BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BAGIAN HUKUM
SETDA

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

BAGIAN HUKUM
SETDA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Laporan Keuangan adalah catatan formal dan sistematis yang berisi informasi posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas pada periode tertentu.
12. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan estimasi serta pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu.

BAGIAN HUKUM SETDA

13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Neraca adalah laporan keuangan utama yang merinci posisi aset, kewajiban, dan ekuitas (modal) suatu entitas pada tanggal tertentu.
15. Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya.
16. Laporan Arus Kas adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi terperinci mengenai seluruh aliran kas masuk (penerimaan) dan kas keluar (pengeluaran) dalam satu periode akuntansi.
17. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai rincian peningkatan atau penurunan nilai kekayaan bersih (ekuitas atau modal) suatu entitas selama satu periode akuntansi tertentu.
18. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian pelengkap yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

BAB II
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

BAGIAN HUKUM
SETDA

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.642.957.087.265,14	
b. Belanja	Rp3.394.746.436.963,63	
surplus/(defisit)		Rp248.210.650.301,51
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp637.908.336.793,85	
Pengeluaran	Rp0,00	
Pembiayaan Netto		Rp637.908.336.793,85

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp287.200.424.827,14 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.355.750.662.436,00
2. realisasi	Rp3.642.957.087.265,14
Selisih lebih / (kurang)	Rp287.200.424.827,14

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp598.918.662.474,22 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.993.665.099.438,85
2. realisasi	Rp3.394.746.436.963,63
selisih lebih/(kurang)	Rp598.918.662.474,22

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp905.928,36 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran setelah perubahan	(Rp637.908.437.000,85)
2. realisasi	Rp248.210.650.301,51
selisih lebih/(kurang)	Rp905.928.36

d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp100.207 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp637.908.437.000,85
2. realisasi	Rp637.908.336.793.85
selisih lebih/(kurang	Rp100.207

BAGIAN HUKUM
SETDA

e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
2. realisasi	Rp0,00
selisih lebih/(kurang)	Rp0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp100.207 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp637.908.437.000.85
2. realisasi	Rp637.908.336.793,85
selisih lebih/(kurang)	Rp100.207

Bagian Ketiga
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp637.908.437.000,85
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp637.908.336.793,85
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp886.118.987.095,36
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp886.119.087.302,36

Bagian Keempat
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp6.878.379.259.266,00
b. jumlah kewajiban	Rp24.097.564.837,86
c. jumlah ekuitas	Rp6.854.281.694.428,14

BAGIAN HUKUM
SETDA

Bagian Kelima
Laporan Operasional

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp2.681.078.138.671,11
b.	beban	Rp2.681.078.138.671,11
c.	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp6.400.415.248,00)
d.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp48.819.577.45,.29
e.	pos luar biasa	Rp0,00
f.	surplus/defisit – LO	Rp48.819.577.452,29

Bagian Keenam
Laporan Arus Kas

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 januari 2025	Rp1.809.733.510.545,86
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp1.214.049.212.923,09
c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp1.802.174.676.702,04)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp0,00
f.	arus kas akhir per 31 Desember 2025	Rp637.908.437.000,85

Bagian Ketujuh
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp6.555.152.017.838,08
b.	surplus/defisit – lo	Rp48.819.577.452,29
c.	dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp250.310.099.137,77
d.	ekuitas akhir	Rp6.854.281.694.428,14

BAGIAN HUKUM
SETDA

Bagian Kedelapan
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Uraian mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Anggaran, yang memuat:
      1. ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
      2. rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
      3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
      4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan.
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Laporan Operasional;
   d. Laporan Perubahan Ekuitas;
   e. Neraca;
   f. Laporan Arus Kas;
   g. Catatan atas Laporan Keuangan;
   h. daftar rekapitulasi piutang Daerah;
   i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
   j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
   k. daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
   l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
   m. daftar rekapitulasi aset tetap;
   n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
   o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
   p. daftar dana cadangan Daerah;
   q. daftar kewajiban jangka pendek;
   r. daftar kewajiban jangka panjang;
   s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
   t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, yang memuat:
      1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
      2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

BAGIAN HUKUM
SETDA

(2) Uraian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TAKRIMYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG (4-58/2026) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89	17.931.079.059,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96	6.491.994.812,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00	18.345.765.305,00
6	Lain - lain PAD yang sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14	133.132.894.990,41
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**	**175.901.734.166,91**
8		-			-
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	-			-
10	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	-			-
11	Dana Bagi Hasil	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75	3.394.844.581.540,00
12	Dana Alokasi Umum	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10	387.094.307.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60	36.005.560.168,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43	81.484.551.213,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**2.640.864.182.000,00**	**2.862.288.231.840,00**	**108,38**	**3.899.428.999.921,00**
16		-			-
17	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	-			-
18	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
19	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
20	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
21	Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89	114.314.789.590,00
22	Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12	20.597.049.000,00
23	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**132.798.578.000,00**	**120.541.620.020,00**	**90,77**	**134.911.838.590,00**
24		-			-
25	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	-			-
26	Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
27	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
28	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**	**107.530.009.314,00**
29	**Total Pendapatan Transfer**	**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**107,41**	**4.141.870.847.825,00**
30		-			-
31	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-			-
32	Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-	421.917.285,00
33	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
34	Pendapatan Lainnya	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07	7.935.418.762,00
35	**Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**	**8.357.336.047,00**
36	**JUMLAH PENDAPATAN**	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**
37		-			-
38	**BELANJA**	-			-
39	**BELANJA OPERASI**	-			-
40	Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71	528.346.491.670,00
41	Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58	1.292.777.489.260,70
42	Belanja Bunga	-	-	-	-
43	Belanja Subsidi	-	-	-	-
44	Belanja Hibah	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44	198.460.439.999,65
45	Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78	9.013.922.500,00
46	**Jumlah Belanja Operasi**	**2.429.729.067.940,87**	**2.045.244.791.336,05**	**84,18**	**2.028.598.343.430,35**
47		-			-
48	**BELANJA MODAL**	-			-
49	Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39	8.119.274.250,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86	370.854.449.606,00
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78	274.000.297.829,17
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17	396.492.146.916,87
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,72	778.523.500,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59	1.929.984.600,00
55	**Jumlah Belanja Modal**	**1.154.447.391.284,13**	**966.740.815.511,58**	**83,74**	**1.052.174.676.702,04**

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
56		-			-
57	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**			**-**
58	Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
59	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**9.478.109.524,85**	**3.388.752.199,00**	**35,75**	**1.357.500.000,00**
60		-			-
61	**BELANJA TRANSFER**	**-**			**-**
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
65	**Jumlah Belanja Transfer**	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**94,84**	**496.863.574.525,00**
66	**JUMLAH BELANJA**	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**
67		-			-
68	**SURPLUS/DEFISIT**	**(637.908.437.000,85)**	**248.210.650.301,51**	**(38,91)**	**747.135.823.381,52**
69		-			-
70	**PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
72	Penggunaan SILPA	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.771.613.619,33
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
80	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	1.000.000,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
82	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**640.772.613.619,33**
83		-			-
84	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
85	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
86	Penyertaan Modal Pemeritah Daerah	-	-	-	750.000.000.000,00
87	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
92	Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
94	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000.000,00**
95	**PEMBIAYAAN NETTO**	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**(109.227.386.380,67)**
96		**-**			**-**
97	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (76 + 110)**	**-**	**886.118.987.095,36**		**637.908.437.000,85**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.355.756.662.438,00	3.642.957.087.265,14	287.200.424.827,14	108,56
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	58.330.281.843,00	149.800.609.903,77	91.470.328.060,77	256,81
4.1.01	**PENDIDIKAN**	51.700.000,00	80.085.645.530,00	80.033.945.530,00	154.90
					4,54
4.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51.700.000,00	80.085.645.530,00	80.033.945.530,00	154.90
					4,54
4.1.02	**KESEHATAN**	58.178.581.843,00	69.478.752.873,77	11.300.171.030,77	119,42
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	58.178.581.843,00	69.478.752.873,77	11.300.171.030,77	119,42
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	100.000.000,00	186.211.500,00	86.211.500,00	186,21
4.1.03.1-03.1-04.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	100.000.000,00	186.211.500,00	86.211.500,00	186,21
4.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.1.05.1-05.0-00.0-00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	963.825.000,00	1.569.666.243,00	605.841.243,00	162,86
4.2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0
4.2.08.2-08.2-14.2-13.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0
4.2.09	**PANGAN**	220.000.000,00	164.798.000,00	(55.202.000,00)	74,91
4.2.09.2-09.3-27.3-25.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	220.000.000,00	164.798.000,00	(55.202.000,00)	74,91
4.2.10	**PERTANAHAN**	150.000.000,00	160.884.000,00	10.884.000,00	107,26
4.2.10.2-10.2-11.0-00.01	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	160.884.000,00	10.884.000,00	107,26
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	75.000.000,00	116.197.000,00	41.197.000,00	154,93
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	116.197.000,00	41.197.000,00	154,93
4.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	18.825.000,00	0,00	(18.825.000,00)	0
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	18.825.000,00	0,00	(18.825.000,00)	0
4.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	0,00	479.938.804,00	479.938.804,00	0
4.2.17.2-17.3-32.2-07.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA	0,00	479.938.804,00	479.938.804,00	0
4.2.18	**PENANAMAN MODAL**	500.000.000,00	547.848.439,00	47.848.439,00	109,57
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	500.000.000,00	547.848.439,00	47.848.439,00	109,57
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	148.860.000,00	353.555.000,00	204.695.000,00	237,51
4.3.31	**PERINDUSTRIAN**	148.860.000,00	353.555.000,00	204.695.000,00	237,51
4.3.31.3-31.3-30.0-00.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	148.860.000,00	353.555.000,00	204.695.000,00	237,51

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	188.528.000,00	278.644.000,00	90.116.000,00	147,80
4.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	188.528.000,00	278.644.000,00	90.116.000,00	147,80
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	188.528.000,00	278.644.000,00	90.116.000,00	147,80
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	3.295.720.007.929,00	3.490.572.207.118,37	194.852.199.189,37	105,91
4.5.02	**KEUANGAN**	3.295.720.007.929,00	3.490.572.207.118,37	194.852.199.189,37	105,91
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.295.720.007.929,00	3.490.572.207.118,37	194.852.199.189,37	105,91
4.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	405.159.666,00	382.405.000,00	(22.754.666,00)	94,38
4.7.01	**KECAMATAN**	405.159.666,00	382.405.000,00	(22.754.666,00)	94,38
4.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN LAMPIHONG	54.528.000,00	55.849.000,00	1.321.000,00	102,42
4.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN BATUMANDI	110.680.000,00	57.362.000,00	(53.318.000,00)	51,83
4.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN AWAYAN	19.750.000,00	46.294.000,00	26.544.000,00	234,40
4.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN HALONG	144.250.000,00	131.500.000,00	(12.750.000,00)	91,16
4.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN JUAI	20.951.666,00	29.412.000,00	8.460.334,00	140,38
4.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN PARINGIN	55.000.000,00	61.988.000,00	6.988.000,00	112,71
5	**BELANJA DAERAH**	3.993.665.099.438,85	3.394.746.436.963,63	(598.918.662.475,22)	85,00
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	2.189.416.756.087,00	1.814.045.091.040,83	(375.371.665.046,17)	82,86
5.1.01	**PENDIDIKAN**	594.738.157.877,00	467.763.116.121,00	(126.975.041.756,00)	78,65
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	594.738.157.877,00	467.763.116.121,00	(126.975.041.756,00)	78,65
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	474.455.937.486,00	369.020.966.335,00	(105.434.971.151,00)	77,78
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	295.907.391.956,00	241.391.740.052,00	(54.515.651.904,00)	81,58
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.089.063.130,00	120.239.150.414,00	(50.849.912.716,00)	70,28
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	7.459.482.400,00	7.390.075.869,00	(69.406.531,00)	99,07
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	120.282.220.391,00	98.742.149.786,00	(21.540.070.605,00)	82,09
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	14.907.850.026,00	2.049.320.729,00	(12.858.529.297,00)	13,75
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.815.985.885,00	33.119.284.144,00	(1.696.701.741,00)	95,13
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.555.202.444,00	62.204.323.677,00	(4.350.878.767,00)	93,46
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	10.404.000,00	10.404.000,00	0
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.953.182.036,00	1.308.917.186,00	(2.644.264.850,00)	33,11
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80
5.1.02	**KESEHATAN**	373.594.375.254,00	306.292.600.731,42	(67.301.774.522,58)	81,99
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**DINAS KESEHATAN**	373.594.375.254,00	306.292.600.731,42	(67.301.774.522,58)	81,99
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	305.024.532.353,00	257.170.035.476,41	(47.854.496.876,59)	84,31
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	135.927.727.451,00	103.544.430.818,00	(32.383.296.633,00)	76,18
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.847.504.902,00	153.376.304.658,41	(15.471.200.243,59)	90,84
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	249.300.000,00	249.300.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	68.569.842.901,00	49.122.565.255,01	(19.447.277.645,99)	71,64
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	2.912.000.000,00	1.045.802.324,00	(1.866.197.676,00)	35,91
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.256.441.416,00	18.058.881.956,00	(12.197.559.460,00)	59,69
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.578.401.485,00	22.313.705.179,01	(5.264.696.305,99)	80,91
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.823.000.000,00	7.704.175.796,00	(118.824.204,00)	98,48

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.130.522.761.838,00	963.596.492.412,00	(166.926.269.426,00)	85,23
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	1.130.522.761.838,00	963.596.492.412,00	(166.926.269.426,00)	85,23
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	379.717.242.041,87	345.290.651.256,00	(34.426.590.785,87)	90,93
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	12.893.255.286,87	12.517.419.486,00	(375.835.800,87)	97,09
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.823.986.755,00	332.773.231.770,00	(34.050.754.985,00)	90,72
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	750.805.519.796,13	618.305.841.156,00	(132.499.678.640,13)	82,35
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	120.400.000.000,00	57.398.505.221,00	(63.001.494.779,00)	47,67
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.011.502.100,00	1.553.352.853,00	(1.458.149.247,00)	51,58
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.129.480.592,50	189.746.882.154,00	(13.382.598.438,50)	93,41
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	424.264.537.103,63	369.607.100.928,00	(54.657.436.175,63)	87,12
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	60.990.689.018,00	51.606.838.860,41	(9.383.850.157,59)	84,61
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	18.406.742.051,00	16.865.048.398,41	(1.541.693.652,59)	91,62
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	16.045.039.431,00	14.687.173.901,00	(1.357.865.530,00)	91,54
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	6.667.742.405,00	6.273.045.333,00	(394.697.072,00)	94,08
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.377.297.026,00	8.414.128.568,00	(963.168.458,00)	89,73
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.361.702.620,00	2.177.874.497,41	(183.828.122,59)	92,22
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.739.123.000,00	1.694.564.499,00	(44.558.501,00)	97,44
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	622.579.620,00	483.309.998,41	(139.269.621,59)	77,63
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	26.240.018.602,00	20.192.409.993,00	(6.047.608.609,00)	76,95
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	24.760.158.602,00	18.729.890.194,00	(6.030.268.408,00)	75,65
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	13.432.585.240,00	8.469.271.835,00	(4.963.313.405,00)	63,05
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.327.573.362,00	10.260.618.359,00	(1.066.955.003,00)	90,58
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	1.479.860.000,00	1.462.519.799,00	(17.340.201,00)	98,83
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.395.063.000,00	1.379.125.499,00	(15.937.501,00)	98,86
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.797.000,00	34.021.500,00	(775.500,00)	97,77
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.372.800,00	(627.200,00)	98,75
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	16.343.928.365,00	14.549.380.469,00	(1.794.547.896,00)	89,02
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	15.812.614.440,00	14.028.718.227,00	(1.783.896.213,00)	88,72
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.427.074.577,00	4.486.125.419,00	(940.949.158,00)	82,66
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.653.664.863,00	7.835.036.292,00	(818.628.571,00)	90,54
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.731.875.000,00	1.707.556.516,00	(24.318.484,00)	98,60
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.2	BELANJA MODAL	531.313.925,00	520.662.242,00	(10.651.683,00)	98,00
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.598.800,00	460.777.500,00	(9.821.300,00)	97,91
5.1.05.1-05.8-01.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.715.125,00	59.884.742,00	(830.383,00)	98,63
5.1.06	**SOSIAL**	29.570.772.100,00	24.786.042.916,00	(4.784.729.184,00)	83,82
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	**DINAS SOSIAL**	29.570.772.100,00	24.786.042.916,00	(4.784.729.184,00)	83,82
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.668.174.300,00	23.992.628.716,00	(4.675.545.584,00)	83,69
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.950.017.600,00	6.364.251.993,00	(2.585.765.607,00)	71,11
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.769.751.700,00	8.696.371.723,00	(1.073.379.977,00)	89,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	(1.016.400.000,00)	89,78
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	902.597.800,00	793.414.200,00	(109.183.600,00)	87,90
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	867.800.800,00	793.414.200,00	(74.386.600,00)	91,43
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.797.000,00	0,00	(34.797.000,00)	0
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	754.988.888.410,00	690.364.153.551,96	(64.624.734.858,04)	91,44
5.2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	125.134.672.783,00	121.992.478.785,00	(3.142.193.998,00)	97,49
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	125.134.672.783,00	121.992.478.785,00	(3.142.193.998,00)	97,49
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.1	BELANJA OPERASI	48.089.149.183,00	45.331.737.796,00	(2.757.411.387,00)	94,27
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.1.01	Belanja Pegawai	9.720.254.543,00	9.058.979.622,00	(661.274.921,00)	93,20
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.018.894.640,00	35.422.758.174,00	(1.596.136.466,00)	95,69
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.1.05	Belanja Hibah	1.350.000.000,00	850.000.000,00	(500.000.000,00)	62,96
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.2	BELANJA MODAL	77.045.523.600,00	76.660.740.989,00	(384.782.611,00)	99,50
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.795.700,00	1.145.346.250,00	(262.449.450,00)	81,36
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	684.849.700,00	672.186.569,00	(12.663.131,00)	98,15
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.938.547.600,00	74.828.908.170,00	(109.639.430,00)	99,85
5.2.08.2-08.2-14.2-13.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.330.600,00	14.300.000,00	(30.600,00)	99,79
5.2.09	**PANGAN**	318.244.367.721,00	284.438.265.877,61	(33.806.101.843,39)	89,38
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**	318.244.367.721,00	284.438.265.877,61	(33.806.101.843,39)	89,38
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.1	BELANJA OPERASI	304.918.941.011,00	277.610.661.946,61	(27.308.279.064,39)	91,04
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.1.01	Belanja Pegawai	26.602.441.066,00	23.112.013.751,00	(3.490.427.315,00)	86,88
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.530.329.320,00	209.827.788.167,61	(19.702.541.152,39)	91,42
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.1.05	Belanja Hibah	48.786.170.625,00	44.670.860.028,00	(4.115.310.597,00)	91,56
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.2	BELANJA MODAL	13.325.426.710,00	6.827.603.931,00	(6.497.822.779,00)	51,24
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.2.01	Belanja Modal Tanah	4.500.000.000,00	0,00	(4.500.000.000,00)	0
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.414.028.900,00	2.323.475.361,00	(90.553.539,00)	96,25
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.566.235.810,00	3.861.721.200,00	(1.704.514.610,00)	69,38
5.2.09.2-09.3-27.3-25.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	845.162.000,00	642.407.370,00	(202.754.630,00)	76,01
5.2.10	**PERTANAHAN**	46.927.180.030,00	40.159.358.275,00	(6.767.821.755,00)	85,58
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01	**DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	46.927.180.030,00	40.159.358.275,00	(6.767.821.755,00)	85,58
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	34.440.247.310,00	29.625.182.007,00	(4.815.065.303,00)	86,02
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.339.365.920,00	9.604.229.574,00	(735.136.346,00)	92,89
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.881.390,00	20.020.952.433,00	(4.079.928.957,00)	83,07
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.2	BELANJA MODAL	12.486.932.720,00	10.534.176.268,00	(1.952.756.452,00)	84,36
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.191.730.820,00	3.820.066.060,00	(371.664.760,00)	91,13
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.645.734.300,00	6.228.478.605,00	(1.417.255.695,00)	81,46
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	449.467.600,00	436.625.103,00	(12.842.497,00)	97,14
5.2.10.2-10.2-11.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	49.006.500,00	(150.993.500,00)	24,50
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	12.130.490.744,00	10.310.477.904,00	(1.820.012.840,00)	85,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	12.130.490.744,00	10.310.477.904,00	(1.820.012.840,00)	85,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.222.897.284,00	9.492.630.168,00	(1.730.267.116,00)	84,58
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.123.164.224,00	5.888.219.141,00	(1.234.945.083,00)	82,66
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.099.733.060,00	3.604.411.027,00	(495.322.033,00)	87,92
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	907.593.460,00	817.847.736,00	(89.745.724,00)	90,11
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.888.900,00	377.289.502,00	(30.599.398,00)	92,50
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.704.560,00	440.558.234,00	(59.146.326,00)	88,16
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	61.223.979.181,00	59.088.993.286,00	(2.134.985.895,00)	96,51
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	61.223.979.181,00	59.088.993.286,00	(2.134.985.895,00)	96,51
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	29.382.788.961,00	27.565.038.594,00	(1.817.750.367,00)	93,81
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.444.972.137,00	7.052.950.950,00	(392.021.187,00)	94,73
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.445.640.824,00	17.019.911.644,00	(1.425.729.180,00)	92,27
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	3.492.176.000,00	3.492.176.000,00	0,00	100,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	31.841.190.220,00	31.523.954.692,00	(317.235.528,00)	99,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.268.160.720,00	31.014.167.373,00	(253.993.347,00)	99,19
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	523.029.500,00	509.787.319,00	(13.242.181,00)	97,47
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	29.153.841.197,00	27.180.400.637,00	(1.973.440.560,00)	93,23
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**	29.153.841.197,00	27.180.400.637,00	(1.973.440.560,00)	93,23
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	25.839.842.497,00	23.967.104.182,00	(1.872.738.315,00)	92,75
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	6.775.347.661,00	5.913.152.691,00	(862.194.970,00)	87,27
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.064.494.836,00	18.053.951.491,00	(1.010.543.345,00)	94,70
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	3.313.998.700,00	3.213.296.455,00	(100.702.245,00)	96,96
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.256.500,00	665.377.697,00	(48.878.803,00)	93,16
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.599.742.200,00	2.547.918.758,00	(51.823.442,00)	98,01
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	85.295.033.398,00	79.622.262.801,35	(5.672.770.596,65)	93,35
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA**	85.295.033.398,00	79.622.262.801,35	(5.672.770.596,65)	93,35
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.1	BELANJA OPERASI	82.796.509.658,00	77.268.675.483,37	(5.527.834.174,63)	93,32
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.1.01	Belanja Pegawai	10.337.591.430,00	8.754.530.309,00	(1.583.061.121,00)	84,69
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.458.918.228,00	68.514.145.174,37	(3.944.773.053,63)	94,56
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.2	BELANJA MODAL	2.498.523.740,00	2.353.587.317,98	(144.936.422,02)	94,20
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.588.775.140,00	1.447.035.520,00	(141.739.620,00)	91,08
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	883.288.600,00	880.328.047,98	(2.960.552,02)	99,66
5.2.17.2-17.3-32.2-07.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	26.460.000,00	26.223.750,00	(236.250,00)	99,11
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	13.369.605.871,00	11.982.214.125,00	(1.387.391.746,00)	89,62
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	13.369.605.871,00	11.982.214.125,00	(1.387.391.746,00)	89,62
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.308.312.171,00	9.227.495.827,00	(1.080.816.344,00)	89,52
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.154.168.407,00	4.701.978.446,00	(452.189.961,00)	91,23
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.154.143.764,00	4.525.517.381,00	(628.626.383,00)	87,80
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.061.293.700,00	2.754.718.298,00	(306.575.402,00)	89,99
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.986.293.700,00	2.680.118.298,00	(306.175.402,00)	89,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47
5.2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	42.899.181.296,00	36.642.974.521,00	(6.256.206.775,00)	85,42
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	42.899.181.296,00	36.642.974.521,00	(6.256.206.775,00)	85,42
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	39.295.868.978,00	33.385.233.833,00	(5.910.635.145,00)	84,96
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.451.014.544,00	5.932.807.609,00	(1.518.206.935,00)	79,62
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.244.854.434,00	19.864.428.764,00	(4.380.425.670,00)	81,93
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	7.600.000.000,00	7.587.997.460,00	(12.002.540,00)	99,84
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.603.312.318,00	3.257.740.688,00	(345.571.630,00)	90,41
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.013.934.300,00	1.785.495.498,00	(228.438.802,00)	88,66
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.589.378.018,00	1.472.245.190,00	(117.132.828,00)	92,63
5.2.23	**PERPUSTAKAAN**	20.610.536.189,00	18.946.727.340,00	(1.663.808.849,00)	91,93
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	20.610.536.189,00	18.946.727.340,00	(1.663.808.849,00)	91,93
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.279.868.389,00	15.952.227.184,00	(1.327.641.205,00)	92,32
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.102.890.139,00	6.690.601.602,00	(412.288.537,00)	94,20
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.978.250,00	9.261.625.582,00	(915.352.668,00)	91,01
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.330.667.800,00	2.994.500.156,00	(336.167.644,00)	89,91
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	838.199.900,00	799.757.048,00	(38.442.852,00)	95,41
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.996.600,00	1.676.206.608,00	(285.789.992,00)	85,43
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.471.300,00	141.025.500,00	(9.445.800,00)	93,72
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	380.000.000,00	377.511.000,00	(2.489.000,00)	99,35
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	18.970.658.838,00	16.610.686.785,00	(2.359.972.053,00)	87,56
5.3.31	**PERINDUSTRIAN**	18.970.658.838,00	16.610.686.785,00	(2.359.972.053,00)	87,56
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	18.970.658.838,00	16.610.686.785,00	(2.359.972.053,00)	87,56
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.138.762.138,00	15.812.562.305,00	(2.326.199.833,00)	87,18
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.777.690.396,00	6.122.444.487,00	(1.655.245.909,00)	78,72
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.361.071.742,00	9.690.117.818,00	(670.953.924,00)	93,52
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.2	BELANJA MODAL	831.896.700,00	798.124.480,00	(33.772.220,00)	95,94
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.537.800,00	262.664.750,00	(26.873.050,00)	90,72
5.3.31.3-31.3-30.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	542.358.900,00	535.459.730,00	(6.899.170,00)	98,73
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	397.327.684.447,00	297.970.785.512,58	(99.356.898.934,42)	74,99
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	307.290.693.088,00	223.177.238.731,58	(84.113.454.356,42)	72,63
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	307.290.693.088,00	223.177.238.731,58	(84.113.454.356,42)	72,63
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	288.766.280.958,00	205.878.205.149,91	(82.888.075.808,09)	71,30
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	34.523.464.788,00	24.985.827.371,00	(9.537.637.417,00)	72,37
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.452.216.170,00	131.630.057.523,00	(51.822.158.647,00)	71,75
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	70.790.600.000,00	49.262.320.255,91	(21.528.279.744,09)	69,59
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	18.524.412.130,00	17.299.033.581,67	(1.225.378.548,33)	93,39
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.231.800.130,00	15.060.793.685,00	(1.171.006.445,00)	92,79
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.237.612.000,00	2.184.011.400,00	(53.600.600,00)	97,60
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	54.228.496,67	(771.503,33)	98,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	90.036.991.359,00	74.793.546.781,00	(15.243.444.578,00)	83,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DPRD**	90.036.991.359,00	74.793.546.781,00	(15.243.444.578,00)	83,07
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	79.544.878.284,00	64.895.377.655,00	(14.649.500.629,00)	81,58
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	26.143.938.369,00	23.707.733.682,00	(2.436.204.687,00)	90,68
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.400.939.915,00	41.187.643.973,00	(12.213.295.942,00)	77,13
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.492.113.075,00	9.898.169.126,00	(593.943.949,00)	94,34
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.161.622.000,00	5.635.372.782,00	(526.249.218,00)	91,46
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.924.491.075,00	3.866.304.344,00	(58.186.731,00)	98,52
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	348.762.000,00	(1.238.000,00)	99,65
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	47.730.000,00	(2.270.000,00)	95,46
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	532.461.028.859,85	482.650.837.139,02	(49.810.191.720,83)	90,65
5.5.01	**PERENCANAAN**	26.609.748.673,00	25.789.676.484,00	(820.072.189,00)	96,92
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**	26.609.748.673,00	25.789.676.484,00	(820.072.189,00)	96,92
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	25.531.519.073,00	24.771.008.879,00	(760.510.194,00)	97,02
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	8.840.247.533,00	8.755.809.468,00	(84.438.065,00)	99,04
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.691.271.540,00	16.015.199.411,00	(676.072.129,00)	95,95
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.078.229.600,00	1.018.667.605,00	(59.561.995,00)	94,48
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.563.400,00	485.999.599,00	(47.563.801,00)	91,09
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	434.666.200,00	433.156.506,00	(1.509.694,00)	99,65
5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	99.511.500,00	(10.488.500,00)	90,47
5.5.02	**KEUANGAN**	480.286.449.193,85	436.723.043.961,02	(43.563.405.232,83)	90,93
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	480.286.449.193,85	436.723.043.961,02	(43.563.405.232,83)	90,93
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	57.258.926.302,00	41.374.437.845,02	(15.884.488.456,98)	72,26
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	24.989.039.707,00	14.808.318.537,00	(10.180.721.170,00)	59,26
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.269.886.595,00	26.566.119.308,02	(5.703.767.286,98)	82,32
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.538.882.678,00	12.587.776.000,00	(951.106.678,00)	92,97
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.118.905.195,00	11.214.099.773,00	(904.805.422,00)	92,53
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.119.977.483,00	1.081.687.824,00	(38.289.659,00)	96,58
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	291.988.403,00	(8.011.597,00)	97,33
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	(6.089.357.325,85)	35,75
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	(6.089.357.325,85)	35,75
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	(20.638.452.772,00)	94,84
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	(32.536.800,00)	99,21
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	375.291.719.420,00	(20.605.915.972,00)	94,80
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	25.564.830.993,00	20.138.116.694,00	(5.426.714.299,00)	78,77
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	25.564.830.993,00	20.138.116.694,00	(5.426.714.299,00)	78,77
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	24.222.787.793,00	18.850.904.601,00	(5.371.883.192,00)	77,82
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.084.957.737,00	7.746.826.362,00	(338.131.375,00)	95,82
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.137.830.056,00	11.104.078.239,00	(5.033.751.817,00)	68,81

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.342.043.200,00	1.287.212.093,00	(54.831.107,00)	95,91
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.169.543.200,00	1.115.551.302,00	(53.991.898,00)	95,38
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.500.000,00	171.660.791,00	(839.209,00)	99,51
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	36.721.000.553,00	32.696.885.770,24	(4.024.114.782,76)	89,04
5.6.01	**INSPEKTORAT**	36.721.000.553,00	32.696.885.770,24	(4.024.114.782,76)	89,04
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**INSPEKTORAT**	36.721.000.553,00	32.696.885.770,24	(4.024.114.782,76)	89,04
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.554.635.753,00	24.897.067.606,73	(3.657.568.146,27)	87,19
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	16.752.675.395,00	15.675.057.004,00	(1.077.618.391,00)	93,57
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.801.960.358,00	9.222.010.602,73	(2.579.949.755,27)	78,14
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	8.166.364.800,00	7.799.818.163,51	(366.546.636,49)	95,51
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.842.524.400,00	7.505.318.986,00	(337.205.414,00)	95,70
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.840.400,00	294.499.177,51	(29.341.222,49)	90,94
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	63.779.082.244,00	60.407.997.164,00	(3.371.085.080,00)	94,71
5.7.01	**KECAMATAN**	63.779.082.244,00	60.407.997.164,00	(3.371.085.080,00)	94,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**KECAMATAN LAMPIHONG**	7.567.578.814,00	7.058.682.575,00	(508.896.239,00)	93,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.531.450.814,00	7.022.894.775,00	(508.556.039,00)	93,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.846.262.634,00	4.403.484.295,00	(442.778.339,00)	90,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.188.180,00	2.619.410.480,00	(65.777.700,00)	97,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	36.128.000,00	35.787.800,00	(340.200,00)	99,06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.128.000,00	35.787.800,00	(340.200,00)	99,06
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**KECAMATAN BATUMANDI**	6.827.136.854,00	6.514.967.811,00	(312.169.043,00)	95,43
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	6.722.263.254,00	6.411.806.811,00	(310.456.443,00)	95,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.287.173.272,00	4.006.474.883,00	(280.698.389,00)	93,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.435.089.982,00	2.405.331.928,00	(29.758.054,00)	98,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	104.873.600,00	103.161.000,00	(1.712.600,00)	98,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.873.600,00	103.161.000,00	(1.712.600,00)	98,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**KECAMATAN AWAYAN**	5.726.546.072,00	5.403.322.192,00	(323.223.880,00)	94,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	5.668.174.172,00	5.345.206.192,00	(322.967.980,00)	94,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	3.529.116.772,00	3.234.392.613,00	(294.724.159,00)	91,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.057.400,00	2.110.813.579,00	(28.243.821,00)	98,68
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**KECAMATAN HALONG**	6.491.860.314,00	6.099.471.482,00	(392.388.832,00)	93,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	6.425.352.714,00	6.034.028.482,00	(391.324.232,00)	93,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	4.239.274.198,00	3.991.691.572,00	(247.582.626,00)	94,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.186.078.516,00	2.042.336.910,00	(143.741.606,00)	93,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	66.507.600,00	65.443.000,00	(1.064.600,00)	98,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.507.600,00	65.443.000,00	(1.064.600,00)	98,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	**KECAMATAN JUAI**	5.825.933.332,00	5.649.732.874,00	(176.200.458,00)	96,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	5.825.933.332,00	5.649.732.874,00	(176.200.458,00)	96,98

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	3.564.899.722,00	3.468.956.203,00	(95.943.519,00)	97,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.033.610,00	2.180.776.671,00	(80.256.939,00)	96,45
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	**KECAMATAN PARINGIN**	14.565.568.524,00	13.888.997.866,00	(676.570.658,00)	95,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	12.809.911.324,00	12.205.386.456,00	(604.524.868,00)	95,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	6.727.110.674,00	6.254.442.181,00	(472.668.493,00)	92,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.082.800.650,00	5.950.944.275,00	(131.856.375,00)	97,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	1.755.657.200,00	1.683.611.410,00	(72.045.790,00)	95,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.622.508.300,00	1.554.296.410,00	(68.211.890,00)	95,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	37.562.400,00	(2.437.600,00)	93,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93.148.900,00	91.752.600,00	(1.396.300,00)	98,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	**KECAMATAN TEBING TINGGI**	6.167.568.439,00	5.840.843.927,00	(326.724.512,00)	94,70
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	5.406.715.439,00	5.100.564.487,00	(306.150.952,00)	94,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	3.119.613.279,00	2.854.471.477,00	(265.141.802,00)	91,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.287.102.160,00	2.246.093.010,00	(41.009.150,00)	98,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	760.853.000,00	740.279.440,00	(20.573.560,00)	97,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.687.700,00	733.279.440,00	(20.408.260,00)	97,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.300,00	7.000.000,00	(165.300,00)	97,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	**KECAMATAN PARINGIN SELATAN**	10.606.889.895,00	9.951.978.437,00	(654.911.458,00)	93,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	9.263.352.495,00	8.649.556.091,00	(613.796.404,00)	93,37
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	5.491.872.135,00	5.055.034.439,00	(436.837.696,00)	92,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.771.480.360,00	3.594.521.652,00	(176.958.708,00)	95,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	1.343.537.400,00	1.302.422.346,00	(41.115.054,00)	96,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.527.400,00	1.158.416.346,00	(41.111.054,00)	96,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.010.000,00	144.006.000,00	(4.000,00)	100,00
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	(100.207,00)	100,00
6.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0
6.1.01	**PENDIDIKAN**	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0
6.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00
6.5.02	**KEUANGAN**	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.355.756.662.438,00	3.642.957.087.265,14	108,56	4.326.129.918.038,91
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	146.342.376.518,00	202.419.435.557,66	138,32	175.901.734.166,91
4.1.01	**Pajak Daerah**	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89	17.931.079.059,50
4.1.02	**Retribusi Daerah**	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96	6.470.674.812,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00	18.345.765.305,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14	133.154.214.990,41
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.851.458.117.640,00	3.062.780.561.770,00	107,41	4.141.870.847.825,00
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.773.662.760.000,00	2.982.829.851.860,00	107,54	4.034.340.838.511,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0	3.899.428.999.921,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89	114.314.789.590,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12	20.597.049.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.736.189.000,00	95.236.660.580,00	98,45	0,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	357.956.168.280,00	377.757.089.937,48	105,53	8.357.336.047,00
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	0,00	1.655.200.090,00	0	421.917.285,00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07	7.935.418.762,00
5	**BELANJA DAERAH**	3.993.665.099.438,85	3.394.746.436.963,63	85,00	3.578.994.094.657,39
5.1	**BELANJA OPERASI**	2.429.729.067.940,87	2.045.244.791.336,05	84,18	2.028.598.343.430,35
5.1.01	**Belanja Pegawai**	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71	528.346.491.670,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58	1.292.777.489.260,70
5.1.05	**Belanja Hibah**	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44	198.460.439.999,65
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78	9.013.922.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**	1.154.447.391.284,13	966.740.815.511,58	83,74	1.052.174.676.702,04
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39	8.119.274.250,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86	370.854.449.606,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78	274.000.297.829,17
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17	396.492.146.916,87
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,72	778.523.500,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59	1.929.984.600,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	99,21	1.730.148.884,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	395.897.635.392,00	375.291.719.420,00	94,80	495.133.425.641,00
	SURPLUS / DEFISIT	(637.908.437.000,85)	248.210.650.301,51	0	747.135.823.381,52
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.772.613.619,33
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.771.613.619,33
6.1.05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	0,00	0,00	0	1.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	0,00	0,00	0	750.000.000.000,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	0,00	0,00	0	750.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	(109.227.386.380,67)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(0,00)**	**886.118.987.095,36**	**0**	**637.908.437.000,85**

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.2-22.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Unit Organisasi : 1-01.2-22.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	51.700.000,00	80.085.645.530,00	80.033.945.530,00	154.904,54		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	51.700.000,00	91.547.000,00	39.847.000,00	177,07		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	37.200.000,00	34.325.000,00	(2.875.000,00)	92,27		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.500.000,00	57.222.000,00	42.722.000,00	394,63	NULL	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	79.557.758.530,00	79.557.758.530,00	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	79.557.758.530,00	79.557.758.530,00	0		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	436.340.000,00	436.340.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	436.340.000,00	436.340.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	594.738.157.877,00	467.763.116.121,00	(126.975.041.756,00)	78,65		
00	**Non Program**	0,00	5.711.554.469,00	5.711.554.469,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	5.711.554.469,00	5.711.554.469,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	5.711.554.469,00	5.711.554.469,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	5.440.036.469,00	5.440.036.469,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.369.000,00	31.369.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.05	Belanja Hibah	0,00	5.408.667.469,00	5.408.667.469,00	0		
00.0.00.00.5.2	BELANJA MODAL	0,00	271.518.000,00	271.518.000,00	0		
00.0.00.00.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.341.000,00	10.341.000,00	0		
00.0.00.00.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	258.523.000,00	258.523.000,00	0		
00.0.00.00.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.654.000,00	2.654.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	314.216.005.961,00	255.172.788.615,00	(59.043.217.346,00)	81,21		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	582.566.700,00	509.417.334,00	(73.149.366,00)	87,44		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.959.500,00	209.712.592,00	(18.246.908,00)	92,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	227.959.500,00	209.712.592,00	(18.246.908,00)	92,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.959.500,00	209.712.592,00	(18.246.908,00)	92,00		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.507.200,00	261.606.942,00	(36.900.258,00)	87,64		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	298.507.200,00	261.606.942,00	(36.900.258,00)	87,64		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.507.200,00	261.606.942,00	(36.900.258,00)	87,64		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.050.000,00	18.348.000,00	(9.702.000,00)	65,41		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.050.000,00	18.348.000,00	(9.702.000,00)	65,41		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	18.348.000,00	(9.702.000,00)	65,41		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.050.000,00	19.749.800,00	(8.300.200,00)	70,41		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	28.050.000,00	19.749.800,00	(8.300.200,00)	70,41		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	19.749.800,00	(8.300.200,00)	70,41		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	299.085.468.881,00	242.702.417.332,00	(56.383.051.549,00)	81,15		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	295.788.317.921,00	241.391.740.052,00	(54.396.577.869,00)	81,61		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	295.788.317.921,00	241.391.740.052,00	(54.396.577.869,00)	81,61		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	295.755.677.921,00	241.391.740.052,00	(54.363.937.869,00)	81,62		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.640.000,00	0,00	(32.640.000,00)	0		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.297.150.960,00	1.310.677.280,00	(1.986.473.680,00)	39,75		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.297.150.960,00	1.310.677.280,00	(1.986.473.680,00)	39,75		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.297.150.960,00	1.310.677.280,00	(1.986.473.680,00)	39,75		
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.213.879.035,00	893.658.350,00	(320.220.685,00)	73,62		
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	202.145.000,00	137.174.800,00	(64.970.200,00)	67,86		
01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	202.145.000,00	137.174.800,00	(64.970.200,00)	67,86		
01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.145.000,00	137.174.800,00	(64.970.200,00)	67,86		
01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.011.734.035,00	756.483.550,00	(255.250.485,00)	74,77		
01.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	785.984.035,00	532.874.050,00	(253.109.985,00)	67,80		
01.2.03.04.5.1.01	Belanja Pegawai	151.714.035,00	0,00	(151.714.035,00)	0		
01.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.270.000,00	532.874.050,00	(101.395.950,00)	84,01		
01.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	225.750.000,00	223.609.500,00	(2.140.500,00)	99,05		
01.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.750.000,00	223.609.500,00	(2.140.500,00)	99,05		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.080.433.100,00	2.272.075.352,00	(808.357.748,00)	73,76		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.603.100,00	91.706.250,00	(11.896.850,00)	88,52		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.603.100,00	91.706.250,00	(11.896.850,00)	88,52		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.603.100,00	91.706.250,00	(11.896.850,00)	88,52		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.976.830.000,00	2.180.369.102,00	(796.460.898,00)	73,24		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.976.830.000,00	2.180.369.102,00	(796.460.898,00)	73,24		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.830.000,00	2.180.369.102,00	(796.460.898,00)	73,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.348.078.800,00	3.601.579.150,00	(746.499.650,00)	82,83		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.875.200,00	106.168.000,00	(707.200,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	106.875.200,00	106.168.000,00	(707.200,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.875.200,00	106.168.000,00	(707.200,00)	99,34		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.121.406.200,00	1.000.771.309,00	(120.634.891,00)	89,24		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	29.902.500,00	23.729.000,00	(6.173.500,00)	79,35		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.902.500,00	23.729.000,00	(6.173.500,00)	79,35		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.091.503.700,00	977.042.309,00	(114.461.391,00)	89,51		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.091.503.700,00	977.042.309,00	(114.461.391,00)	89,51		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.431.100,00	11.845.000,00	(586.100,00)	95,29		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.431.100,00	11.845.000,00	(586.100,00)	95,29		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.431.100,00	11.845.000,00	(586.100,00)	95,29		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	419.766.300,00	326.364.000,00	(93.402.300,00)	77,75		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	419.766.300,00	326.364.000,00	(93.402.300,00)	77,75		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.766.300,00	326.364.000,00	(93.402.300,00)	77,75		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.976.000,00	54.760.000,00	(5.216.000,00)	91,30		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	59.976.000,00	54.760.000,00	(5.216.000,00)	91,30		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.976.000,00	54.760.000,00	(5.216.000,00)	91,30		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.627.624.000,00	2.101.670.841,00	(525.953.159,00)	79,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.627.624.000,00	2.101.670.841,00	(525.953.159,00)	79,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.627.624.000,00	2.101.670.841,00	(525.953.159,00)	79,98		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	486.306.000,00	415.995.000,00	(70.311.000,00)	85,54		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.306.000,00	415.995.000,00	(70.311.000,00)	85,54		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	486.306.000,00	415.995.000,00	(70.311.000,00)	85,54		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.306.000,00	415.995.000,00	(70.311.000,00)	85,54		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.016.000,00	772.047.615,00	(107.968.385,00)	87,73		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.941.000,00	129.127.000,00	(814.000,00)	99,37		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	129.941.000,00	129.127.000,00	(814.000,00)	99,37		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.941.000,00	129.127.000,00	(814.000,00)	99,37		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.075.000,00	642.920.615,00	(107.154.385,00)	85,71		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	750.075.000,00	642.920.615,00	(107.154.385,00)	85,71		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.075.000,00	642.920.615,00	(107.154.385,00)	85,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.539.257.445,00	4.005.598.482,00	(533.658.963,00)	88,24		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	571.042.100,00	493.550.538,00	(77.491.562,00)	86,43		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	571.042.100,00	493.550.538,00	(77.491.562,00)	86,43		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.042.100,00	493.550.538,00	(77.491.562,00)	86,43		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.220.800,00	306.873.999,00	(11.346.801,00)	96,43		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	318.220.800,00	306.873.999,00	(11.346.801,00)	96,43		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.220.800,00	306.873.999,00	(11.346.801,00)	96,43		
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.377.800,00	59.993.600,00	(384.200,00)	99,36		
01.2.09.07.5.1	BELANJA OPERASI	60.377.800,00	59.993.600,00	(384.200,00)	99,36		
01.2.09.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.377.800,00	59.993.600,00	(384.200,00)	99,36		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.589.616.745,00	3.145.180.345,00	(444.436.400,00)	87,62		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	253.579.680,00	233.784.780,00	(19.794.900,00)	92,19		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.579.680,00	233.784.780,00	(19.794.900,00)	92,19		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	3.336.037.065,00	2.911.395.565,00	(424.641.500,00)	87,27		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.336.037.065,00	2.911.395.565,00	(424.641.500,00)	87,27		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	267.062.939.386,00	196.034.714.176,00	(71.028.225.210,00)	73,40		
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.385.643.575,00	91.043.312.483,00	(37.342.331.092,00)	70,91		
02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6.401.050.026,00	2.210.889.729,00	(4.190.160.297,00)	34,54		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	161.569.000,00	(88.431.000,00)	64,63		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	161.569.000,00	(88.431.000,00)	64,63		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	6.151.050.026,00	2.049.320.729,00	(4.101.729.297,00)	33,32		
02.2.01.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.151.050.026,00	2.049.320.729,00	(4.101.729.297,00)	33,32		
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.130.079.285,00	2.022.622.585,00	(107.456.700,00)	94,96		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	4.050.000,00	(10.350.000,00)	28,13		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	4.050.000,00	(10.350.000,00)	28,13		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.115.679.285,00	2.018.572.585,00	(97.106.700,00)	95,41		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.115.679.285,00	2.018.572.585,00	(97.106.700,00)	95,41		
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	104.587.750,00	104.587.750,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	104.587.750,00	104.587.750,00	0,00	100,00		
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.587.750,00	104.587.750,00	0,00	100,00		
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.093.151.250,00	4.678.802.080,00	(414.349.170,00)	91,86		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	209.000.000,00	199.165.350,00	(9.834.650,00)	95,29		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.000.000,00	199.165.350,00	(9.834.650,00)	95,29		
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	4.884.151.250,00	4.479.636.730,00	(404.514.520,00)	91,72		
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.884.151.250,00	4.479.636.730,00	(404.514.520,00)	91,72		
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.996.106.400,00	6.751.254.690,00	(244.851.710,00)	96,50		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	177.250.000,00	72.440.000,00	(104.810.000,00)	40,87		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.250.000,00	72.440.000,00	(104.810.000,00)	40,87		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	6.818.856.400,00	6.678.814.690,00	(140.041.710,00)	97,95		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.818.856.400,00	6.678.814.690,00	(140.041.710,00)	97,95		
02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	166.600.000,00	162.807.600,00	(3.792.400,00)	97,72		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	164.800.000,00	162.807.600,00	(1.992.400,00)	98,79		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.800.000,00	162.807.600,00	(1.992.400,00)	98,79		
02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	149.611.100,00	149.611.100,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	149.611.100,00	149.611.100,00	0,00	100,00		
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.611.100,00	149.611.100,00	0,00	100,00		
02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.690.264.000,00	442.527.995,00	(2.247.736.005,00)	16,45		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	233.900.000,00	219.700.000,00	(14.200.000,00)	93,93		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.900.000,00	219.700.000,00	(14.200.000,00)	93,93		
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	2.456.364.000,00	222.827.995,00	(2.233.536.005,00)	9,07		
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.194.995,00	(805.005,00)	99,60		
02.2.01.16.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.256.364.000,00	23.633.000,00	(2.232.731.000,00)	1,05		
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.530.838.700,00	838.874.180,00	(691.964.520,00)	54,80		
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.530.838.700,00	838.874.180,00	(691.964.520,00)	54,80		
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.838.700,00	838.874.180,00	(691.964.520,00)	54,80		
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	17.954.100.000,00	16.337.040.000,00	(1.617.060.000,00)	90,99		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	17.954.100.000,00	16.337.040.000,00	(1.617.060.000,00)	90,99		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.954.100.000,00	16.337.040.000,00	(1.617.060.000,00)	90,99		
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.036.793.000,00	1.900.679.912,00	(136.113.088,00)	93,32		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	2.036.793.000,00	1.900.679.912,00	(136.113.088,00)	93,32		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.793.000,00	1.900.679.912,00	(136.113.088,00)	93,32		
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.786.652.000,00	11.000.507.746,00	213.855.746,00	101,98		
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	9.382.481.900,00	9.488.517.396,00	106.035.496,00	101,13		
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.645.349.900,00	9.488.517.396,00	843.167.496,00	109,75		
02.2.01.29.5.1.05	Belanja Hibah	737.132.000,00	0,00	(737.132.000,00)	0		
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	1.404.170.100,00	1.511.990.350,00	107.820.250,00	107,68		
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.170.100,00	597.155.700,00	(807.014.400,00)	42,53		
02.2.01.29.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0		
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	913.084.650,00	913.084.650,00	0		
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.722.369.000,00	1.562.983.320,00	(159.385.680,00)	90,75		
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	1.722.369.000,00	1.562.983.320,00	(159.385.680,00)	90,75		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.722.369.000,00	1.562.983.320,00	(159.385.680,00)	90,75		
02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.937.766.400,00	5.503.017.767,00	(6.434.748.633,00)	46,10		
02.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	11.937.766.400,00	5.503.017.767,00	(6.434.748.633,00)	46,10		
02.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.937.766.400,00	5.503.017.767,00	(6.434.748.633,00)	46,10		
02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	447.226.605,00	447.226.605,00	0,00	100,00		
02.2.01.47.5.1	BELANJA OPERASI	253.609.700,00	253.609.700,00	0,00	100,00		
02.2.01.47.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.609.700,00	253.609.700,00	0,00	100,00		
02.2.01.47.5.2	BELANJA MODAL	193.616.905,00	193.616.905,00	0,00	100,00		
02.2.01.47.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.616.905,00	193.616.905,00	0,00	100,00		
02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.246.021.120,00	7.970.887.065,00	(275.134.055,00)	96,66		
02.2.01.48.5.1	BELANJA OPERASI	220.800.000,00	185.320.000,00	(35.480.000,00)	83,93		
02.2.01.48.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.800.000,00	185.320.000,00	(35.480.000,00)	83,93		
02.2.01.48.5.2	BELANJA MODAL	8.025.221.120,00	7.785.567.065,00	(239.654.055,00)	97,01		
02.2.01.48.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.025.221.120,00	7.785.567.065,00	(239.654.055,00)	97,01		
02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	27.356.785.250,00	8.312.814.587,00	(19.043.970.663,00)	30,39		
02.2.01.49.5.1	BELANJA OPERASI	27.356.785.250,00	8.312.814.587,00	(19.043.970.663,00)	30,39		
02.2.01.49.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.356.785.250,00	8.312.814.587,00	(19.043.970.663,00)	30,39		
02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	977.645.625,00	773.945.000,00	(203.700.625,00)	79,16		
02.2.01.50.5.1	BELANJA OPERASI	977.645.625,00	773.945.000,00	(203.700.625,00)	79,16		
02.2.01.50.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.645.625,00	773.945.000,00	(203.700.625,00)	79,16		
02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.586.677.064,00	9.108.299.456,00	(1.478.377.608,00)	86,04		
02.2.01.51.5.1	BELANJA OPERASI	280.430.000,00	263.341.600,00	(17.088.400,00)	93,91		
02.2.01.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.430.000,00	263.341.600,00	(17.088.400,00)	93,91		
02.2.01.51.5.2	BELANJA MODAL	10.306.247.064,00	8.844.957.856,00	(1.461.289.208,00)	85,82		
02.2.01.51.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.306.247.064,00	8.844.957.856,00	(1.461.289.208,00)	85,82		
02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.799.319.000,00	2.623.933.300,00	(175.385.700,00)	93,73		
02.2.01.54.5.1	BELANJA OPERASI	2.799.319.000,00	2.623.933.300,00	(175.385.700,00)	93,73		
02.2.01.54.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.799.319.000,00	2.623.933.300,00	(175.385.700,00)	93,73		
02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.272.000.000,00	8.140.000.016,00	(131.999.984,00)	98,40		
02.2.01.55.5.2	BELANJA MODAL	8.272.000.000,00	8.140.000.016,00	(131.999.984,00)	98,40		
02.2.01.55.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.272.000.000,00	8.140.000.016,00	(131.999.984,00)	98,40		
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.633.047.953,00	33.344.781.151,00	(12.288.266.802,00)	73,07		
02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	7.366.800.000,00	49.229.000,00	(7.317.571.000,00)	0,67		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.229.000,00	(771.000,00)	98,46		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.229.000,00	(771.000,00)	98,46		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	7.316.800.000,00	0,00	(7.316.800.000,00)	0		
02.2.02.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.316.800.000,00	0,00	(7.316.800.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	418.307.851,00	418.307.851,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	418.307.851,00	418.307.851,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	418.307.851,00	418.307.851,00	0,00	100,00		
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	423.755.800,00	423.755.800,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	423.755.800,00	423.755.800,00	0,00	100,00		
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	423.755.800,00	423.755.800,00	0,00	100,00		
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	16.463.000,00	16.463.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	16.463.000,00	16.463.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.463.000,00	16.463.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.617.388.640,00	3.600.816.960,00	(16.571.680,00)	99,54		
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	3.617.388.640,00	3.600.816.960,00	(16.571.680,00)	99,54		
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.617.388.640,00	3.600.816.960,00	(16.571.680,00)	99,54		
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.725.898.980,00	2.506.585.774,00	(219.313.206,00)	91,95		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	0		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	0		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	2.715.098.980,00	2.506.585.774,00	(208.513.206,00)	92,32		
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.715.098.980,00	2.506.585.774,00	(208.513.206,00)	92,32		
02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	677.054.629,00	666.011.879,00	(11.042.750,00)	98,37		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0		
02.2.02.16.5.2	BELANJA MODAL	668.054.629,00	666.011.879,00	(2.042.750,00)	99,69		
02.2.02.16.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	668.054.629,00	666.011.879,00	(2.042.750,00)	99,69		
02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	973.924.969,00	972.176.889,00	(1.748.080,00)	99,82		
02.2.02.17.5.2	BELANJA MODAL	973.924.969,00	972.176.889,00	(1.748.080,00)	99,82		
02.2.02.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	973.924.969,00	972.176.889,00	(1.748.080,00)	99,82		
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	341.571.953,00	340.964.313,00	(607.640,00)	99,82		
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	341.571.953,00	340.964.313,00	(607.640,00)	99,82		
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.571.953,00	340.964.313,00	(607.640,00)	99,82		
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.616.826.516,00	4.497.041.733,00	(119.784.783,00)	97,41		
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	55.800.000,00	15.920.000,00	(39.880.000,00)	28,53		
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	15.920.000,00	(39.880.000,00)	28,53		
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	4.561.026.516,00	4.481.121.733,00	(79.904.783,00)	98,25		
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.561.026.516,00	4.481.121.733,00	(79.904.783,00)	98,25		
02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9.941.940.000,00	8.361.298.213,00	(1.580.641.787,00)	84,10		
02.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	119.000.000,00	118.300.000,00	(700.000,00)	99,41		
02.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	118.300.000,00	(700.000,00)	99,41		
02.2.02.27.5.2	BELANJA MODAL	9.822.940.000,00	8.242.998.213,00	(1.579.941.787,00)	83,92		
02.2.02.27.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.387.600.000,00	8.242.998.213,00	(144.601.787,00)	98,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.27.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.435.340.000,00	0,00	(1.435.340.000,00)	0		
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.112.174.000,00	935.675.800,00	(176.498.200,00)	84,13		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	1.112.174.000,00	935.675.800,00	(176.498.200,00)	84,13		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.174.000,00	935.675.800,00	(176.498.200,00)	84,13		
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.308.560.800,00	581.934.500,00	(726.626.300,00)	44,47		
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	1.308.560.800,00	581.934.500,00	(726.626.300,00)	44,47		
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.560.800,00	581.934.500,00	(726.626.300,00)	44,47		
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.191.850.000,00	5.331.480.000,00	(1.860.370.000,00)	74,13		
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	7.191.850.000,00	5.331.480.000,00	(1.860.370.000,00)	74,13		
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.191.850.000,00	5.331.480.000,00	(1.860.370.000,00)	74,13		
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	158.389.000,00	48.599.152,00	(109.789.848,00)	30,68		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	158.389.000,00	48.599.152,00	(109.789.848,00)	30,68		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.389.000,00	48.599.152,00	(109.789.848,00)	30,68		
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.056.114.000,00	3.193.758.289,00	137.644.289,00	104,50		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	2.600.913.875,00	2.711.781.564,00	110.867.689,00	104,26		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.482.113.875,00	2.711.781.564,00	229.667.689,00	109,25		
02.2.02.42.5.1.05	Belanja Hibah	118.800.000,00	0,00	(118.800.000,00)	0		
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	455.200.125,00	481.976.725,00	26.776.600,00	105,88		
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	455.200.125,00	306.311.825,00	(148.888.300,00)	67,29		
02.2.02.42.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0		
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	172.664.900,00	172.664.900,00	0		
02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	487.916.400,00	334.341.633,00	(153.574.767,00)	68,52		
02.2.02.51.5.1	BELANJA OPERASI	487.916.400,00	334.341.633,00	(153.574.767,00)	68,52		
02.2.02.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.916.400,00	334.341.633,00	(153.574.767,00)	68,52		
02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	297.880.000,00	173.190.000,00	(124.690.000,00)	58,14		
02.2.02.58.5.1	BELANJA OPERASI	297.880.000,00	173.190.000,00	(124.690.000,00)	58,14		
02.2.02.58.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.880.000,00	173.190.000,00	(124.690.000,00)	58,14		
02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	209.014.100,00	209.014.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.59.5.2	BELANJA MODAL	209.014.100,00	209.014.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.59.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.014.100,00	209.014.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	388.117.315,00	382.187.015,00	(5.930.300,00)	98,47		
02.2.02.64.5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0		
02.2.02.64.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0		
02.2.02.64.5.2	BELANJA MODAL	384.517.315,00	382.187.015,00	(2.330.300,00)	99,39		
02.2.02.64.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.517.315,00	382.187.015,00	(2.330.300,00)	99,39		
02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	303.100.000,00	301.949.250,00	(1.150.750,00)	99,62		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.67.5.1	BELANJA OPERASI	103.100.000,00	102.704.250,00	(395.750,00)	99,62		
02.2.02.67.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.100.000,00	102.704.250,00	(395.750,00)	99,62		
02.2.02.67.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.245.000,00	(755.000,00)	99,62		
02.2.02.67.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.245.000,00	(755.000,00)	99,62		
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71.582.821.408,00	61.139.947.845,00	(10.442.873.563,00)	85,41		
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	13.132.942.359,00	11.677.253.930,00	(1.455.688.429,00)	88,92		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.674.079.881,00	3.162.518.679,00	(511.561.202,00)	86,08		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.674.079.881,00	3.162.518.679,00	(511.561.202,00)	86,08		
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	9.458.862.478,00	8.514.735.251,00	(944.127.227,00)	90,02		
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.458.862.478,00	8.514.735.251,00	(944.127.227,00)	90,02		
02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.235.696.200,00	1.233.809.400,00	(1.886.800,00)	99,85		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.696.200,00	35.009.400,00	(686.800,00)	98,08		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.696.200,00	35.009.400,00	(686.800,00)	98,08		
02.2.03.09.5.2	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.198.800.000,00	(1.200.000,00)	99,90		
02.2.03.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000.000,00	1.198.800.000,00	(1.200.000,00)	99,90		
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.926.795.000,00	10.863.963.436,00	(1.062.831.564,00)	91,09		
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	11.926.795.000,00	10.863.963.436,00	(1.062.831.564,00)	91,09		
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.926.795.000,00	10.863.963.436,00	(1.062.831.564,00)	91,09		
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.041.109.800,00	6.366.248.277,00	(674.861.523,00)	90,42		
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	7.041.109.800,00	6.366.248.277,00	(674.861.523,00)	90,42		
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.041.109.800,00	6.366.248.277,00	(674.861.523,00)	90,42		
02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.968.749.000,00	213.477.084,00	(1.755.271.916,00)	10,84		
02.2.03.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.968.749.000,00	213.477.084,00	(1.755.271.916,00)	10,84		
02.2.03.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.749.000,00	213.477.084,00	(1.755.271.916,00)	10,84		
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.293.031.000,00	1.359.553.095,00	(2.933.477.905,00)	31,67		
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	4.102.680.064,00	1.167.953.159,00	(2.934.726.905,00)	28,47		
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.668.064,00	1.167.953.159,00	(118.714.905,00)	90,77		
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	2.816.012.000,00	0,00	(2.816.012.000,00)	0		
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	190.350.936,00	191.599.936,00	1.249.000,00	100,66		
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.088.000,00	74.337.000,00	(1.751.000,00)	97,70		
02.2.03.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0		
02.2.03.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.262.936,00	114.262.936,00	0,00	100,00		
02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	763.785.000,00	758.490.000,00	(5.295.000,00)	99,31		
02.2.03.28.5.1	BELANJA OPERASI	326.791.000,00	323.191.000,00	(3.600.000,00)	98,90		
02.2.03.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.791.000,00	323.191.000,00	(3.600.000,00)	98,90		
02.2.03.28.5.2	BELANJA MODAL	436.994.000,00	435.299.000,00	(1.695.000,00)	99,61		
02.2.03.28.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	436.994.000,00	435.299.000,00	(1.695.000,00)	99,61		
02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.411.374.583,00	4.740.080.583,00	(1.671.294.000,00)	73,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.30.5.1	BELANJA OPERASI	3.232.452.021,00	3.214.951.021,00	(17.501.000,00)	99,46		
02.2.03.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.232.452.021,00	3.214.951.021,00	(17.501.000,00)	99,46		
02.2.03.30.5.2	BELANJA MODAL	3.178.922.562,00	1.525.129.562,00	(1.653.793.000,00)	47,98		
02.2.03.30.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.440.000.000,00	0,00	(1.440.000.000,00)	0		
02.2.03.30.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.738.922.562,00	1.525.129.562,00	(213.793.000,00)	87,71		
02.2.03.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.078.182.592,00	1.954.125.139,00	(124.057.453,00)	94,03		
02.2.03.45.5.1	BELANJA OPERASI	169.754.500,00	84.674.500,00	(85.080.000,00)	49,88		
02.2.03.45.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.754.500,00	84.674.500,00	(85.080.000,00)	49,88		
02.2.03.45.5.2	BELANJA MODAL	1.908.428.092,00	1.869.450.639,00	(38.977.453,00)	97,96		
02.2.03.45.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.908.428.092,00	1.869.450.639,00	(38.977.453,00)	97,96		
02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	13.452.397.000,00	13.099.169.086,00	(353.227.914,00)	97,37		
02.2.03.46.5.1	BELANJA OPERASI	682.446.440,00	674.187.050,00	(8.259.390,00)	98,79		
02.2.03.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.446.440,00	674.187.050,00	(8.259.390,00)	98,79		
02.2.03.46.5.2	BELANJA MODAL	12.769.950.560,00	12.424.982.036,00	(344.968.524,00)	97,30		
02.2.03.46.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.769.950.560,00	12.424.982.036,00	(344.968.524,00)	97,30		
02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.529.399.600,00	4.326.647.696,00	(202.751.904,00)	95,52		
02.2.03.47.5.1	BELANJA OPERASI	4.479.399.600,00	4.276.747.646,00	(202.651.954,00)	95,48		
02.2.03.47.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.779.399.600,00	3.576.747.646,00	(202.651.954,00)	94,64		
02.2.03.47.5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.47.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80		
02.2.03.47.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.900.050,00	(99.950,00)	99,80		
02.2.03.49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	286.965.250,00	283.639.586,00	(3.325.664,00)	98,84		
02.2.03.49.5.2	BELANJA MODAL	286.965.250,00	283.639.586,00	(3.325.664,00)	98,84		
02.2.03.49.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.965.250,00	283.639.586,00	(3.325.664,00)	98,84		
02.2.03.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.462.394.024,00	4.263.490.533,00	(198.903.491,00)	95,54		
02.2.03.51.5.1	BELANJA OPERASI	2.518.895.654,00	2.332.129.354,00	(186.766.300,00)	92,59		
02.2.03.51.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.518.895.654,00	2.332.129.354,00	(186.766.300,00)	92,59		
02.2.03.51.5.2	BELANJA MODAL	1.943.498.370,00	1.931.361.179,00	(12.137.191,00)	99,38		
02.2.03.51.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.943.498.370,00	1.931.361.179,00	(12.137.191,00)	99,38		
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.461.426.450,00	10.506.672.697,00	(10.954.753.753,00)	48,96		
02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.372.647.300,00	2.169.270.120,00	(203.377.180,00)	91,43		
02.2.04.14.5.1	BELANJA OPERASI	2.372.647.300,00	2.169.270.120,00	(203.377.180,00)	91,43		
02.2.04.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.372.647.300,00	2.169.270.120,00	(203.377.180,00)	91,43		
02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	55.454.000,00	12.619.535,00	(42.834.465,00)	22,76		
02.2.04.16.5.1	BELANJA OPERASI	55.454.000,00	12.619.535,00	(42.834.465,00)	22,76		
02.2.04.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.454.000,00	12.619.535,00	(42.834.465,00)	22,76		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.403.586.000,00	488.982.200,00	(1.914.603.800,00)	20,34		
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.256.370.900,00	341.767.100,00	(1.914.603.800,00)	15,15		
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.240.900,00	341.767.100,00	(108.473.800,00)	75,91		
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	1.806.130.000,00	0,00	(1.806.130.000,00)	0		
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	147.215.100,00	147.215.100,00	0,00	100,00		
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	61.943.400,00	61.943.400,00	0		
02.2.04.17.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.215.100,00	85.271.700,00	(61.943.400,00)	57,92		
02.2.04.39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.498.883.500,00	1.046.124.860,00	(452.758.640,00)	69,79		
02.2.04.39.5.1	BELANJA OPERASI	1.498.883.500,00	1.046.124.860,00	(452.758.640,00)	69,79		
02.2.04.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.883.500,00	1.046.124.860,00	(452.758.640,00)	69,79		
02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.130.855.650,00	6.789.675.982,00	(8.341.179.668,00)	44,87		
02.2.04.46.5.1	BELANJA OPERASI	15.130.855.650,00	6.789.675.982,00	(8.341.179.668,00)	44,87		
02.2.04.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.130.855.650,00	6.789.675.982,00	(8.341.179.668,00)	44,87		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	677.605.000,00	667.880.000,00	(9.725.000,00)	98,56		
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	677.605.000,00	667.880.000,00	(9.725.000,00)	98,56		
02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	677.605.000,00	667.880.000,00	(9.725.000,00)	98,56		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	677.605.000,00	667.880.000,00	(9.725.000,00)	98,56		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.605.000,00	467.880.000,00	(9.725.000,00)	97,96		
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	535.107.600,00	508.406.768,00	(26.700.832,00)	95,01		
03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	535.107.600,00	508.406.768,00	(26.700.832,00)	95,01		
03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	535.107.600,00	508.406.768,00	(26.700.832,00)	95,01		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	535.107.600,00	508.406.768,00	(26.700.832,00)	95,01		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.107.600,00	508.406.768,00	(26.700.832,00)	95,01		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	4.525.807.230,00	4.489.876.712,00	(35.930.518,00)	99,21		
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.525.807.230,00	4.489.876.712,00	(35.930.518,00)	99,21		
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.233.358.450,00	2.210.851.702,00	(22.506.748,00)	98,99		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.233.358.450,00	2.210.851.702,00	(22.506.748,00)	98,99		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.233.358.450,00	2.210.851.702,00	(22.506.748,00)	98,99		
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.292.448.780,00	2.279.025.010,00	(13.423.770,00)	99,41		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.211.616.980,00	2.199.070.160,00	(12.546.820,00)	99,43		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.911.616.980,00	1.899.070.160,00	(12.546.820,00)	99,34		
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	80.831.800,00	79.954.850,00	(876.950,00)	98,92		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.831.800,00	40.742.550,00	(89.250,00)	99,78		
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.212.300,00	(787.700,00)	98,03		
04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	3.393.077.200,00	1.685.039.852,00	(1.708.037.348,00)	49,66		
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.393.077.200,00	1.685.039.852,00	(1.708.037.348,00)	49,66		
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.684.821.800,00	1.075.378.000,00	(609.443.800,00)	63,83		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.684.821.800,00	1.075.378.000,00	(609.443.800,00)	63,83		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.413.400,00	293.969.600,00	(609.443.800,00)	32,54		
04.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	781.408.400,00	781.408.400,00	0,00	100,00		
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.708.255.400,00	609.661.852,00	(1.098.593.548,00)	35,69		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.708.255.400,00	609.661.852,00	(1.098.593.548,00)	35,69		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.255.400,00	609.661.852,00	(1.098.593.548,00)	35,69		
04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	2.013.103.500,00	1.888.418.121,00	(124.685.379,00)	93,81		
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.013.103.500,00	1.888.418.121,00	(124.685.379,00)	93,81		
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	1.002.084.500,00	955.398.296,00	(46.686.204,00)	95,34		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.002.084.500,00	955.398.296,00	(46.686.204,00)	95,34		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.084.500,00	955.398.296,00	(46.686.204,00)	95,34		
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	233.000.000,00	220.025.000,00	(12.975.000,00)	94,43		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	233.000.000,00	220.025.000,00	(12.975.000,00)	94,43		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000,00	220.025.000,00	(12.975.000,00)	94,43		
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	778.019.000,00	712.994.825,00	(65.024.175,00)	91,64		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	778.019.000,00	712.994.825,00	(65.024.175,00)	91,64		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.019.000,00	712.994.825,00	(65.024.175,00)	91,64		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	90.234.000,00	0,00	(90.234.000,00)	0		
05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.234.000,00	0,00	(90.234.000,00)	0		
05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.234.000,00	0,00	(90.234.000,00)	0		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.234.000,00	0,00	(90.234.000,00)	0		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.234.000,00	0,00	(90.234.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	2.224.278.000,00	1.604.437.408,00	(619.840.592,00)	72,13		
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	202.528.800,00	193.123.000,00	(9.405.800,00)	95,36		
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	44.010.000,00	42.975.000,00	(1.035.000,00)	97,65		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.010.000,00	42.975.000,00	(1.035.000,00)	97,65		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.010.000,00	42.975.000,00	(1.035.000,00)	97,65		
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	158.518.800,00	150.148.000,00	(8.370.800,00)	94,72		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	158.518.800,00	150.148.000,00	(8.370.800,00)	94,72		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.518.800,00	150.148.000,00	(8.370.800,00)	94,72		
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.021.749.200,00	1.411.314.408,00	(610.434.792,00)	69,81		
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	685.278.400,00	419.725.228,00	(265.553.172,00)	61,25		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	678.692.800,00	413.139.628,00	(265.553.172,00)	60,87		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	678.692.800,00	413.139.628,00	(265.553.172,00)	60,87		
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	6.585.600,00	6.585.600,00	0,00	100,00		
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.585.600,00	6.585.600,00	0,00	100,00		
05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	795.809.800,00	478.814.283,00	(316.995.517,00)	60,17		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	482.209.800,00	478.814.283,00	(3.395.517,00)	99,30		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.209.800,00	478.814.283,00	(3.395.517,00)	99,30		
05.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	313.600.000,00	0,00	(313.600.000,00)	0		
05.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.600.000,00	0,00	(313.600.000,00)	0		
05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	540.661.000,00	512.774.897,00	(27.886.103,00)	94,84		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	540.661.000,00	512.774.897,00	(27.886.103,00)	94,84		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.661.000,00	512.774.897,00	(27.886.103,00)	94,84		
	SURPLUS / DEFISIT	(594.686.457.877,00)	(387.677.470.591,00)	207.008.987.286,00	0		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-100.207,00	(100.207,00)	0		
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(100.207,00)	(100.207,00)	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(594.686.457.877,00)**	**(387.677.570.798,00)**	**207.008.887.079,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 DINAS KESEHATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	58.178.581.843,00	69.478.752.873,77	11.300.171.030,77	119,42		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	50.211.732.500,00	53.781.618.464,29	3.569.885.964,29	107,11		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	211.732.500,00	211.432.500,00	(300.000,00)	99,86		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000.000,00	53.570.185.964,29	3.570.185.964,29	107,14	NULL	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	7.564.016.917,00	7.564.016.917,00	0		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	7.564.016.917,00	7.564.016.917,00	0		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	7.966.849.343,00	8.133.117.492,48	166.268.149,48	102,09		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.966.849.343,00	7.783.117.492,48	(183.731.850,52)	97,69	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	373.594.375.254,00	306.292.600.731,42	(67.301.774.522,58)	81,99		
00	**Non Program**	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	201.591.450.052,00	167.327.501.173,55	(34.263.948.878,45)	83,00		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	997.410.765,00	944.511.400,00	(52.899.365,00)	94,70		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	423.743.400,00	402.419.700,00	(21.323.700,00)	94,97		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	423.743.400,00	402.419.700,00	(21.323.700,00)	94,97		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.743.400,00	402.419.700,00	(21.323.700,00)	94,97		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	519.152.365,00	505.043.200,00	(14.109.165,00)	97,28		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	505.059.365,00	491.057.200,00	(14.002.165,00)	97,23		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.059.365,00	491.057.200,00	(14.002.165,00)	97,23		
01.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	14.093.000,00	13.986.000,00	(107.000,00)	99,24		
01.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.093.000,00	13.986.000,00	(107.000,00)	99,24		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	54.515.000,00	37.048.500,00	(17.466.500,00)	67,96		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	54.515.000,00	37.048.500,00	(17.466.500,00)	67,96		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.515.000,00	37.048.500,00	(17.466.500,00)	67,96		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.578.967.151,00	102.940.790.874,00	(31.638.176.277,00)	76,49		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.172.698.451,00	102.545.287.874,00	(31.627.410.577,00)	76,43		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	134.172.698.451,00	102.545.287.874,00	(31.627.410.577,00)	76,43		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	134.148.218.451,00	102.539.167.874,00	(31.609.050.577,00)	76,44		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.480.000,00	6.120.000,00	(18.360.000,00)	25,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	406.268.700,00	395.503.000,00	(10.765.700,00)	97,35		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	406.268.700,00	395.503.000,00	(10.765.700,00)	97,35		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.268.700,00	395.503.000,00	(10.765.700,00)	97,35		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.956.160.000,00	2.946.932.100,00	(9.227.900,00)	99,69		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.956.160.000,00	2.946.932.100,00	(9.227.900,00)	99,69		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.956.160.000,00	2.946.932.100,00	(9.227.900,00)	99,69		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.956.160.000,00	2.946.932.100,00	(9.227.900,00)	99,69		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.979.417.332,00	1.882.392.551,00	(97.024.781,00)	95,10		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.873.300,00	13.630.000,00	(243.300,00)	98,25		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.873.300,00	13.630.000,00	(243.300,00)	98,25		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.873.300,00	13.630.000,00	(243.300,00)	98,25		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.375.565.732,00	1.300.562.702,00	(75.003.030,00)	94,55		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	263.994.232,00	258.671.918,00	(5.322.314,00)	97,98		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.994.232,00	258.671.918,00	(5.322.314,00)	97,98		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.111.571.500,00	1.041.890.784,00	(69.680.716,00)	93,73		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.111.571.500,00	1.041.890.784,00	(69.680.716,00)	93,73		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.930.500,00	63.008.000,00	(922.500,00)	98,56		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.930.500,00	63.008.000,00	(922.500,00)	98,56		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.930.500,00	63.008.000,00	(922.500,00)	98,56		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.947.200,00	29.500.000,00	(447.200,00)	98,51		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.947.200,00	29.500.000,00	(447.200,00)	98,51		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.947.200,00	29.500.000,00	(447.200,00)	98,51		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.100.600,00	475.691.849,00	(20.408.751,00)	95,89		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	496.100.600,00	475.691.849,00	(20.408.751,00)	95,89		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.100.600,00	475.691.849,00	(20.408.751,00)	95,89		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.216.150,00	620.692.322,00	(134.523.828,00)	82,19		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.850.000,00	70.230.000,00	(6.620.000,00)	91,39		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.850.000,00	70.230.000,00	(6.620.000,00)	91,39		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.850.000,00	70.230.000,00	(6.620.000,00)	91,39		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.383.150,00	315.370.122,00	(107.013.028,00)	74,66		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	422.383.150,00	315.370.122,00	(107.013.028,00)	74,66		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.383.150,00	315.370.122,00	(107.013.028,00)	74,66		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.983.000,00	235.092.200,00	(20.890.800,00)	91,84		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	255.983.000,00	235.092.200,00	(20.890.800,00)	91,84		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.983.000,00	235.092.200,00	(20.890.800,00)	91,84		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.113.255.226,00	2.002.683.628,00	(110.571.598,00)	94,77		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.135.000,00	366.656.817,00	(26.478.183,00)	93,26		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	393.135.000,00	366.656.817,00	(26.478.183,00)	93,26		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.135.000,00	366.656.817,00	(26.478.183,00)	93,26		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.604.769.026,00	1.532.115.811,00	(72.653.215,00)	95,47		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.655.588,00	87.259.963,00	(1.395.625,00)	98,43		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.655.588,00	87.259.963,00	(1.395.625,00)	98,43		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	1.516.113.438,00	1.444.855.848,00	(71.257.590,00)	95,30		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.516.113.438,00	1.444.855.848,00	(71.257.590,00)	95,30		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.351.200,00	103.911.000,00	(11.440.200,00)	90,08		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	115.351.200,00	103.911.000,00	(11.440.200,00)	90,08		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.351.200,00	103.911.000,00	(11.440.200,00)	90,08		
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	58.211.023.428,00	55.989.498.298,55	(2.221.525.129,45)	96,18		
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	58.211.023.428,00	55.989.498.298,55	(2.221.525.129,45)	96,18		
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	55.120.564.728,00	53.998.187.468,55	(1.122.377.259,45)	97,96		
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	502.720.000,00	358.090.041,00	(144.629.959,00)	71,23		
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.617.844.728,00	53.640.097.427,55	(977.747.300,45)	98,21		
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	3.090.458.700,00	1.991.310.830,00	(1.099.147.870,00)	64,43		
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.560.548.300,00	1.486.022.230,00	(1.074.526.070,00)	58,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.910.400,00	154.462.000,00	(20.448.400,00)	88,31		
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	355.000.000,00	350.826.600,00	(4.173.400,00)	98,82		
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	159.097.281.202,00	127.108.698.560,87	(31.988.582.641,13)	79,89		
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.448.092.692,00	51.802.919.769,52	(23.645.172.922,48)	68,66		
02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.332.712.580,00	2.309.346.245,00	(23.366.335,00)	99,00		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.285.000,00	96.647.400,00	(15.637.600,00)	86,07		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.285.000,00	96.647.400,00	(15.637.600,00)	86,07		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.220.427.580,00	2.212.698.845,00	(7.728.735,00)	99,65		
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.220.427.580,00	2.212.698.845,00	(7.728.735,00)	99,65		
02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.076.185.150,00	10.906.554.892,00	(12.169.630.258,00)	47,26		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	721.469.500,00	633.770.550,00	(87.698.950,00)	87,84		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.469.500,00	633.770.550,00	(87.698.950,00)	87,84		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	22.354.715.650,00	10.272.784.342,00	(12.081.931.308,00)	45,95		
02.2.01.07.5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.912.000.000,00	1.045.802.324,00	(1.866.197.676,00)	35,91		
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.842.715.650,00	7.626.999.512,00	(10.215.716.138,00)	42,75		
02.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000,00	1.599.982.506,00	(17.494,00)	100,00		
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12.818.166.763,00	8.800.618.079,00	(4.017.548.684,00)	68,66		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	370.823.800,00	150.461.000,00	(220.362.800,00)	40,57		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.823.800,00	150.461.000,00	(220.362.800,00)	40,57		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	12.447.342.963,00	8.650.157.079,00	(3.797.185.884,00)	69,49		
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.447.342.963,00	8.650.157.079,00	(3.797.185.884,00)	69,49		
02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.621.028.104,00	7.918.107.425,00	(702.920.679,00)	91,85		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	122.421.000,00	109.208.505,00	(13.212.495,00)	89,21		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.421.000,00	109.208.505,00	(13.212.495,00)	89,21		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	8.498.607.104,00	7.808.898.920,00	(689.708.184,00)	91,88		
02.2.01.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.498.607.104,00	7.808.898.920,00	(689.708.184,00)	91,88		
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.970.000,00	111.444.800,00	(3.525.200,00)	96,93		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	114.970.000,00	111.444.800,00	(3.525.200,00)	96,93		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.970.000,00	111.444.800,00	(3.525.200,00)	96,93		
02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	20.348.892.230,00	17.932.175.870,01	(2.416.716.359,99)	88,12		
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	3.169.897.264,00	2.343.985.209,00	(825.912.055,00)	73,95		
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.169.897.264,00	2.343.985.209,00	(825.912.055,00)	73,95		
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	17.178.994.966,00	15.588.190.661,01	(1.590.804.304,99)	90,74		
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.589.994.966,00	7.792.191.484,00	(797.803.482,00)	90,71		
02.2.01.22.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.721.000.000,00	2.042.632.487,01	(678.367.512,99)	75,07		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.22.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.868.000.000,00	5.753.366.690,00	(114.633.310,00)	98,05		
02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.794.923.865,00	2.660.244.332,51	(4.134.679.532,49)	39,15		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	6.758.173.865,00	2.660.244.332,51	(4.097.929.532,49)	39,36		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.758.173.865,00	2.660.244.332,51	(4.097.929.532,49)	39,36		
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	0		
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	0		
02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.208.825.000,00	1.094.212.526,00	(114.612.474,00)	90,52		
02.2.01.24.5.1	BELANJA OPERASI	1.208.825.000,00	1.094.212.526,00	(114.612.474,00)	90,52		
02.2.01.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.825.000,00	1.094.212.526,00	(114.612.474,00)	90,52		
02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	132.389.000,00	70.215.600,00	(62.173.400,00)	53,04		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	132.389.000,00	70.215.600,00	(62.173.400,00)	53,04		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.389.000,00	70.215.600,00	(62.173.400,00)	53,04		
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.630.651.510,00	74.428.088.231,35	(8.202.563.278,65)	90,07		
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.636.145.000,00	1.467.679.049,00	(168.465.951,00)	89,70		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.636.145.000,00	1.467.679.049,00	(168.465.951,00)	89,70		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.145.000,00	1.467.679.049,00	(168.465.951,00)	89,70		
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	614.019.000,00	538.948.200,00	(75.070.800,00)	87,77		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	614.019.000,00	538.948.200,00	(75.070.800,00)	87,77		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.019.000,00	538.948.200,00	(75.070.800,00)	87,77		
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	553.353.000,00	468.259.478,00	(85.093.522,00)	84,62		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	553.353.000,00	468.259.478,00	(85.093.522,00)	84,62		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.353.000,00	468.259.478,00	(85.093.522,00)	84,62		
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	368.230.000,00	340.680.255,00	(27.549.745,00)	92,52		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	368.230.000,00	340.680.255,00	(27.549.745,00)	92,52		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.230.000,00	340.680.255,00	(27.549.745,00)	92,52		
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.098.225.000,00	971.753.600,00	(126.471.400,00)	88,48		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.098.225.000,00	971.753.600,00	(126.471.400,00)	88,48		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.225.000,00	971.753.600,00	(126.471.400,00)	88,48		
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	369.880.000,00	336.326.110,00	(33.553.890,00)	90,93		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	369.880.000,00	336.326.110,00	(33.553.890,00)	90,93		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.880.000,00	336.326.110,00	(33.553.890,00)	90,93		
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	620.640.400,00	574.704.850,00	(45.935.550,00)	92,60		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	620.640.400,00	574.704.850,00	(45.935.550,00)	92,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.640.400,00	574.704.850,00	(45.935.550,00)	92,60		
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	191.460.000,00	186.037.330,00	(5.422.670,00)	97,17		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	191.460.000,00	186.037.330,00	(5.422.670,00)	97,17		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.460.000,00	186.037.330,00	(5.422.670,00)	97,17		
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	129.295.000,00	125.190.000,00	(4.105.000,00)	96,83		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	129.295.000,00	125.190.000,00	(4.105.000,00)	96,83		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.295.000,00	125.190.000,00	(4.105.000,00)	96,83		
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	596.770.000,00	490.260.004,00	(106.509.996,00)	82,15		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	596.770.000,00	490.260.004,00	(106.509.996,00)	82,15		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.770.000,00	490.260.004,00	(106.509.996,00)	82,15		
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	379.663.000,00	359.360.930,00	(20.302.070,00)	94,65		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	379.663.000,00	359.360.930,00	(20.302.070,00)	94,65		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.663.000,00	359.360.930,00	(20.302.070,00)	94,65		
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	216.840.000,00	198.295.500,00	(18.544.500,00)	91,45		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	216.840.000,00	198.295.500,00	(18.544.500,00)	91,45		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.840.000,00	198.295.500,00	(18.544.500,00)	91,45		
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	515.748.600,00	465.818.304,00	(49.930.296,00)	90,32		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	473.148.600,00	423.251.358,00	(49.897.242,00)	89,45		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.848.600,00	173.951.358,00	(49.897.242,00)	77,71		
02.2.02.14.5.1.05	Belanja Hibah	249.300.000,00	249.300.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	42.600.000,00	42.566.946,00	(33.054,00)	99,92		
02.2.02.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.600.000,00	42.566.946,00	(33.054,00)	99,92		
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.943.207.700,00	4.179.703.432,00	(763.504.268,00)	84,55		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	4.943.207.700,00	4.179.703.432,00	(763.504.268,00)	84,55		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.943.207.700,00	4.179.703.432,00	(763.504.268,00)	84,55		
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	680.814.900,00	540.719.600,00	(140.095.300,00)	79,42		
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	680.814.900,00	540.719.600,00	(140.095.300,00)	79,42		
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.814.900,00	540.719.600,00	(140.095.300,00)	79,42		
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	986.323.000,00	796.825.618,00	(189.497.382,00)	80,79		
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	986.323.000,00	796.825.618,00	(189.497.382,00)	80,79		
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.323.000,00	796.825.618,00	(189.497.382,00)	80,79		
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	197.601.000,00	176.808.290,00	(20.792.710,00)	89,48		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	197.601.000,00	176.808.290,00	(20.792.710,00)	89,48		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.601.000,00	176.808.290,00	(20.792.710,00)	89,48		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	517.793.600,00	421.961.825,00	(95.831.775,00)	81,49		
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	497.793.600,00	402.256.825,00	(95.536.775,00)	80,81		
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.793.600,00	402.256.825,00	(95.536.775,00)	80,81		
02.2.02.20.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.705.000,00	(295.000,00)	98,53		
02.2.02.20.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.705.000,00	(295.000,00)	98,53		
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	148.200.000,00	110.490.000,00	(37.710.000,00)	74,55		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	148.200.000,00	110.490.000,00	(37.710.000,00)	74,55		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.200.000,00	110.490.000,00	(37.710.000,00)	74,55		
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.102.007.600,00	961.443.318,00	(140.564.282,00)	87,24		
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.102.007.600,00	961.443.318,00	(140.564.282,00)	87,24		
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.007.600,00	961.443.318,00	(140.564.282,00)	87,24		
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.477.599.120,00	33.967.249.956,00	(1.510.349.164,00)	95,74		
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	35.477.599.120,00	33.967.249.956,00	(1.510.349.164,00)	95,74		
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.477.599.120,00	33.967.249.956,00	(1.510.349.164,00)	95,74		
02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	102.366.000,00	99.349.700,00	(3.016.300,00)	97,05		
02.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	102.366.000,00	99.349.700,00	(3.016.300,00)	97,05		
02.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.366.000,00	99.349.700,00	(3.016.300,00)	97,05		
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00		
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00		
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00		
02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	409.988.000,00	343.412.227,00	(66.575.773,00)	83,76		
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	409.988.000,00	343.412.227,00	(66.575.773,00)	83,76		
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.988.000,00	343.412.227,00	(66.575.773,00)	83,76		
02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	24.215.763.370,00	20.497.515.877,35	(3.718.247.492,65)	84,65		
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	24.215.763.370,00	20.497.515.877,35	(3.718.247.492,65)	84,65		
02.2.02.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.215.763.370,00	20.497.515.877,35	(3.718.247.492,65)	84,65		
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.941.856.620,00	4.399.335.478,00	(542.521.142,00)	89,02		
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	4.941.856.620,00	4.399.335.478,00	(542.521.142,00)	89,02		
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	1.276.789.000,00	647.172.903,00	(629.616.097,00)	50,69		
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.665.067.620,00	3.752.162.575,00	87.094.955,00	102,38		
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.075.000,00	13.540.000,00	(10.535.000,00)	56,24		
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	24.075.000,00	13.540.000,00	(10.535.000,00)	56,24		
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.075.000,00	13.540.000,00	(10.535.000,00)	56,24		
02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	239.900.600,00	215.099.900,00	(24.800.700,00)	89,66		
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	239.900.600,00	215.099.900,00	(24.800.700,00)	89,66		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.900.600,00	215.099.900,00	(24.800.700,00)	89,66		
02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	104.721.000,00	94.616.000,00	(10.105.000,00)	90,35		
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	104.721.000,00	94.616.000,00	(10.105.000,00)	90,35		
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.721.000,00	94.616.000,00	(10.105.000,00)	90,35		
02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	53.945.000,00	46.630.400,00	(7.314.600,00)	86,44		
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	53.945.000,00	46.630.400,00	(7.314.600,00)	86,44		
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.945.000,00	46.630.400,00	(7.314.600,00)	86,44		
02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	372.150.000,00	368.895.000,00	(3.255.000,00)	99,13		
02.2.02.44.5.1	BELANJA OPERASI	372.150.000,00	368.895.000,00	(3.255.000,00)	99,13		
02.2.02.44.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.150.000,00	368.895.000,00	(3.255.000,00)	99,13		
02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250.470.000,00	140.698.000,00	(109.772.000,00)	56,17		
02.2.02.46.5.1	BELANJA OPERASI	250.470.000,00	140.698.000,00	(109.772.000,00)	56,17		
02.2.02.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.470.000,00	140.698.000,00	(109.772.000,00)	56,17		
02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	102.900.000,00	85.430.000,00	(17.470.000,00)	83,02		
02.2.02.47.5.1	BELANJA OPERASI	102.900.000,00	85.430.000,00	(17.470.000,00)	83,02		
02.2.02.47.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	85.430.000,00	(17.470.000,00)	83,02		
02.2.02.48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	464.700.000,00	442.450.000,00	(22.250.000,00)	95,21		
02.2.02.48.5.1	BELANJA OPERASI	464.700.000,00	442.450.000,00	(22.250.000,00)	95,21		
02.2.02.48.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.700.000,00	442.450.000,00	(22.250.000,00)	95,21		
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	154.617.000,00	127.883.600,00	(26.733.400,00)	82,71		
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	154.617.000,00	127.883.600,00	(26.733.400,00)	82,71		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	154.617.000,00	127.883.600,00	(26.733.400,00)	82,71		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.617.000,00	127.883.600,00	(26.733.400,00)	82,71		
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863.920.000,00	749.806.960,00	(114.113.040,00)	86,79		
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	863.920.000,00	749.806.960,00	(114.113.040,00)	86,79		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	825.752.000,00	714.286.960,00	(111.465.040,00)	86,50		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.752.000,00	714.286.960,00	(111.465.040,00)	86,50		
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	38.168.000,00	35.520.000,00	(2.648.000,00)	93,06		
02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.168.000,00	35.520.000,00	(2.648.000,00)	93,06		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	11.538.513.100,00	10.799.475.797,00	(739.037.303,00)	93,60		
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.084.371.400,00	8.573.267.121,00	(511.104.279,00)	94,37		
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.084.371.400,00	8.573.267.121,00	(511.104.279,00)	94,37		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.084.371.400,00	8.573.267.121,00	(511.104.279,00)	94,37		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.084.371.400,00	8.573.267.121,00	(511.104.279,00)	94,37		
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.454.141.700,00	2.226.208.676,00	(227.933.024,00)	90,71		
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.454.141.700,00	2.226.208.676,00	(227.933.024,00)	90,71		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.454.141.700,00	2.226.208.676,00	(227.933.024,00)	90,71		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.454.141.700,00	2.226.208.676,00	(227.933.024,00)	90,71		
04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	491.315.000,00	338.974.900,00	(152.340.100,00)	68,99		
04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.403.800,00	33.073.500,00	(6.330.300,00)	83,93		
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.403.800,00	33.073.500,00	(6.330.300,00)	83,93		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.403.800,00	33.073.500,00	(6.330.300,00)	83,93		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.403.800,00	33.073.500,00	(6.330.300,00)	83,93		
04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	245.341.200,00	179.679.900,00	(65.661.300,00)	73,24		
04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	245.341.200,00	179.679.900,00	(65.661.300,00)	73,24		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	245.341.200,00	179.679.900,00	(65.661.300,00)	73,24		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.341.200,00	179.679.900,00	(65.661.300,00)	73,24		
04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	206.570.000,00	126.221.500,00	(80.348.500,00)	61,10		
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	206.570.000,00	126.221.500,00	(80.348.500,00)	61,10		
04.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	206.570.000,00	126.221.500,00	(80.348.500,00)	61,10		
04.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.570.000,00	126.221.500,00	(80.348.500,00)	61,10		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	875.815.900,00	664.950.300,00	(210.865.600,00)	75,92		
05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	358.171.400,00	300.338.400,00	(57.833.000,00)	83,85		
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	358.171.400,00	300.338.400,00	(57.833.000,00)	83,85		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	358.171.400,00	300.338.400,00	(57.833.000,00)	83,85		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.171.400,00	300.338.400,00	(57.833.000,00)	83,85		
05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.544.500,00	155.734.900,00	(89.809.600,00)	63,42		
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	245.544.500,00	155.734.900,00	(89.809.600,00)	63,42		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	245.544.500,00	155.734.900,00	(89.809.600,00)	63,42		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.544.500,00	155.734.900,00	(89.809.600,00)	63,42		
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.100.000,00	208.877.000,00	(63.223.000,00)	76,76		
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	272.100.000,00	208.877.000,00	(63.223.000,00)	76,76		
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	272.100.000,00	208.877.000,00	(63.223.000,00)	76,76		
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.100.000,00	208.877.000,00	(63.223.000,00)	76,76		
	SURPLUS / DEFISIT	(315.415.793.411,00)	(236.813.847.857,65)	78.601.945.553,35	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(315.415.793.411,00)**	**(236.813.847.857,65)**	**78.601.945.553,35**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1-03.1-04.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Unit Organisasi : 1-03.1-04.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	100.000.000,00	186.211.500,00	86.211.500,00	186,21		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	100.000.000,00	186.211.500,00	86.211.500,00	186,21		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	186.211.500,00	86.211.500,00	186,21		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	1.130.522.761.838,00	963.596.492.412,00	(166.926.269.426,00)	85,23		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	24.199.601.086,87	20.620.670.938,00	(3.578.930.148,87)	85,21		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.605.300,00	302.768.674,00	(43.836.626,00)	87,35		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.561.000,00	182.395.611,00	(10.165.389,00)	94,72		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	152.561.000,00	142.768.611,00	(9.792.389,00)	93,58		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.561.000,00	142.768.611,00	(9.792.389,00)	93,58		
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.627.000,00	(373.000,00)	99,07		
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.627.000,00	(373.000,00)	99,07		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.806.300,00	84.626.500,00	(7.179.800,00)	92,18		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	91.806.300,00	84.626.500,00	(7.179.800,00)	92,18		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.806.300,00	84.626.500,00	(7.179.800,00)	92,18		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	34.113.000,00	15.778.063,00	(18.334.937,00)	46,25		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.113.000,00	15.778.063,00	(18.334.937,00)	46,25		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.113.000,00	15.778.063,00	(18.334.937,00)	46,25		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.125.000,00	19.968.500,00	(8.156.500,00)	71,00		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	13.125.000,00	5.150.000,00	(7.975.000,00)	39,24		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	5.150.000,00	(7.975.000,00)	39,24		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.818.500,00	(181.500,00)	98,79		
01.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.818.500,00	(181.500,00)	98,79		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.792.867.986,87	13.153.444.774,00	(639.423.212,87)	95,36		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.925.895.286,87	12.517.419.486,00	(408.475.800,87)	96,84		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.925.895.286,87	12.517.419.486,00	(408.475.800,87)	96,84		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.893.255.286,87	12.517.419.486,00	(375.835.800,87)	97,09		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.640.000,00	0,00	(32.640.000,00)	0		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	296.935.700,00	111.981.551,00	(184.954.149,00)	37,71		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	178.327.200,00	9.140.040,00	(169.187.160,00)	5,13		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.327.200,00	9.140.040,00	(169.187.160,00)	5,13		
01.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	118.608.500,00	102.841.511,00	(15.766.989,00)	86,71		
01.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.608.500,00	102.841.511,00	(15.766.989,00)	86,71		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	570.037.000,00	524.043.737,00	(45.993.263,00)	91,93		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	570.037.000,00	524.043.737,00	(45.993.263,00)	91,93		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.037.000,00	524.043.737,00	(45.993.263,00)	91,93		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	956.283.500,00	941.699.199,00	(14.584.301,00)	98,47		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	372.418.500,00	362.516.931,00	(9.901.569,00)	97,34		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	372.418.500,00	362.516.931,00	(9.901.569,00)	97,34		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.418.500,00	362.516.931,00	(9.901.569,00)	97,34		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	583.865.000,00	579.182.268,00	(4.682.732,00)	99,20		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	583.865.000,00	579.182.268,00	(4.682.732,00)	99,20		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.865.000,00	579.182.268,00	(4.682.732,00)	99,20		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.692.981.100,00	3.706.275.915,00	(1.986.705.185,00)	65,10		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.589.346.800,00	2.103.153.243,00	(1.486.193.557,00)	58,59		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.123.405.000,00	1.686.710.050,00	(436.694.950,00)	79,43		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.123.405.000,00	1.686.710.050,00	(436.694.950,00)	79,43		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.465.941.800,00	416.443.193,00	(1.049.498.607,00)	28,41		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.465.941.800,00	416.443.193,00	(1.049.498.607,00)	28,41		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.715.000,00	48.286.000,00	(13.429.000,00)	78,24		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.715.000,00	48.286.000,00	(13.429.000,00)	78,24		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.715.000,00	48.286.000,00	(13.429.000,00)	78,24		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	407.844.000,00	293.153.800,00	(114.690.200,00)	71,88		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	407.844.000,00	293.153.800,00	(114.690.200,00)	71,88		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.844.000,00	293.153.800,00	(114.690.200,00)	71,88		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.973.800,00	12.920.000,00	(23.053.800,00)	35,92		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.973.800,00	12.920.000,00	(23.053.800,00)	35,92		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.973.800,00	12.920.000,00	(23.053.800,00)	35,92		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.598.101.500,00	1.248.762.872,00	(349.338.628,00)	78,14		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.598.101.500,00	1.248.762.872,00	(349.338.628,00)	78,14		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.101.500,00	1.248.762.872,00	(349.338.628,00)	78,14		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.786.800.200,00	1.260.555.610,00	(526.244.590,00)	70,55		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	699.200.000,00	442.339.670,00	(256.860.330,00)	63,26		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	699.200.000,00	442.339.670,00	(256.860.330,00)	63,26		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.200.000,00	442.339.670,00	(256.860.330,00)	63,26		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.087.600.200,00	818.215.940,00	(269.384.260,00)	75,23		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.600.200,00	818.215.940,00	(269.384.260,00)	75,23		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.600.200,00	818.215.940,00	(269.384.260,00)	75,23		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.624.063.000,00	1.255.926.766,00	(368.136.234,00)	77,33		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.126.100,00	284.732.351,00	(107.393.749,00)	72,61		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	392.126.100,00	284.732.351,00	(107.393.749,00)	72,61		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.126.100,00	284.732.351,00	(107.393.749,00)	72,61		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	536.860.100,00	435.360.670,00	(101.499.430,00)	81,09		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	536.860.100,00	435.360.670,00	(101.499.430,00)	81,09		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.860.100,00	435.360.670,00	(101.499.430,00)	81,09		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.892.000,00	79.818.900,00	(68.073.100,00)	53,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	147.892.000,00	79.818.900,00	(68.073.100,00)	53,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.892.000,00	79.818.900,00	(68.073.100,00)	53,97		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	547.184.800,00	456.014.845,00	(91.169.955,00)	83,34		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	547.184.800,00	456.014.845,00	(91.169.955,00)	83,34		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.184.800,00	456.014.845,00	(91.169.955,00)	83,34		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	88.919.485.700,00	86.046.058.512,00	(2.873.427.188,00)	96,77		
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.453.548.700,00	48.052.848.301,00	(1.400.700.399,00)	97,17		
02.2.01.09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	44.116.658.100,00	42.904.094.969,00	(1.212.563.131,00)	97,25		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	817.398.100,00	612.435.474,00	(204.962.626,00)	74,92		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.398.100,00	612.435.474,00	(204.962.626,00)	74,92		
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	43.299.260.000,00	42.291.659.495,00	(1.007.600.505,00)	97,67		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.299.260.000,00	42.291.659.495,00	(1.007.600.505,00)	97,67		
02.2.01.21	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	734.620.000,00	718.282.232,00	(16.337.768,00)	97,78		
02.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	734.620.000,00	718.282.232,00	(16.337.768,00)	97,78		
02.2.01.21.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	734.620.000,00	718.282.232,00	(16.337.768,00)	97,78		
02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	780.230.000,00	766.664.000,00	(13.566.000,00)	98,26		
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	71.880.000,00	65.550.000,00	(6.330.000,00)	91,19		
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.880.000,00	65.550.000,00	(6.330.000,00)	91,19		
02.2.01.26.5.2	BELANJA MODAL	708.350.000,00	701.114.000,00	(7.236.000,00)	98,98		
02.2.01.26.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	708.350.000,00	701.114.000,00	(7.236.000,00)	98,98		
02.2.01.28	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.435.360.000,00	3.371.671.000,00	(63.689.000,00)	98,15		
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	3.435.360.000,00	3.371.671.000,00	(63.689.000,00)	98,15		
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.435.360.000,00	3.371.671.000,00	(63.689.000,00)	98,15		
02.2.01.75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	386.680.600,00	292.136.100,00	(94.544.500,00)	75,55		
02.2.01.75.5.1	BELANJA OPERASI	322.355.800,00	228.311.100,00	(94.044.700,00)	70,83		
02.2.01.75.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.355.800,00	228.311.100,00	(94.044.700,00)	70,83		
02.2.01.75.5.2	BELANJA MODAL	64.324.800,00	63.825.000,00	(499.800,00)	99,22		
02.2.01.75.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.324.800,00	63.825.000,00	(499.800,00)	99,22		
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.465.937.000,00	37.993.210.211,00	(1.472.726.789,00)	96,27		
02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	15.167.560.000,00	14.333.573.891,00	(833.986.109,00)	94,50		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	178.000.000,00	156.452.903,00	(21.547.097,00)	87,89		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	156.452.903,00	(21.547.097,00)	87,89		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	14.989.560.000,00	14.177.120.988,00	(812.439.012,00)	94,58		
02.2.02.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.989.560.000,00	14.177.120.988,00	(812.439.012,00)	94,58		
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.577.960.000,00	6.259.951.320,00	(318.008.680,00)	95,17		
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	111.120.000,00	103.120.000,00	(8.000.000,00)	92,80		
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.120.000,00	103.120.000,00	(8.000.000,00)	92,80		
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	6.466.840.000,00	6.156.831.320,00	(310.008.680,00)	95,21		
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.466.840.000,00	6.156.831.320,00	(310.008.680,00)	95,21		
02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	15.999.777.000,00	15.768.711.000,00	(231.066.000,00)	98,56		
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	15.999.777.000,00	15.768.711.000,00	(231.066.000,00)	98,56		
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.999.777.000,00	15.768.711.000,00	(231.066.000,00)	98,56		
02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.720.640.000,00	1.630.974.000,00	(89.666.000,00)	94,79		
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	1.720.640.000,00	1.630.974.000,00	(89.666.000,00)	94,79		
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.640.000,00	1.630.974.000,00	(89.666.000,00)	94,79		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	1.126.129.800,00	942.919.400,00	(183.210.400,00)	83,73		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	189.535.500,00	60.421.200,00	(129.114.300,00)	31,88		
02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	189.535.500,00	60.421.200,00	(129.114.300,00)	31,88		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	189.535.500,00	60.421.200,00	(129.114.300,00)	31,88		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.535.500,00	60.421.200,00	(129.114.300,00)	31,88		
02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	936.594.300,00	882.498.200,00	(54.096.100,00)	94,22		
02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	518.193.300,00	498.990.000,00	(19.203.300,00)	96,29		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	518.193.300,00	498.990.000,00	(19.203.300,00)	96,29		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.193.300,00	498.990.000,00	(19.203.300,00)	96,29		
02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	418.401.000,00	383.508.200,00	(34.892.800,00)	91,66		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	418.401.000,00	383.508.200,00	(34.892.800,00)	91,66		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.401.000,00	383.508.200,00	(34.892.800,00)	91,66		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	17.854.046.000,00	16.783.813.804,00	(1.070.232.196,00)	94,01		
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	17.854.046.000,00	16.783.813.804,00	(1.070.232.196,00)	94,01		
03.2.01.22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.773.260.000,00	4.976.801.228,00	(796.458.772,00)	86,20		
03.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	5.773.260.000,00	4.976.801.228,00	(796.458.772,00)	86,20		
03.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.773.260.000,00	4.976.801.228,00	(796.458.772,00)	86,20		
03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.080.786.000,00	11.807.012.576,00	(273.773.424,00)	97,73		
03.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	12.080.786.000,00	11.807.012.576,00	(273.773.424,00)	97,73		
03.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.080.786.000,00	11.807.012.576,00	(273.773.424,00)	97,73		
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	13.402.662.380,00	12.450.103.659,00	(952.558.721,00)	92,89		
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	686.586.000,00	523.326.260,00	(163.259.740,00)	76,22		
03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	686.586.000,00	523.326.260,00	(163.259.740,00)	76,22		
03.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	686.586.000,00	523.326.260,00	(163.259.740,00)	76,22		
03.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.586.000,00	523.326.260,00	(163.259.740,00)	76,22		
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	12.716.076.380,00	11.926.777.399,00	(789.298.981,00)	93,79		
03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	12.716.076.380,00	11.926.777.399,00	(789.298.981,00)	93,79		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.632.520.200,00	5.194.181.181,00	(438.339.019,00)	92,22		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.632.520.200,00	5.194.181.181,00	(438.339.019,00)	92,22		
03.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	7.083.556.180,00	6.732.596.218,00	(350.959.962,00)	95,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.080.000,00	84.079.999,00	(7.000.001,00)	92,31		
03.2.03.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.992.476.180,00	6.648.516.219,00	(343.959.961,00)	95,08		
04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	32.505.945.300,00	31.367.332.500,00	(1.138.612.800,00)	96,50		
04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	32.505.945.300,00	31.367.332.500,00	(1.138.612.800,00)	96,50		
04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	32.505.945.300,00	31.367.332.500,00	(1.138.612.800,00)	96,50		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.505.945.300,00	31.367.332.500,00	(1.138.612.800,00)	96,50		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.505.945.300,00	31.367.332.500,00	(1.138.612.800,00)	96,50		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	29.457.305.927,00	26.219.626.358,00	(3.237.679.569,00)	89,01		
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.457.305.927,00	26.219.626.358,00	(3.237.679.569,00)	89,01		
05.2.01.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.065.305.800,00	1.011.614.704,00	(53.691.096,00)	94,96		
05.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	909.114.400,00	864.300.704,00	(44.813.696,00)	95,07		
05.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.114.400,00	864.300.704,00	(44.813.696,00)	95,07		
05.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	156.191.400,00	147.314.000,00	(8.877.400,00)	94,32		
05.2.01.38.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.191.400,00	147.314.000,00	(8.877.400,00)	94,32		
05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	28.392.000.127,00	25.208.011.654,00	(3.183.988.473,00)	88,79		
05.2.01.39.5.1	BELANJA OPERASI	27.236.800.127,00	24.054.987.050,00	(3.181.813.077,00)	88,32		
05.2.01.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.236.800.127,00	24.054.987.050,00	(3.181.813.077,00)	88,32		
05.2.01.39.5.2	BELANJA MODAL	1.155.200.000,00	1.153.024.604,00	(2.175.396,00)	99,81		
05.2.01.39.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.155.200.000,00	1.153.024.604,00	(2.175.396,00)	99,81		
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	168.342.718.108,00	164.381.885.455,00	(3.960.832.653,00)	97,65		
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	168.342.718.108,00	164.381.885.455,00	(3.960.832.653,00)	97,65		
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	262.380.000,00	237.142.020,00	(25.237.980,00)	90,38		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	262.380.000,00	237.142.020,00	(25.237.980,00)	90,38		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.380.000,00	237.142.020,00	(25.237.980,00)	90,38		
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	168.080.338.108,00	164.144.743.435,00	(3.935.594.673,00)	97,66		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.592.303.433,00	80.988.818.401,00	(603.485.032,00)	99,26		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.592.303.433,00	80.988.818.401,00	(603.485.032,00)	99,26		
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	86.488.034.675,00	83.155.925.034,00	(3.332.109.641,00)	96,15		
05.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.356.400,00	84.145.000,00	(46.211.400,00)	64,55		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.944.600.000,00	13.331.158.000,00	(613.442.000,00)	95,60		
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.413.078.275,00	69.740.622.034,00	(2.672.456.241,00)	96,31		
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	347.742.604.776,00	288.459.591.935,00	(59.283.012.841,00)	82,95		
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	347.742.604.776,00	288.459.591.935,00	(59.283.012.841,00)	82,95		
08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.657.018.031,00	17.112.472.629,00	(3.544.545.402,00)	82,84		
08.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	5.096.863.000,00	3.478.800.887,00	(1.618.062.113,00)	68,25		
08.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.096.863.000,00	3.478.800.887,00	(1.618.062.113,00)	68,25		
08.2.01.17.5.2	BELANJA MODAL	15.560.155.031,00	13.633.671.742,00	(1.926.483.289,00)	87,62		
08.2.01.17.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0		
08.2.01.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.948.800,00	225.635.250,00	(70.313.550,00)	76,24		
08.2.01.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.264.206.231,00	13.408.036.492,00	(856.169.739,00)	94,00		
08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	507.565.284,00	375.990.800,00	(131.574.484,00)	74,08		
08.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	507.565.284,00	375.990.800,00	(131.574.484,00)	74,08		
08.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.565.284,00	375.990.800,00	(131.574.484,00)	74,08		
08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	326.578.021.461,00	270.971.128.506,00	(55.606.892.955,00)	82,97		
08.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	137.753.214.961,00	120.766.206.733,00	(16.987.008.228,00)	87,67		
08.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.753.214.961,00	120.766.206.733,00	(16.987.008.228,00)	87,67		
08.2.01.21.5.2	BELANJA MODAL	188.824.806.500,00	150.204.921.773,00	(38.619.884.727,00)	79,55		
08.2.01.21.5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.900.000.000,00	21.282.712.821,00	(30.617.287.179,00)	41,01		
08.2.01.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.956.500,00	152.336.400,00	(27.620.100,00)	84,65		
08.2.01.21.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.282.750.000,00	128.310.455.120,00	(7.972.294.880,00)	94,15		
08.2.01.21.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	462.100.000,00	459.417.432,00	(2.682.568,00)	99,42		
09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	107.010.974.361,50	78.006.615.075,00	(29.004.359.286,50)	72,90		
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	107.010.974.361,50	78.006.615.075,00	(29.004.359.286,50)	72,90		
09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	107.010.974.361,50	78.006.615.075,00	(29.004.359.286,50)	72,90		
09.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.798.250.000,00	8.116.956.237,00	(2.681.293.763,00)	75,17		
09.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.798.250.000,00	8.116.956.237,00	(2.681.293.763,00)	75,17		
09.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	96.212.724.361,50	69.889.658.838,00	(26.323.065.523,50)	72,64		
09.2.01.08.5.2.01	Belanja Modal Tanah	58.500.000.000,00	36.115.792.400,00	(22.384.207.600,00)	61,74		
09.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.482.724.361,50	33.544.207.938,00	(3.938.516.423,50)	89,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
09.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.000.000,00	229.658.500,00	(341.500,00)	99,85		
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	291.208.817.898,63	230.404.783.418,00	(60.804.034.480,63)	79,12		
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	291.208.817.898,63	230.404.783.418,00	(60.804.034.480,63)	79,12		
10.2.01.32	Pembangunan Jalan	20.778.972.280,58	5.129.357.890,00	(15.649.614.390,58)	24,69		
10.2.01.32.5.1	BELANJA OPERASI	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.32.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.32.5.2	BELANJA MODAL	20.778.282.280,58	5.128.667.890,00	(15.649.614.390,58)	24,68		
10.2.01.32.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.289.600,00	78.181.000,00	(16.108.600,00)	82,92		
10.2.01.32.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.683.992.680,58	5.050.486.890,00	(15.633.505.790,58)	24,42		
10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	207.002.974.150,05	179.682.115.272,00	(27.320.858.878,05)	86,80		
10.2.01.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.393.810.700,00	930.632.840,00	(463.177.860,00)	66,77		
10.2.01.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.810.700,00	930.632.840,00	(463.177.860,00)	66,77		
10.2.01.33.5.2	BELANJA MODAL	205.609.163.450,05	178.751.482.432,00	(26.857.681.018,05)	86,94		
10.2.01.33.5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.000.000.000,00	0,00	(8.000.000.000,00)	0		
10.2.01.33.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0		
10.2.01.33.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.409.163.450,05	178.751.482.432,00	(18.657.681.018,05)	90,55		
10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	350.000.000,00	191.125.000,00	(158.875.000,00)	54,61		
10.2.01.38.5.1	BELANJA OPERASI	210.720.000,00	51.845.000,00	(158.875.000,00)	24,60		
10.2.01.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.720.000,00	51.845.000,00	(158.875.000,00)	24,60		
10.2.01.38.5.2	BELANJA MODAL	139.280.000,00	139.280.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.38.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.280.000,00	139.280.000,00	0,00	100,00		
10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan	4.170.105.000,00	3.817.166.139,00	(352.938.861,00)	91,54		
10.2.01.39.5.1	BELANJA OPERASI	32.675.000,00	125.000,00	(32.550.000,00)	0,38		
10.2.01.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.675.000,00	125.000,00	(32.550.000,00)	0,38		
10.2.01.39.5.2	BELANJA MODAL	4.137.430.000,00	3.817.041.139,00	(320.388.861,00)	92,26		
10.2.01.39.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.137.430.000,00	3.817.041.139,00	(320.388.861,00)	92,26		
10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	57.362.355.518,00	41.056.403.666,00	(16.305.951.852,00)	71,57		
10.2.01.40.5.1	BELANJA OPERASI	973.379.000,00	385.225.419,00	(588.153.581,00)	39,58		
10.2.01.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.379.000,00	385.225.419,00	(588.153.581,00)	39,58		
10.2.01.40.5.2	BELANJA MODAL	56.388.976.518,00	40.671.178.247,00	(15.717.798.271,00)	72,13		
10.2.01.40.5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0		
10.2.01.40.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.388.976.518,00	40.671.178.247,00	(14.717.798.271,00)	73,43		
10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.544.410.950,00	528.615.451,00	(1.015.795.499,00)	34,23		
10.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.000.950,00	474.205.451,00	(860.795.499,00)	35,52		
10.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000.950,00	474.205.451,00	(860.795.499,00)	35,52		
10.2.01.46.5.2	BELANJA MODAL	209.410.000,00	54.410.000,00	(155.000.000,00)	25,98		
10.2.01.46.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	209.410.000,00	54.410.000,00	(155.000.000,00)	25,98		
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	5.771.571.200,00	5.262.147.672,00	(509.423.528,00)	91,17		
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	764.549.000,00	467.847.693,00	(296.701.307,00)	61,19		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
11.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	764.549.000,00	467.847.693,00	(296.701.307,00)	61,19		
11.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	764.549.000,00	467.847.693,00	(296.701.307,00)	61,19		
11.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.549.000,00	467.847.693,00	(296.701.307,00)	61,19		
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	304.596.000,00	216.954.247,00	(87.641.753,00)	71,23		
11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	304.596.000,00	216.954.247,00	(87.641.753,00)	71,23		
11.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	200.848.000,00	128.392.247,00	(72.455.753,00)	63,93		
11.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.848.000,00	128.392.247,00	(72.455.753,00)	63,93		
11.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	103.748.000,00	88.562.000,00	(15.186.000,00)	85,36		
11.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.748.000,00	88.562.000,00	(15.186.000,00)	85,36		
11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.702.426.200,00	4.577.345.732,00	(125.080.468,00)	97,34		
11.2.04.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	4.702.426.200,00	4.577.345.732,00	(125.080.468,00)	97,34		
11.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.702.426.200,00	4.577.345.732,00	(125.080.468,00)	97,34		
11.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.702.426.200,00	4.577.345.732,00	(125.080.468,00)	97,34		
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	2.980.899.300,00	2.650.943.686,00	(329.955.614,00)	88,93		
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.745.727.200,00	1.640.806.819,00	(104.920.381,00)	93,99		
12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.745.727.200,00	1.640.806.819,00	(104.920.381,00)	93,99		
12.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.689.670.900,00	1.585.262.819,00	(104.408.081,00)	93,82		
12.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.670.900,00	1.585.262.819,00	(104.408.081,00)	93,82		
12.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	56.056.300,00	55.544.000,00	(512.300,00)	99,09		
12.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.056.300,00	55.544.000,00	(512.300,00)	99,09		
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	917.999.600,00	708.992.036,00	(209.007.564,00)	77,23		
12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	917.999.600,00	708.992.036,00	(209.007.564,00)	77,23		
12.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	917.999.600,00	708.992.036,00	(209.007.564,00)	77,23		
12.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	917.999.600,00	708.992.036,00	(209.007.564,00)	77,23		
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	317.172.500,00	301.144.831,00	(16.027.669,00)	94,95		
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	317.172.500,00	301.144.831,00	(16.027.669,00)	94,95		
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	317.172.500,00	301.144.831,00	(16.027.669,00)	94,95		
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.172.500,00	301.144.831,00	(16.027.669,00)	94,95		
	SURPLUS / DEFISIT	(1.130.422.761.838,00)	(963.410.280.912,00)	167.012.480.926,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(1.130.422.761.838,00)**	**(963.410.280.912,00)**	**167.012.480.926,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.8-01.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi : 1-05.8-01.0-00.01.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	16.343.928.365,00	14.549.380.469,00	(1.794.547.896,00)	89,02		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.878.963.165,00	6.797.271.386,52	(1.081.691.778,48)	86,27		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.079.100,00	252.679.710,00	(44.399.390,00)	85,05		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.553.800,00	146.252.000,00	(12.301.800,00)	92,24		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.553.800,00	146.252.000,00	(12.301.800,00)	92,24		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.553.800,00	146.252.000,00	(12.301.800,00)	92,24		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.435.800,00	13.120.800,00	(7.315.000,00)	64,20		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.435.800,00	13.120.800,00	(7.315.000,00)	64,20		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.435.800,00	13.120.800,00	(7.315.000,00)	64,20		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.318.500,00	8.028.500,00	(1.290.000,00)	86,16		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.318.500,00	8.028.500,00	(1.290.000,00)	86,16		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.318.500,00	8.028.500,00	(1.290.000,00)	86,16		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.331.000,00	38.024.800,00	(9.306.200,00)	80,34		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.331.000,00	38.024.800,00	(9.306.200,00)	80,34		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.331.000,00	38.024.800,00	(9.306.200,00)	80,34		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.720.000,00	23.973.610,00	(6.746.390,00)	78,04		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.720.000,00	23.973.610,00	(6.746.390,00)	78,04		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	23.973.610,00	(6.746.390,00)	78,04		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	30.720.000,00	23.280.000,00	(7.440.000,00)	75,78		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.720.000,00	23.280.000,00	(7.440.000,00)	75,78		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	23.280.000,00	(7.440.000,00)	75,78		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.509.363.577,00	4.566.165.619,00	(943.197.958,00)	82,88		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.427.074.577,00	4.486.125.419,00	(940.949.158,00)	82,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.427.074.577,00	4.486.125.419,00	(940.949.158,00)	82,66		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.427.074.577,00	4.486.125.419,00	(940.949.158,00)	82,66		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	80.778.000,00	78.529.200,00	(2.248.800,00)	97,22		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	80.778.000,00	78.529.200,00	(2.248.800,00)	97,22		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.778.000,00	78.529.200,00	(2.248.800,00)	97,22		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486.413.500,00	482.388.140,00	(4.025.360,00)	99,17		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	59.363.500,00	55.685.990,00	(3.677.510,00)	93,81		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.363.500,00	55.685.990,00	(3.677.510,00)	93,81		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.363.500,00	55.685.990,00	(3.677.510,00)	93,81		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	427.050.000,00	426.702.150,00	(347.850,00)	99,92		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	427.050.000,00	426.702.150,00	(347.850,00)	99,92		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.050.000,00	426.702.150,00	(347.850,00)	99,92		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.340.400,00	877.532.366,52	(19.808.033,48)	97,79		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.459.800,00	7.340.000,00	(119.800,00)	98,39		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.459.800,00	7.340.000,00	(119.800,00)	98,39		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.459.800,00	7.340.000,00	(119.800,00)	98,39		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523.381.200,00	506.696.499,00	(16.684.701,00)	96,81		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.782.400,00	54.870.999,00	(6.911.401,00)	88,81		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.782.400,00	54.870.999,00	(6.911.401,00)	88,81		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	461.598.800,00	451.825.500,00	(9.773.300,00)	97,88		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.598.800,00	451.825.500,00	(9.773.300,00)	97,88		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.444.200,00	8.428.000,00	(16.200,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.444.200,00	8.428.000,00	(16.200,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.444.200,00	8.428.000,00	(16.200,00)	99,81		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.336.000,00	3.000.000,00	(336.000,00)	89,93		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.336.000,00	3.000.000,00	(336.000,00)	89,93		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.336.000,00	3.000.000,00	(336.000,00)	89,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.719.200,00	352.067.867,52	(2.651.332,48)	99,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	354.719.200,00	352.067.867,52	(2.651.332,48)	99,25		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.719.200,00	352.067.867,52	(2.651.332,48)	99,25		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.512.463,00	362.661.059,00	(64.851.404,00)	84,83		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.600.000,00	123.050.000,00	(5.550.000,00)	95,68		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.600.000,00	123.050.000,00	(5.550.000,00)	95,68		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.600.000,00	123.050.000,00	(5.550.000,00)	95,68		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.745.000,00	92.123.179,00	(45.621.821,00)	66,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	137.745.000,00	92.123.179,00	(45.621.821,00)	66,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.745.000,00	92.123.179,00	(45.621.821,00)	66,88		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.730.000,00	25.779.500,00	(950.500,00)	96,44		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.730.000,00	25.779.500,00	(950.500,00)	96,44		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.730.000,00	25.779.500,00	(950.500,00)	96,44		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.437.463,00	121.708.380,00	(12.729.083,00)	90,53		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	134.437.463,00	121.708.380,00	(12.729.083,00)	90,53		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.437.463,00	121.708.380,00	(12.729.083,00)	90,53		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.254.125,00	255.844.492,00	(5.409.633,00)	97,93		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.139.000,00	157.559.750,00	(4.579.250,00)	97,18		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	162.139.000,00	157.559.750,00	(4.579.250,00)	97,18		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.139.000,00	157.559.750,00	(4.579.250,00)	97,18		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.115.125,00	98.284.742,00	(830.383,00)	99,16		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	60.715.125,00	59.884.742,00	(830.383,00)	98,63		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.715.125,00	59.884.742,00	(830.383,00)	98,63		
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	1.863.312.800,00	1.653.014.718,00	(210.298.082,00)	88,71		
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.863.312.800,00	1.653.014.718,00	(210.298.082,00)	88,71		
02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39.241.400,00	36.315.300,00	(2.926.100,00)	92,54		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.241.400,00	36.315.300,00	(2.926.100,00)	92,54		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.241.400,00	36.315.300,00	(2.926.100,00)	92,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.750.000,00	117.952.000,00	(53.798.000,00)	68,68		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	162.750.000,00	109.000.000,00	(53.750.000,00)	66,97		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.750.000,00	109.000.000,00	(53.750.000,00)	66,97		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.952.000,00	(48.000,00)	99,47		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.952.000,00	(48.000,00)	99,47		
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	175.440.000,00	124.534.200,00	(50.905.800,00)	70,98		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	175.440.000,00	124.534.200,00	(50.905.800,00)	70,98		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.440.000,00	124.534.200,00	(50.905.800,00)	70,98		
02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.038.000,00	10.068.200,00	(969.800,00)	91,21		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	11.038.000,00	10.068.200,00	(969.800,00)	91,21		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.038.000,00	10.068.200,00	(969.800,00)	91,21		
02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	1.276.807.600,00	1.195.294.818,00	(81.512.782,00)	93,62		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.276.807.600,00	1.195.294.818,00	(81.512.782,00)	93,62		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.276.807.600,00	1.195.294.818,00	(81.512.782,00)	93,62		
02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	24.873.000,00	9.708.200,00	(15.164.800,00)	39,03		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	24.873.000,00	9.708.200,00	(15.164.800,00)	39,03		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.873.000,00	9.708.200,00	(15.164.800,00)	39,03		
02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	164.162.800,00	159.142.000,00	(5.020.800,00)	96,94		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	164.162.800,00	159.142.000,00	(5.020.800,00)	96,94		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.162.800,00	159.142.000,00	(5.020.800,00)	96,94		
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	1.685.076.500,00	1.625.256.400,00	(59.820.100,00)	96,45		
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1.685.076.500,00	1.625.256.400,00	(59.820.100,00)	96,45		
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.106.500,00	65.317.600,00	(27.788.900,00)	70,15		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.106.500,00	65.317.600,00	(27.788.900,00)	70,15		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.106.500,00	65.317.600,00	(27.788.900,00)	70,15		
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	292.795.000,00	268.472.700,00	(24.322.300,00)	91,69		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	292.795.000,00	268.472.700,00	(24.322.300,00)	91,69		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.795.000,00	268.472.700,00	(24.322.300,00)	91,69		
03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	1.299.175.000,00	1.291.466.100,00	(7.708.900,00)	99,41		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.299.175.000,00	1.291.466.100,00	(7.708.900,00)	99,41		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	59.591.100,00	(7.708.900,00)	88,55		
03.2.01.05.5.1.05	Belanja Hibah	1.231.875.000,00	1.231.875.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	443.943.000,00	409.225.500,00	(34.717.500,00)	92,18		
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	443.943.000,00	409.225.500,00	(34.717.500,00)	92,18		
04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	127.913.000,00	101.835.200,00	(26.077.800,00)	79,61		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	127.913.000,00	101.835.200,00	(26.077.800,00)	79,61		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.913.000,00	101.835.200,00	(26.077.800,00)	79,61		
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	316.030.000,00	307.390.300,00	(8.639.700,00)	97,27		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	316.030.000,00	307.390.300,00	(8.639.700,00)	97,27		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.030.000,00	307.390.300,00	(8.639.700,00)	97,27		
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	998.395.900,00	827.665.716,00	(170.730.184,00)	82,90		
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	998.395.900,00	827.665.716,00	(170.730.184,00)	82,90		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.816.000,00	5.378.200,00	(9.437.800,00)	36,30		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.816.000,00	5.378.200,00	(9.437.800,00)	36,30		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.816.000,00	5.378.200,00	(9.437.800,00)	36,30		
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	182.970.900,00	114.557.000,00	(68.413.900,00)	62,61		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	182.970.900,00	114.557.000,00	(68.413.900,00)	62,61		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.970.900,00	114.557.000,00	(68.413.900,00)	62,61		
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	787.486.000,00	697.602.316,00	(89.883.684,00)	88,59		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	787.486.000,00	697.602.316,00	(89.883.684,00)	88,59		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.486.000,00	221.920.800,00	(65.565.200,00)	77,19		
05.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	475.681.516,00	(24.318.484,00)	95,14		
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.123.000,00	10.128.200,00	(2.994.800,00)	77,18		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.123.000,00	10.128.200,00	(2.994.800,00)	77,18		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.123.000,00	10.128.200,00	(2.994.800,00)	77,18		
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	3.474.237.000,00	3.236.946.748,48	(237.290.251,52)	93,17		
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.474.237.000,00	3.236.946.748,48	(237.290.251,52)	93,17		
06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	81.990.000,00	81.458.600,00	(531.400,00)	99,35		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.990.000,00	81.458.600,00	(531.400,00)	99,35		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.990.000,00	81.458.600,00	(531.400,00)	99,35		
06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.515.646.000,00	1.435.918.505,48	(79.727.494,52)	94,74		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.515.646.000,00	1.435.918.505,48	(79.727.494,52)	94,74		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.515.646.000,00	1.435.918.505,48	(79.727.494,52)	94,74		
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	236.424.000,00	176.279.838,00	(60.144.162,00)	74,56		
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	236.424.000,00	176.279.838,00	(60.144.162,00)	74,56		
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.424.000,00	176.279.838,00	(60.144.162,00)	74,56		
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	109.605.000,00	74.334.999,00	(35.270.001,00)	67,82		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	109.605.000,00	74.334.999,00	(35.270.001,00)	67,82		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.605.000,00	74.334.999,00	(35.270.001,00)	67,82		
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.530.572.000,00	1.468.954.806,00	(61.617.194,00)	95,97		
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.530.572.000,00	1.468.954.806,00	(61.617.194,00)	95,97		
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.572.000,00	1.468.954.806,00	(61.617.194,00)	95,97		
	SURPLUS / DEFISIT	(16.343.928.365,00)	(14.549.380.469,00)	1.794.547.896,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(16.343.928.365,00)**	**(14.549.380.469,00)**	**1.794.547.896,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.02.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	18.406.742.051,00	16.865.048.398,41	(1.541.693.652,59)	91,62		
00	**Non Program**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.992.347.351,00	8.943.330.241,41	(1.049.017.109,59)	89,50		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.041.000,00	163.911.036,00	(43.129.964,00)	79,17		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.334.000,00	37.876.300,00	(1.457.700,00)	96,29		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.334.000,00	37.876.300,00	(1.457.700,00)	96,29		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.334.000,00	37.876.300,00	(1.457.700,00)	96,29		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.792.000,00	10.852.200,00	(1.939.800,00)	84,84		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.792.000,00	10.852.200,00	(1.939.800,00)	84,84		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.792.000,00	10.852.200,00	(1.939.800,00)	84,84		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.915.000,00	115.182.536,00	(39.732.464,00)	74,35		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	154.915.000,00	115.182.536,00	(39.732.464,00)	74,35		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.915.000,00	115.182.536,00	(39.732.464,00)	74,35		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.718.302.405,00	6.319.010.833,00	(399.291.572,00)	94,06		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.667.742.405,00	6.273.045.333,00	(394.697.072,00)	94,08		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.667.742.405,00	6.273.045.333,00	(394.697.072,00)	94,08		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.667.742.405,00	6.273.045.333,00	(394.697.072,00)	94,08		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.280.000,00	6.720.000,00	(560.000,00)	92,31		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.280.000,00	6.720.000,00	(560.000,00)	92,31		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	6.720.000,00	(560.000,00)	92,31		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.280.000,00	39.245.500,00	(4.034.500,00)	90,68		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	43.280.000,00	39.245.500,00	(4.034.500,00)	90,68		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.280.000,00	39.245.500,00	(4.034.500,00)	90,68		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.611.100,00	331.001.700,00	(3.609.400,00)	98,92		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.121.100,00	47.938.000,00	(3.183.100,00)	93,77		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.121.100,00	47.938.000,00	(3.183.100,00)	93,77		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.121.100,00	47.938.000,00	(3.183.100,00)	93,77		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	283.490.000,00	283.063.700,00	(426.300,00)	99,85		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	283.490.000,00	283.063.700,00	(426.300,00)	99,85		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.490.000,00	283.063.700,00	(426.300,00)	99,85		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.187.800,00	609.801.312,00	(26.386.488,00)	95,85		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.635.600,00	3.605.400,00	(30.200,00)	99,17		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.635.600,00	3.605.400,00	(30.200,00)	99,17		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.635.600,00	3.605.400,00	(30.200,00)	99,17		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.310.400,00	207.404.500,00	(19.905.900,00)	91,24		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	44.493.400,00	41.721.000,00	(2.772.400,00)	93,77		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.493.400,00	41.721.000,00	(2.772.400,00)	93,77		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	182.817.000,00	165.683.500,00	(17.133.500,00)	90,63		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.817.000,00	165.683.500,00	(17.133.500,00)	90,63		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.744.300,00	62.721.100,00	(4.023.200,00)	93,97		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	66.744.300,00	62.721.100,00	(4.023.200,00)	93,97		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.744.300,00	62.721.100,00	(4.023.200,00)	93,97		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.872.500,00	9.000.000,00	(1.872.500,00)	82,78		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.872.500,00	9.000.000,00	(1.872.500,00)	82,78		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.872.500,00	9.000.000,00	(1.872.500,00)	82,78		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.625.000,00	327.070.312,00	(554.688,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	327.625.000,00	327.070.312,00	(554.688,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.625.000,00	327.070.312,00	(554.688,00)	99,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	486.306.000,00	477.000.000,00	(9.306.000,00)	98,09		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	486.306.000,00	477.000.000,00	(9.306.000,00)	98,09		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	486.306.000,00	477.000.000,00	(9.306.000,00)	98,09		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.306.000,00	477.000.000,00	(9.306.000,00)	98,09		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.563.926,00	276.402.068,00	(334.161.858,00)	45,27		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.626.800,00	98.180.000,00	(38.446.800,00)	71,86		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.626.800,00	98.180.000,00	(38.446.800,00)	71,86		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.626.800,00	98.180.000,00	(38.446.800,00)	71,86		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.800.050,00	119.472.448,00	(95.327.602,00)	55,62		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	214.800.050,00	119.472.448,00	(95.327.602,00)	55,62		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.800.050,00	119.472.448,00	(95.327.602,00)	55,62		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.137.076,00	58.749.620,00	(200.387.456,00)	22,67		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	259.137.076,00	58.749.620,00	(200.387.456,00)	22,67		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.137.076,00	58.749.620,00	(200.387.456,00)	22,67		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.335.120,00	766.203.292,41	(233.131.827,59)	76,67		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.604.300,00	178.263.994,00	(75.340.306,00)	70,29		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	253.604.300,00	178.263.994,00	(75.340.306,00)	70,29		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.604.300,00	178.263.994,00	(75.340.306,00)	70,29		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	622.579.620,00	483.309.998,41	(139.269.621,59)	77,63		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	622.579.620,00	483.309.998,41	(139.269.621,59)	77,63		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	622.579.620,00	483.309.998,41	(139.269.621,59)	77,63		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.591.200,00	89.069.300,00	(18.521.900,00)	82,78		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	107.591.200,00	89.069.300,00	(18.521.900,00)	82,78		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.591.200,00	89.069.300,00	(18.521.900,00)	82,78		
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	6.667.428.200,00	6.290.498.922,00	(376.929.278,00)	94,35		
03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	940.840.000,00	929.550.338,00	(11.289.662,00)	98,80		
03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	760.670.000,00	750.086.138,00	(10.583.862,00)	98,61		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	760.670.000,00	750.086.138,00	(10.583.862,00)	98,61		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.670.000,00	750.086.138,00	(10.583.862,00)	98,61		
03.2.01.08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	180.170.000,00	179.464.200,00	(705.800,00)	99,61		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	180.170.000,00	179.464.200,00	(705.800,00)	99,61		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.170.000,00	179.464.200,00	(705.800,00)	99,61		
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.520.860.300,00	4.318.069.962,00	(202.790.338,00)	95,51		
03.2.02.13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	32.224.500,00	29.194.500,00	(3.030.000,00)	90,60		
03.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	32.224.500,00	29.194.500,00	(3.030.000,00)	90,60		
03.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.224.500,00	29.194.500,00	(3.030.000,00)	90,60		
03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.506.114.500,00	1.468.671.253,00	(37.443.247,00)	97,51		
03.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	436.114.500,00	416.790.254,00	(19.324.246,00)	95,57		
03.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.114.500,00	416.790.254,00	(19.324.246,00)	95,57		
03.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	1.070.000.000,00	1.051.880.999,00	(18.119.001,00)	98,31		
03.2.02.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.070.000.000,00	1.051.880.999,00	(18.119.001,00)	98,31		
03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	120.839.300,00	116.264.500,00	(4.574.800,00)	96,21		
03.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	120.839.300,00	116.264.500,00	(4.574.800,00)	96,21		
03.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.839.300,00	116.264.500,00	(4.574.800,00)	96,21		
03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	411.370.000,00	408.407.635,00	(2.962.365,00)	99,28		
03.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	411.370.000,00	408.407.635,00	(2.962.365,00)	99,28		
03.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.370.000,00	408.407.635,00	(2.962.365,00)	99,28		
03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.775.072.000,00	1.622.881.227,00	(152.190.773,00)	91,43		
03.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	1.775.072.000,00	1.622.881.227,00	(152.190.773,00)	91,43		
03.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.775.072.000,00	1.622.881.227,00	(152.190.773,00)	91,43		
03.2.02.22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	84.410.000,00	82.329.847,00	(2.080.153,00)	97,54		
03.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	84.410.000,00	82.329.847,00	(2.080.153,00)	97,54		
03.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.410.000,00	82.329.847,00	(2.080.153,00)	97,54		
03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	590.830.000,00	590.321.000,00	(509.000,00)	99,91		
03.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	590.830.000,00	590.321.000,00	(509.000,00)	99,91		
03.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.830.000,00	590.321.000,00	(509.000,00)	99,91		
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	637.826.400,00	509.547.787,00	(128.278.613,00)	79,89		
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	111.108.000,00	87.551.604,00	(23.556.396,00)	78,80		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.108.000,00	87.551.604,00	(23.556.396,00)	78,80		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.108.000,00	87.551.604,00	(23.556.396,00)	78,80		
03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	419.058.400,00	383.931.183,00	(35.127.217,00)	91,62		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	419.058.400,00	383.931.183,00	(35.127.217,00)	91,62		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.058.400,00	383.931.183,00	(35.127.217,00)	91,62		
03.2.03.12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	107.660.000,00	38.065.000,00	(69.595.000,00)	35,36		
03.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	107.660.000,00	38.065.000,00	(69.595.000,00)	35,36		
03.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.660.000,00	38.065.000,00	(69.595.000,00)	35,36		
03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	567.901.500,00	533.330.835,00	(34.570.665,00)	93,91		
03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	37.745.200,00	32.693.000,00	(5.052.200,00)	86,61		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	37.745.200,00	32.693.000,00	(5.052.200,00)	86,61		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.745.200,00	32.693.000,00	(5.052.200,00)	86,61		
03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	282.677.500,00	279.198.500,00	(3.479.000,00)	98,77		
03.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	282.677.500,00	279.198.500,00	(3.479.000,00)	98,77		
03.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.677.500,00	279.198.500,00	(3.479.000,00)	98,77		
03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	141.315.400,00	138.467.035,00	(2.848.365,00)	97,98		
03.2.04.10.5.1	BELANJA OPERASI	141.315.400,00	138.467.035,00	(2.848.365,00)	97,98		
03.2.04.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.315.400,00	138.467.035,00	(2.848.365,00)	97,98		
03.2.04.11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	70.448.500,00	60.128.100,00	(10.320.400,00)	85,35		
03.2.04.11.5.1	BELANJA OPERASI	70.448.500,00	60.128.100,00	(10.320.400,00)	85,35		
03.2.04.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.448.500,00	60.128.100,00	(10.320.400,00)	85,35		
03.2.04.15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	35.714.900,00	22.844.200,00	(12.870.700,00)	63,96		
03.2.04.15.5.1	BELANJA OPERASI	35.714.900,00	22.844.200,00	(12.870.700,00)	63,96		
03.2.04.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.714.900,00	22.844.200,00	(12.870.700,00)	63,96		
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	1.746.966.500,00	1.581.219.235,00	(165.747.265,00)	90,51		
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.071.201.500,00	941.973.405,00	(129.228.095,00)	87,94		
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.004.241.500,00	902.180.572,00	(102.060.928,00)	89,84		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.004.241.500,00	902.180.572,00	(102.060.928,00)	89,84		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.241.500,00	902.180.572,00	(102.060.928,00)	89,84		
04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	66.960.000,00	39.792.833,00	(27.167.167,00)	59,43		
04.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	66.960.000,00	39.792.833,00	(27.167.167,00)	59,43		
04.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.960.000,00	39.792.833,00	(27.167.167,00)	59,43		
04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	675.765.000,00	639.245.830,00	(36.519.170,00)	94,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35.195.000,00	32.597.000,00	(2.598.000,00)	92,62		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.195.000,00	32.597.000,00	(2.598.000,00)	92,62		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.195.000,00	32.597.000,00	(2.598.000,00)	92,62		
04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	640.570.000,00	606.648.830,00	(33.921.170,00)	94,70		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	640.570.000,00	606.648.830,00	(33.921.170,00)	94,70		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.570.000,00	606.648.830,00	(33.921.170,00)	94,70		
	SURPLUS / DEFISIT	(18.406.742.051,00)	(16.815.048.398,41)	1.591.693.652,59	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(18.406.742.051,00)**	**(16.815.048.398,41)**	**1.591.693.652,59**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1-05.0-00.0-00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.03.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	26.240.018.602,00	20.192.409.993,00	(6.047.608.609,00)	76,95		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	16.439.571.990,00	11.300.550.259,00	(5.139.021.731,00)	68,74		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.415.500,00	169.226.682,00	(3.188.818,00)	98,15		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.740.000,00	68.436.400,00	(303.600,00)	99,56		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.740.000,00	68.436.400,00	(303.600,00)	99,56		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.740.000,00	68.436.400,00	(303.600,00)	99,56		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.776.000,00	31.804.876,00	(971.124,00)	97,04		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	32.776.000,00	31.804.876,00	(971.124,00)	97,04		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.776.000,00	31.804.876,00	(971.124,00)	97,04		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000,00	45.364.575,00	(635.425,00)	98,62		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	45.364.575,00	(635.425,00)	98,62		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.364.575,00	(635.425,00)	98,62		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	14.904.000,00	14.400.831,00	(503.169,00)	96,62		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.904.000,00	14.400.831,00	(503.169,00)	96,62		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.904.000,00	14.400.831,00	(503.169,00)	96,62		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.995.500,00	9.220.000,00	(775.500,00)	92,24		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	9.995.500,00	9.220.000,00	(775.500,00)	92,24		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.500,00	9.220.000,00	(775.500,00)	92,24		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.432.585.240,00	8.469.271.835,00	(4.963.313.405,00)	63,05		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.432.585.240,00	8.469.271.835,00	(4.963.313.405,00)	63,05		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.432.585.240,00	8.469.271.835,00	(4.963.313.405,00)	63,05		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	13.432.585.240,00	8.469.271.835,00	(4.963.313.405,00)	63,05		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.068.030.000,00	1.059.701.884,00	(8.328.116,00)	99,22		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	589.100.000,00	587.499.418,00	(1.600.582,00)	99,73		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	589.100.000,00	587.499.418,00	(1.600.582,00)	99,73		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.100.000,00	587.499.418,00	(1.600.582,00)	99,73		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	478.930.000,00	472.202.466,00	(6.727.534,00)	98,60		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	478.930.000,00	472.202.466,00	(6.727.534,00)	98,60		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.930.000,00	472.202.466,00	(6.727.534,00)	98,60		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.186.800,00	436.914.760,00	(26.272.040,00)	94,33		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.471.200,00	51.498.080,00	(1.973.120,00)	96,31		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.471.200,00	51.498.080,00	(1.973.120,00)	96,31		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.471.200,00	51.498.080,00	(1.973.120,00)	96,31		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.775.000,00	10.700.000,00	(75.000,00)	99,30		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.775.000,00	10.700.000,00	(75.000,00)	99,30		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	10.700.000,00	(75.000,00)	99,30		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000,00	8.220.000,00	(280.000,00)	96,71		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.220.000,00	(280.000,00)	96,71		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.220.000,00	(280.000,00)	96,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.440.600,00	366.496.680,00	(23.943.920,00)	93,87		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	390.440.600,00	366.496.680,00	(23.943.920,00)	93,87		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.440.600,00	366.496.680,00	(23.943.920,00)	93,87		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	955.533.450,00	890.568.090,00	(64.965.360,00)	93,20		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.703.000,00	115.417.999,00	(1.285.001,00)	98,90		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	116.703.000,00	115.417.999,00	(1.285.001,00)	98,90		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.703.000,00	115.417.999,00	(1.285.001,00)	98,90		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	838.830.450,00	775.150.091,00	(63.680.359,00)	92,41		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	125.673.450,00	76.266.091,00	(49.407.359,00)	60,69		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.673.450,00	76.266.091,00	(49.407.359,00)	60,69		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	713.157.000,00	698.884.000,00	(14.273.000,00)	98,00		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	678.360.000,00	664.862.500,00	(13.497.500,00)	98,01		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.797.000,00	34.021.500,00	(775.500,00)	97,77		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.162.400,00	84.553.844,00	(50.608.556,00)	62,56		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.162.400,00	84.553.844,00	(50.608.556,00)	62,56		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	135.162.400,00	84.553.844,00	(50.608.556,00)	62,56		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.162.400,00	84.553.844,00	(50.608.556,00)	62,56		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.658.600,00	190.313.164,00	(22.345.436,00)	89,49		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.628.600,00	183.468.164,00	(19.160.436,00)	90,54		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	202.628.600,00	183.468.164,00	(19.160.436,00)	90,54		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.628.600,00	183.468.164,00	(19.160.436,00)	90,54		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000,00	6.845.000,00	(3.185.000,00)	68,25		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.030.000,00	6.845.000,00	(3.185.000,00)	68,25		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	6.845.000,00	(3.185.000,00)	68,25		
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	9.800.446.612,00	8.891.859.734,00	(908.586.878,00)	90,73		
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.190.756.612,00	8.298.352.034,00	(892.404.578,00)	90,29		
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	457.552.100,00	452.352.100,00	(5.200.000,00)	98,86		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	457.552.100,00	452.352.100,00	(5.200.000,00)	98,86		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.552.100,00	452.352.100,00	(5.200.000,00)	98,86		
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	620.910.500,00	591.686.220,00	(29.224.280,00)	95,29		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	570.910.500,00	542.313.420,00	(28.597.080,00)	94,99		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.910.500,00	542.313.420,00	(28.597.080,00)	94,99		
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.372.800,00	(627.200,00)	98,75		
02.2.01.05.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.372.800,00	(627.200,00)	98,75		
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.625.000,00	93.048.982,00	(3.576.018,00)	96,30		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	96.625.000,00	93.048.982,00	(3.576.018,00)	96,30		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.625.000,00	93.048.982,00	(3.576.018,00)	96,30		
02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	7.211.490.012,00	6.370.198.632,00	(841.291.380,00)	88,33		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	7.211.490.012,00	6.370.198.632,00	(841.291.380,00)	88,33		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.211.490.012,00	6.370.198.632,00	(841.291.380,00)	88,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40.000.000,00	35.261.100,00	(4.738.900,00)	88,15		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	35.261.100,00	(4.738.900,00)	88,15		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.261.100,00	(4.738.900,00)	88,15		
02.2.01.18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	764.179.000,00	755.805.000,00	(8.374.000,00)	98,90		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	164.179.000,00	156.960.000,00	(7.219.000,00)	95,60		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.179.000,00	156.960.000,00	(7.219.000,00)	95,60		
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.845.000,00	(1.155.000,00)	99,81		
02.2.01.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	598.845.000,00	(1.155.000,00)	99,81		
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	609.690.000,00	593.507.700,00	(16.182.300,00)	97,35		
02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	166.185.000,00	163.257.800,00	(2.927.200,00)	98,24		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	166.185.000,00	163.257.800,00	(2.927.200,00)	98,24		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.185.000,00	163.257.800,00	(2.927.200,00)	98,24		
02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49.095.000,00	48.242.900,00	(852.100,00)	98,26		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	49.095.000,00	48.242.900,00	(852.100,00)	98,26		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.095.000,00	48.242.900,00	(852.100,00)	98,26		
02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	394.410.000,00	382.007.000,00	(12.403.000,00)	96,86		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	394.410.000,00	382.007.000,00	(12.403.000,00)	96,86		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.410.000,00	382.007.000,00	(12.403.000,00)	96,86		
	SURPLUS / DEFISIT	(26.240.018.602,00)	(20.192.409.993,00)	6.047.608.609,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(26.240.018.602,00)**	**(20.192.409.993,00)**	**6.047.608.609,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
SKPD : 1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL
Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.01.000 DINAS SOSIAL

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	29.570.772.100,00	24.786.042.916,00	(4.784.729.184,00)	83,82		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12.429.925.100,00	9.243.936.169,00	(3.185.988.931,00)	74,37		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	447.714.500,00	420.962.363,00	(26.752.137,00)	94,02		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.601.000,00	87.865.245,00	(14.735.755,00)	85,64		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	102.601.000,00	87.865.245,00	(14.735.755,00)	85,64		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.601.000,00	87.865.245,00	(14.735.755,00)	85,64		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.757.000,00	36.970.500,00	(2.786.500,00)	92,99		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	39.757.000,00	36.970.500,00	(2.786.500,00)	92,99		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.757.000,00	36.970.500,00	(2.786.500,00)	92,99		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	305.356.500,00	296.126.618,00	(9.229.882,00)	96,98		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	305.356.500,00	296.126.618,00	(9.229.882,00)	96,98		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.356.500,00	296.126.618,00	(9.229.882,00)	96,98		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.091.157.600,00	6.457.491.101,00	(2.633.666.499,00)	71,03		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.970.417.600,00	6.364.251.993,00	(2.606.165.607,00)	70,95		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.970.417.600,00	6.364.251.993,00	(2.606.165.607,00)	70,95		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.950.017.600,00	6.364.251.993,00	(2.585.765.607,00)	71,11		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	0		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.960.000,00	15.200.000,00	(9.760.000,00)	60,90		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.960.000,00	15.200.000,00	(9.760.000,00)	60,90		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	15.200.000,00	(9.760.000,00)	60,90		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.780.000,00	78.039.108,00	(17.740.892,00)	81,48		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	95.780.000,00	78.039.108,00	(17.740.892,00)	81,48		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.780.000,00	78.039.108,00	(17.740.892,00)	81,48		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.028.600,00	87.600.000,00	(42.428.600,00)	67,37		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.028.600,00	57.600.000,00	(42.428.600,00)	57,58		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.028.600,00	57.600.000,00	(42.428.600,00)	57,58		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.028.600,00	57.600.000,00	(42.428.600,00)	57,58		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.018.751.300,00	915.083.364,00	(103.667.936,00)	89,82		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.124.700,00	19.082.300,00	(10.042.400,00)	65,52		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.124.700,00	19.082.300,00	(10.042.400,00)	65,52		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.124.700,00	19.082.300,00	(10.042.400,00)	65,52		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.763.000,00	207.633.900,00	(63.129.100,00)	76,68		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.377.500,00	88.586.400,00	(6.791.100,00)	92,88		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.377.500,00	88.586.400,00	(6.791.100,00)	92,88		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	175.385.500,00	119.047.500,00	(56.338.000,00)	67,88		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.588.500,00	119.047.500,00	(21.541.000,00)	84,68		
01.2.06.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.797.000,00	0,00	(34.797.000,00)	0		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.389.200,00	17.661.400,00	(17.727.800,00)	49,91		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.389.200,00	17.661.400,00	(17.727.800,00)	49,91		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.389.200,00	17.661.400,00	(17.727.800,00)	49,91		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.150.800,00	4.365.000,00	(2.785.800,00)	61,04		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.150.800,00	4.365.000,00	(2.785.800,00)	61,04		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.150.800,00	4.365.000,00	(2.785.800,00)	61,04		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.323.600,00	666.340.764,00	(9.982.836,00)	98,52		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	676.323.600,00	666.340.764,00	(9.982.836,00)	98,52		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.323.600,00	666.340.764,00	(9.982.836,00)	98,52		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540.581.300,00	514.174.000,00	(26.407.300,00)	95,12		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	476.200.000,00	465.722.500,00	(10.477.500,00)	97,80		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	476.200.000,00	465.722.500,00	(10.477.500,00)	97,80		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.200.000,00	465.722.500,00	(10.477.500,00)	97,80		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	64.381.300,00	48.451.500,00	(15.929.800,00)	75,26		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	64.381.300,00	48.451.500,00	(15.929.800,00)	75,26		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.381.300,00	48.451.500,00	(15.929.800,00)	75,26		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.969.600,00	541.953.394,00	(197.016.206,00)	73,34		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.386.200,00	106.755.935,00	(68.630.265,00)	60,87		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	175.386.200,00	106.755.935,00	(68.630.265,00)	60,87		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.386.200,00	106.755.935,00	(68.630.265,00)	60,87		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.583.400,00	435.197.459,00	(128.385.941,00)	77,22		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	563.583.400,00	435.197.459,00	(128.385.941,00)	77,22		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.583.400,00	435.197.459,00	(128.385.941,00)	77,22		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.722.200,00	306.671.947,00	(156.050.253,00)	66,28		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.616.400,00	73.982.777,00	(70.633.623,00)	51,16		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	144.616.400,00	73.982.777,00	(70.633.623,00)	51,16		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.616.400,00	73.982.777,00	(70.633.623,00)	51,16		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.105.800,00	232.689.170,00	(85.416.630,00)	73,15		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	318.105.800,00	232.689.170,00	(85.416.630,00)	73,15		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.105.800,00	232.689.170,00	(85.416.630,00)	73,15		
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	5.932.289.500,00	5.902.262.898,00	(30.026.602,00)	99,49		
02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	153.180.000,00	150.882.000,00	(2.298.000,00)	98,50		
02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	128.930.000,00	128.162.000,00	(768.000,00)	99,40		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.930.000,00	128.162.000,00	(768.000,00)	99,40		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.930.000,00	28.162.000,00	(768.000,00)	97,35		
02.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	24.250.000,00	22.720.000,00	(1.530.000,00)	93,69		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.250.000,00	22.720.000,00	(1.530.000,00)	93,69		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	22.720.000,00	(1.530.000,00)	93,69		
02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.210.000,00	16.607.200,00	(3.602.800,00)	82,17		
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.210.000,00	16.607.200,00	(3.602.800,00)	82,17		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.210.000,00	16.607.200,00	(3.602.800,00)	82,17		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.210.000,00	16.607.200,00	(3.602.800,00)	82,17		
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5.758.899.500,00	5.734.773.698,00	(24.125.802,00)	99,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74.036.500,00	73.966.100,00	(70.400,00)	99,90		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.036.500,00	73.966.100,00	(70.400,00)	99,90		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.036.500,00	73.966.100,00	(70.400,00)	99,90		
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.110.000,00	108.451.200,00	(7.658.800,00)	93,40		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	116.110.000,00	108.451.200,00	(7.658.800,00)	93,40		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.110.000,00	108.451.200,00	(7.658.800,00)	93,40		
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	266.238.000,00	259.894.198,00	(6.343.802,00)	97,62		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	266.238.000,00	259.894.198,00	(6.343.802,00)	97,62		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.238.000,00	259.894.198,00	(6.343.802,00)	97,62		
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.302.515.000,00	5.292.462.200,00	(10.052.800,00)	99,81		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.302.515.000,00	5.292.462.200,00	(10.052.800,00)	99,81		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.410.000,00	58.357.200,00	(10.052.800,00)	85,31		
02.2.03.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.234.105.000,00	5.234.105.000,00	0,00	100,00		
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	2.933.048.600,00	2.421.966.596,00	(511.082.004,00)	82,58		
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.933.048.600,00	2.421.966.596,00	(511.082.004,00)	82,58		
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.330.396.600,00	1.326.281.200,00	(4.115.400,00)	99,69		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.330.396.600,00	1.326.281.200,00	(4.115.400,00)	99,69		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.396.600,00	126.281.200,00	(4.115.400,00)	96,84		
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.02	Penyediaan Sandang	448.326.000,00	228.080.600,00	(220.245.400,00)	50,87		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	448.326.000,00	228.080.600,00	(220.245.400,00)	50,87		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.326.000,00	43.080.600,00	(5.245.400,00)	89,15		
04.2.01.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	185.000.000,00	(215.000.000,00)	46,25		
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	250.471.000,00	206.226.632,00	(44.244.368,00)	82,34		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	250.471.000,00	206.226.632,00	(44.244.368,00)	82,34		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.471.000,00	206.226.632,00	(44.244.368,00)	82,34		
04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	177.602.600,00	137.173.800,00	(40.428.800,00)	77,24		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	177.602.600,00	137.173.800,00	(40.428.800,00)	77,24		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.102.600,00	117.573.800,00	(18.528.800,00)	86,39		
04.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.500.000,00	19.600.000,00	(21.900.000,00)	47,23		
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	401.900.000,00	290.004.253,00	(111.895.747,00)	72,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	401.900.000,00	290.004.253,00	(111.895.747,00)	72,16		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.100.000,00	65.304.253,00	(7.795.747,00)	89,34		
04.2.01.05.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	328.800.000,00	224.700.000,00	(104.100.000,00)	68,34		
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.645.200,00	23.830.000,00	(25.815.200,00)	48,00		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	49.645.200,00	23.830.000,00	(25.815.200,00)	48,00		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.645.200,00	23.830.000,00	(25.815.200,00)	48,00		
04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	274.707.200,00	210.370.111,00	(64.337.089,00)	76,58		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	88.076.200,00	50.177.411,00	(37.898.789,00)	56,97		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.076.200,00	50.177.411,00	(37.898.789,00)	56,97		
04.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	186.631.000,00	160.192.700,00	(26.438.300,00)	85,83		
04.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.631.000,00	160.192.700,00	(26.438.300,00)	85,83		
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	7.356.484.000,00	6.415.282.924,00	(941.201.076,00)	87,21		
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.356.484.000,00	6.415.282.924,00	(941.201.076,00)	87,21		
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.940.000,00	6.265.000,00	(4.675.000,00)	57,27		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.940.000,00	6.265.000,00	(4.675.000,00)	57,27		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000,00	6.265.000,00	(4.675.000,00)	57,27		
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.143.580.000,00	1.118.685.785,00	(24.894.215,00)	97,82		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.143.580.000,00	1.118.685.785,00	(24.894.215,00)	97,82		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.580.000,00	83.085.785,00	(16.494.215,00)	83,44		
05.2.02.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.044.000.000,00	1.035.600.000,00	(8.400.000,00)	99,20		
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.282.234.000,00	4.459.908.589,00	(822.325.411,00)	84,43		
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.282.234.000,00	4.459.908.589,00	(822.325.411,00)	84,43		
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.282.234.000,00	4.123.908.589,00	(158.325.411,00)	96,30		
05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	336.000.000,00	(664.000.000,00)	33,60		
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	919.730.000,00	830.423.550,00	(89.306.450,00)	90,29		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	919.730.000,00	830.423.550,00	(89.306.450,00)	90,29		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.730.000,00	233.423.550,00	(86.306.450,00)	73,01		
05.2.02.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	597.000.000,00	(3.000.000,00)	99,50		
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	797.954.900,00	698.434.329,00	(99.520.571,00)	87,53		
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	288.305.000,00	279.051.831,00	(9.253.169,00)	96,79		
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	288.305.000,00	279.051.831,00	(9.253.169,00)	96,79		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	288.305.000,00	279.051.831,00	(9.253.169,00)	96,79		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.305.000,00	279.051.831,00	(9.253.169,00)	96,79		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	509.649.900,00	419.382.498,00	(90.267.402,00)	82,29		
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	509.649.900,00	419.382.498,00	(90.267.402,00)	82,29		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	509.649.900,00	419.382.498,00	(90.267.402,00)	82,29		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.649.900,00	419.382.498,00	(90.267.402,00)	82,29		
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	121.070.000,00	104.160.000,00	(16.910.000,00)	86,03		
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	121.070.000,00	104.160.000,00	(16.910.000,00)	86,03		
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	121.070.000,00	104.160.000,00	(16.910.000,00)	86,03		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	121.070.000,00	104.160.000,00	(16.910.000,00)	86,03		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.070.000,00	104.160.000,00	(16.910.000,00)	86,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(29.570.772.100,00)	(24.786.042.916,00)	4.784.729.184,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(29.570.772.100,00)**	**(24.786.042.916,00)**	**4.784.729.184,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD : 2-08.2-14.2-13.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Unit Organisasi : 2-08.2-14.2-13.01.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	125.134.672.783,00	121.992.478.785,00	(3.142.193.998,00)	97,49		
00	**Non Program**	0,00	81.340.000,00	81.340.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	81.340.000,00	81.340.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	81.340.000,00	81.340.000,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	81.340.000,00	81.340.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	81.340.000,00	81.340.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	14.608.354.543,00	13.721.243.853,00	(887.110.690,00)	93,93		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	397.599.800,00	397.011.759,00	(588.041,00)	99,85		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	198.641.300,00	198.616.900,00	(24.400,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	198.641.300,00	198.616.900,00	(24.400,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.641.300,00	198.616.900,00	(24.400,00)	99,99		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198.958.500,00	198.394.859,00	(563.641,00)	99,72		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	198.958.500,00	198.394.859,00	(563.641,00)	99,72		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.958.500,00	198.394.859,00	(563.641,00)	99,72		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.102.266.543,00	9.438.076.023,00	(664.190.520,00)	93,43		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.720.254.543,00	9.058.979.622,00	(661.274.921,00)	93,20		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.720.254.543,00	9.058.979.622,00	(661.274.921,00)	93,20		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.720.254.543,00	9.058.979.622,00	(661.274.921,00)	93,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	191.456.000,00	189.592.071,00	(1.863.929,00)	99,03		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	191.456.000,00	189.592.071,00	(1.863.929,00)	99,03		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.456.000,00	189.592.071,00	(1.863.929,00)	99,03		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	190.556.000,00	189.504.330,00	(1.051.670,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	190.556.000,00	189.504.330,00	(1.051.670,00)	99,45		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.556.000,00	189.504.330,00	(1.051.670,00)	99,45		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	391.131.000,00	383.012.750,00	(8.118.250,00)	97,92		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	191.131.000,00	183.063.750,00	(8.067.250,00)	95,78		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	191.131.000,00	183.063.750,00	(8.067.250,00)	95,78		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.131.000,00	183.063.750,00	(8.067.250,00)	95,78		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	199.949.000,00	(51.000,00)	99,97		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.949.000,00	(51.000,00)	99,97		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.949.000,00	(51.000,00)	99,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.865.903.800,00	1.823.648.204,00	(42.255.596,00)	97,74		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.235.100,00	155.647.800,00	(4.587.300,00)	97,14		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	160.235.100,00	155.647.800,00	(4.587.300,00)	97,14		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.235.100,00	155.647.800,00	(4.587.300,00)	97,14		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	741.834.800,00	708.163.250,00	(33.671.550,00)	95,46		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.248.700,00	72.930.000,00	(10.318.700,00)	87,60		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.248.700,00	72.930.000,00	(10.318.700,00)	87,60		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	658.586.100,00	635.233.250,00	(23.352.850,00)	96,45		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	658.586.100,00	635.233.250,00	(23.352.850,00)	96,45		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.915.700,00	77.648.200,00	(267.500,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	77.915.700,00	77.648.200,00	(267.500,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.915.700,00	77.648.200,00	(267.500,00)	99,66		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.434.800,00	6.220.000,00	(2.214.800,00)	73,74		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.434.800,00	6.220.000,00	(2.214.800,00)	73,74		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.434.800,00	6.220.000,00	(2.214.800,00)	73,74		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	877.483.400,00	875.968.954,00	(1.514.446,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	877.483.400,00	875.968.954,00	(1.514.446,00)	99,83		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.483.400,00	875.968.954,00	(1.514.446,00)	99,83		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	608.640.000,00	501.413.000,00	(107.227.000,00)	82,38		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.640.000,00	501.413.000,00	(107.227.000,00)	82,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	608.640.000,00	501.413.000,00	(107.227.000,00)	82,38		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	608.640.000,00	501.413.000,00	(107.227.000,00)	82,38		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.851.800,00	655.775.459,00	(37.076.341,00)	94,65		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000,00	132.613.413,00	(19.186.587,00)	87,36		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.800.000,00	132.613.413,00	(19.186.587,00)	87,36		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.800.000,00	132.613.413,00	(19.186.587,00)	87,36		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.051.800,00	523.162.046,00	(17.889.754,00)	96,69		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	541.051.800,00	523.162.046,00	(17.889.754,00)	96,69		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.051.800,00	523.162.046,00	(17.889.754,00)	96,69		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.961.600,00	522.306.658,00	(27.654.942,00)	94,97		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.082.400,00	164.463.658,00	(23.618.742,00)	87,44		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	188.082.400,00	164.463.658,00	(23.618.742,00)	87,44		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.082.400,00	164.463.658,00	(23.618.742,00)	87,44		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.879.400,00	210.523.000,00	(1.356.400,00)	99,36		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	211.879.400,00	210.523.000,00	(1.356.400,00)	99,36		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.879.400,00	210.523.000,00	(1.356.400,00)	99,36		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.999.800,00	147.320.000,00	(2.679.800,00)	98,21		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	149.999.800,00	147.320.000,00	(2.679.800,00)	98,21		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.800,00	147.320.000,00	(2.679.800,00)	98,21		
02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	1.889.783.700,00	1.351.243.774,00	(538.539.926,00)	71,50		
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	203.425.100,00	195.295.414,00	(8.129.686,00)	96,00		
02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	81.777.100,00	76.303.200,00	(5.473.900,00)	93,31		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	81.777.100,00	76.303.200,00	(5.473.900,00)	93,31		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.777.100,00	76.303.200,00	(5.473.900,00)	93,31		
02.2.01.06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	121.648.000,00	118.992.214,00	(2.655.786,00)	97,82		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	121.648.000,00	118.992.214,00	(2.655.786,00)	97,82		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.648.000,00	118.992.214,00	(2.655.786,00)	97,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.686.358.600,00	1.155.948.360,00	(530.410.240,00)	68,55		
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	136.358.600,00	128.399.800,00	(7.958.800,00)	94,16		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	136.358.600,00	128.399.800,00	(7.958.800,00)	94,16		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.358.600,00	128.399.800,00	(7.958.800,00)	94,16		
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.550.000.000,00	1.027.548.560,00	(522.451.440,00)	66,29		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000.000,00	1.027.548.560,00	(522.451.440,00)	66,29		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	177.548.560,00	(22.451.440,00)	88,77		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.350.000.000,00	850.000.000,00	(500.000.000,00)	62,96		
02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	223.064.000,00	161.474.648,00	(61.589.352,00)	72,39		
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	223.064.000,00	161.474.648,00	(61.589.352,00)	72,39		
02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	223.064.000,00	161.474.648,00	(61.589.352,00)	72,39		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	223.064.000,00	161.474.648,00	(61.589.352,00)	72,39		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.064.000,00	161.474.648,00	(61.589.352,00)	72,39		
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	8.179.672.800,00	7.796.610.629,00	(383.062.171,00)	95,32		
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.104.107.800,00	938.510.529,00	(165.597.271,00)	85,00		
02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	166.648.400,00	158.199.851,00	(8.448.549,00)	94,93		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	166.648.400,00	158.199.851,00	(8.448.549,00)	94,93		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.648.400,00	158.199.851,00	(8.448.549,00)	94,93		
02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	530.973.900,00	392.347.078,00	(138.626.822,00)	73,89		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	400.973.900,00	392.347.078,00	(8.626.822,00)	97,85		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.973.900,00	392.347.078,00	(8.626.822,00)	97,85		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	0		
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	0		
02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	200.177.300,00	194.337.500,00	(5.839.800,00)	97,08		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	200.177.300,00	194.337.500,00	(5.839.800,00)	97,08		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.177.300,00	194.337.500,00	(5.839.800,00)	97,08		
02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	206.308.200,00	193.626.100,00	(12.682.100,00)	93,85		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	206.308.200,00	193.626.100,00	(12.682.100,00)	93,85		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.308.200,00	193.626.100,00	(12.682.100,00)	93,85		
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.075.565.000,00	6.858.100.100,00	(217.464.900,00)	96,93		
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.784.588.700,00	2.762.423.180,00	(22.165.520,00)	99,20		
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.784.588.700,00	2.762.423.180,00	(22.165.520,00)	99,20		
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.784.588.700,00	2.762.423.180,00	(22.165.520,00)	99,20		
02.2.02.15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	324.891.700,00	311.282.339,00	(13.609.361,00)	95,81		
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	324.891.700,00	311.282.339,00	(13.609.361,00)	95,81		
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.891.700,00	311.282.339,00	(13.609.361,00)	95,81		
02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	3.966.084.600,00	3.784.394.581,00	(181.690.019,00)	95,42		
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	3.966.084.600,00	3.784.394.581,00	(181.690.019,00)	95,42		
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.966.084.600,00	3.784.394.581,00	(181.690.019,00)	95,42		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	252.022.600,00	231.618.648,00	(20.403.952,00)	91,90		
03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	211.922.600,00	197.810.867,00	(14.111.733,00)	93,34		
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	211.922.600,00	197.810.867,00	(14.111.733,00)	93,34		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	201.353.000,00	189.110.867,00	(12.242.133,00)	93,92		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.353.000,00	189.110.867,00	(12.242.133,00)	93,92		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	10.569.600,00	8.700.000,00	(1.869.600,00)	82,31		
03.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.569.600,00	8.700.000,00	(1.869.600,00)	82,31		
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.100.000,00	33.807.781,00	(6.292.219,00)	84,31		
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.100.000,00	33.807.781,00	(6.292.219,00)	84,31		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.100.000,00	33.807.781,00	(6.292.219,00)	84,31		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	33.807.781,00	(6.292.219,00)	84,31		
03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	76.625.792.100,00	76.477.694.215,00	(148.097.885,00)	99,81		
03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	76.625.792.100,00	76.477.694.215,00	(148.097.885,00)	99,81		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	76.625.792.100,00	76.477.694.215,00	(148.097.885,00)	99,81		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.687.244.500,00	1.648.786.045,00	(38.458.455,00)	97,72		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.687.244.500,00	1.648.786.045,00	(38.458.455,00)	97,72		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	74.938.547.600,00	74.828.908.170,00	(109.639.430,00)	99,85		
03.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.938.547.600,00	74.828.908.170,00	(109.639.430,00)	99,85		
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.134.721.200,00	1.106.939.292,00	(27.781.908,00)	97,55		
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	606.445.000,00	587.929.200,00	(18.515.800,00)	96,95		
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	507.250.000,00	489.924.200,00	(17.325.800,00)	96,58		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	507.250.000,00	489.924.200,00	(17.325.800,00)	96,58		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.250.000,00	489.924.200,00	(17.325.800,00)	96,58		
03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	99.195.000,00	98.005.000,00	(1.190.000,00)	98,80		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	99.195.000,00	98.005.000,00	(1.190.000,00)	98,80		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.195.000,00	98.005.000,00	(1.190.000,00)	98,80		
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	528.276.200,00	519.010.092,00	(9.266.108,00)	98,25		
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.109.200,00	28.395.964,00	(3.713.236,00)	88,44		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.109.200,00	28.395.964,00	(3.713.236,00)	88,44		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.109.200,00	28.395.964,00	(3.713.236,00)	88,44		
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	279.718.000,00	274.979.428,00	(4.738.572,00)	98,31		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	279.718.000,00	274.979.428,00	(4.738.572,00)	98,31		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.718.000,00	274.979.428,00	(4.738.572,00)	98,31		
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	216.449.000,00	215.634.700,00	(814.300,00)	99,62		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	216.449.000,00	215.634.700,00	(814.300,00)	99,62		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.449.000,00	215.634.700,00	(814.300,00)	99,62		
04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	391.553.000,00	386.782.900,00	(4.770.100,00)	98,78		
04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.946.700,00	150.808.300,00	(2.138.400,00)	98,60		
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	152.946.700,00	150.808.300,00	(2.138.400,00)	98,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	152.946.700,00	150.808.300,00	(2.138.400,00)	98,60		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.946.700,00	150.808.300,00	(2.138.400,00)	98,60		
04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.606.300,00	235.974.600,00	(2.631.700,00)	98,90		
04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.606.300,00	235.974.600,00	(2.631.700,00)	98,90		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	238.606.300,00	235.974.600,00	(2.631.700,00)	98,90		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.606.300,00	235.974.600,00	(2.631.700,00)	98,90		
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	12.064.688.040,00	11.062.997.919,00	(1.001.690.121,00)	91,70		
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.064.688.040,00	11.062.997.919,00	(1.001.690.121,00)	91,70		
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.849.848.240,00	1.778.886.356,00	(70.961.884,00)	96,16		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.849.848.240,00	1.778.886.356,00	(70.961.884,00)	96,16		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.849.848.240,00	1.778.886.356,00	(70.961.884,00)	96,16		
04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1.101.700.000,00	1.086.006.200,00	(15.693.800,00)	98,58		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.101.700.000,00	1.086.006.200,00	(15.693.800,00)	98,58		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.101.700.000,00	1.086.006.200,00	(15.693.800,00)	98,58		
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.637.717.000,00	1.588.361.306,00	(49.355.694,00)	96,99		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.637.717.000,00	1.588.361.306,00	(49.355.694,00)	96,99		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.637.717.000,00	1.588.361.306,00	(49.355.694,00)	96,99		
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.851.876.000,00	5.127.271.438,00	(724.604.562,00)	87,62		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	5.851.876.000,00	5.127.271.438,00	(724.604.562,00)	87,62		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.851.876.000,00	5.127.271.438,00	(724.604.562,00)	87,62		
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	550.632.000,00	544.380.819,00	(6.251.181,00)	98,86		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	550.632.000,00	544.380.819,00	(6.251.181,00)	98,86		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.632.000,00	544.380.819,00	(6.251.181,00)	98,86		
04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	52.897.000,00	50.490.000,00	(2.407.000,00)	95,45		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	52.897.000,00	50.490.000,00	(2.407.000,00)	95,45		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.897.000,00	50.490.000,00	(2.407.000,00)	95,45		
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	599.551.000,00	574.071.800,00	(25.479.200,00)	95,75		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	599.551.000,00	574.071.800,00	(25.479.200,00)	95,75		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.551.000,00	574.071.800,00	(25.479.200,00)	95,75		
04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	287.883.500,00	224.358.460,00	(63.525.040,00)	77,93		
04.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	287.883.500,00	224.358.460,00	(63.525.040,00)	77,93		
04.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.883.500,00	224.358.460,00	(63.525.040,00)	77,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	132.583.300,00	89.171.540,00	(43.411.760,00)	67,26		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	132.583.300,00	89.171.540,00	(43.411.760,00)	67,26		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.583.300,00	89.171.540,00	(43.411.760,00)	67,26		
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	3.069.527.800,00	3.034.275.013,00	(35.252.787,00)	98,85		
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	186.043.100,00	175.917.400,00	(10.125.700,00)	94,56		
04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	52.000.000,00	50.195.000,00	(1.805.000,00)	96,53		
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	50.195.000,00	(1.805.000,00)	96,53		
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	50.195.000,00	(1.805.000,00)	96,53		
04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	21.157.600,00	13.616.900,00	(7.540.700,00)	64,36		
04.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	21.157.600,00	13.616.900,00	(7.540.700,00)	64,36		
04.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.157.600,00	13.616.900,00	(7.540.700,00)	64,36		
04.2.01.28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	112.885.500,00	112.105.500,00	(780.000,00)	99,31		
04.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	112.885.500,00	112.105.500,00	(780.000,00)	99,31		
04.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.885.500,00	112.105.500,00	(780.000,00)	99,31		
04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.883.484.700,00	2.858.357.613,00	(25.127.087,00)	99,13		
04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.767.475.700,00	2.748.465.713,00	(19.009.987,00)	99,31		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.767.475.700,00	2.748.465.713,00	(19.009.987,00)	99,31		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.767.475.700,00	2.748.465.713,00	(19.009.987,00)	99,31		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	116.009.000,00	109.891.900,00	(6.117.100,00)	94,73		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.009.000,00	109.891.900,00	(6.117.100,00)	94,73		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.009.000,00	109.891.900,00	(6.117.100,00)	94,73		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	111.734.200,00	98.710.910,00	(13.023.290,00)	88,34		
05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.734.200,00	98.710.910,00	(13.023.290,00)	88,34		
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	61.365.000,00	61.098.700,00	(266.300,00)	99,57		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.365.000,00	61.098.700,00	(266.300,00)	99,57		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.365.000,00	61.098.700,00	(266.300,00)	99,57		
05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.369.200,00	37.612.210,00	(12.756.990,00)	74,67		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.369.200,00	37.612.210,00	(12.756.990,00)	74,67		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.369.200,00	37.612.210,00	(12.756.990,00)	74,67		
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	5.722.967.100,00	5.657.667.681,00	(65.299.419,00)	98,86		
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.722.967.100,00	5.657.667.681,00	(65.299.419,00)	98,86		
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.997.144.400,00	1.977.277.860,00	(19.866.540,00)	99,01		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.312.294.700,00	1.305.091.291,00	(7.203.409,00)	99,45		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.294.700,00	1.305.091.291,00	(7.203.409,00)	99,45		
05.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	684.849.700,00	672.186.569,00	(12.663.131,00)	98,15		
05.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	684.849.700,00	672.186.569,00	(12.663.131,00)	98,15		
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.143.791.000,00	2.127.039.641,00	(16.751.359,00)	99,22		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.143.791.000,00	2.127.039.641,00	(16.751.359,00)	99,22		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.143.791.000,00	2.127.039.641,00	(16.751.359,00)	99,22		
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	131.962.700,00	119.978.000,00	(11.984.700,00)	90,92		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	131.962.700,00	119.978.000,00	(11.984.700,00)	90,92		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.962.700,00	119.978.000,00	(11.984.700,00)	90,92		
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.450.069.000,00	1.433.372.180,00	(16.696.820,00)	98,85		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.450.069.000,00	1.433.372.180,00	(16.696.820,00)	98,85		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.069.000,00	1.433.372.180,00	(16.696.820,00)	98,85		
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	598.583.200,00	578.220.026,00	(20.363.174,00)	96,60		
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	313.326.100,00	302.188.000,00	(11.138.100,00)	96,45		
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	271.221.100,00	262.146.000,00	(9.075.100,00)	96,65		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	271.221.100,00	262.146.000,00	(9.075.100,00)	96,65		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.221.100,00	262.146.000,00	(9.075.100,00)	96,65		
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	42.105.000,00	40.042.000,00	(2.063.000,00)	95,10		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.105.000,00	40.042.000,00	(2.063.000,00)	95,10		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.105.000,00	40.042.000,00	(2.063.000,00)	95,10		
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	285.257.100,00	276.032.026,00	(9.225.074,00)	96,77		
06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.825.600,00	78.825.000,00	(2.000.600,00)	97,52		
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	80.825.600,00	78.825.000,00	(2.000.600,00)	97,52		
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.825.600,00	78.825.000,00	(2.000.600,00)	97,52		
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.395.800,00	61.506.226,00	(1.889.574,00)	97,02		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	63.395.800,00	61.506.226,00	(1.889.574,00)	97,02		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.395.800,00	61.506.226,00	(1.889.574,00)	97,02		
06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.991.800,00	94.442.800,00	(4.549.000,00)	95,40		
06.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	91.826.500,00	87.292.800,00	(4.533.700,00)	95,06		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.826.500,00	87.292.800,00	(4.533.700,00)	95,06		
06.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	7.165.300,00	7.150.000,00	(15.300,00)	99,79		
06.2.02.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.300,00	7.150.000,00	(15.300,00)	99,79		
06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.043.900,00	41.258.000,00	(785.900,00)	98,13		
06.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.878.600,00	34.108.000,00	(770.600,00)	97,79		
06.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.878.600,00	34.108.000,00	(770.600,00)	97,79		
06.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	7.165.300,00	7.150.000,00	(15.300,00)	99,79		
06.2.02.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.300,00	7.150.000,00	(15.300,00)	99,79		
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	262.208.500,00	245.659.277,00	(16.549.223,00)	93,69		
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.035.000,00	62.361.200,00	(2.673.800,00)	95,89		
07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	65.035.000,00	62.361.200,00	(2.673.800,00)	95,89		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.035.000,00	62.361.200,00	(2.673.800,00)	95,89		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.035.000,00	62.361.200,00	(2.673.800,00)	95,89		
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.481.500,00	94.378.277,00	(9.103.223,00)	91,20		
07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.481.500,00	94.378.277,00	(9.103.223,00)	91,20		
07.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	103.481.500,00	94.378.277,00	(9.103.223,00)	91,20		
07.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.481.500,00	94.378.277,00	(9.103.223,00)	91,20		
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.692.000,00	88.919.800,00	(4.772.200,00)	94,91		
07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	93.692.000,00	88.919.800,00	(4.772.200,00)	94,91		
07.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	93.692.000,00	88.919.800,00	(4.772.200,00)	94,91		
07.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.692.000,00	88.919.800,00	(4.772.200,00)	94,91		
	SURPLUS / DEFISIT	(125.134.672.783,00)	(121.892.478.785,00)	3.242.193.998,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(125.134.672.783,00)**	**(121.892.478.785,00)**	**3.242.193.998,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.09 PANGAN

SKPD : 2-09.3-27.3-25.01 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : 2-09.3-27.3-25.01.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	220.000.000,00	164.798.000,00	(55.202.000,00)	74,91		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	220.000.000,00	164.798.000,00	(55.202.000,00)	74,91		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	220.000.000,00	164.798.000,00	(55.202.000,00)	74,91		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	318.244.367.721,00	284.438.265.877,61	(33.806.101.843,39)	89,38		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	42.573.858.778,00	35.502.404.675,00	(7.071.454.103,00)	83,39		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.020.608.000,00	577.274.658,00	(443.333.342,00)	56,56		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	619.791.000,00	489.325.958,00	(130.465.042,00)	78,95		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	619.791.000,00	489.325.958,00	(130.465.042,00)	78,95		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.791.000,00	489.325.958,00	(130.465.042,00)	78,95		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.335.000,00	6.420.000,00	(3.915.000,00)	62,12		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.335.000,00	6.420.000,00	(3.915.000,00)	62,12		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.335.000,00	6.420.000,00	(3.915.000,00)	62,12		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.865.000,00	7.952.000,00	(4.913.000,00)	61,81		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.865.000,00	7.952.000,00	(4.913.000,00)	61,81		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.865.000,00	7.952.000,00	(4.913.000,00)	61,81		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6.790.000,00	5.750.000,00	(1.040.000,00)	84,68		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.790.000,00	5.750.000,00	(1.040.000,00)	84,68		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	5.750.000,00	(1.040.000,00)	84,68		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.040.000,00	6.013.000,00	(2.027.000,00)	74,79		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.040.000,00	6.013.000,00	(2.027.000,00)	74,79		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	6.013.000,00	(2.027.000,00)	74,79		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.473.000,00	39.439.600,00	(15.033.400,00)	72,40		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	54.473.000,00	39.439.600,00	(15.033.400,00)	72,40		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.473.000,00	39.439.600,00	(15.033.400,00)	72,40		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.114.000,00	4.325.000,00	(789.000,00)	84,57		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.114.000,00	4.325.000,00	(789.000,00)	84,57		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.114.000,00	4.325.000,00	(789.000,00)	84,57		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	9.400.000,00	3.680.000,00	(5.720.000,00)	39,15		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	3.680.000,00	(5.720.000,00)	39,15		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	3.680.000,00	(5.720.000,00)	39,15		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	293.800.000,00	14.369.100,00	(279.430.900,00)	4,89		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	293.800.000,00	14.369.100,00	(279.430.900,00)	4,89		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.800.000,00	14.369.100,00	(279.430.900,00)	4,89		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.124.287.566,00	23.561.297.383,00	(3.562.990.183,00)	86,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.684.041.066,00	23.128.333.751,00	(3.555.707.315,00)	86,67		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.684.041.066,00	23.128.333.751,00	(3.555.707.315,00)	86,67		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	26.602.441.066,00	23.112.013.751,00	(3.490.427.315,00)	86,88		
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	16.320.000,00	(65.280.000,00)	20,00		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	422.770.000,00	417.228.632,00	(5.541.368,00)	98,69		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	422.770.000,00	417.228.632,00	(5.541.368,00)	98,69		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.770.000,00	417.228.632,00	(5.541.368,00)	98,69		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.974.000,00	8.710.000,00	(264.000,00)	97,06		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.974.000,00	8.710.000,00	(264.000,00)	97,06		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.974.000,00	8.710.000,00	(264.000,00)	97,06		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.502.500,00	7.025.000,00	(1.477.500,00)	82,62		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.502.500,00	7.025.000,00	(1.477.500,00)	82,62		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.502.500,00	7.025.000,00	(1.477.500,00)	82,62		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.016.855.500,00	2.906.127.076,00	(110.728.424,00)	96,33		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	321.220.500,00	257.171.500,00	(64.049.000,00)	80,06		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	321.220.500,00	257.171.500,00	(64.049.000,00)	80,06		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.220.500,00	257.171.500,00	(64.049.000,00)	80,06		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.695.635.000,00	2.648.955.576,00	(46.679.424,00)	98,27		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.695.635.000,00	2.648.955.576,00	(46.679.424,00)	98,27		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.695.635.000,00	2.648.955.576,00	(46.679.424,00)	98,27		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.531.561.700,00	2.304.732.981,00	(226.828.719,00)	91,04		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	137.502.000,00	39.866.100,00	(97.635.900,00)	28,99		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	137.502.000,00	39.866.100,00	(97.635.900,00)	28,99		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.502.000,00	39.866.100,00	(97.635.900,00)	28,99		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	957.585.200,00	884.288.300,00	(73.296.900,00)	92,35		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.851.800,00	9.901.200,00	(4.950.600,00)	66,67		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.851.800,00	9.901.200,00	(4.950.600,00)	66,67		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	942.733.400,00	874.387.100,00	(68.346.300,00)	92,75		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.733.400,00	874.387.100,00	(68.346.300,00)	92,75		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	632.673.500,00	625.005.350,00	(7.668.150,00)	98,79		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	65.967.600,00	61.861.000,00	(4.106.600,00)	93,77		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.967.600,00	61.861.000,00	(4.106.600,00)	93,77		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	566.705.900,00	563.144.350,00	(3.561.550,00)	99,37		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	566.705.900,00	563.144.350,00	(3.561.550,00)	99,37		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.086.000,00	73.443.500,00	(13.642.500,00)	84,33		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	87.086.000,00	73.443.500,00	(13.642.500,00)	84,33		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.086.000,00	73.443.500,00	(13.642.500,00)	84,33		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.790.000,00	8.160.000,00	(15.630.000,00)	34,30		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.790.000,00	8.160.000,00	(15.630.000,00)	34,30		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.790.000,00	8.160.000,00	(15.630.000,00)	34,30		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.925.000,00	673.969.731,00	(18.955.269,00)	97,26		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	692.925.000,00	673.969.731,00	(18.955.269,00)	97,26		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.925.000,00	673.969.731,00	(18.955.269,00)	97,26		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.542.308.800,00	3.022.387.370,00	(1.519.921.430,00)	66,54		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.461.000,00	254.067.500,00	(2.393.500,00)	99,07		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	256.461.000,00	254.067.500,00	(2.393.500,00)	99,07		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.461.000,00	254.067.500,00	(2.393.500,00)	99,07		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	329.243.000,00	327.192.220,00	(2.050.780,00)	99,38		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.101.000,00	2.100.000,00	(1.000,00)	99,95		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.101.000,00	2.100.000,00	(1.000,00)	99,95		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	327.142.000,00	325.092.220,00	(2.049.780,00)	99,37		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.142.000,00	325.092.220,00	(2.049.780,00)	99,37		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.821.600,00	213.185.000,00	(4.636.600,00)	97,87		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	217.821.600,00	213.185.000,00	(4.636.600,00)	97,87		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.821.600,00	213.185.000,00	(4.636.600,00)	97,87		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.738.783.200,00	2.227.942.650,00	(1.510.840.550,00)	59,59		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	0		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	0		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	3.680.283.200,00	2.227.942.650,00	(1.452.340.550,00)	60,54		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.254.283.200,00	1.804.267.990,00	(1.450.015.210,00)	55,44		
01.2.07.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	426.000.000,00	423.674.660,00	(2.325.340,00)	99,45		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.880.414.412,00	2.785.278.432,00	(1.095.135.980,00)	71,78		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	6.250.000,00	(200.000,00)	96,90		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	6.250.000,00	(200.000,00)	96,90		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.250.000,00	(200.000,00)	96,90		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.675.500,00	451.191.329,00	(58.484.171,00)	88,53		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	509.675.500,00	451.191.329,00	(58.484.171,00)	88,53		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.675.500,00	451.191.329,00	(58.484.171,00)	88,53		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.364.288.912,00	2.327.837.103,00	(1.036.451.809,00)	69,19		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.364.288.912,00	2.327.837.103,00	(1.036.451.809,00)	69,19		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.364.288.912,00	2.327.837.103,00	(1.036.451.809,00)	69,19		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.822.800,00	345.306.775,00	(112.516.025,00)	75,42		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.880.000,00	238.700.900,00	(106.179.100,00)	69,21		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	344.880.000,00	238.700.900,00	(106.179.100,00)	69,21		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.880.000,00	238.700.900,00	(106.179.100,00)	69,21		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.942.800,00	106.605.875,00	(6.336.925,00)	94,39		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	112.942.800,00	106.605.875,00	(6.336.925,00)	94,39		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.942.800,00	106.605.875,00	(6.336.925,00)	94,39		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	2.507.235.508,00	2.431.887.992,00	(75.347.516,00)	96,99		
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.507.235.508,00	2.431.887.992,00	(75.347.516,00)	96,99		
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.266.637.008,00	2.191.546.749,00	(75.090.259,00)	96,69		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.254.637.008,00	2.186.579.749,00	(68.057.259,00)	96,98		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.254.637.008,00	2.186.579.749,00	(68.057.259,00)	96,98		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	4.967.000,00	(7.033.000,00)	41,39		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	4.967.000,00	(7.033.000,00)	41,39		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	240.598.500,00	240.341.243,00	(257.257,00)	99,89		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	240.598.500,00	240.341.243,00	(257.257,00)	99,89		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.598.500,00	240.341.243,00	(257.257,00)	99,89		
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	69.060.739.000,00	59.477.260.328,00	(9.583.478.672,00)	86,12		
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	59.972.716.400,00	52.793.706.589,00	(7.179.009.811,00)	88,03		
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	59.179.241.900,00	52.043.194.668,00	(7.136.047.232,00)	87,94		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.179.241.900,00	52.043.194.668,00	(7.136.047.232,00)	87,94		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.075.211.500,00	51.952.677.828,00	(7.122.533.672,00)	87,94		
02.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	104.030.400,00	90.516.840,00	(13.513.560,00)	87,01		
02.2.01.03	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	733.744.500,00	692.531.921,00	(41.212.579,00)	94,38		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	457.289.300,00	419.579.240,00	(37.710.060,00)	91,75		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.289.300,00	419.579.240,00	(37.710.060,00)	91,75		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	276.455.200,00	272.952.681,00	(3.502.519,00)	98,73		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.105.200,00	54.219.971,00	(1.885.229,00)	96,64		
02.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.350.000,00	218.732.710,00	(1.617.290,00)	99,27		
02.2.01.06	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	26.350.000,00	25.810.000,00	(540.000,00)	97,95		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.350.000,00	25.810.000,00	(540.000,00)	97,95		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.350.000,00	25.810.000,00	(540.000,00)	97,95		
02.2.01.14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	16.690.000,00	16.320.000,00	(370.000,00)	97,78		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	16.690.000,00	16.320.000,00	(370.000,00)	97,78		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	16.320.000,00	(370.000,00)	97,78		
02.2.01.16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	16.690.000,00	15.850.000,00	(840.000,00)	94,97		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	16.690.000,00	15.850.000,00	(840.000,00)	94,97		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	15.850.000,00	(840.000,00)	94,97		
02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	9.088.022.600,00	6.683.553.739,00	(2.404.468.861,00)	73,54		
02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.810.449.600,00	6.434.765.901,00	(2.375.683.699,00)	73,04		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.535.713.200,00	6.212.372.901,00	(2.323.340.299,00)	72,78		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.173.200,00	1.055.313.183,00	(76.860.017,00)	93,21		
02.2.06.03.5.1.05	Belanja Hibah	7.403.540.000,00	5.157.059.718,00	(2.246.480.282,00)	69,66		
02.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	274.736.400,00	222.393.000,00	(52.343.400,00)	80,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.06.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.736.400,00	222.393.000,00	(52.343.400,00)	80,95		
02.2.06.04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	277.573.000,00	248.787.838,00	(28.785.162,00)	89,63		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	164.573.000,00	136.728.788,00	(27.844.212,00)	83,08		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.573.000,00	136.728.788,00	(27.844.212,00)	83,08		
02.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	113.000.000,00	112.059.050,00	(940.950,00)	99,17		
02.2.06.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.000.000,00	112.059.050,00	(940.950,00)	99,17		
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	6.891.120.400,00	6.799.648.984,00	(91.471.416,00)	98,67		
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5.016.449.400,00	4.987.492.731,00	(28.956.669,00)	99,42		
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	855.132.400,00	853.486.450,00	(1.645.950,00)	99,81		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	629.132.400,00	628.562.700,00	(569.700,00)	99,91		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.132.400,00	628.562.700,00	(569.700,00)	99,91		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	226.000.000,00	224.923.750,00	(1.076.250,00)	99,52		
03.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.000.000,00	224.923.750,00	(1.076.250,00)	99,52		
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.715.144.500,00	1.712.229.204,00	(2.915.296,00)	99,83		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.516.264.500,00	1.514.233.454,00	(2.031.046,00)	99,87		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.264.500,00	1.514.233.454,00	(2.031.046,00)	99,87		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	198.880.000,00	197.995.750,00	(884.250,00)	99,56		
03.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.880.000,00	197.995.750,00	(884.250,00)	99,56		
03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1.810.021.500,00	1.802.845.601,00	(7.175.899,00)	99,60		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.810.021.500,00	1.802.845.601,00	(7.175.899,00)	99,60		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.021.500,00	1.802.845.601,00	(7.175.899,00)	99,60		
03.2.01.09	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	239.886.000,00	239.411.233,00	(474.767,00)	99,80		
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	239.886.000,00	239.411.233,00	(474.767,00)	99,80		
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.886.000,00	239.411.233,00	(474.767,00)	99,80		
03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	104.860.000,00	104.300.000,00	(560.000,00)	99,47		
03.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	104.860.000,00	104.300.000,00	(560.000,00)	99,47		
03.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.860.000,00	104.300.000,00	(560.000,00)	99,47		
03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	210.900.000,00	198.815.243,00	(12.084.757,00)	94,27		
03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	210.900.000,00	198.815.243,00	(12.084.757,00)	94,27		
03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.900.000,00	198.815.243,00	(12.084.757,00)	94,27		
03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	73.110.000,00	69.010.000,00	(4.100.000,00)	94,39		
03.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	73.110.000,00	69.010.000,00	(4.100.000,00)	94,39		
03.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.110.000,00	69.010.000,00	(4.100.000,00)	94,39		
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	865.782.000,00	818.520.680,00	(47.261.320,00)	94,54		
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	87.730.000,00	87.598.000,00	(132.000,00)	99,85		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	87.730.000,00	87.598.000,00	(132.000,00)	99,85		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.730.000,00	87.598.000,00	(132.000,00)	99,85		
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	702.000.000,00	655.579.080,00	(46.420.920,00)	93,39		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	702.000.000,00	655.579.080,00	(46.420.920,00)	93,39		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.000.000,00	655.579.080,00	(46.420.920,00)	93,39		
03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	76.052.000,00	75.343.600,00	(708.400,00)	99,07		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	76.052.000,00	75.343.600,00	(708.400,00)	99,07		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.052.000,00	75.343.600,00	(708.400,00)	99,07		
03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	324.675.000,00	324.154.300,00	(520.700,00)	99,84		
03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	324.675.000,00	324.154.300,00	(520.700,00)	99,84		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	324.675.000,00	324.154.300,00	(520.700,00)	99,84		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.675.000,00	324.154.300,00	(520.700,00)	99,84		
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	684.214.000,00	669.481.273,00	(14.732.727,00)	97,85		
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	100,00		
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	681.569.000,00	666.836.273,00	(14.732.727,00)	97,84		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	681.569.000,00	666.836.273,00	(14.732.727,00)	97,84		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.569.000,00	666.836.273,00	(14.732.727,00)	97,84		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	1.118.470.500,00	1.051.266.467,00	(67.204.033,00)	93,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.118.470.500,00	1.051.266.467,00	(67.204.033,00)	93,99		
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	76.870.500,00	60.820.500,00	(16.050.000,00)	79,12		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	76.870.500,00	60.820.500,00	(16.050.000,00)	79,12		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.870.500,00	60.820.500,00	(16.050.000,00)	79,12		
03.2.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.041.600.000,00	990.445.967,00	(51.154.033,00)	95,09		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.041.600.000,00	990.445.967,00	(51.154.033,00)	95,09		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	22.845.967,00	(26.754.033,00)	46,06		
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	992.000.000,00	967.600.000,00	(24.400.000,00)	97,54		
03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	113.557.779.010,00	100.686.746.489,61	(12.871.032.520,39)	88,67		
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	11.892.156.500,00	5.990.511.779,00	(5.901.644.721,00)	50,37		
03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	11.892.156.500,00	5.990.511.779,00	(5.901.644.721,00)	50,37		
03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	7.392.156.500,00	5.990.511.779,00	(1.401.644.721,00)	81,04		
03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.392.156.500,00	5.990.511.779,00	(1.401.644.721,00)	81,04		
03.2.01.15.5.2	BELANJA MODAL	4.500.000.000,00	0,00	(4.500.000.000,00)	0		
03.2.01.15.5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.500.000.000,00	0,00	(4.500.000.000,00)	0		
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	101.665.622.510,00	94.696.234.710,61	(6.969.387.799,39)	93,14		
03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	4.170.737.600,00	3.517.536.200,00	(653.201.400,00)	84,34		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.170.737.600,00	3.517.536.200,00	(653.201.400,00)	84,34		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.170.737.600,00	3.517.536.200,00	(653.201.400,00)	84,34		
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	86.613.832.900,00	84.114.172.563,61	(2.499.660.336,39)	97,11		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.415.020.900,00	84.114.172.563,61	(2.300.848.336,39)	97,34		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.360.268.900,00	84.114.172.563,61	(2.246.096.336,39)	97,40		
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	54.752.000,00	0,00	(54.752.000,00)	0		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	198.812.000,00	0,00	(198.812.000,00)	0		
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.812.000,00	0,00	(198.812.000,00)	0		
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.443.603.410,00	1.246.421.118,00	(197.182.292,00)	86,34		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	240.150.500,00	234.996.118,00	(5.154.382,00)	97,85		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.150.500,00	234.996.118,00	(5.154.382,00)	97,85		
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	1.203.452.910,00	1.011.425.000,00	(192.027.910,00)	84,04		
03.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.203.452.910,00	1.011.425.000,00	(192.027.910,00)	84,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7.251.009.000,00	3.738.320.674,00	(3.512.688.326,00)	51,56		
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.154.709.000,00	3.648.437.174,00	(3.506.271.826,00)	50,99		
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.549.714.000,00	3.648.437.174,00	(1.901.276.826,00)	65,74		
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	1.604.995.000,00	0,00	(1.604.995.000,00)	0		
03.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	96.300.000,00	89.883.500,00	(6.416.500,00)	93,34		
03.2.02.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.300.000,00	89.883.500,00	(6.416.500,00)	93,34		
03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.047.867.900,00	1.033.044.810,00	(14.823.090,00)	98,59		
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.047.867.900,00	1.033.044.810,00	(14.823.090,00)	98,59		
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.047.867.900,00	1.033.044.810,00	(14.823.090,00)	98,59		
03.2.02.11	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	518.935.700,00	456.777.700,00	(62.158.000,00)	88,02		
03.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	518.935.700,00	456.777.700,00	(62.158.000,00)	88,02		
03.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.935.700,00	456.777.700,00	(62.158.000,00)	88,02		
03.2.02.14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	619.636.000,00	589.961.645,00	(29.674.355,00)	95,21		
03.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	384.992.900,00	356.776.265,00	(28.216.635,00)	92,67		
03.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.992.900,00	356.776.265,00	(28.216.635,00)	92,67		
03.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	234.643.100,00	233.185.380,00	(1.457.720,00)	99,38		
03.2.02.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.059.800,00	34.412.220,00	(647.580,00)	98,15		
03.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.583.300,00	198.773.160,00	(810.140,00)	99,59		
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	630.219.100,00	615.295.610,00	(14.923.490,00)	97,63		
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	187.729.500,00	187.169.500,00	(560.000,00)	99,70		
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	187.729.500,00	187.169.500,00	(560.000,00)	99,70		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	187.729.500,00	187.169.500,00	(560.000,00)	99,70		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.729.500,00	187.169.500,00	(560.000,00)	99,70		
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	442.489.600,00	428.126.110,00	(14.363.490,00)	96,75		
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168.992.900,00	156.651.132,00	(12.341.768,00)	92,70		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.992.900,00	156.651.132,00	(12.341.768,00)	92,70		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.992.900,00	156.651.132,00	(12.341.768,00)	92,70		
04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	261.411.700,00	259.449.978,00	(1.961.722,00)	99,25		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	261.411.700,00	259.449.978,00	(1.961.722,00)	99,25		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.411.700,00	259.449.978,00	(1.961.722,00)	99,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12.085.000,00	12.025.000,00	(60.000,00)	99,50		
04.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.085.000,00	12.025.000,00	(60.000,00)	99,50		
04.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.085.000,00	12.025.000,00	(60.000,00)	99,50		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	56.406.287.675,00	55.280.994.573,00	(1.125.293.102,00)	98,01		
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	786.473.300,00	730.398.089,00	(56.075.211,00)	92,87		
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	153.150.500,00	136.648.995,00	(16.501.505,00)	89,23		
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	153.150.500,00	136.648.995,00	(16.501.505,00)	89,23		
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.150.500,00	136.648.995,00	(16.501.505,00)	89,23		
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	633.322.800,00	593.749.094,00	(39.573.706,00)	93,75		
04.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	633.322.800,00	593.749.094,00	(39.573.706,00)	93,75		
04.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.322.800,00	593.749.094,00	(39.573.706,00)	93,75		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	55.619.814.375,00	54.550.596.484,00	(1.069.217.891,00)	98,08		
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.580.000,00	42.115.000,00	(17.465.000,00)	70,69		
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.580.000,00	42.115.000,00	(17.465.000,00)	70,69		
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.580.000,00	42.115.000,00	(17.465.000,00)	70,69		
04.2.04.09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.560.234.375,00	54.508.481.484,00	(1.051.752.891,00)	98,11		
04.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	55.560.234.375,00	54.508.481.484,00	(1.051.752.891,00)	98,11		
04.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.933.381.150,00	16.052.798.014,00	(880.583.136,00)	94,80		
04.2.04.09.5.1.05	Belanja Hibah	38.626.853.225,00	38.455.683.470,00	(171.169.755,00)	99,56		
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	906.922.450,00	844.403.710,00	(62.518.740,00)	93,11		
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	72.383.750,00	53.443.900,00	(18.939.850,00)	73,83		
04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	72.383.750,00	53.443.900,00	(18.939.850,00)	73,83		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	72.383.750,00	53.443.900,00	(18.939.850,00)	73,83		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.383.750,00	53.443.900,00	(18.939.850,00)	73,83		
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	384.614.600,00	365.313.810,00	(19.300.790,00)	94,98		
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	384.614.600,00	365.313.810,00	(19.300.790,00)	94,98		
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	384.614.600,00	365.313.810,00	(19.300.790,00)	94,98		
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.614.600,00	365.313.810,00	(19.300.790,00)	94,98		
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	449.924.100,00	425.646.000,00	(24.278.100,00)	94,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.04.07	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	117.512.000,00	105.170.000,00	(12.342.000,00)	89,50		
04.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	117.512.000,00	105.170.000,00	(12.342.000,00)	89,50		
04.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.512.000,00	105.170.000,00	(12.342.000,00)	89,50		
04.2.04.08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	332.412.100,00	320.476.000,00	(11.936.100,00)	96,41		
04.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	332.412.100,00	320.476.000,00	(11.936.100,00)	96,41		
04.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.412.100,00	320.476.000,00	(11.936.100,00)	96,41		
05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	282.145.200,00	276.841.906,00	(5.303.294,00)	98,12		
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	282.145.200,00	276.841.906,00	(5.303.294,00)	98,12		
05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3.958.000,00	3.958.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.958.000,00	3.958.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.958.000,00	3.958.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	262.732.200,00	257.797.500,00	(4.934.700,00)	98,12		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	262.732.200,00	257.797.500,00	(4.934.700,00)	98,12		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.732.200,00	257.797.500,00	(4.934.700,00)	98,12		
05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	15.455.000,00	15.086.406,00	(368.594,00)	97,62		
05.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	15.455.000,00	15.086.406,00	(368.594,00)	97,62		
05.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	15.086.406,00	(368.594,00)	97,62		
05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	484.838.300,00	412.637.500,00	(72.200.800,00)	85,11		
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	484.838.300,00	412.637.500,00	(72.200.800,00)	85,11		
05.2.01.09	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	484.838.300,00	412.637.500,00	(72.200.800,00)	85,11		
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	484.838.300,00	412.637.500,00	(72.200.800,00)	85,11		
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.838.300,00	412.637.500,00	(72.200.800,00)	85,11		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	17.999.625.500,00	15.630.174.247,00	(2.369.451.253,00)	86,84		
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	17.999.625.500,00	15.630.174.247,00	(2.369.451.253,00)	86,84		
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	17.549.405.400,00	15.266.369.361,00	(2.283.036.039,00)	86,99		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.549.405.400,00	15.266.369.361,00	(2.283.036.039,00)	86,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.549.405.400,00	15.266.369.361,00	(2.283.036.039,00)	86,99		
05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	93.706.400,00	89.827.200,00	(3.879.200,00)	95,86		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.706.400,00	89.827.200,00	(3.879.200,00)	95,86		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.706.400,00	89.827.200,00	(3.879.200,00)	95,86		
05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	87.675.700,00	33.736.136,00	(53.939.564,00)	38,48		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.675.700,00	33.736.136,00	(53.939.564,00)	38,48		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.675.700,00	33.736.136,00	(53.939.564,00)	38,48		
05.2.01.06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	268.838.000,00	240.241.550,00	(28.596.450,00)	89,36		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	268.838.000,00	240.241.550,00	(28.596.450,00)	89,36		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.838.000,00	240.241.550,00	(28.596.450,00)	89,36		
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	1.323.288.100,00	1.315.599.439,00	(7.688.661,00)	99,42		
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31.557.500,00	31.332.500,00	(225.000,00)	99,29		
06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	31.557.500,00	31.332.500,00	(225.000,00)	99,29		
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.557.500,00	31.332.500,00	(225.000,00)	99,29		
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.557.500,00	31.332.500,00	(225.000,00)	99,29		
06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.291.730.600,00	1.284.266.939,00	(7.463.661,00)	99,42		
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	809.585.200,00	806.247.053,00	(3.338.147,00)	99,59		
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	809.585.200,00	806.247.053,00	(3.338.147,00)	99,59		
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.585.200,00	806.247.053,00	(3.338.147,00)	99,59		
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	482.145.400,00	478.019.886,00	(4.125.514,00)	99,14		
06.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	482.145.400,00	478.019.886,00	(4.125.514,00)	99,14		
06.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.145.400,00	478.019.886,00	(4.125.514,00)	99,14		
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	4.501.838.200,00	4.113.103.957,00	(388.734.243,00)	91,36		
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.501.838.200,00	4.113.103.957,00	(388.734.243,00)	91,36		
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	708.362.700,00	581.636.000,00	(126.726.700,00)	82,11		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	708.362.700,00	581.636.000,00	(126.726.700,00)	82,11		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.362.700,00	581.636.000,00	(126.726.700,00)	82,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	298.431.500,00	279.461.491,00	(18.970.009,00)	93,64		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	298.431.500,00	279.461.491,00	(18.970.009,00)	93,64		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.431.500,00	279.461.491,00	(18.970.009,00)	93,64		
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.113.144.000,00	2.896.706.466,00	(216.437.534,00)	93,05		
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.113.144.000,00	2.896.706.466,00	(216.437.534,00)	93,05		
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.113.144.000,00	2.896.706.466,00	(216.437.534,00)	93,05		
07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	381.900.000,00	355.300.000,00	(26.600.000,00)	93,03		
07.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	381.900.000,00	355.300.000,00	(26.600.000,00)	93,03		
07.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.900.000,00	355.300.000,00	(26.600.000,00)	93,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(318.024.367.721,00)	(284.273.467.877,61)	33.750.899.843,39	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(318.024.367.721,00)**	**(284.273.467.877,61)**	**33.750.899.843,39**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H.ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.10 PERTANAHAN
SKPD : 2-10.2-11.0-00.01 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 2-10.2-11.0-00.01.000 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	150.000.000,00	160.884.000,00	10.884.000,00	107,26		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	150.000.000,00	118.884.000,00	(31.116.000,00)	79,26		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	118.874.000,00	(31.126.000,00)	79,25		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	10.000,00	10.000,00	0	NULL	
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	46.927.180.030,00	40.159.358.275,00	(6.767.821.755,00)	85,58		
00	**Non Program**	0,00	32.702.000,00	32.702.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	32.702.000,00	32.702.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	32.702.000,00	32.702.000,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	32.702.000,00	32.702.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.702.000,00	32.702.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	18.297.555.180,00	16.680.098.844,00	(1.617.456.336,00)	91,16		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.119.000,00	77.673.000,00	(23.446.000,00)	76,81		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.379.000,00	54.829.000,00	(3.550.000,00)	93,92		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.379.000,00	54.829.000,00	(3.550.000,00)	93,92		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.379.000,00	54.829.000,00	(3.550.000,00)	93,92		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.740.000,00	22.844.000,00	(19.896.000,00)	53,45		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.740.000,00	22.844.000,00	(19.896.000,00)	53,45		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.740.000,00	22.844.000,00	(19.896.000,00)	53,45		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.423.805.920,00	9.684.383.574,00	(739.422.346,00)	92,91		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.339.365.920,00	9.604.229.574,00	(735.136.346,00)	92,89		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.339.365.920,00	9.604.229.574,00	(735.136.346,00)	92,89		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.339.365.920,00	9.604.229.574,00	(735.136.346,00)	92,89		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.440.000,00	39.655.000,00	(1.785.000,00)	95,69		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	41.440.000,00	39.655.000,00	(1.785.000,00)	95,69		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.440.000,00	39.655.000,00	(1.785.000,00)	95,69		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43.000.000,00	40.499.000,00	(2.501.000,00)	94,18		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	34.100.000,00	31.599.000,00	(2.501.000,00)	92,67		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	31.599.000,00	(2.501.000,00)	92,67		
01.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.550.000,00	68.220.000,00	(1.330.000,00)	98,09		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.550.000,00	38.220.000,00	(1.330.000,00)	96,64		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.550.000,00	38.220.000,00	(1.330.000,00)	96,64		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	38.220.000,00	(1.330.000,00)	96,64		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.822.826.100,00	2.679.935.637,00	(142.890.463,00)	94,94		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176.572.700,00	167.411.620,00	(9.161.080,00)	94,81		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	176.572.700,00	167.411.620,00	(9.161.080,00)	94,81		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.572.700,00	167.411.620,00	(9.161.080,00)	94,81		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.049.458.800,00	926.963.179,00	(122.495.621,00)	88,33		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	268.160.000,00	251.513.679,00	(16.646.321,00)	93,79		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.160.000,00	251.513.679,00	(16.646.321,00)	93,79		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	781.298.800,00	675.449.500,00	(105.849.300,00)	86,45		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.298.800,00	675.449.500,00	(105.849.300,00)	86,45		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.849.600,00	15.105.500,00	(9.744.100,00)	60,79		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.849.600,00	15.105.500,00	(9.744.100,00)	60,79		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.849.600,00	15.105.500,00	(9.744.100,00)	60,79		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.560.000,00	38.850.000,00	(710.000,00)	98,21		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	39.560.000,00	38.850.000,00	(710.000,00)	98,21		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.560.000,00	38.850.000,00	(710.000,00)	98,21		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.532.385.000,00	1.531.605.338,00	(779.662,00)	99,95		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.532.385.000,00	1.531.605.338,00	(779.662,00)	99,95		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.385.000,00	1.531.605.338,00	(779.662,00)	99,95		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.624.452.400,00	2.424.691.999,00	(199.760.401,00)	92,39		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	651.964.000,00	625.500.000,00	(26.464.000,00)	95,94		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	651.964.000,00	625.500.000,00	(26.464.000,00)	95,94		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651.964.000,00	625.500.000,00	(26.464.000,00)	95,94		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.146.498.000,00	1.076.380.660,00	(70.117.340,00)	93,88		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	1.146.498.000,00	1.076.380.660,00	(70.117.340,00)	93,88		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.146.498.000,00	1.076.380.660,00	(70.117.340,00)	93,88		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	825.990.400,00	722.811.339,00	(103.179.061,00)	87,51		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	179.376.800,00	88.289.400,00	(91.087.400,00)	49,22		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.376.800,00	88.289.400,00	(91.087.400,00)	49,22		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	646.613.600,00	634.521.939,00	(12.091.661,00)	98,13		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.613.600,00	634.521.939,00	(12.091.661,00)	98,13		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.860.410,00	629.222.174,00	(308.638.236,00)	67,09		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.700.000,00	27.115.000,00	(6.585.000,00)	80,46		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.700.000,00	27.115.000,00	(6.585.000,00)	80,46		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	27.115.000,00	(6.585.000,00)	80,46		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.868.900,00	123.305.657,00	(122.563.243,00)	50,15		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	245.868.900,00	123.305.657,00	(122.563.243,00)	50,15		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.868.900,00	123.305.657,00	(122.563.243,00)	50,15		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.998.400,00	37.622.150,00	(13.376.250,00)	73,77		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.998.400,00	37.622.150,00	(13.376.250,00)	73,77		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.998.400,00	37.622.150,00	(13.376.250,00)	73,77		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.293.110,00	441.179.367,00	(166.113.743,00)	72,65		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	607.293.110,00	441.179.367,00	(166.113.743,00)	72,65		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.293.110,00	441.179.367,00	(166.113.743,00)	72,65		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.941.350,00	1.115.972.460,00	(201.968.890,00)	84,68		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.943.200,00	275.832.560,00	(69.110.640,00)	79,96		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	344.943.200,00	275.832.560,00	(69.110.640,00)	79,96		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.943.200,00	275.832.560,00	(69.110.640,00)	79,96		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	972.998.150,00	840.139.900,00	(132.858.250,00)	86,35		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.161.600,00	60.000.000,00	(11.161.600,00)	84,32		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.161.600,00	60.000.000,00	(11.161.600,00)	84,32		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	901.836.550,00	780.139.900,00	(121.696.650,00)	86,51		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	901.836.550,00	780.139.900,00	(121.696.650,00)	86,51		
02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.742.587.500,00	1.165.489.900,00	(577.097.600,00)	66,88		
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	736.921.700,00	642.853.100,00	(94.068.600,00)	87,23		
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	138.887.600,00	124.957.600,00	(13.930.000,00)	89,97		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	136.773.600,00	122.907.600,00	(13.866.000,00)	89,86		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.773.600,00	122.907.600,00	(13.866.000,00)	89,86		
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	2.114.000,00	2.050.000,00	(64.000,00)	96,97		
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.114.000,00	2.050.000,00	(64.000,00)	96,97		
02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	598.034.100,00	517.895.500,00	(80.138.600,00)	86,60		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	598.034.100,00	517.895.500,00	(80.138.600,00)	86,60		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.034.100,00	517.895.500,00	(80.138.600,00)	86,60		
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.005.665.800,00	522.636.800,00	(483.029.000,00)	51,97		
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	59.757.800,00	46.424.800,00	(13.333.000,00)	77,69		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.757.800,00	46.424.800,00	(13.333.000,00)	77,69		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.757.800,00	46.424.800,00	(13.333.000,00)	77,69		
02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	945.908.000,00	476.212.000,00	(469.696.000,00)	50,34		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	937.100.000,00	467.462.000,00	(469.638.000,00)	49,88		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	937.100.000,00	467.462.000,00	(469.638.000,00)	49,88		
02.2.02.05.5.2	BELANJA MODAL	8.808.000,00	8.750.000,00	(58.000,00)	99,34		
02.2.02.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.808.000,00	8.750.000,00	(58.000,00)	99,34		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	2.406.768.450,00	1.966.542.534,00	(440.225.916,00)	81,71		
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.832.045.950,00	1.419.178.034,00	(412.867.916,00)	77,46		
03.2.01.05	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	89.500.000,00	77.909.500,00	(11.590.500,00)	87,05		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	89.500.000,00	77.909.500,00	(11.590.500,00)	87,05		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00	77.909.500,00	(11.590.500,00)	87,05		
03.2.01.07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	102.000.000,00	61.203.800,00	(40.796.200,00)	60,00		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	61.203.800,00	(40.796.200,00)	60,00		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	61.203.800,00	(40.796.200,00)	60,00		
03.2.01.10	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	315.368.700,00	237.469.950,00	(77.898.750,00)	75,30		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	315.368.700,00	237.469.950,00	(77.898.750,00)	75,30		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.368.700,00	237.469.950,00	(77.898.750,00)	75,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	70.000.000,00	67.449.000,00	(2.551.000,00)	96,36		
03.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	67.449.000,00	(2.551.000,00)	96,36		
03.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	67.449.000,00	(2.551.000,00)	96,36		
03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1.255.177.250,00	975.145.784,00	(280.031.466,00)	77,69		
03.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	627.310.300,00	571.789.733,00	(55.520.567,00)	91,15		
03.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.310.300,00	571.789.733,00	(55.520.567,00)	91,15		
03.2.01.15.5.2	BELANJA MODAL	627.866.950,00	403.356.051,00	(224.510.899,00)	64,24		
03.2.01.15.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.125.900,00	378.787.800,00	(29.338.100,00)	92,81		
03.2.01.15.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.741.050,00	24.568.251,00	(195.172.799,00)	11,18		
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	574.722.500,00	547.364.500,00	(27.358.000,00)	95,24		
03.2.03.13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	574.722.500,00	547.364.500,00	(27.358.000,00)	95,24		
03.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	574.722.500,00	547.364.500,00	(27.358.000,00)	95,24		
03.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.722.500,00	547.364.500,00	(27.358.000,00)	95,24		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	11.958.360.200,00	9.190.877.925,00	(2.767.482.275,00)	76,86		
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.958.360.200,00	9.190.877.925,00	(2.767.482.275,00)	76,86		
04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	2.979.655.500,00	2.320.144.938,00	(659.510.562,00)	77,87		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.052.772.100,00	674.693.625,00	(378.078.475,00)	64,09		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.772.100,00	674.693.625,00	(378.078.475,00)	64,09		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.926.883.400,00	1.645.451.313,00	(281.432.087,00)	85,39		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.678.800,00	156.648.650,00	(18.030.150,00)	89,68		
04.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.752.204.600,00	1.488.802.663,00	(263.401.937,00)	84,97		
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.978.704.700,00	6.870.732.987,00	(2.107.971.713,00)	76,52		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.503.276.500,00	3.242.883.234,00	(1.260.393.266,00)	72,01		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.503.276.500,00	3.242.883.234,00	(1.260.393.266,00)	72,01		
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	4.475.428.200,00	3.627.849.753,00	(847.578.447,00)	81,06		
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574.428.000,00	540.750.000,00	(33.678.000,00)	94,14		
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.451.532.600,00	2.650.474.650,00	(801.057.950,00)	76,79		
04.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	449.467.600,00	436.625.103,00	(12.842.497,00)	97,14		
05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	157.190.600,00	13.128.500,00	(144.062.100,00)	8,35		
05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	157.190.600,00	13.128.500,00	(144.062.100,00)	8,35		
05.2.01.07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	157.190.600,00	13.128.500,00	(144.062.100,00)	8,35		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	107.190.600,00	13.128.500,00	(94.062.100,00)	12,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.190.600,00	13.128.500,00	(94.062.100,00)	12,25		
05.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
05.2.01.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	40.100.000,00	26.600.000,00	(13.500.000,00)	66,33		
05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	40.100.000,00	26.600.000,00	(13.500.000,00)	66,33		
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	40.100.000,00	26.600.000,00	(13.500.000,00)	66,33		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	40.100.000,00	26.600.000,00	(13.500.000,00)	66,33		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	26.600.000,00	(13.500.000,00)	66,33		
06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	10.000.300,00	8.063.500,00	(1.936.800,00)	80,63		
06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.300,00	8.063.500,00	(1.936.800,00)	80,63		
06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.300,00	8.063.500,00	(1.936.800,00)	80,63		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.300,00	8.063.500,00	(1.936.800,00)	80,63		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.300,00	8.063.500,00	(1.936.800,00)	80,63		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	299.115.170,00	264.212.000,00	(34.903.170,00)	88,33		
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	299.115.170,00	264.212.000,00	(34.903.170,00)	88,33		
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	87.690.200,00	77.221.000,00	(10.469.200,00)	88,06		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.579.800,00	73.221.000,00	(10.358.800,00)	87,61		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.579.800,00	73.221.000,00	(10.358.800,00)	87,61		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	4.110.400,00	4.000.000,00	(110.400,00)	97,31		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.110.400,00	4.000.000,00	(110.400,00)	97,31		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	211.424.970,00	186.991.000,00	(24.433.970,00)	88,44		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	101.999.850,00	81.941.000,00	(20.058.850,00)	80,33		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.999.850,00	81.941.000,00	(20.058.850,00)	80,33		
06.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	109.425.120,00	105.050.000,00	(4.375.120,00)	96,00		
06.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.425.120,00	105.050.000,00	(4.375.120,00)	96,00		
07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	22.502.400,00	16.155.700,00	(6.346.700,00)	71,80		
07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	22.502.400,00	16.155.700,00	(6.346.700,00)	71,80		
07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	22.502.400,00	16.155.700,00	(6.346.700,00)	71,80		
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.502.400,00	16.155.700,00	(6.346.700,00)	71,80		
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.502.400,00	16.155.700,00	(6.346.700,00)	71,80		
09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	523.944.700,00	210.446.300,00	(313.498.400,00)	40,17		
09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	523.944.700,00	210.446.300,00	(313.498.400,00)	40,17		
09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	523.944.700,00	210.446.300,00	(313.498.400,00)	40,17		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	388.569.500,00	199.981.300,00	(188.588.200,00)	51,47		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.569.500,00	199.981.300,00	(188.588.200,00)	51,47		
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	135.375.200,00	10.465.000,00	(124.910.200,00)	7,73		
09.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.375.200,00	10.465.000,00	(24.910.200,00)	29,58		
09.2.01.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0		
09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	87.178.500,00	78.283.000,00	(8.895.500,00)	89,80		
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.178.500,00	78.283.000,00	(8.895.500,00)	89,80		
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87.178.500,00	78.283.000,00	(8.895.500,00)	89,80		
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	87.178.500,00	78.283.000,00	(8.895.500,00)	89,80		
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.178.500,00	78.283.000,00	(8.895.500,00)	89,80		
10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	719.079.700,00	397.882.622,00	(321.197.078,00)	55,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	719.079.700,00	397.882.622,00	(321.197.078,00)	55,33		
10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	719.079.700,00	397.882.622,00	(321.197.078,00)	55,33		
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	719.079.700,00	397.882.622,00	(321.197.078,00)	55,33		
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.079.700,00	397.882.622,00	(321.197.078,00)	55,33		
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	55.348.800,00	52.469.000,00	(2.879.800,00)	94,80		
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	55.348.800,00	52.469.000,00	(2.879.800,00)	94,80		
10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	55.348.800,00	52.469.000,00	(2.879.800,00)	94,80		
10.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.898.800,00	49.469.000,00	(1.429.800,00)	97,19		
10.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.898.800,00	49.469.000,00	(1.429.800,00)	97,19		
10.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	4.450.000,00	3.000.000,00	(1.450.000,00)	67,42		
10.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	3.000.000,00	(1.450.000,00)	67,42		
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	10.607.448.530,00	10.056.406.450,00	(551.042.080,00)	94,81		
11.2.01	Pengelolaan Sampah	10.607.448.530,00	10.056.406.450,00	(551.042.080,00)	94,81		
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	2.081.866.330,00	1.957.828.799,00	(124.037.531,00)	94,04		
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.153.069.230,00	1.102.275.147,00	(50.794.083,00)	95,59		
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.069.230,00	1.102.275.147,00	(50.794.083,00)	95,59		
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	928.797.100,00	855.553.652,00	(73.243.448,00)	92,11		
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.991.200,00	156.575.950,00	(48.415.250,00)	76,38		
11.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	673.805.900,00	649.971.202,00	(23.834.698,00)	96,46		
11.2.01.07.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.006.500,00	(993.500,00)	98,01		
11.2.01.19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	1.336.519.300,00	1.223.141.850,00	(113.377.450,00)	91,52		
11.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	1.295.846.400,00	1.188.960.850,00	(106.885.550,00)	91,75		
11.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.846.400,00	1.188.960.850,00	(106.885.550,00)	91,75		
11.2.01.19.5.2	BELANJA MODAL	40.672.900,00	34.181.000,00	(6.491.900,00)	84,04		
11.2.01.19.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.672.900,00	34.181.000,00	(6.491.900,00)	84,04		
11.2.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7.189.062.900,00	6.875.435.801,00	(313.627.099,00)	95,64		
11.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	7.153.172.400,00	6.841.858.301,00	(311.314.099,00)	95,65		
11.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.153.172.400,00	6.841.858.301,00	(311.314.099,00)	95,65		
11.2.01.20.5.2	BELANJA MODAL	35.890.500,00	33.577.500,00	(2.313.000,00)	93,56		
11.2.01.20.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.890.500,00	33.577.500,00	(2.313.000,00)	93,56		
	SURPLUS / DEFISIT	(46.777.180.030,00)	(39.998.474.275,00)	6.778.705.755,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(46.777.180.030,00)**	**(39.998.474.275,00)**	**6.778.705.755,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	12.130.490.744,00	10.310.477.904,00	(1.820.012.840,00)	85,00		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.793.513.144,00	8.237.727.808,00	(1.555.785.336,00)	84,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.890.000,00	68.733.100,00	(12.156.900,00)	84,97		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.450.000,00	62.450.000,00	(12.000.000,00)	83,88		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.450.000,00	62.450.000,00	(12.000.000,00)	83,88		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.450.000,00	62.450.000,00	(12.000.000,00)	83,88		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6.440.000,00	6.283.100,00	(156.900,00)	97,56		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	6.440.000,00	6.283.100,00	(156.900,00)	97,56		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	6.283.100,00	(156.900,00)	97,56		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.208.566.184,00	5.892.425.639,00	(1.316.140.545,00)	81,74		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.123.164.224,00	5.888.219.141,00	(1.234.945.083,00)	82,66		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.123.164.224,00	5.888.219.141,00	(1.234.945.083,00)	82,66		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.123.164.224,00	5.888.219.141,00	(1.234.945.083,00)	82,66		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.401.960,00	4.206.498,00	(81.195.462,00)	4,93		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	85.401.960,00	4.206.498,00	(81.195.462,00)	4,93		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.401.960,00	4.206.498,00	(81.195.462,00)	4,93		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.626.000,00	129.124.800,00	(3.501.200,00)	97,36		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.986.000,00	51.894.800,00	(3.091.200,00)	94,38		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.986.000,00	51.894.800,00	(3.091.200,00)	94,38		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.986.000,00	51.894.800,00	(3.091.200,00)	94,38		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.640.000,00	77.230.000,00	(410.000,00)	99,47		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	77.640.000,00	77.230.000,00	(410.000,00)	99,47		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.640.000,00	77.230.000,00	(410.000,00)	99,47		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.933.700,00	634.815.656,00	(9.118.044,00)	98,58		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.019.800,00	6.574.800,00	(445.000,00)	93,66		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.019.800,00	6.574.800,00	(445.000,00)	93,66		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.019.800,00	6.574.800,00	(445.000,00)	93,66		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.983.000,00	30.389.001,00	(5.593.999,00)	84,45		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.264.200,00	13.910.000,00	(4.354.200,00)	76,16		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.264.200,00	13.910.000,00	(4.354.200,00)	76,16		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	17.718.800,00	16.479.001,00	(1.239.799,00)	93,00		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.718.800,00	16.479.001,00	(1.239.799,00)	93,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.788.900,00	27.615.500,00	(2.173.400,00)	92,70		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	29.788.900,00	27.615.500,00	(2.173.400,00)	92,70		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.788.900,00	27.615.500,00	(2.173.400,00)	92,70		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.142.000,00	570.236.355,00	(905.645,00)	99,84		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	571.142.000,00	570.236.355,00	(905.645,00)	99,84		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.142.000,00	570.236.355,00	(905.645,00)	99,84		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.240.000,00	76.235.001,00	(17.004.999,00)	81,76		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.240.000,00	76.235.001,00	(17.004.999,00)	81,76		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	93.240.000,00	76.235.001,00	(17.004.999,00)	81,76		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.240.000,00	76.235.001,00	(17.004.999,00)	81,76		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.239.350,00	155.598.278,00	(66.641.072,00)	70,01		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.070.150,00	119.612.082,00	(66.458.068,00)	64,28		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	186.070.150,00	119.612.082,00	(66.458.068,00)	64,28		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.070.150,00	119.612.082,00	(66.458.068,00)	64,28		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.169.200,00	35.986.196,00	(183.004,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.169.200,00	35.986.196,00	(183.004,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.169.200,00	35.986.196,00	(183.004,00)	99,49		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.017.910,00	1.280.795.334,00	(131.222.576,00)	90,71		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.059.350,00	232.306.300,00	(63.753.050,00)	78,47		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	296.059.350,00	232.306.300,00	(63.753.050,00)	78,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.059.350,00	232.306.300,00	(63.753.050,00)	78,47		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000,00	28.200.000,00	(1.650.000,00)	94,47		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.850.000,00	28.200.000,00	(1.650.000,00)	94,47		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	28.200.000,00	(1.650.000,00)	94,47		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.086.108.560,00	1.020.289.034,00	(65.819.526,00)	93,94		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	380.760.800,00	377.710.800,00	(3.050.000,00)	99,20		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.760.800,00	377.710.800,00	(3.050.000,00)	99,20		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	705.347.760,00	642.578.234,00	(62.769.526,00)	91,10		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.643.200,00	202.020.000,00	(3.623.200,00)	98,24		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.704.560,00	440.558.234,00	(59.146.326,00)	88,16		
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	786.436.500,00	741.641.713,00	(44.794.787,00)	94,30		
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	786.436.500,00	741.641.713,00	(44.794.787,00)	94,30		
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	690.686.000,00	648.606.713,00	(42.079.287,00)	93,91		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	690.686.000,00	648.606.713,00	(42.079.287,00)	93,91		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.686.000,00	648.606.713,00	(42.079.287,00)	93,91		
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.312.000,00	45.520.000,00	(1.792.000,00)	96,21		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.312.000,00	45.520.000,00	(1.792.000,00)	96,21		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.312.000,00	45.520.000,00	(1.792.000,00)	96,21		
02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48.438.500,00	47.515.000,00	(923.500,00)	98,09		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.438.500,00	47.515.000,00	(923.500,00)	98,09		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.438.500,00	47.515.000,00	(923.500,00)	98,09		
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	600.125.100,00	571.207.455,00	(28.917.645,00)	95,18		
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	543.314.600,00	524.757.455,00	(18.557.145,00)	96,58		
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	123.845.900,00	113.465.500,00	(10.380.400,00)	91,62		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.753.100,00	99.465.500,00	(10.287.600,00)	90,63		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.753.100,00	99.465.500,00	(10.287.600,00)	90,63		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	14.092.800,00	14.000.000,00	(92.800,00)	99,34		
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.092.800,00	14.000.000,00	(92.800,00)	99,34		
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	419.468.700,00	411.291.955,00	(8.176.745,00)	98,05		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	419.468.700,00	411.291.955,00	(8.176.745,00)	98,05		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.468.700,00	411.291.955,00	(8.176.745,00)	98,05		
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	56.810.500,00	46.450.000,00	(10.360.500,00)	81,76		
03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	56.810.500,00	46.450.000,00	(10.360.500,00)	81,76		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	56.810.500,00	46.450.000,00	(10.360.500,00)	81,76		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.810.500,00	46.450.000,00	(10.360.500,00)	81,76		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	922.643.500,00	740.605.794,00	(182.037.706,00)	80,27		
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	283.362.000,00	244.047.083,00	(39.314.917,00)	86,13		
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	94.882.000,00	92.603.083,00	(2.278.917,00)	97,60		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.882.000,00	92.603.083,00	(2.278.917,00)	97,60		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.882.000,00	92.603.083,00	(2.278.917,00)	97,60		
04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	188.480.000,00	151.444.000,00	(37.036.000,00)	80,35		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.480.000,00	151.444.000,00	(37.036.000,00)	80,35		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.480.000,00	151.444.000,00	(37.036.000,00)	80,35		
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	484.635.500,00	394.978.834,00	(89.656.666,00)	81,50		
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	202.344.500,00	176.372.642,00	(25.971.858,00)	87,16		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.150.400,00	107.817.142,00	(17.333.258,00)	86,15		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.150.400,00	107.817.142,00	(17.333.258,00)	86,15		
04.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	77.194.100,00	68.555.500,00	(8.638.600,00)	88,81		
04.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.194.100,00	68.555.500,00	(8.638.600,00)	88,81		
04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	282.291.000,00	218.606.192,00	(63.684.808,00)	77,44		
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	282.291.000,00	218.606.192,00	(63.684.808,00)	77,44		
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.291.000,00	218.606.192,00	(63.684.808,00)	77,44		
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.646.000,00	101.579.877,00	(53.066.123,00)	65,69		
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.686.000,00	47.379.815,00	(38.306.185,00)	55,29		
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.686.000,00	47.379.815,00	(38.306.185,00)	55,29		
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.686.000,00	47.379.815,00	(38.306.185,00)	55,29		
04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68.960.000,00	54.200.062,00	(14.759.938,00)	78,60		
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	68.960.000,00	54.200.062,00	(14.759.938,00)	78,60		
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.960.000,00	54.200.062,00	(14.759.938,00)	78,60		
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	27.772.500,00	19.295.134,00	(8.477.366,00)	69,48		
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	27.772.500,00	19.295.134,00	(8.477.366,00)	69,48		
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	27.772.500,00	19.295.134,00	(8.477.366,00)	69,48		
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.772.500,00	19.295.134,00	(8.477.366,00)	69,48		
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.772.500,00	19.295.134,00	(8.477.366,00)	69,48		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.130.490.744,00)	(10.310.477.904,00)	1.820.012.840,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(12.130.490.744,00)**	**(10.310.477.904,00)**	**1.820.012.840,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN
SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.000 DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	75.000.000,00	116.197.000,00	41.197.000,00	154,93		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	75.000.000,00	116.197.000,00	41.197.000,00	154,93		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	116.197.000,00	41.197.000,00	154,93		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	61.223.979.181,00	59.088.993.286,00	(2.134.985.895,00)	96,51		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.695.585.567,00	12.786.897.569,00	(908.687.998,00)	93,37		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.037.500,00	132.837.500,00	(5.200.000,00)	96,23		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.307.500,00	130.042.500,00	(265.000,00)	99,80		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	130.307.500,00	130.042.500,00	(265.000,00)	99,80		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.307.500,00	130.042.500,00	(265.000,00)	99,80		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.730.000,00	2.795.000,00	(4.935.000,00)	36,16		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.730.000,00	2.795.000,00	(4.935.000,00)	36,16		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	2.795.000,00	(4.935.000,00)	36,16		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.629.226.137,00	7.234.086.160,00	(395.139.977,00)	94,82		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.972.137,00	7.052.950.950,00	(392.021.187,00)	94,73		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.444.972.137,00	7.052.950.950,00	(392.021.187,00)	94,73		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.444.972.137,00	7.052.950.950,00	(392.021.187,00)	94,73		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.254.000,00	181.135.210,00	(3.118.790,00)	98,31		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	184.254.000,00	181.135.210,00	(3.118.790,00)	98,31		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.254.000,00	181.135.210,00	(3.118.790,00)	98,31		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.785.750,00	138.383.779,00	(2.401.971,00)	98,29		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.839.750,00	30.830.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.839.750,00	30.830.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.839.750,00	30.830.000,00	(9.750,00)	99,97		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109.946.000,00	107.553.779,00	(2.392.221,00)	97,82		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	109.946.000,00	107.553.779,00	(2.392.221,00)	97,82		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.946.000,00	107.553.779,00	(2.392.221,00)	97,82		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.022.772.350,00	1.954.210.755,00	(68.561.595,00)	96,61		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.901.400,00	9.893.000,00	(1.008.400,00)	90,75		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.085.000,00	9.893.000,00	(192.000,00)	98,10		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.085.000,00	9.893.000,00	(192.000,00)	98,10		
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	816.400,00	0,00	(816.400,00)	0		
01.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	816.400,00	0,00	(816.400,00)	0		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.108.400,00	309.069.499,00	(41.038.901,00)	88,28		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.071.600,00	48.319.999,00	(29.751.601,00)	61,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.071.600,00	48.319.999,00	(29.751.601,00)	61,89		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	272.036.800,00	260.749.500,00	(11.287.300,00)	95,85		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.036.800,00	260.749.500,00	(11.287.300,00)	95,85		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.771.350,00	6.625.300,00	(146.050,00)	97,84		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.771.350,00	6.625.300,00	(146.050,00)	97,84		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.771.350,00	6.625.300,00	(146.050,00)	97,84		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.973.200,00	20.920.000,00	(53.200,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.973.200,00	20.920.000,00	(53.200,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.973.200,00	20.920.000,00	(53.200,00)	99,75		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.118.000,00	8.094.000,00	(24.000,00)	99,70		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.118.000,00	8.094.000,00	(24.000,00)	99,70		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.118.000,00	8.094.000,00	(24.000,00)	99,70		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.625.900.000,00	1.599.608.956,00	(26.291.044,00)	98,38		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.625.900.000,00	1.599.608.956,00	(26.291.044,00)	98,38		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.900.000,00	1.599.608.956,00	(26.291.044,00)	98,38		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.355.000.002,00	(144.999.998,00)	90,33		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000,00	1.355.000.002,00	(144.999.998,00)	90,33		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.355.000.002,00	(144.999.998,00)	90,33		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	1.355.000.002,00	(144.999.998,00)	90,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.414.330,00	1.208.595.911,00	(100.818.419,00)	92,30		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.283.300,00	802.800.000,00	(37.483.300,00)	95,54		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	840.283.300,00	802.800.000,00	(37.483.300,00)	95,54		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.283.300,00	802.800.000,00	(37.483.300,00)	95,54		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.191.000,00	197.014.117,00	(30.176.883,00)	86,72		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	227.191.000,00	197.014.117,00	(30.176.883,00)	86,72		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.191.000,00	197.014.117,00	(30.176.883,00)	86,72		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.940.030,00	208.781.794,00	(33.158.236,00)	86,29		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	241.940.030,00	208.781.794,00	(33.158.236,00)	86,29		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.940.030,00	208.781.794,00	(33.158.236,00)	86,29		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.349.500,00	763.783.462,00	(191.566.038,00)	79,95		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.720.000,00	257.153.692,00	(168.566.308,00)	60,40		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	425.720.000,00	257.153.692,00	(168.566.308,00)	60,40		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.720.000,00	257.153.692,00	(168.566.308,00)	60,40		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.629.500,00	506.629.770,00	(22.999.730,00)	95,66		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	106.600.000,00	95.488.040,00	(11.111.960,00)	89,58		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.600.000,00	95.488.040,00	(11.111.960,00)	89,58		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	423.029.500,00	411.141.730,00	(11.887.770,00)	97,19		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	423.029.500,00	411.141.730,00	(11.887.770,00)	97,19		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	47.528.393.614,00	46.302.095.717,00	(1.226.297.897,00)	97,42		
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.073.486.050,00	39.275.141.561,00	(798.344.489,00)	98,01		
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	29.765.268.000,00	29.674.624.146,00	(90.643.854,00)	99,70		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	201.033.000,00	200.874.546,00	(158.454,00)	99,92		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.033.000,00	200.874.546,00	(158.454,00)	99,92		
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	29.564.235.000,00	29.473.749.600,00	(90.485.400,00)	99,69		
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.464.235.000,00	29.375.104.011,00	(89.130.989,00)	99,70		
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.645.589,00	(1.354.411,00)	98,65		
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.308.218.050,00	9.600.517.415,00	(707.700.635,00)	93,13		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.308.218.050,00	9.600.517.415,00	(707.700.635,00)	93,13		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.308.218.050,00	9.600.517.415,00	(707.700.635,00)	93,13		
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	107.850.000,00	107.550.000,00	(300.000,00)	99,72		
02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	107.850.000,00	107.550.000,00	(300.000,00)	99,72		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	107.850.000,00	107.550.000,00	(300.000,00)	99,72		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.850.000,00	107.550.000,00	(300.000,00)	99,72		
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	616.080.200,00	598.549.424,00	(17.530.776,00)	97,15		
02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	616.080.200,00	598.549.424,00	(17.530.776,00)	97,15		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	616.080.200,00	598.549.424,00	(17.530.776,00)	97,15		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.080.200,00	598.549.424,00	(17.530.776,00)	97,15		
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	333.025.090,00	283.286.570,00	(49.738.520,00)	85,06		
02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	155.611.050,00	126.697.900,00	(28.913.150,00)	81,42		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	155.611.050,00	126.697.900,00	(28.913.150,00)	81,42		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.611.050,00	126.697.900,00	(28.913.150,00)	81,42		
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.400.000,00	25.000.000,00	(4.400.000,00)	85,03		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	25.000.000,00	(4.400.000,00)	85,03		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	25.000.000,00	(4.400.000,00)	85,03		
02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.650.000,00	3.600.000,00	(50.000,00)	98,63		
02.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.600.000,00	(50.000,00)	98,63		
02.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.600.000,00	(50.000,00)	98,63		
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.289.040,00	127.988.670,00	(7.300.370,00)	94,60		
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	114.615.000,00	107.474.810,00	(7.140.190,00)	93,77		
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.615.000,00	107.474.810,00	(7.140.190,00)	93,77		
02.2.05.07.5.2	BELANJA MODAL	20.674.040,00	20.513.860,00	(160.180,00)	99,23		
02.2.05.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.674.040,00	20.513.860,00	(160.180,00)	99,23		
02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	0		
02.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	0		
02.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	0,00	(9.075.000,00)	0		
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.384.619.174,00	5.280.366.450,00	(104.252.724,00)	98,06		
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.898.726.730,00	4.805.111.450,00	(93.615.280,00)	98,09		
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.888.328.250,00	4.802.311.450,00	(86.016.800,00)	98,24		
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.396.152.250,00	1.310.135.450,00	(86.016.800,00)	93,84		
02.2.06.04.5.1.05	Belanja Hibah	3.492.176.000,00	3.492.176.000,00	0,00	100,00		
02.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	10.398.480,00	2.800.000,00	(7.598.480,00)	26,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.398.480,00	2.800.000,00	(7.598.480,00)	26,93		
02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	485.892.444,00	475.255.000,00	(10.637.444,00)	97,81		
02.2.06.15.5.1	BELANJA OPERASI	485.892.444,00	475.255.000,00	(10.637.444,00)	97,81		
02.2.06.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.892.444,00	475.255.000,00	(10.637.444,00)	97,81		
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	79.964.800,00	0,00	(79.964.800,00)	0		
02.2.07.05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0		
02.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0		
02.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0		
02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	55.964.800,00	0,00	(55.964.800,00)	0		
02.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.964.800,00	0,00	(5.964.800,00)	0		
02.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.964.800,00	0,00	(5.964.800,00)	0		
02.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
02.2.07.06.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0		
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	933.368.300,00	757.201.712,00	(176.166.588,00)	81,13		
02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	933.368.300,00	757.201.712,00	(176.166.588,00)	81,13		
02.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	933.368.300,00	757.201.712,00	(176.166.588,00)	81,13		
02.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.368.300,00	757.201.712,00	(176.166.588,00)	81,13		
	SURPLUS / DEFISIT	(61.148.979.181,00)	(58.972.796.286,00)	2.176.182.895,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(61.148.979.181,00)**	**(58.972.796.286,00)**	**2.176.182.895,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Unit Organisasi : 2-16.2-20.2-21.01.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	18.825.000,00	0,00	(18.825.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	18.825.000,00	0,00	(18.825.000,00)	0		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.825.000,00	0,00	(18.825.000,00)	0	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	29.153.841.197,00	27.180.400.637,00	(1.973.440.560,00)	93,23		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.225.083.445,00	9.030.787.352,00	(1.194.296.093,00)	88,32		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.228.700,00	57.228.500,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.536.800,00	46.536.600,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.536.800,00	46.536.600,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.536.800,00	46.536.600,00	(200,00)	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.691.900,00	10.691.900,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.691.900,00	10.691.900,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.691.900,00	10.691.900,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.775.347.661,00	5.913.152.691,00	(862.194.970,00)	87,27		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.775.347.661,00	5.913.152.691,00	(862.194.970,00)	87,27		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.775.347.661,00	5.913.152.691,00	(862.194.970,00)	87,27		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.775.347.661,00	5.913.152.691,00	(862.194.970,00)	87,27		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.776.000,00	189.900.000,00	(8.876.000,00)	95,53		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.776.000,00	22.375.000,00	(1.401.000,00)	94,11		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.776.000,00	22.375.000,00	(1.401.000,00)	94,11		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.776.000,00	22.375.000,00	(1.401.000,00)	94,11		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000,00	167.525.000,00	(7.475.000,00)	95,73		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	167.525.000,00	(7.475.000,00)	95,73		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	167.525.000,00	(7.475.000,00)	95,73		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.606.600,00	1.194.847.250,00	(30.759.350,00)	97,49		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.692.000,00	14.619.200,00	(72.800,00)	99,50		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.692.000,00	14.619.200,00	(72.800,00)	99,50		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.692.000,00	14.619.200,00	(72.800,00)	99,50		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.227.400,00	296.156.397,00	(30.071.003,00)	90,78		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.697.000,00	8.611.200,00	(85.800,00)	99,01		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.697.000,00	8.611.200,00	(85.800,00)	99,01		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	317.530.400,00	287.545.197,00	(29.985.203,00)	90,56		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.530.400,00	287.545.197,00	(29.985.203,00)	90,56		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.877.200,00	14.840.000,00	(37.200,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.877.200,00	14.840.000,00	(37.200,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.877.200,00	14.840.000,00	(37.200,00)	99,75		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000,00	18.372.000,00	(348.000,00)	98,14		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	18.720.000,00	18.372.000,00	(348.000,00)	98,14		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.372.000,00	(348.000,00)	98,14		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	851.090.000,00	850.859.653,00	(230.347,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	851.090.000,00	850.859.653,00	(230.347,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.090.000,00	850.859.653,00	(230.347,00)	99,97		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	659.603.200,00	626.555.685,00	(33.047.515,00)	94,99		
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	659.603.200,00	626.555.685,00	(33.047.515,00)	94,99		
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	75.861.000,00	74.346.789,00	(1.514.211,00)	98,00		
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.861.000,00	74.346.789,00	(1.514.211,00)	98,00		
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	583.742.200,00	552.208.896,00	(31.533.304,00)	94,60		
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	583.742.200,00	552.208.896,00	(31.533.304,00)	94,60		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.851.584,00	770.071.757,00	(247.779.827,00)	75,66		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.403.412,00	189.872.500,00	(20.530.912,00)	90,24		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	210.403.412,00	189.872.500,00	(20.530.912,00)	90,24		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.403.412,00	189.872.500,00	(20.530.912,00)	90,24		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.393.000,00	116.478.840,00	(5.914.160,00)	95,17		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.393.000,00	116.478.840,00	(5.914.160,00)	95,17		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.393.000,00	116.478.840,00	(5.914.160,00)	95,17		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.055.172,00	463.720.417,00	(221.334.755,00)	67,69		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	685.055.172,00	463.720.417,00	(221.334.755,00)	67,69		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.055.172,00	463.720.417,00	(221.334.755,00)	67,69		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.669.700,00	279.031.469,00	(11.638.231,00)	96,00		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.669.700,00	279.031.469,00	(11.638.231,00)	96,00		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	290.669.700,00	279.031.469,00	(11.638.231,00)	96,00		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.669.700,00	279.031.469,00	(11.638.231,00)	96,00		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	11.117.025.400,00	10.748.511.628,00	(368.513.772,00)	96,69		
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.117.025.400,00	10.748.511.628,00	(368.513.772,00)	96,69		
02.2.01.14	Relasi Media	8.671.924.900,00	8.331.592.411,00	(340.332.489,00)	96,08		
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	8.671.924.900,00	8.331.592.411,00	(340.332.489,00)	96,08		
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.671.924.900,00	8.331.592.411,00	(340.332.489,00)	96,08		
02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	425.290.000,00	419.806.294,00	(5.483.706,00)	98,71		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	425.290.000,00	419.806.294,00	(5.483.706,00)	98,71		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.290.000,00	419.806.294,00	(5.483.706,00)	98,71		
02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	696.935.500,00	692.049.085,00	(4.886.415,00)	99,30		
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	696.935.500,00	692.049.085,00	(4.886.415,00)	99,30		
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.935.500,00	692.049.085,00	(4.886.415,00)	99,30		
02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	673.585.000,00	665.720.991,00	(7.864.009,00)	98,83		
02.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	673.585.000,00	665.720.991,00	(7.864.009,00)	98,83		
02.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.585.000,00	665.720.991,00	(7.864.009,00)	98,83		
02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	317.720.000,00	315.122.864,00	(2.597.136,00)	99,18		
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	317.720.000,00	315.122.864,00	(2.597.136,00)	99,18		
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.720.000,00	315.122.864,00	(2.597.136,00)	99,18		
02.2.01.23	Penyusunan Konten	331.570.000,00	324.219.983,00	(7.350.017,00)	97,78		
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	318.570.000,00	311.219.983,00	(7.350.017,00)	97,69		
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.570.000,00	311.219.983,00	(7.350.017,00)	97,69		
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	415.461.700,00	377.378.600,00	(38.083.100,00)	90,83		
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	415.461.700,00	377.378.600,00	(38.083.100,00)	90,83		
02.2.01.07	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	87.980.400,00	76.843.940,00	(11.136.460,00)	87,34		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	83.530.400,00	72.393.940,00	(11.136.460,00)	86,67		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.530.400,00	72.393.940,00	(11.136.460,00)	86,67		
02.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	163.905.700,00	147.946.000,00	(15.959.700,00)	90,26		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	163.905.700,00	147.946.000,00	(15.959.700,00)	90,26		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.905.700,00	147.946.000,00	(15.959.700,00)	90,26		
02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	163.575.600,00	152.588.660,00	(10.986.940,00)	93,28		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	64.926.000,00	60.458.660,00	(4.467.340,00)	93,12		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.926.000,00	60.458.660,00	(4.467.340,00)	93,12		
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	98.649.600,00	92.130.000,00	(6.519.600,00)	93,39		
02.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.649.600,00	92.130.000,00	(6.519.600,00)	93,39		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	272.835.800,00	261.636.330,00	(11.199.470,00)	95,90		
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	272.835.800,00	261.636.330,00	(11.199.470,00)	95,90		
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	272.835.800,00	261.636.330,00	(11.199.470,00)	95,90		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	142.209.300,00	138.516.330,00	(3.692.970,00)	97,40		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.209.300,00	138.516.330,00	(3.692.970,00)	97,40		
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	130.626.500,00	123.120.000,00	(7.506.500,00)	94,25		
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.626.500,00	123.120.000,00	(7.506.500,00)	94,25		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	7.123.434.852,00	6.762.086.727,00	(361.348.125,00)	94,93		
03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.123.434.852,00	6.762.086.727,00	(361.348.125,00)	94,93		
03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5.257.094.852,00	5.149.722.627,00	(107.372.225,00)	97,96		
03.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	3.091.094.852,00	3.008.880.265,00	(82.214.587,00)	97,34		
03.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.091.094.852,00	3.008.880.265,00	(82.214.587,00)	97,34		
03.2.02.21.5.2	BELANJA MODAL	2.166.000.000,00	2.140.842.362,00	(25.157.638,00)	98,84		
03.2.02.21.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	145.132.500,00	(4.867.500,00)	96,76		
03.2.02.21.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.016.000.000,00	1.995.709.862,00	(20.290.138,00)	98,99		
03.2.02.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	296.960.000,00	296.454.000,00	(506.000,00)	99,83		
03.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	296.960.000,00	296.454.000,00	(506.000,00)	99,83		
03.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.960.000,00	296.454.000,00	(506.000,00)	99,83		
03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.569.380.000,00	1.315.910.100,00	(253.469.900,00)	83,85		
03.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	1.569.380.000,00	1.315.910.100,00	(253.469.900,00)	83,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.569.380.000,00	1.315.910.100,00	(253.469.900,00)	83,85		
	SURPLUS / DEFISIT	(29.135.016.197,00)	(27.180.400.637,00)	1.954.615.560,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(29.135.016.197,00)**	**(27.180.400.637,00)**	**1.954.615.560,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.3-32.2-07.02 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA

Unit Organisasi : 2-17.3-32.2-07.02.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	0,00	479.938.804,00	479.938.804,00	0		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	0,00	19.938.804,00	19.938.804,00	0		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	19.938.804,00	19.938.804,00	0		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	85.295.033.398,00	79.622.262.801,35	(5.672.770.596,65)	93,35		
00	**Non Program**	0,00	150.002.900,00	150.002.900,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	150.002.900,00	150.002.900,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	150.002.900,00	150.002.900,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	150.002.900,00	150.002.900,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.002.900,00	150.002.900,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	14.148.752.438,00	11.465.663.272,92	(2.683.089.165,08)	81,04		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.303.000,00	52.623.592,00	(679.408,00)	98,73		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.100.000,00	23.759.716,00	(340.284,00)	98,59		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	23.759.716,00	(340.284,00)	98,59		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	23.759.716,00	(340.284,00)	98,59		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.203.000,00	28.863.876,00	(339.124,00)	98,84		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.203.000,00	28.863.876,00	(339.124,00)	98,84		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.203.000,00	28.863.876,00	(339.124,00)	98,84		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.013.798.138,00	9.019.888.425,00	(1.993.909.713,00)	81,90		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.337.591.430,00	8.754.530.309,00	(1.583.061.121,00)	84,69		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.337.591.430,00	8.754.530.309,00	(1.583.061.121,00)	84,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	10.337.591.430,00	8.754.530.309,00	(1.583.061.121,00)	84,69		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	676.206.708,00	265.358.116,00	(410.848.592,00)	39,24		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	676.206.708,00	265.358.116,00	(410.848.592,00)	39,24		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.206.708,00	265.358.116,00	(410.848.592,00)	39,24		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.960.000,00	144.424.400,00	(4.535.600,00)	96,96		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	148.960.000,00	144.424.400,00	(4.535.600,00)	96,96		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	148.960.000,00	144.424.400,00	(4.535.600,00)	96,96		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.960.000,00	144.424.400,00	(4.535.600,00)	96,96		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	870.471.500,00	848.586.938,00	(21.884.562,00)	97,49		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.877.900,00	8.221.500,00	(656.400,00)	92,61		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.877.900,00	8.221.500,00	(656.400,00)	92,61		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.877.900,00	8.221.500,00	(656.400,00)	92,61		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.339.500,00	83.353.000,00	(8.986.500,00)	90,27		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.989.100,00	76.053.000,00	(1.936.100,00)	97,52		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.989.100,00	76.053.000,00	(1.936.100,00)	97,52		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	14.350.400,00	7.300.000,00	(7.050.400,00)	50,87		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.350.400,00	7.300.000,00	(7.050.400,00)	50,87		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.210.200,00	53.908.500,00	(301.700,00)	99,44		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	54.210.200,00	53.908.500,00	(301.700,00)	99,44		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.210.200,00	53.908.500,00	(301.700,00)	99,44		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.443.500,00	30.353.000,00	(90.500,00)	99,70		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.443.500,00	30.353.000,00	(90.500,00)	99,70		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.443.500,00	30.353.000,00	(90.500,00)	99,70		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.136.000,00	7.850.000,00	(286.000,00)	96,48		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.136.000,00	7.850.000,00	(286.000,00)	96,48		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.136.000,00	7.850.000,00	(286.000,00)	96,48		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.464.400,00	664.900.938,00	(11.563.462,00)	98,29		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	676.464.400,00	664.900.938,00	(11.563.462,00)	98,29		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.464.400,00	664.900.938,00	(11.563.462,00)	98,29		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.252.500,00	478.913.128,00	(157.339.372,00)	75,27		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.475.800,00	269.661.320,00	(54.814.480,00)	83,11		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	324.475.800,00	269.661.320,00	(54.814.480,00)	83,11		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.475.800,00	269.661.320,00	(54.814.480,00)	83,11		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.776.700,00	209.251.808,00	(102.524.892,00)	67,12		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	311.776.700,00	209.251.808,00	(102.524.892,00)	67,12		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.776.700,00	209.251.808,00	(102.524.892,00)	67,12		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.425.967.300,00	921.226.789,92	(504.740.510,08)	64,60		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.780.000,00	35.117.322,00	(93.662.678,00)	27,27		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	128.780.000,00	35.117.322,00	(93.662.678,00)	27,27		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.780.000,00	35.117.322,00	(93.662.678,00)	27,27		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.530.000,00	15.328.878,00	(58.201.122,00)	20,85		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.530.000,00	15.328.878,00	(58.201.122,00)	20,85		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.530.000,00	15.328.878,00	(58.201.122,00)	20,85		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.840.000,00	34.070.000,00	(21.770.000,00)	61,01		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	55.840.000,00	34.070.000,00	(21.770.000,00)	61,01		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.840.000,00	34.070.000,00	(21.770.000,00)	61,01		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	511.976.100,00	429.823.256,89	(82.152.843,11)	83,95		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	80.953.500,00	0,00	(80.953.500,00)	0		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.953.500,00	0,00	(80.953.500,00)	0		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	431.022.600,00	429.823.256,89	(1.199.343,11)	99,72		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	431.022.600,00	429.823.256,89	(1.199.343,11)	99,72		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	655.841.200,00	406.887.333,03	(248.953.866,97)	62,04		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	428.575.200,00	180.303.182,00	(248.272.018,00)	42,07		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.575.200,00	180.303.182,00	(248.272.018,00)	42,07		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	227.266.000,00	226.584.151,03	(681.848,97)	99,70		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.266.000,00	226.584.151,03	(681.848,97)	99,70		
02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	222.172.500,00	219.026.201,00	(3.146.299,00)	98,58		
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	222.172.500,00	219.026.201,00	(3.146.299,00)	98,58		
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	58.537.500,00	57.867.101,00	(670.399,00)	98,85		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	58.537.500,00	57.867.101,00	(670.399,00)	98,85		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.537.500,00	57.867.101,00	(670.399,00)	98,85		
02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	163.635.000,00	161.159.100,00	(2.475.900,00)	98,49		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	163.635.000,00	161.159.100,00	(2.475.900,00)	98,49		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.635.000,00	161.159.100,00	(2.475.900,00)	98,49		
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	49.960.003.710,00	48.939.526.483,00	(1.020.477.227,00)	97,96		
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	48.541.339.310,00	47.647.546.754,00	(893.792.556,00)	98,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	43.445.950.000,00	43.348.068.200,00	(97.881.800,00)	99,77		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.445.950.000,00	43.348.068.200,00	(97.881.800,00)	99,77		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.445.950.000,00	43.348.068.200,00	(97.881.800,00)	99,77		
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	550.400.000,00	487.624.900,00	(62.775.100,00)	88,59		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	550.400.000,00	487.624.900,00	(62.775.100,00)	88,59		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.400.000,00	487.624.900,00	(62.775.100,00)	88,59		
03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.504.271.668,00	1.466.160.270,00	(38.111.398,00)	97,47		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.768.928,00	219.340.120,00	(4.428.808,00)	98,02		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.768.928,00	219.340.120,00	(4.428.808,00)	98,02		
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.280.502.740,00	1.246.820.150,00	(33.682.590,00)	97,37		
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.254.042.740,00	1.220.596.400,00	(33.446.340,00)	97,33		
03.2.01.03.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	26.460.000,00	26.223.750,00	(236.250,00)	99,11		
03.2.01.04	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	3.040.717.642,00	2.345.693.384,00	(695.024.258,00)	77,14		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.899.495.642,00	2.205.158.384,00	(694.337.258,00)	76,05		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.899.495.642,00	2.205.158.384,00	(694.337.258,00)	76,05		
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	141.222.000,00	140.535.000,00	(687.000,00)	99,51		
03.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.222.000,00	140.535.000,00	(687.000,00)	99,51		
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	790.829.600,00	695.047.810,00	(95.781.790,00)	87,89		
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	790.829.600,00	695.047.810,00	(95.781.790,00)	87,89		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	790.829.600,00	695.047.810,00	(95.781.790,00)	87,89		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.829.600,00	695.047.810,00	(95.781.790,00)	87,89		
03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	211.253.800,00	199.784.159,00	(11.469.641,00)	94,57		
03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	211.253.800,00	199.784.159,00	(11.469.641,00)	94,57		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	211.253.800,00	199.784.159,00	(11.469.641,00)	94,57		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.253.800,00	199.784.159,00	(11.469.641,00)	94,57		
03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	416.581.000,00	397.147.760,00	(19.433.240,00)	95,34		
03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	416.581.000,00	397.147.760,00	(19.433.240,00)	95,34		
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	416.581.000,00	397.147.760,00	(19.433.240,00)	95,34		
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.581.000,00	397.147.760,00	(19.433.240,00)	95,34		
03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	478.297.400,00	470.123.883,00	(8.173.517,00)	98,29		
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	478.297.400,00	470.123.883,00	(8.173.517,00)	98,29		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	478.297.400,00	470.123.883,00	(8.173.517,00)	98,29		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	478.297.400,00	470.123.883,00	(8.173.517,00)	98,29		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.297.400,00	470.123.883,00	(8.173.517,00)	98,29		
03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	762.080.000,00	750.532.344,82	(11.547.655,18)	98,48		
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	762.080.000,00	750.532.344,82	(11.547.655,18)	98,48		
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.190.000,00	186.179.887,00	(7.010.113,00)	96,37		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	193.190.000,00	186.179.887,00	(7.010.113,00)	96,37		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.190.000,00	186.179.887,00	(7.010.113,00)	96,37		
03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	568.890.000,00	564.352.457,82	(4.537.542,18)	99,20		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	343.890.000,00	340.431.817,76	(3.458.182,24)	98,99		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.890.000,00	340.431.817,76	(3.458.182,24)	98,99		
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	225.000.000,00	223.920.640,06	(1.079.359,94)	99,52		
03.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	223.920.640,06	(1.079.359,94)	99,52		
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	1.103.758.700,00	1.016.454.264,00	(87.304.436,00)	92,09		
04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	944.669.500,00	879.238.566,00	(65.430.934,00)	93,07		
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	233.797.500,00	181.871.100,00	(51.926.400,00)	77,79		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	208.797.500,00	157.451.100,00	(51.346.400,00)	75,41		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.797.500,00	157.451.100,00	(51.346.400,00)	75,41		
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.420.000,00	(580.000,00)	97,68		
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.420.000,00	(580.000,00)	97,68		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	118.478.000,00	113.212.869,00	(5.265.131,00)	95,56		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	118.478.000,00	113.212.869,00	(5.265.131,00)	95,56		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.478.000,00	113.212.869,00	(5.265.131,00)	95,56		
04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	40.876.000,00	33.667.080,00	(7.208.920,00)	82,36		
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	40.876.000,00	33.667.080,00	(7.208.920,00)	82,36		
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.876.000,00	33.667.080,00	(7.208.920,00)	82,36		
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	551.518.000,00	550.487.517,00	(1.030.483,00)	99,81		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	551.518.000,00	550.487.517,00	(1.030.483,00)	99,81		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.518.000,00	550.487.517,00	(1.030.483,00)	99,81		
04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.427.000,00	2.675.000,00	(2.752.000,00)	49,29		
04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5.427.000,00	2.675.000,00	(2.752.000,00)	49,29		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.427.000,00	2.675.000,00	(2.752.000,00)	49,29		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.427.000,00	2.675.000,00	(2.752.000,00)	49,29		
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	129.118.200,00	111.270.698,00	(17.847.502,00)	86,18		
04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	68.143.500,00	67.443.200,00	(700.300,00)	98,97		
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	68.143.500,00	67.443.200,00	(700.300,00)	98,97		
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.143.500,00	67.443.200,00	(700.300,00)	98,97		
04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	60.974.700,00	43.827.498,00	(17.147.202,00)	71,88		
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.974.700,00	43.827.498,00	(17.147.202,00)	71,88		
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.974.700,00	43.827.498,00	(17.147.202,00)	71,88		
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	24.544.000,00	23.270.000,00	(1.274.000,00)	94,81		
04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.544.000,00	23.270.000,00	(1.274.000,00)	94,81		
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.544.000,00	23.270.000,00	(1.274.000,00)	94,81		
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.544.000,00	23.270.000,00	(1.274.000,00)	94,81		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	381.750.000,00	369.324.556,61	(12.425.443,39)	96,75		
04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	381.750.000,00	369.324.556,61	(12.425.443,39)	96,75		
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	105.331.000,00	95.743.100,00	(9.587.900,00)	90,90		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.331.000,00	95.743.100,00	(9.587.900,00)	90,90		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.331.000,00	95.743.100,00	(9.587.900,00)	90,90		
04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	276.419.000,00	273.581.456,61	(2.837.543,39)	98,97		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	276.419.000,00	273.581.456,61	(2.837.543,39)	98,97		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.419.000,00	273.581.456,61	(2.837.543,39)	98,97		
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	15.024.999.800,00	13.211.563.498,00	(1.813.436.302,00)	87,93		
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	232.458.400,00	175.645.074,00	(56.813.326,00)	75,56		
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	64.664.300,00	57.005.974,00	(7.658.326,00)	88,16		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	64.664.300,00	57.005.974,00	(7.658.326,00)	88,16		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.664.300,00	57.005.974,00	(7.658.326,00)	88,16		
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	167.794.100,00	118.639.100,00	(49.155.000,00)	70,71		
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	167.794.100,00	118.639.100,00	(49.155.000,00)	70,71		
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.794.100,00	118.639.100,00	(49.155.000,00)	70,71		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	14.792.541.400,00	13.035.918.424,00	(1.756.622.976,00)	88,12		
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.724.400,00	303.386.822,00	(17.337.578,00)	94,59		
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	320.724.400,00	303.386.822,00	(17.337.578,00)	94,59		
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.724.400,00	303.386.822,00	(17.337.578,00)	94,59		
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.575.000,00	5.961.400,00	(2.613.600,00)	69,52		
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.575.000,00	5.961.400,00	(2.613.600,00)	69,52		
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	5.961.400,00	(2.613.600,00)	69,52		
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	255.542.000,00	233.667.200,00	(21.874.800,00)	91,44		
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	255.542.000,00	233.667.200,00	(21.874.800,00)	91,44		
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.542.000,00	233.667.200,00	(21.874.800,00)	91,44		
05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14.207.700.000,00	12.492.903.002,00	(1.714.796.998,00)	87,93		
05.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.207.700.000,00	12.492.903.002,00	(1.714.796.998,00)	87,93		
05.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.207.700.000,00	12.492.903.002,00	(1.714.796.998,00)	87,93		
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	131.730.000,00	130.736.000,00	(994.000,00)	99,25		
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	131.730.000,00	130.736.000,00	(994.000,00)	99,25		
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	131.730.000,00	130.736.000,00	(994.000,00)	99,25		
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	131.730.000,00	130.736.000,00	(994.000,00)	99,25		
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.730.000,00	130.736.000,00	(994.000,00)	99,25		
07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	2.591.953.850,00	2.433.107.634,00	(158.846.216,00)	93,87		
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.591.953.850,00	2.433.107.634,00	(158.846.216,00)	93,87		
07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	430.414.400,00	414.802.900,00	(15.611.500,00)	96,37		
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	430.414.400,00	414.802.900,00	(15.611.500,00)	96,37		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.414.400,00	414.802.900,00	(15.611.500,00)	96,37		
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.754.831.750,00	1.652.970.479,00	(101.861.271,00)	94,20		
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.671.750,00	1.598.786.359,00	(1.885.391,00)	99,88		
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.671.750,00	1.598.786.359,00	(1.885.391,00)	99,88		
07.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	154.160.000,00	54.184.120,00	(99.975.880,00)	35,15		
07.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.160.000,00	54.184.120,00	(99.975.880,00)	35,15		
07.2.01.14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	406.707.700,00	365.334.255,00	(41.373.445,00)	89,83		
07.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	406.707.700,00	365.334.255,00	(41.373.445,00)	89,83		
07.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.707.700,00	365.334.255,00	(41.373.445,00)	89,83		
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	489.535.000,00	466.201.764,00	(23.333.236,00)	95,23		
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	489.535.000,00	466.201.764,00	(23.333.236,00)	95,23		
08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	489.535.000,00	466.201.764,00	(23.333.236,00)	95,23		
08.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	489.535.000,00	466.201.764,00	(23.333.236,00)	95,23		
08.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.535.000,00	466.201.764,00	(23.333.236,00)	95,23		
	SURPLUS / DEFISIT	(85.295.033.398,00)	(79.142.323.997,35)	6.152.709.400,65	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(85.295.033.398,00)**	**(79.142.323.997,35)**	**6.152.709.400,65**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	500.000.000,00	547.848.439,00	47.848.439,00	109,57		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	500.000.000,00	547.848.439,00	47.848.439,00	109,57		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	450.000.000,00	455.768.439,00	5.768.439,00	101,28		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000,00	92.080.000,00	42.080.000,00	184,16	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	13.369.605.871,00	11.982.214.125,00	(1.387.391.746,00)	89,62		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.935.573.471,00	7.322.217.528,00	(613.355.943,00)	92,27		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.631.000,00	292.101.060,00	(7.529.940,00)	97,49		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.303.000,00	87.610.500,00	(692.500,00)	99,22		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	88.303.000,00	87.610.500,00	(692.500,00)	99,22		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.303.000,00	87.610.500,00	(692.500,00)	99,22		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.838.000,00	72.707.849,00	(130.151,00)	99,82		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	72.838.000,00	72.707.849,00	(130.151,00)	99,82		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.838.000,00	72.707.849,00	(130.151,00)	99,82		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.170.000,00	28.179.522,00	(1.990.478,00)	93,40		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	30.170.000,00	28.179.522,00	(1.990.478,00)	93,40		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.170.000,00	28.179.522,00	(1.990.478,00)	93,40		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	108.320.000,00	103.603.189,00	(4.716.811,00)	95,65		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	108.320.000,00	103.603.189,00	(4.716.811,00)	95,65		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.320.000,00	103.603.189,00	(4.716.811,00)	95,65		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.545.858.871,00	5.023.613.798,00	(522.245.073,00)	90,58		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.139.001.807,00	4.689.253.446,00	(449.748.361,00)	91,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.139.001.807,00	4.689.253.446,00	(449.748.361,00)	91,25		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.139.001.807,00	4.689.253.446,00	(449.748.361,00)	91,25		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	364.110.064,00	294.074.465,00	(70.035.599,00)	80,77		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	364.110.064,00	294.074.465,00	(70.035.599,00)	80,77		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.110.064,00	294.074.465,00	(70.035.599,00)	80,77		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28.687.000,00	26.642.200,00	(2.044.800,00)	92,87		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.687.000,00	26.642.200,00	(2.044.800,00)	92,87		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.687.000,00	26.642.200,00	(2.044.800,00)	92,87		
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.060.000,00	13.643.687,00	(416.313,00)	97,04		
01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	14.060.000,00	13.643.687,00	(416.313,00)	97,04		
01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	13.643.687,00	(416.313,00)	97,04		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.009.500,00	256.829.125,00	(4.180.375,00)	98,40		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	184.676.500,00	182.113.125,00	(2.563.375,00)	98,61		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	184.676.500,00	182.113.125,00	(2.563.375,00)	98,61		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.676.500,00	182.113.125,00	(2.563.375,00)	98,61		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.333.000,00	74.716.000,00	(1.617.000,00)	97,88		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	76.333.000,00	74.716.000,00	(1.617.000,00)	97,88		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.333.000,00	74.716.000,00	(1.617.000,00)	97,88		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.518.100,00	500.699.032,00	(9.819.068,00)	98,08		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.345.500,00	44.964.100,00	(381.400,00)	99,16		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.345.500,00	44.964.100,00	(381.400,00)	99,16		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.345.500,00	44.964.100,00	(381.400,00)	99,16		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.013.700,00	62.857.800,00	(155.900,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.013.700,00	62.857.800,00	(155.900,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.013.700,00	62.857.800,00	(155.900,00)	99,75		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.118.400,00	9.580.000,00	(538.400,00)	94,68		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.118.400,00	9.580.000,00	(538.400,00)	94,68		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.118.400,00	9.580.000,00	(538.400,00)	94,68		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.040.500,00	383.297.132,00	(8.743.368,00)	97,77		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	392.040.500,00	383.297.132,00	(8.743.368,00)	97,77		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.040.500,00	383.297.132,00	(8.743.368,00)	97,77		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	426.657.500,00	403.023.001,00	(23.634.499,00)	94,46		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.396.000,00	141.186.000,00	(8.210.000,00)	94,50		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	149.396.000,00	141.186.000,00	(8.210.000,00)	94,50		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.396.000,00	141.186.000,00	(8.210.000,00)	94,50		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	14.675.000,00	(325.000,00)	97,83		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.675.000,00	(325.000,00)	97,83		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.675.000,00	(325.000,00)	97,83		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.261.500,00	247.162.001,00	(15.099.499,00)	94,24		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	262.261.500,00	247.162.001,00	(15.099.499,00)	94,24		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.261.500,00	247.162.001,00	(15.099.499,00)	94,24		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.822.400,00	451.273.310,00	(39.549.090,00)	91,94		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.865.000,00	219.138.710,00	(32.726.290,00)	87,01		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	251.865.000,00	219.138.710,00	(32.726.290,00)	87,01		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.865.000,00	219.138.710,00	(32.726.290,00)	87,01		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.957.400,00	232.134.600,00	(6.822.800,00)	97,14		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	238.957.400,00	232.134.600,00	(6.822.800,00)	97,14		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.957.400,00	232.134.600,00	(6.822.800,00)	97,14		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.076.100,00	394.678.202,00	(6.397.898,00)	98,40		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.686.900,00	316.723.202,00	(2.963.698,00)	99,07		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	319.686.900,00	316.723.202,00	(2.963.698,00)	99,07		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.686.900,00	316.723.202,00	(2.963.698,00)	99,07		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.389.200,00	77.955.000,00	(3.434.200,00)	95,78		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	81.389.200,00	77.955.000,00	(3.434.200,00)	95,78		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.389.200,00	77.955.000,00	(3.434.200,00)	95,78		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	319.270.000,00	288.960.278,00	(30.309.722,00)	90,51		
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.230.000,00	60.956.852,00	(6.273.148,00)	90,67		
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.720.000,00	37.333.152,00	(3.386.848,00)	91,68		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.720.000,00	37.333.152,00	(3.386.848,00)	91,68		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.720.000,00	37.333.152,00	(3.386.848,00)	91,68		
02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	26.510.000,00	23.623.700,00	(2.886.300,00)	89,11		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.510.000,00	23.623.700,00	(2.886.300,00)	89,11		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.510.000,00	23.623.700,00	(2.886.300,00)	89,11		
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	252.040.000,00	228.003.426,00	(24.036.574,00)	90,46		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	121.770.000,00	113.615.901,00	(8.154.099,00)	93,30		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	121.770.000,00	113.615.901,00	(8.154.099,00)	93,30		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.770.000,00	113.615.901,00	(8.154.099,00)	93,30		
02.2.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	30.090.000,00	24.664.725,00	(5.425.275,00)	81,97		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	30.090.000,00	24.664.725,00	(5.425.275,00)	81,97		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.090.000,00	24.664.725,00	(5.425.275,00)	81,97		
02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.180.000,00	89.722.800,00	(10.457.200,00)	89,56		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	25.180.000,00	15.122.800,00	(10.057.200,00)	60,06		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.180.000,00	15.122.800,00	(10.057.200,00)	60,06		
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47		
02.2.02.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47		
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	542.993.500,00	517.163.864,00	(25.829.636,00)	95,24		
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	542.993.500,00	517.163.864,00	(25.829.636,00)	95,24		
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	255.214.300,00	244.862.000,00	(10.352.300,00)	95,94		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	255.214.300,00	244.862.000,00	(10.352.300,00)	95,94		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.214.300,00	244.862.000,00	(10.352.300,00)	95,94		
03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	287.779.200,00	272.301.864,00	(15.477.336,00)	94,62		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	287.779.200,00	272.301.864,00	(15.477.336,00)	94,62		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.779.200,00	272.301.864,00	(15.477.336,00)	94,62		
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	3.908.092.900,00	3.409.557.525,00	(498.535.375,00)	87,24		
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3.908.092.900,00	3.409.557.525,00	(498.535.375,00)	87,24		
04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.528.519.900,00	3.038.059.585,00	(490.460.315,00)	86,10		
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	994.883.700,00	785.964.287,00	(208.919.413,00)	79,00		
04.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	15.166.600,00	12.725.000,00	(2.441.600,00)	83,90		
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.717.100,00	773.239.287,00	(206.477.813,00)	78,92		
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	2.533.636.200,00	2.252.095.298,00	(281.540.902,00)	88,89		
04.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.533.636.200,00	2.252.095.298,00	(281.540.902,00)	88,89		
04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	138.603.000,00	135.686.540,00	(2.916.460,00)	97,90		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	112.603.000,00	110.686.541,00	(1.916.459,00)	98,30		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.603.000,00	110.686.541,00	(1.916.459,00)	98,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	26.000.000,00	24.999.999,00	(1.000.001,00)	96,15		
04.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	24.999.999,00	(1.000.001,00)	96,15		
04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	240.970.000,00	235.811.400,00	(5.158.600,00)	97,86		
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	240.970.000,00	235.811.400,00	(5.158.600,00)	97,86		
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.970.000,00	235.811.400,00	(5.158.600,00)	97,86		
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	275.310.000,00	263.562.400,00	(11.747.600,00)	95,73		
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	275.310.000,00	263.562.400,00	(11.747.600,00)	95,73		
05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22.360.000,00	16.463.200,00	(5.896.800,00)	73,63		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	22.360.000,00	16.463.200,00	(5.896.800,00)	73,63		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.360.000,00	16.463.200,00	(5.896.800,00)	73,63		
05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	102.547.000,00	99.482.200,00	(3.064.800,00)	97,01		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	102.547.000,00	99.482.200,00	(3.064.800,00)	97,01		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.547.000,00	99.482.200,00	(3.064.800,00)	97,01		
05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	150.403.000,00	147.617.000,00	(2.786.000,00)	98,15		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	150.403.000,00	147.617.000,00	(2.786.000,00)	98,15		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.403.000,00	147.617.000,00	(2.786.000,00)	98,15		
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	388.366.000,00	180.752.530,00	(207.613.470,00)	46,54		
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	388.366.000,00	180.752.530,00	(207.613.470,00)	46,54		
06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	388.366.000,00	180.752.530,00	(207.613.470,00)	46,54		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.366.000,00	180.752.530,00	(207.613.470,00)	46,54		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.366.000,00	180.752.530,00	(207.613.470,00)	46,54		
	SURPLUS / DEFISIT	(12.869.605.871,00)	(11.434.365.686,00)	1.435.240.185,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(12.869.605.871,00)**	**(11.434.365.686,00)**	**1.435.240.185,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SKPD : 2-19.3-26.0-00.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Unit Organisasi : 2-19.3-26.0-00.01.000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	42.899.181.296,00	36.642.974.521,00	(6.256.206.775,00)	85,42		
00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0		
00.0.00.00.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	15.644.221.978,00	12.561.447.762,00	(3.082.774.216,00)	80,29		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	810.622.784,00	557.067.969,00	(253.554.815,00)	68,72		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	627.790.384,00	412.072.618,00	(215.717.766,00)	65,64		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	627.790.384,00	412.072.618,00	(215.717.766,00)	65,64		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.790.384,00	412.072.618,00	(215.717.766,00)	65,64		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.412.000,00	36.171.100,00	(2.240.900,00)	94,17		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.412.000,00	36.171.100,00	(2.240.900,00)	94,17		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.412.000,00	36.171.100,00	(2.240.900,00)	94,17		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.270.400,00	95.994.251,00	(11.276.149,00)	89,49		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	107.270.400,00	95.994.251,00	(11.276.149,00)	89,49		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.270.400,00	95.994.251,00	(11.276.149,00)	89,49		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	18.575.000,00	9.170.000,00	(9.405.000,00)	49,37		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	18.575.000,00	9.170.000,00	(9.405.000,00)	49,37		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	9.170.000,00	(9.405.000,00)	49,37		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.575.000,00	3.660.000,00	(14.915.000,00)	19,70		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	18.575.000,00	3.660.000,00	(14.915.000,00)	19,70		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	3.660.000,00	(14.915.000,00)	19,70		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.638.060.044,00	6.118.232.509,00	(1.519.827.535,00)	80,10		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.451.014.544,00	5.932.807.609,00	(1.518.206.935,00)	79,62		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.451.014.544,00	5.932.807.609,00	(1.518.206.935,00)	79,62		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.451.014.544,00	5.932.807.609,00	(1.518.206.935,00)	79,62		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.915.500,00	63.746.800,00	(168.700,00)	99,74		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	63.915.500,00	63.746.800,00	(168.700,00)	99,74		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.915.500,00	63.746.800,00	(168.700,00)	99,74		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.560.000,00	77.773.900,00	(786.100,00)	99,00		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	78.560.000,00	77.773.900,00	(786.100,00)	99,00		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.560.000,00	77.773.900,00	(786.100,00)	99,00		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	44.570.000,00	43.904.200,00	(665.800,00)	98,51		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	44.570.000,00	43.904.200,00	(665.800,00)	98,51		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.570.000,00	43.904.200,00	(665.800,00)	98,51		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.575.054.000,00	1.354.090.900,00	(220.963.100,00)	85,97		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	174.734.000,00	159.253.600,00	(15.480.400,00)	91,14		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	174.734.000,00	159.253.600,00	(15.480.400,00)	91,14		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.734.000,00	159.253.600,00	(15.480.400,00)	91,14		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.400.320.000,00	1.194.837.300,00	(205.482.700,00)	85,33		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.400.320.000,00	1.194.837.300,00	(205.482.700,00)	85,33		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.320.000,00	1.194.837.300,00	(205.482.700,00)	85,33		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.410.200,00	697.228.135,00	(105.182.065,00)	86,89		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.962.800,00	26.731.000,00	(231.800,00)	99,14		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.962.800,00	26.731.000,00	(231.800,00)	99,14		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.962.800,00	26.731.000,00	(231.800,00)	99,14		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.951.200,00	197.030.499,00	(40.920.701,00)	82,80		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.632.200,00	32.066.000,00	(20.566.200,00)	60,92		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.632.200,00	32.066.000,00	(20.566.200,00)	60,92		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	185.319.000,00	164.964.499,00	(20.354.501,00)	89,02		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.319.000,00	164.964.499,00	(20.354.501,00)	89,02		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.012.200,00	42.888.600,00	(16.123.600,00)	72,68		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	59.012.200,00	42.888.600,00	(16.123.600,00)	72,68		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.012.200,00	42.888.600,00	(16.123.600,00)	72,68		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000,00	15.870.000,00	(1.410.000,00)	91,84		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	15.870.000,00	(1.410.000,00)	91,84		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	15.870.000,00	(1.410.000,00)	91,84		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.204.000,00	414.708.036,00	(46.495.964,00)	89,92		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	461.204.000,00	414.708.036,00	(46.495.964,00)	89,92		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.204.000,00	414.708.036,00	(46.495.964,00)	89,92		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.964.160.400,00	1.654.190.950,00	(309.969.450,00)	84,22		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.714.528.000,00	1.565.985.999,00	(148.542.001,00)	91,34		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	1.714.528.000,00	1.565.985.999,00	(148.542.001,00)	91,34		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.714.528.000,00	1.565.985.999,00	(148.542.001,00)	91,34		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.694.800,00	39.405.000,00	(60.289.800,00)	39,53		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	0		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	98.334.800,00	39.405.000,00	(58.929.800,00)	40,07		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.334.800,00	39.405.000,00	(58.929.800,00)	40,07		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.937.600,00	48.799.951,00	(101.137.649,00)	32,55		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	51.087.200,00	48.799.951,00	(2.287.249,00)	95,52		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.087.200,00	48.799.951,00	(2.287.249,00)	95,52		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	98.850.400,00	0,00	(98.850.400,00)	0		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.850.400,00	0,00	(98.850.400,00)	0		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.914.850,00	1.730.455.401,00	(443.459.449,00)	79,60		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	76,47		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	76,47		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	76,47		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.538.750,00	149.098.032,00	(52.440.718,00)	73,98		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	201.538.750,00	149.098.032,00	(52.440.718,00)	73,98		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.538.750,00	149.098.032,00	(52.440.718,00)	73,98		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.955.376.100,00	1.568.357.369,00	(387.018.731,00)	80,21		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.955.376.100,00	1.568.357.369,00	(387.018.731,00)	80,21		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.376.100,00	1.568.357.369,00	(387.018.731,00)	80,21		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.999.700,00	450.181.898,00	(229.817.802,00)	66,20		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.876.500,00	187.031.898,00	(85.844.602,00)	68,54		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	272.876.500,00	187.031.898,00	(85.844.602,00)	68,54		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.876.500,00	187.031.898,00	(85.844.602,00)	68,54		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.710.000,00	44.250.000,00	(460.000,00)	98,97		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.710.000,00	44.250.000,00	(460.000,00)	98,97		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.710.000,00	44.250.000,00	(460.000,00)	98,97		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.686.000,00	218.900.000,00	(93.786.000,00)	70,01		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	312.686.000,00	218.900.000,00	(93.786.000,00)	70,01		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.686.000,00	218.900.000,00	(93.786.000,00)	70,01		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.727.200,00	0,00	(49.727.200,00)	0		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	49.727.200,00	0,00	(49.727.200,00)	0		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.727.200,00	0,00	(49.727.200,00)	0		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	1.741.044.400,00	1.720.021.119,00	(21.023.281,00)	98,79		
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	614.465.900,00	608.428.659,00	(6.037.241,00)	99,02		
02.2.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	164.615.000,00	164.287.400,00	(327.600,00)	99,80		
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	164.615.000,00	164.287.400,00	(327.600,00)	99,80		
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.615.000,00	164.287.400,00	(327.600,00)	99,80		
02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	389.630.000,00	388.103.059,00	(1.526.941,00)	99,61		
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	389.630.000,00	388.103.059,00	(1.526.941,00)	99,61		
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.630.000,00	88.103.059,00	(1.526.941,00)	98,30		
02.2.01.11.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	60.220.900,00	56.038.200,00	(4.182.700,00)	93,05		
02.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	60.220.900,00	56.038.200,00	(4.182.700,00)	93,05		
02.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.220.900,00	56.038.200,00	(4.182.700,00)	93,05		
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.126.578.500,00	1.111.592.460,00	(14.986.040,00)	98,67		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1.126.578.500,00	1.111.592.460,00	(14.986.040,00)	98,67		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.126.578.500,00	1.111.592.460,00	(14.986.040,00)	98,67		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.578.500,00	122.122.100,00	(4.456.400,00)	96,48		
02.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	989.470.360,00	(10.529.640,00)	98,95		
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	2.901.212.518,00	2.844.024.354,00	(57.188.164,00)	98,03		
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.901.212.518,00	2.844.024.354,00	(57.188.164,00)	98,03		
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.828.655.318,00	1.809.155.255,00	(19.500.063,00)	98,93		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	338.127.700,00	336.910.065,00	(1.217.635,00)	99,64		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.127.700,00	336.910.065,00	(1.217.635,00)	99,64		
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	1.490.527.618,00	1.472.245.190,00	(18.282.428,00)	98,77		
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.490.527.618,00	1.472.245.190,00	(18.282.428,00)	98,77		
02.2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	599.172.500,00	563.060.602,00	(36.111.898,00)	93,97		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	599.172.500,00	563.060.602,00	(36.111.898,00)	93,97		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.172.500,00	563.060.602,00	(36.111.898,00)	93,97		
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	473.384.700,00	471.808.497,00	(1.576.203,00)	99,67		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	473.384.700,00	471.808.497,00	(1.576.203,00)	99,67		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.384.700,00	471.808.497,00	(1.576.203,00)	99,67		
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	18.429.872.500,00	16.172.599.493,00	(2.257.273.007,00)	87,75		
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.873.610.000,00	6.164.162.916,00	(1.709.447.084,00)	78,29		
03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	7.870.310.000,00	6.160.942.916,00	(1.709.367.084,00)	78,28		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.870.310.000,00	6.160.942.916,00	(1.709.367.084,00)	78,28		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.310.000,00	6.160.942.916,00	(1.709.367.084,00)	78,28		
03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,58		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,58		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.070.069.600,00	1.006.038.892,00	(64.030.708,00)	94,02		
03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.070.069.600,00	1.006.038.892,00	(64.030.708,00)	94,02		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.070.069.600,00	1.006.038.892,00	(64.030.708,00)	94,02		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.069.600,00	1.006.038.892,00	(64.030.708,00)	94,02		
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.277.485.000,00	1.222.707.944,00	(54.777.056,00)	95,71		
03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	183.929.000,00	132.520.660,00	(51.408.340,00)	72,05		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	183.929.000,00	132.520.660,00	(51.408.340,00)	72,05		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.929.000,00	132.520.660,00	(51.408.340,00)	72,05		
03.2.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.093.556.000,00	1.090.187.284,00	(3.368.716,00)	99,69		
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.093.556.000,00	1.090.187.284,00	(3.368.716,00)	99,69		
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.556.000,00	1.090.187.284,00	(3.368.716,00)	99,69		
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.202.080.000,00	6.052.569.200,00	(149.510.800,00)	97,59		
03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	6.202.080.000,00	6.052.569.200,00	(149.510.800,00)	97,59		
03.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.202.080.000,00	6.052.569.200,00	(149.510.800,00)	97,59		
03.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.080.000,00	302.569.200,00	(149.510.800,00)	66,93		
03.2.04.05.5.1.05	Belanja Hibah	5.750.000.000,00	5.750.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.006.627.900,00	1.727.120.541,00	(279.507.359,00)	86,07		
03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.272.720.100,00	1.160.475.859,00	(112.244.241,00)	91,18		
03.2.05.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.272.720.100,00	1.160.475.859,00	(112.244.241,00)	91,18		
03.2.05.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.720.100,00	860.475.859,00	(112.244.241,00)	88,46		
03.2.05.06.5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00		
03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	733.907.800,00	566.644.682,00	(167.263.118,00)	77,21		
03.2.05.08.5.1	BELANJA OPERASI	718.155.300,00	551.504.682,00	(166.650.618,00)	76,79		
03.2.05.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.155.300,00	551.504.682,00	(166.650.618,00)	76,79		
03.2.05.08.5.2	BELANJA MODAL	15.752.500,00	15.140.000,00	(612.500,00)	96,11		
03.2.05.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.752.500,00	15.140.000,00	(612.500,00)	96,11		
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	2.408.263.300,00	2.381.341.933,00	(26.921.367,00)	98,88		
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.408.263.300,00	2.381.341.933,00	(26.921.367,00)	98,88		
03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.108.473.300,00	2.089.515.543,00	(18.957.757,00)	99,10		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.108.473.300,00	2.089.515.543,00	(18.957.757,00)	99,10		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.108.473.300,00	2.089.515.543,00	(18.957.757,00)	99,10		
03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	299.790.000,00	291.826.390,00	(7.963.610,00)	97,34		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	299.790.000,00	291.826.390,00	(7.963.610,00)	97,34		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.790.000,00	291.826.390,00	(7.963.610,00)	97,34		
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	344.212.000,00	342.067.160,00	(2.144.840,00)	99,38		
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	344.212.000,00	342.067.160,00	(2.144.840,00)	99,38		
04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	344.212.000,00	342.067.160,00	(2.144.840,00)	99,38		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	344.212.000,00	342.067.160,00	(2.144.840,00)	99,38		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.212.000,00	93.540.060,00	(671.940,00)	99,29		
04.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	248.527.100,00	(1.472.900,00)	99,41		
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	1.430.354.600,00	621.472.700,00	(808.881.900,00)	43,45		
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.430.354.600,00	621.472.700,00	(808.881.900,00)	43,45		
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.010.656.300,00	204.755.700,00	(805.900.600,00)	20,26		
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.010.656.300,00	204.755.700,00	(805.900.600,00)	20,26		
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.656.300,00	204.755.700,00	(805.900.600,00)	20,26		
05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	419.698.300,00	416.717.000,00	(2.981.300,00)	99,29		
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	419.698.300,00	416.717.000,00	(2.981.300,00)	99,29		
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.698.300,00	416.717.000,00	(2.981.300,00)	99,29		
	SURPLUS / DEFISIT	(42.899.181.296,00)	(36.642.974.521,00)	6.256.206.775,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(42.899.181.296,00)**	**(36.642.974.521,00)**	**6.256.206.775,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN
SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	20.610.536.189,00	18.946.727.340,00	(1.663.808.849,00)	91,93		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.288.840.939,00	12.070.922.868,00	(1.217.918.071,00)	90,84		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.825.200,00	297.091.863,00	(1.733.337,00)	99,42		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	214.435.800,00	213.342.663,00	(1.093.137,00)	99,49		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	214.435.800,00	213.342.663,00	(1.093.137,00)	99,49		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.435.800,00	213.342.663,00	(1.093.137,00)	99,49		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.105.500,00	71.604.200,00	(501.300,00)	99,30		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.105.500,00	71.604.200,00	(501.300,00)	99,30		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.105.500,00	71.604.200,00	(501.300,00)	99,30		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.807.300,00	10.745.000,00	(62.300,00)	99,42		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.807.300,00	10.745.000,00	(62.300,00)	99,42		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.807.300,00	10.745.000,00	(62.300,00)	99,42		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.476.600,00	1.400.000,00	(76.600,00)	94,81		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.476.600,00	1.400.000,00	(76.600,00)	94,81		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.600,00	1.400.000,00	(76.600,00)	94,81		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.302.286.039,00	6.888.714.502,00	(413.571.537,00)	94,34		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.102.890.139,00	6.690.601.602,00	(412.288.537,00)	94,20		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.102.890.139,00	6.690.601.602,00	(412.288.537,00)	94,20		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.102.890.139,00	6.690.601.602,00	(412.288.537,00)	94,20		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.482.000,00	168.943.900,00	(538.100,00)	99,68		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	169.482.000,00	168.943.900,00	(538.100,00)	99,68		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.482.000,00	168.943.900,00	(538.100,00)	99,68		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.763.900,00	18.601.000,00	(162.900,00)	99,13		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.763.900,00	18.601.000,00	(162.900,00)	99,13		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.763.900,00	18.601.000,00	(162.900,00)	99,13		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.150.000,00	10.568.000,00	(582.000,00)	94,78		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	11.150.000,00	10.568.000,00	(582.000,00)	94,78		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	10.568.000,00	(582.000,00)	94,78		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	477.227.500,00	453.241.593,00	(23.985.907,00)	94,97		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	217.387.500,00	208.580.015,00	(8.807.485,00)	95,95		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	217.387.500,00	208.580.015,00	(8.807.485,00)	95,95		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.387.500,00	208.580.015,00	(8.807.485,00)	95,95		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	259.840.000,00	244.661.578,00	(15.178.422,00)	94,16		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	259.840.000,00	244.661.578,00	(15.178.422,00)	94,16		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.840.000,00	244.661.578,00	(15.178.422,00)	94,16		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.162.700,00	857.149.185,00	(35.013.515,00)	96,08		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.670.200,00	42.619.500,00	(4.050.700,00)	91,32		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	46.670.200,00	42.619.500,00	(4.050.700,00)	91,32		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.670.200,00	42.619.500,00	(4.050.700,00)	91,32		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.950.000,00	61.624.500,00	(3.325.500,00)	94,88		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	64.950.000,00	61.624.500,00	(3.325.500,00)	94,88		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.950.000,00	61.624.500,00	(3.325.500,00)	94,88		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.089.000,00	3.000.000,00	(4.089.000,00)	42,32		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.089.000,00	3.000.000,00	(4.089.000,00)	42,32		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.089.000,00	3.000.000,00	(4.089.000,00)	42,32		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	773.453.500,00	749.905.185,00	(23.548.315,00)	96,96		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	773.453.500,00	749.905.185,00	(23.548.315,00)	96,96		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.453.500,00	749.905.185,00	(23.548.315,00)	96,96		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.958.200,00	1.282.264.986,00	(211.693.214,00)	85,83		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.660.000,00	153.071.961,00	(110.588.039,00)	58,06		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	263.660.000,00	153.071.961,00	(110.588.039,00)	58,06		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.660.000,00	153.071.961,00	(110.588.039,00)	58,06		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	703.694.200,00	662.795.405,00	(40.898.795,00)	94,19		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.270.300,00	87.027.400,00	(6.242.900,00)	93,31		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.270.300,00	87.027.400,00	(6.242.900,00)	93,31		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	610.423.900,00	575.768.005,00	(34.655.895,00)	94,32		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	610.423.900,00	575.768.005,00	(34.655.895,00)	94,32		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	526.604.000,00	466.397.620,00	(60.206.380,00)	88,57		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	526.604.000,00	466.397.620,00	(60.206.380,00)	88,57		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.604.000,00	466.397.620,00	(60.206.380,00)	88,57		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.824.381.300,00	2.292.460.739,00	(531.920.561,00)	81,17		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.539.300,00	170.660.847,00	(152.878.453,00)	52,75		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	323.539.300,00	170.660.847,00	(152.878.453,00)	52,75		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.539.300,00	170.660.847,00	(152.878.453,00)	52,75		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.842.000,00	2.121.799.892,00	(379.042.108,00)	84,84		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	680.685.400,00	585.249.944,00	(95.435.456,00)	85,98		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.685.400,00	585.249.944,00	(95.435.456,00)	85,98		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	1.820.156.600,00	1.536.549.948,00	(283.606.652,00)	84,42		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.439.045,00	(560.955,00)	99,63		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.670.156.600,00	1.387.110.903,00	(283.045.697,00)	83,05		
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	5.320.466.050,00	4.938.843.050,00	(381.623.000,00)	92,83		
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.159.847.850,00	3.092.765.839,00	(67.082.011,00)	97,88		
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	410.973.400,00	402.700.302,00	(8.273.098,00)	97,99		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	410.973.400,00	402.700.302,00	(8.273.098,00)	97,99		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.973.400,00	402.700.302,00	(8.273.098,00)	97,99		
02.2.01.12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.218.850.000,00	1.208.118.300,00	(10.731.700,00)	99,12		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.218.850.000,00	1.208.118.300,00	(10.731.700,00)	99,12		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.850.000,00	1.208.118.300,00	(10.731.700,00)	99,12		
02.2.01.16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.099.000,00	12.706.600,00	(1.392.400,00)	90,12		
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	14.099.000,00	12.706.600,00	(1.392.400,00)	90,12		
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.099.000,00	12.706.600,00	(1.392.400,00)	90,12		
02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	977.278.800,00	936.549.100,00	(40.729.700,00)	95,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	826.807.500,00	795.523.600,00	(31.283.900,00)	96,22		
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.807.500,00	795.523.600,00	(31.283.900,00)	96,22		
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	150.471.300,00	141.025.500,00	(9.445.800,00)	93,72		
02.2.01.18.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.471.300,00	141.025.500,00	(9.445.800,00)	93,72		
02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	538.646.650,00	532.691.537,00	(5.955.113,00)	98,89		
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	127.846.650,00	127.030.537,00	(816.113,00)	99,36		
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.846.650,00	127.030.537,00	(816.113,00)	99,36		
02.2.01.20.5.2	BELANJA MODAL	410.800.000,00	405.661.000,00	(5.139.000,00)	98,75		
02.2.01.20.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.800.000,00	28.150.000,00	(2.650.000,00)	91,40		
02.2.01.20.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	380.000.000,00	377.511.000,00	(2.489.000,00)	99,35		
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.160.618.200,00	1.846.077.211,00	(314.540.989,00)	85,44		
02.2.02.06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.268.300,00	19.650.000,00	(1.618.300,00)	92,39		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	21.268.300,00	19.650.000,00	(1.618.300,00)	92,39		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.268.300,00	19.650.000,00	(1.618.300,00)	92,39		
02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.836.664.900,00	1.529.522.449,00	(307.142.451,00)	83,28		
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.497.848.900,00	1.194.026.746,00	(303.822.154,00)	79,72		
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.497.848.900,00	1.194.026.746,00	(303.822.154,00)	79,72		
02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	338.816.000,00	335.495.703,00	(3.320.297,00)	99,02		
02.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.976.000,00	46.399.998,00	(576.002,00)	98,77		
02.2.02.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291.840.000,00	289.095.705,00	(2.744.295,00)	99,06		
02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	302.685.000,00	296.904.762,00	(5.780.238,00)	98,09		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	302.685.000,00	296.904.762,00	(5.780.238,00)	98,09		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.685.000,00	296.904.762,00	(5.780.238,00)	98,09		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	847.015.500,00	833.557.728,00	(13.457.772,00)	98,41		
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	705.333.800,00	702.364.828,00	(2.968.972,00)	99,58		
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	419.290.500,00	417.769.278,00	(1.521.222,00)	99,64		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	419.290.500,00	417.769.278,00	(1.521.222,00)	99,64		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.290.500,00	417.769.278,00	(1.521.222,00)	99,64		
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	154.872.500,00	153.836.250,00	(1.036.250,00)	99,33		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	154.872.500,00	153.836.250,00	(1.036.250,00)	99,33		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.872.500,00	153.836.250,00	(1.036.250,00)	99,33		
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	131.170.800,00	130.759.300,00	(411.500,00)	99,69		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	131.170.800,00	130.759.300,00	(411.500,00)	99,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.170.800,00	130.759.300,00	(411.500,00)	99,69		
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.945.700,00	34.204.900,00	(1.740.800,00)	95,16		
02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	17.650.000,00	17.544.600,00	(105.400,00)	99,40		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.650.000,00	17.544.600,00	(105.400,00)	99,40		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	17.544.600,00	(105.400,00)	99,40		
02.2.02.04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	18.295.700,00	16.660.300,00	(1.635.400,00)	91,06		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	18.295.700,00	16.660.300,00	(1.635.400,00)	91,06		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.295.700,00	16.660.300,00	(1.635.400,00)	91,06		
02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	105.736.000,00	96.988.000,00	(8.748.000,00)	91,73		
02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	33.681.000,00	27.150.000,00	(6.531.000,00)	80,61		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.681.000,00	27.150.000,00	(6.531.000,00)	80,61		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.681.000,00	27.150.000,00	(6.531.000,00)	80,61		
02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	72.055.000,00	69.838.000,00	(2.217.000,00)	96,92		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	72.055.000,00	69.838.000,00	(2.217.000,00)	96,92		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.055.000,00	69.838.000,00	(2.217.000,00)	96,92		
03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	261.522.500,00	255.956.000,00	(5.566.500,00)	97,87		
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	261.522.500,00	255.956.000,00	(5.566.500,00)	97,87		
03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	90.238.900,00	84.766.900,00	(5.472.000,00)	93,94		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	90.238.900,00	84.766.900,00	(5.472.000,00)	93,94		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.238.900,00	84.766.900,00	(5.472.000,00)	93,94		
03.2.01.04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	171.283.600,00	171.189.100,00	(94.500,00)	99,94		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	171.283.600,00	171.189.100,00	(94.500,00)	99,94		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.283.600,00	171.189.100,00	(94.500,00)	99,94		
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	857.194.800,00	812.185.094,00	(45.009.706,00)	94,75		
03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	442.893.000,00	429.651.939,00	(13.241.061,00)	97,01		
03.2.01.04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	442.893.000,00	429.651.939,00	(13.241.061,00)	97,01		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	442.893.000,00	429.651.939,00	(13.241.061,00)	97,01		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.893.000,00	429.651.939,00	(13.241.061,00)	97,01		
03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	318.460.800,00	287.877.835,00	(30.582.965,00)	90,40		
03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	222.150.800,00	200.866.995,00	(21.283.805,00)	90,42		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	222.150.800,00	200.866.995,00	(21.283.805,00)	90,42		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.150.800,00	200.866.995,00	(21.283.805,00)	90,42		
03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	96.310.000,00	87.010.840,00	(9.299.160,00)	90,34		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	96.310.000,00	87.010.840,00	(9.299.160,00)	90,34		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.310.000,00	87.010.840,00	(9.299.160,00)	90,34		
03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	95.841.000,00	94.655.320,00	(1.185.680,00)	98,76		
03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	95.841.000,00	94.655.320,00	(1.185.680,00)	98,76		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.841.000,00	94.655.320,00	(1.185.680,00)	98,76		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.841.000,00	94.655.320,00	(1.185.680,00)	98,76		
04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	35.496.400,00	35.262.600,00	(233.800,00)	99,34		
04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota	35.496.400,00	35.262.600,00	(233.800,00)	99,34		
04.2.01.03	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	35.496.400,00	35.262.600,00	(233.800,00)	99,34		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	35.496.400,00	35.262.600,00	(233.800,00)	99,34		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.496.400,00	35.262.600,00	(233.800,00)	99,34		
	SURPLUS / DEFISIT	(20.610.536.189,00)	(18.946.727.340,00)	1.663.808.849,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(20.610.536.189,00)**	**(18.946.727.340,00)**	**1.663.808.849,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN
SKPD : 3-31.3-30.0-00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Unit Organisasi : 3-31.3-30.0-00.01.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	148.860.000,00	353.555.000,00	204.695.000,00	237,51		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	148.860.000,00	136.695.000,00	(12.165.000,00)	91,83		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	148.860.000,00	136.695.000,00	(12.165.000,00)	91,83		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0,00	216.860.000,00	216.860.000,00	0		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	216.860.000,00	216.860.000,00	0		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	18.970.658.838,00	16.610.686.785,00	(2.359.972.053,00)	87,56		
00	**Non Program**	0,00	179.510.000,00	179.510.000,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	179.510.000,00	179.510.000,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	179.510.000,00	179.510.000,00	0		
00.0.00.00.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	179.510.000,00	179.510.000,00	0		
00.0.00.00.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	179.510.000,00	179.510.000,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.234.900.438,00	8.940.415.146,00	(2.294.485.292,00)	79,58		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.325.000,00	38.035.200,00	(3.289.800,00)	92,04		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.520.000,00	20.588.200,00	(931.800,00)	95,67		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.520.000,00	20.588.200,00	(931.800,00)	95,67		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.520.000,00	20.588.200,00	(931.800,00)	95,67		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.940.000,00	17.447.000,00	(493.000,00)	97,25		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.940.000,00	17.447.000,00	(493.000,00)	97,25		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.940.000,00	17.447.000,00	(493.000,00)	97,25		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.865.000,00	0,00	(1.865.000,00)	0		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.865.000,00	0,00	(1.865.000,00)	0		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	0,00	(1.865.000,00)	0		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.478.865.588,00	6.465.202.887,00	(2.013.662.701,00)	76,25		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.777.690.396,00	6.122.444.487,00	(1.655.245.909,00)	78,72		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.777.690.396,00	6.122.444.487,00	(1.655.245.909,00)	78,72		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.777.690.396,00	6.122.444.487,00	(1.655.245.909,00)	78,72		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	701.175.192,00	342.758.400,00	(358.416.792,00)	48,88		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	701.175.192,00	342.758.400,00	(358.416.792,00)	48,88		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.175.192,00	342.758.400,00	(358.416.792,00)	48,88		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.520.000,00	313.114.914,00	(1.405.086,00)	99,55		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	314.520.000,00	313.114.914,00	(1.405.086,00)	99,55		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	314.520.000,00	313.114.914,00	(1.405.086,00)	99,55		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.520.000,00	313.114.914,00	(1.405.086,00)	99,55		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	945.378.500,00	892.095.937,00	(53.282.563,00)	94,36		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.573.500,00	12.554.000,00	(19.500,00)	99,84		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.573.500,00	12.554.000,00	(19.500,00)	99,84		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.573.500,00	12.554.000,00	(19.500,00)	99,84		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.568.100,00	195.900.000,00	(21.668.100,00)	90,04		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	132.780.000,00	124.000.000,00	(8.780.000,00)	93,39		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.780.000,00	124.000.000,00	(8.780.000,00)	93,39		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	84.788.100,00	71.900.000,00	(12.888.100,00)	84,80		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.788.100,00	71.900.000,00	(12.888.100,00)	84,80		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.476.000,00	32.459.680,00	(16.320,00)	99,95		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	32.476.000,00	32.459.680,00	(16.320,00)	99,95		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.476.000,00	32.459.680,00	(16.320,00)	99,95		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.669.800,00	28.433.000,00	(9.236.800,00)	75,48		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	37.669.800,00	28.433.000,00	(9.236.800,00)	75,48		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.669.800,00	28.433.000,00	(9.236.800,00)	75,48		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.301.600,00	7.900.000,00	(401.600,00)	95,16		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.301.600,00	7.900.000,00	(401.600,00)	95,16		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.301.600,00	7.900.000,00	(401.600,00)	95,16		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.789.500,00	614.849.257,00	(21.940.243,00)	96,55		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	636.789.500,00	614.849.257,00	(21.940.243,00)	96,55		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.789.500,00	614.849.257,00	(21.940.243,00)	96,55		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.249.700,00	141.786.000,00	(9.463.700,00)	93,74		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.249.700,00	141.786.000,00	(9.463.700,00)	93,74		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	151.249.700,00	141.786.000,00	(9.463.700,00)	93,74		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.249.700,00	141.786.000,00	(9.463.700,00)	93,74		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.975.050,00	307.536.575,00	(66.438.475,00)	82,23		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.199.150,00	138.152.275,00	(19.046.875,00)	87,88		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.199.150,00	138.152.275,00	(19.046.875,00)	87,88		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.199.150,00	138.152.275,00	(19.046.875,00)	87,88		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.775.900,00	169.384.300,00	(47.391.600,00)	78,14		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	216.775.900,00	169.384.300,00	(47.391.600,00)	78,14		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.775.900,00	169.384.300,00	(47.391.600,00)	78,14		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.586.600,00	782.643.633,00	(146.942.967,00)	84,19		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.984.600,00	165.849.025,00	(58.135.575,00)	74,04		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	223.984.600,00	165.849.025,00	(58.135.575,00)	74,04		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.984.600,00	165.849.025,00	(58.135.575,00)	74,04		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.110.000,00	33.574.750,00	(535.250,00)	98,43		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	34.110.000,00	33.574.750,00	(535.250,00)	98,43		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.110.000,00	33.574.750,00	(535.250,00)	98,43		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	671.492.000,00	583.219.858,00	(88.272.142,00)	86,85		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	601.492.000,00	513.975.978,00	(87.516.022,00)	85,45		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.492.000,00	513.975.978,00	(87.516.022,00)	85,45		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.243.880,00	(756.120,00)	98,92		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.243.880,00	(756.120,00)	98,92		
02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	118.505.000,00	87.466.800,00	(31.038.200,00)	73,81		
02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	44.218.000,00	40.494.200,00	(3.723.800,00)	91,58		
02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44.218.000,00	40.494.200,00	(3.723.800,00)	91,58		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.218.000,00	40.494.200,00	(3.723.800,00)	91,58		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.218.000,00	40.494.200,00	(3.723.800,00)	91,58		
02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	19.890.000,00	16.253.900,00	(3.636.100,00)	81,72		
02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	19.890.000,00	16.253.900,00	(3.636.100,00)	81,72		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.890.000,00	16.253.900,00	(3.636.100,00)	81,72		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	16.253.900,00	(3.636.100,00)	81,72		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	18.001.000,00	480.000,00	(17.521.000,00)	2,67		
02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	18.001.000,00	480.000,00	(17.521.000,00)	2,67		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.001.000,00	480.000,00	(17.521.000,00)	2,67		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.001.000,00	480.000,00	(17.521.000,00)	2,67		
02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	32.776.000,00	30.238.700,00	(2.537.300,00)	92,26		
02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	32.776.000,00	30.238.700,00	(2.537.300,00)	92,26		
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.776.000,00	30.238.700,00	(2.537.300,00)	92,26		
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.776.000,00	30.238.700,00	(2.537.300,00)	92,26		
02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.620.000,00	0,00	(3.620.000,00)	0		
02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	3.620.000,00	0,00	(3.620.000,00)	0		
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.620.000,00	0,00	(3.620.000,00)	0		
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	0,00	(3.620.000,00)	0		
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	702.390.000,00	697.585.026,00	(4.804.974,00)	99,32		
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	702.390.000,00	697.585.026,00	(4.804.974,00)	99,32		
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	238.994.000,00	238.615.750,00	(378.250,00)	99,84		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	238.994.000,00	238.615.750,00	(378.250,00)	99,84		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.994.000,00	238.615.750,00	(378.250,00)	99,84		
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	463.396.000,00	458.969.276,00	(4.426.724,00)	99,04		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	463.396.000,00	458.969.276,00	(4.426.724,00)	99,04		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.396.000,00	458.969.276,00	(4.426.724,00)	99,04		
03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	2.150.470.300,00	2.072.471.125,00	(77.999.175,00)	96,37		
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.036.995.300,00	1.976.801.125,00	(60.194.175,00)	97,04		
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	516.506.400,00	507.637.350,00	(8.869.050,00)	98,28		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.147.500,00	41.421.500,00	(2.726.000,00)	93,83		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.147.500,00	41.421.500,00	(2.726.000,00)	93,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	472.358.900,00	466.215.850,00	(6.143.050,00)	98,70		
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	472.358.900,00	466.215.850,00	(6.143.050,00)	98,70		
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.520.488.900,00	1.469.163.775,00	(51.325.125,00)	96,62		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.520.488.900,00	1.469.163.775,00	(51.325.125,00)	96,62		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.488.900,00	1.469.163.775,00	(51.325.125,00)	96,62		
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	113.475.000,00	95.670.000,00	(17.805.000,00)	84,31		
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	83.250.000,00	66.420.000,00	(16.830.000,00)	79,78		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.250.000,00	66.420.000,00	(16.830.000,00)	79,78		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	66.420.000,00	(16.830.000,00)	79,78		
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.225.000,00	29.250.000,00	(975.000,00)	96,77		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.225.000,00	29.250.000,00	(975.000,00)	96,77		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.225.000,00	29.250.000,00	(975.000,00)	96,77		
03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	505.214.000,00	503.162.476,00	(2.051.524,00)	99,59		
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	505.214.000,00	503.162.476,00	(2.051.524,00)	99,59		
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	132.409.000,00	130.782.476,00	(1.626.524,00)	98,77		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.409.000,00	130.782.476,00	(1.626.524,00)	98,77		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.409.000,00	130.782.476,00	(1.626.524,00)	98,77		
03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submissi	372.805.000,00	372.380.000,00	(425.000,00)	99,89		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	372.805.000,00	372.380.000,00	(425.000,00)	99,89		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.805.000,00	372.380.000,00	(425.000,00)	99,89		
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	983.380.800,00	961.606.300,00	(21.774.500,00)	97,79		
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	983.380.800,00	961.606.300,00	(21.774.500,00)	97,79		
04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	142.840.800,00	124.599.366,00	(18.241.434,00)	87,23		
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	142.840.800,00	124.599.366,00	(18.241.434,00)	87,23		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.840.800,00	124.599.366,00	(18.241.434,00)	87,23		
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	840.540.000,00	837.006.934,00	(3.533.066,00)	99,58		
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	840.540.000,00	837.006.934,00	(3.533.066,00)	99,58		
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.540.000,00	837.006.934,00	(3.533.066,00)	99,58		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTE**	1.162.091.900,00	1.107.480.276,00	(54.611.624,00)	95,30		
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.162.091.900,00	1.107.480.276,00	(54.611.624,00)	95,30		
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	161.955.000,00	141.656.100,00	(20.298.900,00)	87,47		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.955.000,00	141.656.100,00	(20.298.900,00)	87,47		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.955.000,00	141.656.100,00	(20.298.900,00)	87,47		
04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1.000.136.900,00	965.824.176,00	(34.312.724,00)	96,57		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.136.900,00	965.824.176,00	(34.312.724,00)	96,57		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.136.900,00	965.824.176,00	(34.312.724,00)	96,57		
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	236.883.500,00	235.897.054,00	(986.446,00)	99,58		
05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	236.883.500,00	235.897.054,00	(986.446,00)	99,58		
05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	236.883.500,00	235.897.054,00	(986.446,00)	99,58		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	236.883.500,00	235.897.054,00	(986.446,00)	99,58		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.883.500,00	235.897.054,00	(986.446,00)	99,58		
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	395.314.900,00	390.242.750,00	(5.072.150,00)	98,72		
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	395.314.900,00	390.242.750,00	(5.072.150,00)	98,72		
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	218.246.900,00	213.443.050,00	(4.803.850,00)	97,80		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	164.746.900,00	164.464.300,00	(282.600,00)	99,83		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.746.900,00	164.464.300,00	(282.600,00)	99,83		
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	53.500.000,00	48.978.750,00	(4.521.250,00)	91,55		
06.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.500.000,00	48.978.750,00	(4.521.250,00)	91,55		
06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	177.068.000,00	176.799.700,00	(268.300,00)	99,85		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	177.068.000,00	176.799.700,00	(268.300,00)	99,85		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.068.000,00	176.799.700,00	(268.300,00)	99,85		
07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	1.481.508.000,00	1.434.849.832,00	(46.658.168,00)	96,85		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.481.508.000,00	1.434.849.832,00	(46.658.168,00)	96,85		
07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.481.508.000,00	1.434.849.832,00	(46.658.168,00)	96,85		
07.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.481.508.000,00	1.434.849.832,00	(46.658.168,00)	96,85		
07.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.481.508.000,00	1.434.849.832,00	(46.658.168,00)	96,85		
	SURPLUS / DEFISIT	(18.821.798.838,00)	(16.257.131.785,00)	2.564.667.053,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(18.821.798.838,00)**	**(16.257.131.785,00)**	**2.564.667.053,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4-01.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	188.528.000,00	278.644.000,00	90.116.000,00	147,80		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	188.528.000,00	278.644.000,00	90.116.000,00	147,80		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	165.000.000,00	185.908.000,00	20.908.000,00	112,67		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.528.000,00	92.736.000,00	69.208.000,00	394,15	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	307.290.693.088,00	223.177.238.731,58	(84.113.454.356,42)	72,63		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	119.033.174.788,00	99.088.663.830,67	(19.944.510.957,33)	83,24		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.978.945.600,00	1.907.836.722,00	(71.108.878,00)	96,41		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.657.036.000,00	1.606.682.622,00	(50.353.378,00)	96,96		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.657.036.000,00	1.606.682.622,00	(50.353.378,00)	96,96		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.657.036.000,00	1.606.682.622,00	(50.353.378,00)	96,96		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.611.100,00	46.365.000,00	(7.246.100,00)	86,48		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	53.611.100,00	46.365.000,00	(7.246.100,00)	86,48		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.611.100,00	46.365.000,00	(7.246.100,00)	86,48		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	213.695.000,00	211.917.600,00	(1.777.400,00)	99,17		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	213.695.000,00	211.917.600,00	(1.777.400,00)	99,17		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.695.000,00	211.917.600,00	(1.777.400,00)	99,17		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	54.603.500,00	42.871.500,00	(11.732.000,00)	78,51		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	54.603.500,00	42.871.500,00	(11.732.000,00)	78,51		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.603.500,00	42.871.500,00	(11.732.000,00)	78,51		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.357.178.176,00	25.074.906.283,00	(9.282.271.893,00)	72,98		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.719.328.776,00	24.443.868.783,00	(9.275.459.993,00)	72,49		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.719.328.776,00	24.443.868.783,00	(9.275.459.993,00)	72,49		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	33.719.328.776,00	24.443.868.783,00	(9.275.459.993,00)	72,49		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.087.900,00	234.558.800,00	(529.100,00)	99,77		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.087.900,00	234.558.800,00	(529.100,00)	99,77		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.087.900,00	234.558.800,00	(529.100,00)	99,77		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	210.769.500,00	207.537.200,00	(3.232.300,00)	98,47		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	210.769.500,00	207.537.200,00	(3.232.300,00)	98,47		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.769.500,00	207.537.200,00	(3.232.300,00)	98,47		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	191.992.000,00	188.941.500,00	(3.050.500,00)	98,41		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	191.992.000,00	188.941.500,00	(3.050.500,00)	98,41		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.992.000,00	188.941.500,00	(3.050.500,00)	98,41		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	575.937.200,00	563.600.000,00	(12.337.200,00)	97,86		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	575.937.200,00	563.600.000,00	(12.337.200,00)	97,86		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	575.937.200,00	563.600.000,00	(12.337.200,00)	97,86		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.937.200,00	563.600.000,00	(12.337.200,00)	97,86		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.445.260.550,00	33.734.691.293,00	(5.710.569.257,00)	85,52		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.117.444.400,00	1.110.086.445,00	(7.357.955,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.117.444.400,00	1.110.086.445,00	(7.357.955,00)	99,34		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.444.400,00	1.110.086.445,00	(7.357.955,00)	99,34		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.654.784.050,00	10.772.113.020,00	(882.671.030,00)	92,43		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.006.520.400,00	4.774.700.524,00	(231.819.876,00)	95,37		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.006.520.400,00	4.774.700.524,00	(231.819.876,00)	95,37		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	6.648.263.650,00	5.997.412.496,00	(650.851.154,00)	90,21		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.643.263.650,00	5.992.412.496,00	(650.851.154,00)	90,20		
01.2.06.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.975.603.200,00	11.253.069.540,00	(722.533.660,00)	93,97		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.038.971.500,00	2.773.814.400,00	(265.157.100,00)	91,27		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.038.971.500,00	2.773.814.400,00	(265.157.100,00)	91,27		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	8.936.631.700,00	8.479.255.140,00	(457.376.560,00)	94,88		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.576.631.700,00	8.157.255.140,00	(419.376.560,00)	95,11		
01.2.06.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.000.000,00	322.000.000,00	(38.000.000,00)	89,44		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.909.019.200,00	1.857.477.898,00	(51.541.302,00)	97,30		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.909.019.200,00	1.857.477.898,00	(51.541.302,00)	97,30		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.909.019.200,00	1.857.477.898,00	(51.541.302,00)	97,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.305.048.700,00	1.268.832.100,00	(36.216.600,00)	97,22		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.305.048.700,00	1.268.832.100,00	(36.216.600,00)	97,22		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.048.700,00	1.268.832.100,00	(36.216.600,00)	97,22		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.483.361.000,00	7.473.112.290,00	(4.010.248.710,00)	65,08		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	11.483.361.000,00	7.473.112.290,00	(4.010.248.710,00)	65,08		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.483.361.000,00	7.473.112.290,00	(4.010.248.710,00)	65,08		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.847.083.900,00	10.899.732.197,00	(947.351.703,00)	92,00		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.040.840.800,00	4.497.665.607,00	(543.175.193,00)	89,22		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.040.840.800,00	4.497.665.607,00	(543.175.193,00)	89,22		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.840.800,00	4.497.665.607,00	(543.175.193,00)	89,22		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.090.914.700,00	2.693.213.900,00	(397.700.800,00)	87,13		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.090.914.700,00	2.693.213.900,00	(397.700.800,00)	87,13		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.090.914.700,00	2.693.213.900,00	(397.700.800,00)	87,13		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.715.328.400,00	3.708.852.690,00	(6.475.710,00)	99,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.715.328.400,00	3.708.852.690,00	(6.475.710,00)	99,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.715.328.400,00	3.708.852.690,00	(6.475.710,00)	99,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.293.960.650,00	18.866.243.636,00	(3.427.717.014,00)	84,62		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.744.494.550,00	4.317.863.242,00	(426.631.308,00)	91,01		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.338.494.550,00	3.951.429.243,00	(387.065.307,00)	91,08		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.338.494.550,00	3.951.429.243,00	(387.065.307,00)	91,08		
01.2.09.01.5.2	BELANJA MODAL	406.000.000,00	366.433.999,00	(39.566.001,00)	90,25		
01.2.09.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	406.000.000,00	366.433.999,00	(39.566.001,00)	90,25		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.093.629.300,00	1.024.404.300,00	(69.225.000,00)	93,67		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.093.629.300,00	1.024.404.300,00	(69.225.000,00)	93,67		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.629.300,00	1.024.404.300,00	(69.225.000,00)	93,67		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.477.708.000,00	9.184.558.644,00	(1.293.149.356,00)	87,66		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	8.600.096.000,00	7.322.547.244,00	(1.277.548.756,00)	85,14		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.096.000,00	7.322.547.244,00	(1.277.548.756,00)	85,14		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	1.877.612.000,00	1.862.011.400,00	(15.600.600,00)	99,17		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.877.612.000,00	1.862.011.400,00	(15.600.600,00)	99,17		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.528.259.800,00	2.282.743.150,00	(1.245.516.650,00)	64,70		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	3.528.259.800,00	2.282.743.150,00	(1.245.516.650,00)	64,70		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.528.259.800,00	2.282.743.150,00	(1.245.516.650,00)	64,70		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.449.869.000,00	2.056.674.300,00	(393.194.700,00)	83,95		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.449.869.000,00	2.056.674.300,00	(393.194.700,00)	83,95		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.869.000,00	2.056.674.300,00	(393.194.700,00)	83,95		
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.404.136.012,00	2.122.208.588,00	(281.927.424,00)	88,27		
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	404.136.012,00	141.958.588,00	(262.177.424,00)	35,13		
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	404.136.012,00	141.958.588,00	(262.177.424,00)	35,13		
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	404.136.012,00	141.958.588,00	(262.177.424,00)	35,13		
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.600.000.000,00	1.580.250.000,00	(19.750.000,00)	98,77		
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.580.250.000,00	(19.750.000,00)	98,77		
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	1.580.250.000,00	(19.750.000,00)	98,77		
01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.13	Penataan Organisasi	1.729.236.500,00	1.704.739.206,00	(24.497.294,00)	98,58		
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	578.162.000,00	568.338.777,00	(9.823.223,00)	98,30		
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	578.162.000,00	568.338.777,00	(9.823.223,00)	98,30		
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.162.000,00	568.338.777,00	(9.823.223,00)	98,30		
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	239.577.300,00	235.117.276,00	(4.460.024,00)	98,14		
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	239.577.300,00	235.117.276,00	(4.460.024,00)	98,14		
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.577.300,00	235.117.276,00	(4.460.024,00)	98,14		
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	911.497.200,00	901.283.153,00	(10.214.047,00)	98,88		
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	911.497.200,00	901.283.153,00	(10.214.047,00)	98,88		
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.497.200,00	901.283.153,00	(10.214.047,00)	98,88		
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.401.436.200,00	4.214.705.905,67	(186.730.294,33)	95,76		
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.809.022.300,00	1.758.034.008,67	(50.988.291,33)	97,18		
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.759.022.300,00	1.708.805.512,00	(50.216.788,00)	97,15		
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.759.022.300,00	1.708.805.512,00	(50.216.788,00)	97,15		
01.2.14.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.228.496,67	(771.503,33)	98,46		
01.2.14.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.228.496,67	(771.503,33)	98,46		
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	897.724.000,00	852.119.647,00	(45.604.353,00)	94,92		
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	897.724.000,00	852.119.647,00	(45.604.353,00)	94,92		
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.724.000,00	852.119.647,00	(45.604.353,00)	94,92		
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.694.689.900,00	1.604.552.250,00	(90.137.650,00)	94,68		
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.088.785.120,00	1.059.860.200,00	(28.924.920,00)	97,34		
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.785.120,00	1.059.860.200,00	(28.924.920,00)	97,34		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.14.03.5.2	BELANJA MODAL	605.904.780,00	544.692.050,00	(61.212.730,00)	89,90		
01.2.14.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	605.904.780,00	544.692.050,00	(61.212.730,00)	89,90		
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	184.171.361.600,00	120.605.205.776,91	(63.566.155.823,09)	65,49		
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.613.462.700,00	1.550.864.418,00	(62.598.282,00)	96,12		
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	988.985.500,00	955.905.916,00	(33.079.584,00)	96,66		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	988.985.500,00	955.905.916,00	(33.079.584,00)	96,66		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.985.500,00	955.905.916,00	(33.079.584,00)	96,66		
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	275.835.000,00	260.371.289,00	(15.463.711,00)	94,39		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	275.835.000,00	260.371.289,00	(15.463.711,00)	94,39		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.835.000,00	260.371.289,00	(15.463.711,00)	94,39		
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	348.642.200,00	334.587.213,00	(14.054.987,00)	95,97		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	348.642.200,00	334.587.213,00	(14.054.987,00)	95,97		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.642.200,00	334.587.213,00	(14.054.987,00)	95,97		
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	180.706.146.300,00	117.421.748.397,91	(63.284.397.902,09)	64,98		
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.165.728.800,00	12.571.703.886,00	(594.024.914,00)	95,49		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.165.728.800,00	12.571.703.886,00	(594.024.914,00)	95,49		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.165.728.800,00	12.571.703.886,00	(594.024.914,00)	95,49		
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.449.345.000,00	15.160.252.080,00	(289.092.920,00)	98,13		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.449.345.000,00	15.160.252.080,00	(289.092.920,00)	98,13		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.745.000,00	669.652.080,00	(289.092.920,00)	69,85		
02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	14.490.600.000,00	14.490.600.000,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	16.895.770.000,00	15.552.434.213,00	(1.343.335.787,00)	92,05		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.895.770.000,00	15.552.434.213,00	(1.343.335.787,00)	92,05		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.895.770.000,00	15.552.434.213,00	(1.343.335.787,00)	92,05		
02.2.02.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	135.195.302.500,00	74.137.358.218,91	(61.057.944.281,09)	54,84		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	135.195.302.500,00	74.137.358.218,91	(61.057.944.281,09)	54,84		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.895.302.500,00	39.365.637.963,00	(39.529.664.537,00)	49,90		
02.2.02.06.5.1.05	Belanja Hibah	56.300.000.000,00	34.771.720.255,91	(21.528.279.744,09)	61,76		
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.630.743.600,00	1.419.110.065,00	(211.633.535,00)	87,02		
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	844.459.000,00	821.460.092,00	(22.998.908,00)	97,28		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	844.459.000,00	821.460.092,00	(22.998.908,00)	97,28		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.459.000,00	821.460.092,00	(22.998.908,00)	97,28		
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	551.667.500,00	384.480.463,00	(167.187.037,00)	69,69		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	551.667.500,00	384.480.463,00	(167.187.037,00)	69,69		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.667.500,00	384.480.463,00	(167.187.037,00)	69,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	234.617.100,00	213.169.510,00	(21.447.590,00)	90,86		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	234.617.100,00	213.169.510,00	(21.447.590,00)	90,86		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.617.100,00	213.169.510,00	(21.447.590,00)	90,86		
02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	221.009.000,00	213.482.896,00	(7.526.104,00)	96,59		
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	221.009.000,00	213.482.896,00	(7.526.104,00)	96,59		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	221.009.000,00	213.482.896,00	(7.526.104,00)	96,59		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.009.000,00	213.482.896,00	(7.526.104,00)	96,59		
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	4.086.156.700,00	3.483.369.124,00	(602.787.576,00)	85,25		
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.038.352.500,00	873.968.608,00	(164.383.892,00)	84,17		
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	243.364.000,00	158.207.586,00	(85.156.414,00)	65,01		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	243.364.000,00	158.207.586,00	(85.156.414,00)	65,01		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.364.000,00	158.207.586,00	(85.156.414,00)	65,01		
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	486.067.600,00	473.215.607,00	(12.851.993,00)	97,36		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	486.067.600,00	473.215.607,00	(12.851.993,00)	97,36		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.067.600,00	473.215.607,00	(12.851.993,00)	97,36		
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	243.239.200,00	177.376.399,00	(65.862.801,00)	72,92		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	243.239.200,00	177.376.399,00	(65.862.801,00)	72,92		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.239.200,00	177.376.399,00	(65.862.801,00)	72,92		
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	65.681.700,00	65.169.016,00	(512.684,00)	99,22		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	65.681.700,00	65.169.016,00	(512.684,00)	99,22		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.681.700,00	65.169.016,00	(512.684,00)	99,22		
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	609.784.800,00	476.142.052,00	(133.642.748,00)	78,08		
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	202.385.000,00	129.869.965,00	(72.515.035,00)	64,17		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	202.385.000,00	129.869.965,00	(72.515.035,00)	64,17		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.385.000,00	129.869.965,00	(72.515.035,00)	64,17		
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	180.783.400,00	173.951.897,00	(6.831.503,00)	96,22		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.783.400,00	173.951.897,00	(6.831.503,00)	96,22		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.783.400,00	173.951.897,00	(6.831.503,00)	96,22		
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	226.616.400,00	172.320.190,00	(54.296.210,00)	76,04		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	226.616.400,00	172.320.190,00	(54.296.210,00)	76,04		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.616.400,00	172.320.190,00	(54.296.210,00)	76,04		
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.292.367.400,00	2.000.336.490,00	(292.030.910,00)	87,26		
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.803.500,00	231.061.813,00	(10.741.687,00)	95,56		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	241.803.500,00	231.061.813,00	(10.741.687,00)	95,56		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.803.500,00	231.061.813,00	(10.741.687,00)	95,56		
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	381.772.600,00	307.700.868,00	(74.071.732,00)	80,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	381.772.600,00	307.700.868,00	(74.071.732,00)	80,60		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.772.600,00	307.700.868,00	(74.071.732,00)	80,60		
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.668.791.300,00	1.461.573.809,00	(207.217.491,00)	87,58		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.668.791.300,00	1.461.573.809,00	(207.217.491,00)	87,58		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.791.300,00	1.461.573.809,00	(207.217.491,00)	87,58		
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	145.652.000,00	132.921.974,00	(12.730.026,00)	91,26		
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.173.000,00	28.513.746,00	(659.254,00)	97,74		
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.173.000,00	28.513.746,00	(659.254,00)	97,74		
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.173.000,00	28.513.746,00	(659.254,00)	97,74		
03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	69.289.500,00	57.793.970,00	(11.495.530,00)	83,41		
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.289.500,00	57.793.970,00	(11.495.530,00)	83,41		
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.289.500,00	57.793.970,00	(11.495.530,00)	83,41		
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	47.189.500,00	46.614.258,00	(575.242,00)	98,78		
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	47.189.500,00	46.614.258,00	(575.242,00)	98,78		
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.189.500,00	46.614.258,00	(575.242,00)	98,78		
	SURPLUS / DEFISIT	(307.102.165.088,00)	(222.898.594.731,58)	84.203.570.356,42	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(307.102.165.088,00)**	**(222.898.594.731,58)**	**84.203.570.356,42**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	90.036.991.359,00	74.793.546.781,00	(15.243.444.578,00)	83,07		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	50.090.346.144,00	45.125.109.383,00	(4.965.236.761,00)	90,09		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.977.700,00	338.375.766,00	(93.601.934,00)	78,33		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.804.600,00	40.954.600,00	(1.850.000,00)	95,68		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.804.600,00	40.954.600,00	(1.850.000,00)	95,68		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.804.600,00	40.954.600,00	(1.850.000,00)	95,68		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.430.000,00	11.184.000,00	(8.246.000,00)	57,56		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.430.000,00	11.184.000,00	(8.246.000,00)	57,56		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.430.000,00	11.184.000,00	(8.246.000,00)	57,56		
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.545.200,00	31.964.036,00	(1.581.164,00)	95,29		
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	33.545.200,00	31.964.036,00	(1.581.164,00)	95,29		
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.545.200,00	31.964.036,00	(1.581.164,00)	95,29		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	33.674.800,00	31.919.400,00	(1.755.400,00)	94,79		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.674.800,00	31.919.400,00	(1.755.400,00)	94,79		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.674.800,00	31.919.400,00	(1.755.400,00)	94,79		
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32.238.000,00	12.747.500,00	(19.490.500,00)	39,54		
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.238.000,00	12.747.500,00	(19.490.500,00)	39,54		
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.238.000,00	12.747.500,00	(19.490.500,00)	39,54		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	209.115.100,00	169.522.200,00	(39.592.900,00)	81,07		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	209.115.100,00	169.522.200,00	(39.592.900,00)	81,07		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.115.100,00	169.522.200,00	(39.592.900,00)	81,07		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.170.000,00	40.084.030,00	(21.085.970,00)	65,53		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	61.170.000,00	40.084.030,00	(21.085.970,00)	65,53		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.170.000,00	40.084.030,00	(21.085.970,00)	65,53		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.209.966.949,00	5.262.918.268,00	(1.947.048.681,00)	73,00		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.164.479.349,00	5.239.090.068,00	(1.925.389.281,00)	73,13		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.164.479.349,00	5.239.090.068,00	(1.925.389.281,00)	73,13		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.164.479.349,00	5.239.090.068,00	(1.925.389.281,00)	73,13		
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.894.000,00	5.919.600,00	(5.974.400,00)	49,77		
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	11.894.000,00	5.919.600,00	(5.974.400,00)	49,77		
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.894.000,00	5.919.600,00	(5.974.400,00)	49,77		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.223.800,00	6.775.000,00	(3.448.800,00)	66,27		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.223.800,00	6.775.000,00	(3.448.800,00)	66,27		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.223.800,00	6.775.000,00	(3.448.800,00)	66,27		
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.019.800,00	4.944.000,00	(75.800,00)	98,49		
01.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.019.800,00	4.944.000,00	(75.800,00)	98,49		
01.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.019.800,00	4.944.000,00	(75.800,00)	98,49		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.350.000,00	6.189.600,00	(12.160.400,00)	33,73		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.350.000,00	6.189.600,00	(12.160.400,00)	33,73		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	6.189.600,00	(12.160.400,00)	33,73		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.737.608.740,00	1.649.780.923,00	(87.827.817,00)	94,95		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	650.428.740,00	620.664.900,00	(29.763.840,00)	95,42		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	650.428.740,00	620.664.900,00	(29.763.840,00)	95,42		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.428.740,00	620.664.900,00	(29.763.840,00)	95,42		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.087.180.000,00	1.029.116.023,00	(58.063.977,00)	94,66		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.087.180.000,00	1.029.116.023,00	(58.063.977,00)	94,66		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.180.000,00	1.029.116.023,00	(58.063.977,00)	94,66		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.065.355.300,00	4.476.991.434,00	(588.363.866,00)	88,38		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	252.951.100,00	237.181.000,00	(15.770.100,00)	93,77		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	252.951.100,00	237.181.000,00	(15.770.100,00)	93,77		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.951.100,00	237.181.000,00	(15.770.100,00)	93,77		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.536.446.800,00	1.311.108.992,00	(225.337.808,00)	85,33		
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.011.800,00	55.817.500,00	(3.194.300,00)	94,59		
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.011.800,00	55.817.500,00	(3.194.300,00)	94,59		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	1.477.435.000,00	1.255.291.492,00	(222.143.508,00)	84,96		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.477.435.000,00	1.255.291.492,00	(222.143.508,00)	84,96		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	576.335.700,00	517.073.700,00	(59.262.000,00)	89,72		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	576.335.700,00	517.073.700,00	(59.262.000,00)	89,72		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.335.700,00	517.073.700,00	(59.262.000,00)	89,72		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.764.000,00	104.497.600,00	(266.400,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	104.764.000,00	104.497.600,00	(266.400,00)	99,75		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.764.000,00	104.497.600,00	(266.400,00)	99,75		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	221.450.000,00	212.440.000,00	(9.010.000,00)	95,93		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	215.450.000,00	212.440.000,00	(3.010.000,00)	98,60		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.450.000,00	212.440.000,00	(3.010.000,00)	98,60		
01.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
01.2.06.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0		
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	210.496.000,00	132.250.000,00	(78.246.000,00)	62,83		
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	210.496.000,00	132.250.000,00	(78.246.000,00)	62,83		
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.496.000,00	132.250.000,00	(78.246.000,00)	62,83		
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	261.341.700,00	171.679.700,00	(89.662.000,00)	65,69		
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	261.341.700,00	171.679.700,00	(89.662.000,00)	65,69		
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.341.700,00	171.679.700,00	(89.662.000,00)	65,69		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.901.570.000,00	1.790.760.442,00	(110.809.558,00)	94,17		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.901.570.000,00	1.790.760.442,00	(110.809.558,00)	94,17		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.901.570.000,00	1.790.760.442,00	(110.809.558,00)	94,17		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.286.935.860,00	5.035.193.337,00	(251.742.523,00)	95,24		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	471.061.000,00	443.378.400,00	(27.682.600,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	471.061.000,00	443.378.400,00	(27.682.600,00)	94,12		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471.061.000,00	443.378.400,00	(27.682.600,00)	94,12		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.616.102.800,00	1.509.438.801,00	(106.663.999,00)	93,40		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	64.556.400,00	49.745.000,00	(14.811.400,00)	77,06		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.556.400,00	49.745.000,00	(14.811.400,00)	77,06		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	1.551.546.400,00	1.459.693.801,00	(91.852.599,00)	94,08		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.551.546.400,00	1.459.693.801,00	(91.852.599,00)	94,08		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.199.772.060,00	3.082.376.136,00	(117.395.924,00)	96,33		
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	96.112.000,00	29.637.000,00	(66.475.000,00)	30,84		
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.112.000,00	29.637.000,00	(66.475.000,00)	30,84		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	3.103.660.060,00	3.052.739.136,00	(50.920.924,00)	98,36		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.103.660.060,00	3.052.739.136,00	(50.920.924,00)	98,36		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.642.202.950,00	3.089.534.404,00	(552.668.546,00)	84,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640.519.750,00	498.978.548,00	(141.541.202,00)	77,90		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	640.519.750,00	498.978.548,00	(141.541.202,00)	77,90		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.519.750,00	498.978.548,00	(141.541.202,00)	77,90		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.001.683.200,00	2.590.555.856,00	(411.127.344,00)	86,30		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.001.683.200,00	2.590.555.856,00	(411.127.344,00)	86,30		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.001.683.200,00	2.590.555.856,00	(411.127.344,00)	86,30		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.111.200.610,00	1.857.084.757,00	(254.115.853,00)	87,96		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	433.457.500,00	390.645.516,00	(42.811.984,00)	90,12		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	433.457.500,00	390.645.516,00	(42.811.984,00)	90,12		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.457.500,00	390.645.516,00	(42.811.984,00)	90,12		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495.947.500,00	439.773.822,00	(56.173.678,00)	88,67		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	495.947.500,00	439.773.822,00	(56.173.678,00)	88,67		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.947.500,00	439.773.822,00	(56.173.678,00)	88,67		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.150.000,00	216.647.500,00	(7.502.500,00)	96,65		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	224.150.000,00	216.647.500,00	(7.502.500,00)	96,65		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.150.000,00	216.647.500,00	(7.502.500,00)	96,65		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	957.645.610,00	810.017.919,00	(147.627.691,00)	84,58		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	575.145.610,00	430.005.312,00	(145.140.298,00)	74,76		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.145.610,00	430.005.312,00	(145.140.298,00)	74,76		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	382.500.000,00	380.012.607,00	(2.487.393,00)	99,35		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	31.250.607,00	(1.249.393,00)	96,16		
01.2.09.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	348.762.000,00	(1.238.000,00)	99,65		
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.450.269.020,00	19.533.375.994,00	(916.893.026,00)	95,52		
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.979.459.020,00	18.468.643.614,00	(510.815.406,00)	97,31		
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.979.459.020,00	18.468.643.614,00	(510.815.406,00)	97,31		
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	18.979.459.020,00	18.468.643.614,00	(510.815.406,00)	97,31		
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	806.160.000,00	726.528.630,00	(79.631.370,00)	90,12		
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	806.160.000,00	726.528.630,00	(79.631.370,00)	90,12		
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.160.000,00	726.528.630,00	(79.631.370,00)	90,12		
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	664.650.000,00	338.203.750,00	(326.446.250,00)	50,88		
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	664.650.000,00	338.203.750,00	(326.446.250,00)	50,88		
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.650.000,00	338.203.750,00	(326.446.250,00)	50,88		
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.154.829.015,00	3.881.854.500,00	(272.974.515,00)	93,43		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.154.829.015,00	3.881.854.500,00	(272.974.515,00)	93,43		
01.2.16.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.199.918.400,00	1.033.144.310,00	(166.774.090,00)	86,10		
01.2.16.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.199.918.400,00	1.033.144.310,00	(166.774.090,00)	86,10		
01.2.16.04.5.2	BELANJA MODAL	2.954.910.615,00	2.848.710.190,00	(106.200.425,00)	96,41		
01.2.16.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.166.579.600,00	2.066.395.589,00	(100.184.011,00)	95,38		
01.2.16.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	788.331.015,00	782.314.601,00	(6.016.414,00)	99,24		
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	39.946.645.215,00	29.668.437.398,00	(10.278.207.817,00)	74,27		
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13.883.703.300,00	9.739.092.160,00	(4.144.611.140,00)	70,15		
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.689.781.000,00	3.643.897.255,00	(1.045.883.745,00)	77,70		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.689.781.000,00	3.643.897.255,00	(1.045.883.745,00)	77,70		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.689.781.000,00	3.643.897.255,00	(1.045.883.745,00)	77,70		
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.391.687.500,00	4.638.780.405,00	(2.752.907.095,00)	62,76		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.391.687.500,00	4.638.780.405,00	(2.752.907.095,00)	62,76		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.391.687.500,00	4.638.780.405,00	(2.752.907.095,00)	62,76		
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- U ndangan	1.182.353.400,00	958.752.500,00	(223.600.900,00)	81,09		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.353.400,00	958.752.500,00	(223.600.900,00)	81,09		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.353.400,00	958.752.500,00	(223.600.900,00)	81,09		
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	398.616.400,00	388.162.000,00	(10.454.400,00)	97,38		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	398.616.400,00	388.162.000,00	(10.454.400,00)	97,38		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.616.400,00	388.162.000,00	(10.454.400,00)	97,38		
02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	221.265.000,00	109.500.000,00	(111.765.000,00)	49,49		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	221.265.000,00	109.500.000,00	(111.765.000,00)	49,49		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.265.000,00	109.500.000,00	(111.765.000,00)	49,49		
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	486.416.663,00	359.929.700,00	(126.486.963,00)	74,00		
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.655.500,00	18.556.000,00	(2.099.500,00)	89,84		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.655.500,00	18.556.000,00	(2.099.500,00)	89,84		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.655.500,00	18.556.000,00	(2.099.500,00)	89,84		
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.373.500,00	96.200.000,00	(173.500,00)	99,82		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	96.373.500,00	96.200.000,00	(173.500,00)	99,82		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.373.500,00	96.200.000,00	(173.500,00)	99,82		
02.2.02.03	Pembahasan APBD	227.286.235,00	109.789.100,00	(117.497.135,00)	48,30		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	227.286.235,00	109.789.100,00	(117.497.135,00)	48,30		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.286.235,00	109.789.100,00	(117.497.135,00)	48,30		
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	122.786.428,00	117.334.600,00	(5.451.828,00)	95,56		
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	122.786.428,00	117.334.600,00	(5.451.828,00)	95,56		
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.786.428,00	117.334.600,00	(5.451.828,00)	95,56		
02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.710.000,00	11.500.000,00	(1.210.000,00)	90,48		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.710.000,00	11.500.000,00	(1.210.000,00)	90,48		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	11.500.000,00	(1.210.000,00)	90,48		
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	373.435.000,00	363.025.000,00	(10.410.000,00)	97,21		
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	61.550.000,00	60.450.000,00	(1.100.000,00)	98,21		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.550.000,00	60.450.000,00	(1.100.000,00)	98,21		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	60.450.000,00	(1.100.000,00)	98,21		
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	61.550.000,00	61.275.000,00	(275.000,00)	99,55		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.550.000,00	61.275.000,00	(275.000,00)	99,55		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	61.275.000,00	(275.000,00)	99,55		
02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.605.000,00	6.550.000,00	(55.000,00)	99,17		
02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6.605.000,00	4.350.000,00	(2.255.000,00)	65,86		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.605.000,00	4.350.000,00	(2.255.000,00)	65,86		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.605.000,00	4.350.000,00	(2.255.000,00)	65,86		
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	61.000.000,00	54.275.000,00	(6.725.000,00)	88,98		
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	61.000.000,00	54.275.000,00	(6.725.000,00)	88,98		
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	54.275.000,00	(6.725.000,00)	88,98		
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	92.075.000,00	92.075.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	92.075.000,00	92.075.000,00	0,00	100,00		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.075.000,00	92.075.000,00	0,00	100,00		
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.942.012.872,00	3.133.943.729,00	(808.069.143,00)	79,50		
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.223.122.000,00	818.408.141,00	(404.713.859,00)	66,91		
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.223.122.000,00	818.408.141,00	(404.713.859,00)	66,91		
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.122.000,00	818.408.141,00	(404.713.859,00)	66,91		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	81.310.000,00	61.050.000,00	(20.260.000,00)	75,08		
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	81.310.000,00	61.050.000,00	(20.260.000,00)	75,08		
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.310.000,00	61.050.000,00	(20.260.000,00)	75,08		
02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	501.480.000,00	374.980.000,00	(126.500.000,00)	74,77		
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	501.480.000,00	374.980.000,00	(126.500.000,00)	74,77		
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.480.000,00	374.980.000,00	(126.500.000,00)	74,77		
02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2.136.100.872,00	1.879.505.588,00	(256.595.284,00)	87,99		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.136.100.872,00	1.879.505.588,00	(256.595.284,00)	87,99		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.100.872,00	1.879.505.588,00	(256.595.284,00)	87,99		
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.995.850.380,00	4.917.015.492,00	(1.078.834.888,00)	82,01		
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	31.500.000,00	30.125.000,00	(1.375.000,00)	95,63		
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	30.125.000,00	(1.375.000,00)	95,63		
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	30.125.000,00	(1.375.000,00)	95,63		
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	854.365.810,00	647.172.682,00	(207.193.128,00)	75,75		
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	804.365.810,00	599.442.682,00	(204.923.128,00)	74,52		
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.365.810,00	599.442.682,00	(204.923.128,00)	74,52		
02.2.05.02.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	47.730.000,00	(2.270.000,00)	95,46		
02.2.05.02.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	47.730.000,00	(2.270.000,00)	95,46		
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.919.940.070,00	4.080.237.810,00	(839.702.260,00)	82,93		
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.424.940.070,00	3.669.624.310,00	(755.315.760,00)	82,93		
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.424.940.070,00	3.669.624.310,00	(755.315.760,00)	82,93		
02.2.05.03.5.2	BELANJA MODAL	495.000.000,00	410.613.500,00	(84.386.500,00)	82,95		
02.2.05.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.000.000,00	410.613.500,00	(84.386.500,00)	82,95		
02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	190.044.500,00	159.480.000,00	(30.564.500,00)	83,92		
02.2.05.04.5.1	BELANJA OPERASI	190.044.500,00	159.480.000,00	(30.564.500,00)	83,92		
02.2.05.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.044.500,00	159.480.000,00	(30.564.500,00)	83,92		
02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	21.760.000,00	13.309.200,00	(8.450.800,00)	61,16		
02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	21.760.000,00	13.309.200,00	(8.450.800,00)	61,16		
02.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.760.000,00	13.309.200,00	(8.450.800,00)	61,16		
02.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	13.309.200,00	(8.450.800,00)	61,16		
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	15.243.467.000,00	11.142.122.117,00	(4.101.344.883,00)	73,09		
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.712.987.000,00	10.655.527.117,00	(4.057.459.883,00)	72,42		
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.712.987.000,00	10.655.527.117,00	(4.057.459.883,00)	72,42		
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.712.987.000,00	10.655.527.117,00	(4.057.459.883,00)	72,42		
02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	48.300.000,00	46.550.000,00	(1.750.000,00)	96,38		
02.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.300.000,00	46.550.000,00	(1.750.000,00)	96,38		
02.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	46.550.000,00	(1.750.000,00)	96,38		
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60.200.000,00	44.495.000,00	(15.705.000,00)	73,91		
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.200.000,00	44.495.000,00	(15.705.000,00)	73,91		
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	44.495.000,00	(15.705.000,00)	73,91		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	421.980.000,00	395.550.000,00	(26.430.000,00)	93,74		
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	421.980.000,00	395.550.000,00	(26.430.000,00)	93,74		
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.980.000,00	395.550.000,00	(26.430.000,00)	93,74		
	SURPLUS / DEFISIT	(90.036.991.359,00)	(74.793.546.781,00)	15.243.444.578,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(90.036.991.359,00)**	**(74.793.546.781,00)**	**15.243.444.578,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	26.609.748.673,00	25.789.676.484,00	(820.072.189,00)	96,92		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.095.546.973,00	12.705.826.120,00	(389.720.853,00)	97,02		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.170.000,00	264.578.710,00	(14.591.290,00)	94,77		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	196.570.000,00	183.728.710,00	(12.841.290,00)	93,47		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.570.000,00	183.728.710,00	(12.841.290,00)	93,47		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.570.000,00	183.728.710,00	(12.841.290,00)	93,47		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.140.000,00	63.390.000,00	(1.750.000,00)	97,31		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.140.000,00	63.390.000,00	(1.750.000,00)	97,31		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.140.000,00	63.390.000,00	(1.750.000,00)	97,31		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.988.722.933,00	8.832.918.146,00	(155.804.787,00)	98,27		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.840.247.533,00	8.755.809.468,00	(84.438.065,00)	99,04		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.840.247.533,00	8.755.809.468,00	(84.438.065,00)	99,04		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.840.247.533,00	8.755.809.468,00	(84.438.065,00)	99,04		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.550.400,00	57.194.178,00	(71.356.222,00)	44,49		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	128.550.400,00	57.194.178,00	(71.356.222,00)	44,49		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.550.400,00	57.194.178,00	(71.356.222,00)	44,49		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.825.000,00	12.814.500,00	(10.500,00)	99,92		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.825.000,00	12.814.500,00	(10.500,00)	99,92		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	12.814.500,00	(10.500,00)	99,92		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	542.479.000,00	533.016.000,00	(9.463.000,00)	98,26		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.359.000,00	42.700.000,00	(659.000,00)	98,48		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	43.359.000,00	42.700.000,00	(659.000,00)	98,48		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.359.000,00	42.700.000,00	(659.000,00)	98,48		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	499.120.000,00	490.316.000,00	(8.804.000,00)	98,24		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	499.120.000,00	490.316.000,00	(8.804.000,00)	98,24		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.120.000,00	490.316.000,00	(8.804.000,00)	98,24		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.438.052.200,00	1.365.129.527,00	(72.922.673,00)	94,93		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.869.300,00	80.207.000,00	(8.662.300,00)	90,25		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	88.869.300,00	80.207.000,00	(8.662.300,00)	90,25		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.869.300,00	80.207.000,00	(8.662.300,00)	90,25		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.132.900,00	555.499.599,00	(58.633.301,00)	90,45		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.569.500,00	78.700.000,00	(11.869.500,00)	86,89		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.569.500,00	78.700.000,00	(11.869.500,00)	86,89		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	523.563.400,00	476.799.599,00	(46.763.801,00)	91,07		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.563.400,00	476.799.599,00	(46.763.801,00)	91,07		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.662.000,00	60.817.500,00	(2.844.500,00)	95,53		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.662.000,00	60.817.500,00	(2.844.500,00)	95,53		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.662.000,00	60.817.500,00	(2.844.500,00)	95,53		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	654.708.000,00	651.925.428,00	(2.782.572,00)	99,57		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	654.708.000,00	651.925.428,00	(2.782.572,00)	99,57		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.708.000,00	651.925.428,00	(2.782.572,00)	99,57		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.500.000,00	216.828.375,00	(671.625,00)	99,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.500.000,00	216.828.375,00	(671.625,00)	99,69		
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	217.500.000,00	216.828.375,00	(671.625,00)	99,69		
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.500.000,00	216.828.375,00	(671.625,00)	99,69		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.839.300,00	800.353.088,00	(77.486.212,00)	91,17		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.289.500,00	244.957.488,00	(51.332.012,00)	82,68		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	296.289.500,00	244.957.488,00	(51.332.012,00)	82,68		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.289.500,00	244.957.488,00	(51.332.012,00)	82,68		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.549.800,00	555.395.600,00	(26.154.200,00)	95,50		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	571.549.800,00	546.195.600,00	(25.354.200,00)	95,56		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.549.800,00	546.195.600,00	(25.354.200,00)	95,56		
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	92,00		
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	92,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.783.540,00	693.002.274,00	(58.781.266,00)	92,18		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.081.500,00	184.301.622,00	(24.779.878,00)	88,15		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	209.081.500,00	184.301.622,00	(24.779.878,00)	88,15		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.081.500,00	184.301.622,00	(24.779.878,00)	88,15		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	542.702.040,00	508.700.652,00	(34.001.388,00)	93,73		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	325.535.840,00	292.372.521,00	(33.163.319,00)	89,81		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.535.840,00	292.372.521,00	(33.163.319,00)	89,81		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	217.166.200,00	216.328.131,00	(838.069,00)	99,61		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.166.200,00	216.328.131,00	(838.069,00)	99,61		
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	2.541.199.300,00	2.501.503.610,00	(39.695.690,00)	98,44		
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.718.556.300,00	1.708.360.432,00	(10.195.868,00)	99,41		
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	213.375.000,00	210.683.819,00	(2.691.181,00)	98,74		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	213.375.000,00	210.683.819,00	(2.691.181,00)	98,74		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.375.000,00	210.683.819,00	(2.691.181,00)	98,74		
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	112.715.000,00	112.028.886,00	(686.114,00)	99,39		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.715.000,00	112.028.886,00	(686.114,00)	99,39		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.715.000,00	112.028.886,00	(686.114,00)	99,39		
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	217.086.300,00	215.276.404,00	(1.809.896,00)	99,17		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	217.086.300,00	215.276.404,00	(1.809.896,00)	99,17		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.086.300,00	215.276.404,00	(1.809.896,00)	99,17		
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.175.380.000,00	1.170.371.323,00	(5.008.677,00)	99,57		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.175.380.000,00	1.170.371.323,00	(5.008.677,00)	99,57		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.380.000,00	1.170.371.323,00	(5.008.677,00)	99,57		
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	446.233.000,00	426.542.176,00	(19.690.824,00)	95,59		
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	425.903.000,00	406.637.476,00	(19.265.524,00)	95,48		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	325.903.000,00	307.125.976,00	(18.777.024,00)	94,24		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.903.000,00	307.125.976,00	(18.777.024,00)	94,24		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.511.500,00	(488.500,00)	99,51		
02.2.02.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.511.500,00	(488.500,00)	99,51		
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.330.000,00	19.904.700,00	(425.300,00)	97,91		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.330.000,00	19.904.700,00	(425.300,00)	97,91		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.330.000,00	19.904.700,00	(425.300,00)	97,91		
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376.410.000,00	366.601.002,00	(9.808.998,00)	97,39		
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	314.120.000,00	304.546.302,00	(9.573.698,00)	96,95		
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	314.120.000,00	304.546.302,00	(9.573.698,00)	96,95		
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.120.000,00	304.546.302,00	(9.573.698,00)	96,95		
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62.290.000,00	62.054.700,00	(235.300,00)	99,62		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	62.290.000,00	62.054.700,00	(235.300,00)	99,62		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.290.000,00	62.054.700,00	(235.300,00)	99,62		
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	7.046.613.000,00	6.837.617.388,00	(208.995.612,00)	97,03		
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	829.413.000,00	802.092.343,00	(27.320.657,00)	96,71		
02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	604.400.000,00	578.248.881,00	(26.151.119,00)	95,67		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	604.400.000,00	578.248.881,00	(26.151.119,00)	95,67		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.400.000,00	578.248.881,00	(26.151.119,00)	95,67		
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	225.013.000,00	223.843.462,00	(1.169.538,00)	99,48		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	225.013.000,00	223.843.462,00	(1.169.538,00)	99,48		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.013.000,00	223.843.462,00	(1.169.538,00)	99,48		
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	180.670.000,00	180.417.100,00	(252.900,00)	99,86		
02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	180.670.000,00	180.417.100,00	(252.900,00)	99,86		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	180.670.000,00	180.417.100,00	(252.900,00)	99,86		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.670.000,00	180.417.100,00	(252.900,00)	99,86		
02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.863.018.000,00	1.853.531.872,00	(9.486.128,00)	99,49		
02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	391.850.000,00	390.738.293,00	(1.111.707,00)	99,72		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	391.850.000,00	390.738.293,00	(1.111.707,00)	99,72		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.850.000,00	390.738.293,00	(1.111.707,00)	99,72		
02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	128.380.000,00	122.931.488,00	(5.448.512,00)	95,76		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	128.380.000,00	122.931.488,00	(5.448.512,00)	95,76		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.380.000,00	122.931.488,00	(5.448.512,00)	95,76		
02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1.342.788.000,00	1.339.862.091,00	(2.925.909,00)	99,78		
02.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.342.788.000,00	1.339.862.091,00	(2.925.909,00)	99,78		
02.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.788.000,00	1.339.862.091,00	(2.925.909,00)	99,78		
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.173.512.000,00	4.001.576.073,00	(171.935.927,00)	95,88		
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	312.313.000,00	299.490.500,00	(12.822.500,00)	95,89		
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	312.313.000,00	299.490.500,00	(12.822.500,00)	95,89		
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.313.000,00	299.490.500,00	(12.822.500,00)	95,89		
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3.861.199.000,00	3.702.085.573,00	(159.113.427,00)	95,88		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.861.199.000,00	3.702.085.573,00	(159.113.427,00)	95,88		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.861.199.000,00	3.702.085.573,00	(159.113.427,00)	95,88		
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	3.926.389.400,00	3.744.729.366,00	(181.660.034,00)	95,37		
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.917.883.500,00	1.820.585.050,00	(97.298.450,00)	94,93		
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	624.101.000,00	594.716.655,00	(29.384.345,00)	95,29		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	624.101.000,00	594.716.655,00	(29.384.345,00)	95,29		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.101.000,00	594.716.655,00	(29.384.345,00)	95,29		
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	218.327.000,00	206.756.541,00	(11.570.459,00)	94,70		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	218.327.000,00	206.756.541,00	(11.570.459,00)	94,70		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.327.000,00	206.756.541,00	(11.570.459,00)	94,70		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.745.500,00	55.616.400,00	(5.129.100,00)	91,56		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.745.500,00	55.616.400,00	(5.129.100,00)	91,56		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.745.500,00	55.616.400,00	(5.129.100,00)	91,56		
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	313.934.000,00	303.252.199,00	(10.681.801,00)	96,60		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	313.934.000,00	303.252.199,00	(10.681.801,00)	96,60		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.934.000,00	303.252.199,00	(10.681.801,00)	96,60		
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.461.000,00	89.145.987,00	(4.315.013,00)	95,38		
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	93.461.000,00	89.145.987,00	(4.315.013,00)	95,38		
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.461.000,00	89.145.987,00	(4.315.013,00)	95,38		
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.300.000,00	28.474.194,00	(6.825.806,00)	80,66		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.300.000,00	28.474.194,00	(6.825.806,00)	80,66		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	28.474.194,00	(6.825.806,00)	80,66		
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.390.000,00	33.779.720,00	(6.610.280,00)	83,63		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	40.390.000,00	33.779.720,00	(6.610.280,00)	83,63		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.390.000,00	33.779.720,00	(6.610.280,00)	83,63		
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	531.625.000,00	508.843.354,00	(22.781.646,00)	95,71		
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	531.625.000,00	508.843.354,00	(22.781.646,00)	95,71		
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.625.000,00	508.843.354,00	(22.781.646,00)	95,71		
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	630.715.400,00	626.985.645,00	(3.729.755,00)	99,41		
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139.801.000,00	138.720.305,00	(1.080.695,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.801.000,00	138.720.305,00	(1.080.695,00)	99,23		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.801.000,00	138.720.305,00	(1.080.695,00)	99,23		
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.096.200,00	41.921.541,00	(174.659,00)	99,59		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.096.200,00	41.921.541,00	(174.659,00)	99,59		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.096.200,00	41.921.541,00	(174.659,00)	99,59		
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.226.200,00	28.224.000,00	(2.200,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	28.226.200,00	28.224.000,00	(2.200,00)	99,99		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.226.200,00	28.224.000,00	(2.200,00)	99,99		
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.220.000,00	63.804.086,00	(415.914,00)	99,35		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	64.220.000,00	63.804.086,00	(415.914,00)	99,35		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.220.000,00	63.804.086,00	(415.914,00)	99,35		
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.181.200,00	98.961.567,00	(219.633,00)	99,78		
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	99.181.200,00	98.961.567,00	(219.633,00)	99,78		
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.181.200,00	98.961.567,00	(219.633,00)	99,78		
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	210.557.500,00	209.737.366,00	(820.134,00)	99,61		
03.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	210.557.500,00	209.737.366,00	(820.134,00)	99,61		
03.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.557.500,00	209.737.366,00	(820.134,00)	99,61		
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.106.700,00	26.750.800,00	(355.900,00)	98,69		
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	27.106.700,00	26.750.800,00	(355.900,00)	98,69		
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.106.700,00	26.750.800,00	(355.900,00)	98,69		
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	19.526.600,00	18.865.980,00	(660.620,00)	96,62		
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	19.526.600,00	18.865.980,00	(660.620,00)	96,62		
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.526.600,00	18.865.980,00	(660.620,00)	96,62		
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.377.790.500,00	1.297.158.671,00	(80.631.829,00)	94,15		
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.263.500,00	105.719.010,00	(19.544.490,00)	84,40		
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.263.500,00	105.719.010,00	(19.544.490,00)	84,40		
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.263.500,00	105.719.010,00	(19.544.490,00)	84,40		
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.717.000,00	11.000.000,00	(4.717.000,00)	69,99		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.717.000,00	11.000.000,00	(4.717.000,00)	69,99		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.717.000,00	11.000.000,00	(4.717.000,00)	69,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.138.000,00	25.125.000,00	(1.013.000,00)	96,12		
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.138.000,00	25.125.000,00	(1.013.000,00)	96,12		
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.138.000,00	25.125.000,00	(1.013.000,00)	96,12		
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	168.143.000,00	153.409.576,00	(14.733.424,00)	91,24		
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	168.143.000,00	153.409.576,00	(14.733.424,00)	91,24		
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.143.000,00	153.409.576,00	(14.733.424,00)	91,24		
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.042.529.000,00	1.001.905.085,00	(40.623.915,00)	96,10		
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.032.529.000,00	1.001.905.085,00	(30.623.915,00)	97,03		
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.529.000,00	1.001.905.085,00	(30.623.915,00)	97,03		
03.2.03.08.5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
03.2.03.08.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0		
	SURPLUS / DEFISIT	(26.609.748.673,00)	(25.789.676.484,00)	820.072.189,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(26.609.748.673,00)**	**(25.789.676.484,00)**	**820.072.189,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	3.295.720.007.929,00	3.490.572.207.118,37	194.852.199.189,37	105,91		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	94.272.571.352,00	146.594.648.350,37	52.322.076.998,37	155,50		
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	1.752.366.130,00	104,89		
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	0,00	100,00		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.124.071.526,00	60.693.782.394,37	50.569.710.868,37	599,50	NULL	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.851.458.117.640,00	2.975.658.786.323,00	124.200.668.683,00	104,36		
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.773.662.760.000,00	2.895.708.076.413,00	122.045.316.413,00	104,40		
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	2.155.352.270,00	102,77		
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	349.989.318.937,00	368.318.772.445,00	18.329.453.508,00	105,24		
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	90,00	90,00	0		
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	349.989.318.937,00	368.318.772.355,00	18.329.453.418,00	105,24	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	480.286.449.193,85	436.723.043.961,02	(43.563.405.232,83)	90,93		
00	**Non Program**	0,00	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	0		
00.0.00	Non Kegiatan	0,00	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	0		
00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	0		
00.0.00.00.5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	0		
00.0.00.00.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	0		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	37.507.295.760,00	25.210.565.765,00	(12.296.729.995,00)	67,22		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	568.467.800,00	471.815.610,00	(96.652.190,00)	83,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	276.250.500,00	208.422.640,00	(67.827.860,00)	75,45		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	276.250.500,00	208.422.640,00	(67.827.860,00)	75,45		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.250.500,00	208.422.640,00	(67.827.860,00)	75,45		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.313.500,00	69.018.000,00	(2.295.500,00)	96,78		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	71.313.500,00	69.018.000,00	(2.295.500,00)	96,78		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.313.500,00	69.018.000,00	(2.295.500,00)	96,78		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.903.800,00	194.374.970,00	(26.528.830,00)	87,99		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	220.903.800,00	194.374.970,00	(26.528.830,00)	87,99		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.903.800,00	194.374.970,00	(26.528.830,00)	87,99		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.708.374.707,00	15.505.002.698,00	(10.203.372.009,00)	60,31		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.989.039.707,00	14.808.318.537,00	(10.180.721.170,00)	59,26		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.989.039.707,00	14.808.318.537,00	(10.180.721.170,00)	59,26		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	24.989.039.707,00	14.808.318.537,00	(10.180.721.170,00)	59,26		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	533.886.100,00	518.191.220,00	(15.694.880,00)	97,06		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	533.886.100,00	518.191.220,00	(15.694.880,00)	97,06		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.886.100,00	518.191.220,00	(15.694.880,00)	97,06		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.692.600,00	60.196.320,00	(2.496.280,00)	96,02		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	62.692.600,00	60.196.320,00	(2.496.280,00)	96,02		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.692.600,00	60.196.320,00	(2.496.280,00)	96,02		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	122.756.300,00	118.296.621,00	(4.459.679,00)	96,37		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	122.756.300,00	118.296.621,00	(4.459.679,00)	96,37		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.756.300,00	118.296.621,00	(4.459.679,00)	96,37		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.506.348.000,00	2.206.486.335,00	(299.861.665,00)	88,04		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	247.086.000,00	243.950.000,00	(3.136.000,00)	98,73		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	247.086.000,00	243.950.000,00	(3.136.000,00)	98,73		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.086.000,00	243.950.000,00	(3.136.000,00)	98,73		
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	153.683.000,00	130.133.950,00	(23.549.050,00)	84,68		
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	153.683.000,00	130.133.950,00	(23.549.050,00)	84,68		
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.683.000,00	130.133.950,00	(23.549.050,00)	84,68		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.105.579.000,00	1.832.402.385,00	(273.176.615,00)	87,03		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.105.579.000,00	1.832.402.385,00	(273.176.615,00)	87,03		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.105.579.000,00	1.832.402.385,00	(273.176.615,00)	87,03		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.842.231.900,00	1.352.652.044,00	(489.579.856,00)	73,42		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.317.500,00	40.377.300,00	(9.940.200,00)	80,25		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.317.500,00	40.377.300,00	(9.940.200,00)	80,25		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.317.500,00	40.377.300,00	(9.940.200,00)	80,25		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.166.744.800,00	694.164.002,00	(472.580.798,00)	59,50		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	257.029.900,00	100.391.997,00	(156.637.903,00)	39,06		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.029.900,00	100.391.997,00	(156.637.903,00)	39,06		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	909.714.900,00	593.772.005,00	(315.942.895,00)	65,27		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	909.714.900,00	593.772.005,00	(315.942.895,00)	65,27		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.121.000,00	10.693.000,00	(6.428.000,00)	62,46		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	17.121.000,00	10.693.000,00	(6.428.000,00)	62,46		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.121.000,00	10.693.000,00	(6.428.000,00)	62,46		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.048.600,00	607.417.742,00	(630.858,00)	99,90		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	608.048.600,00	607.417.742,00	(630.858,00)	99,90		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.048.600,00	607.417.742,00	(630.858,00)	99,90		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.484.930.500,00	1.643.312.542,00	(841.617.958,00)	66,13		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.063.213.000,00	863.070.471,00	(200.142.529,00)	81,18		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	665.253.000,00	316.220.471,00	(349.032.529,00)	47,53		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.253.000,00	316.220.471,00	(349.032.529,00)	47,53		
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	397.960.000,00	546.850.000,00	148.890.000,00	137,41		
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.960.000,00	546.850.000,00	148.890.000,00	137,41		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.670.000,00	32.637.500,00	(6.032.500,00)	84,40		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	38.670.000,00	32.637.500,00	(6.032.500,00)	84,40		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.670.000,00	32.637.500,00	(6.032.500,00)	84,40		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.383.047.500,00	747.604.571,00	(635.442.929,00)	54,05		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.383.047.500,00	747.604.571,00	(635.442.929,00)	54,05		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.383.047.500,00	747.604.571,00	(635.442.929,00)	54,05		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.396.942.853,00	4.031.296.536,00	(365.646.317,00)	91,68		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.914.800,00	373.218.280,00	(136.696.520,00)	73,19		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	509.914.800,00	373.218.280,00	(136.696.520,00)	73,19		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.914.800,00	373.218.280,00	(136.696.520,00)	73,19		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.887.028.053,00	3.658.078.256,00	(228.949.797,00)	94,11		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.366.628.275,00	2.197.170.032,00	(169.458.243,00)	92,84		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.366.628.275,00	2.197.170.032,00	(169.458.243,00)	92,84		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	1.520.399.778,00	1.460.908.224,00	(59.491.554,00)	96,09		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.422.295,00	379.220.400,00	(21.201.895,00)	94,71		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.119.977.483,00	1.081.687.824,00	(38.289.659,00)	96,58		
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	419.586.191.633,85	292.780.952.702,00	(126.805.238.931,85)	69,78		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.390.112.920,00	1.839.157.568,00	(550.955.352,00)	76,95		
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	165.226.000,00	144.894.150,00	(20.331.850,00)	87,69		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.610.000,00	131.519.150,00	(16.090.850,00)	89,10		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.610.000,00	131.519.150,00	(16.090.850,00)	89,10		
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	17.616.000,00	13.375.000,00	(4.241.000,00)	75,93		
02.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.616.000,00	13.375.000,00	(4.241.000,00)	75,93		
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	103.023.100,00	100.696.576,00	(2.326.524,00)	97,74		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.023.100,00	100.696.576,00	(2.326.524,00)	97,74		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.023.100,00	100.696.576,00	(2.326.524,00)	97,74		
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	342.195.600,00	227.316.400,00	(114.879.200,00)	66,43		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	342.195.600,00	227.316.400,00	(114.879.200,00)	66,43		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.195.600,00	227.316.400,00	(114.879.200,00)	66,43		
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.373.000,00	34.307.500,00	(2.065.500,00)	94,32		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	36.373.000,00	34.307.500,00	(2.065.500,00)	94,32		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.373.000,00	34.307.500,00	(2.065.500,00)	94,32		
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	336.745.000,00	280.997.772,00	(55.747.228,00)	83,45		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	336.745.000,00	280.997.772,00	(55.747.228,00)	83,45		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.745.000,00	280.997.772,00	(55.747.228,00)	83,45		
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	269.232.000,00	236.029.456,00	(33.202.544,00)	87,67		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	269.232.000,00	236.029.456,00	(33.202.544,00)	87,67		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.232.000,00	236.029.456,00	(33.202.544,00)	87,67		
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.137.318.220,00	814.915.714,00	(322.402.506,00)	71,65		
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.137.318.220,00	814.915.714,00	(322.402.506,00)	71,65		
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.318.220,00	814.915.714,00	(322.402.506,00)	71,65		
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.767.450.700,00	3.614.424.543,00	(1.153.026.157,00)	75,81		
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	282.069.700,00	225.836.062,00	(56.233.638,00)	80,06		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	182.069.700,00	131.150.159,00	(50.919.541,00)	72,03		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.069.700,00	131.150.159,00	(50.919.541,00)	72,03		
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	94.685.903,00	(5.314.097,00)	94,69		
02.2.02.01.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	94.685.903,00	(5.314.097,00)	94,69		
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	773.985.500,00	761.689.606,00	(12.295.894,00)	98,41		
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	773.985.500,00	761.689.606,00	(12.295.894,00)	98,41		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.985.500,00	761.689.606,00	(12.295.894,00)	98,41		
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.088.627.000,00	664.584.247,00	(424.042.753,00)	61,05		
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.088.627.000,00	664.584.247,00	(424.042.753,00)	61,05		
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.627.000,00	664.584.247,00	(424.042.753,00)	61,05		
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	526.507.000,00	227.335.600,00	(299.171.400,00)	43,18		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	526.507.000,00	227.335.600,00	(299.171.400,00)	43,18		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.507.000,00	227.335.600,00	(299.171.400,00)	43,18		
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	475.895.000,00	317.872.845,00	(158.022.155,00)	66,79		
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	475.895.000,00	317.872.845,00	(158.022.155,00)	66,79		
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.895.000,00	317.872.845,00	(158.022.155,00)	66,79		
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	589.641.000,00	444.855.400,00	(144.785.600,00)	75,45		
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	589.641.000,00	444.855.400,00	(144.785.600,00)	75,45		
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.641.000,00	444.855.400,00	(144.785.600,00)	75,45		
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.030.725.500,00	972.250.783,00	(58.474.717,00)	94,33		
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.030.725.500,00	972.250.783,00	(58.474.717,00)	94,33		
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.725.500,00	972.250.783,00	(58.474.717,00)	94,33		
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.939.987.800,00	2.811.497.495,00	(128.490.305,00)	95,63		
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	54.161.600,00	47.443.200,00	(6.718.400,00)	87,60		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.161.600,00	47.443.200,00	(6.718.400,00)	87,60		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.161.600,00	47.443.200,00	(6.718.400,00)	87,60		
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	87.595.600,00	86.438.346,00	(1.157.254,00)	98,68		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.595.600,00	86.438.346,00	(1.157.254,00)	98,68		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.595.600,00	86.438.346,00	(1.157.254,00)	98,68		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	357.333.000,00	350.772.500,00	(6.560.500,00)	98,16		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	257.333.000,00	252.315.500,00	(5.017.500,00)	98,05		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.333.000,00	252.315.500,00	(5.017.500,00)	98,05		
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.457.000,00	(1.543.000,00)	98,46		
02.2.03.04.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	98.457.000,00	(1.543.000,00)	98,46		
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	432.970.000,00	425.098.260,00	(7.871.740,00)	98,18		
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	432.970.000,00	425.098.260,00	(7.871.740,00)	98,18		
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.970.000,00	425.098.260,00	(7.871.740,00)	98,18		
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	193.842.800,00	187.597.126,00	(6.245.674,00)	96,78		
02.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	193.842.800,00	187.597.126,00	(6.245.674,00)	96,78		
02.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.842.800,00	187.597.126,00	(6.245.674,00)	96,78		
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.814.084.800,00	1.714.148.063,00	(99.936.737,00)	94,49		
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.704.245.300,00	1.617.011.963,00	(87.233.337,00)	94,88		
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.245.300,00	1.617.011.963,00	(87.233.337,00)	94,88		
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	109.839.500,00	97.136.100,00	(12.703.400,00)	88,43		
02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.839.500,00	97.136.100,00	(12.703.400,00)	88,43		
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	409.488.640.213,85	284.515.873.096,00	(124.972.767.117,85)	69,48		
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	277.046.762.400,00	(118.850.872.992,00)	69,98		
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	395.897.635.392,00	277.046.762.400,00	(118.850.872.992,00)	69,98		
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	277.046.762.400,00	(118.850.872.992,00)	69,98		
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	(6.089.357.325,85)	35,75		
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	(6.089.357.325,85)	35,75		
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	(6.089.357.325,85)	35,75		
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	(32.536.800,00)	99,21		
02.2.04.10.5.4	BELANJA TRANSFER	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	(32.536.800,00)	99,21		
02.2.04.10.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	(32.536.800,00)	99,21		
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	18.027.142.300,00	16.273.031.085,00	(1.754.111.215,00)	90,27		
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.027.142.300,00	16.273.031.085,00	(1.754.111.215,00)	90,27		
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	225.219.200,00	224.413.700,00	(805.500,00)	99,64		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	225.219.200,00	224.413.700,00	(805.500,00)	99,64		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.219.200,00	224.413.700,00	(805.500,00)	99,64		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	166.025.800,00	134.778.947,00	(31.246.853,00)	81,18		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	166.025.800,00	134.778.947,00	(31.246.853,00)	81,18		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.025.800,00	134.778.947,00	(31.246.853,00)	81,18		
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	287.057.900,00	283.412.354,00	(3.645.546,00)	98,73		
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	287.057.900,00	283.412.354,00	(3.645.546,00)	98,73		
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.057.900,00	283.412.354,00	(3.645.546,00)	98,73		
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	22.854.000,00	21.353.000,00	(1.501.000,00)	93,43		
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.854.000,00	21.353.000,00	(1.501.000,00)	93,43		
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.854.000,00	21.353.000,00	(1.501.000,00)	93,43		
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	789.988.600,00	704.149.119,00	(85.839.481,00)	89,13		
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	612.047.200,00	536.295.119,00	(75.752.081,00)	87,62		
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.047.200,00	536.295.119,00	(75.752.081,00)	87,62		
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	177.941.400,00	167.854.000,00	(10.087.400,00)	94,33		
03.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.941.400,00	167.854.000,00	(10.087.400,00)	94,33		
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	132.918.600,00	81.934.500,00	(50.984.100,00)	61,64		
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.126.600,00	28.084.500,00	(2.042.100,00)	93,22		
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.126.600,00	28.084.500,00	(2.042.100,00)	93,22		
03.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	102.792.000,00	53.850.000,00	(48.942.000,00)	52,39		
03.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.792.000,00	53.850.000,00	(48.942.000,00)	52,39		
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14.266.921.800,00	13.111.614.356,00	(1.155.307.444,00)	91,90		
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	4.584.375.400,00	4.014.610.891,00	(569.764.509,00)	87,57		
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.584.375.400,00	4.014.610.891,00	(569.764.509,00)	87,57		
03.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	9.682.546.400,00	9.097.003.465,00	(585.542.935,00)	93,95		
03.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.682.546.400,00	9.097.003.465,00	(585.542.935,00)	93,95		
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	825.303.400,00	734.494.516,00	(90.808.884,00)	89,00		
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	538.672.200,00	487.249.013,00	(51.423.187,00)	90,45		
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.672.200,00	487.249.013,00	(51.423.187,00)	90,45		
03.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	286.631.200,00	247.245.503,00	(39.385.697,00)	86,26		
03.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.631.200,00	148.400.003,00	(38.231.197,00)	79,52		
03.2.01.12.5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	98.845.500,00	(1.154.500,00)	98,85		
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	1.310.853.000,00	976.880.593,00	(333.972.407,00)	74,52		
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.310.853.000,00	976.880.593,00	(333.972.407,00)	74,52		
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.853.000,00	976.880.593,00	(333.972.407,00)	74,52		
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	5.165.819.500,00	4.213.537.389,02	(952.282.110,98)	81,57		
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.165.819.500,00	4.213.537.389,02	(952.282.110,98)	81,57		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	470.714.500,00	337.062.039,02	(133.652.460,98)	71,61		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	470.714.500,00	337.062.039,02	(133.652.460,98)	71,61		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.714.500,00	337.062.039,02	(133.652.460,98)	71,61		
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	801.074.200,00	600.906.803,00	(200.167.397,00)	75,01		
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	732.632.700,00	536.993.003,00	(195.639.697,00)	73,30		
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.632.700,00	536.993.003,00	(195.639.697,00)	73,30		
04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	68.441.500,00	63.913.800,00	(4.527.700,00)	93,38		
04.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.441.500,00	63.913.800,00	(4.527.700,00)	93,38		
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.423.379.600,00	1.232.630.186,00	(190.749.414,00)	86,60		
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.358.379.600,00	1.179.905.186,00	(178.474.414,00)	86,86		
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.358.379.600,00	1.179.905.186,00	(178.474.414,00)	86,86		
04.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	52.725.000,00	(12.275.000,00)	81,12		
04.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	52.725.000,00	(12.275.000,00)	81,12		
04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	429.223.000,00	308.457.807,00	(120.765.193,00)	71,86		
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	429.223.000,00	308.457.807,00	(120.765.193,00)	71,86		
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.223.000,00	308.457.807,00	(120.765.193,00)	71,86		
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	489.672.600,00	252.854.867,00	(236.817.733,00)	51,64		
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	489.672.600,00	252.854.867,00	(236.817.733,00)	51,64		
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.672.600,00	252.854.867,00	(236.817.733,00)	51,64		
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	147.966.000,00	125.031.499,00	(22.934.501,00)	84,50		
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	147.966.000,00	125.031.499,00	(22.934.501,00)	84,50		
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.966.000,00	125.031.499,00	(22.934.501,00)	84,50		
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	983.886.000,00	963.358.889,00	(20.527.111,00)	97,91		
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	983.886.000,00	963.358.889,00	(20.527.111,00)	97,91		
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.886.000,00	963.358.889,00	(20.527.111,00)	97,91		
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	205.689.000,00	192.708.195,00	(12.980.805,00)	93,69		
04.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	205.689.000,00	192.708.195,00	(12.980.805,00)	93,69		
04.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.689.000,00	192.708.195,00	(12.980.805,00)	93,69		
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	214.214.600,00	200.527.104,00	(13.687.496,00)	93,61		
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	214.214.600,00	200.527.104,00	(13.687.496,00)	93,61		
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.214.600,00	200.527.104,00	(13.687.496,00)	93,61		
	SURPLUS / DEFISIT	2.815.433.558.735,15	3.053.849.163.157,35	238.415.604.422,20	108,47		
	PEMBIAYAAN						
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00		
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	0,00	100,00		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**3.453.341.995.736,00**	**3.691.757.600.158,20**	**238.415.604.422,20**	**106,90**		

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	25.564.830.993,00	20.138.116.694,00	(5.426.714.299,00)	78,77		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.691.990.493,00	10.625.414.784,00	(1.066.575.709,00)	90,88		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.822.700,00	153.746.776,00	(9.075.924,00)	94,43		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.558.000,00	56.471.790,00	(86.210,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.558.000,00	56.471.790,00	(86.210,00)	99,85		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.558.000,00	56.471.790,00	(86.210,00)	99,85		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.529.700,00	64.144.691,00	(8.385.009,00)	88,44		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	72.529.700,00	64.144.691,00	(8.385.009,00)	88,44		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.529.700,00	64.144.691,00	(8.385.009,00)	88,44		
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.735.000,00	33.130.295,00	(604.705,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	33.735.000,00	33.130.295,00	(604.705,00)	98,21		
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.735.000,00	33.130.295,00	(604.705,00)	98,21		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.183.574.737,00	7.839.911.548,00	(343.663.189,00)	95,80		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.084.957.737,00	7.746.826.362,00	(338.131.375,00)	95,82		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.084.957.737,00	7.746.826.362,00	(338.131.375,00)	95,82		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	8.084.957.737,00	7.746.826.362,00	(338.131.375,00)	95,82		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.848.000,00	80.701.700,00	(1.146.300,00)	98,60		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.848.000,00	80.701.700,00	(1.146.300,00)	98,60		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.848.000,00	80.701.700,00	(1.146.300,00)	98,60		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.769.000,00	12.383.486,00	(4.385.514,00)	73,85		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.769.000,00	12.383.486,00	(4.385.514,00)	73,85		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.769.000,00	12.383.486,00	(4.385.514,00)	73,85		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.054.300,00	798.021.107,00	(159.033.193,00)	83,38		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.856.300,00	469.752.997,00	(107.103.303,00)	81,43		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	134.213.500,00	63.231.295,00	(70.982.205,00)	47,11		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.213.500,00	63.231.295,00	(70.982.205,00)	47,11		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	442.642.800,00	406.521.702,00	(36.121.098,00)	91,84		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.642.800,00	406.521.702,00	(36.121.098,00)	91,84		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.022.000,00	24.850.000,00	(21.172.000,00)	54,00		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	46.022.000,00	24.850.000,00	(21.172.000,00)	54,00		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.022.000,00	24.850.000,00	(21.172.000,00)	54,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.176.000,00	303.418.110,00	(30.757.890,00)	90,80		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	334.176.000,00	303.418.110,00	(30.757.890,00)	90,80		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.176.000,00	303.418.110,00	(30.757.890,00)	90,80		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.400.400,00	880.690.391,00	(18.710.009,00)	97,92		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899.400.400,00	880.690.391,00	(18.710.009,00)	97,92		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	899.400.400,00	880.690.391,00	(18.710.009,00)	97,92		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	726.900.400,00	709.029.600,00	(17.870.800,00)	97,54		
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.500.000,00	171.660.791,00	(839.209,00)	99,51		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.574.556,00	616.190.461,00	(420.384.095,00)	59,44		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.900.000,00	293.807.056,00	(244.092.944,00)	54,62		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	537.900.000,00	293.807.056,00	(244.092.944,00)	54,62		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.900.000,00	293.807.056,00	(244.092.944,00)	54,62		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.674.556,00	322.383.405,00	(176.291.151,00)	64,65		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	498.674.556,00	322.383.405,00	(176.291.151,00)	64,65		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.674.556,00	322.383.405,00	(176.291.151,00)	64,65		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.563.800,00	336.854.501,00	(115.709.299,00)	74,43		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.563.800,00	91.787.501,00	(85.776.299,00)	51,69		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	177.563.800,00	91.787.501,00	(85.776.299,00)	51,69		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.563.800,00	91.787.501,00	(85.776.299,00)	51,69		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.000.000,00	245.067.000,00	(29.933.000,00)	89,12		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	245.067.000,00	(29.933.000,00)	89,12		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	245.067.000,00	(29.933.000,00)	89,12		
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	8.217.242.700,00	6.001.066.408,00	(2.216.176.292,00)	73,03		
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	769.173.600,00	724.699.902,00	(44.473.698,00)	94,22		
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	370.177.000,00	337.482.768,00	(32.694.232,00)	91,17		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	370.177.000,00	337.482.768,00	(32.694.232,00)	91,17		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.177.000,00	337.482.768,00	(32.694.232,00)	91,17		
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	121.396.000,00	121.327.919,00	(68.081,00)	99,94		
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	121.396.000,00	121.327.919,00	(68.081,00)	99,94		
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.396.000,00	121.327.919,00	(68.081,00)	99,94		
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	94.510.100,00	89.252.419,00	(5.257.681,00)	94,44		
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	94.510.100,00	89.252.419,00	(5.257.681,00)	94,44		
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.510.100,00	89.252.419,00	(5.257.681,00)	94,44		
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	183.090.500,00	176.636.796,00	(6.453.704,00)	96,48		
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	183.090.500,00	176.636.796,00	(6.453.704,00)	96,48		
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.090.500,00	176.636.796,00	(6.453.704,00)	96,48		
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.495.994.000,00	1.213.171.351,00	(282.822.649,00)	81,09		
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	1.365.693.000,00	1.083.594.497,00	(282.098.503,00)	79,34		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.365.693.000,00	1.083.594.497,00	(282.098.503,00)	79,34		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.693.000,00	1.083.594.497,00	(282.098.503,00)	79,34		
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	130.301.000,00	129.576.854,00	(724.146,00)	99,44		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	130.301.000,00	129.576.854,00	(724.146,00)	99,44		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.301.000,00	129.576.854,00	(724.146,00)	99,44		
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.493.880.500,00	3.662.832.374,00	(1.831.048.126,00)	66,67		
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	893.295.000,00	299.249.838,00	(594.045.162,00)	33,50		
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	893.295.000,00	299.249.838,00	(594.045.162,00)	33,50		
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.295.000,00	299.249.838,00	(594.045.162,00)	33,50		
02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.443.686.000,00	1.379.600.559,00	(64.085.441,00)	95,56		
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.443.686.000,00	1.379.600.559,00	(64.085.441,00)	95,56		
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.443.686.000,00	1.379.600.559,00	(64.085.441,00)	95,56		
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.589.978.000,00	465.041.538,00	(1.124.936.462,00)	29,25		
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.589.978.000,00	465.041.538,00	(1.124.936.462,00)	29,25		
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.589.978.000,00	465.041.538,00	(1.124.936.462,00)	29,25		
02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	771.108.000,00	743.898.096,00	(27.209.904,00)	96,47		
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	771.108.000,00	743.898.096,00	(27.209.904,00)	96,47		
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.108.000,00	743.898.096,00	(27.209.904,00)	96,47		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	795.813.500,00	775.042.343,00	(20.771.157,00)	97,39		
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	795.813.500,00	775.042.343,00	(20.771.157,00)	97,39		
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.813.500,00	775.042.343,00	(20.771.157,00)	97,39		
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	458.194.600,00	400.362.781,00	(57.831.819,00)	87,38		
02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	121.291.000,00	105.904.636,00	(15.386.364,00)	87,31		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.291.000,00	105.904.636,00	(15.386.364,00)	87,31		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.291.000,00	105.904.636,00	(15.386.364,00)	87,31		
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	138.559.600,00	119.905.490,00	(18.654.110,00)	86,54		
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	138.559.600,00	119.905.490,00	(18.654.110,00)	86,54		
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.559.600,00	119.905.490,00	(18.654.110,00)	86,54		
02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	58.289.000,00	52.330.853,00	(5.958.147,00)	89,78		
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	58.289.000,00	52.330.853,00	(5.958.147,00)	89,78		
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.289.000,00	52.330.853,00	(5.958.147,00)	89,78		
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.825.000,00	79.673.602,00	(6.151.398,00)	92,83		
02.2.04.08.5.1	BELANJA OPERASI	85.825.000,00	79.673.602,00	(6.151.398,00)	92,83		
02.2.04.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.825.000,00	79.673.602,00	(6.151.398,00)	92,83		
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	54.230.000,00	42.548.200,00	(11.681.800,00)	78,46		
02.2.04.09.5.1	BELANJA OPERASI	54.230.000,00	42.548.200,00	(11.681.800,00)	78,46		
02.2.04.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.230.000,00	42.548.200,00	(11.681.800,00)	78,46		
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	5.655.597.800,00	3.511.635.502,00	(2.143.962.298,00)	62,09		
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.655.597.800,00	3.511.635.502,00	(2.143.962.298,00)	62,09		
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.655.597.800,00	3.511.635.502,00	(2.143.962.298,00)	62,09		
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	5.655.597.800,00	3.511.635.502,00	(2.143.962.298,00)	62,09		
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.655.597.800,00	3.511.635.502,00	(2.143.962.298,00)	62,09		
	SURPLUS / DEFISIT	(25.564.830.993,00)	(20.138.116.694,00)	5.426.714.299,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(25.564.830.993,00)**	**(20.138.116.694,00)**	**5.426.714.299,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 INSPEKTORAT

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	36.721.000.553,00	32.696.885.770,24	(4.024.114.782,76)	89,04		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	31.057.142.853,00	28.937.600.422,24	(2.119.542.430,76)	93,18		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.067.924,00	108.815.600,00	(46.252.324,00)	70,17		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.147.600,00	29.079.900,00	(3.067.700,00)	90,46		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.147.600,00	29.079.900,00	(3.067.700,00)	90,46		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.147.600,00	29.079.900,00	(3.067.700,00)	90,46		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.633.824,00	37.942.000,00	(6.691.824,00)	85,01		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	44.633.824,00	37.942.000,00	(6.691.824,00)	85,01		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.633.824,00	37.942.000,00	(6.691.824,00)	85,01		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	42.340.000,00	22.268.700,00	(20.071.300,00)	52,59		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	42.340.000,00	22.268.700,00	(20.071.300,00)	52,59		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.340.000,00	22.268.700,00	(20.071.300,00)	52,59		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.946.500,00	19.525.000,00	(16.421.500,00)	54,32		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	35.946.500,00	19.525.000,00	(16.421.500,00)	54,32		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.946.500,00	19.525.000,00	(16.421.500,00)	54,32		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.752.675.395,00	15.675.057.004,00	(1.077.618.391,00)	93,57		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.752.675.395,00	15.675.057.004,00	(1.077.618.391,00)	93,57		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.752.675.395,00	15.675.057.004,00	(1.077.618.391,00)	93,57		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	16.752.675.395,00	15.675.057.004,00	(1.077.618.391,00)	93,57		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.973.934.500,00	2.721.955.554,00	(251.978.946,00)	91,53		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180.969.500,00	173.415.300,00	(7.554.200,00)	95,83		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	180.969.500,00	173.415.300,00	(7.554.200,00)	95,83		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.969.500,00	173.415.300,00	(7.554.200,00)	95,83		
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.934.439.000,00	1.817.285.538,00	(117.153.462,00)	93,94		
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.934.439.000,00	1.817.285.538,00	(117.153.462,00)	93,94		
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.934.439.000,00	1.817.285.538,00	(117.153.462,00)	93,94		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	858.526.000,00	731.254.716,00	(127.271.284,00)	85,18		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	858.526.000,00	731.254.716,00	(127.271.284,00)	85,18		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	858.526.000,00	731.254.716,00	(127.271.284,00)	85,18		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.892.915.600,00	4.777.287.171,00	(115.628.429,00)	97,64		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.482.470.400,00	3.414.204.990,00	(68.265.410,00)	98,04		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	3.482.470.400,00	3.414.204.990,00	(68.265.410,00)	98,04		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.482.470.400,00	3.414.204.990,00	(68.265.410,00)	98,04		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.868.200,00	63.832.400,00	(35.800,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.868.200,00	63.832.400,00	(35.800,00)	99,94		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.868.200,00	63.832.400,00	(35.800,00)	99,94		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.714.000,00	6.700.000,00	(14.000,00)	99,79		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.714.000,00	6.700.000,00	(14.000,00)	99,79		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.714.000,00	6.700.000,00	(14.000,00)	99,79		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.339.863.000,00	1.292.549.781,00	(47.313.219,00)	96,47		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.339.863.000,00	1.292.549.781,00	(47.313.219,00)	96,47		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.339.863.000,00	1.292.549.781,00	(47.313.219,00)	96,47		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.360.054.000,00	4.091.113.996,00	(268.940.004,00)	93,83		
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.360.054.000,00	4.091.113.996,00	(268.940.004,00)	93,83		
01.2.07.02.5.2	BELANJA MODAL	4.360.054.000,00	4.091.113.996,00	(268.940.004,00)	93,83		
01.2.07.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.360.054.000,00	4.091.113.996,00	(268.940.004,00)	93,83		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.355.890,00	412.189.296,00	(44.166.594,00)	90,32		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.991.000,00	(9.000,00)	99,82		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.991.000,00	(9.000,00)	99,82		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.991.000,00	(9.000,00)	99,82		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.950.750,00	161.996.357,00	(42.954.393,00)	79,04		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	204.950.750,00	161.996.357,00	(42.954.393,00)	79,04		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.950.750,00	161.996.357,00	(42.954.393,00)	79,04		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.405.140,00	245.201.939,00	(1.203.201,00)	99,51		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	246.405.140,00	245.201.939,00	(1.203.201,00)	99,51		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.405.140,00	245.201.939,00	(1.203.201,00)	99,51		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.466.139.544,00	1.151.181.801,24	(314.957.742,76)	78,52		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	573.930.276,00	417.288.326,00	(156.641.950,00)	72,71		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	573.930.276,00	417.288.326,00	(156.641.950,00)	72,71		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.930.276,00	417.288.326,00	(156.641.950,00)	72,71		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	892.209.268,00	733.893.475,24	(158.315.792,76)	82,26		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	568.368.868,00	439.394.297,73	(128.974.570,27)	77,31		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.368.868,00	439.394.297,73	(128.974.570,27)	77,31		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	323.840.400,00	294.499.177,51	(29.341.222,49)	90,94		
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.840.400,00	294.499.177,51	(29.341.222,49)	90,94		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	2.387.427.200,00	1.064.696.885,00	(1.322.730.315,00)	44,60		
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.697.637.200,00	672.821.332,00	(1.024.815.868,00)	39,63		
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	355.634.000,00	102.637.986,00	(252.996.014,00)	28,86		
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	355.634.000,00	102.637.986,00	(252.996.014,00)	28,86		
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.634.000,00	102.637.986,00	(252.996.014,00)	28,86		
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	394.896.000,00	198.198.811,00	(196.697.189,00)	50,19		
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	394.896.000,00	198.198.811,00	(196.697.189,00)	50,19		
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.896.000,00	198.198.811,00	(196.697.189,00)	50,19		
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	10.095.000,00	4.000.000,00	(6.095.000,00)	39,62		
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.095.000,00	4.000.000,00	(6.095.000,00)	39,62		
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.095.000,00	4.000.000,00	(6.095.000,00)	39,62		
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	35.814.000,00	31.762.600,00	(4.051.400,00)	88,69		
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.814.000,00	31.762.600,00	(4.051.400,00)	88,69		
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.814.000,00	31.762.600,00	(4.051.400,00)	88,69		
02.2.01.05	Pengawasan Desa	439.720.200,00	82.005.000,00	(357.715.200,00)	18,65		
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	439.720.200,00	82.005.000,00	(357.715.200,00)	18,65		
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.720.200,00	82.005.000,00	(357.715.200,00)	18,65		
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	461.478.000,00	254.216.935,00	(207.261.065,00)	55,09		
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	461.478.000,00	254.216.935,00	(207.261.065,00)	55,09		
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.478.000,00	254.216.935,00	(207.261.065,00)	55,09		
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	689.790.000,00	391.875.553,00	(297.914.447,00)	56,81		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	79.450.000,00	38.200.000,00	(41.250.000,00)	48,08		
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.450.000,00	38.200.000,00	(41.250.000,00)	48,08		
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.450.000,00	38.200.000,00	(41.250.000,00)	48,08		
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	610.340.000,00	353.675.553,00	(256.664.447,00)	57,95		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	610.340.000,00	353.675.553,00	(256.664.447,00)	57,95		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.340.000,00	353.675.553,00	(256.664.447,00)	57,95		
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	3.276.430.500,00	2.694.588.463,00	(581.842.037,00)	82,24		
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	3.276.430.500,00	2.694.588.463,00	(581.842.037,00)	82,24		
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	297.605.000,00	203.375.817,00	(94.229.183,00)	68,34		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	297.605.000,00	203.375.817,00	(94.229.183,00)	68,34		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.605.000,00	203.375.817,00	(94.229.183,00)	68,34		
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	644.351.000,00	601.010.869,00	(43.340.131,00)	93,27		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	644.351.000,00	601.010.869,00	(43.340.131,00)	93,27		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.351.000,00	601.010.869,00	(43.340.131,00)	93,27		
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.039.492.500,00	1.778.778.202,00	(260.714.298,00)	87,22		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.039.492.500,00	1.778.778.202,00	(260.714.298,00)	87,22		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.039.492.500,00	1.778.778.202,00	(260.714.298,00)	87,22		
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	294.982.000,00	111.423.575,00	(183.558.425,00)	37,77		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	294.982.000,00	111.423.575,00	(183.558.425,00)	37,77		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.982.000,00	111.423.575,00	(183.558.425,00)	37,77		
	SURPLUS / DEFISIT	(36.721.000.553,00)	(32.696.885.770,24)	4.024.114.782,76	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(36.721.000.553,00)**	**(32.696.885.770,24)**	**4.024.114.782,76**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 KECAMATAN LAMPIHONG
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.01.000 KECAMATAN LAMPIHONG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	54.528.000,00	55.849.000,00	1.321.000,00	102,42		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	54.528.000,00	55.849.000,00	1.321.000,00	102,42		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	47.328.000,00	30.884.000,00	(16.444.000,00)	65,26		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000,00	24.965.000,00	17.765.000,00	346,74	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.567.578.814,00	7.058.682.575,00	(508.896.239,00)	93,28		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.642.531.414,00	6.144.773.110,00	(497.758.304,00)	92,51		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.267.000,00	83.121.000,00	(146.000,00)	99,82		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.347.000,00	40.347.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.347.000,00	40.347.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.347.000,00	40.347.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.920.000,00	42.774.000,00	(146.000,00)	99,66		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.920.000,00	42.774.000,00	(146.000,00)	99,66		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.920.000,00	42.774.000,00	(146.000,00)	99,66		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.846.262.634,00	4.403.484.295,00	(442.778.339,00)	90,86		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.846.262.634,00	4.403.484.295,00	(442.778.339,00)	90,86		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.846.262.634,00	4.403.484.295,00	(442.778.339,00)	90,86		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.846.262.634,00	4.403.484.295,00	(442.778.339,00)	90,86		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.362.700,00	623.314.135,00	(48.565,00)	99,99		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.508.500,00	117.508.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	117.508.500,00	117.508.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.508.500,00	117.508.500,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.347.200,00	48.347.200,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.347.200,00	48.347.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.347.200,00	48.347.200,00	0,00	100,00		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.507.000,00	457.458.435,00	(48.565,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	457.507.000,00	457.458.435,00	(48.565,00)	99,99		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.507.000,00	457.458.435,00	(48.565,00)	99,99		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.261.980,00	868.008.044,00	(51.253.936,00)	94,42		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.782.000,00	120.249.997,00	(47.532.003,00)	71,67		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.782.000,00	120.249.997,00	(47.532.003,00)	71,67		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.782.000,00	120.249.997,00	(47.532.003,00)	71,67		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.087.000,00	84.746.800,00	(340.200,00)	99,60		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	48.959.000,00	48.959.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.959.000,00	48.959.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	36.128.000,00	35.787.800,00	(340.200,00)	99,06		
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.128.000,00	35.787.800,00	(340.200,00)	99,06		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	666.392.980,00	663.011.247,00	(3.381.733,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	666.392.980,00	663.011.247,00	(3.381.733,00)	99,49		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.392.980,00	663.011.247,00	(3.381.733,00)	99,49		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.377.100,00	166.845.636,00	(3.531.464,00)	97,93		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.477.100,00	105.945.636,00	(3.531.464,00)	96,77		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	109.477.100,00	105.945.636,00	(3.531.464,00)	96,77		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.477.100,00	105.945.636,00	(3.531.464,00)	96,77		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	202.498.500,00	198.725.125,00	(3.773.375,00)	98,14		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	202.498.500,00	198.725.125,00	(3.773.375,00)	98,14		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	202.498.500,00	198.725.125,00	(3.773.375,00)	98,14		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	202.498.500,00	198.725.125,00	(3.773.375,00)	98,14		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.498.500,00	198.725.125,00	(3.773.375,00)	98,14		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	252.299.500,00	251.092.140,00	(1.207.360,00)	99,52		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96.530.000,00	96.480.000,00	(50.000,00)	99,95		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.530.000,00	96.480.000,00	(50.000,00)	99,95		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	96.530.000,00	96.480.000,00	(50.000,00)	99,95		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.530.000,00	96.480.000,00	(50.000,00)	99,95		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	155.769.500,00	154.612.140,00	(1.157.360,00)	99,26		
03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	155.769.500,00	154.612.140,00	(1.157.360,00)	99,26		
03.2.06.12.5.1	BELANJA OPERASI	155.769.500,00	154.612.140,00	(1.157.360,00)	99,26		
03.2.06.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.769.500,00	154.612.140,00	(1.157.360,00)	99,26		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	70.549.800,00	65.599.800,00	(4.950.000,00)	92,98		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.549.800,00	65.599.800,00	(4.950.000,00)	92,98		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.549.800,00	65.599.800,00	(4.950.000,00)	92,98		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.549.800,00	65.599.800,00	(4.950.000,00)	92,98		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.549.800,00	65.599.800,00	(4.950.000,00)	92,98		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	217.435.400,00	216.268.200,00	(1.167.200,00)	99,46		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	217.435.400,00	216.268.200,00	(1.167.200,00)	99,46		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	217.435.400,00	216.268.200,00	(1.167.200,00)	99,46		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	217.435.400,00	216.268.200,00	(1.167.200,00)	99,46		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.435.400,00	216.268.200,00	(1.167.200,00)	99,46		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	182.264.200,00	182.224.200,00	(40.000,00)	99,98		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	182.264.200,00	182.224.200,00	(40.000,00)	99,98		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.800.000,00	22.760.000,00	(40.000,00)	99,82		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.760.000,00	(40.000,00)	99,82		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.760.000,00	(40.000,00)	99,82		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	94.446.000,00	94.446.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	94.446.000,00	94.446.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.446.000,00	94.446.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	65.018.200,00	65.018.200,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	65.018.200,00	65.018.200,00	0,00	100,00		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.018.200,00	65.018.200,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(7.513.050.814,00)	(7.002.833.575,00)	510.217.239,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(7.513.050.814,00)**	**(7.002.833.575,00)**	**510.217.239,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 KECAMATAN BATUMANDI
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 KECAMATAN BATUMANDI

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	110.680.000,00	57.362.000,00	(53.318.000,00)	51,83		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	110.680.000,00	57.362.000,00	(53.318.000,00)	51,83		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	110.680.000,00	57.362.000,00	(53.318.000,00)	51,83		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.827.136.854,00	6.514.967.811,00	(312.169.043,00)	95,43		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.087.367.966,00	5.786.349.711,00	(301.018.255,00)	95,06		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.435.300,00	38.410.300,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.435.300,00	38.410.300,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	38.435.300,00	38.410.300,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.435.300,00	38.410.300,00	(25.000,00)	99,93		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.547.966,00	4.568.917.281,00	(289.630.685,00)	94,04		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.287.173.272,00	4.006.474.883,00	(280.698.389,00)	93,45		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.287.173.272,00	4.006.474.883,00	(280.698.389,00)	93,45		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.287.173.272,00	4.006.474.883,00	(280.698.389,00)	93,45		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	518.772.394,00	509.902.198,00	(8.870.196,00)	98,29		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	518.772.394,00	509.902.198,00	(8.870.196,00)	98,29		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.772.394,00	509.902.198,00	(8.870.196,00)	98,29		
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.602.300,00	52.540.200,00	(62.100,00)	99,88		
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	52.602.300,00	52.540.200,00	(62.100,00)	99,88		
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.602.300,00	52.540.200,00	(62.100,00)	99,88		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.656.000,00	199.039.200,00	(3.616.800,00)	98,22		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.456.000,00	35.839.200,00	(3.616.800,00)	90,83		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.456.000,00	35.839.200,00	(3.616.800,00)	90,83		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.456.000,00	35.839.200,00	(3.616.800,00)	90,83		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.432.000,00	399.282.159,00	(149.841,00)	99,96		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.543.900,00	13.532.400,00	(11.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.543.900,00	13.532.400,00	(11.500,00)	99,92		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.543.900,00	13.532.400,00	(11.500,00)	99,92		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.465.900,00	86.435.400,00	(30.500,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	84.065.900,00	84.035.400,00	(30.500,00)	99,96		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.065.900,00	84.035.400,00	(30.500,00)	99,96		
01.2.06.04.5.2	BELANJA MODAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.543.200,00	28.524.200,00	(19.000,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	28.543.200,00	28.524.200,00	(19.000,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.543.200,00	28.524.200,00	(19.000,00)	99,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.879.000,00	270.790.159,00	(88.841,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	270.879.000,00	270.790.159,00	(88.841,00)	99,97		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.879.000,00	270.790.159,00	(88.841,00)	99,97		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.200.000,00	56.118.000,00	(82.000,00)	99,85		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.200.000,00	56.118.000,00	(82.000,00)	99,85		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	56.200.000,00	56.118.000,00	(82.000,00)	99,85		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.200.000,00	56.118.000,00	(82.000,00)	99,85		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.822.000,00	134.376.183,00	(5.445.817,00)	96,11		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.166.400,00	116.730.683,00	(5.435.717,00)	95,55		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.166.400,00	116.730.683,00	(5.435.717,00)	95,55		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.166.400,00	116.730.683,00	(5.435.717,00)	95,55		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.655.600,00	17.645.500,00	(10.100,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.655.600,00	17.645.500,00	(10.100,00)	99,94		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.655.600,00	17.645.500,00	(10.100,00)	99,94		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.274.700,00	390.206.588,00	(2.068.112,00)	99,47		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.770.400,00	220.509.388,00	(261.012,00)	99,88		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.770.400,00	220.509.388,00	(261.012,00)	99,88		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.770.400,00	220.509.388,00	(261.012,00)	99,88		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.900.000,00	64.770.000,00	(130.000,00)	99,80		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	64.900.000,00	64.770.000,00	(130.000,00)	99,80		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	64.770.000,00	(130.000,00)	99,80		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.604.300,00	104.927.200,00	(1.677.100,00)	98,43		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	60.330.700,00	60.284.200,00	(46.500,00)	99,92		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.330.700,00	60.284.200,00	(46.500,00)	99,92		
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	46.273.600,00	44.643.000,00	(1.630.600,00)	96,48		
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.273.600,00	44.643.000,00	(1.630.600,00)	96,48		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	43.292.500,00	42.390.400,00	(902.100,00)	97,92		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	43.292.500,00	42.390.400,00	(902.100,00)	97,92		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.292.500,00	42.390.400,00	(902.100,00)	97,92		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	43.292.500,00	42.390.400,00	(902.100,00)	97,92		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.292.500,00	42.390.400,00	(902.100,00)	97,92		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	191.918.388,00	191.452.000,00	(466.388,00)	99,76		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	87.096.000,00	86.706.000,00	(390.000,00)	99,55		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.260.000,00	10.220.000,00	(40.000,00)	99,61		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.260.000,00	10.220.000,00	(40.000,00)	99,61		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	10.220.000,00	(40.000,00)	99,61		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.836.000,00	76.486.000,00	(350.000,00)	99,54		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	76.836.000,00	76.486.000,00	(350.000,00)	99,54		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.836.000,00	76.486.000,00	(350.000,00)	99,54		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	104.822.388,00	104.746.000,00	(76.388,00)	99,93		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	104.822.388,00	104.746.000,00	(76.388,00)	99,93		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	104.822.388,00	104.746.000,00	(76.388,00)	99,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.822.388,00	104.746.000,00	(76.388,00)	99,93		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	361.347.100,00	356.380.700,00	(4.966.400,00)	98,63		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	361.347.100,00	356.380.700,00	(4.966.400,00)	98,63		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.260.000,00	10.250.000,00	(10.000,00)	99,90		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.260.000,00	10.250.000,00	(10.000,00)	99,90		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	10.250.000,00	(10.000,00)	99,90		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	351.087.100,00	346.130.700,00	(4.956.400,00)	98,59		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	351.087.100,00	346.130.700,00	(4.956.400,00)	98,59		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.087.100,00	346.130.700,00	(4.956.400,00)	98,59		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	131.910.900,00	127.095.000,00	(4.815.900,00)	96,35		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	131.910.900,00	127.095.000,00	(4.815.900,00)	96,35		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.651.000,00	12.345.000,00	(306.000,00)	97,58		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.651.000,00	12.345.000,00	(306.000,00)	97,58		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.651.000,00	12.345.000,00	(306.000,00)	97,58		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.530.000,00	16.720.000,00	(810.000,00)	95,38		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.530.000,00	16.720.000,00	(810.000,00)	95,38		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.530.000,00	16.720.000,00	(810.000,00)	95,38		
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.745.000,00	16.365.000,00	(2.380.000,00)	87,30		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.745.000,00	16.365.000,00	(2.380.000,00)	87,30		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.745.000,00	16.365.000,00	(2.380.000,00)	87,30		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10.195.000,00	10.175.000,00	(20.000,00)	99,80		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.195.000,00	10.175.000,00	(20.000,00)	99,80		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.195.000,00	10.175.000,00	(20.000,00)	99,80		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.695.000,00	5.500.000,00	(195.000,00)	96,58		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.695.000,00	5.500.000,00	(195.000,00)	96,58		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.695.000,00	5.500.000,00	(195.000,00)	96,58		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000,00	10.210.000,00	(50.000,00)	99,51		
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	10.260.000,00	10.210.000,00	(50.000,00)	99,51		
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	10.210.000,00	(50.000,00)	99,51		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	31.784.900,00	31.120.000,00	(664.900,00)	97,91		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	31.784.900,00	31.120.000,00	(664.900,00)	97,91		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.784.900,00	31.120.000,00	(664.900,00)	97,91		
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.390.000,00	10.000.000,00	(390.000,00)	96,25		
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	10.390.000,00	10.000.000,00	(390.000,00)	96,25		
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.390.000,00	10.000.000,00	(390.000,00)	96,25		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.716.456.854,00)	(6.457.605.811,00)	258.851.043,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.716.456.854,00)**	**(6.457.605.811,00)**	**258.851.043,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 KECAMATAN AWAYAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.000 KECAMATAN AWAYAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	19.750.000,00	46.294.000,00	26.544.000,00	234,40		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	19.750.000,00	46.294.000,00	26.544.000,00	234,40		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	19.750.000,00	46.294.000,00	26.544.000,00	234,40		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.726.546.072,00	5.403.322.192,00	(323.223.880,00)	94,36		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.719.137.572,00	4.409.327.392,00	(309.810.180,00)	93,44		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.109.500,00	106.045.000,00	(64.500,00)	99,94		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.670.500,00	79.663.000,00	(7.500,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	79.670.500,00	79.663.000,00	(7.500,00)	99,99		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.670.500,00	79.663.000,00	(7.500,00)	99,99		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.791.000,00	5.748.000,00	(43.000,00)	99,26		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.791.000,00	5.748.000,00	(43.000,00)	99,26		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.791.000,00	5.748.000,00	(43.000,00)	99,26		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.888.000,00	14.874.000,00	(14.000,00)	99,91		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.888.000,00	14.874.000,00	(14.000,00)	99,91		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.888.000,00	14.874.000,00	(14.000,00)	99,91		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.598.367.772,00	3.303.598.613,00	(294.769.159,00)	91,81		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.529.116.772,00	3.234.392.613,00	(294.724.159,00)	91,65		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.529.116.772,00	3.234.392.613,00	(294.724.159,00)	91,65		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.529.116.772,00	3.234.392.613,00	(294.724.159,00)	91,65		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.124.000,00	60.081.000,00	(43.000,00)	99,93		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.124.000,00	60.081.000,00	(43.000,00)	99,93		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.124.000,00	60.081.000,00	(43.000,00)	99,93		
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.127.000,00	9.125.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	9.127.000,00	9.125.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.127.000,00	9.125.000,00	(2.000,00)	99,98		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.122.500,00	57.925.000,00	(1.197.500,00)	97,97		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	59.122.500,00	57.925.000,00	(1.197.500,00)	97,97		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.122.500,00	57.925.000,00	(1.197.500,00)	97,97		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.122.500,00	57.925.000,00	(1.197.500,00)	97,97		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.272.800,00	546.018.200,00	(254.600,00)	99,95		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.014.100,00	14.006.000,00	(8.100,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.014.100,00	14.006.000,00	(8.100,00)	99,94		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.014.100,00	14.006.000,00	(8.100,00)	99,94		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.297.300,00	134.095.200,00	(202.100,00)	99,85		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	134.297.300,00	134.095.200,00	(202.100,00)	99,85		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.297.300,00	134.095.200,00	(202.100,00)	99,85		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.619.400,00	25.575.000,00	(44.400,00)	99,83		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	25.619.400,00	25.575.000,00	(44.400,00)	99,83		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.619.400,00	25.575.000,00	(44.400,00)	99,83		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.342.000,00	372.342.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	372.342.000,00	372.342.000,00	0,00	100,00		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.342.000,00	372.342.000,00	0,00	100,00		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.371.900,00	58.116.000,00	(255.900,00)	99,56		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.638.700,00	180.381.579,00	(12.257.121,00)	93,64		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.684.200,00	48.442.579,00	(12.241.621,00)	79,83		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	60.684.200,00	48.442.579,00	(12.241.621,00)	79,83		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.684.200,00	48.442.579,00	(12.241.621,00)	79,83		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.954.500,00	131.939.000,00	(15.500,00)	99,99		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	131.954.500,00	131.939.000,00	(15.500,00)	99,99		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.954.500,00	131.939.000,00	(15.500,00)	99,99		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.254.400,00	157.243.000,00	(1.011.400,00)	99,36		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.788.600,00	93.777.200,00	(1.011.400,00)	98,93		
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.788.600,00	93.777.200,00	(1.011.400,00)	98,93		
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.788.600,00	93.777.200,00	(1.011.400,00)	98,93		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.510.000,00	26.510.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.955.800,00	36.955.800,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	36.955.800,00	36.955.800,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.955.800,00	36.955.800,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	120.646.200,00	109.246.200,00	(11.400.000,00)	90,55		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	120.646.200,00	109.246.200,00	(11.400.000,00)	90,55		
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	120.646.200,00	109.246.200,00	(11.400.000,00)	90,55		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	120.646.200,00	109.246.200,00	(11.400.000,00)	90,55		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.646.200,00	109.246.200,00	(11.400.000,00)	90,55		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	177.674.000,00	177.471.100,00	(202.900,00)	99,89		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	177.674.000,00	177.471.100,00	(202.900,00)	99,89		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177.674.000,00	177.471.100,00	(202.900,00)	99,89		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	177.674.000,00	177.471.100,00	(202.900,00)	99,89		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.674.000,00	177.471.100,00	(202.900,00)	99,89		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.180.000,00	117.180.000,00	0,00	100,00		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	391.534.900,00	390.236.500,00	(1.298.400,00)	99,67		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	391.534.900,00	390.236.500,00	(1.298.400,00)	99,67		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	391.534.900,00	390.236.500,00	(1.298.400,00)	99,67		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	391.534.900,00	390.236.500,00	(1.298.400,00)	99,67		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.534.900,00	390.236.500,00	(1.298.400,00)	99,67		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	200.373.400,00	199.861.000,00	(512.400,00)	99,74		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200.373.400,00	199.861.000,00	(512.400,00)	99,74		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	155.726.000,00	155.646.000,00	(80.000,00)	99,95		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	155.726.000,00	155.646.000,00	(80.000,00)	99,95		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.726.000,00	155.646.000,00	(80.000,00)	99,95		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	44.647.400,00	44.215.000,00	(432.400,00)	99,03		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	44.647.400,00	44.215.000,00	(432.400,00)	99,03		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.647.400,00	44.215.000,00	(432.400,00)	99,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.706.796.072,00)	(5.357.028.192,00)	349.767.880,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(5.706.796.072,00)**	**(5.357.028.192,00)**	**349.767.880,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 KECAMATAN HALONG
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.04.000 KECAMATAN HALONG

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	144.250.000,00	131.500.000,00	(12.750.000,00)	91,16		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	144.250.000,00	131.500.000,00	(12.750.000,00)	91,16		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	144.250.000,00	131.500.000,00	(12.750.000,00)	91,16		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.491.860.314,00	6.099.471.482,00	(392.388.832,00)	93,96		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.251.479.014,00	4.904.632.142,00	(346.846.872,00)	93,40		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.770.100,00	12.714.100,00	(56.000,00)	99,56		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.700,00	236.700,00	0,00	100,00		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.060.000,00	12.004.000,00	(56.000,00)	99,54		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	12.060.000,00	12.004.000,00	(56.000,00)	99,54		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.060.000,00	12.004.000,00	(56.000,00)	99,54		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.319.800.614,00	4.015.243.983,00	(304.556.631,00)	92,95		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.239.274.198,00	3.991.691.572,00	(247.582.626,00)	94,16		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.239.274.198,00	3.991.691.572,00	(247.582.626,00)	94,16		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.239.274.198,00	3.991.691.572,00	(247.582.626,00)	94,16		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.526.416,00	23.552.411,00	(56.974.005,00)	29,25		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	80.526.416,00	23.552.411,00	(56.974.005,00)	29,25		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.526.416,00	23.552.411,00	(56.974.005,00)	29,25		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.400.000,00	420.560.146,00	(839.854,00)	99,80		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.653.000,00	12.610.400,00	(42.600,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.653.000,00	12.610.400,00	(42.600,00)	99,66		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.653.000,00	12.610.400,00	(42.600,00)	99,66		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408.747.000,00	407.949.746,00	(797.254,00)	99,80		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	408.747.000,00	407.949.746,00	(797.254,00)	99,80		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.747.000,00	407.949.746,00	(797.254,00)	99,80		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.993.200,00	56.943.000,00	(1.050.200,00)	98,19		
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.993.200,00	56.943.000,00	(1.050.200,00)	98,19		
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	57.993.200,00	56.943.000,00	(1.050.200,00)	98,19		
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.993.200,00	56.943.000,00	(1.050.200,00)	98,19		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.217.100,00	281.526.303,00	(18.690.797,00)	93,77		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.339.400,00	32.146.667,00	(18.192.733,00)	63,86		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.339.400,00	32.146.667,00	(18.192.733,00)	63,86		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.339.400,00	32.146.667,00	(18.192.733,00)	63,86		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.877.700,00	249.379.636,00	(498.064,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	249.877.700,00	249.379.636,00	(498.064,00)	99,80		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.877.700,00	249.379.636,00	(498.064,00)	99,80		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.298.000,00	117.644.610,00	(21.653.390,00)	84,46		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.994.000,00	94.340.610,00	(21.653.390,00)	81,33		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	115.994.000,00	94.340.610,00	(21.653.390,00)	81,33		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.994.000,00	94.340.610,00	(21.653.390,00)	81,33		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.304.000,00	23.304.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	23.304.000,00	23.304.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.304.000,00	23.304.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	559.660.100,00	542.992.400,00	(16.667.700,00)	97,02		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	559.660.100,00	542.992.400,00	(16.667.700,00)	97,02		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	559.660.100,00	542.992.400,00	(16.667.700,00)	97,02		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	559.660.100,00	542.992.400,00	(16.667.700,00)	97,02		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.660.100,00	542.992.400,00	(16.667.700,00)	97,02		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	246.213.200,00	238.400.940,00	(7.812.260,00)	96,83		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.710.000,00	52.039.000,00	(2.671.000,00)	95,12		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.710.000,00	52.039.000,00	(2.671.000,00)	95,12		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.710.000,00	52.039.000,00	(2.671.000,00)	95,12		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.710.000,00	52.039.000,00	(2.671.000,00)	95,12		
03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.585.000,00	24.140.000,00	(445.000,00)	98,19		
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24.585.000,00	24.140.000,00	(445.000,00)	98,19		
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.585.000,00	24.140.000,00	(445.000,00)	98,19		
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.585.000,00	24.140.000,00	(445.000,00)	98,19		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	166.918.200,00	162.221.940,00	(4.696.260,00)	97,19		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	166.918.200,00	162.221.940,00	(4.696.260,00)	97,19		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	158.403.800,00	153.721.940,00	(4.681.860,00)	97,04		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.403.800,00	153.721.940,00	(4.681.860,00)	97,04		
03.2.06.06.5.2	BELANJA MODAL	8.514.400,00	8.500.000,00	(14.400,00)	99,83		
03.2.06.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.514.400,00	8.500.000,00	(14.400,00)	99,83		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	86.588.400,00	82.400.000,00	(4.188.400,00)	95,16		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86.588.400,00	82.400.000,00	(4.188.400,00)	95,16		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.588.400,00	82.400.000,00	(4.188.400,00)	95,16		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.588.400,00	82.400.000,00	(4.188.400,00)	95,16		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.588.400,00	82.400.000,00	(4.188.400,00)	95,16		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	34.720.000,00	34.020.000,00	(700.000,00)	97,98		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.720.000,00	34.020.000,00	(700.000,00)	97,98		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34.720.000,00	34.020.000,00	(700.000,00)	97,98		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.720.000,00	34.020.000,00	(700.000,00)	97,98		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.720.000,00	34.020.000,00	(700.000,00)	97,98		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	313.199.600,00	297.026.000,00	(16.173.600,00)	94,84		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	313.199.600,00	297.026.000,00	(16.173.600,00)	94,84		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.989.600,00	48.389.000,00	(600.600,00)	98,77		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.989.600,00	48.389.000,00	(600.600,00)	98,77		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.989.600,00	48.389.000,00	(600.600,00)	98,77		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	64.265.000,00	56.220.000,00	(8.045.000,00)	87,48		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	64.265.000,00	56.220.000,00	(8.045.000,00)	87,48		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.265.000,00	56.220.000,00	(8.045.000,00)	87,48		
06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.540.000,00	30.470.000,00	(3.070.000,00)	90,85		
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	33.540.000,00	30.470.000,00	(3.070.000,00)	90,85		
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	30.470.000,00	(3.070.000,00)	90,85		
06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	22.265.000,00	18.370.000,00	(3.895.000,00)	82,51		
06.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	22.265.000,00	18.370.000,00	(3.895.000,00)	82,51		
06.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.265.000,00	18.370.000,00	(3.895.000,00)	82,51		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.360.000,00	28.340.000,00	(20.000,00)	99,93		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	28.360.000,00	28.340.000,00	(20.000,00)	99,93		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.360.000,00	28.340.000,00	(20.000,00)	99,93		
06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.340.000,00	18.253.000,00	(87.000,00)	99,53		
06.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	18.340.000,00	18.253.000,00	(87.000,00)	99,53		
06.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.340.000,00	18.253.000,00	(87.000,00)	99,53		
06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	26.450.000,00	26.414.000,00	(36.000,00)	99,86		
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	26.450.000,00	26.414.000,00	(36.000,00)	99,86		
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	26.414.000,00	(36.000,00)	99,86		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	54.270.000,00	54.180.000,00	(90.000,00)	99,83		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	54.270.000,00	54.180.000,00	(90.000,00)	99,83		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.270.000,00	54.180.000,00	(90.000,00)	99,83		
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.720.000,00	16.390.000,00	(330.000,00)	98,03		
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	16.720.000,00	16.390.000,00	(330.000,00)	98,03		
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	16.390.000,00	(330.000,00)	98,03		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.347.610.314,00)	(5.967.971.482,00)	379.638.832,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.347.610.314,00)**	**(5.967.971.482,00)**	**379.638.832,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 KECAMATAN JUAI
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 KECAMATAN JUAI

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	20.951.666,00	29.412.000,00	8.460.334,00	140,38		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	20.951.666,00	29.412.000,00	8.460.334,00	140,38		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	13.700.000,00	9.118.000,00	(4.582.000,00)	66,55		
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.251.666,00	20.294.000,00	13.042.334,00	279,85	NULL	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.825.933.332,00	5.649.732.874,00	(176.200.458,00)	96,98		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.544.136.432,00	4.392.943.794,00	(151.192.638,00)	96,67		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.318.700,00	143.765.500,00	(553.200,00)	99,62		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.123.400,00	17.123.400,00	0,00	100,00		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.123.400,00	17.123.400,00	0,00	100,00		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.123.400,00	17.123.400,00	0,00	100,00		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.990.300,00	116.497.100,00	(493.200,00)	99,58		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	116.990.300,00	116.497.100,00	(493.200,00)	99,58		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.990.300,00	116.497.100,00	(493.200,00)	99,58		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.565.000,00	1.505.000,00	(60.000,00)	96,17		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.565.000,00	1.505.000,00	(60.000,00)	96,17		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	1.505.000,00	(60.000,00)	96,17		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.638.324.222,00	3.541.774.503,00	(96.549.719,00)	97,35		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.564.899.722,00	3.468.956.203,00	(95.943.519,00)	97,31		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.564.899.722,00	3.468.956.203,00	(95.943.519,00)	97,31		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.564.899.722,00	3.468.956.203,00	(95.943.519,00)	97,31		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.424.500,00	72.818.300,00	(606.200,00)	99,17		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.424.500,00	72.818.300,00	(606.200,00)	99,17		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.424.500,00	72.818.300,00	(606.200,00)	99,17		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.160.000,00	8.030.000,00	(130.000,00)	98,41		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.160.000,00	8.030.000,00	(130.000,00)	98,41		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	8.160.000,00	8.030.000,00	(130.000,00)	98,41		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.030.000,00	(130.000,00)	98,41		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.680.200,00	285.269.400,00	(410.800,00)	99,86		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.427.400,00	8.427.400,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.427.400,00	8.427.400,00	0,00	100,00		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.427.400,00	8.427.400,00	0,00	100,00		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.872.200,00	101.800.200,00	(72.000,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	101.872.200,00	101.800.200,00	(72.000,00)	99,93		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.872.200,00	101.800.200,00	(72.000,00)	99,93		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.380.600,00	175.041.800,00	(338.800,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	175.380.600,00	175.041.800,00	(338.800,00)	99,81		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.380.600,00	175.041.800,00	(338.800,00)	99,81		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.588.010,00	197.405.859,00	(48.182.151,00)	80,38		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.753.110,00	75.649.180,00	(11.103.930,00)	87,20		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.753.110,00	75.649.180,00	(11.103.930,00)	87,20		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.753.110,00	75.649.180,00	(11.103.930,00)	87,20		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.534.900,00	94.456.679,00	(37.078.221,00)	71,81		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	131.534.900,00	94.456.679,00	(37.078.221,00)	71,81		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.534.900,00	94.456.679,00	(37.078.221,00)	71,81		
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.065.300,00	216.698.532,00	(5.366.768,00)	97,58		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.786.100,00	94.019.332,00	(2.766.768,00)	97,14		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.786.100,00	94.019.332,00	(2.766.768,00)	97,14		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.786.100,00	94.019.332,00	(2.766.768,00)	97,14		
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.279.200,00	122.679.200,00	(2.600.000,00)	97,92		
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	125.279.200,00	122.679.200,00	(2.600.000,00)	97,92		
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.279.200,00	122.679.200,00	(2.600.000,00)	97,92		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	504.733.900,00	499.939.350,00	(4.794.550,00)	99,05		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	108.580.100,00	108.580.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	108.580.100,00	108.580.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	108.580.100,00	108.580.100,00	0,00	100,00		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.580.100,00	108.580.100,00	0,00	100,00		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	396.153.800,00	391.359.250,00	(4.794.550,00)	98,79		
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	396.153.800,00	391.359.250,00	(4.794.550,00)	98,79		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	396.153.800,00	391.359.250,00	(4.794.550,00)	98,79		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.153.800,00	391.359.250,00	(4.794.550,00)	98,79		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	200.098.900,00	199.310.030,00	(788.870,00)	99,61		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	156.556.500,00	156.083.800,00	(472.700,00)	99,70		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38.848.800,00	38.803.800,00	(45.000,00)	99,88		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.848.800,00	38.803.800,00	(45.000,00)	99,88		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.848.800,00	38.803.800,00	(45.000,00)	99,88		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	76.595.000,00	76.167.300,00	(427.700,00)	99,44		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.595.000,00	76.167.300,00	(427.700,00)	99,44		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.595.000,00	76.167.300,00	(427.700,00)	99,44		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.112.700,00	41.112.700,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.112.700,00	41.112.700,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.112.700,00	41.112.700,00	0,00	100,00		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.542.400,00	43.226.230,00	(316.170,00)	99,27		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	43.542.400,00	43.226.230,00	(316.170,00)	99,27		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.542.400,00	43.226.230,00	(316.170,00)	99,27		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.542.400,00	43.226.230,00	(316.170,00)	99,27		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	155.061.400,00	153.852.300,00	(1.209.100,00)	99,22		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155.061.400,00	153.852.300,00	(1.209.100,00)	99,22		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.061.400,00	153.852.300,00	(1.209.100,00)	99,22		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	155.061.400,00	153.852.300,00	(1.209.100,00)	99,22		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.061.400,00	153.852.300,00	(1.209.100,00)	99,22		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	73.076.400,00	66.636.800,00	(6.439.600,00)	91,19		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.076.400,00	66.636.800,00	(6.439.600,00)	91,19		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	73.076.400,00	66.636.800,00	(6.439.600,00)	91,19		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	73.076.400,00	66.636.800,00	(6.439.600,00)	91,19		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.076.400,00	66.636.800,00	(6.439.600,00)	91,19		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	348.826.300,00	337.050.600,00	(11.775.700,00)	96,62		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	348.826.300,00	337.050.600,00	(11.775.700,00)	96,62		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	129.830.100,00	118.096.100,00	(11.734.000,00)	90,96		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	129.830.100,00	118.096.100,00	(11.734.000,00)	90,96		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.830.100,00	118.096.100,00	(11.734.000,00)	90,96		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	83.396.800,00	83.395.600,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	83.396.800,00	83.395.600,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.396.800,00	83.395.600,00	(1.200,00)	100,00		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.511.100,00	42.485.400,00	(25.700,00)	99,94		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	42.511.100,00	42.485.400,00	(25.700,00)	99,94		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.511.100,00	42.485.400,00	(25.700,00)	99,94		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	57.297.700,00	57.288.900,00	(8.800,00)	99,98		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	57.297.700,00	57.288.900,00	(8.800,00)	99,98		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.297.700,00	57.288.900,00	(8.800,00)	99,98		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	35.790.600,00	35.784.600,00	(6.000,00)	99,98		
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	35.790.600,00	35.784.600,00	(6.000,00)	99,98		
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.790.600,00	35.784.600,00	(6.000,00)	99,98		
	SURPLUS / DEFISIT	(5.804.981.666,00)	(5.620.320.874,00)	184.660.792,00	0		
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(5.804.981.666,00)**	**(5.620.320.874,00)**	**184.660.792,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.06 KECAMATAN PARINGIN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.06.000 KECAMATAN PARINGIN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	55.000.000,00	61.988.000,00	6.988.000,00	112,71		
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	55.000.000,00	61.988.000,00	6.988.000,00	112,71		
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	55.000.000,00	61.988.000,00	6.988.000,00	112,71		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	14.565.568.524,00	13.888.997.866,00	(676.570.658,00)	95,35		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.728.981.784,00	9.174.409.830,00	(554.571.954,00)	94,30		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.090.000,00	43.285.100,00	(1.804.900,00)	96,00		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.895.600,00	17.370.100,00	(525.500,00)	97,06		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.895.600,00	17.370.100,00	(525.500,00)	97,06		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.895.600,00	17.370.100,00	(525.500,00)	97,06		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.744.400,00	14.015.000,00	(729.400,00)	95,05		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.744.400,00	14.015.000,00	(729.400,00)	95,05		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.744.400,00	14.015.000,00	(729.400,00)	95,05		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.450.000,00	11.900.000,00	(550.000,00)	95,58		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	11.900.000,00	(550.000,00)	95,58		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	11.900.000,00	(550.000,00)	95,58		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.727.110.674,00	6.254.442.181,00	(472.668.493,00)	92,97		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.727.110.674,00	6.254.442.181,00	(472.668.493,00)	92,97		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.727.110.674,00	6.254.442.181,00	(472.668.493,00)	92,97		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.727.110.674,00	6.254.442.181,00	(472.668.493,00)	92,97		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.982.700,00	115.084.200,00	(7.898.500,00)	93,58		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122.982.700,00	115.084.200,00	(7.898.500,00)	93,58		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	122.982.700,00	115.084.200,00	(7.898.500,00)	93,58		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.982.700,00	115.084.200,00	(7.898.500,00)	93,58		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.435.086.700,00	1.412.923.203,00	(22.163.497,00)	98,46		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.429.900,00	82.839.500,00	(590.400,00)	99,29		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	83.429.900,00	82.839.500,00	(590.400,00)	99,29		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.429.900,00	82.839.500,00	(590.400,00)	99,29		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.027.700,00	366.124.710,00	(20.902.990,00)	94,60		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.903.800,00	22.873.600,00	(30.200,00)	99,87		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.903.800,00	22.873.600,00	(30.200,00)	99,87		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	364.123.900,00	343.251.110,00	(20.872.790,00)	94,27		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.123.900,00	343.251.110,00	(20.872.790,00)	94,27		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.929.500,00	43.844.400,00	(85.100,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	43.929.500,00	43.844.400,00	(85.100,00)	99,81		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.929.500,00	43.844.400,00	(85.100,00)	99,81		
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.268.000,00	5.200.000,00	(68.000,00)	98,71		
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.268.000,00	5.200.000,00	(68.000,00)	98,71		
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.268.000,00	5.200.000,00	(68.000,00)	98,71		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.431.600,00	914.914.593,00	(517.007,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	915.431.600,00	914.914.593,00	(517.007,00)	99,94		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.431.600,00	914.914.593,00	(517.007,00)	99,94		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.684.200,00	93.700.000,00	(3.984.200,00)	95,92		
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.901.000,00	37.700.000,00	(1.201.000,00)	96,91		
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	38.901.000,00	37.700.000,00	(1.201.000,00)	96,91		
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.901.000,00	37.700.000,00	(1.201.000,00)	96,91		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58.783.200,00	56.000.000,00	(2.783.200,00)	95,27		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	43.783.200,00	41.000.000,00	(2.783.200,00)	93,64		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.783.200,00	41.000.000,00	(2.783.200,00)	93,64		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952.496.990,00	921.723.806,00	(30.773.184,00)	96,77		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.261.050,00	132.013.106,00	(19.247.944,00)	87,28		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.261.050,00	132.013.106,00	(19.247.944,00)	87,28		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.261.050,00	132.013.106,00	(19.247.944,00)	87,28		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.235.940,00	789.710.700,00	(11.525.240,00)	98,56		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	801.235.940,00	789.710.700,00	(11.525.240,00)	98,56		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.235.940,00	789.710.700,00	(11.525.240,00)	98,56		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.530.520,00	333.251.340,00	(15.279.180,00)	95,62		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.864.180,00	184.106.940,00	(8.757.240,00)	95,46		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	192.864.180,00	184.106.940,00	(8.757.240,00)	95,46		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.864.180,00	184.106.940,00	(8.757.240,00)	95,46		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.666.340,00	149.144.400,00	(6.521.940,00)	95,81		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	115.666.340,00	111.582.000,00	(4.084.340,00)	96,47		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.666.340,00	111.582.000,00	(4.084.340,00)	96,47		
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	37.562.400,00	(2.437.600,00)	93,91		
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	37.562.400,00	(2.437.600,00)	93,91		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	396.745.040,00	379.273.500,00	(17.471.540,00)	95,60		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	396.745.040,00	379.273.500,00	(17.471.540,00)	95,60		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	140.512.240,00	139.369.000,00	(1.143.240,00)	99,19		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	140.512.240,00	139.369.000,00	(1.143.240,00)	99,19		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.512.240,00	139.369.000,00	(1.143.240,00)	99,19		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	256.232.800,00	239.904.500,00	(16.328.300,00)	93,63		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	256.232.800,00	239.904.500,00	(16.328.300,00)	93,63		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.232.800,00	239.904.500,00	(16.328.300,00)	93,63		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	3.952.498.200,00	3.854.815.186,00	(97.683.014,00)	97,53		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	294.456.900,00	291.334.700,00	(3.122.200,00)	98,94		
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.616.400,00	22.110.400,00	(1.506.000,00)	93,62		
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.616.400,00	22.110.400,00	(1.506.000,00)	93,62		
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.616.400,00	22.110.400,00	(1.506.000,00)	93,62		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30.749.000,00	29.660.000,00	(1.089.000,00)	96,46		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.749.000,00	29.660.000,00	(1.089.000,00)	96,46		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.749.000,00	29.660.000,00	(1.089.000,00)	96,46		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	240.091.500,00	239.564.300,00	(527.200,00)	99,78		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	240.091.500,00	239.564.300,00	(527.200,00)	99,78		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.091.500,00	239.564.300,00	(527.200,00)	99,78		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.453.617.800,00	3.363.985.859,00	(89.631.941,00)	97,40		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.524.232.400,00	1.461.223.214,00	(63.009.186,00)	95,87		
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	271.344.000,00	252.543.214,00	(18.800.786,00)	93,07		
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.344.000,00	252.543.214,00	(18.800.786,00)	93,07		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.252.888.400,00	1.208.680.000,00	(44.208.400,00)	96,47		
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.159.739.500,00	1.116.927.400,00	(42.812.100,00)	96,31		
03.2.02.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93.148.900,00	91.752.600,00	(1.396.300,00)	98,50		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.929.385.400,00	1.902.762.645,00	(26.622.755,00)	98,62		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.913.424.700,00	1.887.344.745,00	(26.079.955,00)	98,64		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.913.424.700,00	1.887.344.745,00	(26.079.955,00)	98,64		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	15.960.700,00	15.417.900,00	(542.800,00)	96,60		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.960.700,00	15.417.900,00	(542.800,00)	96,60		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	204.423.500,00	199.494.627,00	(4.928.873,00)	97,59		
03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	204.423.500,00	199.494.627,00	(4.928.873,00)	97,59		
03.2.06.12.5.1	BELANJA OPERASI	204.423.500,00	199.494.627,00	(4.928.873,00)	97,59		
03.2.06.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.423.500,00	199.494.627,00	(4.928.873,00)	97,59		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	251.514.700,00	250.792.250,00	(722.450,00)	99,71		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	251.514.700,00	250.792.250,00	(722.450,00)	99,71		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	196.575.800,00	196.423.500,00	(152.300,00)	99,92		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	196.575.800,00	196.423.500,00	(152.300,00)	99,92		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.575.800,00	196.423.500,00	(152.300,00)	99,92		
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	54.938.900,00	54.368.750,00	(570.150,00)	98,96		
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.938.900,00	54.368.750,00	(570.150,00)	98,96		
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.938.900,00	54.368.750,00	(570.150,00)	98,96		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	235.828.800,00	229.707.100,00	(6.121.700,00)	97,40		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	235.828.800,00	229.707.100,00	(6.121.700,00)	97,40		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	23.897.000,00	23.847.000,00	(50.000,00)	99,79		
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.897.000,00	23.847.000,00	(50.000,00)	99,79		
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.897.000,00	23.847.000,00	(50.000,00)	99,79		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66.460.500,00	65.776.800,00	(683.700,00)	98,97		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.460.500,00	65.776.800,00	(683.700,00)	98,97		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.460.500,00	65.776.800,00	(683.700,00)	98,97		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	64.891.500,00	61.089.000,00	(3.802.500,00)	94,14		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	64.891.500,00	61.089.000,00	(3.802.500,00)	94,14		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.891.500,00	61.089.000,00	(3.802.500,00)	94,14		
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.352.500,00	6.602.500,00	(750.000,00)	89,80		
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.352.500,00	6.602.500,00	(750.000,00)	89,80		
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.352.500,00	6.602.500,00	(750.000,00)	89,80		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	36.100.000,00	35.341.000,00	(759.000,00)	97,90		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	36.100.000,00	35.341.000,00	(759.000,00)	97,90		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	35.341.000,00	(759.000,00)	97,90		
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	37.127.300,00	37.050.800,00	(76.500,00)	99,79		
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	37.127.300,00	37.050.800,00	(76.500,00)	99,79		
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.127.300,00	37.050.800,00	(76.500,00)	99,79		
	SURPLUS / DEFISIT	(14.510.568.524,00)	(13.827.009.866,00)	683.558.658,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(14.510.568.524,00)**	**(13.827.009.866,00)**	**683.558.658,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.08 KECAMATAN PARINGIN SELATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.08.000 KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.606.889.895,00	9.951.978.437,00	(654.911.458,00)	93,83		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.667.074.195,00	7.139.117.142,00	(527.957.053,00)	93,11		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.243.000,00	47.367.500,00	(875.500,00)	98,19		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.023.000,00	39.270.200,00	(752.800,00)	98,12		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.023.000,00	39.270.200,00	(752.800,00)	98,12		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.023.000,00	39.270.200,00	(752.800,00)	98,12		
01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00		
01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.470.000,00	5.347.300,00	(122.700,00)	97,76		
01.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	5.470.000,00	5.347.300,00	(122.700,00)	97,76		
01.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	5.347.300,00	(122.700,00)	97,76		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.551.611.135,00	5.114.528.039,00	(437.083.096,00)	92,13		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.491.872.135,00	5.055.034.439,00	(436.837.696,00)	92,05		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.491.872.135,00	5.055.034.439,00	(436.837.696,00)	92,05		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.491.872.135,00	5.055.034.439,00	(436.837.696,00)	92,05		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.739.000,00	59.493.600,00	(245.400,00)	99,59		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	59.739.000,00	59.493.600,00	(245.400,00)	99,59		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.739.000,00	59.493.600,00	(245.400,00)	99,59		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.375.000,00	97.162.500,00	(4.212.500,00)	95,84		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.375.000,00	87.162.500,00	(4.212.500,00)	95,39		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	91.375.000,00	87.162.500,00	(4.212.500,00)	95,39		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.375.000,00	87.162.500,00	(4.212.500,00)	95,39		
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.564.000,00	678.168.883,00	(3.395.117,00)	99,50		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.209.800,00	10.147.500,00	(62.300,00)	99,39		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.209.800,00	10.147.500,00	(62.300,00)	99,39		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.209.800,00	10.147.500,00	(62.300,00)	99,39		
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	119.952.900,00	116.963.950,00	(2.988.950,00)	97,51		
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	119.952.900,00	116.963.950,00	(2.988.950,00)	97,51		
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.952.900,00	116.963.950,00	(2.988.950,00)	97,51		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.128.200,00	26.070.000,00	(58.200,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	26.128.200,00	26.070.000,00	(58.200,00)	99,78		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.128.200,00	26.070.000,00	(58.200,00)	99,78		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.273.100,00	524.987.433,00	(285.667,00)	99,95		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	525.273.100,00	524.987.433,00	(285.667,00)	99,95		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.273.100,00	524.987.433,00	(285.667,00)	99,95		
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	504.229.400,00	482.091.296,00	(22.138.104,00)	95,61		
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	269.628.000,00	266.927.250,00	(2.700.750,00)	99,00		
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.487.200,00	9.324.000,00	(163.200,00)	98,28		
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.487.200,00	9.324.000,00	(163.200,00)	98,28		
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	260.140.800,00	257.603.250,00	(2.537.550,00)	99,02		
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.140.800,00	257.603.250,00	(2.537.550,00)	99,02		
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.601.400,00	215.164.046,00	(19.437.354,00)	91,71		
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	231.101.400,00	212.164.046,00	(18.937.354,00)	91,81		
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.101.400,00	212.164.046,00	(18.937.354,00)	91,81		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.682.260,00	466.243.524,00	(39.438.736,00)	92,20		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.637.500,00	116.358.677,00	(35.278.823,00)	76,73		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	151.637.500,00	116.358.677,00	(35.278.823,00)	76,73		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.637.500,00	116.358.677,00	(35.278.823,00)	76,73		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.044.760,00	349.884.847,00	(4.159.913,00)	98,83		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	354.044.760,00	349.884.847,00	(4.159.913,00)	98,83		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.044.760,00	349.884.847,00	(4.159.913,00)	98,83		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.369.400,00	253.555.400,00	(20.814.000,00)	92,41		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.021.100,00	127.545.400,00	(19.475.700,00)	86,75		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	147.021.100,00	127.545.400,00	(19.475.700,00)	86,75		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.021.100,00	127.545.400,00	(19.475.700,00)	86,75		
01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.348.300,00	126.010.000,00	(1.338.300,00)	98,95		
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	127.348.300,00	126.010.000,00	(1.338.300,00)	98,95		
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.348.300,00	126.010.000,00	(1.338.300,00)	98,95		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	287.927.300,00	281.704.000,00	(6.223.300,00)	97,84		
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	287.927.300,00	281.704.000,00	(6.223.300,00)	97,84		
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	54.680.000,00	54.640.000,00	(40.000,00)	99,93		
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.680.000,00	54.640.000,00	(40.000,00)	99,93		
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.680.000,00	54.640.000,00	(40.000,00)	99,93		
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	233.247.300,00	227.064.000,00	(6.183.300,00)	97,35		
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	233.247.300,00	227.064.000,00	(6.183.300,00)	97,35		
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.247.300,00	227.064.000,00	(6.183.300,00)	97,35		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2.420.508.400,00	2.303.621.295,00	(116.887.105,00)	95,17		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	156.877.500,00	156.650.000,00	(227.500,00)	99,85		
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30.177.500,00	29.950.000,00	(227.500,00)	99,25		
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.177.500,00	29.950.000,00	(227.500,00)	99,25		
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.177.500,00	29.950.000,00	(227.500,00)	99,25		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	100,00		
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.098.947.900,00	1.983.917.869,00	(115.030.031,00)	94,52		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	330.090.000,00	322.326.786,00	(7.763.214,00)	97,65		
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	330.090.000,00	322.326.786,00	(7.763.214,00)	97,65		
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.090.000,00	322.326.786,00	(7.763.214,00)	97,65		
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.010.000,00	144.006.000,00	(4.000,00)	100,00		
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	144.010.000,00	144.006.000,00	(4.000,00)	100,00		
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.010.000,00	144.006.000,00	(4.000,00)	100,00		
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	673.865.800,00	661.704.340,00	(12.161.460,00)	98,20		
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	624.098.600,00	612.234.740,00	(11.863.860,00)	98,10		
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.098.600,00	612.234.740,00	(11.863.860,00)	98,10		
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	49.767.200,00	49.469.600,00	(297.600,00)	99,40		
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.767.200,00	49.469.600,00	(297.600,00)	99,40		
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	950.982.100,00	855.880.743,00	(95.101.357,00)	90,00		
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	412.417.000,00	333.665.243,00	(78.751.757,00)	80,90		
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.417.000,00	333.665.243,00	(78.751.757,00)	80,90		
03.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	538.565.100,00	522.215.500,00	(16.349.600,00)	96,96		
03.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	538.565.100,00	522.215.500,00	(16.349.600,00)	96,96		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	164.683.000,00	163.053.426,00	(1.629.574,00)	99,01		
03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	164.683.000,00	163.053.426,00	(1.629.574,00)	99,01		
03.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	164.683.000,00	163.053.426,00	(1.629.574,00)	99,01		
03.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.683.000,00	163.053.426,00	(1.629.574,00)	99,01		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	54.340.000,00	52.744.000,00	(1.596.000,00)	97,06		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.340.000,00	52.744.000,00	(1.596.000,00)	97,06		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54.340.000,00	52.744.000,00	(1.596.000,00)	97,06		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.340.000,00	52.744.000,00	(1.596.000,00)	97,06		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.340.000,00	52.744.000,00	(1.596.000,00)	97,06		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	16.220.000,00	14.652.000,00	(1.568.000,00)	90,33		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.220.000,00	14.652.000,00	(1.568.000,00)	90,33		
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.220.000,00	14.652.000,00	(1.568.000,00)	90,33		
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.220.000,00	14.652.000,00	(1.568.000,00)	90,33		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	14.652.000,00	(1.568.000,00)	90,33		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	160.820.000,00	160.140.000,00	(680.000,00)	99,58		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160.820.000,00	160.140.000,00	(680.000,00)	99,58		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52.250.000,00	51.650.000,00	(600.000,00)	98,85		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.250.000,00	51.650.000,00	(600.000,00)	98,85		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	51.650.000,00	(600.000,00)	98,85		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	90.270.000,00	90.190.000,00	(80.000,00)	99,91		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	90.270.000,00	90.190.000,00	(80.000,00)	99,91		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.270.000,00	90.190.000,00	(80.000,00)	99,91		
06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.15.5.1	BELANJA OPERASI	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00		
06.2.01.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	100,00		
	SURPLUS / DEFISIT	(10.606.889.895,00)	(9.951.978.437,00)	654.911.458,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(10.606.889.895,00)**	**(9.951.978.437,00)**	**654.911.458,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 KECAMATAN TEBING TINGGI
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.000 KECAMATAN TEBING TINGGI

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.167.568.439,00	5.840.843.927,00	(326.724.512,00)	94,70		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.071.771.939,00	4.763.039.291,00	(308.732.648,00)	93,91		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.205.700,00	192.758.410,00	(447.290,00)	99,77		
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.588.800,00	17.459.500,00	(129.300,00)	99,26		
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.588.800,00	17.459.500,00	(129.300,00)	99,26		
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.588.800,00	17.459.500,00	(129.300,00)	99,26		
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.346.000,00	17.175.000,00	(171.000,00)	99,01		
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.346.000,00	17.175.000,00	(171.000,00)	99,01		
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.346.000,00	17.175.000,00	(171.000,00)	99,01		
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	16.625.900,00	16.601.500,00	(24.400,00)	99,85		
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.625.900,00	16.601.500,00	(24.400,00)	99,85		
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.625.900,00	16.601.500,00	(24.400,00)	99,85		
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.645.000,00	141.522.410,00	(122.590,00)	99,91		
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	141.645.000,00	141.522.410,00	(122.590,00)	99,91		
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.645.000,00	141.522.410,00	(122.590,00)	99,91		
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.190.859.439,00	2.922.473.277,00	(268.386.162,00)	91,59		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.613.279,00	2.854.471.477,00	(265.141.802,00)	91,50		
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.119.613.279,00	2.854.471.477,00	(265.141.802,00)	91,50		
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.119.613.279,00	2.854.471.477,00	(265.141.802,00)	91,50		
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.246.160,00	68.001.800,00	(3.244.360,00)	95,45		
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	71.246.160,00	68.001.800,00	(3.244.360,00)	95,45		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.246.160,00	68.001.800,00	(3.244.360,00)	95,45		
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.957.000,00	55.571.620,00	(385.380,00)	99,31		
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.957.000,00	55.571.620,00	(385.380,00)	99,31		
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.957.000,00	55.571.620,00	(385.380,00)	99,31		
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.957.000,00	55.571.620,00	(385.380,00)	99,31		
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.166.305.400,00	1.144.766.913,00	(21.538.487,00)	98,15		
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.747.400,00	48.695.600,00	(51.800,00)	99,89		
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	48.747.400,00	48.695.600,00	(51.800,00)	99,89		
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.747.400,00	48.695.600,00	(51.800,00)	99,89		
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	837.702.800,00	816.770.640,00	(20.932.160,00)	97,50		
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	76.849.800,00	76.491.200,00	(358.600,00)	99,53		
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.849.800,00	76.491.200,00	(358.600,00)	99,53		
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	760.853.000,00	740.279.440,00	(20.573.560,00)	97,30		
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.687.700,00	733.279.440,00	(20.408.260,00)	97,29		
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.165.300,00	7.000.000,00	(165.300,00)	97,69		
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.568.600,00	41.091.498,00	(477.102,00)	98,85		
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.568.600,00	41.091.498,00	(477.102,00)	98,85		
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.568.600,00	41.091.498,00	(477.102,00)	98,85		
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.060.600,00	31.024.800,00	(35.800,00)	99,88		
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.060.600,00	31.024.800,00	(35.800,00)	99,88		
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.060.600,00	31.024.800,00	(35.800,00)	99,88		
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.226.000,00	207.184.375,00	(41.625,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	207.226.000,00	207.184.375,00	(41.625,00)	99,98		
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.226.000,00	207.184.375,00	(41.625,00)	99,98		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.903.200,00	253.292.816,00	(13.610.384,00)	94,90		
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118.602.000,00	118.588.000,00	(14.000,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	118.602.000,00	118.588.000,00	(14.000,00)	99,99		
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.602.000,00	118.588.000,00	(14.000,00)	99,99		
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.449.000,00	29.148.616,00	(13.300.384,00)	68,67		
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	42.449.000,00	29.148.616,00	(13.300.384,00)	68,67		
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.449.000,00	29.148.616,00	(13.300.384,00)	68,67		
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.852.200,00	105.556.200,00	(296.000,00)	99,72		
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	105.852.200,00	105.556.200,00	(296.000,00)	99,72		
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.852.200,00	105.556.200,00	(296.000,00)	99,72		
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.541.200,00	194.176.255,00	(4.364.945,00)	97,80		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.195.200,00	139.423.255,00	(3.771.945,00)	97,37		
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	143.195.200,00	139.423.255,00	(3.771.945,00)	97,37		
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.195.200,00	139.423.255,00	(3.771.945,00)	97,37		
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.346.000,00	18.753.000,00	(593.000,00)	96,93		
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.346.000,00	18.753.000,00	(593.000,00)	96,93		
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.346.000,00	18.753.000,00	(593.000,00)	96,93		
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	225.245.500,00	224.363.900,00	(881.600,00)	99,61		
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	225.245.500,00	224.363.900,00	(881.600,00)	99,61		
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	225.245.500,00	224.363.900,00	(881.600,00)	99,61		
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	225.245.500,00	224.363.900,00	(881.600,00)	99,61		
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.245.500,00	224.363.900,00	(881.600,00)	99,61		
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	487.749.100,00	477.031.136,00	(10.717.964,00)	97,80		
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	319.879.300,00	309.226.006,00	(10.653.294,00)	96,67		
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	319.879.300,00	309.226.006,00	(10.653.294,00)	96,67		
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	319.879.300,00	309.226.006,00	(10.653.294,00)	96,67		
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.879.300,00	309.226.006,00	(10.653.294,00)	96,67		
03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	167.869.800,00	167.805.130,00	(64.670,00)	99,96		
03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	167.869.800,00	167.805.130,00	(64.670,00)	99,96		
03.2.06.12.5.1	BELANJA OPERASI	167.869.800,00	167.805.130,00	(64.670,00)	99,96		
03.2.06.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.869.800,00	167.805.130,00	(64.670,00)	99,96		
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	94.230.000,00	94.160.000,00	(70.000,00)	99,93		
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.230.000,00	94.160.000,00	(70.000,00)	99,93		
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94.230.000,00	94.160.000,00	(70.000,00)	99,93		
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.230.000,00	94.160.000,00	(70.000,00)	99,93		

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.230.000,00	94.160.000,00	(70.000,00)	99,93		
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00		
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00		
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	100,00		
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	277.751.900,00	271.429.600,00	(6.322.300,00)	97,72		
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	277.751.900,00	271.429.600,00	(6.322.300,00)	97,72		
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	113.355.000,00	113.256.000,00	(99.000,00)	99,91		
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.355.000,00	113.256.000,00	(99.000,00)	99,91		
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.355.000,00	113.256.000,00	(99.000,00)	99,91		
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	134.665.000,00	131.670.000,00	(2.995.000,00)	97,78		
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	134.665.000,00	131.670.000,00	(2.995.000,00)	97,78		
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.665.000,00	131.670.000,00	(2.995.000,00)	97,78		
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	29.731.900,00	26.503.600,00	(3.228.300,00)	89,14		
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	29.731.900,00	26.503.600,00	(3.228.300,00)	89,14		
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.731.900,00	26.503.600,00	(3.228.300,00)	89,14		
	SURPLUS / DEFISIT	(6.167.568.439,00)	(5.840.843.927,00)	326.724.512,00	0		
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.167.568.439,00)**	**(5.840.843.927,00)**	**326.724.512,00**	**0**		

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI — KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.226.987.957.123,87	944.523.040.033,13	0,00	0,00
		1.026.612.835.231,93	771.029.534.485,42	0,00	0,00
1.01	**PENDIDIKAN**	465.416.161.156,00	119.881.202.991,00	0,00	0,00
		360.456.894.544,00	98.655.609.336,00	0,00	0,00
1.01.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.440.036.469,00	271.518.000,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.440.036.469,00	271.518.000,00	0,00	0,00
1.01.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.440.036.469,00	271.518.000,00	0,00	0,00
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	309.076.409.196,00	5.139.596.765,00	0,00	0,00
		250.644.746.241,00	4.528.042.374,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	582.566.700,00	0,00	0,00	0,00
		509.417.334,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.959.500,00	0,00	0,00	0,00
		209.712.592,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.507.200,00	0,00	0,00	0,00
		261.606.942,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.348.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.749.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	299.085.468.881,00	0,00	0,00	0,00
		242.702.417.332,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	295.788.317.921,00	0,00	0,00	0,00
		241.391.740.052,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.297.150.960,00	0,00	0,00	0,00
		1.310.677.280,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	988.129.035,00	225.750.000,00	0,00	0,00
		670.048.850,00	223.609.500,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	202.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.174.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	785.984.035,00	225.750.000,00	0,00	0,00
		532.874.050,00	223.609.500,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.080.433.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.272.075.352,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.603.100,00	0,00	0,00	0,00
		91.706.250,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.976.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.180.369.102,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.256.575.100,00	1.091.503.700,00	0,00	0,00
		2.624.536.841,00	977.042.309,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.875.200,00	0,00	0,00	0,00
		106.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.902.500,00	1.091.503.700,00	0,00	0,00
		23.729.000,00	977.042.309,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.431.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.845.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	419.766.300,00	0,00	0,00	0,00
		326.364.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.627.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.101.670.841,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	486.306.000,00	0,00	0,00
		0,00	415.995.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	486.306.000,00	0,00	0,00
		0,00	415.995.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		772.047.615,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.941.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.127.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		642.920.615,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.220.380,00	3.336.037.065,00	0,00	0,00
		1.094.202.917,00	2.911.395.565,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	571.042.100,00	0,00	0,00	0,00
		493.550.538,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.220.800,00	0,00	0,00	0,00
		306.873.999,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.377.800,00	0,00	0,00	0,00
		59.993.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253.579.680,00	3.336.037.065,00	0,00	0,00
		233.784.780,00	2.911.395.565,00	0,00	0,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	152.321.333.160,00	114.741.606.226,00	0,00	0,00
		102.178.665.214,00	93.856.048.962,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.339.288.575,00	51.046.355.000,00	0,00	0,00
		48.701.001.112,00	42.342.311.371,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	250.000.000,00	6.151.050.026,00	0,00	0,00
		161.569.000,00	2.049.320.729,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	14.400.000,00	2.115.679.285,00	0,00	0,00
		4.050.000,00	2.018.572.585,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	104.587.750,00	0,00	0,00
		0,00	104.587.750,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	209.000.000,00	4.884.151.250,00	0,00	0,00
		199.165.350,00	4.479.636.730,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	177.250.000,00	6.818.856.400,00	0,00	0,00
		72.440.000,00	6.678.814.690,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.800.000,00	164.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	162.807.600,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	149.611.100,00	0,00	0,00
		0,00	149.611.100,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	233.900.000,00	2.456.364.000,00	0,00	0,00
		219.700.000,00	222.827.995,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.530.838.700,00	0,00	0,00	0,00
		838.874.180,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	17.954.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.337.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.036.793.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.900.679.912,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.382.481.900,00	1.404.170.100,00	0,00	0,00
		9.488.517.396,00	1.511.990.350,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.722.369.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.562.983.320,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.937.766.400,00	0,00	0,00	0,00
		5.503.017.767,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	253.609.700,00	193.616.905,00	0,00	0,00
		253.609.700,00	193.616.905,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	220.800.000,00	8.025.221.120,00	0,00	0,00
		185.320.000,00	7.785.567.065,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	27.356.785.250,00	0,00	0,00	0,00
		8.312.814.587,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	977.645.625,00	0,00	0,00	0,00
		773.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	280.430.000,00	10.306.247.064,00	0,00	0,00
		263.341.600,00	8.844.957.856,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.799.319.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.623.933.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	8.272.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.140.000.016,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.508.984.075,00	32.124.063.878,00	0,00	0,00
		10.403.155.899,00	22.941.625.252,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	50.000.000,00	7.316.800.000,00	0,00	0,00
		49.229.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	418.307.851,00	0,00	0,00
		0,00	418.307.851,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	423.755.800,00	0,00	0,00
		0,00	423.755.800,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	16.463.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.463.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	3.617.388.640,00	0,00	0,00
		0,00	3.600.816.960,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.800.000,00	2.715.098.980,00	0,00	0,00
		0,00	2.506.585.774,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	9.000.000,00	668.054.629,00	0,00	0,00
		0,00	666.011.879,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	973.924.969,00	0,00	0,00
		0,00	972.176.889,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	341.571.953,00	0,00	0,00
		0,00	340.964.313,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	55.800.000,00	4.561.026.516,00	0,00	0,00
		15.920.000,00	4.481.121.733,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	119.000.000,00	9.822.940.000,00	0,00	0,00
		118.300.000,00	8.242.998.213,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.112.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		935.675.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.308.560.800,00	0,00	0,00	0,00
		581.934.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.191.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.331.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	158.389.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.599.152,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.600.913.875,00	455.200.125,00	0,00	0,00
		2.711.781.564,00	481.976.725,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	487.916.400,00	0,00	0,00	0,00
		334.341.633,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	297.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	209.014.100,00	0,00	0,00
		0,00	209.014.100,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.600.000,00	384.517.315,00	0,00	0,00
		0,00	382.187.015,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	103.100.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		102.704.250,00	199.245.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40.158.849.160,00	31.423.972.248,00	0,00	0,00
		32.715.050.606,00	28.424.897.239,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.674.079.881,00	9.458.862.478,00	0,00	0,00
		3.162.518.679,00	8.514.735.251,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	35.696.200,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
		35.009.400,00	1.198.800.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.926.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.863.963.436,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.041.109.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.366.248.277,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.968.749.000,00	0,00	0,00	0,00
		213.477.084,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.102.680.064,00	190.350.936,00	0,00	0,00
		1.167.953.159,00	191.599.936,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	326.791.000,00	436.994.000,00	0,00	0,00
		323.191.000,00	435.299.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.232.452.021,00	3.178.922.562,00	0,00	0,00
		3.214.951.021,00	1.525.129.562,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	169.754.500,00	1.908.428.092,00	0,00	0,00
		84.674.500,00	1.869.450.639,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	682.446.440,00	12.769.950.560,00	0,00	0,00
		674.187.050,00	12.424.982.036,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.479.399.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		4.276.747.646,00	49.900.050,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	286.965.250,00	0,00	0,00
		0,00	283.639.586,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.518.895.654,00	1.943.498.370,00	0,00	0,00
		2.332.129.354,00	1.931.361.179,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.314.211.350,00	147.215.100,00	0,00	0,00
		10.359.457.597,00	147.215.100,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.372.647.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.169.270.120,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	55.454.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.619.535,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.256.370.900,00	147.215.100,00	0,00	0,00
		341.767.100,00	147.215.100,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.498.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.124.860,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.130.855.650,00	0,00	0,00	0,00
		6.789.675.982,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	535.107.600,00	0,00	0,00	0,00
		508.406.768,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	535.107.600,00	0,00	0,00	0,00
		508.406.768,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	535.107.600,00	0,00	0,00	0,00
		508.406.768,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	3.393.077.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.685.039.852,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.393.077.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.685.039.852,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.684.821.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.075.378.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.708.255.400,00	0,00	0,00	0,00
			609.661.852,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**		90.234.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		90.234.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		90.234.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**KESEHATAN**		305.024.532.353,00	68.569.842.901,00	0,00	0,00
			257.170.035.476,41	49.122.565.255,01	0,00	0,00
1.02.00	**Non Program**		0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00	Non Kegiatan		0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan		0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		195.859.213.414,00	5.732.236.638,00	0,00	0,00
			162.835.457.711,55	4.492.043.462,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		983.317.765,00	14.093.000,00	0,00	0,00
			930.525.400,00	13.986.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		423.743.400,00	0,00	0,00	0,00
			402.419.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		505.059.365,00	14.093.000,00	0,00	0,00
			491.057.200,00	13.986.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		54.515.000,00	0,00	0,00	0,00
			37.048.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		134.578.967.151,00	0,00	0,00	0,00
			102.940.790.874,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		134.172.698.451,00	0,00	0,00	0,00
			102.545.287.874,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		406.268.700,00	0,00	0,00	0,00
			395.503.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.956.160.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.946.932.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2.956.160.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.946.932.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	867.845.832,00	1.111.571.500,00	0,00	0,00
		840.501.767,00	1.041.890.784,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.873.300,00	0,00	0,00	0,00
		13.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.994.232,00	1.111.571.500,00	0,00	0,00
		258.671.918,00	1.041.890.784,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.930.500,00	0,00	0,00	0,00
		63.008.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.947.200,00	0,00	0,00	0,00
		29.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.100.600,00	0,00	0,00	0,00
		475.691.849,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.216.150,00	0,00	0,00	0,00
		620.692.322,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.383.150,00	0,00	0,00	0,00
		315.370.122,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.983.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.092.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.141.788,00	1.516.113.438,00	0,00	0,00
		557.827.780,00	1.444.855.848,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.135.000,00	0,00	0,00	0,00
		366.656.817,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.655.588,00	1.516.113.438,00	0,00	0,00
		87.259.963,00	1.444.855.848,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.351.200,00	0,00	0,00	0,00
		103.911.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	55.120.564.728,00	3.090.458.700,00	0,00	0,00
		53.998.187.468,55	1.991.310.830,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	55.120.564.728,00	3.090.458.700,00	0,00	0,00
		53.998.187.468,55	1.991.310.830,00	0,00	0,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	96.259.674.939,00	62.837.606.263,00	0,00	0,00
		82.478.176.767,86	44.630.521.793,01	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.711.254.429,00	62.736.838.263,00	0,00	0,00
		7.270.189.922,51	44.532.729.847,01	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	112.285.000,00	2.220.427.580,00	0,00	0,00
		96.647.400,00	2.212.698.845,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	721.469.500,00	22.354.715.650,00	0,00	0,00
		633.770.550,00	10.272.784.342,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	370.823.800,00	12.447.342.963,00	0,00	0,00
		150.461.000,00	8.650.157.079,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	122.421.000,00	8.498.607.104,00	0,00	0,00
		109.208.505,00	7.808.898.920,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.444.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	3.169.897.264,00	17.178.994.966,00	0,00	0,00
		2.343.985.209,00	15.588.190.661,01	0,00	0,00
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.758.173.865,00	36.750.000,00	0,00	0,00
		2.660.244.332,51	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.208.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.094.212.526,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	132.389.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.215.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.568.051.510,00	62.600.000,00	0,00	0,00
		74.365.816.285,35	62.271.946,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.636.145.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.467.679.049,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	614.019.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.948.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	553.353.000,00	0,00	0,00	0,00
		468.259.478,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	368.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		340.680.255,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.098.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		971.753.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	369.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		336.326.110,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	620.640.400,00	0,00	0,00	0,00
		574.704.850,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	191.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.037.330,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	129.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.190.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	596.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		490.260.004,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	379.663.000,00	0,00	0,00	0,00
		359.360.930,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	216.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.295.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	473.148.600,00	42.600.000,00	0,00	0,00
		423.251.358,00	42.566.946,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.943.207.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.179.703.432,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	680.814.900,00	0,00	0,00	0,00
		540.719.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	986.323.000,00	0,00	0,00	0,00
		796.825.618,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	197.601.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.808.290,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	497.793.600,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		402.256.825,00	19.705.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	148.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.490.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.102.007.600,00	0,00	0,00	0,00
		961.443.318,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.477.599.120,00	0,00	0,00	0,00
		33.967.249.956,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	102.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.349.700,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	409.988.000,00	0,00	0,00	0,00
		343.412.227,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	24.215.763.370,00	0,00	0,00	0,00
		20.497.515.877,35	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.941.856.620,00	0,00	0,00	0,00
		4.399.335.478,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	239.900.600,00	0,00	0,00	0,00
		215.099.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	104.721.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.616.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	53.945.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.630.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	372.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		368.895.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.698.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	102.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	464.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		442.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	154.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.883.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	154.617.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.883.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	825.752.000,00	38.168.000,00	0,00	0,00
		714.286.960,00	35.520.000,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	825.752.000,00	38.168.000,00	0,00	0,00
		714.286.960,00	35.520.000,00	0,00	0,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	11.538.513.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.799.475.797,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.084.371.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.573.267.121,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.084.371.400,00	0,00	0,00	0,00
		8.573.267.121,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.454.141.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.226.208.676,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.454.141.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.226.208.676,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	491.315.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.974.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.403.800,00	0,00	0,00	0,00
		33.073.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39.403.800,00	0,00	0,00	0,00
		33.073.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	245.341.200,00	0,00	0,00	0,00
		179.679.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	245.341.200,00	0,00	0,00	0,00
		179.679.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	206.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.221.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	206.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.221.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	875.815.900,00	0,00	0,00	0,00
		664.950.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	358.171.400,00	0,00	0,00	0,00
		300.338.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	358.171.400,00	0,00	0,00	0,00
		300.338.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.544.500,00	0,00	0,00	0,00
		155.734.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	245.544.500,00	0,00	0,00	0,00
		155.734.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		208.877.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	272.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		208.877.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	257.911.377.308,87	657.233.928.941,13	0,00	0,00
		226.036.931.494,00	528.417.319.904,00	0,00	0,00
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	22.560.050.786,87	1.639.550.300,00	0,00	0,00
		20.046.940.734,00	573.730.204,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.605.300,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		248.323.174,00	54.445.500,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.561.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		142.768.611,00	39.627.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.806.300,00	0,00	0,00	0,00
		84.626.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	34.113.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.778.063,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	13.125.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		5.150.000,00	14.818.500,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.674.259.486,87	118.608.500,00	0,00	0,00
		13.050.603.263,00	102.841.511,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.925.895.286,87	0,00	0,00	0,00
		12.517.419.486,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.327.200,00	118.608.500,00	0,00	0,00
		9.140.040,00	102.841.511,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	570.037.000,00	0,00	0,00	0,00
		524.043.737,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	956.283.500,00	0,00	0,00	0,00
		941.699.199,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	372.418.500,00	0,00	0,00	0,00
		362.516.931,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	583.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		579.182.268,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.227.039.300,00	1.465.941.800,00	0,00	0,00
		3.289.832.722,00	416.443.193,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.123.405.000,00	1.465.941.800,00	0,00	0,00
		1.686.710.050,00	416.443.193,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.286.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	407.844.000,00	0,00	0,00	0,00
		293.153.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.973.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.920.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.598.101.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.762.872,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.786.800.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.555.610,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	699.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		442.339.670,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.087.600.200,00	0,00	0,00	0,00
		818.215.940,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.624.063.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.255.926.766,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.126.100,00	0,00	0,00	0,00
		284.732.351,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	536.860.100,00	0,00	0,00	0,00
		435.360.670,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.818.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	547.184.800,00	0,00	0,00	0,00
		456.014.845,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	22.656.530.900,00	66.262.954.800,00	0,00	0,00
		21.937.225.477,00	64.108.833.035,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.646.993.900,00	44.806.554.800,00	0,00	0,00
		4.277.967.574,00	43.774.880.727,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	817.398.100,00	43.299.260.000,00	0,00	0,00
		612.435.474,00	42.291.659.495,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.21	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	734.620.000,00	0,00	0,00
		0,00	718.282.232,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	71.880.000,00	708.350.000,00	0,00	0,00
		65.550.000,00	701.114.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.02.2.01.28	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.435.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.371.671.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	322.355.800,00	64.324.800,00	0,00	0,00
		228.311.100,00	63.825.000,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.009.537.000,00	21.456.400.000,00	0,00	0,00
		17.659.257.903,00	20.333.952.308,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	178.000.000,00	14.989.560.000,00	0,00	0,00
		156.452.903,00	14.177.120.988,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	111.120.000,00	6.466.840.000,00	0,00	0,00
		103.120.000,00	6.156.831.320,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	15.999.777.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.768.711.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.720.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.630.974.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	17.854.046.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.783.813.804,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	17.854.046.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.783.813.804,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.773.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.976.801.228,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.080.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.807.012.576,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	28.145.914.527,00	1.311.391.400,00	0,00	0,00
		24.919.287.754,00	1.300.338.604,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.145.914.527,00	1.311.391.400,00	0,00	0,00
		24.919.287.754,00	1.300.338.604,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	909.114.400,00	156.191.400,00	0,00	0,00
		864.300.704,00	147.314.000,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	27.236.800.127,00	1.155.200.000,00	0,00	0,00
		24.054.987.050,00	1.153.024.604,00	0,00	0,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	143.357.643.245,00	204.384.961.531,00	0,00	0,00
		124.620.998.420,00	163.838.593.515,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	143.357.643.245,00	204.384.961.531,00	0,00	0,00
		124.620.998.420,00	163.838.593.515,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.096.863.000,00	15.560.155.031,00	0,00	0,00
		3.478.800.887,00	13.633.671.742,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	507.565.284,00	0,00	0,00	0,00
		375.990.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	137.753.214.961,00	188.824.806.500,00	0,00	0,00
		120.766.206.733,00	150.204.921.773,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	10.798.250.000,00	96.212.724.361,50	0,00	0,00
		8.116.956.237,00	69.889.658.838,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.798.250.000,00	96.212.724.361,50	0,00	0,00
		8.116.956.237,00	69.889.658.838,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	10.798.250.000,00	96.212.724.361,50	0,00	0,00
		8.116.956.237,00	69.889.658.838,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	3.946.275.650,00	287.262.542.248,63	0,00	0,00
		1.842.723.710,00	228.562.059.708,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.946.275.650,00	287.262.542.248,63	0,00	0,00
		1.842.723.710,00	228.562.059.708,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	690.000,00	20.778.282.280,58	0,00	0,00
		690.000,00	5.128.667.890,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	1.393.810.700,00	205.609.163.450,05	0,00	0,00
		930.632.840,00	178.751.482.432,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	210.720.000,00	139.280.000,00	0,00	0,00
		51.845.000,00	139.280.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan	32.675.000,00	4.137.430.000,00	0,00	0,00
		125.000,00	3.817.041.139,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	973.379.000,00	56.388.976.518,00	0,00	0,00
		385.225.419,00	40.671.178.247,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.335.000.950,00	209.410.000,00	0,00	0,00
		474.205.451,00	54.410.000,00	0,00	0,00
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	5.667.823.200,00	103.748.000,00	0,00	0,00
		5.173.585.672,00	88.562.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	764.549.000,00	0,00	0,00	0,00
		467.847.693,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	764.549.000,00	0,00	0,00	0,00
		467.847.693,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.848.000,00	103.748.000,00	0,00	0,00
		128.392.247,00	88.562.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	200.848.000,00	103.748.000,00	0,00	0,00
		128.392.247,00	88.562.000,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.702.426.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.577.345.732,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.04.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	4.702.426.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.577.345.732,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	2.924.843.000,00	56.056.300,00	0,00	0,00
		2.595.399.686,00	55.544.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.689.670.900,00	56.056.300,00	0,00	0,00
		1.585.262.819,00	55.544.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.689.670.900,00	56.056.300,00	0,00	0,00
		1.585.262.819,00	55.544.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	917.999.600,00	0,00	0,00	0,00
		708.992.036,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	917.999.600,00	0,00	0,00	0,00
		708.992.036,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	317.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		301.144.831,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	317.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		301.144.831,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	121.805.864.733,00	93.571.590.855,00	0,00	0,00
		119.253.719.762,00	89.888.521.252,00	0,00	0,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	1.126.129.800,00	0,00	0,00	0,00
		942.919.400,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	189.535.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.421.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	189.535.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.421.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	936.594.300,00	0,00	0,00	0,00
		882.498.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	518.193.300,00	0,00	0,00	0,00
		498.990.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	418.401.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.508.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	6.319.106.200,00	7.083.556.180,00	0,00	0,00
		5.717.507.441,00	6.732.596.218,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	686.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		523.326.260,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	686.586.000,00	0,00	0,00	0,00
		523.326.260,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.632.520.200,00	7.083.556.180,00	0,00	0,00
		5.194.181.181,00	6.732.596.218,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5.632.520.200,00	7.083.556.180,00	0,00	0,00
		5.194.181.181,00	6.732.596.218,00	0,00	0,00
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	32.505.945.300,00	0,00	0,00	0,00
		31.367.332.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	32.505.945.300,00	0,00	0,00	0,00
		31.367.332.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	32.505.945.300,00	0,00	0,00	0,00
		31.367.332.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	81.854.683.433,00	86.488.034.675,00	0,00	0,00
		81.225.960.421,00	83.155.925.034,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	81.854.683.433,00	86.488.034.675,00	0,00	0,00
		81.225.960.421,00	83.155.925.034,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	262.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.142.020,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	81.592.303.433,00	86.488.034.675,00	0,00	0,00
		80.988.818.401,00	83.155.925.034,00	0,00	0,00
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	48.161.847.273,00	4.363.876.545,00	0,00	0,00
		39.702.625.239,52	4.152.104.538,41	0,00	0,00
1.05.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	31.667.005.961,00	2.643.876.545,00	0,00	0,00
		24.589.146.147,52	2.452.005.739,41	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	676.535.600,00	0,00	0,00	0,00
		585.817.428,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	266.627.800,00	0,00	0,00	0,00
		252.564.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.792.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.852.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.435.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.120.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.318.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.028.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	235.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.012.212,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.364.575,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	45.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.374.441,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	40.715.500,00	0,00	0,00	0,00
		32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.660.251.222,00	0,00	0,00	0,00
		19.354.448.287,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.527.402.222,00	0,00	0,00	0,00
		19.228.442.587,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.791.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.231.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	124.058.000,00	0,00	0,00	0,00
		117.774.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.889.054.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.873.091.724,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.484.600,00	0,00	0,00	0,00
		103.623.990,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	589.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		587.499.418,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.189.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.181.968.316,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.352.299.200,00	644.415.800,00	0,00	0,00
		1.306.739.438,52	617.509.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.095.400,00	0,00	0,00	0,00
		10.945.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.275.800,00	644.415.800,00	0,00	0,00
		96.591.999,00	617.509.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.471.200,00	0,00	0,00	0,00
		51.498.080,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.963.500,00	0,00	0,00	0,00
		81.849.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.072.784.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.045.634.859,52	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.673.450,00	1.316.166.000,00	0,00	0,00
		76.266.091,00	1.291.301.999,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	116.703.000,00	0,00	0,00
		0,00	115.417.999,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	486.306.000,00	0,00	0,00
		0,00	477.000.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.673.450,00	713.157.000,00	0,00	0,00
		76.266.091,00	698.884.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.238.789,00	0,00	0,00	0,00
		723.616.971,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	265.226.800,00	0,00	0,00	0,00
		221.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.707.450,00	0,00	0,00	0,00
		296.149.471,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.779.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	393.574.539,00	0,00	0,00	0,00
		180.458.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.953.100,00	683.294.745,00	0,00	0,00
		669.166.208,00	543.194.740,41	0,00	0,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	618.371.900,00	0,00	0,00	0,00
		519.291.908,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.405.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.400.000,00	683.294.745,00	0,00	0,00
		38.400.000,00	543.194.740,41	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.591.200,00	0,00	0,00	0,00
		89.069.300,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	9.150.446.612,00	650.000.000,00	0,00	0,00
		8.243.641.934,00	648.217.800,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.540.756.612,00	650.000.000,00	0,00	0,00
		7.650.134.234,00	648.217.800,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	457.552.100,00	0,00	0,00	0,00
		452.352.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	570.910.500,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		542.313.420,00	49.372.800,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.048.982,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	7.211.490.012,00	0,00	0,00	0,00
		6.370.198.632,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.261.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	164.179.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
		156.960.000,00	598.845.000,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	609.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		593.507.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	166.185.000,00	0,00	0,00	0,00
		163.257.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	49.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.242.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	394.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		382.007.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	5.597.428.200,00	1.070.000.000,00	0,00	0,00
		5.238.617.923,00	1.051.880.999,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	940.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		929.550.338,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	760.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		750.086.138,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.01.08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	180.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.464.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.450.860.300,00	1.070.000.000,00	0,00	0,00
		3.266.188.963,00	1.051.880.999,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.03.2.02.13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	32.224.500,00	0,00	0,00	0,00
		29.194.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	436.114.500,00	1.070.000.000,00	0,00	0,00
		416.790.254,00	1.051.880.999,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	120.839.300,00	0,00	0,00	0,00
		116.264.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	411.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		408.407.635,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.775.072.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.622.881.227,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	84.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.329.847,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	590.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		590.321.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	637.826.400,00	0,00	0,00	0,00
		509.547.787,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	111.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.551.604,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	419.058.400,00	0,00	0,00	0,00
		383.931.183,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	107.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.065.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	567.901.500,00	0,00	0,00	0,00
		533.330.835,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	37.745.200,00	0,00	0,00	0,00
		32.693.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	282.677.500,00	0,00	0,00	0,00
		279.198.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	141.315.400,00	0,00	0,00	0,00
		138.467.035,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	70.448.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.128.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.04.15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	35.714.900,00	0,00	0,00	0,00
		22.844.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	1.746.966.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.581.219.235,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.071.201.500,00	0,00	0,00	0,00
		941.973.405,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.004.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		902.180.572,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.792.833,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	675.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		639.245.830,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35.195.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.597.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	640.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		606.648.830,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**SOSIAL**	28.668.174.300,00	902.597.800,00	0,00	0,00
		23.992.628.716,00	793.414.200,00	0,00	0,00
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.713.958.300,00	715.966.800,00	0,00	0,00
		8.610.714.669,00	633.221.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	447.714.500,00	0,00	0,00	0,00
		420.962.363,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.601.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.865.245,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.757.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.970.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	305.356.500,00	0,00	0,00	0,00
		296.126.618,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.091.157.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.457.491.101,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.970.417.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.364.251.993,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.039.108,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.028.600,00	0,00	0,00	0,00
		87.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.028.600,00	0,00	0,00	0,00
		57.600.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	843.365.800,00	175.385.500,00	0,00	0,00
		796.035.864,00	119.047.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.124.700,00	0,00	0,00	0,00
		19.082.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.377.500,00	175.385.500,00	0,00	0,00
		88.586.400,00	119.047.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.389.200,00	0,00	0,00	0,00
		17.661.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.150.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.365.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.323.600,00	0,00	0,00	0,00
		666.340.764,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	540.581.300,00	0,00	0,00
		0,00	514.174.000,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	476.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	465.722.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	64.381.300,00	0,00	0,00
		0,00	48.451.500,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.969.600,00	0,00	0,00	0,00
		541.953.394,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.386.200,00	0,00	0,00	0,00
		106.755.935,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.583.400,00	0,00	0,00	0,00
		435.197.459,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.722.200,00	0,00	0,00	0,00
		306.671.947,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.616.400,00	0,00	0,00	0,00
		73.982.777,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.105.800,00	0,00	0,00	0,00
		232.689.170,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	5.932.289.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.902.262.898,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	153.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.882.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	128.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.162.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.607.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.607.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5.758.899.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.734.773.698,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74.036.500,00	0,00	0,00	0,00
		73.966.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.451.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	266.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		259.894.198,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.302.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.292.462.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	2.746.417.600,00	186.631.000,00	0,00	0,00
		2.261.773.896,00	160.192.700,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.746.417.600,00	186.631.000,00	0,00	0,00
		2.261.773.896,00	160.192.700,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.330.396.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.326.281.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	448.326.000,00	0,00	0,00	0,00
		228.080.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	250.471.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.226.632,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	177.602.600,00	0,00	0,00	0,00
		137.173.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	401.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		290.004.253,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.645.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	88.076.200,00	186.631.000,00	0,00	0,00
		50.177.411,00	160.192.700,00	0,00	0,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	7.356.484.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.415.282.924,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.356.484.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.415.282.924,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.265.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.143.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.118.685.785,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.282.234.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.459.908.589,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	919.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		830.423.550,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	797.954.900,00	0,00	0,00	0,00
		698.434.329,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	288.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		279.051.831,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	288.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		279.051.831,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	509.649.900,00	0,00	0,00	0,00
		419.382.498,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	509.649.900,00	0,00	0,00	0,00
		419.382.498,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	121.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	121.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	121.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	347.983.679.847,00	143.202.553.140,00	0,00	0,00
		315.849.240.654,00	137.386.642.539,92	0,00	0,00
2.07	**TENAGA KERJA**	64.864.209.970,00	1.446.724.740,00	0,00	0,00
		61.974.795.296,00	1.411.775.150,00	0,00	0,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	222.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		219.026.201,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	222.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		219.026.201,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	58.537.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.867.101,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	163.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.159.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	48.538.278.970,00	1.421.724.740,00	0,00	0,00
		47.552.171.333,00	1.387.355.150,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	47.119.614.570,00	1.421.724.740,00	0,00	0,00
		46.260.191.604,00	1.387.355.150,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	43.445.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.348.068.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	550.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.624.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	223.768.928,00	1.280.502.740,00	0,00	0,00
		219.340.120,00	1.246.820.150,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.04	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.899.495.642,00	141.222.000,00	0,00	0,00
		2.205.158.384,00	140.535.000,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	790.829.600,00	0,00	0,00	0,00
		695.047.810,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	790.829.600,00	0,00	0,00	0,00
		695.047.810,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	211.253.800,00	0,00	0,00	0,00
		199.784.159,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	211.253.800,00	0,00	0,00	0,00
		199.784.159,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	416.581.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.147.760,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	416.581.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.147.760,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	1.078.758.700,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		992.034.264,00	24.420.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	919.669.500,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		854.818.566,00	24.420.000,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	208.797.500,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		157.451.100,00	24.420.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	118.478.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.212.869,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	40.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.667.080,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	551.518.000,00	0,00	0,00	0,00
		550.487.517,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	5.427.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	129.118.200,00	0,00	0,00	0,00
		111.270.698,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	68.143.500,00	0,00	0,00	0,00
		67.443.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	60.974.700,00	0,00	0,00	0,00
		43.827.498,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	24.544.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.544.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	15.024.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		13.211.563.498,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	232.458.400,00	0,00	0,00	0,00
		175.645.074,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	64.664.300,00	0,00	0,00	0,00
		57.005.974,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	167.794.100,00	0,00	0,00	0,00
		118.639.100,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	14.792.541.400,00	0,00	0,00	0,00
		13.035.918.424,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.724.400,00	0,00	0,00	0,00
		303.386.822,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.961.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	255.542.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.667.200,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14.207.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.492.903.002,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	16.822.113.443,00	1.292.126.300,00	0,00	0,00
		15.535.173.138,00	1.159.646.250,00	0,00	0,00
2.08.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.341.128.443,00	1.267.226.100,00	0,00	0,00
		12.584.597.603,00	1.136.646.250,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	397.599.800,00	0,00	0,00	0,00
		397.011.759,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	198.641.300,00	0,00	0,00	0,00
		198.616.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198.958.500,00	0,00	0,00	0,00
		198.394.859,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.102.266.543,00	0,00	0,00	0,00
		9.438.076.023,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.720.254.543,00	0,00	0,00	0,00
		9.058.979.622,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	191.456.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.592.071,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	190.556.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.504.330,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	391.131.000,00	0,00	0,00	0,00
		383.012.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	191.131.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.063.750,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		199.949.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.207.317.700,00	658.586.100,00	0,00	0,00
		1.188.414.954,00	635.233.250,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.235.100,00	0,00	0,00	0,00
		155.647.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.248.700,00	658.586.100,00	0,00	0,00
		72.930.000,00	635.233.250,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.915.700,00	0,00	0,00	0,00
		77.648.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.434.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	877.483.400,00	0,00	0,00	0,00
		875.968.954,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	608.640.000,00	0,00	0,00
		0,00	501.413.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	608.640.000,00	0,00	0,00
		0,00	501.413.000,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.851.800,00	0,00	0,00	0,00
		655.775.459,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.613.413,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.051.800,00	0,00	0,00	0,00
		523.162.046,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.961.600,00	0,00	0,00	0,00
		522.306.658,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.082.400,00	0,00	0,00	0,00
		164.463.658,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.879.400,00	0,00	0,00	0,00
		210.523.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		147.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	1.889.783.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.351.243.774,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	203.425.100,00	0,00	0,00	0,00
		195.295.414,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	81.777.100,00	0,00	0,00	0,00
		76.303.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	121.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.992.214,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.686.358.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.155.948.360,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	136.358.600,00	0,00	0,00	0,00
		128.399.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.027.548.560,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	241.453.000,00	10.569.600,00	0,00	0,00
		222.918.648,00	8.700.000,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	201.353.000,00	10.569.600,00	0,00	0,00
		189.110.867,00	8.700.000,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	201.353.000,00	10.569.600,00	0,00	0,00
		189.110.867,00	8.700.000,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.807.781,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.807.781,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	391.553.000,00	0,00	0,00	0,00
		386.782.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.946.700,00	0,00	0,00	0,00
		150.808.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	152.946.700,00	0,00	0,00	0,00
		150.808.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.606.300,00	0,00	0,00	0,00
		235.974.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.606.300,00	0,00	0,00	0,00
		235.974.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	111.734.200,00	0,00	0,00	0,00
		98.710.910,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		111.734.200,00	0,00	0,00	0,00
			98.710.910,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		61.365.000,00	0,00	0,00	0,00
			61.098.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		50.369.200,00	0,00	0,00	0,00
			37.612.210,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		584.252.600,00	14.330.600,00	0,00	0,00
			563.920.026,00	14.300.000,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		313.326.100,00	0,00	0,00	0,00
			302.188.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		271.221.100,00	0,00	0,00	0,00
			262.146.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		42.105.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.042.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		270.926.500,00	14.330.600,00	0,00	0,00
			261.732.026,00	14.300.000,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		80.825.600,00	0,00	0,00	0,00
			78.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		63.395.800,00	0,00	0,00	0,00
			61.506.226,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		91.826.500,00	7.165.300,00	0,00	0,00
			87.292.800,00	7.150.000,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34.878.600,00	7.165.300,00	0,00	0,00
			34.108.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		262.208.500,00	0,00	0,00	0,00
			245.659.277,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		65.035.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.361.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		65.035.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.361.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		103.481.500,00	0,00	0,00	0,00
			94.378.277,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		103.481.500,00	0,00	0,00	0,00
			94.378.277,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		93.692.000,00	0,00	0,00	0,00
			88.919.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		93.692.000,00	0,00	0,00	0,00
			88.919.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**PANGAN**		46.456.551.886,00	6.428.027.100,00	0,00	0,00
			40.740.373.847,00	4.885.705.320,00	0,00	0,00
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		36.582.711.678,00	5.991.147.100,00	0,00	0,00
			31.044.585.855,00	4.457.818.820,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.020.608.000,00	0,00	0,00	0,00
			577.274.658,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		619.791.000,00	0,00	0,00	0,00
			489.325.958,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		10.335.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12.865.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.952.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		6.790.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.013.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		54.473.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.439.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.114.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		293.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.369.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.124.287.566,00	0,00	0,00	0,00
		23.561.297.383,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.684.041.066,00	0,00	0,00	0,00
		23.128.333.751,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	422.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		417.228.632,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.974.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.710.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.502.500,00	0,00	0,00	0,00
		7.025.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.016.855.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.906.127.076,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	321.220.500,00	0,00	0,00	0,00
		257.171.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.695.635.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.648.955.576,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.022.122.400,00	1.509.439.300,00	0,00	0,00
		867.201.531,00	1.437.531.450,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	137.502.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.866.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.851.800,00	942.733.400,00	0,00	0,00
		9.901.200,00	874.387.100,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.967.600,00	566.705.900,00	0,00	0,00
		61.861.000,00	563.144.350,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.443.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		673.969.731,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.601.000,00	4.481.707.800,00	0,00	0,00
		2.100.000,00	3.020.287.370,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	256.461.000,00	0,00	0,00
		0,00	254.067.500,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	2.101.000,00	327.142.000,00	0,00	0,00
		2.100.000,00	325.092.220,00	0,00	0,00
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	217.821.600,00	0,00	0,00
		0,00	213.185.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.500.000,00	3.680.283.200,00	0,00	0,00
		0,00	2.227.942.650,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.880.414.412,00	0,00	0,00	0,00
		2.785.278.432,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.675.500,00	0,00	0,00	0,00
		451.191.329,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.364.288.912,00	0,00	0,00	0,00
		2.327.837.103,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.822.800,00	0,00	0,00	0,00
		345.306.775,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.700.900,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.942.800,00	0,00	0,00	0,00
		106.605.875,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	2.495.235.508,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		2.426.920.992,00	4.967.000,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.495.235.508,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		2.426.920.992,00	4.967.000,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.254.637.008,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		2.186.579.749,00	4.967.000,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	240.598.500,00	0,00	0,00	0,00
		240.341.243,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	6.466.240.400,00	424.880.000,00	0,00	0,00
		6.376.729.484,00	422.919.500,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.591.569.400,00	424.880.000,00	0,00	0,00
		4.564.573.231,00	422.919.500,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	629.132.400,00	226.000.000,00	0,00	0,00
		628.562.700,00	224.923.750,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.516.264.500,00	198.880.000,00	0,00	0,00
		1.514.233.454,00	197.995.750,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1.810.021.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.802.845.601,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	239.886.000,00	0,00	0,00	0,00
		239.411.233,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	4.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.565.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	104.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	210.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.815.243,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	73.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	865.782.000,00	0,00	0,00	0,00
		818.520.680,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	87.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.598.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	702.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		655.579.080,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	76.052.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.343.600,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	324.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.154.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	324.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		324.154.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	684.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		669.481.273,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	681.569.000,00	0,00	0,00	0,00
		666.836.273,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	630.219.100,00	0,00	0,00	0,00
		615.295.610,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	187.729.500,00	0,00	0,00	0,00
		187.169.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	187.729.500,00	0,00	0,00	0,00
		187.169.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	442.489.600,00	0,00	0,00	0,00
		428.126.110,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168.992.900,00	0,00	0,00	0,00
		156.651.132,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	261.411.700,00	0,00	0,00	0,00
		259.449.978,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	12.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.025.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	282.145.200,00	0,00	0,00	0,00
		276.841.906,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	282.145.200,00	0,00	0,00	0,00
		276.841.906,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.958.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	262.732.200,00	0,00	0,00	0,00
		257.797.500,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	15.455.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.086.406,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**PERTANAHAN**	15.385.284.330,00	4.322.486.150,00	0,00	0,00
		13.530.964.767,00	3.811.356.999,00	0,00	0,00
2.10.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.702.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.702.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.702.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	14.160.444.230,00	4.137.110.950,00	0,00	0,00
		12.879.206.845,00	3.800.891.999,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.119.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.673.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.379.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.829.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.844.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.414.905.920,00	8.900.000,00	0,00	0,00
		9.675.483.574,00	8.900.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.339.365.920,00	0,00	0,00	0,00
		9.604.229.574,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.655.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.100.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
		31.599.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.041.527.300,00	781.298.800,00	0,00	0,00
		2.004.486.137,00	675.449.500,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176.572.700,00	0,00	0,00	0,00
		167.411.620,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.160.000,00	781.298.800,00	0,00	0,00
		251.513.679,00	675.449.500,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.849.600,00	0,00	0,00	0,00
		15.105.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.532.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.605.338,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.376.800,00	2.445.075.600,00	0,00	0,00
		88.289.400,00	2.336.402.599,00	0,00	0,00
2.10.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	651.964.000,00	0,00	0,00
		0,00	625.500.000,00	0,00	0,00
2.10.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	1.146.498.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.076.380.660,00	0,00	0,00
2.10.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.376.800,00	646.613.600,00	0,00	0,00
		88.289.400,00	634.521.939,00	0,00	0,00
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.860.410,00	0,00	0,00	0,00
		629.222.174,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.115.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.868.900,00	0,00	0,00	0,00
		123.305.657,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.998.400,00	0,00	0,00	0,00
		37.622.150,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.293.110,00	0,00	0,00	0,00
		441.179.367,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.104.800,00	901.836.550,00	0,00	0,00
		335.832.560,00	780.139.900,00	0,00	0,00
2.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.943.200,00	0,00	0,00	0,00
		275.832.560,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.161.600,00	901.836.550,00	0,00	0,00
		60.000.000,00	780.139.900,00	0,00	0,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	107.190.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		13.128.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.190.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		13.128.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.2.01.07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.190.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		13.128.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	10.000.300,00	0,00	0,00	0,00
		8.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.300,00	0,00	0,00	0,00
		8.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.300,00	0,00	0,00	0,00
		8.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	388.569.500,00	135.375.200,00	0,00	0,00
		199.981.300,00	10.465.000,00	0,00	0,00
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	388.569.500,00	135.375.200,00	0,00	0,00
		199.981.300,00	10.465.000,00	0,00	0,00
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	388.569.500,00	135.375.200,00	0,00	0,00
		199.981.300,00	10.465.000,00	0,00	0,00
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	719.079.700,00	0,00	0,00	0,00
		397.882.622,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	719.079.700,00	0,00	0,00	0,00
		397.882.622,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	719.079.700,00	0,00	0,00	0,00
		397.882.622,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	19.054.962.980,00	8.164.446.570,00	0,00	0,00
		16.094.217.240,00	6.722.819.269,00	0,00	0,00
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.731.665.500,00	10.922.000,00	0,00	0,00
		1.154.689.900,00	10.800.000,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	734.807.700,00	2.114.000,00	0,00	0,00
		640.803.100,00	2.050.000,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	136.773.600,00	2.114.000,00	0,00	0,00
		122.907.600,00	2.050.000,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	598.034.100,00	0,00	0,00	0,00
		517.895.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	996.857.800,00	8.808.000,00	0,00	0,00
		513.886.800,00	8.750.000,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	59.757.800,00	0,00	0,00	0,00
		46.424.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	937.100.000,00	8.808.000,00	0,00	0,00
		467.462.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.778.901.500,00	627.866.950,00	0,00	0,00
		1.563.186.483,00	403.356.051,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.204.179.000,00	627.866.950,00	0,00	0,00
		1.015.821.983,00	403.356.051,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.05	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	89.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.909.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.203.800,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.10	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	315.368.700,00	0,00	0,00	0,00
		237.469.950,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.449.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	627.310.300,00	627.866.950,00	0,00	0,00
		571.789.733,00	403.356.051,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	574.722.500,00	0,00	0,00	0,00
		547.364.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.13	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	574.722.500,00	0,00	0,00	0,00
		547.364.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	5.556.048.600,00	6.402.311.600,00	0,00	0,00
		3.917.576.859,00	5.273.301.066,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.556.048.600,00	6.402.311.600,00	0,00	0,00
		3.917.576.859,00	5.273.301.066,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	1.052.772.100,00	1.926.883.400,00	0,00	0,00
		674.693.625,00	1.645.451.313,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.503.276.500,00	4.475.428.200,00	0,00	0,00
		3.242.883.234,00	3.627.849.753,00	0,00	0,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	185.579.650,00	113.535.520,00	0,00	0,00
		155.162.000,00	109.050.000,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	185.579.650,00	113.535.520,00	0,00	0,00
		155.162.000,00	109.050.000,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	83.579.800,00	4.110.400,00	0,00	0,00
		73.221.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	101.999.850,00	109.425.120,00	0,00	0,00
		81.941.000,00	105.050.000,00	0,00	0,00
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	22.502.400,00	0,00	0,00	0,00
		16.155.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	22.502.400,00	0,00	0,00	0,00
		16.155.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	22.502.400,00	0,00	0,00	0,00
		16.155.700,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	87.178.500,00	0,00	0,00	0,00
		78.283.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.178.500,00	0,00	0,00	0,00
		78.283.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87.178.500,00	0,00	0,00	0,00
		78.283.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	50.898.800,00	4.450.000,00	0,00	0,00
		49.469.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.898.800,00	4.450.000,00	0,00	0,00
		49.469.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	50.898.800,00	4.450.000,00	0,00	0,00
		49.469.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	9.602.088.030,00	1.005.360.500,00	0,00	0,00
		9.133.094.298,00	923.312.152,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	9.602.088.030,00	1.005.360.500,00	0,00	0,00
		9.133.094.298,00	923.312.152,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	1.153.069.230,00	928.797.100,00	0,00	0,00
		1.102.275.147,00	855.553.652,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	1.295.846.400,00	40.672.900,00	0,00	0,00
		1.188.960.850,00	34.181.000,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7.153.172.400,00	35.890.500,00	0,00	0,00
		6.841.858.301,00	33.577.500,00	0,00	0,00
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	11.222.897.284,00	907.593.460,00	0,00	0,00
		9.492.630.168,00	817.847.736,00	0,00	0,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	8.977.206.584,00	816.306.560,00	0,00	0,00
		7.502.435.572,00	735.292.236,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.733.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.283.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.208.566.184,00	0,00	0,00	0,00
		5.892.425.639,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.123.164.224,00	0,00	0,00	0,00
		5.888.219.141,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.401.960,00	0,00	0,00	0,00
		4.206.498,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.626.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.124.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.986.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.894.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.214.900,00	17.718.800,00	0,00	0,00
		618.336.655,00	16.479.001,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.019.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.574.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.264.200,00	17.718.800,00	0,00	0,00
		13.910.000,00	16.479.001,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.788.900,00	0,00	0,00	0,00
		27.615.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.142.000,00	0,00	0,00	0,00
		570.236.355,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	93.240.000,00	0,00	0,00
		0,00	76.235.001,00	0,00	0,00
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	93.240.000,00	0,00	0,00
		0,00	76.235.001,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.239.350,00	0,00	0,00	0,00
		155.598.278,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.070.150,00	0,00	0,00	0,00
		119.612.082,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.169.200,00	0,00	0,00	0,00
		35.986.196,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.670.150,00	705.347.760,00	0,00	0,00
		638.217.100,00	642.578.234,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.059.350,00	0,00	0,00	0,00
		232.306.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380.760.800,00	705.347.760,00	0,00	0,00
		377.710.800,00	642.578.234,00	0,00	0,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	786.436.500,00	0,00	0,00	0,00
		741.641.713,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	786.436.500,00	0,00	0,00	0,00
		741.641.713,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	690.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		648.606.713,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.312.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48.438.500,00	0,00	0,00	0,00
		47.515.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	586.032.300,00	14.092.800,00	0,00	0,00
		557.207.455,00	14.000.000,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	529.221.800,00	14.092.800,00	0,00	0,00
		510.757.455,00	14.000.000,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	109.753.100,00	14.092.800,00	0,00	0,00
		99.465.500,00	14.000.000,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	419.468.700,00	0,00	0,00	0,00
		411.291.955,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	56.810.500,00	0,00	0,00	0,00
		46.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	56.810.500,00	0,00	0,00	0,00
		46.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	845.449.400,00	77.194.100,00	0,00	0,00
		672.050.294,00	68.555.500,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	283.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		244.047.083,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	94.882.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.603.083,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	188.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.444.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	407.441.400,00	77.194.100,00	0,00	0,00
		326.423.334,00	68.555.500,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.150.400,00	77.194.100,00	0,00	0,00
		107.817.142,00	68.555.500,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	282.291.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.606.192,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.646.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.579.877,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.379.815,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.200.062,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	27.772.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.295.134,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	27.772.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.295.134,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	27.772.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.295.134,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	19.013.113.940,00	75.623.397.300,00	0,00	0,00
		17.858.739.724,00	75.501.094.739,00	0,00	0,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	223.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.474.648,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	223.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.474.648,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	223.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.474.648,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	1.687.244.500,00	74.938.547.600,00	0,00	0,00
		1.648.786.045,00	74.828.908.170,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.687.244.500,00	74.938.547.600,00	0,00	0,00
		1.648.786.045,00	74.828.908.170,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.687.244.500,00	74.938.547.600,00	0,00	0,00
		1.648.786.045,00	74.828.908.170,00	0,00	0,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	12.064.688.040,00	0,00	0,00	0,00
		11.062.997.919,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.064.688.040,00	0,00	0,00	0,00
		11.062.997.919,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.849.848.240,00	0,00	0,00	0,00
		1.778.886.356,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1.101.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.086.006.200,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.637.717.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.588.361.306,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.851.876.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.127.271.438,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	550.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		544.380.819,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	52.897.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.490.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	599.551.000,00	0,00	0,00	0,00
		574.071.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	287.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		224.358.460,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	132.583.300,00	0,00	0,00	0,00
		89.171.540,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	5.038.117.400,00	684.849.700,00	0,00	0,00
		4.985.481.112,00	672.186.569,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.038.117.400,00	684.849.700,00	0,00	0,00
		4.985.481.112,00	672.186.569,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.312.294.700,00	684.849.700,00	0,00	0,00
		1.305.091.291,00	672.186.569,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.143.791.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.127.039.641,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	131.962.700,00	0,00	0,00	0,00
		119.978.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.450.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.433.372.180,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	12.253.921.800,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		11.937.824.934,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	8.049.672.800,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		7.796.610.629,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	974.107.800,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		938.510.529,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	166.648.400,00	0,00	0,00	0,00
		158.199.851,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	400.973.900,00	130.000.000,00	0,00	0,00
		392.347.078,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	200.177.300,00	0,00	0,00	0,00
		194.337.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	206.308.200,00	0,00	0,00	0,00
		193.626.100,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.075.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.858.100.100,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2.784.588.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.762.423.180,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	324.891.700,00	0,00	0,00	0,00
		311.282.339,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	3.966.084.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.784.394.581,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.134.721.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.939.292,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	606.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		587.929.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	507.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		489.924.200,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	99.195.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	528.276.200,00	0,00	0,00	0,00
		519.010.092,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.109.200,00	0,00	0,00	0,00
		28.395.964,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	279.718.000,00	0,00	0,00	0,00
		274.979.428,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	216.449.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.634.700,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	3.069.527.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.034.275.013,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	186.043.100,00	0,00	0,00	0,00
		175.917.400,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.195.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	21.157.600,00	0,00	0,00	0,00
		13.616.900,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	112.885.500,00	0,00	0,00	0,00
		112.105.500,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.883.484.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.858.357.613,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.767.475.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.748.465.713,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	116.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.891.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**PERHUBUNGAN**	29.382.788.961,00	31.841.190.220,00	0,00	0,00
		27.565.038.594,00	31.523.954.692,00	0,00	0,00
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.499.702.867,00	2.195.882.700,00	0,00	0,00
		10.760.006.337,00	2.026.891.232,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.037.500,00	0,00	0,00	0,00
		132.837.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.307.500,00	0,00	0,00	0,00
		130.042.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.629.226.137,00	0,00	0,00	0,00
		7.234.086.160,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.972.137,00	0,00	0,00	0,00
		7.052.950.950,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI — KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.254.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.135.210,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.785.750,00	0,00	0,00	0,00
		138.383.779,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.839.750,00	0,00	0,00	0,00
		30.830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.553.779,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.749.919.150,00	272.853.200,00	0,00	0,00
		1.693.461.255,00	260.749.500,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.085.000,00	816.400,00	0,00	0,00
		9.893.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.071.600,00	272.036.800,00	0,00	0,00
		48.319.999,00	260.749.500,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.771.350,00	0,00	0,00	0,00
		6.625.300,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.973.200,00	0,00	0,00	0,00
		20.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.094.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.625.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.599.608.956,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.355.000.002,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.355.000.002,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.414.330,00	0,00	0,00	0,00
		1.208.595.911,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.283.300,00	0,00	0,00	0,00
		802.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.191.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.014.117,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.940.030,00	0,00	0,00	0,00
		208.781.794,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.320.000,00	423.029.500,00	0,00	0,00
		352.641.732,00	411.141.730,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		257.153.692,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.600.000,00	423.029.500,00	0,00	0,00
		95.488.040,00	411.141.730,00	0,00	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	17.883.086.094,00	29.645.307.520,00	0,00	0,00
		16.805.032.257,00	29.497.063.460,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.509.251.050,00	29.564.235.000,00	0,00	0,00
		9.801.391.961,00	29.473.749.600,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	201.033.000,00	29.564.235.000,00	0,00	0,00
		200.874.546,00	29.473.749.600,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.308.218.050,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.517.415,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	107.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	107.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	616.080.200,00	0,00	0,00	0,00
		598.549.424,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	616.080.200,00	0,00	0,00	0,00
		598.549.424,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	312.351.050,00	20.674.040,00	0,00	0,00
		262.772.710,00	20.513.860,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	155.611.050,00	0,00	0,00	0,00
		126.697.900,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.615.000,00	20.674.040,00	0,00	0,00
		107.474.810,00	20.513.860,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.374.220.694,00	10.398.480,00	0,00	0,00
		5.277.566.450,00	2.800.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.888.328.250,00	10.398.480,00	0,00	0,00
		4.802.311.450,00	2.800.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	485.892.444,00	0,00	0,00	0,00
		475.255.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	29.964.800,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	5.964.800,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	933.368.300,00	0,00	0,00	0,00
		757.201.712,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	933.368.300,00	0,00	0,00	0,00
		757.201.712,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	25.385.271.097,00	3.080.272.600,00	0,00	0,00
		23.547.789.252,00	2.993.596.455,00	0,00	0,00
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9.323.810.845,00	901.272.600,00	0,00	0,00
		8.191.033.259,00	839.754.093,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.228.700,00	0,00	0,00	0,00
		57.228.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.536.800,00	0,00	0,00	0,00
		46.536.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.691.900,00	0,00	0,00	0,00
		10.691.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.775.347.661,00	0,00	0,00	0,00
		5.913.152.691,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.775.347.661,00	0,00	0,00	0,00
		5.913.152.691,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		189.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	908.076.200,00	317.530.400,00	0,00	0,00
		907.302.053,00	287.545.197,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.692.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.619.200,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.697.000,00	317.530.400,00	0,00	0,00
		8.611.200,00	287.545.197,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.877.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.372.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	851.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.859.653,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.861.000,00	583.742.200,00	0,00	0,00
		74.346.789,00	552.208.896,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.861.000,00	583.742.200,00	0,00	0,00
		74.346.789,00	552.208.896,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.851.584,00	0,00	0,00	0,00
		770.071.757,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.403.412,00	0,00	0,00	0,00
		189.872.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.393.000,00	0,00	0,00	0,00
		116.478.840,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.055.172,00	0,00	0,00	0,00
		463.720.417,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.669.700,00	0,00	0,00	0,00
		279.031.469,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.669.700,00	0,00	0,00	0,00
		279.031.469,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	11.104.025.400,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		10.735.511.628,00	13.000.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.104.025.400,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		10.735.511.628,00	13.000.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	8.671.924.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.331.592.411,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	425.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		419.806.294,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	696.935.500,00	0,00	0,00	0,00
		692.049.085,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	673.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		665.720.991,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	317.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		315.122.864,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	318.570.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
		311.219.983,00	13.000.000,00	0,00	0,00
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	4.957.434.852,00	2.166.000.000,00	0,00	0,00
		4.621.244.365,00	2.140.842.362,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.957.434.852,00	2.166.000.000,00	0,00	0,00
		4.621.244.365,00	2.140.842.362,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.091.094.852,00	2.166.000.000,00	0,00	0,00
		3.008.880.265,00	2.140.842.362,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	296.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		296.454.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.569.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.315.910.100,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	17.013.469.688,00	826.799.000,00	0,00	0,00
		14.397.943.926,00	717.891.527,92	0,00	0,00
2.17.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.002.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.002.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.002.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.476.113.438,00	672.639.000,00	0,00	0,00
		10.801.955.865,00	663.707.407,92	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.303.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.623.592,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.759.716,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.203.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.863.876,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.013.798.138,00	0,00	0,00	0,00
		9.019.888.425,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.337.591.430,00	0,00	0,00	0,00
		8.754.530.309,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	676.206.708,00	0,00	0,00	0,00
		265.358.116,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.424.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	148.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.424.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	856.121.100,00	14.350.400,00	0,00	0,00
		841.286.938,00	7.300.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.877.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.221.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.989.100,00	14.350.400,00	0,00	0,00
		76.053.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.210.200,00	0,00	0,00	0,00
		53.908.500,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.443.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.353.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.464.400,00	0,00	0,00	0,00
		664.900.938,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.252.500,00	0,00	0,00	0,00
		478.913.128,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.475.800,00	0,00	0,00	0,00
		269.661.320,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.776.700,00	0,00	0,00	0,00
		209.251.808,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.678.700,00	658.288.600,00	0,00	0,00
		264.819.382,00	656.407.407,92	0,00	0,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.117.322,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.328.878,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.953.500,00	431.022.600,00	0,00	0,00
		0,00	429.823.256,89	0,00	0,00
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	428.575.200,00	227.266.000,00	0,00	0,00
		180.303.182,00	226.584.151,03	0,00	0,00
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	478.297.400,00	0,00	0,00	0,00
		470.123.883,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	478.297.400,00	0,00	0,00	0,00
		470.123.883,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	478.297.400,00	0,00	0,00	0,00
		470.123.883,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	131.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.736.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	131.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.736.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	131.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.736.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	2.437.793.850,00	154.160.000,00	0,00	0,00
		2.378.923.514,00	54.184.120,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.437.793.850,00	154.160.000,00	0,00	0,00
		2.378.923.514,00	54.184.120,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	430.414.400,00	0,00	0,00	0,00
		414.802.900,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.600.671.750,00	154.160.000,00	0,00	0,00
		1.598.786.359,00	54.184.120,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	406.707.700,00	0,00	0,00	0,00
		365.334.255,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	489.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		466.201.764,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	489.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		466.201.764,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	489.535.000,00	0,00	0,00	0,00
		466.201.764,00	0,00	0,00	0,00
2.18	**PENANAMAN MODAL**	10.308.312.171,00	3.061.293.700,00	0,00	0,00
		9.227.495.827,00	2.754.718.298,00	0,00	0,00
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	7.508.915.971,00	426.657.500,00	0,00	0,00
		6.919.194.527,00	403.023.001,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		292.101.060,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.303.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.610.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.838.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.707.849,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.179.522,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	108.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.603.189,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.545.858.871,00	0,00	0,00	0,00
		5.023.613.798,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.139.001.807,00	0,00	0,00	0,00
		4.689.253.446,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	364.110.064,00	0,00	0,00	0,00
		294.074.465,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28.687.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.642.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.060.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.643.687,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.009.500,00	0,00	0,00	0,00
		256.829.125,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	184.676.500,00	0,00	0,00	0,00
		182.113.125,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.333.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.716.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.518.100,00	0,00	0,00	0,00
		500.699.032,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.345.500,00	0,00	0,00	0,00
		44.964.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.013.700,00	0,00	0,00	0,00
		62.857.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.118.400,00	0,00	0,00	0,00
		9.580.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.040.500,00	0,00	0,00	0,00
		383.297.132,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	426.657.500,00	0,00	0,00
		0,00	403.023.001,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	149.396.000,00	0,00	0,00
		0,00	141.186.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.675.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	262.261.500,00	0,00	0,00
		0,00	247.162.001,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.822.400,00	0,00	0,00	0,00
		451.273.310,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		219.138.710,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.957.400,00	0,00	0,00	0,00
		232.134.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.076.100,00	0,00	0,00	0,00
		394.678.202,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.686.900,00	0,00	0,00	0,00
		316.723.202,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.389.200,00	0,00	0,00	0,00
		77.955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	244.270.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		214.360.278,00	74.600.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.956.852,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.333.152,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	26.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.623.700,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	177.040.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		153.403.426,00	74.600.000,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	121.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		113.615.901,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	30.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.664.725,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	25.180.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		15.122.800,00	74.600.000,00	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	542.993.500,00	0,00	0,00	0,00
		517.163.864,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	542.993.500,00	0,00	0,00	0,00
		517.163.864,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	255.214.300,00	0,00	0,00	0,00
		244.862.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	287.779.200,00	0,00	0,00	0,00
		272.301.864,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	1.348.456.700,00	2.559.636.200,00	0,00	0,00
		1.132.462.228,00	2.277.095.297,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.348.456.700,00	2.559.636.200,00	0,00	0,00
		1.132.462.228,00	2.277.095.297,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	994.883.700,00	2.533.636.200,00	0,00	0,00
		785.964.287,00	2.252.095.298,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	112.603.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
		110.686.541,00	24.999.999,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	240.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.811.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	275.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.562.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	275.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		263.562.400,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.463.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	102.547.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.482.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	150.403.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.617.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	388.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.752.530,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	388.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.752.530,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	388.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.752.530,00	0,00	0,00	0,00
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	34.046.566.178,00	2.112.784.700,00	0,00	0,00
		29.010.640.036,00	1.785.495.498,00	0,00	0,00
2.19.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	13.547.189.778,00	2.097.032.200,00	0,00	0,00
		10.791.092.264,00	1.770.355.498,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	810.622.784,00	0,00	0,00	0,00
		557.067.969,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	627.790.384,00	0,00	0,00	0,00
		412.072.618,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.412.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.171.100,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.270.400,00	0,00	0,00	0,00
		95.994.251,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	18.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.170.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.660.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.638.060.044,00	0,00	0,00	0,00
		6.118.232.509,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.451.014.544,00	0,00	0,00	0,00
		5.932.807.609,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.915.500,00	0,00	0,00	0,00
		63.746.800,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.773.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	44.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.904.200,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.575.054.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.354.090.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	174.734.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.253.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.400.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.194.837.300,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.091.200,00	185.319.000,00	0,00	0,00
		532.263.636,00	164.964.499,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.962.800,00	0,00	0,00	0,00
		26.731.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.632.200,00	185.319.000,00	0,00	0,00
		32.066.000,00	164.964.499,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.012.200,00	0,00	0,00	0,00
		42.888.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.870.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		414.708.036,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.447.200,00	1.911.713.200,00	0,00	0,00
		48.799.951,00	1.605.390.999,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	1.714.528.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.565.985.999,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.360.000,00	98.334.800,00	0,00	0,00
		0,00	39.405.000,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.087.200,00	98.850.400,00	0,00	0,00
		48.799.951,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.914.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.730.455.401,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.538.750,00	0,00	0,00	0,00
		149.098.032,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.955.376.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.568.357.369,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.999.700,00	0,00	0,00	0,00
		450.181.898,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.876.500,00	0,00	0,00	0,00
		187.031.898,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	312.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		218.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.727.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	1.741.044.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.720.021.119,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	614.465.900,00	0,00	0,00	0,00
		608.428.659,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	ANGGARAN	164.615.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	164.287.400,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	ANGGARAN	389.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	388.103.059,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	ANGGARAN	60.220.900,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	56.038.200,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.126.578.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.111.592.460,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	ANGGARAN	1.126.578.500,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.111.592.460,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	ANGGARAN	18.414.120.000,00	15.752.500,00	0,00	0,00
		REALISASI	16.157.459.493,00	15.140.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ANGGARAN	7.873.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.164.162.916,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	ANGGARAN	7.870.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.160.942.916,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	ANGGARAN	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	ANGGARAN	1.070.069.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.006.038.892,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	ANGGARAN	1.070.069.600,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.006.038.892,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	ANGGARAN	1.277.485.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.222.707.944,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	ANGGARAN	183.929.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	132.520.660,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	ANGGARAN	1.093.556.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	1.090.187.284,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	ANGGARAN	6.202.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		REALISASI	6.052.569.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	6.202.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.052.569.200,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.990.875.400,00	15.752.500,00	0,00	0,00
		1.711.980.541,00	15.140.000,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.272.720.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.160.475.859,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	718.155.300,00	15.752.500,00	0,00	0,00
		551.504.682,00	15.140.000,00	0,00	0,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	344.212.000,00	0,00	0,00	0,00
		342.067.160,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	344.212.000,00	0,00	0,00	0,00
		342.067.160,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	344.212.000,00	0,00	0,00	0,00
		342.067.160,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**STATISTIK**	312.362.100,00	103.099.600,00	0,00	0,00
		280.798.600,00	96.580.000,00	0,00	0,00
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	312.362.100,00	103.099.600,00	0,00	0,00
		280.798.600,00	96.580.000,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	312.362.100,00	103.099.600,00	0,00	0,00
		280.798.600,00	96.580.000,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.07	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	83.530.400,00	4.450.000,00	0,00	0,00
		72.393.940,00	4.450.000,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	163.905.700,00	0,00	0,00	0,00
		147.946.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	64.926.000,00	98.649.600,00	0,00	0,00
		60.458.660,00	92.130.000,00	0,00	0,00
2.21	**PERSANDIAN**	142.209.300,00	130.626.500,00	0,00	0,00
		138.516.330,00	123.120.000,00	0,00	0,00
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	142.209.300,00	130.626.500,00	0,00	0,00
		138.516.330,00	123.120.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	142.209.300,00	130.626.500,00	0,00	0,00
		138.516.330,00	123.120.000,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	142.209.300,00	130.626.500,00	0,00	0,00
		138.516.330,00	123.120.000,00	0,00	0,00
2.22	**KEBUDAYAAN**	9.039.776.330,00	401.017.400,00	0,00	0,00
		8.564.071.791,00	86.540.450,00	0,00	0,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	677.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		667.880.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	677.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		667.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	677.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		667.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	4.444.975.430,00	80.831.800,00	0,00	0,00
		4.409.921.862,00	79.954.850,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.444.975.430,00	80.831.800,00	0,00	0,00
		4.409.921.862,00	79.954.850,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.233.358.450,00	0,00	0,00	0,00
		2.210.851.702,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.211.616.980,00	80.831.800,00	0,00	0,00
		2.199.070.160,00	79.954.850,00	0,00	0,00
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	2.013.103.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.888.418.121,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.013.103.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.888.418.121,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	1.002.084.500,00	0,00	0,00	0,00
		955.398.296,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	233.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.025.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	778.019.000,00	0,00	0,00	0,00
		712.994.825,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	1.904.092.400,00	320.185.600,00	0,00	0,00
		1.597.851.808,00	6.585.600,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	202.528.800,00	0,00	0,00	0,00
		193.123.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	44.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.975.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	158.518.800,00	0,00	0,00	0,00
		150.148.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.701.563.600,00	320.185.600,00	0,00	0,00
		1.404.728.808,00	6.585.600,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	678.692.800,00	6.585.600,00	0,00	0,00
		413.139.628,00	6.585.600,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	482.209.800,00	313.600.000,00	0,00	0,00
		478.814.283,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	540.661.000,00	0,00	0,00	0,00
		512.774.897,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23	**PERPUSTAKAAN**	15.540.161.689,00	3.330.667.800,00	0,00	0,00
		14.271.221.762,00	2.994.500.156,00	0,00	0,00
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.858.260.439,00	2.430.580.500,00	0,00	0,00
		9.958.604.915,00	2.112.317.953,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.825.200,00	0,00	0,00	0,00
		297.091.863,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	214.435.800,00	0,00	0,00	0,00
		213.342.663,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.105.500,00	0,00	0,00	0,00
		71.604.200,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.807.300,00	0,00	0,00	0,00
		10.745.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.476.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.302.286.039,00	0,00	0,00	0,00
		6.888.714.502,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.102.890.139,00	0,00	0,00	0,00
		6.690.601.602,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	169.482.000,00	0,00	0,00	0,00
		168.943.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.763.900,00	0,00	0,00	0,00
		18.601.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.568.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	477.227.500,00	0,00	0,00	0,00
		453.241.593,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	217.387.500,00	0,00	0,00	0,00
		208.580.015,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	259.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		244.661.578,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.162.700,00	0,00	0,00	0,00
		857.149.185,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.670.200,00	0,00	0,00	0,00
		42.619.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.624.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.089.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	773.453.500,00	0,00	0,00	0,00
		749.905.185,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.534.300,00	610.423.900,00	0,00	0,00
		706.496.981,00	575.768.005,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.071.961,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.270.300,00	610.423.900,00	0,00	0,00
		87.027.400,00	575.768.005,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	526.604.000,00	0,00	0,00	0,00
		466.397.620,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.224.700,00	1.820.156.600,00	0,00	0,00
		755.910.791,00	1.536.549.948,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.539.300,00	0,00	0,00	0,00
		170.660.847,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.685.400,00	1.820.156.600,00	0,00	0,00
		585.249.944,00	1.536.549.948,00	0,00	0,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	4.420.378.750,00	900.087.300,00	0,00	0,00
		4.056.660.847,00	882.182.203,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.598.576.550,00	561.271.300,00	0,00	0,00
		2.546.079.339,00	546.686.500,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	410.973.400,00	0,00	0,00	0,00
		402.700.302,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.218.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.208.118.300,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.099.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.706.600,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	826.807.500,00	150.471.300,00	0,00	0,00
		795.523.600,00	141.025.500,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	127.846.650,00	410.800.000,00	0,00	0,00
		127.030.537,00	405.661.000,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.821.802.200,00	338.816.000,00	0,00	0,00
		1.510.581.508,00	335.495.703,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.268.300,00	0,00	0,00	0,00
		19.650.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.497.848.900,00	338.816.000,00	0,00	0,00
		1.194.026.746,00	335.495.703,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	302.685.000,00	0,00	0,00	0,00
		296.904.762,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	261.522.500,00	0,00	0,00	0,00
		255.956.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	261.522.500,00	0,00	0,00	0,00
		255.956.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	90.238.900,00	0,00	0,00	0,00
		84.766.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	171.283.600,00	0,00	0,00	0,00
		171.189.100,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**KEARSIPAN**	1.739.706.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.681.005.422,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	847.015.500,00	0,00	0,00	0,00
		833.557.728,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	705.333.800,00	0,00	0,00	0,00
		702.364.828,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	419.290.500,00	0,00	0,00	0,00
		417.769.278,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	154.872.500,00	0,00	0,00	0,00
		153.836.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	131.170.800,00	0,00	0,00	0,00
		130.759.300,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.945.700,00	0,00	0,00	0,00
		34.204.900,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	17.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.544.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	18.295.700,00	0,00	0,00	0,00
		16.660.300,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	105.736.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.988.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	33.681.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.150.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	72.055.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.838.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	857.194.800,00	0,00	0,00	0,00
		812.185.094,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	442.893.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.651.939,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.01.04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	442.893.000,00	0,00	0,00	0,00
		429.651.939,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	318.460.800,00	0,00	0,00	0,00
		287.877.835,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	222.150.800,00	0,00	0,00	0,00
		200.866.995,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	96.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.010.840,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	95.841.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.655.320,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	95.841.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.655.320,00	0,00	0,00	0,00
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	35.496.400,00	0,00	0,00	0,00
		35.262.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota	35.496.400,00	0,00	0,00	0,00
		35.262.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24.04.2.01.03	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	35.496.400,00	0,00	0,00	0,00
		35.262.600,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	282.769.284.063,00	9.444.823.928,00	0,00	0,00
		257.953.380.462,98	4.436.188.921,06	0,00	0,00
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	59.332.884.575,00	0,00	0,00	0,00
		58.060.497.979,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	1.118.470.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.051.266.467,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.118.470.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.051.266.467,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	76.870.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.820.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.041.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		990.445.967,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	56.406.287.675,00	0,00	0,00	0,00
		55.280.994.573,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	786.473.300,00	0,00	0,00	0,00
		730.398.089,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	153.150.500,00	0,00	0,00	0,00
		136.648.995,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	633.322.800,00	0,00	0,00	0,00
		593.749.094,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	55.619.814.375,00	0,00	0,00	0,00
		54.550.596.484,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.560.234.375,00	0,00	0,00	0,00
		54.508.481.484,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	484.838.300,00	0,00	0,00	0,00
		412.637.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	484.838.300,00	0,00	0,00	0,00
		412.637.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01.09	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	484.838.300,00	0,00	0,00	0,00
		412.637.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	1.323.288.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.315.599.439,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31.557.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.332.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	31.557.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.332.500,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.291.730.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.284.266.939,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	809.585.200,00	0,00	0,00	0,00
		806.247.053,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	482.145.400,00	0,00	0,00	0,00
		478.019.886,00	0,00	0,00	0,00
3.26	**PARIWISATA**	5.249.302.800,00	1.490.527.618,00	0,00	0,00
		4.374.593.797,00	1.472.245.190,00	0,00	0,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	1.410.684.900,00	1.490.527.618,00	0,00	0,00
		1.371.779.164,00	1.472.245.190,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.410.684.900,00	1.490.527.618,00	0,00	0,00
		1.371.779.164,00	1.472.245.190,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	338.127.700,00	1.490.527.618,00	0,00	0,00
		336.910.065,00	1.472.245.190,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	599.172.500,00	0,00	0,00	0,00
		563.060.602,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	473.384.700,00	0,00	0,00	0,00
		471.808.497,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	2.408.263.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.381.341.933,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.408.263.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.381.341.933,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.108.473.300,00	0,00	0,00	0,00
		2.089.515.543,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	299.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.826.390,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	1.430.354.600,00	0,00	0,00	0,00
		621.472.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.430.354.600,00	0,00	0,00	0,00
		621.472.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.010.656.300,00	0,00	0,00	0,00
		204.755.700,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	419.698.300,00	0,00	0,00	0,00
		416.717.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27	**PERTANIAN**	199.129.504.550,00	6.897.399.610,00	0,00	0,00
		178.809.790.120,61	1.941.898.611,00	0,00	0,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	68.396.547.400,00	664.191.600,00	0,00	0,00
		58.869.855.597,00	607.404.731,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	59.696.261.200,00	276.455.200,00	0,00	0,00
		52.520.753.908,00	272.952.681,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	59.179.241.900,00	0,00	0,00	0,00
		52.043.194.668,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.03	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	457.289.300,00	276.455.200,00	0,00	0,00
		419.579.240,00	272.952.681,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.06	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	26.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.810.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.850.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.700.286.200,00	387.736.400,00	0,00	0,00
		6.349.101.689,00	334.452.050,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.535.713.200,00	274.736.400,00	0,00	0,00
		6.212.372.901,00	222.393.000,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06.04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	164.573.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00
		136.728.788,00	112.059.050,00	0,00	0,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	107.324.571.000,00	6.233.208.010,00	0,00	0,00
		99.352.252.609,61	1.334.493.880,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	7.392.156.500,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
		5.990.511.779,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	7.392.156.500,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
		5.990.511.779,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	99.932.414.500,00	1.733.208.010,00	0,00	0,00
		93.361.740.830,61	1.334.493.880,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	4.170.737.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.517.536.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	86.415.020.900,00	198.812.000,00	0,00	0,00
		84.114.172.563,61	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	240.150.500,00	1.203.452.910,00	0,00	0,00
		234.996.118,00	1.011.425.000,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7.154.709.000,00	96.300.000,00	0,00	0,00
		3.648.437.174,00	89.883.500,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.047.867.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.033.044.810,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.11	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	518.935.700,00	0,00	0,00	0,00
		456.777.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.14	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	384.992.900,00	234.643.100,00	0,00	0,00
		356.776.265,00	233.185.380,00	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	906.922.450,00	0,00	0,00	0,00
		844.403.710,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	72.383.750,00	0,00	0,00	0,00
		53.443.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	72.383.750,00	0,00	0,00	0,00
		53.443.900,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	384.614.600,00	0,00	0,00	0,00
		365.313.810,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	384.614.600,00	0,00	0,00	0,00
		365.313.810,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	449.924.100,00	0,00	0,00	0,00
		425.646.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.07	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	117.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	332.412.100,00	0,00	0,00	0,00
		320.476.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	17.999.625.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.630.174.247,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	17.999.625.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.630.174.247,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	17.549.405.400,00	0,00	0,00	0,00
		15.266.369.361,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	93.706.400,00	0,00	0,00	0,00
		89.827.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	87.675.700,00	0,00	0,00	0,00
		33.736.136,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.06	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	268.838.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.241.550,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	4.501.838.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.113.103.957,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.501.838.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.113.103.957,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	708.362.700,00	0,00	0,00	0,00
		581.636.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	298.431.500,00	0,00	0,00	0,00
		279.461.491,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.113.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.896.706.466,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	381.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		355.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30	**PERDAGANGAN**	4.840.203.600,00	525.858.900,00	0,00	0,00
		4.667.339.261,00	515.194.600,00	0,00	0,00
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	118.505.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.466.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	44.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.494.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.494.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	19.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.253.900,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	19.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.253.900,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	18.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	18.001.000,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	32.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.238.700,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	32.776.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.238.700,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	1.678.111.400,00	472.358.900,00	0,00	0,00
		1.606.255.275,00	466.215.850,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.564.636.400,00	472.358.900,00	0,00	0,00
		1.510.585.275,00	466.215.850,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	44.147.500,00	472.358.900,00	0,00	0,00
		41.421.500,00	466.215.850,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.520.488.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.469.163.775,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	113.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.670.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	83.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.420.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.225.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	983.380.800,00	0,00	0,00	0,00
		961.606.300,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	983.380.800,00	0,00	0,00	0,00
		961.606.300,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	142.840.800,00	0,00	0,00	0,00
		124.599.366,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	840.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		837.006.934,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	236.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		235.897.054,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	236.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		235.897.054,00	0,00	0,00	0,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	236.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		235.897.054,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	341.814.900,00	53.500.000,00	0,00	0,00
		341.264.000,00	48.978.750,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	341.814.900,00	53.500.000,00	0,00	0,00
		341.264.000,00	48.978.750,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	164.746.900,00	53.500.000,00	0,00	0,00
		164.464.300,00	48.978.750,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	177.068.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.799.700,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	1.481.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.849.832,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.481.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.849.832,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.481.508.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.434.849.832,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PERINDUSTRIAN**	13.298.558.538,00	306.037.800,00	0,00	0,00
		11.145.223.044,00	282.929.880,00	0,00	0,00
3.31.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.928.862.638,00	306.037.800,00	0,00	0,00
		8.657.485.266,00	282.929.880,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.035.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.588.200,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.447.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.478.865.588,00	0,00	0,00	0,00
		6.465.202.887,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.777.690.396,00	0,00	0,00	0,00
		6.122.444.487,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	701.175.192,00	0,00	0,00	0,00
		342.758.400,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.114.914,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	314.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		313.114.914,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.590.400,00	84.788.100,00	0,00	0,00
		820.195.937,00	71.900.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.573.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.554.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.780.000,00	84.788.100,00	0,00	0,00
		124.000.000,00	71.900.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.476.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.459.680,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.669.800,00	0,00	0,00	0,00
		28.433.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.301.600,00	0,00	0,00	0,00
		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.789.500,00	0,00	0,00	0,00
		614.849.257,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	151.249.700,00	0,00	0,00
		0,00	141.786.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	151.249.700,00	0,00	0,00
		0,00	141.786.000,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.975.050,00	0,00	0,00	0,00
		307.536.575,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.199.150,00	0,00	0,00	0,00
		138.152.275,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.775.900,00	0,00	0,00	0,00
		169.384.300,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.586.600,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		713.399.753,00	69.243.880,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.984.600,00	0,00	0,00	0,00
		165.849.025,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.574.750,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	601.492.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		513.975.978,00	69.243.880,00	0,00	0,00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	702.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		697.585.026,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	702.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		697.585.026,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	238.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		238.615.750,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	463.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		458.969.276,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	505.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.162.476,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	505.214.000,00	0,00	0,00	0,00
		503.162.476,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	132.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.782.476,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submissi	372.805.000,00	0,00	0,00	0,00
		372.380.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTE**	1.162.091.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.107.480.276,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.162.091.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.107.480.276,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	161.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		141.656.100,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1.000.136.900,00	0,00	0,00	0,00
		965.824.176,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**TRANSMIGRASI**	918.830.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		895.936.261,37	223.920.640,06	0,00	0,00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	537.080.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		526.611.704,76	223.920.640,06	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	537.080.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		526.611.704,76	223.920.640,06	0,00	0,00
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.179.887,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	343.890.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
		340.431.817,76	223.920.640,06	0,00	0,00
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	381.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		369.324.556,61	0,00	0,00	0,00
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	381.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		369.324.556,61	0,00	0,00	0,00
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	105.331.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.743.100,00	0,00	0,00	0,00
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	276.419.000,00	0,00	0,00	0,00
		273.581.456,61	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	368.311.159.242,00	29.016.525.205,00	0,00	0,00
		270.773.582.804,91	27.197.202.707,67	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	288.766.280.958,00	18.524.412.130,00	0,00	0,00
		205.878.205.149,91	17.299.033.581,67	0,00	0,00
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100.508.762.658,00	18.524.412.130,00	0,00	0,00
		81.789.630.249,00	17.299.033.581,67	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.978.945.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.907.836.722,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.657.036.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.606.682.622,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.611.100,00	0,00	0,00	0,00
		46.365.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	213.695.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.917.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	54.603.500,00	0,00	0,00	0,00
		42.871.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.357.178.176,00	0,00	0,00	0,00
		25.074.906.283,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.719.328.776,00	0,00	0,00	0,00
		24.443.868.783,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.087.900,00	0,00	0,00	0,00
		234.558.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	210.769.500,00	0,00	0,00	0,00
		207.537.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	191.992.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.941.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	575.937.200,00	0,00	0,00	0,00
		563.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	575.937.200,00	0,00	0,00	0,00
		563.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.860.365.200,00	15.584.895.350,00	0,00	0,00
		19.258.023.657,00	14.476.667.636,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.117.444.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.110.086.445,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.006.520.400,00	6.648.263.650,00	0,00	0,00
		4.774.700.524,00	5.997.412.496,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.038.971.500,00	8.936.631.700,00	0,00	0,00
		2.773.814.400,00	8.479.255.140,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.909.019.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.857.477.898,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.305.048.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.268.832.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.483.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.473.112.290,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.847.083.900,00	0,00	0,00	0,00
		10.899.732.197,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.040.840.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.497.665.607,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.090.914.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.693.213.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.715.328.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.708.852.690,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.010.348.650,00	2.283.612.000,00	0,00	0,00
		16.637.798.237,00	2.228.445.399,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.338.494.550,00	406.000.000,00	0,00	0,00
		3.951.429.243,00	366.433.999,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.093.629.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.024.404.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.600.096.000,00	1.877.612.000,00	0,00	0,00
		7.322.547.244,00	1.862.011.400,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.528.259.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.282.743.150,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.449.869.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.056.674.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.404.136.012,00	0,00	0,00	0,00
		2.122.208.588,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	404.136.012,00	0,00	0,00	0,00
		141.958.588,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.580.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.729.236.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.704.739.206,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	578.162.000,00	0,00	0,00	0,00
		568.338.777,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	239.577.300,00	0,00	0,00	0,00
		235.117.276,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	911.497.200,00	0,00	0,00	0,00
		901.283.153,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.745.531.420,00	655.904.780,00	0,00	0,00
		3.620.785.359,00	593.920.546,67	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.759.022.300,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.708.805.512,00	49.228.496,67	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	897.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		852.119.647,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.088.785.120,00	605.904.780,00	0,00	0,00
		1.059.860.200,00	544.692.050,00	0,00	0,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	184.171.361.600,00	0,00	0,00	0,00
		120.605.205.776,91	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.613.462.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.864.418,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	988.985.500,00	0,00	0,00	0,00
		955.905.916,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	275.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.371.289,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	348.642.200,00	0,00	0,00	0,00
		334.587.213,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	180.706.146.300,00	0,00	0,00	0,00
		117.421.748.397,91	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.165.728.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.571.703.886,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.449.345.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.160.252.080,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	16.895.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.552.434.213,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	135.195.302.500,00	0,00	0,00	0,00
		74.137.358.218,91	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.630.743.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.419.110.065,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	844.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		821.460.092,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	551.667.500,00	0,00	0,00	0,00
		384.480.463,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	234.617.100,00	0,00	0,00	0,00
		213.169.510,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	221.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		213.482.896,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	221.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		213.482.896,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	4.086.156.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.483.369.124,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.038.352.500,00	0,00	0,00	0,00
		873.968.608,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	243.364.000,00	0,00	0,00	0,00
		158.207.586,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	486.067.600,00	0,00	0,00	0,00
		473.215.607,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	243.239.200,00	0,00	0,00	0,00
		177.376.399,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	65.681.700,00	0,00	0,00	0,00
		65.169.016,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	609.784.800,00	0,00	0,00	0,00
		476.142.052,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	202.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.869.965,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	180.783.400,00	0,00	0,00	0,00
		173.951.897,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	226.616.400,00	0,00	0,00	0,00
		172.320.190,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.292.367.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.336.490,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.803.500,00	0,00	0,00	0,00
		231.061.813,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	381.772.600,00	0,00	0,00	0,00
		307.700.868,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.668.791.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.461.573.809,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	145.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.921.974,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	29.173.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.513.746,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	69.289.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.793.970,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	47.189.500,00	0,00	0,00	0,00
		46.614.258,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	79.544.878.284,00	10.492.113.075,00	0,00	0,00
		64.895.377.655,00	9.898.169.126,00	0,00	0,00
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	40.143.233.069,00	9.947.113.075,00	0,00	0,00
		35.685.283.757,00	9.439.825.626,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.977.700,00	0,00	0,00	0,00
		338.375.766,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.804.600,00	0,00	0,00	0,00
		40.954.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.184.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	33.545.200,00	0,00	0,00	0,00
		31.964.036,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	33.674.800,00	0,00	0,00	0,00
		31.919.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.747.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	209.115.100,00	0,00	0,00	0,00
		169.522.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.084.030,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.209.966.949,00	0,00	0,00	0,00
		5.262.918.268,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.164.479.349,00	0,00	0,00	0,00
		5.239.090.068,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.894.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.919.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.223.800,00	0,00	0,00	0,00
		6.775.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.019.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.944.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.189.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.737.608.740,00	0,00	0,00	0,00
		1.649.780.923,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	650.428.740,00	0,00	0,00	0,00
		620.664.900,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.087.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.029.116.023,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.581.920.300,00	1.483.435.000,00	0,00	0,00
		3.221.699.942,00	1.255.291.492,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	252.951.100,00	0,00	0,00	0,00
		237.181.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.011.800,00	1.477.435.000,00	0,00	0,00
		55.817.500,00	1.255.291.492,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	576.335.700,00	0,00	0,00	0,00
		517.073.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.764.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.497.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	215.450.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		212.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	210.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	261.341.700,00	0,00	0,00	0,00
		171.679.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.901.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.760.442,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.668.400,00	5.126.267.460,00	0,00	0,00
		79.382.000,00	4.955.811.337,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	471.061.000,00	0,00	0,00
		0,00	443.378.400,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.556.400,00	1.551.546.400,00	0,00	0,00
		49.745.000,00	1.459.693.801,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.112.000,00	3.103.660.060,00	0,00	0,00
		29.637.000,00	3.052.739.136,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.642.202.950,00	0,00	0,00	0,00
		3.089.534.404,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640.519.750,00	0,00	0,00	0,00
		498.978.548,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.001.683.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.590.555.856,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.700.610,00	382.500.000,00	0,00	0,00
		1.477.072.150,00	380.012.607,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	433.457.500,00	0,00	0,00	0,00
		390.645.516,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495.947.500,00	0,00	0,00	0,00
		439.773.822,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		216.647.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.145.610,00	382.500.000,00	0,00	0,00
		430.005.312,00	380.012.607,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.450.269.020,00	0,00	0,00	0,00
		19.533.375.994,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.979.459.020,00	0,00	0,00	0,00
		18.468.643.614,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	806.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		726.528.630,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	664.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		338.203.750,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.199.918.400,00	2.954.910.615,00	0,00	0,00
		1.033.144.310,00	2.848.710.190,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.199.918.400,00	2.954.910.615,00	0,00	0,00
		1.033.144.310,00	2.848.710.190,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	39.401.645.215,00	545.000.000,00	0,00	0,00
		29.210.093.898,00	458.343.500,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13.883.703.300,00	0,00	0,00	0,00
		9.739.092.160,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.689.781.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.643.897.255,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.391.687.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.638.780.405,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- U ndangan	1.182.353.400,00	0,00	0,00	0,00
		958.752.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	398.616.400,00	0,00	0,00	0,00
		388.162.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	221.265.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	486.416.663,00	0,00	0,00	0,00
		359.929.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.655.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.556.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.373.500,00	0,00	0,00	0,00
		96.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	227.286.235,00	0,00	0,00	0,00
		109.789.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	122.786.428,00	0,00	0,00	0,00
		117.334.600,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	373.435.000,00	0,00	0,00	0,00
		363.025.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	61.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	61.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	61.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	6.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	92.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.075.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.942.012.872,00	0,00	0,00	0,00
		3.133.943.729,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.223.122.000,00	0,00	0,00	0,00
		818.408.141,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	81.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	501.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		374.980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2.136.100.872,00	0,00	0,00	0,00
		1.879.505.588,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.450.850.380,00	545.000.000,00	0,00	0,00
		4.458.671.992,00	458.343.500,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.125.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	804.365.810,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		599.442.682,00	47.730.000,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.424.940.070,00	495.000.000,00	0,00	0,00
		3.669.624.310,00	410.613.500,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	190.044.500,00	0,00	0,00	0,00
		159.480.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	21.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.309.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	21.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.309.200,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	15.243.467.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.142.122.117,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.712.987.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.655.527.117,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.495.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	421.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		395.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	107.013.233.168,00	15.959.155.478,00	9.478.109.524,85	400.010.530.689,00
		84.996.351.325,02	14.893.655.698,00	3.388.752.199,00	379.372.077.917,00
5.01	**PERENCANAAN**	18.484.906.073,00	1.078.229.600,00	0,00	0,00
		17.933.391.491,00	1.018.667.605,00	0,00	0,00
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12.127.317.373,00	968.229.600,00	0,00	0,00
		11.786.670.015,00	919.156.105,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		264.578.710,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.460.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	196.570.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.728.710,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.140.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.390.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.988.722.933,00	0,00	0,00	0,00
		8.832.918.146,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.840.247.533,00	0,00	0,00	0,00
		8.755.809.468,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.550.400,00	0,00	0,00	0,00
		57.194.178,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.814.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	542.479.000,00	0,00	0,00	0,00
		533.016.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.359.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	499.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		490.316.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.488.800,00	523.563.400,00	0,00	0,00
		888.329.928,00	476.799.599,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.869.300,00	0,00	0,00	0,00
		80.207.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.569.500,00	523.563.400,00	0,00	0,00
		78.700.000,00	476.799.599,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.662.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.817.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	654.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		651.925.428,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	217.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	216.828.375,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	217.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	216.828.375,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.839.300,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		791.153.088,00	9.200.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.289.500,00	0,00	0,00	0,00
		244.957.488,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.549.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		546.195.600,00	9.200.000,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.617.340,00	217.166.200,00	0,00	0,00
		476.674.143,00	216.328.131,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.081.500,00	0,00	0,00	0,00
		184.301.622,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.535.840,00	217.166.200,00	0,00	0,00
		292.372.521,00	216.328.131,00	0,00	0,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	2.441.199.300,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		2.401.992.110,00	99.511.500,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.718.556.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.708.360.432,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	213.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.683.819,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	112.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.028.886,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	217.086.300,00	0,00	0,00	0,00
		215.276.404,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.175.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.170.371.323,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	346.233.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		327.030.676,00	99.511.500,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	325.903.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		307.125.976,00	99.511.500,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.904.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376.410.000,00	0,00	0,00	0,00
		366.601.002,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	314.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.546.302,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.054.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	3.916.389.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		3.744.729.366,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.917.883.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.820.585.050,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	624.101.000,00	0,00	0,00	0,00
		594.716.655,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	218.327.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.756.541,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.745.500,00	0,00	0,00	0,00
		55.616.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	313.934.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.252.199,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.461.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.145.987,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.474.194,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.779.720,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	531.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		508.843.354,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	630.715.400,00	0,00	0,00	0,00
		626.985.645,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	139.801.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.720.305,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.096.200,00	0,00	0,00	0,00
		41.921.541,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.226.200,00	0,00	0,00	0,00
		28.224.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		63.804.086,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.181.200,00	0,00	0,00	0,00
		98.961.567,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	210.557.500,00	0,00	0,00	0,00
		209.737.366,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	27.106.700,00	0,00	0,00	0,00
		26.750.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	19.526.600,00	0,00	0,00	0,00
		18.865.980,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.367.790.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		1.297.158.671,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.263.500,00	0,00	0,00	0,00
		105.719.010,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.717.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.138.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.125.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	168.143.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.409.576,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.032.529.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		1.001.905.085,00	0,00	0,00	0,00
5.02	**KEUANGAN**	57.258.926.302,00	13.538.882.678,00	9.478.109.524,85	400.010.530.689,00
		41.374.437.845,02	12.587.776.000,00	3.388.752.199,00	379.372.077.917,00
5.02.00	**Non Program**	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.244.957.020,00
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.244.957.020,00
5.02.00.0.00.00	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	98.244.957.020,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	34.679.221.082,00	2.828.074.678,00	0,00	0,00
		22.609.035.536,00	2.601.530.229,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	568.467.800,00	0,00	0,00	0,00
		471.815.610,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	276.250.500,00	0,00	0,00	0,00
		208.422.640,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.313.500,00	0,00	0,00	0,00
		69.018.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.903.800,00	0,00	0,00	0,00
		194.374.970,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.708.374.707,00	0,00	0,00	0,00
		15.505.002.698,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.989.039.707,00	0,00	0,00	0,00
		14.808.318.537,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	533.886.100,00	0,00	0,00	0,00
		518.191.220,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.692.600,00	0,00	0,00	0,00
		60.196.320,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	122.756.300,00	0,00	0,00	0,00
		118.296.621,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.506.348.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.206.486.335,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	247.086.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	153.683.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.133.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.105.579.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.832.402.385,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	932.517.000,00	909.714.900,00	0,00	0,00
		758.880.039,00	593.772.005,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.317.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.377.300,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.029.900,00	909.714.900,00	0,00	0,00
		100.391.997,00	593.772.005,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.121.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.693.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.048.600,00	0,00	0,00	0,00
		607.417.742,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.086.970.500,00	397.960.000,00	0,00	0,00
		1.096.462.542,00	546.850.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	665.253.000,00	397.960.000,00	0,00	0,00
		316.220.471,00	546.850.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.637.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.383.047.500,00	0,00	0,00	0,00
		747.604.571,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.876.543.075,00	1.520.399.778,00	0,00	0,00
		2.570.388.312,00	1.460.908.224,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.914.800,00	0,00	0,00	0,00
		373.218.280,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.366.628.275,00	1.520.399.778,00	0,00	0,00
		2.197.170.032,00	1.460.908.224,00	0,00	0,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	9.770.095.920,00	327.455.500,00	9.478.109.524,85	400.010.530.689,00
		7.961.425.603,00	303.654.003,00	3.388.752.199,00	281.127.120.897,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.372.496.920,00	17.616.000,00	0,00	0,00
		1.825.782.568,00	13.375.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	147.610.000,00	17.616.000,00	0,00	0,00
		131.519.150,00	13.375.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	103.023.100,00	0,00	0,00	0,00
		100.696.576,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	342.195.600,00	0,00	0,00	0,00
		227.316.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.373.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.307.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	336.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		280.997.772,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	269.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		236.029.456,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.137.318.220,00	0,00	0,00	0,00
		814.915.714,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.667.450.700,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		3.519.738.640,00	94.685.903,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	182.069.700,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		131.150.159,00	94.685.903,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	773.985.500,00	0,00	0,00	0,00
		761.689.606,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.088.627.000,00	0,00	0,00	0,00
		664.584.247,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	526.507.000,00	0,00	0,00	0,00
		227.335.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	475.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		317.872.845,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	589.641.000,00	0,00	0,00	0,00
		444.855.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.030.725.500,00	0,00	0,00	0,00
		972.250.783,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.730.148.300,00	209.839.500,00	0,00	0,00
		2.615.904.395,00	195.593.100,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	54.161.600,00	0,00	0,00	0,00
		47.443.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	87.595.600,00	0,00	0,00	0,00
		86.438.346,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	257.333.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		252.315.500,00	98.457.000,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	432.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		425.098.260,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	193.842.800,00	0,00	0,00	0,00
		187.597.126,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.704.245.300,00	109.839.500,00	0,00	0,00
		1.617.011.963,00	97.136.100,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	9.478.109.524,85	400.010.530.689,00
		0,00	0,00	3.388.752.199,00	281.127.120.897,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	395.897.635.392,00
		0,00	0,00	0,00	277.046.762.400,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	9.478.109.524,85	0,00
		0,00	0,00	3.388.752.199,00	0,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	0,00	0,00	0,00	4.112.895.297,00
		0,00	0,00	0,00	4.080.358.497,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	7.777.231.300,00	10.249.911.000,00	0,00	0,00
		6.707.078.117,00	9.565.952.968,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.777.231.300,00	10.249.911.000,00	0,00	0,00
		6.707.078.117,00	9.565.952.968,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	225.219.200,00	0,00	0,00	0,00
		224.413.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	166.025.800,00	0,00	0,00	0,00
		134.778.947,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	287.057.900,00	0,00	0,00	0,00
		283.412.354,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	22.854.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.353.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	612.047.200,00	177.941.400,00	0,00	0,00
		536.295.119,00	167.854.000,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.126.600,00	102.792.000,00	0,00	0,00
		28.084.500,00	53.850.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4.584.375.400,00	9.682.546.400,00	0,00	0,00
		4.014.610.891,00	9.097.003.465,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	538.672.200,00	286.631.200,00	0,00	0,00
		487.249.013,00	247.245.503,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	1.310.853.000,00	0,00	0,00	0,00
		976.880.593,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	5.032.378.000,00	133.441.500,00	0,00	0,00
		4.096.898.589,02	116.638.800,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.032.378.000,00	133.441.500,00	0,00	0,00
		4.096.898.589,02	116.638.800,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	470.714.500,00	0,00	0,00	0,00
		337.062.039,02	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	732.632.700,00	68.441.500,00	0,00	0,00
		536.993.003,00	63.913.800,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.358.379.600,00	65.000.000,00	0,00	0,00
		1.179.905.186,00	52.725.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	429.223.000,00	0,00	0,00	0,00
		308.457.807,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	489.672.600,00	0,00	0,00	0,00
		252.854.867,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	147.966.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.031.499,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	983.886.000,00	0,00	0,00	0,00
		963.358.889,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	205.689.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.708.195,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	214.214.600,00	0,00	0,00	0,00
		200.527.104,00	0,00	0,00	0,00
5.03	**KEPEGAWAIAN**	18.567.189.993,00	1.342.043.200,00	0,00	0,00
		15.339.269.099,00	1.287.212.093,00	0,00	0,00
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	10.349.947.293,00	1.342.043.200,00	0,00	0,00
		9.338.202.691,00	1.287.212.093,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.822.700,00	0,00	0,00	0,00
		153.746.776,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.558.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.471.790,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.529.700,00	0,00	0,00	0,00
		64.144.691,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.735.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.130.295,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.183.574.737,00	0,00	0,00	0,00
		7.839.911.548,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.084.957.737,00	0,00	0,00	0,00
		7.746.826.362,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.848.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.701.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.769.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.383.486,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.411.500,00	442.642.800,00	0,00	0,00
		391.499.405,00	406.521.702,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.213.500,00	442.642.800,00	0,00	0,00
		63.231.295,00	406.521.702,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.418.110,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	899.400.400,00	0,00	0,00
		0,00	880.690.391,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	899.400.400,00	0,00	0,00
		0,00	880.690.391,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.574.556,00	0,00	0,00	0,00
		616.190.461,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		293.807.056,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.674.556,00	0,00	0,00	0,00
		322.383.405,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.563.800,00	0,00	0,00	0,00
		336.854.501,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.563.800,00	0,00	0,00	0,00
		91.787.501,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		245.067.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	8.217.242.700,00	0,00	0,00	0,00
		6.001.066.408,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	769.173.600,00	0,00	0,00	0,00
		724.699.902,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	370.177.000,00	0,00	0,00	0,00
		337.482.768,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	121.396.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.327.919,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	94.510.100,00	0,00	0,00	0,00
		89.252.419,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	183.090.500,00	0,00	0,00	0,00
		176.636.796,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.495.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.213.171.351,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	1.365.693.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.083.594.497,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	130.301.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.576.854,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.493.880.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.662.832.374,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	893.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.249.838,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.443.686.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.379.600.559,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.589.978.000,00	0,00	0,00	0,00
		465.041.538,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	771.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		743.898.096,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	795.813.500,00	0,00	0,00	0,00
		775.042.343,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	458.194.600,00	0,00	0,00	0,00
		400.362.781,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	121.291.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.904.636,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	138.559.600,00	0,00	0,00	0,00
		119.905.490,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	58.289.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.330.853,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.673.602,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	54.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.548.200,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	5.655.597.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.511.635.502,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	5.655.597.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.511.635.502,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.655.597.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.511.635.502,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.655.597.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.511.635.502,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	7.046.613.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.837.617.388,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	7.046.613.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.837.617.388,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	829.413.000,00	0,00	0,00	0,00
		802.092.343,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	604.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		578.248.881,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	225.013.000,00	0,00	0,00	0,00
		223.843.462,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	180.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.417.100,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	180.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.417.100,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.863.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.853.531.872,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	391.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.738.293,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	128.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.931.488,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1.342.788.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.339.862.091,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.173.512.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.576.073,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	312.313.000,00	0,00	0,00	0,00
		299.490.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3.861.199.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.702.085.573,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	28.554.635.753,00	8.166.364.800,00	0,00	0,00
		24.897.067.606,73	7.799.818.163,51	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT**	28.554.635.753,00	8.166.364.800,00	0,00	0,00
		24.897.067.606,73	7.799.818.163,51	0,00	0,00
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	22.890.778.053,00	8.166.364.800,00	0,00	0,00
		21.137.782.258,73	7.799.818.163,51	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.067.924,00	0,00	0,00	0,00
		108.815.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.147.600,00	0,00	0,00	0,00
		29.079.900,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.633.824,00	0,00	0,00	0,00
		37.942.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	42.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.268.700,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.946.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.525.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.752.675.395,00	0,00	0,00	0,00
		15.675.057.004,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.752.675.395,00	0,00	0,00	0,00
		15.675.057.004,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.973.934.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.721.955.554,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180.969.500,00	0,00	0,00	0,00
		173.415.300,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.934.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.817.285.538,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	858.526.000,00	0,00	0,00	0,00
		731.254.716,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.410.445.200,00	3.482.470.400,00	0,00	0,00
		1.363.082.181,00	3.414.204.990,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	3.482.470.400,00	0,00	0,00
		0,00	3.414.204.990,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.868.200,00	0,00	0,00	0,00
		63.832.400,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.714.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.339.863.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.292.549.781,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	4.360.054.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.091.113.996,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	4.360.054.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.091.113.996,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.355.890,00	0,00	0,00	0,00
		412.189.296,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.991.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.950.750,00	0,00	0,00	0,00
		161.996.357,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.405.140,00	0,00	0,00	0,00
		245.201.939,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.299.144,00	323.840.400,00	0,00	0,00
		856.682.623,73	294.499.177,51	0,00	0,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	573.930.276,00	0,00	0,00	0,00
		417.288.326,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	568.368.868,00	323.840.400,00	0,00	0,00
		439.394.297,73	294.499.177,51	0,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	2.387.427.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.064.696.885,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.697.637.200,00	0,00	0,00	0,00
		672.821.332,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	355.634.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.637.986,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	394.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		198.198.811,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	10.095.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	35.814.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.762.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	439.720.200,00	0,00	0,00	0,00
		82.005.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	461.478.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.216.935,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	689.790.000,00	0,00	0,00	0,00
		391.875.553,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	79.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	610.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		353.675.553,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	3.276.430.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.694.588.463,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	3.276.430.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.694.588.463,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	297.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.375.817,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	644.351.000,00	0,00	0,00	0,00
		601.010.869,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.039.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.778.778.202,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	294.982.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.423.575,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	59.653.153.544,00	4.125.928.700,00	0,00	0,00
		56.419.176.168,00	3.988.820.996,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	59.653.153.544,00	4.125.928.700,00	0,00	0,00
		56.419.176.168,00	3.988.820.996,00	0,00	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	47.596.257.416,00	2.116.222.900,00	0,00	0,00
		44.674.060.416,00	2.040.531.996,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	671.439.300,00	0,00	0,00	0,00
		667.466.910,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.401.600,00	0,00	0,00	0,00
		202.986.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.298.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	16.625.900,00	0,00	0,00	0,00
		16.601.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	367.565.300,00	0,00	0,00	0,00
		366.214.510,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	22.135.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.019.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.347.300,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.730.884.456,00	0,00	0,00	0,00
		34.124.462.172,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.805.322.686,00	0,00	0,00	0,00
		33.268.947.663,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	863.832.470,00	0,00	0,00	0,00
		793.849.309,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.602.300,00	0,00	0,00	0,00
		52.540.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.127.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.125.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.253.200,00	0,00	0,00	0,00
		532.812.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	368.893.200,00	0,00	0,00	0,00
		351.582.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		181.230.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.311.774.000,00	1.247.329.800,00	0,00	0,00
		4.307.408.539,00	1.202.894.500,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.372.500,00	0,00	0,00	0,00
		177.648.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.753.600,00	1.124.976.900,00	0,00	0,00
		99.364.800,00	1.083.530.550,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	119.952.900,00	0,00	0,00
		0,00	116.963.950,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	377.440.300,00	2.400.000,00	0,00	0,00
		376.730.598,00	2.400.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	318.153.300,00	0,00	0,00	0,00
		317.796.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.268.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.332.786.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.330.668.541,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.987.200,00	746.491.500,00	0,00	0,00
		27.324.000,00	719.644.296,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	95.101.000,00	0,00	0,00
		0,00	93.818.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.487.200,00	303.924.000,00	0,00	0,00
		24.324.000,00	298.603.250,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	289.473.300,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	270.280.046,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	57.993.200,00	0,00	0,00
		0,00	56.943.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.486.482.240,00	36.128.000,00	0,00	0,00
		3.267.170.314,00	35.787.800,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	205.355.110,00	0,00	0,00	0,00
		194.237.180,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	877.854.450,00	0,00	0,00	0,00
		689.547.004,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.914.600,00	36.128.000,00	0,00	0,00
		93.904.500,00	35.787.800,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.309.358.080,00	0,00	0,00	0,00
		2.289.481.630,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.437.020,00	86.273.600,00	0,00	0,00
		1.747.415.961,00	82.205.400,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.026.108.080,00	0,00	0,00	0,00
		965.890.561,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.788.600,00	0,00	0,00	0,00
		93.777.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.756.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.033.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.274.440,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		297.851.800,00	37.562.400,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.509.900,00	46.273.600,00	0,00	0,00
		243.863.400,00	44.643.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2.340.749.040,00	0,00	0,00	0,00
		2.278.634.875,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.598.703.540,00	0,00	0,00	0,00
		1.553.665.525,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	195.192.240,00	0,00	0,00	0,00
		194.009.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.403.511.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.359.656.525,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	742.045.500,00	0,00	0,00	0,00
		724.969.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	742.045.500,00	0,00	0,00	0,00
		724.969.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	5.919.253.888,00	2.009.705.800,00	0,00	0,00
		5.744.904.827,00	1.948.289.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.343.780.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.325.990.606,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	72.725.200,00	0,00	0,00	0,00
		71.134.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	137.521.500,00	0,00	0,00	0,00
		135.777.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.133.533.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.119.079.106,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.551.374.300,00	2.001.191.400,00	0,00	0,00
		3.408.114.728,00	1.939.789.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	330.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		322.326.786,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	271.344.000,00	1.396.898.400,00	0,00	0,00
		252.543.214,00	1.352.686.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.537.523.300,00	65.727.900,00	0,00	0,00
		2.499.579.485,00	64.887.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	412.417.000,00	538.565.100,00	0,00	0,00
		333.665.243,00	522.215.500,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.140.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24.585.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.140.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	999.514.388,00	8.514.400,00	0,00	0,00
		986.659.493,00	8.500.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	471.451.588,00	8.514.400,00	0,00	0,00
		464.747.596,00	8.500.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	528.062.800,00	0,00	0,00	0,00
		521.911.897,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	840.764.300,00	0,00	0,00	0,00
		828.028.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	840.764.300,00	0,00	0,00	0,00
		828.028.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	785.825.400,00	0,00	0,00	0,00
		773.659.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	54.938.900,00	0,00	0,00	0,00
		54.368.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	1.105.153.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.089.014.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.105.153.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.089.014.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	134.276.400,00	0,00	0,00	0,00
		125.558.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	970.877.400,00	0,00	0,00	0,00
		963.455.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	1.850.975.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.804.533.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.850.975.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.804.533.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	23.897.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.847.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	446.336.200,00	0,00	0,00	0,00
		432.272.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	614.920.300,00	0,00	0,00	0,00
		599.186.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.285.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.835.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	32.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.545.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	83.918.600,00	0,00	0,00	0,00
		82.927.900,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.913.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	36.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.624.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	409.120.100,00	0,00	0,00	0,00
		403.856.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	118.327.900,00	0,00	0,00	0,00
		117.525.400,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	8.455.965.200,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		7.743.157.082,48	8.952.000,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	8.455.965.200,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		7.743.157.082,48	8.952.000,00	0,00	0,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	1.854.312.800,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		1.644.062.718,00	8.952.000,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.854.312.800,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		1.644.062.718,00	8.952.000,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39.241.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.315.300,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	162.750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		109.000.000,00	8.952.000,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	175.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.534.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11.038.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.068.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	1.276.807.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.195.294.818,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	24.873.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.708.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	164.162.800,00	0,00	0,00	0,00
		159.142.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	1.685.076.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.625.256.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1.685.076.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.625.256.400,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.106.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.317.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	292.795.000,00	0,00	0,00	0,00
		268.472.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	1.299.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.291.466.100,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	443.943.000,00	0,00	0,00	0,00
		409.225.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	443.943.000,00	0,00	0,00	0,00
		409.225.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	127.913.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.835.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	316.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		307.390.300,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	998.395.900,00	0,00	0,00	0,00
		827.665.716,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	998.395.900,00	0,00	0,00	0,00
		827.665.716,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.378.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI — KELOMPOK BELANJA: OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	182.970.900,00	0,00	0,00	0,00
		114.557.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	787.486.000,00	0,00	0,00	0,00
		697.602.316,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13.123.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.128.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	3.474.237.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.236.946.748,48	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.474.237.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.236.946.748,48	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	81.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.458.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.515.646.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.435.918.505,48	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	236.424.000,00	0,00	0,00	0,00
		176.279.838,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	109.605.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.334.999,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.530.572.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.954.806,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.429.729.067.940,87	1.154.447.391.284,13	9.478.109.524,85	400.010.530.689,00
		2.045.244.791.336,05	966.740.815.511,58	3.388.752.199,00	379.372.077.917,00

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN

H ABDUL HADI

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89	17.931.079.059,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96	6.491.994.812,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00	18.345.765.305,00
6	Lain - lain PAD yang sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14	133.132.894.990,41
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**	**175.901.734.166,91**
8		-			-
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	-			-
10	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	-			-
11	Dana Bagi Hasil	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75	3.394.844.581.540,00
12	Dana Alokasi Umum	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10	387.094.307.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60	36.005.560.168,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43	81.484.551.213,00
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**2.640.864.182.000,00**	**2.862.288.231.840,00**	**108,38**	**3.899.428.999.921,00**
16		-			-
17	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	-			-
18	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
19	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
20	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
21	Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89	114.314.789.590,00
22	Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12	20.597.049.000,00
23	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**132.798.578.000,00**	**120.541.620.020,00**	**90,77**	**134.911.838.590,00**
24		-			-
25	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	-			-
26	Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
27	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
28	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**	**107.530.009.314,00**
29	**Total Pendapatan Transfer**	**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**107,41**	**4.141.870.847.825,00**
30		-			-
31	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-			-
32	Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-	421.917.285,00
33	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
34	Pendapatan Lainnya	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07	7.935.418.762,00
35	**Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**	**8.357.336.047,00**
36	**JUMLAH PENDAPATAN**	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**
37		-			-
38	**BELANJA**	-			-
39	**BELANJA OPERASI**	-			-
40	Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71	528.346.491.670,00
41	Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58	1.292.777.489.260,70
42	Belanja Bunga	-	-	-	-
43	Belanja Subsidi	-	-	-	-
44	Belanja Hibah	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44	198.460.439.999,65
45	Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78	9.013.922.500,00
46	**Jumlah Belanja Operasi**	**2.429.729.067.940,87**	**2.045.244.791.336,05**	**84,18**	**2.028.598.343.430,35**
47		-			-
48	**BELANJA MODAL**	-			-
49	Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39	8.119.274.250,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86	370.854.449.606,00
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78	274.000.297.829,17
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17	396.492.146.916,87
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,72	778.523.500,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59	1.929.984.600,00
55	**Jumlah Belanja Modal**	**1.154.447.391.284,13**	**966.740.815.511,58**	**83,74**	**1.052.174.676.702,04**

NO.	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
56		-			-
57	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**			**-**
58	Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
59	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**9.478.109.524,85**	**3.388.752.199,00**	**35,75**	**1.357.500.000,00**
60		-			-
61	**BELANJA TRANSFER**	**-**			**-**
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
65	**Jumlah Belanja Transfer**	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**94,84**	**496.863.574.525,00**
66	**JUMLAH BELANJA**	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**
67		-			-
68	**SURPLUS/DEFISIT**	**(637.908.437.000,85)**	**248.210.650.301,51**	**(38,91)**	**747.135.823.381,52**
69		-			-
70	**PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
71	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
72	Penggunaan SILPA	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.771.613.619,33
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
80	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	1.000.000,00
81	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
82	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**640.772.613.619,33**
83		-			-
84	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**			**-**
85	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
86	Penyertaan Modal Pemeritah Daerah	-	-	-	750.000.000.000,00
87	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
89	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
91	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
92	Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
93	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
94	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000.000,00**
95	**PEMBIAYAAN NETTO**	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**(109.227.386.380,67)**
96		**-**			**-**
97	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (76 + 110)**	**-**	**886.118.987.095,36**		**637.908.437.000,85**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	637.908.437.000,85	640.771.536.002,33
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	637.908.336.793,85	640.771.613.619,33
3	Sub Total (1 - 2)	100.207,00	**(77.617,00)**
4			
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	886.118.987.095,36	637.908.437.000,85
6	Sub Total (3 + 5)	886.119.087.302,36	637.908.359.383,85
7			
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(100.207,00)	77.617,00
9	Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (6 s/d 9)		**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO.	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	4	5	6	7
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**				
2	**PENDAPATAN**				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4	Pendapatan Pajak Daerah	37.460.993.676,73	18.299.531.748,53	19.161.461.928,20	1,05
5	Pendapatan Retribusi Daerah	2.020.670.865,87	2.662.107.164,70	(641.436.298,83)	(0,24)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.282.992.046,34	20.479.163.343,96	29.803.828.702,38	1,46
7	Lain - lain PAD yang sah	118.115.667.622,69	138.894.502.644,87	(20.778.835.022,18)	(0,15)
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)**	**207.880.324.211,63**	**180.335.304.902,06**	**27.545.019.309,57**	**0,15**
9					
10	**PENDAPATAN TRANSFER**				
11	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**				
12	Dana Bagi Hasil	1.493.494.615.500,00	3.890.507.358.540,00	(2.397.012.743.040,00)	(0,62)
13	Dana Alokasi Umum	388.541.608.760,00	387.094.307.000,00	1.447.301.760,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.611.713.142,00	36.005.560.168,00	(34.393.847.026,00)	(0,96)
15	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	93.624.947.438,00	81.484.551.213,00	12.140.396.225,00	0,15
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 s/d 15)**	**1.977.272.884.840,00**	**4.395.091.776.921,00**	**(2.417.818.892.081,00)**	**(0,55)**
17					
18	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**				
19	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
20	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
21	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
22	Dana Desa	-	-	-	-
23	Insentif Fiskal	22.296.663.000,00	20.597.049.000,00	1.699.614.000,00	0,08
24	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s/d 22)**	**22.296.663.000,00**	**20.597.049.000,00**	**1.699.614.000,00**	**0,08**
25					
26	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**				
27	Pendapatan Bagi Hasil	82.750.373.807,00	99.312.064.729,82	(16.561.690.922,82)	(0,17)
28	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
29	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (26 s/d 27)**	**82.750.373.807,00**	**99.312.064.729,82**	**(16.561.690.922,82)**	**(0,17)**
30	**Total Pendapatan Transfer (16+23+28)**	**2.082.319.921.647,00**	**4.515.000.890.650,82**	**(2.432.680.969.003,82)**	**(0,54)**
31					
32	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
33	Pendapatan Hibah	14.776.002.965,00	5.961.231.815,00	8.814.771.150,00	1,48
34	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
35	Pendapatan Lainnya	376.101.889.847,48	7.935.610.562,00	368.166.279.285,48	46,39
36	**Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah (32 sd 34)**	**390.877.892.812,48**	**13.896.842.377,00**	**376.981.050.435,48**	**27,13**
37	**JUMLAH PENDAPATAN (8 + 29 + 35)**	**2.681.078.138.671,11**	**4.709.233.037.929,88**	**(2.028.154.899.258,77)**	**(0,43)**
38					
39	**BEBAN**				
40	**BEBAN OPERASI**				
41	Beban Pegawai	597.290.474.568,00	532.344.390.342,00	64.946.084.226,00	0,12
42	Beban Barang Dan Jasa	837.838.572.194,10	860.361.717.102,10	(22.523.144.908,00)	(0,03)
43	Beban Bunga	-	-	-	-
44	Beban Subsidi	-	-	-	-
45	Beban Hibah	503.224.596.259,91	628.239.433.873,65	(125.014.837.613,74)	(0,20)
46	Beban Bantuan Sosial	8.932.005.000,00	9.013.922.500,00	(81.917.500,00)	(0,01)
47	Beban Lain-lain	-	24.988.527.831,00	(24.988.527.831,00)	(1,00)
48	**JUMLAH BEBAN OPERASI (40 s/d 45)**	**1.947.285.648.022,01**	**2.054.947.991.648,75**	**(107.662.343.626,74)**	**(0,05)**
49					
50	**BEBAN PENYISIHAN PIUTANG**				
51	Beban Penyisihan Piutang Pajak	500.464.166,15	510.600,65	499.953.565,50	979,15
52	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	59.833.200,00	30.188.250,00	29.644.950,00	0,98
53	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pad Yg Sah	30.253.235,66	48.544.292,60	(18.291.056,94)	(0,38)
54	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	-	-		
55	**JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (49 s/d 52)**	**590.550.601,81**	**79.243.143,25**	**511.307.458,56**	**6,45**

NO.	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	4	5	6	7
56					
57	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**				
58	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	133.041.894.929,00	129.417.993.585,00	3.623.901.344,00	0,03
59	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	63.715.722.238,00	62.988.718.821,00	727.003.417,00	0,01
60	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	195.815.684.059,00	191.792.727.531,00	4.022.956.528,00	0,02
61	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	82.499.476,00	82.891.227,00	(391.751,00)	(0,00)
62	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
63	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.020.168.549,00	1.004.727.830,00	15.440.719,00	0,02
64	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	-	6.635.000,00	(6.635.000,00)	(1,00)
65	**JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (56 s/d 61)**	**393.675.969.251,00**	**385.293.693.994,00**	**8.382.275.257,00**	**0,02**
66					
67	**BEBAN TRANSFER**				
68	Beban Bagi Hasil	4.080.358.497,00	1.730.148.884,00	2.350.209.613,00	1,36
69	Beban Bantuan Keuangan	277.046.762.400,00	380.818.636.051,00	(103.771.873.651,00)	(0,27)
70	**JUMLAH BEBAN TRANSFER (65 s/d 66)**	**281.127.120.897,00**	**382.548.784.935,00**	**(101.421.664.038,00)**	**(0,27)**
71					
72	**BEBAN TAK TERDUGA**				
73	Beban Tak Terduga	3.178.857.199,00	1.357.500.000,00	1.821.357.199,00	1,34
74	**JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA**	**3.178.857.199,00**	**1.357.500.000,00**	**1.821.357.199,00**	**1,34**
75					
76	**JUMLAH BEBAN (46 + 53 + 62 + 67)**	**2.625.858.145.970,82**	**2.824.227.213.721,00**	**(198.369.067.750,18)**	**(0,07)**
77					
78	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**55.219.992.700,29**	**1.885.005.824.208,88**	**(1.829.785.831.508,59)**	**(0,97)**
79					
80	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
81	**SURPLUS NON OPERASIONAL**				
82	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	38.941.231.984,00	(38.941.231.984,00)	(1,00)
83	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
84	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.469.777,00	-	9.469.777,00	-
85	**JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL (79 s/d 81)**	**9.469.777,00**	**38.941.231.984,00**	**(38.931.762.207,00)**	**(1,00)**
86					
87	**DEFISIT NON OPERASIONAL**				
88	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	3.410.273.948,00	-	3.410.273.948,00	-
89	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
90	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.999.611.077,00	446.629.049,00	2.552.982.028,00	5,72
91	**JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL (85 s/d 87)**	**6.409.885.025,00**	**446.629.049,00**	**5.963.255.976,00**	**13,35**
92					
93	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**(6.400.415.248,00)**	**38.494.602.935,00**	**(44.895.018.183,00)**	**(1,17)**
94					
95	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (75 + 90)**	**48.819.577.452,29**	**1.923.500.427.143,88**	**(1.874.680.849.691,59)**	**(0,97)**
96					
97	**POS LUAR BIASA**				
98	**PENDAPATAN LUAR BIASA**				
99	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
100	**JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA**	**-**	**-**	**-**	**-**
101					
102	**BEBAN LUAR BIASA**				
103	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
104	**JUMLAH BEBAN LUAR BIASA**	**-**	**-**	**-**	**-**
105					
106	**POS LUAR BIASA**	**-**	**-**	**-**	**-**
107					
108	**SURPLUS/DEFISIT LO (92 + 103)**	**48.819.577.452,29**	**1.923.500.427.143,88**	**(1.874.680.849.691,59)**	**(0,97)**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	6.555.152.017.838,08	4.613.767.447.063,90
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	48.819.577.452,29	1.923.500.427.143,88
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	250.310.099.137,77	17.884.143.630,30
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)		-
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
7	LAIN-LAIN	250.310.099.137,77	17.884.143.630,30
EKUITAS AKHIR (1 s/d 7)		**6.854.281.694.428,14**	**6.555.152.017.838,08**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	KAS DAN SETARA KAS		
4	Kas di Kas Daerah	871.993.533.360,28	629.401.707.659,99
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7	Kas di BLUD	11.705.419.258,08	6.219.353.795,86
8	Kas Dana Bos	37.655.777,00	147.761.158,00
9	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	-	122.260.304,00
10	Kas Dana BOP	11.000,00	-
11	Kas Dana BOK	1.576.609.600,00	2.017.354.083,00
12	Kas Lainnya	805.758.100,00	-
13	Setara Kas	-	-
14	Investasi Jangka Pendek	-	-
15	Piutang Pajak	3.538.347.208,00	3.881.268.779,00
16	Piutang Retribusi	160.552.730,00	147.907.730,00
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
18	Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	18.193.093.845,67	12.036.582.088,50
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	709.305.200.000,00	1.223.130.370.000,00
20	Piutang Transfer Antar Daerah	27.589.748.778,00	24.790.084.881,00
21	Piutang Lainnya	40.548.320,38	111.377.138,68
22	Penyisihan Piutang	(2.142.453.558,22)	(1.840.457.973,98)
23	Beban Dibayar Dimuka	-	-
24	Persediaan	134.419.536.393,00	36.877.880.753,00
25	**JUMLAH ASET LANCAR**	**1.777.223.560.812,19**	**1.937.043.450.397,05**
27	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
28	INVESTASI NON PERMANEN		
29	Investasi Kepada BUMN	-	-
30	Investasi Kepada BUMD	203.818.000,00	203.818.000,00
31	Investasi Dalam Obligasi	-	-
32	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-
33	Dana Bergulir	-	-
34	**JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN**	**203.818.000,00**	**203.818.000,00**
36	INVESTASI PERMANEN		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.125.986.490.639,45	1.123.997.112.829,11
38	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
39	**JUMLAH INVESTASI PERMANEN**	**1.125.986.490.639,45**	**1.123.997.112.829,11**
40	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**	**1.126.190.308.639,45**	**1.124.200.930.829,11**
42	**ASET TETAP**		
43	Tanah	562.398.687.718,00	502.128.333.512,00
44	Peralatan Dan Mesin	1.138.447.481.302,00	988.477.540.498,00
45	Gedung Dan Bangunan	1.606.821.616.487,00	1.360.559.912.324,42
46	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	3.161.556.671.072,42	2.685.719.280.826,42
47	Aset Tetap Lainnya	10.059.296.877,00	9.753.400.327,00
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.926.236.147,00	15.345.808.759,00
49	Akumulasi Penyusutan	(2.558.822.435.898,00)	(2.423.329.601.218,00)
50	**JUMLAH ASET TETAP**	**3.927.387.553.705,42**	**3.138.654.675.028,84**

No.	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
51			
52	**DANA CADANGAN**		
53	Dana Cadangan	-	-
54	**JUMLAH DANA CADANGAN**	**-**	**-**
55			
56	**ASET LAINNYA**		
57	Tagihan Jangka Panjang		
58	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
59	Tuntutan Ganti Rugi	538.784.181,00	538.784.181,00
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-
61	Aset Tak Berwujud	7.740.866.899,00	6.670.167.200,00
62	Aset Lain - Lain	105.193.479.615,42	102.555.885.116,00
63	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.315.444.731,00)	(4.088.865.460,00)
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.694.019.855,48)	(62.034.826.165,48)
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	371.190.177.000,00
65	Properti Investasi	114.170.000,00	114.170.000,00
66	**JUMLAH ASET LAINNYA**	**47.577.836.108,94**	**414.945.491.871,52**
67			
67	**JUMLAH ASET**	**6.878.379.259.266,00**	**6.614.844.548.126,52**
68			
69	**KEWAJIBAN**		
70	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
72	Utang Bunga	-	-
73	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
75	Pendapatan Diterima Dimuka	330.118.209,39	186.392.548,50
76	Utang Belanja	23.763.562.001,47	59.493.224.212,94
77	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.884.627,00	12.913.527,00
78	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**24.097.564.837,86**	**59.692.530.288,44**
79			
80	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
81	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-
82	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-
83	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
84	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-
85	Premium (Diskonto) Obligai	-	-
86	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**
87	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**24.097.564.837,86**	**59.692.530.288,44**
88			
89	**EKUITAS**		
90	Ekuitas	6.854.281.694.428,14	6.555.152.017.838,08
91	**JUMLAH EKUITAS**	**6.854.281.694.428,14**	**6.555.152.017.838,08**
92			
93	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**6.878.379.259.266,00**	**6.614.844.548.126,52**

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	37.607.251.720,00	17.931.079.059,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah	1.967.294.243,00	2.551.421.071,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	18.345.765.305,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	113.649.022.468,66	137.073.468.731,41
7	Penerimaan Bagi Hasil	2.378.509.962.500,00	3.394.844.581.540,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	388.541.608.760,00	387.094.307.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.611.713.142,00	36.005.560.168,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	93.624.947.438,00	81.484.551.213,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	-
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
13	Penerimaan Dana Keistimewaan	-	-
14	Penerimaan Dana Desa	98.244.957.020,00	114.314.789.590,00
15	Penerimaan Insentif Fiskal	22.296.663.000,00	20.597.049.000,00
16	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	79.950.709.910,00	107.530.009.314,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	-	-
18	Penerimaan Hibah	1.655.200.090,00	421.917.285,00
19	Penerimaan Dana Darurat	-	-
20	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	376.101.889.847,48	7.935.418.762,00
21	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)**	**3.642.054.834.375,14**	**4.326.129.918.038,91**
22	**Arus Keluar Kas**		
23	Pembayaran Pegawai	604.826.713.205,00	528.346.491.670,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa	1.316.275.787.002,14	1.292.777.489.260,70
25	Pembayaran Bunga	-	-
26	Pembayaran Subsidi	-	-
27	Pembayaran Hibah	115.210.286.128,91	198.460.439.999,65
28	Pembayaran Bantuan Sosial	8.932.005.000,00	9.013.922.500,00
29	Pembayaran Tak Terduga	3.388.752.199,00	1.357.500.000,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	-	-
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	379.372.077.917,00	496.863.574.525,00
33	**Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 31)**	**2.428.005.621.452,05**	**2.526.819.417.955,35**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (20 -32)**	**1.214.049.212.923,09**	**1.799.310.500.083,56**
35	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Pencairan Dana Cadangan	-	-
38	Penjualan atas Tanah	-	-
39	Penjualan atas Mesin dan Peralatan	-	-
40	Penjualan atas Bangunan dan Gedung	-	-
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	324.485.000,00
43	Penjualan Aset Lainnya	-	-
44	Penerimaan Investasi Non Permanen	-	-
45	**Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 44)**	**-**	**324.485.000,00**
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
48	Perolehan Tanah	8.119.274.250,00	-

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	370.854.449.606,00	161.050.737.928,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	274.000.297.829,17	99.741.722.125,39
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	396.492.146.916,87	313.533.424.903,64
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	778.523.500,00	5.354.696.000,00
53	Perolehan Aset Lainnya	1.929.984.600,00	993.507.200,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	750.000.000.000,00	50.000.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
56	**Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)**	**1.802.174.676.702,04**	**630.674.088.157,03**
57	**Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi (44 - 55)**	**(1.802.174.676.702,04)**	**(630.349.603.157,03)**
58	**ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN**		
59	**Arus Masuk Kas**		
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
65	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	1.000.000,00
66	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**-**	**1.000.000,00**
67	**Arus Keluar Kas**		
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
73	Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-
74	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**-**	**-**
75	**Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan**	**-**	**1.000.000,00**
76			
77	**ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS**		
78	**Arus Masuk Kas**		
79	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	222.171.661.843,10	222.265.144.916,00
80	Dana Bantuan (CSR)	-	-
81	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**222.171.661.843,10**	**222.265.144.916,00**
82	**Arus Keluar Kas**		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	222.171.661.843,10	222.265.144.916,00
84	Pemberian Kembali Kas Bos kepada Provinsi	-	-
85	**Jumlah Arus Keluar Kas 81 s/d 82)**	**222.171.661.843,10**	**222.265.144.916,00**
86	**Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (79 - 83)**	**-**	**-**
87			
88	**KENAIKAN/PENURUNAN KAS**	**248.210.650.301,51**	**(2.863.176.618,48)**
89	**SALDO AWAL KAS**	**637.908.437.000,85**	**640.771.536.002,33**
90			
91	**Koreksi SILPA Tahun lalu**	**(100.207,00)**	**77.617,00**
92	**Kas lainnya**	**-**	**-**
93			
94	**SALDO AKHIR KAS (86 + 87 + 89 + 90)**	**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**
95			

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik *(good governance)*. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan Tahun Anggaran (TA) 2025 sebagai implementasi dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemkab Balangan TA 2025 disusun dengan menggunakan basis akrual yang diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPD disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemkab Balangan juga menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan yaitu:

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi; dan
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

4. Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
5. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; dan
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diperlukan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, oleh karena itu LKPD Kabupaten Balangan TA 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan TA 2025 dan menjadi pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Kabupaten Balangan adalah daerah otonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Proses berdirinya Kabupaten Balangan memiliki sejarah yang panjang dengan Resolusi I tanggal 13 Desember 1963 Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan (PPKB) menuntut agar Kewedanaan Balangan dijadikan Kabupaten Balangan. Tahun 1968 disampaikan lagi Resolusi II kepada Presiden RI dan disetiap kesempatan melakukan desakan kepada Bupati Kepala Dati II dan DPRD Dati II HSU guna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat. Sejak tahun 1970 usaha untuk menjadikan Balangan sebagai kabupaten sendiri terhenti karena pemerintah pusat pada masa itu belum mengizinkan. Setelah era Orde Baru yang digantikan oleh pemerintahan di era reformasi yang melahirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 maka muncul kembali keinginan masyarakat Kabupaten Balangan untuk membentuk Kabupaten Balangan. Pada tanggal 13 Mei 1999 dibentuk (disegarkan) kembali.

PPKB yang diketuai oleh H. Syahrani Ahing memulai aktivitasnya dengan melaksanakan rapat secara maraton dari tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1999 guna menyiapkan berkas dan konsep resolusi ke DPRD HSU. Pada tanggal 17 Mei 1999 bertepatan dengan HUT Proklamasi Tentara ALRI Divisi Kalimantan, PPKB beserta tokoh Balangan menyampaikan Resolusi III ke DPRD HSU (DPRD masa transisi) yaitu Resolusi Masyarakat Balangan yang berisikan tuntutan pendirian Kabupaten Balangan. Untuk menanggapi hal tersebut, DPRD HSU menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang

Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten tersendiri. Atas dasar itu Bupati HSU mengeluarkan Rekomendasi Nomor 125/0889/Pem, tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan. Pada tanggal 11 Februari 2002 terbit SK DPRD Kabupaten HSU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balangan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0110 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten HSU yang diketuai oleh Drs. H. M. Arsyad dan diiringi pula dengan terbitnya SK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembentukan Kabupaten Balangan. Pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI yang membahas pembentukan dan pemekaran Kabupaten sehingga terbitlah UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj. Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Semboyan Kabupaten Balangan adalah "Sanggam" yang berarti kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Pada tahun 2025 Kabupaten Balangan sudah 22 Tahun berdiri dengan pergantian kepemimpinan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1 Pergantian Kepemimpinan Kabupaten Balangan Tahun 2003 - 2025

No	Periode Jabatan	Bupati	Wakil Bupati	Keterangan
1.	08 April 2003 s.d 16 April 2004	Drs. H. M. Arsyad	-	Penjabat
2.	16 April 2004 s.d 13 Maret 2005	Ir. H. Sefek Effendie, ME	-	Penjabat
3.	13 Maret 2005 s.d 13 Agustus 2005	Ir. H. Johanes Sriyono	-	Penjabat
4.	13 Agustus 2005 s.d 13 Agustus 2010	Ir. H. Sefek Effendie, ME	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	Definitif
5.	13 Agustus 2010 s.d 13 Maret 2015	Ir. H. Sefek Effendie, ME	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	Definitif
6.	13 Maret 2015 s.d 17 Februari 2016	Drs. H. M. Hawari	-	Penjabat
7.	17 Februari 2016 s.d 26 September 2020	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	H. Syaifullah	Definitif
8.	26 September 2020 s.d 17 Februari 2021	H. Syaifullah	-	Pelaksana tugas Bupati selama Bupati Cuti Pilkada
9.	17 Februari 2021 s.d 04 Agustus 2022	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	H. Supiani, S.Sos, M.Si	(Wakil Bupati Meninggal dunia pada 04/08/2022)
10.	04 Agustus 2022 s.d 24 September 2024	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	-	Definitif
11.	24 September 2024 s.d 20 Februari 2025	Taufik Hidayat, S.Sos, M.Si	-	Penjabat Sementara
12.	20 Februari 2025 s.d sekarang	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	H. Akhmad Fauzi, S.Pd	Definitif

Secara geografis, Kabupaten Balangan merupakan dataran dengan ketinggian antara 25 – 100 meter diatas permukaan laut, yang terletak pada posisi 2°01'37" Lintang Utara dan 02°35'58" Lintang Selatan, serta 114°50' dan 115°50' Bujur Timur. Kabupaten Balangan dengan luas sebesar 1.878,30 km², merupakan 5 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63 - 372 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63 - 322 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan. Terhitung sejak ditetapkan pelantikan oleh Pj. Gubernur an. Mendagri tanggal 26 Februari 2021 hari Jumat bertempat di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin yang dilantik sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Balangan dipimpin oleh H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom sebagai Bupati dan untuk Wakil Bupati sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022. Hingga pada tanggal 20 Februari 2025 H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom kembali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Balangan dengan Wakil Bupatinya H. Akhmad Fauzi, S.Pd bertempat di Istana Negara Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua dengan fokus pada visi "Membangun Desa, Menata Kota"

Pada Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi bertambah sebanyak 2 (dua) SKPD karena ada pemekaran SKPD yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dari 30 (tiga puluh) SKPD menjadi 32 (tiga puluh dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
10. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;
25. Kecamatan Lampihong;
26. Kecamatan Batumandi;
27. Kecamatan Awayan;
28. Kecamatan Halong;
29. Kecamatan Juai;
30. Kecamatan Paringin;
31. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
32. Kecamatan Paringin Selatan.

SKPD bertugas membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Perda yang paling tidak mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian. Bersamaan dalam menjalankan tugasnya, jumlah pegawai pada Pemkab Balangan sampai dengan Desember 2025 sebanyak 3.790 orang yang terdiri dari 1.340 orang PNS dan CPNS, sebanyak 758 orang laki-laki dan 582 orang perempuan sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 311 orang yang terdiri dari 134 orang laki-laki dan 177 orang perempuan serta untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu sebanyak 2.139 orang yang terdiri dari 1.186 orang laki-laki dan 953 orang perempuan. Adapun komposisi pegawai per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2 Komposisi Pegawai Per SKPD sampai dengan Desember 2025

No	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
PNS dan CPNS				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42	24	66
2	Dinas Kesehatan	21	26	47
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36	23	59
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	5	26

No	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	8	18
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32	9	41
7	Dinas Sosial	20	11	31
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	26	46
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	47	43	90
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	23	17	40
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	9	29
12	Dinas Perhubungan	30	9	39
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	21	8	29
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	21	10	31
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	13	22
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16	14	30
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	17	30
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	11	27
19	Sekretariat Daerah	56	44	100
20	Sekretariat DPRD	16	8	24
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	17	22	39
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38	26	64
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	15	36
24	Inspektorat	38	21	59
25	Kecamatan Lampihong	16	9	25
26	Kecamatan Batumandi	14	7	21
27	Kecamatan Awayan	13	2	15
28	Kecamatan Halong	13	6	19
29	Kecamatan Juai	9	8	17
30	Kecamatan Paringin	12	10	22
31	Kecamatan Tebing Tinggi	11	4	15
32	Kecamatan Paringin Selatan	10	7	17
33	Kelurahan Paringin Kota	3	3	6
34	Kelurahan Batu Piring	7	3	10
35	Kelurahan Paringin Timur	2	4	6
36	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	44	100	144
Jumlah PNS dan CPNS		**758**	**582**	**1.340**
PPPK				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	4	9
2	Dinas Kesehatan	7	8	15
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	4
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4	6
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	2	7
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1	4	5
7	Dinas Sosial	1	4	5

No	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	4
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	15	15	30
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2	0	2
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	5
12	Dinas Perhubungan	3	2	5
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	1	5
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	3	7	10
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	4
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2	1	3
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	8	10
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	2	6
19	Sekretariat Daerah	9	3	12
20	Sekretariat DPRD	3	2	5
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3	4	7
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4	1	5
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	7	8
24	Inspektorat	4	0	4
25	Kecamatan Lampihong	2	3	5
26	Kecamatan Batumandi	2	2	4
27	Kecamatan Awayan	3	1	4
28	Kecamatan Halong	3	1	4
29	Kecamatan Juai	1	2	3
30	Kecamatan Paringin	2	2	4
31	Kecamatan Tebing Tinggi	2	1	3
32	Kecamatan Paringin Selatan	1	2	3
33	Kelurahan Batu Piring	1	0	1
34	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	30	74	104
Jumlah PPPK		**134**	**177**	**311**
PPPK Paruh Waktu				
1	Sekretariat Daerah	135	64	199
2	Sekretariat DPRD	53	42	95
3	Inspektorat	5	1	6
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52	53	105
5	Dinas Kesehatan	13	17	30
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37	57	94
7	Satuan Polisi Pamong Praja	120	13	133
8	Dinas Sosial	21	31	52
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	26	51
10	Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup	67	12	79
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	24	45
12	Dinas Perhubungan	59	15	74
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18	21	39
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30	21	51

No	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	28	21	49
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	9	22
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21	27	48
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47	83	130
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	142	141	283
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	18	14	32
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23	13	36
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	8	19
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56	9	65
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	7	19
25	Kecamatan Paringin	5	9	14
26	Kecamatan Paringin Selatan	8	9	17
27	Kecamatan Batumandi	9	13	22
28	Kecamatan Lampihong	5	17	22
29	Kecamatan Juai	13	17	30
30	Kecamatan Halong	12	13	25
31	Kecamatan Awayan	8	12	20
32	Kecamatan Tebing Tinggi	9	16	25
33	Kelurahan Paringin Timur	1	3	4
34	Kelurahan Paringin Kota	2	4	6
35	Kelurahan Batu Piring	3	2	5
36	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	84	113	197
Jumlah PPPK Paruh Waktu		**1.186**	**957**	**2.143**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada Tahun 2024 adalah 138.950 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 70.475 Jiwa dan Perempuan sebanyak 68.475 jiwa, adapun jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Halong dengan jumlah penduduk 21.262 jiwa disusul oleh Kecamatan Paringin sebanyak 20.534 dan Kecamatan Batumandi sebanyak 20.178 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 7.502 jiwa adapun sebaran penduduk per Kecamatan dan per jenis kelamin tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Laki - laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Juai	8.914	8.693	17.607	12,67%
Halong	10.847	10.415	21.262	15,30%
Awayan	7.562	7.360	14.922	10,74%
Batumandi	10.312	9.866	20.178	14,52%
Lampihong	10.080	9.721	19.801	14,25%
Paringin	10.304	10.230	20.534	14,78%
Paringin Selatan	8.646	8.498	17.144	12,34%
Tebing Tinggi	3.810	3.692	7.502	5,40%
Jumlah	**70.475**	**68.475**	**138.950**	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan

Keterangan: Untuk Data Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2025 masih belum rilis.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan LKPD ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Pemkab Balangan. Sedangkan maksud dan tujuan secara khusus penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemkab Balangan adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
h. UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
i. Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
j. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
k. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
l. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
o. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
p. Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
q. Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 09 Noreg Provinsi Kalimantan Selatan 9-128 Tahun 2022);
r. Perda Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 12 Noreg Provinsi Kalimantan Selatan 12-148 Tahun 2022);
s. Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 03 Noreg Provinsi Kalimantan Selatan 3-38/2023);
t. Perda Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 05 Noreg (4-67/2025) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan);

u. Perbup Balangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima Oleh Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 15);
v. Perbup Balangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbup Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 065); dan
w. Perbup Balangan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbup Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 131).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *Stakeholder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang beragam dalam memahami laporan maka LKPD harus dilengkapi dengan CaLK sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

a. Laporan keuangan mudah dipahami;
b. Menghindari kesalahpahaman;
c. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
d. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
e. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;
Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan dan keberhasilan pencapaian target APBD;
Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program;
Bab IV : Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
Bab VI : Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya; dan
Bab VII : Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber alam dan manusia di daerah.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemkab Balangan Tahun 2025, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), adapun indikator sosial ekonomi Pemkab Balangan Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 sebesar 4,87% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 4,64% atau turun sebesar 0,23%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 sebesar 76,91% sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar 75,09% atau turun sebesar 1,82%;
c. Gini Ratio Tahun 2024 sebesar 0,218 poin sedangkan untuk Tahun 2025 belum ada data resmi yang rilis.
d. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar 71,34 poin sedangkan Tahun 2025 sebesar 74,78 poin atau naik sebesar 3,44 poin;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 sebesar 4,15% sedangkan Tahun 2025 sebesar 4,51% atau naik sebesar 0,36%;
f. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar 1,95% sedangkan Tahun 2025 sebesar 3,66 poin atau naik sebesar 1,71 poin;
g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2024 sebesar Rp21.764,18 Miliar sedangkan untuk Tahun 2025 sebesar Rp22.942,05 atau naik sebesar Rp1.177,87 Miliar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak, sehingga yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Akan tetapi, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Berikut tabel persentase penduduk miskin se-Kalimantan Selatan:

Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Se Kalsel Tahun 2023 - 2025

Uraian	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2024	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2025	+ / (-) Tahun 2025 – 2024
Provinsi Kalimantan Selatan	**4,29**	**4,11**	**3,84**	**(0,27)**
1. Kabupaten Tanah Laut	3,73	3,74	3,00	(0,74)
2. Kabupaten Kotabaru	4,32	4,45	4,39	(0,06)
3. Kabupaten Banjar	2,44	2,36	2,74	0,38
4. Kabupaten Barito Kuala	4,60	4,36	4,31	(0,05)
5. Kabupaten Tapin	3,19	3,33	2,91	(0,42)
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,01	3,38	3,12	(0,26)
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5,84	5,81	5,03	(0,78)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	6,25	5,75	4,81	(0,94)
9. Kabupaten Tabalong	5,77	5,64	4,67	(0,97)
10. Kabupaten Tanah Bumbu	4,12	3,41	3,13	(0,28)
11. Kabupaten Balangan	**5,22**	**4,87**	**4,64**	**(0,23)**
12. Kota Banjarmasin	4,63	4,58	4,52	(0,06)
13. Kota Banjarbaru	3,92	3,79	3,44	(0,35)

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Se Kalsel Tahun 2023 – 2025

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	+ / (-) Tahun 2025 - 2024
Provinsi Kalimantan Selatan	**0,61**	**0,57**	**0,47**	**(0,10)**
1. Kabupaten Tanah Laut	0,30	0,76	0,27	(0,49)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	+ / (-) Tahun 2025 - 2024
2. Kabupaten Kotabaru	0,92	0,45	0,50	0,05
3. Kabupaten Banjar	0,38	0,33	0,23	(0,10)
4. Kabupaten Barito Kuala	1,14	0,69	0,57	(0,12)
5. Kabupaten Tapin	0,31	0,23	0,35	0,12
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,69	0,34	0,48	0,14
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,63	0,75	0,34	(0,41)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,63	0,54	0,44	(0,10)
9. Kabupaten Tabalong	0,46	0,95	0,22	(0,73)
10. Kabupaten Tanah Bumbu	0,42	0,54	0,43	(0,11)
11. Kabupaten Balangan	**0,55**	**0,85**	**0,51**	**(0,34)**
12. Kota Banjarmasin	0,55	0,49	0,51	0,02
13. Kota Banjarbaru	0,62	0,45	0,38	(0,07)

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 0,51% atau mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,85%.

Tabel 6 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Se Kalsel Tahun 2023 - 2025

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	+ / (-) Tahun 2025 – 2024
Provinsi Kalimantan Selatan	**0,16**	**0,12**	**0,09**	**(0,03)**
1. Kabupaten Tanah Laut	0,07	0,21	0,05	(0,16)
2. Kabupaten Kotabaru	0,22	0,08	0,11	0,03
3. Kabupaten Banjar	0,09	0,07	0,03	(0,04)
4. Kabupaten Barito Kuala	0,40	0,16	0,12	(0,04)
5. Kabupaten Tapin	0,08	0,03	0,10	0,07
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,21	0,05	0,12	0,07
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,14	0,14	0,04	(0,10)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,13	0,08	0,07	(0,01)
9. Kabupaten Tabalong	0,09	0,20	0,02	(0,18)
10. Kabupaten Tanah Bumbu	0,07	0,14	0,12	(0,02)
11. Kabupaten Balangan	**0,13**	**0,20**	**0,09**	**(0,11)**
12. Kota Banjarmasin	0,09	0,08	0,10	0,02
13. Kota Banjarbaru	0,14	0,07	0,07	-

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 0,09 poin mengalami penurunan sebesar 0,11 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,20 poin.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Se Kalsel Tahun 2024 - 2025 (persen), Agustus 2024 - Agustus 2025

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
	Agustus 2024	Agustus 2025	Agustus 2024	Agustus 2025
Provinsi Kalimantan Selatan	**4,20**	**4,16**	**70,22**	**69,93**
1. Kabupaten Tanah Laut	3,43	3,30	73,04	71,98
2. Kabupaten Kotabaru	6,05	5,93	65,80	65,36
3. Kabupaten Banjar	2,71	2,76	71,03	69,74
4. Kabupaten Barito Kuala	3,41	3,23	73,46	71,98
5. Kabupaten Tapin	3,86	3,69	68,12	70,59
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	2,20	75,77	70,96
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,20	3,12	74,53	73,33
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,73	3,79	73,89	70,88
9. Kabupaten Tabalong	3,44	3,48	74,17	71,05
10. Kabupaten Tanah Bumbu	6,37	6,05	67,35	69,83
11. Kabupaten Balangan	**2,69**	**2,74**	**76,91**	**75,09**
12. Kota Banjarmasin	6,56	6,49	63,93	66,55
13. Kota Banjarbaru	4,93	4,75	67,23	70,01

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

TPT Kabupaten Balangan pada Agustus Tahun 2025 sebesar 2,74 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dibandingkan Agustus Tahun 2024 sebesar 2,69 persen. Sedangkan TPAK pada Agustus Tahun 2025 sebesar 75,09 persen mengalami penurunan sebesar 1,82 persen dibandingkan Agustus Tahun 2024 sebesar 76,91 persen hal ini menunjukkan semakin meningkatnya TPAK di Kabupaten Balangan.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk, nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Indeks Gini Ratio indikator menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu.

Tabel 8 Indeks Gini (Gini Ratio) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan Tahun 2023 – 2025

Uraian	Indeks Gini Ratio			+ / (-)
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025–2024
Provinsi Kalimantan Selatan	**0,313**	**0,302**	**0,287**	**(0,015)**
Kabupaten Balangan	0,258	0,218	-	-

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar 0,218 poin dan untuk tahun 2025 masih belum ada data resmi yang rilis sedangkan Indeks Ratio Gini Kalimantan Selatan tahun 2025 yang menjadi 0,287 poin atau mengalami penurunan 0,015 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,302 poin.

Dari data di atas adanya tren penurunan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Penurunan ketimpangan ini dapat diatributkan pada berbagai faktor seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Program sosial yang lebih terarah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ini.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70)
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
d. Sangat Tinggi (> 80)

Tabel 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Se Kalsel Tahun 2023 - 2025

Uraian	(Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia			+ / (-)
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025 – 2024
Provinsi Kalimantan Selatan	**72,5**	**73,03**	**76,10**	**3,07**
1. Kabupaten Tanah Laut	70,98	71,43	74,32	2,89
2. Kabupaten Kotabaru	70,18	70,61	73,03	2,42
3. Kabupaten Banjar	71,46	71,87	75,11	3,24
4. Kabupaten Barito Kuala	68,11	68,84	72,05	3,21
5. Kabupaten Tapin	72	72,51	74,98	2,47
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	70,5	71,21	74,81	3,60
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	70,13	70,69	74,26	3,57
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,66	68,28	72,67	4,39
9. Kabupaten Tabalong	73,85	74,41	76,94	2,53
10. Kabupaten Tanah Bumbu	72,31	72,95	75,09	2,14
11. Kabupaten Balangan	**70,49**	**71,34**	**74,78**	**3,44**
12. Kota Banjarmasin	78,5	79,05	80,88	1,83
13. Kota Banjarbaru	80,11	80,51	82,20	1,69

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama tahun 2023 hingga 2025, nilai IPM baik secara lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2025, IPM untuk level Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 76,10 poin, dan Kabupaten Balangan mencapai 74,78 poin. Dengan kata lain, IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan tahun 2024 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,07 poin dan 3,44 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2024.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu

wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi total menggambarkan peningkatan atau penambahan *output* suatu daerah secara total dalam kurun waktu tertentu. Nilai pertumbuhan ekonomi total tahun t dapat diperoleh melalui perhitungan selisih *output* yang dapat didekati dengan cara mengurangkan nilai PDRB ADHK total tahun t dengan nilai PDRB ADHK total tahun t-1.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan perekonomian di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi tahun t menunjukkan persentase besarnya pertumbuhan ekonomi tahun t. Namun ada juga yang menyebutkan istilah "pertumbuhan ekonomi" tersebut langsung merujuk pada laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi dan/atau angka pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih besar daripada nilai PDRB ADHK total tahun t-1 dan menunjukkan terjadinya peningkatan *output* perekonomian. Sedangkan nilai negatif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih kecil daripada nilai PDRB ADHK total tahun t-1 dan menunjukkan terjadinya penurunan *output* perekonomian. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa perekonomian suatu daerah semakin baik.

Hal yang perlu diingat yaitu ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t lebih kecil dari pada tahun t-1 namun masih bertanda positif, artinya perekonomian pada tahun t tetap mengalami pertumbuhan (bukan penurunan) dan hanya menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Sedangkan ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t bertanda negatif, artinya perekonomian pada tahun t mengalami penurunan pertumbuhan. Data yang digunakan untuk memperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010).

Tabel 10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2023 – 2025

(dalam persen)

No	Uraian	Kabupaten Balangan			
		Tahun 2023*	Tahun 2024**	Tahun 2025***	+ / (-) Tahun 2025 – 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,99	3,63	17,72	14,09
2	Pertambangan dan Penggalian	3,62	3,39	1,31	(2,08)
3	Industri Pengolahan	3,54	3,82	9,18	5,36
4	Pengadaan Listrik, Gas	8,19	6,20	9,75	3,55
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,94	2,31	3,19	0,88
6	Konstruksi	7,33	7,10	5,66	(1,44)

No	Uraian	Kabupaten Balangan			
		Tahun 2023*	Tahun 2024**	Tahun 2025***	+ / (-) Tahun 2025 – 2024
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,67	4,96	9,40	4,44
8	Transportasi dan Pergudangan	6,50	7,54	8,20	0,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,11	7,69	12,59	4,9
10	Informasi dan Komunikasi	5,71	6,64	7,67	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,38	9,12	5,15	-3,97
12	Real Estate	5,54	5,34	6,34	1
13	Jasa Perusahaan	8,59	7,29	8,50	1,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,48	8,47	8,70	0,23
15	Jasa Pendidikan	4,79	8,17	8,20	0,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,12	6,76	6,87	0,11
17	Jasa Lainnya	6,20	8,03	8,88	0,85
18	**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**	**4,17**	**4,15**	**4,51**	0,36

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.
Keterangan:
* = *Angka Sementara*
** = *Angka Sangat Sementara*
*** = *Angka Sangat sangat Sementara*

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori, yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 11 Tingkat Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2025

Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik / (Turun)
Inflasi Kalimantan Selatan	**2,43**	**1,95**	**3,66**	**1,71**
Inflasi Tanah Laut	-	2,90	2,91	0,01
Inflasi Kotabaru	3,81	0,26	3,03	2,77
Inflasi Hulu Sungai Tengah	-	1,11	3,93	2,82
Inflasi Tanjung	2,39	2,24	3,15	0,91
Inflasi Kota Banjarmasin	2,28	1,98	3,97	1,99

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Inflasi Kabupaten Balangan mengacu pada inflasi Tanjung (Kabupaten Tabalong) sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi di Kabupaten Balangan juga mengalami kenaikan/penurunan.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain:

a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun;
c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha dalam suatu wilayah. Kategori-kategori lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah;
d. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah;
e. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi;
f. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik berupa ekspor maupun impor;

g. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk; dan
h. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel 12 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Se-Kalimantan Selatan (Miliar Rupiah) 2023 – 2025

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025**	+ / - Tahun 2025 – 2024
1	Tanah Laut	20.165,71	21.254,10	22.772,90	1.518,80
2	Kotabaru	34.946,17	37.126,16	40.064,39	2.938,23
3	Banjar	22.634,50	24.042,01	25.600,21	1.558,20
4	Barito Kuala	10.567,48	11.350,36	12.199,11	848,75
5	Tapin	13.694,18	14.407,15	15.330,95	923,80
6	Hulu Sungai Selatan	9.165,46	9.901,34	10.620,48	719,14
7	Hulu Sungai Tengah	8.594,03	9.366,01	10.194,43	828,42
8	Hulu Sungai Utara	6.111,83	6.612,42	7.160,07	547,65
9	Tabalong	31.015,26	32.643,48	34.197,79	1.554,31
10	Tanah Bumbu	33.661,40	35.709,24	38.332,07	2.622,83
11	Balangan	20.876,19	21.764,18	22.942,05	1.177,87
12	Kota Banjarmasin	42.049,12	45.666,21	49.471,89	3.805,68
13	Kota Banjarbaru	13.328,09	14.517,74	15.505,28	987,54

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.
Keterangan:
* = Angka Sementara
** = Angka Sangat Sementara

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Proyeksi pendapatan pada TA 2025 didasarkan pada potensi yang ada dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta penetapan besaran transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan realisasi pendapatan yang sangat signifikan terutama pada pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerba. Adapun anggaran

dan realisasi pendapatan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	**1.776.547.267.309,00**	**1.785.363.522.998,54**	**100,50**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**75.756.717.222,00**	**92.767.033.520,54**	**122,45**
Pendapatan Pajak Daerah	11.768.350.048,00	12.308.860.393,50	104,59
Pendapatan Retribusi Daerah	1.629.254.000,00	1.908.662.405,00	117,15
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.573.275.479,00	13.573.275.479,00	100,00
Lain - lain PAD yang sah	48.785.837.695,00	64.976.235.243,04	133,19
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.601.474.727.263,00**	**1.583.753.808.032,00**	**98,89**
Dana Bagi Hasil	985.472.014.600,00	994.362.274.685,00	100,90
Dana Alokasi Umum	346.527.140.000,00	345.185.535.241,00	99,61
Dana Alokasi Khusus - Fisik	57.597.485.000,00	52.704.154.259,00	91,50
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	89.764.709.663,00	70.332.537.607,00	78,35
Dana Insentif Daerah	13.333.129.000,00	13.333.129.000,00	100,00
Dana Desa	108.780.249.000,00	107.836.177.240,00	99,13
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**93.136.777.251,00**	**102.303.271.167,00**	**109,84**
Pendapatan Bagi Hasil	93.136.777.251,00	102.303.271.167,00	109,84
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**6.179.045.573,00**	**6.539.410.279,00**	**105,83**
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.537.075.079,00	105,83
Pendapatan Lainnya	2.335.200,00	2.335.200,00	100,00

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	**2.384.594.925.767,05**	**2.760.543.725.654,01**	**115,77**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**104.521.373.930,49**	**137.007.405.232,01**	**131,08**
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00
Lain - lain PAD yang sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**2.178.018.839.712,00**	**2.509.925.057.280,00**	**115,24**
Dana Bagi Hasil	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08
Dana Alokasi Umum	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99
Dana Alokasi Khusus - Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**95.878.001.751,56**	**113.011.263.142,00**	**117,87**
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**6.176.710.373,00**	**600.000.000,00**	**9,71**
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	**4.184.500.893.232,00**	**4.326.129.918.038,91**	**103,38**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**95.965.787.433,00**	**175.901.734.166,91**	**183,30**
Pendapatan Pajak Daerah	13.722.500.000,00	17.931.079.059,50	130,67
Pendapatan Retribusi Daerah	2.222.820.000,00	2.551.421.071,00	114,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.117.190.767,00	18.345.765.305,00	86,88
Lain - lain PAD yang sah	58.903.276.666,00	137.073.468.731,41	232,71
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**3.985.933.708.441,00**	**4.034.340.838.511,00**	**101,21**
Dana Bagi Hasil	3.351.734.905.370,00	3.394.844.581.540,00	101,29
Dana Alokasi Umum	378.776.701.000,00	387.094.307.000,00	102,20
Dana Alokasi Khusus - Fisik	36.594.434.000,00	36.005.560.168,00	98,39
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	89.317.735.071,00	81.484.551.213,00	91,23
Dana Insentif Daerah	114.421.503.000,00	114.314.789.590,00	99,91
Dana Desa	15.088.430.000,00	20.597.049.000,00	136,51
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**94.500.000.000,00**	**107.530.009.314,00**	**113,79**
Pendapatan Bagi Hasil	94.500.000.000,00	107.530.009.314,00	113,79
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.101.397.358,00**	**8.357.336.047,00**	**103,16**
Pendapatan Hibah	0,00	421.917.285,00	-
Pendapatan Lainnya	8.101.397.358,00	7.935.418.762,00	97,95

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**
Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89
Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00
Lain - lain PAD yang sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**2.773.662.760.000,00**	**2.982.829.851.860,00**	**107,54**
Dana Bagi Hasil	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75
Dana Alokasi Umum	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10
Dana Alokasi Khusus - Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43
Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89
Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**
Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**
Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dari pada tiap tahunnya, tetapi menurun pada TA 2025 sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini:

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 s.d Tahun 2025

	TA. 2022 (Realisasi 100,50%)	TA. 2023 (Realisasi 115,77%)	TA. 2024 (Realisasi 103,38%)	TA. 2025 (Realisasi 108,51%)
Anggaran	1.776.547.267.309,00	2.384.594.925.767,05	4.184.500.893.232,00	3.355.756.662.438,00
Realisasi	1.785.363.522.998,54	2.760.543.725.654,01	4.326.129.918.038,91	3.642.957.087.265,14

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD), dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.2.1.1.1 Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025;
b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
c. Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemkab Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemkab Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
f. Pendapatan Pajak Hotel diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013;
g. Pendapatan Pajak Restoran dan Katering diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2009, Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012;
h. Pendapatan Pajak Hiburan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2012, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012;
i. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012;
j. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dalam Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011;
k. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013, Perda Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2009;
l. Pendapatan Pajak Parkir diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011, Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011;
m. Pendapatan Pajak Air Tanah diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013;
n. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013;
o. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011;
p. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Perda Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Perda Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014;
q. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Perda Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Perda Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011;

r. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017, Perda Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2016, Perda Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2014, Perda Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

s. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012;

t. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012;

u. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018;

v. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013;

w. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012;

x. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013;

y. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013;

z. Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.

aa. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013;

bb. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018;

cc. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018;

dd. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016;

ee. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012;

ff. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan

sesuai dengan sumber penerimaan jenis retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

gg. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam UU dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

hh. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.2.1.1.2 Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran HPKDYD TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2.2.1.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. Hasil kerja sama daerah;

d. Jasa giro;
e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
f. Pendapatan bunga;
g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah;
i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. Pendapatan denda pajak daerah;
l. Pendapatan denda retribusi daerah;
m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. Pendapatan dari pengembalian;
o. Pendapatan dari BLUD; dan
p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa sedangkan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat

a. Penganggaran DBH yang bersumber dari Pajak
Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-PBB selain PBB Perkotaan dan Perdesaan (PPB-P2), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA;

b. Penganggaran DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta perhitungan lainnya dengan memperhitungkan kurang dan lebih salur tahun sebelumnya

sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA;

c. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA;

d. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA;

e. Penganggaran DID
DID bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu;

f. Penganggaran Dana Desa
Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA; dan

g. Penganggaran Insentif Fiskal
Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain

pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan Peraturan Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

2.2.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan Antar Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan kepada Pemkab Balangan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan untuk Pemkab Balangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2025.

2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2.2.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
3. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain PAD yang sah, jenis lain-lain PAD yang sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Secara khusus dengan kurang stabilnya ekonomi dunia Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi meliputi:

a. Penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
   1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
   2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
   3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
b. Penurunan stunting antara lain:
   1) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita;
   2) Kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitif seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; dan

3) Kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan.

c. Pengendalian inflasi antara lain:
   1) Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
   2) Pengendalian laju alih fungsi lahan;
   3) Pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
   4) Penguatan tata kelola logistik daerah; dan
   5) Pengawasan harga dan operasi pasar.
d. Peningkatan investasi antara lain:
   1) Kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS); dan
   2) Mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
e. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
f. Pembangunan infrastruktur dan Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dan dirinci atas jenis:

2.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala

daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD TA 2021 dengan perpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019;

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada Perda Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada Perda. Dalam hal belum adanya Perda dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Perda Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Perda Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik yang dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi

honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; dan

h. Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

2.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) Penghargaan atas suatu prestasi; dan
   3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Perpres Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah berpedoman pada Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2020 dengan berpedoman pada Pasal 9 Perda Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

   1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
   2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perda Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 101 Tahun 2012

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Peraturan.

j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

   1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
   2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, Pimpinan dan anggota DPRD dan Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD TA 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD TA 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Perda Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat

menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2016.

2.2.2.1.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Perda Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan SAP (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
    1) Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh bertujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    2) Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
    3) Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan bertujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    5) Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Perda Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

f. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

2.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga (BTT) merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. BTT dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa.

a. Pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemkab/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA berkenaan dengan pedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Perda Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Perda Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak dan retribusi daerah Pemkab/kota pada akhir TA berkenaan, maka Pemerintah Daerah akan menyalurkan kepada Pemerintah Desa pada Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemkab Balangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Balangan. Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Perda Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Perda Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Perda Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Perda Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Perda Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) TA berkenaan pada Perubahan APBD dianggarkan sesuai dengan LKPD Audited tahun sebelumnya.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD yang akan diterima kembali. Diperkirakan akan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dialokasikan untuk penyertaan modal ke Bank Kalsel dan PT. Air Minum Sanggam Balangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Pemkab Balangan selama TA 2025 dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemkab Balangan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp3.355.756.662.438,00 dan terealisasi sebesar Rp3.642.957.087.265,14 atau 108,56%, sehingga melebihi dari target anggaran Pendapatan sebesar Rp287.200.424.827,14 atau 8,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.326.129.918.038,91 terdapat penurunan sebesar Rp683.172.830.773,77 atau turun sebesar 15,79%.

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD Pemkab Balangan dalam APBD TA 2025 terealisasi sebesar Rp202.419.435.557,66 atau mencapai 138,32% dari anggaran sebesar Rp146.342.376.518,00. PAD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar

Rp26.517.701.390,75 atau 15,08% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp175.901.734.166,91. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan HPKDYD dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.3.1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Pemkab Balangan dalam APBD TA 2025 terealisasi sebesar Rp3.062.780.561.770,00 atau mencapai 107,41% dari anggaran sebesar Rp2.851.458.117.640,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.079.090.286.055,00 atau 26,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.141.870.847.825,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

2.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemkab Balangan dalam APBD TA 2025 terealisasi sebesar Rp377.757.089.937,48 atau mencapai 105,53% dari anggaran sebesar Rp357.956.168.280,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp369.399.753.890,48 atau 4420,07% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.357.336.047,00.

2.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemkab Balangan TA 2025 terealisasi sebesar Rp3.394.746.436.963,63 atau hanya mencapai 85,00% dari anggaran sebesar Rp3.993.665.099.438,85 sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp598.918.662.475,22 atau 15,00%. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp184.247.657.693,76 atau 5,15% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.578.994.094.657,39. Belanja Daerah terdiri dari:

2.3.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi Pemkab Balangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.045.244.791.336,05 atau hanya mencapai 84,18% dari anggaran sebesar Rp2.429.729.067.940,87 sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp384.484.276.604,82 atau 15,82%. Realisasi Belanja Operasi pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.646.447.905,70 atau 0,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.028.598.343.430,35.

2.3.2.2 Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Pemkab Balangan TA 2024 terealisasi sebesar Rp966.740.815.511,58 atau hanya mencapai 83,74%, dari anggaran sebesar Rp1.154.447.391.284,13 sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp187.706.575.772,55 atau 16,26%. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.433.861.190,46 atau 8,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.052.174.676.702,04.

2.3.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran BTT Pemkab Balangan TA 2025 terealisasi sebesar Rp3.388.752.199,00 atau hanya mencapai 35,75%, dari anggaran sebesar Rp9.478.109.524,85 sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.089.357.325,85 atau 64,25%. Realisasi BTT pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.031.252.199,00 atau 149,63% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.357.500.000,00.

2.3.2.4 Belanja Transfer

Anggaran Belanja Transfer Pemkab Balangan TA 2025 terealisasi sebesar Rp379.372.077.917,00 atau mencapai 94,84% dari anggaran sebesar Rp400.010.530.689,00 sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp20.638.452.772,00 atau 5,16%. Realisasi Belanja Transfer pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp117.491.496.608,00 atau 23,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp496.863.574.525,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (1) pengelolaan investasi daerah; (m) pengelolaan barang milik daerah; (n) pengelolaan dana cadangan; (o) pengelolaan utang daerah; (p) pembinaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Balangan pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan dan proses perencanaan sampai dengan penganggaran mulai dari APBD Murni sampai dengan Perubahan APBD termasuk di dalamnya proses pergeseran. Pergeseran APBD menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPANDA) yang merupakan hasil kerja sama dengan PT. Gesit Solusi Teknologi melalui sistem sewa *Dedicated Server* atau *Cloud Server.*

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan daerah yaitu **"Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan"** berdasarkan tema tersebut, terdapat 7 (Tujuh) prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Pembangunan Sarana Air Bersih;
   b. Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik;
   c. Optimalisasi Sanitasi Layak;
   d. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Bedah Rumah;
   e. Pembangunan Sarpras pada Pemukiman Kumuh untuk hunian layak;

f. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
g. Penambahan armada angkutan umum;
h. Penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan jalan (PJU, Halte, Marka, Rambu);
i. Sarana dan Prasarana Terminal Baru;
j. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
k. Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RTH;
l. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebun Raya dan Hutan Kota;
m. Pembebasan Lahan dan Appresial Hutan Kota, RTH dan Kebun Raya; dan
n. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Prioritas 2 : Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Pembangunan BBI Satelit;
   b. Pengadaan Benih Padi dan pengadaan Cadangan Benih Padi;
   c. Pengadaan dan Bantuan Sarpras Pertanian dan Perikanan;
   d. Peningkatan populasi ternak dengan pelaksanaan inseminasi buatan;
   e. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   f. Bantuan alat-alat pengolahan hasil perikanan;
   g. Pengembangan Destinasi Wisata;
   h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Destinasi Wisata;
   i. Pelatihan Pokdarwis dan Tenaga Kerja Pariwisata; dan
   j. Calender Of Event.

3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif;
   b. Sapras Mall Pelayanan Publik;
   c. Pelatihan kewirausahaan, Branding & Digital Marketing serta Pembinaan Gerakan Kewirausahaan Nasional UMKM;
   d. Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas produk / peningkatan teknologi usaha dan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM;
   e. Promosi Investasi/Event Investasi di Luar Daerah;
   f. Pembuatan Konten/Media Promosi Investasi;
   g. Penyusunan Profil Peta/Peluang Investasi;
   h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar;
   i. Fasilitasi sertifikasi halal dan hak merek; dan
   j. Peningkatan perekonomian khas desa melalui optimalisasi BUMDes.

4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Optimalisasi digitalisasi perpustakaan;
   b. Kerjasama peningkatan kualitas Pendidikan dengan Brighton dan Australia;
   c. Pembangunan/rehabilitasi/utilisasi, sarana prasarana sekolah PAUD,SD dan SMP;

d. Balangan pintar untuk siswa miskin;
e. Program Beasiswa;
f. Peningkatan kompetensi guru;
g. Pelatihan kelas parenting;
h. Penyelenggaraan paket A, B dan C;
i. BOS untuk seluruh SD dan SMP dan BOP untuk seluruh sekolah PAUD;
j. Honorarium Pengajar Ponpes;
k. Fasilitasi BPJS Naker bagi tenaga kerja rentan;
l. Pelatihan Clening Service, costumer service, Office boy, OperatorSarana Ro da 4, Balai Latihan Kerja, Operator Alat berat exavator &Tronton;
m. UHC dan Pembiayaan kapitasi untuk jasa bidan dalam pelayanan ibu hamil/bersalin;
n. Homecare;
o. Pengembangan RSUD Datu Kandang Haji, Relokasi puskesmas(Puskesmas Pirsus dan Tebing Tinggi) dan Rehabilitasi puskesmaspembantu (Pustu Inan, Kalahiyang, Baruh Bahinu Dalam) danRehabilitasi Poskesdes;
p. Pengadaan alat-alat Kesehatan;
q. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
r. Optimalisasi Germas dan PHBS;
s. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;
t. Penyelenggaraan kabupaten sehat; dan
u. Optimalisasi pelayanan dasar SPM Pendidikan dan Kesehatan.

5. Prioritas 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Optimalisasi sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan;
   b. Optimalisasi pelaksanaan srikandi;
   c. Optimalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip;
   d. Digitalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja;
   e. Optimalisasi Predikat SAKIP dan RB;
   f. Jaringan Internet Ditempat umum (free wifi);
   g. Command Center;
   h. Peremajaan perangkat perekaman KTP-el di kecamatan;
   i. Peningkatan SPM;
   j. Perluasan Penjaringan Inovasi;
   k. Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik;
   l. Optimalisasi Pelayanan Kependudukan Mobile dan Wilayah Terpencil;
   m. Peningkatan Manajemen Talenta (IP ASN);
   n. BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan optimalisasi akreditasi puskesmas;
   o. Layanan Adminduk di Daerah Terpencil;
   p. Penyelenggaraan Pilkades;
   q. Penegasan dan Penetapan Batas Desa; dan
   r. Penguatan dan Pengembangan Satu Data Balangan.

6. Prioritas 6 : Percepatan Penanganan Kemiskinan. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Optimalisasi Bansos;
   b. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
   c. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif;
   d. Balangan pintar SD SMP untuk siswa miskin;
   e. Beasiswa Tidak mampu; dan
   f. emenuhan SPM Bidang Sosial.
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Sunatan Massal;
   b. Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita;
   c. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak;
   d. Pemeliharaan Balai adat;
   e. Festival Dayak Meratus;
   f. Pengembangan cagar budaya Benteng Tundakan;
   g. Jelajah cagar budaya untuk seluruh SMP;
   h. Seminar dan pengadaan buku sejarah local;
   i. Pembinaan kesenian tradisional;
   j. Pengendalian Rawan Bencana;
   k. Pembangunan Gudang/Workshop Alat Kebencanaan;
   l. Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan/Relawan Bencana;
   m. Terciptanya Masyarakat Taat Perda;
   n. Patroli Pengamanan dan Pengawalan;
   o. Bantuan Parpol;
   p. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
   q. Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
   r. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik;
   s. Karya Bakti TNI; dan
   t. Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.1.1 Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran yang digunakan pada APBD TA 2025 adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
b. Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
c. Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan

d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan terkait tahapan perencanaan dan penjelasan mengenai tahapan dari penganggaran APBD Tahun Angaran 2025 sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan
   1) Perbup Balangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2024; dan
   2) Perbup Balangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025.

b. Tahapan Penganggaran
   1) APBD Murni Tahun 2025
      a) Kebijakan Umum APBD (KUA) TA 2025 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 19 Juli 2024 dengan nomor kesepakatan 130.5/006/PKS-BLG/2024 dan 188.342/06/DPRD-BLG/2024;
      b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 19 Juli 2024 dengan nomor kesepakatan 130.5/007/PKS-BLG/2024 dan 188.342/07/DPRD-BLG/2024;
      c) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 disetujui bersama pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan nomor kesepakatan 130.5/012/PEM-BLG/2024 dan 188.342/12/DPRD-BLG/2024;
      d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01077/KUM/2024 Tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025 ditetapkan pada 16 Desember 2024;
      e) Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025, ditetapkan tanggal 31 Desember 2024; dan
      f) Perbup Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025, ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 17 Komposisi APBD Murni TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan	**3.506.652.191.207,00**
Pendapatan Asli Daerah	**120.879.109.224,00**
Pendapatan Pajak Daerah	28.902.958.032,00
Hasil Retribusi Daerah	1.773.128.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.203.023.192,00
Pendapatan Transfer	**3.077.806.232.640,00**

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.000.010.875.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**307.966.849.343,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	307.966.849.343,00
Belanja	**3.839.707.519.631,00**
Belanja Operasi	**2.377.090.168.548,00**
Belanja Pegawai	654.584.717.264,00
Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684,00
Belanja Hibah	175.816.588.600,00
Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000,00
Belanja Modal	**978.440.141.942,00**
Belanja Modal Tanah	127.293.050.026,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.235.151.640,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.419.261.176,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	437.811.623.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000,00
Belanja Tak Terduga	**90.000.000.000,00**
Belanja Tak Terduga	90.000.000.000,00
Belanja Transfer	**394.177.209.141,00**
Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541,00
Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600,00
Surplus / (Defisit)	**(333.055.328.424,00)**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**443.055.328.424,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	443.055.328.424,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**110.000.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**333.055.328.424,00**

2) Pergeseran Anggaran Pertama

Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025 dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 agar Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025. Mekanisme dan kriteria pergeseran APBD Murni mengacu pada PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Pergeseran anggaran ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2025 dengan Perbup Balangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 71 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dengan komposisi APBD sebagai berikut:

Tabel 18 Komposisi APBD TA 2025 pada Pergeseran Anggaran Pertama

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Pendapatan	**3.506.652.191.207,00**	**3.294.854.554.207,00**	**(211.797.637.000,00)**
Pendapatan Asli Daerah	**120.879.109.224,00**	**120.879.109.224,00**	**-**
Pendapatan Pajak Daerah	28.902.958.032,00	28.902.958.032,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.773.128.000,00	1.773.128.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.203.023.192,00	60.203.023.192,00	-
Pendapatan Transfer	**3.077.806.232.640,00**	**2.866.008.595.640,00**	**(211.797.637.000,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.000.010.875.000,00	2.788.213.238.000,00	(211.797.637.000,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	77.795.357.640,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**307.966.849.343,00**	**307.966.849.343,00**	**-**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	307.966.849.343,00	307.966.849.343,00	-
Belanja	**3.839.707.519.631,00**	**3.877.558.975.816,00**	**37.851.456.185,00**
Belanja Operasi	**2.377.090.168.548,00**	**2.339.385.659.745,98**	**(37.704.508.802,02)**
Belanja Pegawai	654.584.717.264,00	733.666.802.394,98	79.082.085.130,98
Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684,00	1.423.936.833.526,00	(106.546.954.158,00)
Belanja Subsidi	-	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00
Belanja Hibah	175.816.588.600,00	163.336.948.825,00	(12.479.639.775,00)
Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000,00	16.205.075.000,00	-
Belanja Modal	**978.440.141.942,00**	**1.133.996.106.929,02**	**155.555.964.987,02**
Belanja Modal Tanah	127.293.050.026,00	124.807.850.026,00	(2.485.200.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.235.151.640,00	105.752.722.660,00	(4.482.428.980,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.419.261.176,00	359.729.464.365,50	62.310.203.189,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	437.811.623.900,00	538.079.345.277,52	100.267.721.377,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200,00	4.782.524.600,00	(14.330.600,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000,00	844.200.000,00	(40.000.000,00)
Belanja Tak Terduga	**90.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**(80.000.000.000,00)**
Belanja Tak Terduga	90.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)
Belanja Transfer	**394.177.209.141,00**	**394.177.209.141,00**	**-**
Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541,00	3.417.702.541,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600,00	390.759.506.600,00	-
Surplus / (Defisit)	**(333.055.328.424,00)**	**(582.704.421.609,00)**	**(249.649.093.185,00)**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**443.055.328.424,00**	**582.704.421.609,00**	**139.649.093.185,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	443.055.328.424,00	582.704.421.609,00	139.649.093.185,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**110.000.000.000,00**	**-**	**(110.000.000.000,00)**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00	-	(110.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	**333.055.328.424,00**	**582.704.421.609,00**	**249.649.093.185,00**

3) Bi Pergeseran Anggaran Kedua

Perubahan Kedua Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025 dilakukan untuk penyesuaian atas Alokasi DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian serta DAK Fisik Bidang Pendidikan. Selain itu pergeseran dilakukakan untuk penyesuaian anggaran belanja pegawai terkait pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024. Mekanisme dan kriteria pergeseran mengacu pada PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Pergeseran anggaran ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Perbup Balangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dengan komposisi APBD sebagai berikut:

Tabel 19 Komposisi APBD TA 2025 pada Pergeseran Anggaran Kedua

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Pendapatan	**3.506.652.191.207,00**	**3.315.998.163.207,00**	**(190.654.028.000,00)**
Pendapatan Asli Daerah	**120.879.109.224,00**	**120.879.109.224,00**	**-**
Pendapatan Pajak Daerah	28.902.958.032,00	28.902.958.032,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.773.128.000,00	1.773.128.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.203.023.192,00	60.203.023.192,00	-
Pendapatan Transfer	**3.077.806.232.640,00**	**2.887.152.204.640,00**	**(190.654.028.000,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.000.010.875.000,00	2.809.356.847.000,00	(190.654.028.000,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	77.795.357.640,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**307.966.849.343,00**	**307.966.849.343,00**	**-**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	307.966.849.343,00	307.966.849.343,00	-
Belanja	**3.839.707.519.631,00**	**3.898.702.584.816,00**	**58.995.065.185,00**
Belanja Operasi	**2.377.090.168.548,00**	**2.357.097.606.560,98**	**(19.992.561.987,02)**
Belanja Pegawai	654.584.717.264,00	735.015.739.494,98	80.431.022.230,98
Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684,00	1.454.785.595.241,00	(75.698.192.443,00)
Belanja Subsidi	-	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00
Belanja Hibah	175.816.588.600,00	148.851.196.825,00	(26.965.391.775,00)
Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000,00	16.205.075.000,00	-
Belanja Modal	**978.440.141.942,00**	**1.137.427.769.114,02**	**158.987.627.172,02**
Belanja Modal Tanah	127.293.050.026,00	124.807.850.026,00	(2.485.200.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.235.151.640,00	108.926.237.445,00	(1.308.914.195,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.419.261.176,00	359.901.964.365,50	62.482.703.189,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	437.811.623.900,00	538.079.345.277,52	100.267.721.377,52

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200,00	4.868.172.000,00	71.316.800,00
Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000,00	844.200.000,00	(40.000.000,00)
Belanja Tak Terduga	**90.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**(80.000.000.000,00)**
Belanja Tak Terduga	90.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)
Belanja Transfer	**394.177.209.141,00**	**394.177.209.141,00**	**-**
Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541,00	3.417.702.541,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600,00	390.759.506.600,00	-
Surplus / (Defisit)	**(333.055.328.424,00)**	**(582.704.421.609,00)**	**(249.649.093.185,00)**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**443.055.328.424,00**	**582.704.421.609,00**	**139.649.093.185,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	443.055.328.424,00	582.704.421.609,00	139.649.093.185,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**110.000.000.000,00**	**-**	**-**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto	**333.055.328.424,00**	**582.704.421.609,00**	**249.649.093.185,00**

4) Perubahan APBD TA 2025
   a) Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) TA 2025 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 14 Juli 2025 dengan nomor kesepakatan 130.13/176/PEM/VII/2025 dan 188.342/05/DPRD-BLG/2025;
   b) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) TA 2025 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 14 Juli 2025 dengan nomor kesepakatan 130.13/177/PEM/VII/2025 dan 188.342/06/DPRD-BLG/2025;
   c) Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 disetujui Bersama pada tanggal 18 Juli 2025 dengan nomor kesepakatan 130.13/194/PEM/VII/2025 dan 188.342/08/DPRD-BLG/2025;
   d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0750/KUM/2025 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 ditetapkan pada 13 Agustus 2025;
   e) Keputusan DPRD Nomor 188.342/20/DPRD-BLG/2025 tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Raperda Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025;
   f) Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025, ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025; dan
   g) Perbup Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025, ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025.

Tabel 20 Komposisi Perubahan APBD TA 2025

Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Pendapatan	**3.506.652.191.207,00**	**3.355.756.662.438,00**	**(150.895.528.769,00)**
Pendapatan Asli Daerah	**120.879.109.224,00**	**146.342.376.518,00**	**25.463.267.294,00**
Pendapatan Pajak Daerah	28.902.958.032,00	35.854.885.590,00	6.951.927.558,00
Hasil Retribusi Daerah	1.773.128.000,00	1.948.500.500,00	175.372.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	48.293.614.236,00	18.293.614.236,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.203.023.192,00	60.245.376.192,00	42.353.000,00
Pendapatan Transfer	**3.077.806.232.640,00**	**2.851.458.117.640,00**	**(226.348.115.000,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.000.010.875.000,00	2.773.662.760.000,00	(226.348.115.000,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	77.795.357.640,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**307.966.849.343,00**	**357.956.168.280,00**	**49.989.318.937,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	307.966.849.343,00	357.956.168.280,00	49.989.318.937,00
Belanja	**3.839.707.519.631,00**	**3.993.665.099.438,85**	**153.957.579.807,85**
Belanja Operasi	**2.377.090.168.548,00**	**2.429.729.067.940,87**	**52.638.899.392,87**
Belanja Pegawai	654.584.717.264,00	740.174.341.197,87	85.589.623.933,87
Belanja Barang dan Jasa	1.530.483.787.684,00	1.538.146.717.718,00	7.662.930.034,00
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	175.816.588.600,00	141.459.604.025,00	(34.356.984.575,00)
Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000,00	9.948.405.000,00	(6.256.670.000,00)
Belanja Modal	**978.440.141.942,00**	**1.154.447.391.284,13**	**176.007.249.342,13**
Belanja Modal Tanah	127.293.050.026,00	142.719.850.026,00	15.426.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.235.151.640,00	168.576.680.206,00	58.341.528.566,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	297.419.261.176,00	328.765.378.612,50	31.346.117.436,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	437.811.623.900,00	508.814.724.303,63	71.003.100.403,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200,00	4.274.298.136,00	(522.557.064,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000,00	1.296.460.000,00	412.260.000,00
Belanja Tak Terduga	**90.000.000.000,00**	**9.478.109.524,85**	**(80.521.890.475,15)**
Belanja Tak Terduga	90.000.000.000,00	9.478.109.524,85	(80.521.890.475,15)
Belanja Transfer	**394.177.209.141,00**	**400.010.530.689,00**	**5.833.321.548,00**
Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541,00	4.112.895.297,00	695.192.756,00
Belanja Bantuan Keuangan	390.759.506.600,00	395.897.635.392,00	5.138.128.792,00
Surplus / (Defisit)	**(333.055.328.424,00)**	**(637.908.437.000,85)**	**(304.853.108.576,85)**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**443.055.328.424,00**	**637.908.437.000,85**	**194.853.108.576,85**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	443.055.328.424,00	637.908.437.000,85	194.853.108.576,85
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**110.000.000.000,00**	**-**	**(110.000.000.000,00)**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00	-	(110.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	**333.055.328.424,00**	**637.908.437.000,85**	**304.853.108.576,85**

5) Pergeseran Setelah Perubahan APBD TA 2025

Perubahan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 dilakukan untuk penyesuaian anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, penyesuaian Rekening Belanja PPPK Paruh Waktu sesuai edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 26 Januari 2025 hal penganggaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, serta Usulan Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah. Perubahan Perbup ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan Perbup Balangan Nomor 59 Tahun 2025 tentang perubahan Perbup Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025.

Tabel 21 Komposisi Pergeseran Setelah Perubahan APBD TA 2025

Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
PENDAPATAN	**3.355.756.662.438,00**	**3.355.756.662.438,00**	**-**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**146.342.376.518,00**	**146.342.376.518,00**	**-**
Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	35.854.885.590,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.948.500.500,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.245.376.192,00	60.245.376.192,00	-
PENDAPATAN TRANSFER	**2.851.458.117.640,00**	**2.851.458.117.640,00**	**-**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.773.662.760.000,00	2.773.662.760.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	77.795.357.640,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**357.956.168.280,00**	**357.956.168.280,00**	**-**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	357.956.168.280,00	357.956.168.280,00	-
BELANJA	**3.993.665.099.438,85**	**3.993.665.099.438,85**	**-**
BELANJA OPERASI	**2.429.729.067.940,87**	**2.429.479.067.940,87**	**(250.000.000,00)**
Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	740.174.341.197,87	-
Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.537.896.717.718,00	(250.000.000,00)
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	141.459.604.025,00	141.459.604.025,00	-
Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	9.948.405.000,00	-
BELANJA MODAL	**1.154.447.391.284,13**	**1.154.697.391.284,13**	**250.000.000,00**
Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	142.719.850.026,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	168.826.680.206,00	250.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	328.765.378.612,50	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	508.814.724.303,63	508.814.724.303,63	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	4.274.298.136,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.296.460.000,00	-

Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
BELANJA TAK TERDUGA	**9.478.109.524,85**	**9.478.109.524,85**	**-**
Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	9.478.109.524,85	-
BELANJA TRANSFER	**400.010.530.689,00**	**400.010.530.689,00**	**-**
Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.112.895.297,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	395.897.635.392,00	-
SURPLUS / (DEFISIT)	**(637.908.437.000,85)**	**(637.908.437.000,85)**	**-**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**637.908.437.000,85**	**637.908.437.000,85**	**-**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	637.908.437.000,85	637.908.437.000,85	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**-**	**-**	**-**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**637.908.437.000,85**	**637.908.437.000,85**	**-**

3.1.2 Gambaran Umum Realisasi Anggaran

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Realisasi anggaran pada APBD TA 2025 dari sisi pendapatan sebesar Rp3.638.774.512.184,21 atau mencapai 108,51% dari anggaran sebesar Rp3.355.756.662.438,00 sedangkan dari sisi Belanja sebesar Rp3.393.896.995.063,63 atau hanya mencapai 84,98% dari anggaran sebesar Rp3.993.665.099.438,85 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 22 Realisasi Anggaran pada APBD TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**
Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89
Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14
PENDAPATAN TRANSFER	**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**107,41**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.773.662.760.000,00**	**2.982.829.851.860,00**	**107,54**
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75
Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43
Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89
Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**
Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**
Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07
BELANJA DAERAH	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**
BELANJA OPERASI	**2.429.729.067.940,87**	**2.045.244.791.336,05**	**84,18**
Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71
Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58
Belanja Hibah	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44
Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78
BELANJA MODAL	**1.154.447.391.284,13**	**966.740.815.511,58**	**83,74**
Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,72
Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59
BELANJA TAK TERDUGA	**9.478.109.524,85**	**3.388.752.199,00**	**35,75**
Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75
BELANJA TRANSFER	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**94,84**
Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	99,21
Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	375.291.719.420,00	94,80
PEMBIAYAAN NETTO	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**
Penggunaan SILPA	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**886.118.987.095,36**	**-**

a. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemkab Balangan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemkab Balangan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yang terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23 Pendapatan Daerah Pemkab Balangan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Asli Daerah	146.342.376.518,00	202.419.435.557,66	138,32	175.901.734.166,91
Pendapatan Transfer	2.851.458.117.640,00	3.062.780.561.770,00	107,41	4.141.870.847.825,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	357.956.168.280,00	377.757.089.937,48	105,53	8.357.336.047,00
Jumlah	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**

Berdasarkan tabel di atas Anggaran Pendapatan Pemkab Balangan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp3.355.756.662.438,00 dan terealisasi sebesar Rp3.642.957.087.265,14 atau 108,56%, sehingga melebihi dari target anggaran Pendapatan sebesar Rp287.200.424.827,14 atau 8,56%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp4.326.129.918.038,91 terdapat penurunan sebesar Rp683.172.830.773,77 atau 15,79%. Berikut tabel rincian Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024:

Tabel 24 Rincian Pendapatan Daerah Pemkab Balangan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**	**175.901.734.166,91**
Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89	17.931.079.059,50
Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96	2.551.421.071,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00	18.345.765.305,00
Lain - lain PAD yang sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14	137.073.468.731,41
PENDAPATAN TRANSFER	**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**107,41**	**4.141.870.847.825,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.773.662.760.000,00**	**2.982.829.851.860,00**	**107,54**	**4.034.340.838.511,00**
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75	3.394.844.581.540,00
Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10	387.094.307.000,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60	36.005.560.168,00
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43	81.484.551.213,00
Insentif Fiskal	22.269.663.000,00	22.296.663.000,00	100,12	20.597.049.000,00
Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89	114.314.789.590,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**	**107.530.009.314,00**
Pendapatan Bagi Hasil	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**	**8.357.336.047,00**
Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-	421.917.285,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07	7.935.418.762,00
Jumlah	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**

b. Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode TA yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, BTT dan Belanja Transfer sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 25 Pengelompokkan Belanja Daerah Pemkab Balangan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Operasi	2.429.729.067.940,87	2.045.244.791.336,05	84,18	2.028.598.343.430,35
Belanja Modal	1.154.447.391.284,13	966.740.815.511,58	83,74	1.052.174.676.702,04
Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
Belanja Transfer	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
Jumlah	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**

Berdasarkan tabel di atas Anggaran Belanja Pemkab Balangan TA 2025 ditetapkan sebesar Rp3.993.665.099.438,85 terealisasi sebesar Rp3.394.746.436.963,63 atau hanya mencapai 85,00%, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp598.918.662.475,22 atau 15,00%, lebih rinci anggaran dan realisasi Belanja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Belanja Daerah Pemkab Balangan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA OPERASI	**2.429.729.067.940,87**	**2.045.244.791.336,05**	**84,18**	**2.028.598.343.430,35**
Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71	528.346.491.670,00
Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58	1.292.777.489.260,70
Belanja Hibah	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44	198.460.439.999,65
Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78	9.013.922.500,00
BELANJA MODAL	**1.154.447.391.284,13**	**966.740.815.511,58**	**83,74**	**1.052.174.676.702,04**
Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39	8.119.274.250,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86	370.854.449.606,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78	274.000.297.829,17
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17	396.492.146.916,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,32	778.523.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59	1.929.984.600,00
BELANJA TAK TERDUGA	**9.478.109.524,85**	**3.388.752.199,00**	**35,75**	**1.357.500.000,00**
Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
BELANJA TRANSFER	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**94,84**	**496.863.574.525,00**
Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	99,21	1.730.148.884,00
Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	375.291.719.420,00	94,80	495.133.425.641,00
Jumlah	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Identifikasi mengenai faktor yang menjadi pendukung serta kendala dan hambatan menjadi sangat penting dalam rangka memetakan potensi serta kekurangan yang dimiliki sehingga dapat menjadi perhatian dan penentu kebijakan oleh Pemerintah Daerah.

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pencapaian kinerja diantaranya adalah:

a. Secara umum manajemen pembangunan di Pemkab Balangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat dikatakan bersinergi.
b. Pembinaan dan pelatihan ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM dilakukan secara baik dan berjenjang.
c. Tahapan pembangunan dari sisi perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
d. Pelaporan dan kinerja Pemerintah Daerah maupun pada level Perangkat Daerah telah disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta dalam rangka pengukuran kinerja instansi yang memadai.

3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam pencapaian kinerja Pemerintahan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

a. Masih minimnya koordinasi intern antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta pengelola barang dimasing-masing serta antar Perangkat Daerah.
b. Adanya keterbatasan tenaga teknis dari sisi kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
c. Adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yaitu dengan melakukan penggabungan beberapa SKPD sehingga SKPD yang baru bergabung harus melakukan penataan ulang kesiapan dan manajemen SDM untuk melaksanakan tugas.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keungan Daerah

Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka dalam SAP dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yang masing-masing menurut alur pikir proses dan dari sudut pandang profesi diberi batasan sebagai berikut:

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan SKPD dimaksud berupa LRA, LO, LPE dan CaLK.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan entitas akuntansi di lingkungan Pemkab Balangan berjumlah 32 (tiga puluh dua) unit organisasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 5 Badan, 16 Dinas dan 8 Kecamatan. Laporan Keuangan Daerah TA 2025 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkab Balangan sebagai entitas akuntansi.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemkab Balangan sebagai daerah otonomi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265), yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan

berupa Laporan Keuangan Pemkab Balangan yang meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK yang merupakan konsolidasian dari seluruh SKPD/unit kerja, kewajiban ini melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selain melaksanakan fungsi sebagai SKPD juga melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen Laporan Keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Daerah. Periode pelaporan yaitu Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD Kabupaten Balangan adalah:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemkab Balangan menggunakan nilai perolehan historis;
b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban;
d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

4.2.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan penambahan aset atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dan sumber periode berjalan tertentu. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah bersihnya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode berikutnya, dibukukan dalam ekuitas dana lancar.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
f. Kas atas pendapatan yang diterima satker/SKPD tanpa mekanisme anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
g. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
h. Pendapatan dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan

penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

i. Penyajian Pendapatan dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
j. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pendapatan dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan pendapatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
k. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi yang dipungut dari penyedia barang/jasa, diakui sebagai Pendapatan-LRA dengan akun Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemkab Balangan. Pengakuan Pendapatan-LRA ini didasarkan atas Bukti Memorial yang diterbitkan oleh masing-masing SKPD terkait;
l. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode terjadinya pengembalian;
m. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama; dan
n. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi pendapatan tersebut dilakukan dengan SP2D-LS dengan menggunakan akun BTT.

Pengukuran LRA:

a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu, maka asas bruto dapat dikecualikan;
c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada LRA dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksi. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu..

4.2.1.2 Belanja - LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemkab Balangan. Belanja diukur dan diakui dengan basis kas, merupakan unsur pembentuk LRA.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran;
b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

Klasifikasi menurut fungsi dirincikan dalam klasifikasi menurut urusan wajib dan pilihan serta dirinci lebih lanjut bidang urusan, program dan kegiatan.
Komponen belanja dalam LRA sebagai berikut:

a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
b. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
c. BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemkab; dan
d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D Nihil;
c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
d. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD;
e. Untuk belanja yang berasal dari pendapatan, yang pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, diakui pada saat pengesahan atas belanja oleh fungsi perbendaharaan;
f. Belanja dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
g. Untuk penyajian belanja dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada pedoman penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
h. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan belanja dana BOS setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dianggarkan di dalam anggaran belanja modal dan akan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi Pengukuran sebagai berikut:

a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
c. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA;
d. Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    1) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
3) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
4) Nilai rupiah pembelian barang atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan besaran minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

e. Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa;
f. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang penganggarannya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal;
g. Suatu pengeluaran belanja untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang subtansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan;
h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
i. Pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi;
j. Kriteria Pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang dapat dikapitalisir sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; dan
k. Belanja diukur dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian atas belanja terdiri dari:

a. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
b. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan dijelaskan dalam CaLK;

c. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
d. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.1.3 Transfer - LRA

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan DBH. Transfer Masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan DBH dari Pemerintah Provinsi sedangkan Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan DBH oleh pemerintah daerah.

Pengukuran:
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD; dan
b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer
a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam

LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan; dan

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan:
Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.1.4 Pembiayaan - LRA

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemkab Balangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemkab Balangan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemkab Balangan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemkab Balangan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
Pengukuran Pembiayaan:

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Dalam pengungkapan pada LRA/CaLK terkait dengan pembiayaan, hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai berikut:

a. Rincian dari Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir, dalam LPSAL juga memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Neraca

Kebijakan Akuntansi Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.2.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemkab yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Klasifikasi kas dan setara kas antara lain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS/BOP, Kas Dana Kapitasi dan BOK Puskesmas pada FKTP, Kas Lainnya dan Setara Kas.

a. Kas meliputi Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
b. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham obligasi;
c. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
d. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah, Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;
e. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD meliputi Rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
f. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
g. Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya;
h. Setara kas terdiri dari:
    a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan;
    b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 bulan;
i. Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau RKUD;
j. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
k. Pendapatan yang Belum Disetor adalah Kas di Bendahara Penerimaan baik yang berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah;
l. Kas transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah

daerah antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame;

m. Kas Lainnya digunakan untuk mencatat Kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
n. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
o. Sisa pengisian kas adalah Kas di Bendahara Pengeluaran, baik berupa uang tunai (*cash on hand)* dan/atau uang di bank, yang belum disetorkan ke kas daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU;
p. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan pajak dan non pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke kas negara/pihak ketiga;
q. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di Bendahara Pengeluaran;
r. Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
s. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
t. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran BLUD; dan
u. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan pajak dan non pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/Pihak ketiga. Contoh non pajak antara lain potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tabungan Perumahan, dan BPJS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti potongan PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain;
c. Kebijakan manajemen setara kas; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.2.3.2 Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemkab Balangan.
Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Klasifikasi piutang secara rinci dijelaskan dalam bagan akun standar:

a. Piutang Pajak
   Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Piutang Retribusi Daerah
   Piutang retribusi adalah piutang yang timbul akibat adanya pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemkab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
c. Piutang HPKDYD
   Piutang HPKDYD merupakan saldo piutang atas pembagian deviden dari penyertaan BUMN, BUMD dan Swasta yang masih akan diterima oleh Pemkab Balangan;
d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
   Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari:
   1) Piutang hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
   2) Piutang hasil kerja sama daerah;
   3) Piutang hasil pengelolaan Dana Bergulir;
   4) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
   5) Piutang pendapatan denda pajak daerah;
   6) Piutang pendapatan denda retribusi daerah;
   7) Piutang pendapatan dari pengembalian;
   8) Piutang pendapatan BLUD;
   9) Piutang yang timbul dari putusan pengadilan
      Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penatausahaan putusan pengadilan diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek apabila diharapkan akan diterima dalam jangka waktu kurang dari atau sampai dengan 12 bulan;
e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
   Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah pusat dan daerah, merupakan Piutang Dana Perimbangan;

f. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah terdiri dari:

1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
5) Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok;

g. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya mencakup Piutang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Piutang di atas.

Piutang Lainnya terdiri dari:

1) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara/daerah. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan;
2) Bagian Lancar Piutang lainnya Jangka Panjang

   Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan

h. Beban Dibayar Dimuka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak tersebut sampai akhir periode pelaporan belum diterima oleh Pemerintah.

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang

diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendagri mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemkab Balangan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
   2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
   3) Wajib pajak kooperatif;
   4) Wajib pajak likuid; dan
   5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
   b. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
   c. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
   d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun;
   b. Wajib pajak tidak kooperatif;
   c. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan
   d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang diatas 5 tahun;

b. Wajib pajak tidak ditemukan;
c. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
d. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
   2) Wajib pajak kooperatif;
   3) Wajib pajak likuid; dan
   4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
   2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan
   3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun;
   2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan
   3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Kualitas macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 5 tahun;
   2) Wajib pajak tidak ditemukan;
   3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
   4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek denda pajak, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan
d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus retribusi dikelompokan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kulitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh

tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah. Penyajian piutang:

a. Penyajian piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang;
b. Piutang harus disajikan dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan; dan
c. Selisih penjabaran pos piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Penyisihan Piutang. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah:

a. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;

b. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Pemberhentian Pengakuan

a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;

b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);

c. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;

d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel;

e. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan;

f. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
   2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
   3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus-buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;

g. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;

h. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya

harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau SK dari KPKNL dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara bersyarat mutlak;

i. Penghapusan secara bersyarat dan bersyarat mutlak dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

j. Khusus untuk penghapusan piutang yang berasal dari Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kabupaten Balangan;

k. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
   1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
   2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
   3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
   4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit;
   5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
   6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
   7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

4.2.3.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh

Pemerintah. Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

4.2.3.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda);
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, dan alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pemda;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
   1) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/ pemda;
   2) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda; dan
e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1) Barang habis pakai; 2) Barang tak habis pakai; dan 3) Barang bekas pakai.
Pengakuan persediaan:

a. Pengakuan persediaan diakui pada saat:
   1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan
   2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan

persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

b. Pengakuan beban persediaan diakui pada saat:

   Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

c. Selisih persediaan

   Selisih persediaan terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban persediaan. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil *stock opname*, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

Persediaan dicatat sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

   Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

   Harga pokok produksi meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis; dan

c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. (proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya).

   Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik, Dengan metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan baik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD maupun persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Pengendalian atas seluruh

persediaan yang dibeli dan digunakan, setiap penyimpan barang atau petugas lain yang difungsikan sebagai penyimpan barang wajib melaksanakan pencatatan dan penatausahaan persediaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.

Perlakuan atas persediaan yang rusak, usang dan kedaluwarsa diakui sebagai beban persediaan, sedangkan persediaan yang hilang apabila terbukti bukan kesalahan pengurus barang maka diakui sebagai beban non operasional.

4.2.3.5 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

a. Investasi permanen
   Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. lnvestasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
b. Investasi non permanen
   Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang

kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir); dan
4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemkab Balangan berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang;
b. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
c. Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
d. Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
e. Perubahan pos investasi jangka panjang.

4.2.3.6 Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari rampasan. Aset tetap baru dapat dicatat sebagai aset Pemkab Balangan pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemkab Balangan dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau dihibahkan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip substansi mengungguli formalitas maka aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam CaLK. Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemkab Balangan. Aset tetap dalam sengketa atau sedang menunggu proses pengadilan, harus dijelaskan dalam CaLK. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan mesin
   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan bangunan
   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, irigasi, dan jaringan
   Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset tetap lainnya
   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya atau pengerjaan aset tetap/pembelian aset tetap yang sampai akhir TA berkenaan belum terbayar oleh Pemkab Balangan namun sudah diserahterimakan ke Pemkab Balangan.

g. Akumulasi penyusutan
Akumulasi penyusutan merupakan gangguan penyusutan/ alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan; dan
g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Khusus aset berupa konstruksi diakui dengan berpedoman pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan atau BAST Pekerjaan Pertama.

Pengukuran aset tetap:
Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Komponen Biaya Perolehan;
b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan;
c. Pertukaran;
d. Penyusutan;
e. Penghentian dan Pelepasan;
f. Penilaian Kembali; dan
g. Penyusunan Neraca Awal.

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut

beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount).*
   1) Penambahan;
   2) Pelepasan;
   3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
   4) Mutasi aset tetap lainnya ;
b. Informasi penyusutan, meliputi
   1) Nilai penyusutan;
   2) Metode penyusutan yang digunakan;
   3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
   4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
c. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap Jika ada), meliputi:
   1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
   2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
   3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
   4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
d. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
   1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
   2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
   3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
   4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.2.3.7 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari

transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

4.2.3.8 Aset Lainnya

Aset lainnya aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka Panjang. Aset Lainnya, antara lain:

a. Aset Tak berwujud (ATB);
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
c. Aset Lain-lain.;
d. Uang muka rekening BUD; dan
e. Kas yang dibatasi penggunaannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. ATB

ATB didefinisikan sebagai aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

ATB diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
Dapat diidentifikasi;

1) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
2) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
3) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran ATB pada saat perolehan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut. ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut.

Penyajian dan pengungkapan ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

1) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
2) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa

manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;

3) Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
4) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
6) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
7) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
8) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan
9) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

Perlakuan Khusus, dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga;
2) *Software* yang dibangun/ dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB;
3) *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya;
4) *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB yang memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;
5) *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan; dan
6) Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

b. Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi

menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

c. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Penyajian dan pengungkapan
Aset lain lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.2.3.9 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban jangka pendek
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek antara lain utang bunga, utang belanja, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, dan utang jangka pendek lainnya.
Kewajiban jangka pendek terdiri dari:
1. Utang bunga;
2. Utang belanja;
3. Utang PFK;
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang

belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;

4. Bagian lancar utang jangka panjang;
5. Pendapatan diterima dimuka; dan
6. Utang jangka pendek lainnya

Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.
Pengukuran kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

Penyajian atau Pengungkapan, kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam:

a. Neraca; dan
b. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Perlakuan khusus kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang berbeda-beda. Perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek sebagai berikut:

a. Utang Bunga;
b. Utang PFK;
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
d. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
e. Utang Belanja.

b. Kewajiban jangka panjang
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
   a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
   b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan Kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

a. Pinjaman dalam negeri;
b. Kewajiban kemitraan; dan
c. Utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan pengungkapan Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
c. Syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang.

Perlakuan khusus kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUD dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang. Penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUD dapat berasal dari dalam negeri. Perlakuan khusus dari kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

a. Utang Dalam Negeri;
b. Kewajiban Kemitraan; dan
c. Utang Jangka Panjang Lainnya;

4.2.3.10 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan LPE serta diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam LPE yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari

dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.2.4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Struktur LO mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari Operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos luar biasa;
f. Pos luar biasa; dan
g. Surplus/Defisit-LO;

Pengakuan Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO diaku pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*;dan
   2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
b. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
   1) DBH diakui berdasarkan realisasi penerimaan DBH pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran DBH;
   2) DAU diakui berdasarkan Perpres yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan; dan
   3) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pengakuan Beban-LO
Beban diakui pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya

tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;

b. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah; dan
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional:

a. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
b. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan;
c. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional:

a. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional:
b. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya;
c. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Tujuan kebijakan akuntansi LAK adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca Pemkab Balangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Entitas Pelaporan Arus Kas:

a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD; dan
b. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan LAK adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini disajikan dan disusun oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

Penyajian Laporan Arus Kas:
a. LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris;
b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris; dan
c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
a. Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
c. Penerimaan Hibah;
d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
f. Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang;
c. Bunga;
d. Subsidi;
e. Hibah;

f. Bantuan Sosial;
g. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
h. Transfer Keluar.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam CaLK. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian LPE yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemkab Balangan dalam menyusun LPE pada SKPD, termasuk BLUD sesuai peraturan perundang-undang tentang BLUD, SKPKD, dan Pemerintah Daerah, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CaLK.

LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
d. Ekuitas akhir.

4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan CaLK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Balangan TA 2023 mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun demikian hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut tetap mengacu pada SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

Struktur dan isi CaLK:

a. CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK;
b. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP dan Kebijakan Akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya;
c. CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
   1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
   2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
   3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
   4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
   6) Informasi yang diharuskan oleh SAP dan Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
   7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
d. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
e. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi:

a. CaLK Harus Mengungkapkan Informasi yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum;
b. Untuk Membantu Pemahaman Para Pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:

1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada;
2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

c. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya:
   1) CaLK juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
   2) CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
      a. Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
      b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
      c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
      d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
      e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
   3) Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan CaLK:

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
d. Kebijakan akuntansi yang penting:
   1) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
   2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
   3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
   4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
   5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan;
e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
   1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
   2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan
   3) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, dalam realisasi anggaran juga menampung realisasi yang dianggarkan setelah APBD Perubahan ditetapkan. Penyajian LKPD adalah anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa adanya perubahan untuk Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan atau adanya perubahan setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan maka akan ditampung atau dilaporkan dalam LRA atau hanya menyajikan dari sisi realisasi, adapun rincian realisasi anggaran tersaji pada tabel berikut:

Tabel 27 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dengan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**
Pendapatan Asli Daerah	146.342.376.518,00	202.419.435.557,66	138,32	175.901.734.166,91
Pendapatan Transfer	2.851.458.117.640,00	3.062.780.561.770,00	107,41	4.141.870.847.825,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	357.956.168.280,00	377.757.089.937,48	105,53	8.357.336.047,00
Belanja Daerah	**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**
Belanja Operasi	2.429.729.067.940,87	2.045.244.791.336,05	84,18	2.028.598.343.430,35
Belanja Modal	1.154.447.391.284,13	966.740.815.511,58	83,74	1.052.174.676.702,04
Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
Belanja Transfer	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
Surplus / (Defisit)	**(637.908.437.000,85)**	***248.210.650.301,51***	***(38,91)***	**747.135.823.381,52**
Penerimaan Pembiayaan	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.772.613.619,33
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	750.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**(109.227.386.380,67)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**-**	**886.118.987.095,36**	**-**	**637.908.437.000,85**

Sedangkan lebih rinci Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dengan Realisasi TA 2024 tersaji pada **Lampiran 1**.

Sedangkan rincian realisasi anggaran dengan anggaran berdasarkan pergeseran anggaran setelah perubahan APBD TA 2025 pada sisi anggaran berbeda dengan yang disajikan pada laporan keuangan perbedaan ini terdapat pada sisi persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja, adapun rincian Realisasi Anggaran dengan Anggaran Mengacu Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD TA 2025 tersaji pada **Lampiran 2**

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya dan penjelasan lainnya yang dinilai perlu akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab ini.

Realisasi Pendapatan pada TA 2025 sebesar Rp3.642.957.087.265,14 atau mencapai 108,56% dari anggaran sebesar Rp3.355.756.662.438,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp683.172.830.773,77 atau 15,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.326.129.918.038,91.

Realisasi Pendapatan TA 2025 berasal dari PAD sebesar Rp202.419.435.557,66 , Pendapatan Transfer sebesar Rp3.062.780.561.770,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp377.757.089.937,48. Perkembangan Realisasi Pendapatan dari TA 2021 sampai dengan TA 2025 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2 Realisasi Pendapatan Pemkab Balangan TA 2021 s.d TA 2025

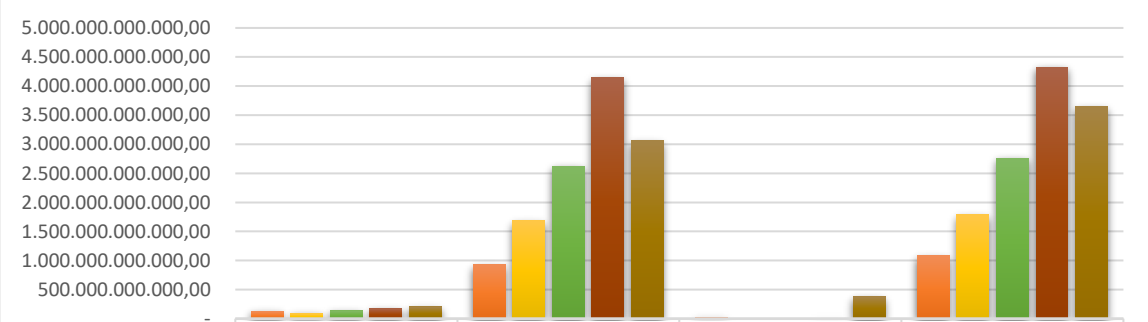

	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah
2021	130.505.127.359,71	928.215.278.041,00	26.657.242.828,00	1.085.377.648.228,71
2022	92.767.033.520,54	1.686.057.079.199,00	6.539.410.279,00	1.785.363.522.998,54
2023	137.007.405.232,01	2.622.936.320.422,00	600.000.000,00	2.760.543.725.654,01
2024	175.901.734.166,91	4.141.870.847.825,00	8.357.336.047,00	4.326.129.918.038,91
2025	202.419.435.557,66	3.062.780.561.770,00	377.757.089.937,48	3.642.957.087.265,14

Realisasi Belanja TA 2025 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.045.244.791.336,05, Belanja Modal sebesar Rp966.740.815.511,58, BTT sebesar Rp3.388.752.199,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp379.372.077.917,00.

Perkembangan Realisasi Belanja dari TA 2021 sampai dengan TA 2025 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3 Realisasi Belanja Pemkab Balangan TA 2021 s.d TA 2025

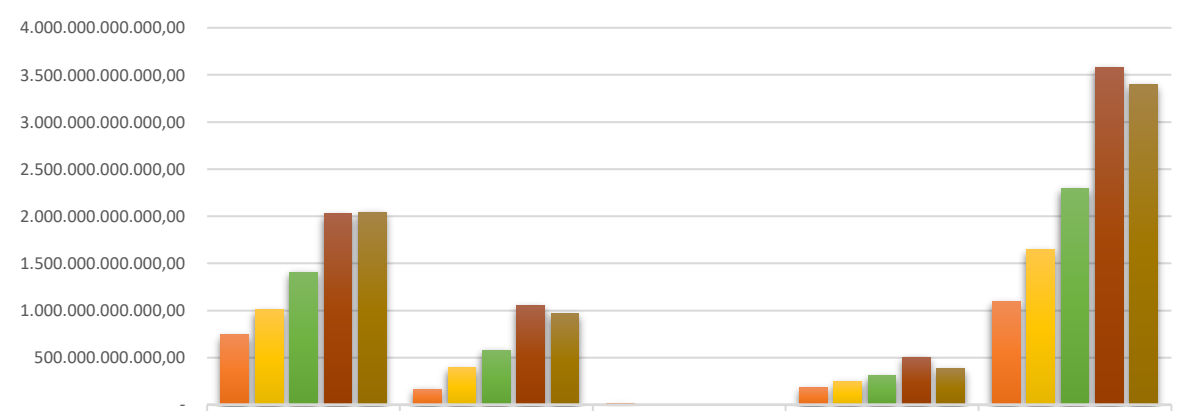

	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Transfer	Jumlah
2021	741.000.174.811,19	163.777.645.493,83	8.386.635.090,00	181.531.462.000,00	1.094.695.917.395,02
2022	1.009.312.423.852,08	391.771.955.326,03	1.203.971.500,00	242.402.786.355,00	1.644.691.137.033,11
2023	1.403.981.021.061,62	580.674.088.157,03	1.602.500.000,00	306.086.953.047,00	2.292.344.562.265,65
2024	2.028.598.343.430,35	1.052.174.676.702,04	1.357.500.000,00	496.863.574.525,00	3.578.994.094.657,39
2025	2.045.244.791.336,05	966.740.815.511,58	3.388.752.199,00	379.372.077.917,00	3.394.746.436.963,63

Berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp3.642.957.087.265,14 dan Realisasi Belanja sebesar Rp3.394.746.436.963,63 maka terdapat surplus anggaran pada TA 2025 sebesar Rp248.210.650.301,51. Sedangkan realisasi Pembiayaan (*Netto*) pada TA 2025 sebesar Rp637.908.336.793,85 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan *Netto* menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp886.118.987.095,36. LRA terdiri atas akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2025 disajikan pada uraian selengkapnya masing-masing akun dijelaskan sebagai berikut.

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.	**Pendapatan**	**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**4.326.129.918.038,91**

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp3.642.957.087.265,14 atau mencapai 108,56% dari anggaran sebesar Rp3.355.756.662.438,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp683.172.830.773,77 atau 15,79% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp4.326.129.918.038,91. Pendapatan terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 dengan 2024 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 28 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	146.342.376.518,00	202.419.435.557,66	138,32	175.901.734.166,91
2	Pendapatan Transfer	2.851.458.117.640,00	3.062.780.561.770,00	107,41	4.141.870.847.825,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	357.956.168.280,00	377.757.089.937,48	105,53	8.357.336.047,00
Jumlah		**3.355.756.662.438,00**	**3.642.957.087.265,14**	**108,56**	**4.326.129.918.038,91**

5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
		146.342.376.518,00	**202.419.435.557,66**	**175.901.734.166,91**

Realisasi PAD TA 2025 sebesar Rp202.419.435.557,66 atau mencapai 138,32% dari anggaran sebesar Rp146.342.376.518,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.517.701.390,75 atau 15,08% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp175.901.734.166,91. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan HPKDYD dan Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi PAD TA 2025 dengan 2024 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	35.854.885.590,00	37.607.251.720,00	104,89	17.931.079.059,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.948.500.500,00	1.967.294.243,00	100,96	6.491.994.812,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	100,00	18.345.765.305,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.245.376.192,00	114.551.275.358,66	190,14	133.132.894.990,41
Jumlah		**146.342.376.518,00**	**202.419.435.557,66**	**138,32**	**175.901.734.166,91**

5.1.1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
		35.854.885.590,00	**37.607.251.720,00**	**17.931.079.059,50**

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang telah dipungut oleh Pemkab Balangan berdasarkan Perda Kabupaten Balangan. Sesuai Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/40/kum Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan untuk melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Dasar Hukum Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Jenis Pajak

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum
1	Pajak Reklame	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
2	Pajak Air Tanah	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
3	Pajak Sarang Burung Walet	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - PBJT Makanan dan/atau Minuman - PBJT Tenaga Listrik - PBJT Jasa Perhotelan - PBJT Jasa Parkir - PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp37.607.251.720,00 atau mencapai 104,89% dari anggaran sebesar Rp35.854.885.590,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.676.172.660,50 atau 109,73% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp17.931.079.059,50. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dengan 2024 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 31 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pajak Reklame	**84.362.852,00**	**102.844.316,00**	**121,91**	**79.934.002,00**
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.362.852,00	102.844.316,00	121,91	79.934.002,00
	Pajak Air Tanah	**25.000.000,00**	**25.956.504,00**	**103,83**	**24.076.662,80**
2	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	25.956.504,00	103,83	24.076.662,80
	Pajak Sarang Burung Walet	**2.066.400,00**	**918.000,00**	**44,43**	**918.000,00**
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.066.400,00	918.000,00	44,43	918.000,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	**2.266.612.800,00**	**3.376.751.892,00**	**148,98**	**1.281.019.834,00**
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.266.612.800,00	3.376.751.892,00	148,98	1.281.019.834,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	**750.000.000,00**	**874.478.570,00**	**116,60**	**967.118.538,00**
5	PBB-P2	750.000.000,00	874.478.570,00	116,60	967.118.538,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**1.632.103.085,00**	**1.739.737.850,00**	**106,59**	**1.150.694.800,00**
6	BPHTB-Pemindahan Hak	1.432.103.085,00	1.506.528.250,00	105,20	967.153.600,00
7	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	233.209.600,00	116,60	183.541.200,00
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	**13.094.740.453,00**	**16.140.488.688,00**	**123,26**	**14.427.317.222,70**
8	PBJT-Restoran	350.000.000,00	415.478.394,00	118,71	395.434.394,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.000.000.000,00	10.536.638.204,00	131,71	8.828.935.181,70
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.700.000.000,00	5.125.712.446,00	109,06	5.172.278.674,00
11	PBJT-Hotel	2.500.000,00	20.694.454,00	827,78	-
12	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	10.955.453,00	8.603.171,00	78,53	13.162.973,00
13	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	20.500.000,00	32.501.019,00	158,54	16.776.000,00
14	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00	-	-	-
15	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	785.000,00	861.000,00	109,68	730.000,00
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**9.000.000.000,00**	**8.153.442.100,00**	**90,59**	**-**
16	Opsen PKB	9.000.000.000,00	8.153.442.100,00	90,59	-
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**9.000.000.000,00**	**7.192.633.800,00**	**79,92**	**-**
17	Opsen BBNKB	9.000.000.000,00	7.192.633.800,00	79,92	-
Jumlah		**35.854.885.590,00**	**37.607.251.720,00**	**104,89**	**17.931.079.059,50**

Berikut adalah penjelasan atas Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025:

1. Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2025 sebesar Rp102.844.316,00 atau mencapai 121,91% dari anggaran Rp84.362.852,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.910.314,00 atau 28,66% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp79.934.002,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan objek Pajak Reklame hasil dari kegiatan pendataan;
2. Realisasi Pajak Air Tanah TA 2025 sebesar Rp25.956.504,00 atau mencapai 103,83% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.879.841,20 atau 7,81% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.076.662,80. Kenaikan ini disebabkan karena penerimaan pada Tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember sudah menggunakan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang baru, sedangkan 2024 untuk perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah bulan Januari 2024 masih menggunakan perhitungan yang lama;
3. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 sebesar Rp918.000,00 atau hanya mencapai 44,43% dari anggaran sebesar Rp2.066.400,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, ini bisa dilihat dari WP yang aktif membayar dan melapor hanya 2 WP

dari 112 WP dan Realisasi tersebut jumlahnya sama dengan realisasi pada TA 2024;

4. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya TA 2025 sebesar Rp3.376.751.892,00 atau mencapai 148,98% dari anggaran sebesar Rp2.266.612.800,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.095.732.058,00 atau 163,60% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.281.019.834,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan volume produksi PT. BASR di Tahun 2025 dan penambahan objek Pajak yaitu CV Adiraja Borneo;
5. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2025 sebesar Rp874.478.570,00 atau mencapai 116,60% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp92.639.968,00 atau 9,58% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp967.118.538,00 ini disebabkan karena adanya penurunan pembayaran piutang PBB-P2 selama Tahun 2025, sedangkan Tahun 2024 penerimaan dari piutang meningkat;
6. Realisasi BPHTB-Pemindahan Hak TA 2025 sebesar Rp1.506.528.250,00, atau mencapai 105,20% dari anggaran sebesar Rp1.432.103.085,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp539.374.650,00 atau 55,77% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp967.153.600,00. Kenaikan ini disebabkan karena seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat, pada Tahun 2025 ini masyarakat banyak yang melakukan proses peralihan hak;
7. Realisasi BPHTB-Pemberian Hak Baru TA 2025 sebesar Rp233.209.600,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau mencapai 116,60% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.668.400,00 atau 27,06% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp183.541.200,00. Kenaikan ini disebabkan karena pada Tahun 2025 proses pemberian hak baru baik dari kelanjutan pelepasan hak maupun di luar pelepasan hak semakin bertambah;
8. Realisasi PBJT-Restoran TA 2025 sebesar Rp415.478.394,00 atau mencapai 118,71% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.044.000,00 atau 5,07% jika dibandingkan dengan realisasi pajak rumah makan dan sejenisnya TA 2024 sebesar Rp395.434.394,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan objek Pajak dari hasil kegiatan pendataan;
9. Realisasi PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering TA 2025 sebesar Rp10.536.638.204,00 atau mencapai 131,71% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.707.703.022,30 atau 19,34% jika dibandingkan dengan realisasi

Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya TA 2024 sebesar Rp8.828.935.181,70. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan objek Pajak dan penerimaan dari katering perusahaan meningkat karena semakin tinggi permintaan dari konsumen;

10. Realisasi PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain TA 2025 sebesar Rp5.125.712.446,00 atau mencapai 109,06% dari anggaran sebesar Rp4.700.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp46.566.228,00 atau 0,90% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 2024 sebesar Rp5.172.278.674,00. Penurunan ini disebabkan karena PT. PLN memberlakukan diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 450 VA - 2.200 VA pada awal tahun (Januari-Februari) dan kembali berlaku pada Juni-Juli 2025;
11. Realisasi PBJT-Hotel TA 2025 sebesar Rp20.694.454,00 atau mencapai 827,78% dari anggaran sebesar Rp2.500.000,00. Untuk PBJT-Hotel TA 2024 tidak adanya realisasi dikarenakan belum ada kategori hotel, baru ada di tahun 2025 yaitu Hotel Ar-Raudah;
12. Realisasi PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cotage TA 2025 sebesar Rp8.603.171,00 atau mencapai 78,53% dari anggaran sebesar Rp10.955.453,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.559.802,00 atau 34,64% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage TA 2024 sebesar Rp13.162.973,00. Penurunan ini disebakan karena di tahun 2025 mulai beroperasinya Hotel Ar-Raudah yang mengakibatkan tingkat hunian di penginapan dan sejenisnya berkurang karena sebagian beralih ke Hotel yang baru;
13. Realisasi PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir TA 2025 sebesar Rp32.501.019,00 atau mencapai 158,54% dari anggaran sebesar Rp20.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.725.019,00 atau 93,74% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp16.776.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan objek Pajak dari hasil pendataan;
14. Realisasi PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana TA 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Tidak adanya realisasi dikarenakan yang semula ada agenda konser musik di tahun 2025 yang akhirnya agenda musik tersebut dibatalkan;
15. Realisasi PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran (Fitness Center) TA 2025 sebesar Rp861.000,00 atau mencapai 109,68% dari anggaran sebesar Rp785.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp131.000,00 atau 17,95% jika

dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp730.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan objek Pajak dari pusat kebugaran;

16. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 sebesar Rp8.153.442.100,00 atau mencapai 90,59% dari anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,00. Untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2024 tidak adanya realisasi dikarenakan masih termasuk penerimaan Dana Bagi Hasil PKB; dan
17. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 sebesar Rp 7.192.633.800,00 atau mencapai 79,92% dari anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,00. Untuk Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2024 tidak adanya realisasi dikarenakan masih termasuk penerimaan Dana Bagi Hasil BBNKB.

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.	**Retribusi Daerah**	**1.948.500.500,00**	**1.967.294.243,00**	**6.491.994.812,00**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Balangan. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut dengan dasar hukum sebagai berikut:

Tabel 32 Dasar Hukum Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Jenis Retribusi

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2025 - Perbup Nomor 68 Tahun 2022
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 9 Tahun 2025
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 10 Tahun 2025
4	Retribusi Pelayanan Pasar	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 8 Tahun 2025
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	- Perbup Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 89 Tahun 2022
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 46 Tahun 2020
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 55 Tahun 2020
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 8 Tahun 2025
10	Retribusi Terminal	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 91 Tahun 2022
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbup Nomor 7 Tahun 2025
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	- Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 - Perbub Nomor 14 Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp1.967.294.243,00 atau mencapai 100,96% dari anggaran sebesar Rp1.948.500.500,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.524.700.569,00 atau 69,70% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.491.994.812,00. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Jasa Umum	**627.310.500,00**	**641.155.000,00**	**102,21**	**5.101.041.241,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	171.732.500,00	171.232.500,00	99,71	574.465.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	3.940.573.741,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	278.504.000,00	243.581.500,00	87,46	391.928.500,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	116.197.000,00	154,93	75.000.000,00
5	Retribusi Pelataran	1.600.000,00	2.262.000,00	141,38	1.740.000,00
6	Retribusi Los	100.474.000,00	107.882.000,00	107,37	117.334.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	**871.190.000,00**	**850.432.000,00**	**97,62**	**804.240.000,00**
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	57.260.000,00
8	Retribusi Penyewaan Bangunan	138.250.000,00	136.025.000,00	98,39	152.747.500,00
9	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000,00	6.674.000,00	13,35	3.288.000,00
10	Retribusi Pemakaian Ruangan	96.000.000,00	111.866.000,00	116,53	116.025.500,00
11	Retribusi Pemakaian Alat	90.000.000,00	185.461.000,00	206,07	65.506.000,00
12	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	221.940.000,00	183.620.000,00	82,73	197.910.000,00
13	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	55.000.000,00	61.988.000,00	112,71	63.000.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000,00	51.000.000,00	255,00	1.000.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.000.000,00	100.510.000,00	100,51	100.240.000,00
16	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	100.000.000,00	13.288.000,00	13,29	47.263.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	**450.000.000,00**	**475.707.243,00**	**105,71**	**586.713.571,00**
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00	455.768.439,00	101,28	586.713.571,00
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	19.938.804,00	-	-
Jumlah		**1.948.500.500,00**	**1.967.294.243,00**	**100,96**	**6.491.994.812,00**

Penjelasan atas Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebagai berikut:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 sebesar Rp171.232.500,00 atau mencapai 99,71% dari anggaran sebesar Rp171.732.500,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp403.232.500,00 atau 70,19% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp574.465.000,00. Penurunan disebabkan karena terhitung bulan Mei tahun 2025 Puskesmas bertransformasi ke dalam Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Balangan;

2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 sebesar Rp243.581.500,00 atau mencapai 87,46% dari anggaran sebesar Rp278.504.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp148.347.000,00 atau 37,85% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp391.928.500,00. Penurunan terjadi karena banyaknya toko yang tutup/tidak layak sewa yang menyebabkan pengurangan penerimaan retribusi sampah;
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 sebesar Rp116.197.000,00 atau mencapai 154,93% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.197.000,00 atau 54,93% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp75.000.000,00. Kenaikan terjadi karena penambahan titik parkir pada gedung sanggam yang berimbas pada meningkatnya penerimaan retribusi parkir itu sendiri;
4. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 terdiri dari:
   a. Retribusi Pelataran dengan realisasi sebesar Rp2.262.000,00 atau mencapai 141,38% dari anggaran sebesar Rp1.600.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp522.000,00 atau 30,00% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.740.000,00. Kenaikan terjadi karena banyaknya para pedagang menggelar lapak-lapak di Pasar Paringin dan Juai pada hari pasar mingguan yang secara tidak langsung menambah wajib retribusi; dan
   b. Retribusi Los dengan realisasi sebesar Rp107.882.000,00 atau mencapai 107,37% dari anggaran sebesar Rp100.474.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.452.000,00 atau 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp117.334.000,00. Penurunan terjadi karena banyaknya los kosong yang tidak terisi dan pedagang lebih memilih untuk menggelar dagangannya di halaman/pelataran pasar;
5. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp440.026.000,00 atau mencapai 117,58% dari anggaran sebesar Rp374.250.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Penyewaan Tanah, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Alat. Realisasi tersebut mengalami kenaikan besar Rp45.199.000,00 atau 11,45% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp394.827.000,00. Kenaikan terjadi karena

meningkatnya tingkat hunian kamar pada wisma menyandar seiring banyaknya even/acara yang mendatangkan sejumlah artis-artis dan band dari ibukota yang diadakan di Balangan pada tahun 2025;

6. Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan TA 2025 sebesar Rp183.620.000,00 atau mencapai 82,73% dari anggaran sebesar Rp221.940.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.290.000,00 atau 7,22% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp197.910.000,00. Penurunan disebabkan banyaknya toko di Paringin yang belum melakukan kewajiban pembayaran sewa tokonya;
7. Realisasi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha TA 2025 sebesar Rp61.988.000,00 atau mencapai 112,71% dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.012.000,00 atau 1,61% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp63.000.000,00. Penurunan terjadi dikarenakan proses relokasi toko-toko yang ada diterminal paringin ke tempat yang baru yang masih dalam tahap pengerjaan;
8. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2025 sebesar Rp164.798.000,00 atau mencapai 74,91% dari anggaran sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan. Retribusi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.295.000,00 atau 10,97% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp148.503.000,00. Kenaikan penerimaan terjadi dikarenakan banyaknya permintaan pasar berupa benih ikan dibarengi dengan kondisi cuaca yang memungkinkan dalam proses reproduksi tersebut serta adanya peningkatan hasil produksi kebun karet milik pemerintah daerah sebagai penerimaan retribusi usaha milik daerah sektor Perkebunan;
9. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp455.768.439,00 atau mencapai 101,28% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp130.945.132,00 atau 22,32% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp586.713.571,00. Penurunan yang terjadi dikarenakan berkurangnya permohonan izin pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dari sektor bangunan berskala besar; dan
10. Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2025 sebesar Rp19.938.804,00 dan tidak dianggarkan. Sementara untuk realisasi TA 2024 tidak ada realisasi.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	48.293.614.236,00	**48.293.614.236,00**	**18.345.765.305,00**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan HPKDYD merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemkab Balangan berupa bagian laba dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank. Realisasi Pendapatan HPKDYD TA 2025 sebesar Rp48.293.614.236,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp48.293.614.236,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.947.848.931,00 atau 163,24% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp18.345.765.305,00.

Realisasi Pendapatan HPKDYD dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2025. Realisasi Pendapatan HPKDYD merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp48.293.614.236,00 terdiri dari penerimaan dividen Bank Kalsel sebesar Rp47.772.172.110 dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp521.442.126.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	60.245.376.192,00	**114.551.275.358,66**	**133.132.894.990,41**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 sebesar Rp114.551.275.358,66 atau mencapai 190,14% dari anggaran sebesar Rp60.245.376.192,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.581.619.631,75 atau 16,22% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp133.132.894.990,41. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	136.400.000,00	-	-
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	520.459.000,00	-	-
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	230.220.290,00	-	-
4	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	15.173.600,00	-	-

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	31.000.000,00
6	Hasil Sewa BMD	121.304.666,00	290.520.000,00	239,50	90.266.666,00
7	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.124.071.526,00	31.960.898.579,44	521,89	23.357.913.834,91
8	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	94.081.057,11	-	70.436.534,01
9	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	16.695.000,00	-	-
10	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	284.931.507,00	7,12	7.043.835.616,43
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	546.974.935,00	-	-
12	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	45.062.596,83	-	3.678.947.067,68
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	7.860.555.289,85	-	1.525.329.059,78
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	13.773,00
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	333.095,00
16	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	125.898.580,00
17	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	1.400,00
18	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	313.449,00	-	166.075,00
19	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	39.960,00
20	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	449.501,00	-	14.980.480,00
21	Pendapatan Denda PBB-P2	-	54.567.740,00	-	39.517.728,00
22	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	-	1.038.666,00	-	-
23	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	-	69.538.356,00	-	-
24	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	-	10.183,00	-	-
25	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	-	107.583,00	-	-
26	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	-	7.950,00	-	-
27	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	42.021.000,00	-	-
28	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	-	597.900,00	-	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	10.000,00	-	40.000,00
30	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	1.879.935.424,00	-	3.223.414.905,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	1.260.000,00	-	51.286.424,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	1.810.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	426.606.137,00	-	-
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	1.302.780.000,00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD	-	-	-	85.680.000,00
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	111.382.000,00	-	-
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	2.910.884,00	-	-
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	318.576.000,00	-	-
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	18.897.500,00	-	-
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	4.300.908.077,33	-	-
41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-	510.000,00
42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	-	-	-	830.368.300,00
43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	44.717.235,14	-	-
44	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa	-	17.862.000,00	-	-
45	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	1.130.400,00	-	-
46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	50.000.000,00	-	100.524.450,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
47	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	588.139,00	-	-
48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	-	-	18.000.000,00
49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	71.673.163,80	-	-
50	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangun an Gedung Kantor	-	557.038.431,55	-	-
51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	-	-	-	2.468.445.929,53
52	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	-	185.366.931,32	-	-
53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	-	61.497,00	-	-
54	Pendapatan BLUD		51.338.498.906,46	-	-
55	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	50.000.000.000,00	1.952.687.057,83	3,91	47.062.084.929,07
56	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	-	279.000.000,00	-	-
57	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF) (Rening Hilang)	-	10.821.541.391,00	-	42.009.270.183,00
Jumlah		**60.245.376.192,00**	**114.551.275.358,66**	**190,14**	**133.132.894.990,41**

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah sebagian besar merupakan penerimaan yang tidak ditargetkan atau tidak dianggarkan kecuali penerimaan yang bersifat rutin seperti Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, Hasil Sewa BMD, Jasa Giro pada Kas Daerah, Jasa Giro pada Kas di Bendahara, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Dari Lain-lain PAD yang sah juga terdapat pendapatan yang pengakuannya berpindah/berubah ke rekening lain menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun beberapa pendapatan diuraiankan secara singkat sebagai berikut:

1) Realisasi pendapatan hanya ada di tahun 2025, tidak ada realisasi di tahun 2024:
   a) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran, denda keterlambatan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas berbagai pekerjaan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
   b) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, denda, dan temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun

Anggaran 2024 atas berbagai pekerjaan belanja modal bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

c) Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara berupa pengembalian kelebihan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Panitia dan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan belanja barang dan jasa;

d) Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua atau lelang kendaraan dinas milik pemerintah yang sudah tidak digunakan lagi;

e) Pendapatan dari Setoran pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada pihak ketiga / pihak lainnya TA 2024;

f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa;

g) Pendapatan dari Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Eks Mobil Dinas Ketua DPRD Balangan;

h) Pendapatan dari Setoran Kelebihan Pembayaran TA 2024 Pekerjaan Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas;

i) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;

j) Pendapatan dari Pengembalian Temuan KONI pada Pemeriksaan LKPD TA. 2024;

k) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung akibat Kekurangan Volume Pemeliharaan Rumah Dinas;

l) Pendapatan dari Denda Opsen Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

m) Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran belanja makanan dan minuman hasil koordinasi dengan Tim Pemeriksa BPK;

n) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Penerima Beasiswa Seribu Sarjana; dan

o) Pendapatan dari Pengembalian atas Temuan BPK terhadap Dana Hibah Polda Tahun 2024 merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengembalian dana hibah kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas hasil pemeriksaan BPK terkait Belanja Hibah Uang untuk pembangunan sarana dan prasarana Mako Polda Kalimantan Selatan Tahun 2024.

2) Penjelasan pendapatan terdapat di tahun 2025 dan 2024:

a) Pendapatan dari Jasa Giro pada Kas Daerah disebabkan saldo pada Kas Daerah yang cukup tinggi selama TA 2025 yang disebabkan rendahnya/lambannya serapan anggaran belanja pada Tahun 2025;

b) Pendapatan dari Remunerasi Dana Alokasi Umum *Treasury Deposit Facility (TDF)* yang diterima pemerintah daerah dari penempatan sementara Dana Alokasi Umum (DAU) di rekening khusus yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility (TDF);*
c) Pendapatan dari Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan atas LHP BPK TA 2024;
d) Pendapatan dari Jasa Layanan BLUD pada 12 Puskesmas di Kabupaten Balangan yang merupakan penerimaan berasal dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh 12 Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
e) Pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berasal dari pencairan jaminan pelaksanaan atau klaim garansi bank atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diselesaikan atau tidak memenuhi ketentuan kontrak oleh penyedia jasa;
f) Pendapatan dari hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari penyewaan spot videotron, sewa ATM, sewa kantor kas bank, serta pemanfaatan aset daerah lainnya selama TA 2025;
g) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan pendapatan bunga dari Deposito pada Bank Kalsel dengan nilai Deposito sebesar Rp284.931.507,00;
h) Peningkatan pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara pada Tahun 2025 dipengaruhi meningkatnya nilai Uang Persediaan (UP) pada SKPD jika dibandingkan tahun sebelumnya serta masih lambannya serapan realisasi belanja yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) sehingga Kas direkening bendahara lebih lama mengendap;
i) Pendapatan dari Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menandakan meningkatnya kesadaran dari wajib pajak; dan
j) Pendapatan dari Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang menandakan menurunnya kesadaran dari wajib pajak;

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**4.141.870.847.825,00**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp3.062.780.561.770,00 atau mencapai 107,41% dari anggaran sebesar Rp2.851.458.117.640,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.079.090.286.055,00 atau 26,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.141.870.847.825,00. Pendapatan

Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.640.864.182.000,00	2.862.288.231.840,00	108,38	3.899.428.999.921,00
2	Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	132.798.578.000,00	120.541.620.020,00	90,77	134.911.838.590,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00	79.950.709.910,00	102,77	107.530.009.314,00
Jumlah		**2.851.458.117.640,00**	**3.062.780.561.770,00**	**107,41**	**4.141.870.847.825,00**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	**2.640.864.182.000,00**	**2.862.288.231.840,00**	**3.899.428.999.921,00**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp2.862.288.231.840,00 atau mencapai 108.38% dari anggaran sebesar Rp2.640.864.182.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.037.140.768.081,00 atau 26,60% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.899.428.999.921,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 36 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.167.274.274.000,00	2.378.509.962.500,00	109,75	3.394.844.581.540,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	376.853.719.000,00	388.541.608.760,00	103,10	387.094.307.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.618.201.000,00	1.611.713.142,00	99,60	36.005.560.168,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.117.988.000,00	93.624.947.438,00	98,43%	81.484.551.213,00
Jumlah		**2.640.864.182.000,00**	**2.862.288.231.840,00**	**108,38**	**3.899.428.999.921,00**

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	2.167.274.274.000,00	**2.378.509.962.500,00**	**3.394.844.581.540,00**

Realisasi DBH TA 2025 sebesar Rp2.378.509.962.500,00 atau mencapai 109,75% dari anggaran sebesar Rp2.167.274.274.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.016.334.619.040,00 atau 29,94% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.394.844.581.540,00. Rincian realisasi DBH pada tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Anggaran dan Realisasi DBH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	206.377.946.000,00	310.858.884.200,00	150,63	403.987.180.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	17.300.820.000,00	13.140.480.000,00	75,95	12.357.793.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	236.259.000,00	176.151.300,00	74,56	166.447.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	208.540,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	68.200.000,00	68.200.000,00	100,00	306.584.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	1.368.816.000,00	-	246.288.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.940.000.000.000,00	2.049.606.382.000,00	105,65	2.971.297.711.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	420.994.000,00	420.994.000,00	100,00	345.416.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.120.498.000,00
10	DBH Sawit	2.036.250.000,00	2.036.250.000,00	100,00	5.016.456.000,00
Jumlah		**2.167.274.274.000,00**	**2.378.509.962.500,00**	**109,75**	**3.394.844.581.540,00**

Alokasi Pendapatan Transfer DBH dari Pemerintah Pusat TA 2025 ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Penurunan Dana Pendapatan Transfer DBH dari Pemerintah Pusat yang sangat signifikan disebabkan menurunnya pendapatan pada Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp2.049.606.382.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp921.691.329.000,00 atau 31,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.971.297.711.000,00.

5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	376.853.719.000,00	**388.541.608.760,00**	**387.094.307.000,00**

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU TA 2025 ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025.

Realisasi DAU TA 2025 Kabupaten Balangan sebesar Rp388.541.608.760,00 atau mencapai 103,10% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp376.853.719.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.301.760,00 atau 0,37% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp387.094.307.000,00. DAU dibagi menjadi 2 (dua) yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU TA 2025 dikelompokkan sesuai dengan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Dana Transfer Umum - DAU Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Realisasi) (Rp)	%
1	DAU (yang tidak ditentukan penggunaannya)	327.535.755.000,00	339.223.644.760,00	11.687.889.760,00	103,57
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.312.629.000,00	12.312.629.000,00	-	100,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20.608.386.000,00	20.608.386.000,00	-	100,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.796.949.000,00	15.796.949.000,00	-	100,00
Jumlah		**376.853.719.000,00**	**388.541.608.760,00**	**11.687.889.760,00**	**103,10**

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus - Fisik	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	1.618.201.000,00	**1.611.713.142,00**	**36.005.560.168,00**

Dana Alokasi Khusus – Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran Dana Alokasi Khusus – Fisik ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik TA 2025 sebesar Rp1.611.713.142,00 atau mencapai 99,60% dari anggaran sebesar Rp1.618.201.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp34.393.847.026,00 atau 95,52% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.005.560.168,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik berdasarkan alokasi setiap bidang sebagai berikut:

Tabel 39 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.187.397.000,00	1.186.250.000,00	99,90	1.015.553.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	223.704.000,00	222.827.995,00	99,61	4.320.584.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	207.100.000,00	202.635.147,00	97,84	2.404.451.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	2.165.128.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	8.621.739.168,00
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	4.065.990.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	6.510.191.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	531.550.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-	6.370.374.000,00
Jumlah		**1.618.201.000,00**	**1.611.713.142,00**	**99,60**	**36.005.560.168,00**

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
95.117.988.000,00	**93.624.947.438,00**	**81.484.551.213,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2025 sebesar Rp93.624.947.438,00 atau mencapai 98,43% dari anggaran sebesar Rp95.117.988.000,00. Realisasi Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp12.140.396.225,00 atau 14,90% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp81.484.551.213,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik berdasarkan alokasi setiap bidang sebagai berikut:

Tabel 40 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	854.405.500,00	-	-
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.000.000.000,00	56.792.582.400,00	109,22	46.842.668.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.000.000.000,00	114.500.000,00	5,73	1.262.251.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.000.000.000,00	1.624.474.800,00	81,22	348.247.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.508.580.000,00	3.784.802.000,00	107,87	-
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	1.895.887.969,00	-	-
7	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	272.991.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.503.942.000,00	2.629.199.463,00	47,77	3.422.450.487,00
9	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	195.000.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	13.907.520.000,00	14.067.565.861,00	101,15	15.141.092.729,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	-	-	-	3.612.030.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.176.480.000,00	423.540.000,00	19,46	2.156.830.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.686.500.000,00	369.418.528,00	10,02	1.922.643.310,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	370.683.000,00	370.683.000,00	100,00	-
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.582.383.000,00	7.564.016.917,00	78,94	6.308.347.687,00
16	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	2.751.971.000,00	-	-
17	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	381.900.000,00	381.900.000,00	100,00	-
Jumlah		**95.117.988.000,00**	**93.624.947.438,00**	**98,43**	**81.484.551.213,00**

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
132.798.578.000,00	**120.541.620.020,00**	**134.911.838.590,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 sebesar Rp120.541.620.020,00 atau mencapai 90,77% dari anggaran sebesar Rp132.798.578.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.370.218.570,00 atau 10,65 % jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp134.911.838.590,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebagai berikut:

5.1.1.2.2.1. Dana Desa	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	110.528.915.000,00	**98.244.957.020,00**	**114.314.789.590,00**

Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan langsung ke oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa dengan prioritas penggunaannya diatur oleh Pemerintah. Realisasi Dana Desa TA 2025 sebesar Rp98.244.957.020,00 atau mencapai 88,89% dari anggaran sebesar Rp110.528.915.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp16.069.832.570,00 atau 14,06% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp114.314.789.590,00. Adapun rincian realisasi pendapatan Dana Desa per Kecamatan pada TA 2025 tersaji pada **Lampiran 3.**

5.1.1.2.2.2. Insentif Fiskal	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	22.269.663.000,00	**22.296.663.000,00**	**20.597.049.000,00**

Realisasi Insentif Fiskal TA 2025 sebesar Rp22.296.663.000,00 atau mencapai 100,12% dari anggaran sebesar Rp22.269.663.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.699.614.000,00 atau 8,25% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp20.597.049.000,00.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	77.795.357.640,00	**79.950.709.910,00**	**107.530.009.314,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 sebesar Rp79.950.709.910,00 atau mencapai 102,77% dari anggaran sebesar Rp77.795.357.640,00. Realisasi Pendapatan tersebut mengalami penurun sebesar Rp27.579.299.404,00 atau 25,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp107.530.009.314,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang perhitungan besarannya didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	77.795.357.640,00	**79.950.709.910,00**	**107.530.009.314,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp79.950.709.910,00 atau mencapai 102,77% dari anggaran sebesar Rp77.795.357.640,00. Realisasi Pendapatan tersebut mengalami penurun sebesar Rp27.579.299.404,00 atau 25,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar

Rp107.530.009.314,00. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	1.697.069.820,00	-	5.663.583.766,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	3.759.484.267,00	-	10.262.755.954,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	64.658.053.326,00	61.684.393.954,00	95,40	80.864.675.197,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.137.304.314,00	731.672.719,00	34,23	1.058.625.930,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.000.000.000,00	12.078.089.150,00	109,80	9.680.368.467,00
Jumlah		**77.795.357.640,00**	**79.950.709.910,00**	**102,77**	**107.530.009.314,00**

5.1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
		357.956.168.280,00	**377.757.089.937,48**	**8.357.336.047,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp377.757.089.937,48 atau terealisasi 105,53% dari anggaran sebesar Rp357.956.168.280,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp369.399.753.890,48 atau 4420,07% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.357.336.047,00. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	-	1.655.200.090,00	-	421.917.285,00
2	Pendapatan Lainnya - Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	357.956.168.280,00	376.101.889.847,48	105,07	7.935.418.762,00
Jumlah		**357.956.168.280,00**	**377.757.089.937,48**	**105,53**	**8.357.336.047,00**

5.1.1.3.1.	Pendapatan Hibah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
		-	**1.655.200.090,00**	**421.917.285,00**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 sebesar Rp1.655.200.090,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.233.282.805,00 atau 292,30% jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2024

sebesar Rp421.917.285,00. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	1.655.200.000,00	-	420.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	90,00	-	1.917.285,00
Jumlah		**-**	**1.655.200.090,00**	**-**	**421.917.285,00**

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar merupakan pendapatan hibah dari sumbangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari beberapa perusahaan, antara lain Adaro Indonesia, PT Saptaindra Sejati (SIS), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dan Balangan Coal sehingga realisasi pendapatan hibah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Pendapatan Hibah yang diterima per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 44 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	436.340.000,00
2	Dinas Kesehatan	350.000.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	460.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	216.860.000,00
5	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	42.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
Jumlah		**1.655.200.000,00**

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.3.2.	**Pendapatan Lainnya - Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**357.956.168.280,00**	**376.101.889.847,48**	**7.935.418.762,00**

Realisasi Pendapatan Lainnya - Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 sebesar Rp376.101.889.847,48 atau mencapai 105,07% dari anggaran sebesar Rp357.956.168.280,00. Adapun Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FTKP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Lainnya - Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan	-	13.962.477.590,00	-	-
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.966.849.343,00	7.783.117.492,48	97,69	7.935.418.762,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	349.989.318.937,00	354.356.294.765,00	101,25	-
Jumlah		**357.956.168.280,00**	**376.101.889.847,48**	**105,07**	**7.935.418.762,00**

Adapun beberapa pendapatan diuraiankan secara singkat sebagai berikut:

1) Lain-lain Pendapatan terealisasi sebesar Rp13.962.477.590,00 yang berasal dari pengembalian dana hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, antara lain pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024 dari KPU dan Bawaslu Balangan, pengembalian dana hibah KONI Balangan TA 2023 dan 2024, serta pengembalian sisa dana hibah dari beberapa organisasi dan kegiatan keagamaan di Kabupaten Balangan;
2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp7.783.117.492,48 merupakan pendapatan yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari program BPJS Kesehatan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FTKP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FTKP

Per Puskesmas TA 2025

No	Nama Puskesmas	Nilai Realisasi (Rp)
1	Puskesmas Paringin	1.027.954.442,00
2	Puskesmas Paringin Selatan	461.042.698,76
3	Puskesmas Awayan	1.068.260.166,00
4	Puskesmas Tebing Tinggi	520.285.565,00
5	Puskesmas Lokbatu	412.054.584,71
6	Puskesmas Batumandi	895.062.879,00
7	Puskesmas Tanah Habang	354.140.567,00
8	Puskesmas Lampihong	468.326.714,00
9	Puskesmas Juai	945.099.456,00
10	Puskesmas Pirsus	73.836.005,00
11	Puskesmas Halong	1.180.565.207,00
12	Puskesmas Uren	376.489.208,01
Jumlah		**7.783.117.492,48**

3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi terealisasi sebesar Rp354.356.294.765,00, yang merupakan pendapatan

daerah dari pembagian penerimaan negara atas kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batu bara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Kabupaten Balangan, penerimaan tersebut berasal dari PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Indonesia.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2. Belanja	**3.993.665.099.438,85**	**3.393.896.995.063,63**	**3.578.994.094.657,39**

Realisasi Belanja pada TA 2025 sebesar Rp3.393.896.995.063,63 atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp3.993.665.099.438,85. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp185.097.099.593,76 atau 5,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.578.994.094.657,39. Penurunan belanja dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan, khususnya pada Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Adapun realisasi anggaran per SKPD untuk TA 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	594.738.157.877,00	467.763.116.121,00	126.975.041.756,00	78,65
2	Dinas Kesehatan	373.594.375.254,00	306.292.600.731,42	67.301.774.522,58	81,99
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.130.522.761.838,00	963.596.492.412,00	166.926.269.426,00	85,23
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.406.742.051,00	16.865.048.398,41	1.541.693.652,59	91,62
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.343.928.365,00	14.549.380.469,00	1.794.547.896,00	89,02
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	26.240.018.602,00	20.192.409.993,00	6.047.608.609,00	76,95
7	Dinas Sosial	29.570.772.100,00	24.786.042.916,00	4.784.729.184,00	83,82
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.134.672.783,00	121.992.478.785,00	3.142.193.998,00	97,49
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	318.244.367.721,00	284.438.265.877,61	33.806.101.843,39	89,38
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	46.927.180.030,00	40.159.358.275,00	6.767.821.755,00	85,58
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.130.490.744,00	10.310.477.904,00	1.820.012.840,00	85,00
12	Dinas Perhubungan	61.223.979.181,00	59.088.993.286,00	2.134.985.895,00	96,51
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	29.153.841.197,00	27.180.400.637,00	1.973.440.560,00	93,23
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	85.295.033.398,00	79.622.262.801,35	5.672.770.596,65	93,35
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.369.605.871,00	11.982.214.125,00	1.387.391.746,00	89,62
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	42.899.181.296,00	36.642.974.521,00	6.256.206.775,00	85,42
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.610.536.189,00	18.946.727.340,00	1.663.808.849,00	91,93
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.970.658.838,00	16.610.686.785,00	2.359.972.053,00	87,56
19	Sekretariat Daerah	307.290.693.088,00	223.177.238.731,58	84.113.454.356,42	72,63
20	Sekretariat DPRD	90.036.991.359,00	74.793.546.781,00	15.243.444.578,00	83,07

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	26.609.748.673,00	25.789.676.484,00	820.072.189,00	96,92
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	480.286.449.193,85	436.723.043.961,02	43.563.405.232,83	90,93
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.564.830.993,00	20.138.116.694,00	5.426.714.299,00	78,77
24	Inspektorat	36.721.000.553,00	32.696.885.770,24	4.024.114.782,76	89,04
25	Kecamatan Lampihong	7.567.578.814,00	7.058.682.575,00	508.896.239,00	93,28
26	Kecamatan Batumandi	6.827.136.854,00	6.514.967.811,00	312.169.043,00	95,43
27	Kecamatan Awayan	5.726.546.072,00	5.403.322.192,00	323.223.880,00	94,36
28	Kecamatan Halong	6.491.860.314,00	6.099.471.482,00	392.388.832,00	93,96
29	Kecamatan Juai	5.825.933.332,00	5.649.732.874,00	176.200.458,00	96,98
30	Kecamatan Paringin	14.565.568.524,00	13.888.997.866,00	676.570.658,00	95,35
31	Kecamatan Tebing Tinggi	6.167.568.439,00	5.840.843.927,00	326.724.512,00	94,70
32	Kecamatan Paringin Selatan	10.606.889.895,00	9.951.978.437,00	654.911.458,00	93,83
JUMLAH		**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**598.918.662.475,22**	**85,00**

Belanja Menurut Jenis Belanja

Sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis Belanja yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, BTT dan Belanja Transfer.

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2025 dengan TA 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2025 dan Realisasi 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.429.729.067.940,87	2.045.244.791.336,05	84,18	2.028.598.343.430,35
2	Belanja Modal	1.154.447.391.284,13	966.740.815.511,58	83,74	1.052.174.676.702,04
3	Belanja Tak Terduga	9.478.109.524,85	3.388.752.199,00	35,75	1.357.500.000,00
4	Belanja Transfer	400.010.530.689,00	379.372.077.917,00	94,84	496.863.574.525,00
Jumlah		**3.993.665.099.438,85**	**3.394.746.436.963,63**	**85,00**	**3.578.994.094.657,39**

5.1.2.1. Belanja Operasi	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	2.429.729.067.940,87	**2.045.244.791.336,05**	**2.028.598.343.430,35**

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp2.045.244.791.336,05 atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp2.429.729.067.940,87. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.646.447.905,70 atau 0,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.028.598.343.430,35. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	740.174.341.197,87	604.826.713.205,00	81,71	528.346.491.670,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.538.146.717.718,00	1.316.275.787.002,14	85,58	1.292.777.489.260,70
3	Belanja Hibah	141.459.604.025,00	115.210.286.128,91	81,44	198.460.439.999,65
4	Belanja Bantuan Sosial	9.948.405.000,00	8.932.005.000,00	89,78	9.013.922.500,00
Jumlah		**2.429.729.067.940,87**	**2.045.244.791.336,05**	**84,18**	**2.028.598.343.430,35**

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	740.174.341.197,87	**604.826.713.205,00**	**528.346.491.670,00**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pimpinan/ anggota DPRD, ASN/PNS dan PPPK serta Non ASN yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp604.826.713.205,00 atau 81,71% dari anggaran sebesar Rp740.174.341.197,87. Realisasi Belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.480.221.535,00 atau 14,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp528.346.491.670,00. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 146 menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan Belanja Pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Maka Pemkab Balangan telah melaksanakan amanah yang ditetapkan dalam UU tersebut dengan persentase anggaran Belanja Pegawai pada TA 2024 sebesar Rp740.174.341.197,87 atau hanya 18,53% dari total APBD TA 2025 sebesar Rp3.993.665.099.438,85. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 serta Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**362.198.770.586,87**	**271.222.174.605,00**	**74,88**	**246.514.845.550,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	198.599.648.890,00	151.091.604.897,00	76,08	148.080.664.352,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.063.293.774,00	36.109.362.925,00	70,71	25.901.825.850,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.877.735.399,00	13.563.954.269,00	75,87	13.582.306.204,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.671.612.345,00	3.305.752.035,00	70,76	2.318.757.336,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.193.349.565,00	3.619.765.000,00	69,70	3.915.469.700,00
6	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	12.507.600,00	540.000,00	4,32	1.620.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.727.798.741,00	11.562.038.440,00	73,51	11.303.497.550,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.071.081.197,00	3.624.826.500,00	71,48	2.691.628.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.694.475.469,00	1.806.762.000,00	67,05	1.563.184.000,00
10	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	842.505.013,00	195.572.097,00	23,21	16.740.000,00
11	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.425.447.976,00	7.752.638.200,00	74,36	7.734.037.000,00
12	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.301.683.264,00	2.322.718.672,00	70,35	1.604.030.580,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.885.385.942,00	17.132.264.947,00	86,16	10.819.190.068,00
14	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.264.649.879,00	353.779.373,00	27,97	237.073.277,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PNS	160.301.972,87	1.952.621,00	1,22	2.118.573,00
16	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	104.395.714,00	635.008,00	0,61	396.610,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.471.634.424,00	14.106.684.630,00	80,74	13.761.787.164,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.491.650.868,00	3.113.970.734,00	69,33	1.553.364.938,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	696.578.630,00	307.104.655,00	44,09	303.847.946,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	404.430.946,00	82.015.600,00	20,28	53.006.319,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.626.067.100,00	921.240.015,00	56,65	911.289.511,00
22	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	612.535.878,00	246.991.987,00	40,32	159.010.572,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**357.083.088.373,00**	**313.812.337.301,00**	**87,88**	**264.121.666.964,00**
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	64.493.900.447,00	54.731.205.385,00	84,86	84.419.380.915,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.970.744.139,00	2.645.678.617,00	53,23	15.688.908.747,00
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	59.128.278.953,00	48.222.440.031,00	81,56	31.282.831.778,00
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	6.537.479.380,00	4.890.584.264,00	74,81	2.979.702.350,00
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.697.649.938,00	6.077.647.086,00	69,88	5.543.530.460,00
28	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	251.876.898,00	-	0,00	-
29	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	125.233.076.282,00	109.489.715.143,00	87,43	70.489.952.272,00
30	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	30.336.579.301,00	17.013.651.147,00	56,08	2.754.644.980,00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	1.400.000,00	28,00	1.106.000,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	-	-	-	472.500,00
33	Belanja TPG PNSD	38.480.000.000,00	53.006.510.525,00	137,75	43.053.348.100,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
34	Belanja TKG PNSD	1.480.000.000,00	946.880.400,00	63,98	891.639.900,00
35	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.480.000.000,00	34.750.000,00	2,35	394.750.000,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.276.789.000,00	647.172.903,00	50,69	574.728.962,00
37	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	395.590.000,00
38	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	151.714.035,00	-	-	-
39	Belanja TPG PPPK	13.520.000.000,00	15.347.357.400,00	113,52	4.189.117.600,00
40	Belanja TKG PPPK	520.000.000,00	677.594.400,00	130,31	578.462.400,00
41	Belanja Tamsil Guru PPPK	520.000.000,00	79.750.000,00	15,34	883.500.000,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**18.666.979.020,00**	**18.189.763.614,00**	**97,44**	**16.596.804.959,00**
42	Belanja Uang Representasi DPRD	569.240.000,00	556.290.000,00	97,73	560.700.000,00
43	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	64.127.000,00	58.270.800,00	90,87	53.379.900,00
44	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.070.000,00	76.185.840,00	82,75	67.640.280,00
45	Belanja Uang Paket DPRD	64.601.600,00	55.629.000,00	86,11	48.048.000,00
46	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	895.937.000,00	806.620.500,00	90,03	813.015.000,00
47	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.930.000,00	72.105.600,00	65,00	63.579.600,00
48	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.230.370,00	13.611.150,00	64,11	10.444.350,00
49	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.365.900.000,00	99,00	4.410.000.000,00
50	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	100,00	735.000.000,00
51	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	48.271.920,00	852.946,00	1,77	476.167,00
52	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	150.000,00	-	0,00	-
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	47.249.496,00	46.867.506,00	99,19	47.444.334,00
54	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	31.082.168,00	1.142.568,00	3,68	671.832,00
55	Belanja Jaminan Kematian DPRD	30.066.622,00	3.427.704,00	11,40	2.015.496,00
56	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.274.047.844,00	5.197.000.000,00	98,54	4.901.500.000,00
57	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.850.000.000,00	5.830.000.000,00	99,66	4.692.000.000,00
58	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	55.475.000,00	3.360.000,00	6,06	190.890.000,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.010.303.218,00**	**565.467.644,00**	**55,97**	**244.808.734,00**
59	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	147.000.000,00	45.000.000,00	30,61	23.100.000,00
60	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.450.000,00	3.528.000,00	37,33	3.234.000,00
61	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	209.650.000,00	81.000.000,00	38,64	41.580.000,00
62	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.962.500,00	4.272.780,00	53,66	2.607.120,00
63	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.639.000,00	193.908,00	2,54	149.364,00
64	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.775.172,00	1.780,00	0,10	720,00
65	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.650.000,00	4.732.560,00	71,17	2.222.640,00
66	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.769.340,00	98.640,00	3,56	45.360,00
67	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	4.620.000,00	295.920,00	6,41	136.080,00
68	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	188.376,00	150.032,00	79,64	168.000,00
69	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	116.900.000,00	97.300.000,00	83,23	68.670.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
70	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	150.990,00	10.990,00	7,28	4.200,00
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.181.080,00	1.181.080,00	100,00	924.000,00
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	65.800.000,00	65.800.000,00	100,00	60.200.000,00
73	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	287.000,00	287.000,00	100,00	215.250,00
74	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	350.000,00	243.460,00	69,56	151.200,00
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	28.930,00	4.340,00	15,00	-
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.732.579,00	26.246.192,00	82,71	9.800.000,00
77	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	9.240.000,00
78	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.849.443,00	22.849.443,00	100,00	14.700.000,00
79	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.000.000,00	94.500.000,00	75,00	-
80	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	126.000.000,00	81.248.631,00	64,48	-
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	1.876.000,00	18,76	4.580.800,00
82	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.996.000,00	1.357.630,00	13,58	350.000,00
83	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.850.000,00	1.050.000,00	10,66	980.000,00
84	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	4.602.272,00	990.682,00	21,53	-
85	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	3.934.000,00	-	-	-
86	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	36.552.500,00	3.131.626,00	8,57	1.750.000,00
87	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.864.000,00	2.056.950,00	29,97	-
88	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.233.436,00	-	0,00	-
89	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	11.620.000,00	2.835.000,00	24,40	-
90	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.166.600,00	12.725.000,00	83,90	-
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**712.480.000,00**	**678.880.000,00**	**95,28**	**647.992.000,00**
91	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	278.880.000,00	89,25	250.992.000,00
92	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	397.000.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	**502.720.000,00**	**358.090.041,00**	**71,23**	**220.373.463,00**
93	Belanja Pegawai BLUD	502.720.000,00	358.090.041,00	71,23	220.373.463,00
Jumlah		**740.174.341.197,87**	**604.826.713.205,00**	**81,71**	**528.346.491.670,00**

1. Besaran dan komponen dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selain gaji dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan juga terdapat komponen Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 atau lebih dikenal sebagai THR bagi pegawai ASN yang terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum yang pembayarannya mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
2. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU. Adapun rincian dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Realisasi Belanja Gaji dan Pegawai ASN TA 2025

No	Uraian	PNS (Rp)	PPPK (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	151.091.604.897,00	36.109.362.925,00	187.200.967.822,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.563.954.269,00	3.305.752.035,00	16.869.706.304,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.619.765.000,00	540.000,00	3.620.305.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.562.038.440,00	3.624.826.500,00	15.186.864.940,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.806.762.000,00	195.572.097,00	2.002.334.097,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.752.638.200,00	2.322.718.672,00	10.075.356.872,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.132.264.947,00	353.779.373,00	17.486.044.320,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.952.621,00	635.008,00	2.587.629,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.106.684.630,00	3.113.970.734,00	17.220.655.364,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	307.104.655,00	82.015.600,00	389.120.255,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	921.240.015,00	246.991.987,00	1.168.232.002,00
Jumlah		**221.866.009.674,00**	**49.356.164.931,00**	**271.222.174.605,00**

3. Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan PPPK yang dikelompokkan dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan: Beban Kerja ASN, Kondisi Kerja ASN, Kelangkaan Profesi ASN dan Prestasi Kerja ASN. Dimana besarannya mengacu pada Perbup yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, besaran pembayaran dan tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA 2024 mengacu pada Perbup Balangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN juga termasuk pemberian Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 yang mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 dari Belanja Tambahan Penghasilan dalam pembayarannya tidak memperhitungkan kinerja bulanan. Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersaji pada tabel berikut:

Tabel 52 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025

No	Uraian	PNS (Rp)	PPPK (Rp)	Total (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	54.731.205.385,00	2.645.678.617,00	57.376.884.002,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	48.222.440.031,00	4.890.584.264,00	53.113.024.295,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.077.647.086,00	-	6.077.647.086,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	109.489.715.143,00	17.013.651.147,00	126.503.366.290,00
Jumlah		**218.521.007.645,00**	**24.549.914.028,00**	**243.070.921.673,00**

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru baik ASN dan Non ASN yang alokasi pendapatannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Besaran tambahan penghasilan mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan gaji dan tunjangan yang diterima oleh DPRD dengan besaran mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Khusus untuk Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari Tunjangan Perumahan DPRD dan Tunjangan Transportasi yang besarannya ditetapkan dengan Perbup. Sedangkan Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD penentuan besarannya sesuai dengan kategori/kelompok kemampuan keuangan daerah dengan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan gaji dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, dimana besarannya mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH.
8. Belanja Pegawai BLUD merupakan belanja Honorarium yang diberikan baik kepada ASN maupun Non ASN yang sumber pendanaannya dari Pendapatan BLUD.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	**1.538.146.717.718,00**	**1.316.275.787.002,14**	**1.292.777.489.260,70**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp1.316.275.787.002,14 atau 85,58% dari anggaran sebesar Rp1.538.146.717.718,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.498.297.741,44 atau 1,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.292.777.489.260,70. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 serta Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	656.630.490.338,00	601.989.004.051,08	91,68	586.761.554.608,65
2	Belanja Jasa	498.627.458.508,00	415.642.681.385,77	83,36	413.275.532.435,00
3	Belanja Pemeliharaan	42.660.041.634,00	37.598.020.850,74	88,13	38.619.440.976,96
4	Belanja Perjalanan Dinas	172.223.935.000,00	136.183.956.336,00	79,07	154.587.040.627,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.801.487.771,00	50.452.997.530,00	54,37	30.790.249.116,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	12.200.298.960,00	-	13.284.980.093,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	12.279.865.739,00	1.211.141.964,00	9,86	-
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.305.594.000,00	7.357.588.497,00	88,59	6.268.980.955,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.617.844.728,00	53.640.097.427,55	98,21	49.189.710.449,09
Jumlah		**1.538.146.717.718,00**	**1.316.275.787.002,14**	**85,58**	**1.292.777.489.260,70**

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	656.630.490.338,00	**601.989.004.051,08**	**586.761.554.608,65**

Realisasi Belanja Barang TA 2025 adalah sebesar Rp601.989.004.051,08 atau 91,68% dari anggaran sebesar Rp656.630.490.338,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.227.449.442,43 atau 2,60% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp586.761.554.608,65. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dengan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 54 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 serta Realisasi Belanja Barang TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Pakai Habis	**649.541.844.920,00**	**595.813.686.972,08**	**91,73**	**578.949.630.725,65**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.548.357.900,00	2.128.391.233,00	83,52	2.913.778.550,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.586.683.700,00	3.977.243.205,00	86,71	16.206.575.120,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.646.898.750,00	7.426.203.184,00	85,88	8.343.636.254,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.092.683.400,00	1.870.782.500,00	89,40	2.154.027.400,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	-
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.500.000,00	5.390.000,00	98,00	25.860.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	258.250.000,00	253.250.000,00	98,06	148.980.900,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.781.222.476,00	7.973.247.990,30	73,95	9.002.823.998,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.232.351.300,00	2.864.379.864,00	88,62	4.582.487.566,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.500.000,00	-	-	116.383.500,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	23.800.000,00	19.500.000,00	81,93	16.895.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	197.386.400,00	173.402.006,00	87,85	70.345.055,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.607.081.962,00	2.325.097.510,00	89,18	3.468.172.783,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.651.271.643,00	2.464.192.177,00	92,94	3.044.417.243,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.211.506.175,00	9.672.613.656,00	86,27	13.762.263.968,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	651.025.200,00	613.755.000,00	94,28	853.418.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.509.288.800,00	3.199.057.861,00	91,16	3.650.461.700,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.624.203.800,00	1.194.069.690,00	73,52	2.448.191.600,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.038.624.524,00	2.486.264.667,00	81,82	6.672.329.200,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	151.754.400,00	131.608.625,00	86,72	615.370.400,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	650.438.100,00	560.233.480,00	86,13	779.895.700,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.736.661.050,00	2.537.363.205,00	92,72	2.936.339.100,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	449.362.300,00	431.381.200,00	96,00	1.543.228.140,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.124.374.620,00	5.476.264.125,56	76,87	2.679.893.448,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	182.636.150,00	147.291.760,00	80,65	285.390.175,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	318.821.841.496,00	290.756.009.889,22	91,20	271.930.976.878,65
27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	204.616.891.946,00	195.128.265.696,00	95,36	165.844.038.335,00
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.640.200.000,00	1.370.804.210,00	83,58	18.012.000,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.282.182.488,00	6.073.145.142,00	96,67	4.284.690.703,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	546.296.000,00	495.185.850,00	90,64	487.088.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	33.300.000,00	33.200.000,00	99,70	26.620.000,00
32	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	76.227.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.090.789.500,00	29.326.302.290,00	88,62	34.957.061.830,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.172.800.000,00	4.061.219.800,00	97,33	3.181.848.775,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	-	-	30.435.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	197.752.800,00	194.896.000,00	98,56	118.957.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	460.000.000,00	459.574.500,00	99,91	439.450.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.030.795.000,00	1.862.790.500,00	91,73	1.850.731.200,00
39	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.520.000.000,00	1.500.700.000,00	98,73	1.356.948.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	25.000.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	202.020.000,00	180.605.880,00	89,40	190.190.000,00
42	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	60.000.000,00	53.956.000,00	89,93	220.380.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.286.791.250,00	1.157.609.225,00	89,96	2.706.267.500,00
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	755.229.780,00	645.923.780,00	85,53	1.515.735.104,00
45	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	247.440.000,00	227.094.020,00	91,78	438.350.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14.240.000,00	13.250.000,00	93,05	18.450.000,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	10.400.000,00	-	-
48	Belanja Pakaian KORPRI	40.261.000,00	40.043.250,00	99,46	40.877.200,00
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.426.405.850,00	1.297.073.761,00	90,93	1.423.061.100,00
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.398.725.560,00	2.284.316.882,00	95,23	558.540.400,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	491.028.700,00	474.577.358,00	96,65	667.285.000,00
52	Belanja Pakaian Paskibraka	236.490.900,00	228.760.000,00	96,73	221.244.900,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	***7.088.645.418,00***	***6.175.317.079,00***	***87,12***	**7.811.923.883,00**
53	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	-	-	-	55.880.000,00
54	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	7.072.583.918,00	6.175.317.079,00	87,31	7.724.772.483,00
55	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.061.500,00	-	-	31.271.400,00
Jumlah		**656.630.490.338,00**	**601.989.004.051,08**	**91,68**	**586.761.554.608,65**

Secara singkat dijelaskan beberapa belanja dengan realisasi cukup signifikan jika dibandingkan dengan belanja lainnya pada belanja barang pakai habis antara lain:

1. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp290.756.009.889,22 meningkat sebesar Rp18.825.033.010,57 atau 6,92% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp271.930.976.878,65, beberapa SKPD yang menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat antara lain:

Tabel 55 Realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan	167.556.329.180,61
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	108.071.262.922,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.978.755.116,00
4	Dinas Sosial	4.156.949.540,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.690.860,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	380.795.863,00
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan MenengahSerta Tenaga Kerja	501.821.649,61
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	632.963.607,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	62.913.500,00
10	Kecamatan Paringin	213.058.500,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.705.141,00
12	Dinas Pendidikandan Kebudayaan	395.775.300,00
13	Dinas Kesehatan	429.860.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	774.128.710,00
Jumlah		**290.756.009.889,22**

Dari tabel diatas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan SKPD dengan realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat paling besar, pada umumnya belanja ini berupa pembangunan jalan usaha tani/jalan usaha produksi, pembangunan fasilitas untuk pendukung pertanian/perikanan/perkebunan, belanja bibit tanaman, obat-obatan pengendali hama tumbuhan, pupuk tanaman, penyediaan sarana dan prasarana lain yang langsung diserahkan serta dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat.

Realisasi terbesar kedua adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimana belanja ini pada umumnya berupa pembangunan jalan wilayah perdesaan/perumahan, drainase, dan pembangunan fasilitas lainnya yang tanahnya bukan milik Pemerintah Daerah.

2. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp195.128.265.696,00 meningkat sebesar Rp29.284.227.361,00 atau 17,66% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp165.844.038.335,00, beberapa SKPD yang menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga antara lain:

Tabel 56 Realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	176.180.806.678,00
2	Sekretariat Daerah	4.150.205.504,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.419.720.514,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.347.785.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.748.000,00
Jumlah		**195.128.265.696,00**

Realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada umumnya berupa pembangunan jalan, wilayah perdesaan/perumahan, drainase dan pembangunan fasilitas lainnya yang tanahnya bukan milik Pemerintah Daerah atau hampir sama dengan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
498.627.458.508,00	**415.642.681.385,77**	**413.275.532.435,00**

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 adalah sebesar Rp415.642.681.385,77 atau 83,36% dari anggaran sebesar Rp498.627.458.508,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.367.148.950,77 atau 0,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp413.275.532.435,00. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dengan 2024 disajikan pada **Lampiran 4.**

Terdapat belanja dengan nilai realisasi meningkat cukup signifikan antara lain:

1. Peningkatan realisasi Bimbingan Teknis merupakan upaya peningkatan SDM untuk ASN, Aparat Desa, Tenaga Pendidik, Petani serta Tenaga Kesehatan, realisasi Bimbingan Teknis SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 57 Realisasi Belanja Bimbingan TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.414.949.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.932.539.647,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.866.600.000,00

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
4	Dinas Kesehatan	2.958.500.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.700.000.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.274.000.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.001.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	2.250.500.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.415.000.000,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.345.000.000,00
11	Dinas Sosial	30.000.000,00
12	Inspektorat	1.016.920.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.677.525.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	2.658.520.000,00
15	Sekretariat DPRD	981.021.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	648.500.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.500.000,00
18	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	66.700.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	104.350.000,00
20	Kelurahan Batu Piring	90.000.000,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.000.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.000.000,00
23	Dinas Perhubungan	42.875.000,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	315.000.000,00
25	Kecamatan Paringin Selatan	10.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.726.050.000,00
Jumlah		**60.819.049.647,00**

2. Peningkatan realisasi Belanja Kursus Singkat/Pelatihan merupakan upaya peningkatan SDM untuk ASN dan pelatihan untuk masyarakat dipersiapkan menjadi tenaga kerja di Kabupaten Balangan realisasi Belanja Kursus Singkat/Pelatihan per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 58 Realisasi Belanja Kursus Singkat/Pelatihan TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	44.847.868.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.018.680.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	698.300.400,00
4	Dinas Kesehatan	676.550.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	574.750.000,00
6	Kelurahan Paringin Kota	82.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.000.000,00
Jumlah		**47.953.148.400,00**

3. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp33.446.530.000 atau 86,11% dari anggaran sebesar Rp38.843.450.000,00. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ini terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk pembayaran insentif pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN. Selain itu, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan untuk pembayaran honor penyelenggara, penguji, pengasuh, pemateri, petugas admin/piket kelas, serta tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dan Orientasi PPPK Tahun 2025 pola fasilitasi Kabupaten Balangan;

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.3.	**Belanja Pemeliharaan**	**42.660.041.634,00**	**37.598.020.850,74**	**38.619.440.976,96**

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 adalah sebesar Rp- atau -% dari anggaran sebesar Rp-. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp- atau -% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp38.619.440.976,96. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dengan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 59 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 serta TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pemeliharaan	**42.660.041.634,00**	**37.598.020.850,74**	**88,13**	**38.619.440.976,96**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**11.458.468.716,00**	**8.562.761.365,00**	**74,73**	**11.548.414.609,00**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	300.000.000,00	-	-	18.455.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	475.050.000,00	399.294.800,00	84,05	208.599.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	30.000.000,00	7.580.000,00	25,27	14.350.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.500.000,00	3.581.000,00	65,11	-
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	36.000.000,00	34.560.000,00	96,00	46.700.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.341.750.000,00	1.071.555.827,00	79,86	980.917.343,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.244.458.000,00	1.519.982.025,00	67,72	1.282.854.821,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	296.880.000,00	232.241.895,00	78,23	153.451.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	357.200.000,00	141.721.600,00	39,68	108.793.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	75.973.200,00	14.660.000,00	19,30	15.600.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	110.000.000,00	102.874.810,00	93,52	103.257.760,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.084.800.000,00	862.455.250,00	79,50	274.393.700,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	860.710.000,00	787.855.750,00	91,54	789.898.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	293.750.000,00	196.276.500,00	66,82	263.083.600,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	9.845.400,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.000.000,00	7.000.000,00	87,50	-
17	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	163.915.400,00	140.556.700,00	85,75	75.059.162,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	2.975.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	399.884.852,00	385.737.500,00	96,46	802.342.200,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	982.817.264,00	431.196.337,00	43,87	816.945.408,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	-	-	-	29.713.090,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	103.100.000,00	102.704.250,00	99,62	170.700.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	2.400.000,00	-	-	-
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	40.000.000,00	9.975.000,00	24,94	-
25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	491.160.000,00	422.971.174,00	86,12	490.424.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	309.120.000,00	252.211.150,00	81,59	350.676.725,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	-	-	11.250.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	1.200.000.000,00	1.196.304.789,00	99,69	4.072.999.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	240.000.000,00	239.465.008,00	99,78	455.130.900,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	***10.989.407.393,00***	***10.034.576.003,74***	***91,31***	**15.246.689.918,96**
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.196.883.593,00	8.493.250.856,98	92,35	9.306.147.796,96
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	200.000.000,00	199.397.367,76	99,70	575.433.902,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	573.923.800,00	369.318.801,00	64,35	2.042.909.116,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	584.600.000,00	579.447.000,00	99,12	284.219.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-	-	220.756.507,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	-	432.353.980,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	154.000.000,00	153.683.978,00	99,79	99.870.617,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	280.000.000,00	239.478.000,00	85,53	-
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-	-	398.411.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-	-	1.788.101.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	-	98.487.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	***20.162.165.525,00***	***18.981.688.482,00***	***94,15***	**11.724.836.449,00**
41	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	621.774.800,00	251.797.000,00	40,50	218.372.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	131.050.000,00	-	-	-
43	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	-	-	-	221.465.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	17.669.337.000,00	17.399.685.000,00	98,47	10.001.174.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.727.100,00	-	-	-
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	266.509.425,00	-	-	331.118.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	27.000.000,00	19.999.999,00	74,07	-
48	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	32.267.200,00	31.890.963,00	98,83	111.656.000,00
49	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.412.500.000,00	1.278.315.520,00	90,50	841.051.449,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	***50.000.000,00***	***18.995.000,00***	***37,99***	**99.500.000,00**
50	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	18.995.000,00	37,99	99.500.000,00

Dari belanja pemeliharaan terdapat 3 (tiga) jenis pendapatan dengan realisasi belanja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan belanja lainnya antara lain Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang.

1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya dari anggaran Rp17.669.337.000,00 terealisasi sebesar Rp17.399.685.000,00 atau 98,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.001.174.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp7.398.511.000,00 atau 73,98%, adapun realisasinya merupakan realisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dari anggaran Rp9.196.883.593,00 terealisasi

sebesar Rp8.493.250.856,98 atau 92,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.306.147.796,96 terdapat penurunan sebesar Rp812.896.939,98 atau 8,74%, adapun realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 60 Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Sekretariat Daerah	3.805.402.219,00
2	Sekretariat DPRD	507.147.382,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312.401.994,00
4	Dinas Perhubungan	49.688.040,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.639.161.668,00
6	Inspektorat	372.250.713,98
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	348.792.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	135.900.000,00
9	Dinas Sosial	222.502.300,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.807.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	124.120.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	178.484.249,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	56.582.291,00
14	Kecamatan Batumandi	25.000.000,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	488.442.000,00
16	Dinas Kesehatan	41.569.000,00
Jumlah		**8.493.250.856,98**

3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dari anggaran Rp2.244.458.000,00 terealisasi sebesar Rp1.519.982.025,00 atau 67,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.282.854.821,00 terdapat kenaikan sebesar Rp237.127.204,00 atau 18,48%, adapun realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 61 Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.748.890,00
2	Dinas Kesehatan	61.494.350,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.417.907,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.128.100,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.246.000,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	27.765.000,00
7	Dinas Sosial	92.193.267,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.905.000,00

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	121.845.000,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	34.295.500,00
11	Dinas Perhubungan	215.807.651,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	65.497.000,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	5.655.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.787.112,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	20.071.326,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.400.000,00
17	Sekretariat Daerah	340.805.558,00
18	Sekretariat DPRD	72.645.105,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.234.933,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.036.321,00
21	Kecamatan Batumandi	34.312.005,00
22	Kecamatan Paringin	34.326.000,00
23	Kecamatan Paringin Selatan	53.365.000,00
Jumlah		**1.519.982.025,00**

5.1.2.1.2.4. **Belanja Perjalanan Dinas**	**Anggaran TA 2025 (Rp)**	**Realisasi TA 2025 (Rp)**	**Realisasi TA 2024 (Rp)**
	172.223.935.000,00	**136.183.956.336,00**	**154.587.040.627,00**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 adalah sebesar Rp136.183.956.336,00 atau mencapai 79,07% dari anggaran sebesar Rp172.223.935.000,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.403.084.291,00 atau 11,90% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp154.587.040.627,00. Rincian dan Perbandingan Anggaran dan Realisasi Perjalanan Dinas TA 2025 dengan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 62 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	***164.808.085.000,00***	***135.939.551.586,00***	***82,48***	**153.480.317.947,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.587.687.000,00	111.988.365.987,00	83,83	130.541.133.879,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.297.280.000,00	16.926.215.199,00	83,39	19.370.680.068,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	*10.923.118.000,00*	*7.024.970.400,00*	*64,31*	3.568.504.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	**7.415.850.000,00**	**244.404.750,00**	**3,30**	**1.106.722.680,00**
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	7.415.850.000,00	244.404.750,00	3,30	1.106.722.680,00
Jumlah		**172.223.935.000,00**	**136.183.956.336,00**	**79,07**	**154.587.040.627,00**

Belanja Perjalanan Dinas Biasa merupakan belanja perjalanan dinas dengan tujuan di luar Kabupaten Balangan baik dalam ataupun luar Provinsi Kalimantan Selatan dari anggaran Rp133.587.687.000,00 terealisasi sebesar Rp111.988.365.987,00 atau 83,83% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp130.541.133.879,00 terdapat penurunan sebesar Rp18.552.767.892,00

atau 14,21%, adapun realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2025 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 63 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Sekretariat DPRD	23.038.095.991,00
2	Sekretariat Daerah	14.054.470.389,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.490.520.616,00
4	Dinas Kesehatan	5.028.497.985,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.511.151.776,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.790.429.274,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.374.689.356,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.167.932.102,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.647.605.330,00
10	Inspektorat	4.513.483.283,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.482.991.762,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.319.752.578,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.925.325.996,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	2.404.092.125,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.546.405.497,00
16	Dinas Perhubungan	2.137.708.694,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.263.280.363,00
18	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.536.733.538,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.949.710.160,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.685.008.967,00
21	Dinas Sosial	1.147.496.281,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	1.214.860.290,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	867.126.484,00
24	Kecamatan Paringin	1.002.198.640,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.086.973.044,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	624.306.701,00
27	Kecamatan Batumandi	451.749.159,00
28	Kecamatan Juai	332.329.330,00
29	Kecamatan Awayan	364.719.100,00
30	Kecamatan Lampihong	332.238.075,00
31	Kecamatan Halong	377.859.186,00
32	Kecamatan Tebing Tinggi	318.623.915,00
Jumlah		**111.988.365.987,00**

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan belanja perjalanan dinas dengan tujuan didalam wilayah Kabupaten Balangan. Dari anggaran sebesar Rp20.297.280.000,00 terealisasi sebesar Rp16.926.215.199,00 atau 83,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp19.370.680.068,00, realisasi TA 2025 mengalami penurun sebesar Rp2.444.464.869,00 atau 12,62%. Adapun realisasi Belanja Perjalanan Dalam Kota TA 2025 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 64 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.831.120.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.183.660.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.529.390.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.280.580.000,00
5	Sekretariat Daerah	700.319.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	700.995.000,00
7	Inspektorat	303.259.000,00
8	Dinas Perhubungan	546.240.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	616.780.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	416.370.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	517.453.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	445.605.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	266.980.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	361.890.000,00
15	Dinas Sosial	284.830.000,00
16	Kecamatan Halong	206.650.000,00
17	Kecamatan Lampihong	319.650.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	317.281.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.714.999,00
20	Kecamatan Paringin	226.410.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.923.200,00
22	Kecamatan Awayan	219.660.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	142.085.000,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	289.770.000,00
25	Sekretariat DPRD	116.870.000,00
26	Kecamatan Tebing Tinggi	174.510.000,00
27	Kecamatan Batumandi	156.700.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.460.000,00
29	Kecamatan Juai	74.180.000,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	80.640.000,00
31	Satuan Polisi Pamong Praja	109.890.000,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	17.350.000,00
Jumlah		**16.926.215.199,00**

Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota merupakan komponen perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, FGD, *Workshop* dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota. Biaya yang ditanggung untuk peserta bisa dalam bentuk *Fullboard, Fullday, dan Halfday* dari anggaran sebesar Rp10.923.118.000,00 terealisasi sebesar Rp7.024.970.400,00 atau 64,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.568.504.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.456.466.400,00 atau 96,86%. Adapun realisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota TA 2025 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 65 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	562.530.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	34.000.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	288.346.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	744.206.000,00
5	Sekretariat Daerah	606.190.000,00
6	Dinas Perhubungan	42.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	214.490.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	182.200.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.100.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	56.000.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.789.356.400,00
12	Dinas Sosial	229.008.000,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	158.800.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	344.800.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	895.114.000,00
16	Sekretariat DPRD	195.150.000,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.000.000,00
18	Kecamatan Paringin Selatan	1.750.000,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	17.500.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	624.430.000,00
Jumlah		**7.024.970.400,00**

Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri dari anggaran Rp7.415.850.000,00 terealisasi sebesar Rp244.404.750,00 atau 3,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.106.722.680,00 terdapat penurunan sebesar Rp862.317.930,00 atau 77,92%.

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.5.	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat**	**92.801.487.771,00**	**50.452.997.530,00**	**30.790.249.116,00**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 adalah sebesar Rp50.452.997.530,00 atau 54,37% dari anggaran sebesar Rp92.801.487.771,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.662.748.414,00 atau 63,86% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp30.790.249.116,00. Rincian dan Perbandingan Anggaran dan Realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 66 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	***88.905.268.100,00***	***46.847.903.769,00***	***52,69***	**27.968.903.116,00**
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.531.407.300,00	2.404.729.212,00	95,00	2.352.952.600,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	729.653.300,00	713.566.300,00	97,80	192.587.000,00
3	Belanja Beasiswa	83.786.207.500,00	43.471.338.257,00	51,88	23.500.323.516,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	258.000.000,00	250.000.000,00	96,90	1.907.120.000,00
5	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	1.600.000.000,00	8.270.000,00	0,52	15.920.000,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	***3.896.219.671,00***	***3.605.093.761,00***	***92,53***	**2.821.346.000,00**
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.896.219.671,00	3.605.093.761,00	92,53	2.791.346.000,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah		**92.801.487.771,00**	**50.452.997.530,00**	**54,37**	**30.790.249.116,00**

Dari belanja diatas dijelaskan secara singkat 3 (tiga) jenis belanja dengan anggaran dan realisasi terbesar sebagai berikut:

1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan merupakan pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dari anggaran Rp2.531.407.300,00 terealisasi sebesar Rp2.404.729.212,00 atau 95,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.352.952.600,00 realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp51.776.612,00 atau 2,20%. Adapun realisasi Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 67 Realisasi Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	NilaiRealisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	996.590.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	283.445.610,00
3	Sekretariat Daerah	192.500.002,00
4	Dinas Kesehatan	15.500.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	185.350.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	470.650.000,00
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja	19.165.600,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.450.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	39.350.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	21.000.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.828.000,00

No	SKPD	NilaiRealisasi (Rp)
12	Kecamatan Juai	6.000.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.000.000,00
14	Kecamatan Batumandi	10.850.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.600.000,00
16	Kecamatan Awayan	4.300.000,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	17.200.000,00
18	Kecamatan Halong	11.800.000,00
19	Kecamatan Lampihong	4.300.000,00
20	Kecamatan Paringin	40.600.000,00
21	Kecamatan Paringin Selatan	2.250.000,00
Jumlah		**2.404.729.212,00**

2. Belanja Beasiswa merupakan pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan untuk Putra-Putri Balangan dalam rangka mendukung Program Beasiswa 1.000 Sarjana dengan tujuan memberikan keringanan kepada warga Balangan untuk menempuh pendidikan serta pemberian beasiswa kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar pada Tahun 2025 dari anggaran Rp83.786.207.500,00 terealisasi sebesar Rp43.471.338.257,00 atau 51,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp23.500.323.516,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp19.971.014.741,00 atau 84,98%. Adapun realisasi Belanja Beasiswa Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 68 Realisasi Belanja Beasiswa TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.275.800.000,00	Beasiwa untuk menempuk pendidikan luar kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
2	Sekretariat Daerah	40.811.538.257,00	Beasiswa untuk Program Balangan Unggul 1000 Sarjana sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	384.000.000,00	Beasiswa untuk ASN yang melaksanakan Tugas Belajar
Jumlah		**43.471.338.257,00**	

3. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain merupakan belanja/pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga/pihak lain baik perorangan/badan usaha pada Tahun 2025 dari anggaran Rp3.896.219.671,00 terealisasi sebesar Rp3.605.093.761,00 atau 92,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.791.346.000,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp813.747.761,00 atau

29,15%. Adapun realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 69 Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.398.237.095,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	469.600.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	275.000.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	106.820.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	352.436.666,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.000.000,00
Jumlah		**3.605.093.761,00**

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.6.	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**-**	**12.200.298.960,00**	**13.284.980.093,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja yang bersumber dari Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah, sesuai dengan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemkab/Kota, mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pengesahan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
b. melakukan pengesahan belanja Dana BOS Satdikdas,Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan; dan
c. melakukan pencatatan realisasi pendapatan DanaBOS Satdikdas, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

Realisasi TA 2025 adalah sebesar Rp12.200.298.960,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.084.681.133,00 atau 8,16% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp13.284.980.093,00, adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS per Sekolah tersaji pada **Lampiran 5.**

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.7.	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**8.305.594.000,00**	**7.357.588.497,00**	**6.268.980.955,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025 adalah sebesar Rp7.357.588.497,00 atau 88,59% dari anggaran sebesar Rp8.305.594.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.268.980.955,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.088.607.542,00 atau 17,36%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 70 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025

No	Nama Puskesmas	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Puskesmas Juai	918.546.313,00
2	Puskesmas Pirsus	367.908.641,00
3	Puskesmas Halong	724.400.000,00
4	Puskesmas Uren	382.122.999,00
5	Puskesmas Paringin	518.334.515,00
6	Puskesmas Paringin Selatan	546.143.350,00
7	Puskesmas Awayan	713.795.000,00
8	Puskesmas Tebing Tinggi	647.540.250,00
9	Puskesmas Lokbatu	302.549.000,00
10	Puskesmas Batumandi	902.343.000,00
11	Puskesmas Tanah Habang	521.553.451,00
12	Puskesmas Lampihong	812.351.978,00
Jumlah		**7.357.588.497,00**

5.1.2.1.2.8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
		54.617.844.728,00	**53.640.097.427,55**	**49.189.710.449,09**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 adalah sebesar Rp53.640.097.427,55 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp54.617.844.728,00. Realisasi Belanja Barang Jasa BLUD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.450.386.978,46 atau 9,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp49.189.710.449,09. Dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 71 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	45.643.840.305,55
2	Puskesmas Juai	956.802.452,00
3	Puskesmas Pirsus	263.849.283,00
4	Puskesmas Halong	954.295.000,00
5	Puskesmas Uren	298.635.010,00
6	Puskesmas Paringin	940.755.611,00
7	Puskesmas Paringin Selatan	761.058.528,00
8	Puskesmas Awayan	874.879.958,00
9	Puskesmas Tebing Tinggi	554.940.214,00
10	Puskesmas Lokbatu	378.935.021,00
11	Puskesmas Batumandi	890.387.134,00
12	Puskesmas Tanah Habang	330.959.608,00
13	Puskesmas Lampihong	790.759.303,00
Jumlah		**53.640.097.427,55**

5.1.2.1.3. Belanja Hibah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	141.459.604.025,00	**115.210.286.128,91**	**198.460.439.999,65**

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp115.210.286.128,91 atau 81,44% dari anggaran sebesar Rp141.459.604.025,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp83.250.153.870,74 atau 41,95% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp198.460.439.999,65 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2025 dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**3.492.176.000,00**	**3.492.176.000,00**	**100,00**	**6.722.600.000,00**
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.492.176.000,00	3.492.176.000,00	100,00	6.722.600.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**135.879.621.025,00**	**105.077.567.659,91**	**77,33**	**185.876.770.970,00**
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.896.030.000,00	28.794.528.497,91	87,53	63.975.407.280,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	54.933.591.025,00	47.502.268.428,00	86,47	52.726.718.650,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	47.800.000.000,00	28.532.243.634,00	59,69	68.874.645.040,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	248.527.100,00	99,41	300.000.000,00
	Belanja Hibah Dana BOS	**855.932.000,00**	-	-	-
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	452.972.000,00	-	-	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	402.960.000,00	-	-	-
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	***1.231.875.000,00***	***1.231.875.000,00***	***100,00***	**741.158.332,65**
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.231.875.000,00	1.231.875.000,00	100,00	741.158.332,65
	Belanja Hibah Dana BOSP	**-**	**5.408.667.469,00**	**-**	**5.119.910.697,00**
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	-	*854.405.500,00*	-	753.580.697,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	-	2.658.374.000,00	-	2.591.530.000,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	-	*1.895.887.969,00*	-	1.774.800.000,00
Jumlah		**141.459.604.025,00**	**115.210.286.128,91**	**81,44**	**198.460.439.999,65**

Secara singkat Belanja Hibah dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.492.176.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.492.176.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.722.600.000,00, realisasi tersebut menurun sebesar Rp3.230.424.000,00 atau 48,05%. Realisasi belanja ini terdapat pada Dinas Perhubungan yang digunakan untuk hibah uang kepada Polres Balangan dalam rangka pengadaan infrastruktur serta pemeliharaan dan perawatan sistem ETLE *(Electronic Traffic Law Enforcement);*
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp32.896.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.794.528.497,91 atau 87,53%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp63.975.407.280,00, realisasi tersebut menurun sebesar Rp35.180.878.782,09 atau 54,99%. Belanja tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan dan direalisasikan oleh 4 SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 73 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Sekretariat Daerah	20.730.076.621,91
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	475.681.516,00
3	Dinas Kesehatan	249.300.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7.339.470.360,00
Jumlah		**28.794.528.497,91**

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp54.933.591.025,00 dan terealisasi sebesar Rp47.502.268.428,00 atau 86,47%. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp52.726.718.650,00, realisasi tersebut menurun sebesar Rp5.224.450.222,00 atau 9,91%. Realisasi Tahun 2025 per SKPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel 74 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Nilai Realisasi (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	44.670.860.028,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.981.408.400,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	850.000.000,00
Jumlah		**47.502.268.428,00**

Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diberikan kepada penerima diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan bantuan berupa bantuan bibit tanaman, pupuk, pembasmi rumput/tanaman, pembasmi hama, pakan ikan, bibit ikan, sarana/prasarana pembudidayaan perikanan, bibit ternak, sarana/prasarana peternakan dan sejenisnya;
b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bantuan diberikan kepada kelompok pelestari budaya dan kesenian; dan
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diberikan kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kabupaten Balangan.

4. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp47.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.532.243.634,00 atau 59,69%, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp68.874.645.040,00 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp40.342.401.406,00 atau 58,57%. Realisasi ini ada pada Sekretariat Daerah untuk hibah berupa uang yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pada bidang keagamaan.
5. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp248.527.100,00 atau 99,41% dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.472.900,00 atau 17,16%. Realisasi tersebut terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk hibah uang kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Balangan.
6. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah dikali Rp10.000,00 persuara/tahun pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.231.875.000,00 dan terealisasi 100%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp741.158.332,65 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp490.716.667,35 atau 66,21%. Realisasi belanja ini merupakan realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun rincian realisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 75 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025

No	Nama Partai	Nilai Realisasi (Rp)
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	312.690.000,00
2	Partai DEMOKRAT	130.635.000,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	83.550.000,00

No	Nama Partai	Nilai Realisasi (Rp)
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	110.595.000,00
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	121.980.000,00
6	Partai Golkar	85.290.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	90.855.000,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	221.430.000,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	74.850.000,00
Jumlah		**1.231.875.000,00**

7. Belanja Hibah Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan belanja yang sumber pembiayaannya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan Pendidikan Swasta. Kenaikan yang cukup besar pada realisasi belanja ini disebabkan pada Satuan Pendidikan/Sekolah Swasta tahun sebelumnya tidak dilakukan pencatatan/pengesahan. Sedangkan pada Tahun 2025 pencatatan/pengesahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
9.948.405.000,00	**8.932.005.000,00**	**9.013.922.500,00**

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan dan kelompok sosial lainnya. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, belanja ini secara teknis dikelola dan dianggarkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Perbup Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemkab Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Realisasi Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp8.932.005.000,00 atau 89,78% dari anggaran sebesar Rp9.948.405.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.917.500,00 atau 0,91% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.013.922.500,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 76 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	**1.970.300.000,00**	**1.629.300.000,00**	**82,69**	**415.600.000,00**
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.970.300.000,00	1.629.300.000,00	82,69	415.600.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	**2.744.000.000,00**	**2.068.600.000,00**	**75,39**	**2.868.100.000,00**
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.744.000.000,00	2.068.600.000,00	75,39	2.868.100.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	**-**	**-**	**-**	**272.807.500,00**
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	272.807.500,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	**5.234.105.000,00**	**5.234.105.000,00**	**100,00**	**5.457.415.000,00**
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.234.105.000,00	5.234.105.000,00	100,00	5.457.415.000,00
Jumlah		**9.948.405.000,00**	**8.932.005.000,00**	**89,78**	**9.013.922.500,00**

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp1.970.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.629.300.000,00 atau 82,69%. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp415.600.000,00, realisasi tersebut meningkat sebesar Rp1.213.700.000,00 atau 292,04%. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk bantuan sosial uang kepada penunggu pasien tidak mampu/terlantar, bantuan sosial anak yatim piatu di luar panti, uang saku bagi klien/alumni panti rehabilitasi sosial, serta bantuan sosial bagi orang terlantar;
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp2.744.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.068.600.000,00 atau 75,39%. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.868.100.000,00, realisasi tersebut menurun sebesar Rp799.500.000,00 atau 27,88%. Belanja tersebut digunakan untuk bantuan kepada keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT-APBD) Kabupaten Balangan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta bantuan sosial pascabencana alam dan sosial; dan
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp5.234.105.000,00 dan terealisasi 100,00%. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.457.415.000,00,

realisasi tersebut menurun sebesar Rp223.310.000,00 atau 4,09%. Adapun realisasi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 77 Belanja Rincian Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025

No	Nama LKSA	Nilai Realisasi (Rp)
1	LKSA Al Tamar Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan	719.000.000,00
2	LKSA Al Hijrah Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan	355.875.000,00
3	LKSA Sirajul Huda Desa Riwa Kecamatan Batumandi	182.500.000,00
4	LKSA Ainul Amin Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	611.375.000,00
5	LKSA Ikhwanul Muslimin Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin	310.250.000,00
6	LKSA Riyadhul Muhibbin Desa Bungin Kec. Paringin	930.750.000,00
7	LKSA Nurul Iman Desa Kalahiang Kecamatan Paringin	292.000.000,00
8	LKSA Nurul Muhibin Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong	930.750.000,00
9	LKSA Nurul Yaqin Inan Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan	319.375.000,00
10	LKSA Nurul Iman Desa Kalahiang Kecamatan Paringin	196.430.000,00
11	LKSA Nurul Yaqin Inan Desa Inan Kec. Paringin Selatan	309.110.000,00
12	LKSA Nurul Muhibin Desa Binjai Punggal Kec. Halong	53.000.000,00
13	LKSA Ikhwanul Muslimin Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin	23.690.000,00
Jumlah		**5.234.105.000,00**

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1.154.447.391.284,13	**966.740.815.511,58**	**1.052.174.676.702,04**

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp966.740.815.511,58 atau 83,74% dari anggaran sebesar Rp1.154.447.391.284,13. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp85.433.861.190,46 atau 8,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.052.174.676.702,04. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi TA 2025 dan 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 78 Perbandingan Anggaran Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	% Perubahan
	BELANJA MODAL	**1.154.447.391.284,13**	**1.209.255.227.809,00**	(4,53)
1	Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	26.035.500.000,00	448,17
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	387.542.617.012,00	(56,50)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	337.350.155.747,00	(2,54)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	508.814.724.303,63	454.867.342.450,00	11,86
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	785.885.500,00	443,88
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	2.673.727.100,00	(51,51)

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	% Perubahan
	BELANJA MODAL	**966.740.815.511,58**	**1.052.174.676.702,04**	**(8,12)**
1	Belanja Modal Tanah	60.493.628.274,00	8.119.274.250,00	645,06
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.105.830.131,00	370.854.449.606,00	(60,06)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.735.899.953,91	274.000.297.829,17	10,12
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	453.722.389.367,00	396.492.146.916,87	14,43
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.612.368.086,00	778.523.500,00	107,11
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.070.699.699,67	1.929.984.600,00	(44,52)

Penganggaran Belanja Modal mengikuti Kebijakan Akuntansi terkait Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap. Nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal menurut jenis dan rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 80 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	142.719.850.026,00	60.493.628.274,00	42,39	8.119.274.250,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.576.680.206,00	148.105.830.131,00	87,86	370.854.449.606,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.765.378.612,50	301.735.899.953,91	91,78	274.000.297.829,17
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	508.814.724.303,63	453.722.389.367,00	89,17	396.492.146.916,87
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.274.298.136,00	1.612.368.086,00	37,72	778.523.500,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.296.460.000,00	1.070.699.699,67	82,59	1.929.984.600,00
Jumlah		**1.154.447.391.284,13**	**966.740.815.511,58**	**83,74**	**1.052.174.676.702,04**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan Realisasi TA 2024 disajikan pada **Lampiran 6.**

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
142.719.850.026,00	**60.493.628.274,00**	**8.119.274.250,00**

Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp142.719.850.026,00 terealisasi sebesar Rp60.493.628.274,00 atau 42,39% sedangkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp8.119.274.250,00. Adapun rincian Belanja Modal Tanah TA 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 81 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Tanah	**142.719.850.026,00**	**60.493.628.274,00**	**42,39**	**8.119.274.250,00**
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	21.200.000.000,00	13.934.877.000,00	65,73	-
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	85.519.850.026,00	46.558.751.274,00	54,44	3.874.226.000,00
3	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	9.000.000.000,00	-	-	-
4	Belanja Modal Tanah Pertanian	4.500.000.000,00	-	-	-
5	Belanja Modal Tanah untuk Taman	22.500.000.000,00	-	-	-
6	Belanja Modal Tanah BLUD	-	-	-	4.245.048.250,00

Rendahnya serapan Belanja Modal Tanah dikarenakan belanja yang sudah dianggarkan oleh SKPD tidak terealisasi antara lain:

1. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan tanah PSDKU, BCC dan tanah perumahan Polres yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00;
2. Belanja Modal Tanah Pertanian pada pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian untuk satelit BBIL Gunung Manau yang anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00; dan
3. Belanja Modal Tanah untuk Taman pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan tanah Balangan Park dianggarkan sebesar Rp22.500.000.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk pembelian/pembebasan tanah bagi pembangunan Rumah Bersama Kabupaten Balangan, penambahan Kantor Dinas PUPRPERKIM, Kejaksaan Negeri, PSDKU ULM, Kantor Kelurahan Paringin Timur, Lapas Kabupaten Balangan, *Balangan Convention Center* (BCC), Perumahan Polres, kawasan perbankan, serta kantor BPN Pengadilan Agama dengan realisasi sebesar Rp.57.398.505.221,00.

Selain itu, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, belanja modal tanah digunakan untuk pengadaan tanah SDN Dahai Kecamatan Paringin, SDN Putat Basiun Kecamatan Awayan, serta Depo Hasil Bongkaran guna mendukung sarana pendidikan dan fasilitas penujang pelayanan pemerintah daerah dengan realisasi sebesar Rp.2.049.320.729,00.

Selanjutnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, realisasi belanja modal tanah digunakam untuk pembelian tanah relokasi Puskesmas Pirsus dan Honor Pendamping Hukum dengan nilai sebesar Rp1.045.802.324,00.

		Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.2.2.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**168.576.680.206,00**	**148.105.830.131,00**	**370.854.449.606,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp168.576.680.206,00 terealisasi sebesar Rp148.105.830.131,00 atau 87,86%. Jika dibandingkan dengan TA 2024, terdapat penurunan sebesar Rp222.748.619.475,00 atau 60,06%, dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp370.854.449.606,00. Adapun rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin tersaji pada tabel berikut:

Tabel 82 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**168.576.680.206,00**	**148.105.830.131,00**	**87,86**	**370.854.449.606,00**
1	Belanja Modal Excavator	-	-	-	1.897.000.000,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	414.376.200,00	390.839.520,00	94,32	1.049.405.555,00
3	Belanja Modal Compressor	6.000.000,00	5.993.860,00	99,90	5.950.000,00
4	Belanja Modal Electric Generating Set	6.510.000.000,00	6.404.450.500,00	98,38	4.869.000.000,00
5	Belanja Modal Pompa	38.373.100,00	36.219.971,00	94,39	149.268.000,00
6	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-	-	730.250.000,00
7	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	861.529.100,00	843.259.999,00	97,88	659.697.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.611.976.000,00	4.461.801.000,00	96,74	3.646.564.000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	14.608.299.000,00	13.358.275.000,00	91,44	40.878.900.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	224.480.000,00	178.750.000,00	79,63	3.501.900.000,00
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.462.565.000,00	5.138.060.414,00	94,06	17.592.348.000,00
12	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	899.644.500,00
13	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	420.000.000,00	419.302.500,00	99,83	10.350.850.000,00
14	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.600.000.000,00	1.599.732.000,00	99,98	-
15	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	4.820.000,00	-	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
16	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	-	-	-	567.000.000,00
17	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	200.000.000,00	154.290.000,00	77,15	-
18	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	87.182.680,00	85.968.400,00	98,61	-
19	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	309.348.000,00	308.825.000,00	99,83	-
20	Belanja Modal Peralatan Las	69.820.000,00	69.750.000,00	99,90	-
21	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	14.212.200,00	13.960.000,00	98,23	65.551.000,00
22	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	-	-	-	5.600.000,00
23	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	-	36.500.000,00
24	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	1.511.284.980,00
25	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	200.000.000,00	-	-	253.850.000,00
26	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	-	-	8.032.200,00
27	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	-	-	187.691.500,00
28	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	800.000.000,00	571.095.000,00	71,39	529.200.000,00
29	Belanja Modal Mesin Ketik	3.891.500,00	1.550.000,00	39,83	-
30	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	2.400.000,00
31	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.896.846.600,00	5.973.272.709,00	86,61	12.449.922.100,00
32	Belanja Modal Mebel	4.382.121.260,00	3.141.936.428,00	71,70	12.141.601.568,00
33	Belanja Modal Alat Pembersih	69.177.855,00	56.665.500,00	81,91	217.601.000,00
34	Belanja Modal Alat Pendingin	5.434.597.300,00	5.044.538.082,00	92,82	5.808.057.980,00
35	Belanja Modal Alat Dapur	41.686.100,00	-	-	96.600.000,00
36	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.987.477.140,00	9.122.481.902,00	91,34	8.668.563.914,00
37	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	520.400.000,00	516.056.000,00	99,17	255.440.015,00
38	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	583.178.500,00	540.288.000,00	92,65	457.950.000,00
39	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	22.381.200,00	16.000.000,00	71,49	210.940.800,00
40	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	30.985.000,00
41	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	34.587.500,00	33.925.000,00	98,08	52.500.000,00
42	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	900.000.000,00	731.661.500,00	81,30	4.852.931.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
43	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.651.995.980,00	1.716.573.403,00	103,91	2.858.350.000,00
44	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	-	-	-	99.800.000,00
45	Belanja Modal Peralatan Cetak	276.217.900,00	261.916.496,00	94,82	61.450.000,00
46	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	15.000.000,00	-	-	377.300.000,00
47	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.643.446.520,00	3.317.511.451,00	91,05	5.134.711.800,00
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	142.154.200,00	125.696.400,00	88,42	728.762.200,00
49	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	66.095.820,00	42.805.750,00	64,76	19.750.000,00
50	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	442.070.800,00	394.680.000,00	89,28	154.290.000,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.988.771.216,00	6.851.168.749,00	42,85	70.147.780.220,00
52	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	-	-	-	102.000.000,00
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	167.600.000,00	156.771.946,00	93,54	10.000.000,00
54	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	420.000.000,00	-	-	-
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	53.500.000,00	48.978.750,00	91,55	183.625.000,00
56	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	200.000.000,00	199.245.000,00	99,62	-
57	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	12.774.950.560,00	12.429.982.036,00	97,30	195.420.000,00
58	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	16.356.000.000,00	16.095.000.032,00	98,40	25.941.574.000,00
59	Belanja Modal System/Power Supply	-	-	-	3.840.000,00
60	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	211.000.000,00	205.849.500,00	97,56	-
61	Belanja Modal Peralatan Umum	430.000.000,00	381.625.095,00	88,75	549.866.741,00
62	Belanja Modal Komputer Jaringan	75.000.000,00	52.414.200,00	69,89	-
63	Belanja Modal Personal Computer	11.937.957.400,00	10.750.811.845,00	90,06	54.494.878.420,00
64	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.141.962.000,00	1.092.327.499,00	95,65	4.087.206.990,00
65	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	22.478.550,00	20.721.500,00	92,18	-
66	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.150.150.200,00	1.810.173.068,00	84,19	3.674.218.200,00
67	Belanja Modal Peralatan Jaringan	30.800.000,00	28.150.000,00	91,40	-
68	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	377.689.300,00	312.164.200,00	82,65	1.535.555.000,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
69	Belanja Modal Elektronik/Electric	722.292.000,00	680.935.760,00	94,27	962.490.200,00
70	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	4.800.000,00	4.785.000,00	99,69	304.313.720,00
71	Belanja Modal Sepatu Lapangan	-	-	-	5.141.500,00
72	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	-	-	-	245.000.000,00
73	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian		900.000,00	-	
74	Belanja Modal Rambu Bersuar	27.642.775.000,00	27.566.983.941,00	99,73	59.407.124.990,00
75	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.821.460.000,00	1.808.120.070,00	99,27	249.240.000,00
76	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	566.110.500,00
77	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	-	-	-	18.900.000,00
78	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	903.467.525,00	-	2.575.355.974,00
79	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.859.370.225,00	-	-	-
80	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	76.088.000,00	74.337.000,00	97,70	-
81	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	-	61.943.400,00	-	-
82	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.560.548.300,00	1.486.022.230,00	58,04	1.519.414.039,00

Adapun beberapa belanja diuraiakan secara singkat sebagai berikut:

1. Realisasi belanja hanya ada di tahun 2025, tidak ada realisasi di tahun 2024, dijabarkan secara singkat 3 (tiga) jenis belanja dengan nilai terbesar sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan realisasi Rp1.599.732.000,00 merupakan realisasi pada Dinas Kesehatan untuk Belanja Ambulace VIP;
   b. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service dengan realisasi Rp308.825.000,00 merupakan realisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja untuk Belanja Modal Perkakas Bengkel Service Pada UPT BLK Kabupaten Balangan; dan
   c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya dengan realisasi Rp205.849.500,00 merupakan realisasi pada Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup untuk Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

2. Realisasi belanja terdapat di tahun 2025 dan 2024:
   a. Belanja Modal Rambu Bersuar pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp27.566.983.941,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp59.407.124.990,00 menurun sebesar Rp31.840.141.049,00 atau 53,60%, realisasi Belanja Modal Rambu Bersuar merupakan realisasi pada Dinas Perhubungan yang merupakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengadaan dan Pemasangan, serta Jasa Konsultansi Pengawasan Penerangan Jalan Umum (PJU);
   b. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp16.095.000.032,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp25.941.574.000,00 menurun sebesar Rp9.846.573.968,00 atau 37,96%, realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya merupakan realisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Pengadaan Smart Interactive Flat Panel SD dan SMP;
   c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil Dinas) pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp13.358.275.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp40.878.900.000,00 menurun sebesar Rp27.520.625.000,00 atau 67,32%, adapun 5 (lima) SKPD dengan nilai realisasi terbesar adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp5.270.000.000,00, Inspektorat sebesar Rp2.379.769.998,00, Dinas Perhubungan Rp1.355.000.002,00, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.222.000.000,00, dan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Rp1.201.220.000,00;
   d. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp12.429.982.036,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp195.420.000,00 meningkat sebesar Rp12.234.562.036,00 atau 6260,65%, realisasi Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK merupakan realisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.424.982.036,00 untuk Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran PAUD Interactive Smart Table untuk PAUD / TK Negeri Kab. Balangan, dan realisasi pada Kecamatan Paringin Selatan sebesar Rp5.000.000,00 untuk belanja modal perosotan (playground indoor set) untuk ruang bermain anak Pelayanan Kecamatan Paringin Selatan; dan

e. Belanja Modal Personal Computer pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp10.750.811.845,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp54.494.878.420,00 menurun sebesar Rp43.744.066.575,00 atau 80,27%, adapun 5 (lima) SKPD dengan nilai realisasi terbesar adalah Inspektorat sebesar Rp1.535.479.993,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.349.167.488,00, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp1.122.016.545,00, Sekretariat DPRD Rp886.556.401,00, dan Sekretariat Daerah Rp720.760.481,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**328.765.378.612,50**	**301.735.899.953,91**	**274.000.297.829,17**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp328.765.378.612,50 terealisasi sebesar Rp301.735.899.953,91 atau 91,78% jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp27.735.602.124,74 atau meningkat sebesar 10,12% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp274.000.297.829,17. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 83 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**328.765.378.612,50**	**301.735.899.953,91**	**91,78**	**274.000.297.829,17**
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.478.065.094,00	178.474.786.905,87	93,70	122.444.440.325,92
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	547.247.000,00	552.719.615,00	101,00	3.577.233.619,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	150.000.000,00	149.568.000,00	99,71	-
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	856.771.353,00	802.934.963,00	93,72	2.710.946.645,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	27.712.425.526,00	22.730.216.364,50	82,02	13.002.327.498,42
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.090.530.943,00	1.084.464.467,00	99,44	10.532.138.706,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	676.432.200,00	659.910.154,06	97,56	21.201.752.265,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.803.936.787,00	33.682.731.815,00	91,52	24.870.099.553,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-	-	1.930.249.458,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.765.475.131,00	6.601.309.945,00	75,31	18.231.432.285,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	973.924.969,00	972.176.889,00	99,82	1.030.469.269,00
12	Belanja Modal Bangunan Terbuka	413.300.000,00	449.545.346,00	108,77	499.680.000,00
13	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	-	10.000.000,00	-	2.215.739.177,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.426.726.600,00	1.397.268.439,03	97,94	1.081.059.247,00
15	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	17.610.233.918,00	16.716.940.651,00	94,93	12.675.287.603,00
16	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.457.119.300,00	1.347.918.091,42	92,51	2.618.268.430,00
17	Belanja Modal Taman	25.968.857.161,50	24.691.184.914,03	95,08	21.706.302.377,00
18	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	-	-	-	1.260.892.000,00
19	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	-	-	-	393.757.328,00
20	Belanja Modal Tugu	-	-	-	203.174.850,00
21	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	2.016.000.000,00	1.995.709.862,00	98,99	5.328.566.899,83
22	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	552.266.300,00	149.612.000,00	27,09	170.870.000,00
23	Belanja Modal Pagar	11.091.155.930,00	9.112.439.532,00	82,16	4.946.236.293,00
24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	174.910.400,00	154.462.000,00	88,31	1.369.374.000,00

Adapun beberapa belanja diuraiakan secara singkat sebagai berikut:

1. Realisasi belanja hanya ada di tahun 2025, tidak ada realisasi di tahun 2024, ada pada Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi dengan realisasi Rp149.568.000,00 merupakan realisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2. Realisasi belanja terdapat di tahun 2025 dan 2024:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp178.474.786.905,87 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp122.444.440.325,92 meningkat sebesar Rp56.030.346.579,95 atau 45,76%. Realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp146.714.400.977,00, realisasi tersebut diantaranya: 1) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Polres Kab. Balangan dengan realisasi sebesar Rp15.612.433.691,00; 2) Pekerjaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kab. Balangan Tahap 2 dengan realisasi sebesar Rp15.525.153.895,00;

3) Pekerjaan Pembangunan Relokasi SDN 1 Paringin dengan realisasi sebesar Rp15.398.999.380,00; 4) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Istana Anak Yatim Kab. Balangan Lanjutan dengan realisasi sebesar Rp15.220.236.671,00; 5) Pekerjaan Pembangunan Wisma Balangan Tahap 2 dengan realisasi sebesar Rp10.030.158.073,00;

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp33.682.731.815,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.870.099.553,00 meningkat sebesar Rp8.812.632.262,00 atau 35,43%. Realisasi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi terbesar untuk Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Aniungan Kec. Halong dengan realisasi sebesar Rp734.204.000,00, Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Teluk Bayur 2 (bertingkat) Kec. Juai dengan realisasi sebesar Rp460.244.999,00, dan Pembangunan Pagar PAUD Terpadu Negeri Pembina Awayan dengan realisasi sebesar Rp476.659.348,00; dan

c. Belanja Modal Taman pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp24.691.184.914,03 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp21.706.302.377,00 meningkat sebesar Rp2.984.882.537,03 atau 13,75%. Realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp23.791.152.832,00, realisasi tersebut diantaranya Pekerjaan Penataan Kawasan Terminal Paringin Kab. Balangan Tahap III dengan realisasi sebesar Rp8.098.208.078,00, Pekerjaan Pembangunan RTH Balangan Expo Lanjutan dengan realisasi sebesar Rp5.255.513.061,00, dan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Datu Kandang Haji Lanjutan dengan realisasi sebesar Rp5.052.102.166,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**508.814.724.303,63**	**453.722.389.367,00**	**396.492.146.916,87**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp508.814.724.303,63 terealisasi sebesar Rp453.722.389.367,00 atau 89,17% jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp57.230.242.450,13 atau meningkat sebesar 14,43%, dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp396.492.146.916,87, Adapun rincian belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 84 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**508.814.724.303,63**	**453.722.389.367,00**	**89,17**	**396.492.146.916,87**
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	218.317.566.130,63	183.842.780.022,00	84,21	148.827.407.839,87
2	Belanja Modal Jalan Desa	85.678.339.430,00	84.850.916.884,00	99,03	69.675.230.509,00
3	Belanja Modal Jalan Kereta Api	-	7.750.000,00	-	-
4	Belanja Modal Jalan Lainnya	874.279.600,00	661.356.353,00	75,65	2.347.794.700,00
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	59.650.686.518,00	44.641.098.686,00	74,84	40.910.419.134,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	708.350.000,00	701.114.000,00	98,98	2.075.386.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	21.456.400.000,00	20.333.952.308,00	94,77	13.163.686.200,00
8	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	-	-	-	126.888.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	734.620.000,00	718.282.232,00	97,78	1.724.798.495,00
10	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	43.299.260.000,00	42.291.659.495,00	97,67	34.923.692.000,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	220.350.000,00	218.732.710,00	99,27	95.962.689,00
12	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	98.928.195,00
13	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	-	2.654.000,00	-	-
14	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	69.501.872.625,00	67.200.211.471,00	96,69	70.798.533.155,00
15	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	198.943.410,00	99,47	2.400.697.000,00
16	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.600.000.000,00	1.599.982.506,00	100,00	7.150.000.000,00
17	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	4.168.000.000,00	4.056.606.000,00	97,33	-
18	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	350.000.000,00	348.762.000,00	99,65	199.559.000,00
19	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya	1.700.000.000,00	1.696.760.690,00	99,81	-
20	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	355.000.000,00	350.826.600,00	98,82	1.973.164.000,00

Adapun beberapa belanja diuraiakan secara singkat sebagai berikut:

1. Realisasi belanja hanya ada di tahun 2025, tidak ada realisasi di tahun 2024, dijabarkan secara singkat 2 (dua) jenis belanja dengan nilai terbesar sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya dengan realisasi Rp4.056.606.000,00 merupakan realisasi pada Dinas Kesehatan untuk Pemasangan dan Pengadaan *Transfromator Indoor*; dan
   b. Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya dengan realisasi Rp1.696.760.690,00 merupakan realisasi pada Dinas Kesehatan untuk Pembangunan Jaringan Oksigen Sentral.
2. Realisasi belanja terdapat di tahun 2025 dan 2024:
   a. Belanja Modal Jalan Kabupaten pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp183.842.780.022,00, meningkat sebesar Rp35.015.372.182,13 atau 23,53% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp148.827.407.839,87. Realisasi tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Paringin–Banua Hanyar sebesar Rp14.653.487.860,00, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tugu Maritam–Muara Pitap sebesar Rp13.644.997.054,00, dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Manau–Lok Batu sebesar Rp11.198.741.050,00;
   b. Belanja Modal Jalan Desa pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp84.850.916.884,00, meningkat sebesar Rp15.175.686.375,00 atau 21,78% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp69.675.230.509,00. Realisasi tersebut sebagian besar terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain untuk Karya Bakti TNI Jalan Desa Mayanau–Mantuyan sebesar Rp32.098.540.800,00, Karya Bakti TNI Desa Binuang Santang–Ajung sebesar Rp18.098.417.745,00, dan Karya Bakti TNI Jalan Desa Baru–Awayan–Tangalin sebesar Rp7.697.945.500,00; dan
   c. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp67.200.211.471,00, menurun sebesar Rp3.598.321.684,00 atau 5,08% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp70.798.533.155,00. Realisasi tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain untuk pembayaran honorarium Tim Pengelola Teknis/Pendukung PPK (Perkim) sebesar Rp277.200.000,00, pekerjaan pembangunan/peningkatan drainase lingkungan

Desa Awayan Pasar sebesar Rp199.982.500,00, dan pekerjaan pembangunan/peningkatan drainase Desa Baruh Bahinu Luar (PKM 199) sebesar Rp199.810.000,00.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	4.274.298.136,00	**1.612.368.086,00**	**778.523.500,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.274.298.136,00 terealisasi sebesar Rp1.612.368.086,00 atau 37,72%. Jika dibandingkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp833.844.586,00 atau naik sebesar 107,11% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp778.523.500,00. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 85 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**4.274.298.136,00**	**1.612.368.086,00**	**37,72**	**778.523.500,00**
1	Belanja Modal Buku Umum	147.704.000,00	23.633.000,00	16,00	352.500.000,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.550.000.000,00	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00	49.372.800,00	98,75	173.588.000,00
4	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	265.116.100,00	254.078.100,00	95,84	126.460.000,00
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-	-	6.679.500,00
6	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	97.966.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	21.330.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	-	1.085.749.550,00	-	-
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	114.262.936,00	114.262.936,00	100,00	-
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	147.215.100,00	85.271.700,00	57,92	-

Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat beberapa belanja pada TA 2024 tidak ada realisasi dan pada TA 2025 dengan realisasi sebesar Rp1.085.749.550,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler untuk keperluan buku-buku Sekolah.

Sedangkan dari Modal Aset Tetap Lainnya juga terdapat peningkatan dan penurunan realisasi Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2025 dibandingkan realisasi TA 2024 antara lain sebagai berikut:

Tabel 86 Perbandingan Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Belanja Modal Buku Umum	23.633.000,00	352.500.000,00	(328.867.000,00)	(93,30)
2	Belanja Modal Alat Musik	49.372.800,00	173.588.000,00	(124.215.200,00)	(71,56)
3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	254.078.100,00	126.460.000,00	127.618.100,00	100,92
Jumlah		**327.083.900,00**	**652.548.000,00**	**(325.464.100,00)**	**(49,88)**

1. Belanja modal buku umum merupakan pengadaan buku koleksi perpustakaan SD Negeri Banua hanyar Kec. Batumandi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.23.633.000,00;
2. Belanja modal alat musik sebesar Rp49.372.800,00 merupakan belanja modal alat musik drumband 1(satu) paket pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Belanja Modal Alat Peraga Kesenian sebesar Rp254.078.100,00 terdiri atas belanja mainan edukatif sebesar Rp14.300.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belanja mainan edukatif sebesar Rp141.025.500,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, belanja mainan edukatif untuk posyandu sebesar Rp49.261.800,00 pada Kelurahan Paringin Kota, belanja mainan edukatif sebesar Rp42.490.800,00 pada Kelurahan Paringin Timur, serta belanja playground untuk ruang bermain anak sebesar Rp7.000.000,00 pada Kecamatan Tebing Tinggi.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	**1.296.460.000,00**	**1.070.699.699,67**	**1.929.984.600,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.296.460.000,00 terealisasi sebesar Rp1.070.699.699,67 atau 82,59% jika dibandingkan dengan TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp859.284.900,33 atau sebesar 44,52% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.929.984.600,00. Adapun rincian Belanja Modal Aset Lainnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 87 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dengan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Aset Lainnya	**1.296.460.000,00**	**1.070.699.699,67**	**82,59**	**1.929.984.600,00**
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	31.460.000,00	31.223.750,00	99,25	1.629.984.600,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.265.000.000,00	1.039.475.949,67	82,17	300.000.000,00

1. Realiasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Lisensi dan Franchise* merupakan realisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja untuk Perlengkapan Peralatan Pelatihan COA berupa Lisensi Pada UPT BLK Kabupaten Balangan sebesar Rp26.223.750,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp5.000.000,00; dan
2. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* merupakan belanja *Software*, Aplikasi atau sejenisnya dengan rinci dibawah ini:

Tabel 88 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Pembuatan Aplikasi Untuk PAUD	49.900.050,00
2	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Belanja Pembuatan Aplikasi Kertas Kerja PPK	49.006.500,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pembuatan Peta Potensi Investasi Berbasis Digital)	74.600.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Berupa Perpustakaan Digital Offline dan Penambahan Koleksi Buku Balangan Membaca	377.511.000,00
5	Sekretariat Daerah	Pembuatan Aplikasi (Software)	49.228.496,67
6	Sekretariat DPRD	Pembuatan Aplikasi (Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD) RUP	47.730.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pembuatan Aplikasi E-SAKIPPRO	99.511.500,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengembangan Fitur Aplikasi Gaji ASN/PBASN dan Tamsil Guru, Pengembangan Aplikasi SIPANDA BMD, dan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Kontruksi Pembuatan Aplikasi Pelaporan Keuangan	291.988.403,00
Jumlah			**1.039.475.949,67**

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	9.478.109.524,85	**3.388.752.199,00**	**1.357.500.000,00**

BTT merupakan pengeluaran anggaran belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan

prasarana serta kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam TA yang bersangkutan.

Penggunaan BTT, tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD teknis sesuai rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk di lakukan reviu oleh APIP.
4) Kepala SKPD mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan hasil reviu oleh APIP, keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab.
5) Pencairan dana kebutuhan belanja dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
6) PPKD selaku BUD melakukan pencairan dana keadaan darurat kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati dan menandatangani berita acara pengeluaran BTT oleh BPKAD dan SKPD teknis terkait.
7) Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan ditransfer ke rekening pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa pada SKPD teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait.
8) Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD.
9) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

BTT TA 2025 dianggarkan sebesar Rp9.478.109.524,85 terealisasi sebesar Rp3.388.752.199,00 atau 35,75%, jika dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp2.031.252.199,00 atau 149,63% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.357.500.000,00.

Tabel 89 Rincian Belanja Tidak Terduga

No	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 13 Orang @ Rp. 1.500.000	19.500.000,00

No	URAIAN	Nilai (Rp)
2	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 di sebanyak 24 Orang @ Rp. 1.500.000	36.000.000,00
3	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 28 Orang @ Rp. 1.500.000	42.000.000,00
4	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 25 Orang @ Rp. 1.500.000	37.500.000,00
5	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 35 Orang @ Rp. 1.500.000	52.500.000,00
6	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 10 Orang @ Rp. 1.500.000	15.000.000,00
7	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
8	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 1 Bulan Januari Februari 2025 sebanyak 4 Orang @ Rp. 1.500.000	6.000.000,00
9	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 5 Orang @ Rp. 1.500.000	7.500.000,00
10	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak12 Orang @ Rp. 1.500.000	18.000.000,00
11	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 9 Orang @ Rp. 1.500.000	13.500.000,00
12	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
13	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 15 Orang @ Rp. 1.500.000	22.500.000,00
14	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 9 Orang @ Rp. 1.500.000	13.500.000,00
15	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
16	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 2 Bulan Maret 2025 sebanyak 3 Orang @ Rp. 1.500.000	4.500.000,00
17	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 19 Orang @ Rp. 1.500.000	28.500.000,00
18	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 17 Orang @ Rp. 1.500.000	25.500.000,00
19	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak8 Orang @ Rp. 1.500.000	12.000.000,00
20	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 10 Orang @ Rp. 1.500.000	15.000.000,00
21	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 13 Orang @ Rp. 1.500.000	19.500.000,00
22	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 9 Orang @ Rp. 1.500.000	13.500.000,00
23	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 3 Orang @ Rp. 1.500.000	4.500.000,00
24	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 3 Bulan April 2025 sebanyak 1 Orang @ Rp. 1.500.000	1.500.000,00
25	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai dengan Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Kas Umum Negara	44.302.319,00
26	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00
27	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 7 Orang @ Rp. 1.500.000	10.500.000,00
28	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 16 Orang @ Rp. 1.500.000	24.000.000,00

No	URAIAN	Nilai (Rp)
29	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00
30	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
31	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 6 Orang @ Rp. 1.500.000	9.000.000,00
32	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 9 Orang @ Rp. 1.500.000	13.500.000,00
33	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 4 Bulan Mei 2025 sebanyak 3 Orang @ Rp. 1.500.000	4.500.000,00
34	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
35	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 24 Orang @ Rp. 1.500.000	36.000.000,00
36	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 18 Orang @ Rp. 1.500.000	27.000.000,00
37	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00
38	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 16 Orang @ Rp. 1.500.000	24.000.000,00
39	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 8 Orang @ Rp. 1.500.000	12.000.000,00
40	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 6 Orang @ Rp. 1.500.000	9.000.000,00
41	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 5 Bulan Juni Juli 2025 sebanyak 3 Orang @ Rp. 1.500.000	4.500.000,00
42	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
43	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 10 Orang @ Rp. 1.500.000	15.000.000,00
44	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 9 Orang @ Rp. 1.500.000	13.500.000,00
45	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 10 Orang @ Rp. 1.500.000	15.000.000,00
46	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00
47	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 4 Orang @ Rp. 1.500.000	6.000.000,00
48	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 7 Orang @ Rp. 1.500.000	10.500.000,00
49	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 6 Bulan Agustus 2025 sebanyak 6 Orang @ Rp. 1.500.000	9.000.000,00
50	Pembayaran Atas Kelebihan Pemotongan Denda Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2024 Pada Disdikbud	32.351.880,00
51	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 7 Orang @ Rp. 1.500.000	10.500.000,00
52	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 13 Orang @ Rp. 1.500.000	19.500.000,00
53	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 16 Orang @ Rp. 1.500.000	24.000.000,00
54	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 8 Orang @ Rp. 1.500.000	12.000.000,00
55	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00

No	URAIAN	Nilai (Rp)
56	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 8 Orang @ Rp. 1.500.000	12.000.000,00
57	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 7 Orang @ Rp. 1.500.000	10.500.000,00
58	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 7 Bulan September 2025 sebanyak 2 Orang @ Rp. 1.500.000	3.000.000,00
59	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 8 Orang @ Rp. 1.500.000	12.000.000,00
60	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 16 Orang @ Rp. 1.500.000	24.000.000,00
61	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
62	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
63	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 17 Orang @ Rp. 1.500.000	25.500.000,00
64	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 10 Orang @ Rp. 1.500.000	15.000.000,00
65	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 6 Orang @ Rp. 1.500.000	9.000.000,00
66	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 8 Bulan Oktober 2025 sebanyak 1 Orang @ Rp. 1.500.000	1.500.000,00
67	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Awayan Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 17 Orang @ Rp. 1.500.000	25.500.000,00
68	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Batumandi Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 20 Orang @ Rp. 1.500.000	30.000.000,00
69	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Halong Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 12 Orang @ Rp. 1.500.000	18.000.000,00
70	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Juai Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 14 Orang @ Rp. 1.500.000	21.000.000,00
71	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Lampihong Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 23 Orang @ Rp. 1.500.000	34.500.000,00
72	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 18 Orang @ Rp. 1.500.000	27.000.000,00
73	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Paringin Selatan Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 11 Orang @ Rp. 1.500.000	16.500.000,00
74	Bantuan Santunan Kematian kepada warga Balangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahap 9 Bulan Nopember Desember 2025 sebanyak 5 Orang @ Rp. 1.500.000	7.500.000,00
75	TU NIHIL Penyaluran Dana BTT Untuk digunakan sebagai Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten Balangan	1.148.768.000,00
76	TU NIHIL Penyaluran Dana BTT Tahap Ke-2 Untuk digunakan sebagai Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten Balangan	916.830.000,00
Jumlah		**3.388.752.199,00**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.4. Belanja Transfer	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**496.863.574.525,00**

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp379.372.077.917,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp400.010.530.689,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan

sebesar Rp117.491.496.608,00 atau 23,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp496.863.574.525,00. Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Adapun rinciannya sebagai berikut:

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.4.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**496.863.574.525,00**

Realisasi Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp379.372.077.917,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp400.010.530.689,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp117.491.496.608,00 atau 23,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp496.863.574.525,00. Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025 dan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 90 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	4.112.895.297,00	4.080.358.497,00	99,21	1.730.148.884,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	395.897.635.392,00	375.291.719.420,00	94,80	495.133.425.641,00
Jumlah		**400.010.530.689,00**	**379.372.077.917,00**	**94,84**	**496.863.574.525,00**

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam LKPD realisasi belanja transfer diakui sebesar nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dan ADD (Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) sedangkan Dana Desa Alokasi Pusat (Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) diakui sebesar yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada Pemerintahan Desa, untuk realisasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak dicatat dalam LKPD.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil	**4.112.895.297,00**	**4.080.358.497,00**	**1.730.148.884,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp4.080.358.497,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp4.112.895.297,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp2.350.209.613,00 atau 135,84% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.730.148.884,00. Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025 dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 91 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.874.518.140,00	3.844.094.540,00	99,21	1.505.603.600,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	238.377.157,00	236.263.957,00	99,11	224.545.284,00
Jumlah		**4.112.895.297,00**	**4.080.358.497,00**	**99,21**	**1.730.148.884,00**

5.1.2.4.1.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3.874.518.140,00	**3.844.094.540,00**	**1.505.603.600,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2025 Rp3.844.094.540,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp3.874.518.140,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.338.490.940,00 atau 155,32% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.505.603.600,00. Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025 tersaji pada **Lampiran 7**.

5.1.2.4.1.1.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
238.377.157,00	**236.263.957,00**	**224.545.284,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2025 Rp236.263.957,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp238.377.157,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.718.673,00 atau 5,22% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp224.545.284,00. Rincian Realisasi TA 2025 tersaji pada **Lampiran 8.**

5.1.2.4.1.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
395.897.635.392,00	**375.291.719.420,00**	**495.133.425.641,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp375.291.719.420,00 atau 94,80% dari anggaran sebesar Rp395.897.635.392,00. Realisasi tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp119.841.706.221,00 atau 24,20% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp495.133.425.641,00. Belanja tersebut terdiri dari ADD dari APBN dan APBD. Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025 dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 92 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	5.138.128.792,00	-	-	-
2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	7.777.458.900,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	390.759.506.600,00	375.291.719.420,00	96,04	487.355.966.741,00
Jumlah		**395.897.635.392,00**	**375.291.719.420,00**	**94,80**	**495.133.425.641,00**

5.1.2.4.1.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.138.128.792,00	**-**	**-**

Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.138.128.792,00 tetapi tidak ada terealisasi.

5.1.2.4.1.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
-	**-**	**7.777.458.900,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi TA 2025 tidak ada. Realisasi TA 2024 merupakan hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dukungan anggaran untuk pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

5.1.2.4.1.2.3. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
390.759.506.600,00	**375.291.719.420,00**	**487.355.966.741,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 Rp375.291.719.420,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp390.759.506.600,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp112.064.247.321,00 atau 22,99% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024

sebesar Rp487.355.966.741,00. Rincian Anggaran dan Realisasi TA 2025 dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 93 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**390.759.506.600,00**	**375.291.719.420,00**	**96,04**	**487.355.966.741,00**
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	110.528.915.000,00	98.244.957.020,00	88,89	114.314.789.590,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	280.230.591.600,00	277.046.762.400,00	98,86	373.041.177.151,00

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DDS) APBN pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp110.528.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.244.957.020,00 atau 88,89%, adapun realisasi tersaji pada **Lampiran 9.**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari ADD dari APBD pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp280.230.591.600,00 dan terealisasi sebesar Rp277.046.762.400,00 atau 98,86%, adapun realisasi tersaji pada **Lampiran 10.**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.3. Surplus/ (Defisit)	**(637.908.437.000,85)**	**248.210.650.301,51**	**747.135.823.381,52**

Terdapat Surplus Anggaran pada TA 2025 sebesar Rp248.210.650.301,51 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp747.135.823.381,52, maka mengalami penurunan sebesar Rp498.925.173.080,01 atau 66,78%. Rincian Surplus TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	3.355.756.662.438,00	3.642.957.087.265,14	108,56	4.326.129.918.038,91
2	Belanja	3.993.665.099.438,85	3.394.746.436.963,63	85,00	(3.578.994.094.657,39)
Jumlah		**(637.908.437.000,85)**	**248.210.650.301,51**	**(38,91)**	**747.135.823.381,52**

5.1.4. Pembiayaan *Netto*	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	637.908.437.000,85	**637.908.336.793,85**	**(109.227.386.380,67)**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan *Netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu.

Realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2025 sebesar Rp637.908.336.793,85. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp747.135.723.174,52 atau 684,02% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp(109.227.386.380,67).
Pembiayaan *Netto* terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan *Netto*

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	637.908.437.000,85	637.908.336.793,85	100,00	640.772.613.619,33
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	(750.000.000.000,00)
Jumlah		**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**(109.227.386.380,67)**

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	637.908.437.000,85	**637.908.336.793,85**	**640.772.613.619,33**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp637.908.336.793,85 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp637.908.437.000,85. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.864.276.825,48 atau 0,45% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp640.772.613.619,33. Rincian penerimaan pembiayaan TA 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**637.908.437.000,85**	**637.908.336.793,85**	**100,00**	**640.771.613.619,33**
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	362.215.020.866,10

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	629.401.707.659,99	629.401.707.659,99	100,00	264.822.735.809,35
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.219.353.795,86	6.219.353.795,86	100,00	
4	Sisa Dana Kapitasi	122.260.304,00	122.260.304,00	100,00	
5	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	147.761.158,00	147.761.158,00	100,00	
6	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.017.354.083,00	2.017.354.083,00	100,00	
7	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	-	13.733.779.326,88
8	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	-	(100,207,00)	-	77.617,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	-	-	-	1.000.000,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**(750.000.000.000,00)**

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sedangkan TA 2024 sebesar Rp750.000.000.000,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**-**	**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**

Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp886.118.987.095,36 dan Rp637.908.437.000,85. Adapun rincian realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	871.993.533.360,28
2	Kas di BLUD	11.705.419.258,08
3	Kas Dana BOS	37.655.777,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-
5	Kas Dana BOP	11.000,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.576.609.600,00
7	Kas Lainnya	805.758.100,00
JUMLAH		**886.118.987.095,36**

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos LPSAL sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir, dalam LPSAL juga memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**637.908.437.000,85**	**640.771.536.002,33**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2025 sebesar Rp637.908.437.00 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2024 sebesar Rp640.771.536.002,33 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Sehingga posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2025 lebih kecil sebesar Rp2.863.099.001,48 atau 0,45% dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**637.908.336.793,85**	**640.771.613.619,33**

Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp637.908.336.793,85 sebagai penggunaan SiLPA TA 2025 yang dianggarkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp637.908.336.793,85 jika dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2024 sebesar Rp640.771.613.619,33 maka posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2025 lebih kecil sebesar Rp2.863.276.825.48 atau 0,45% dari realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**

Surplus sebesar Rp248.210.550.094,51 sebagaimana diuraikan pada poin CaLK LRA 5.1.3 dan realisasi Pembiayaan *Netto* sebesar Rp637.908.336.793,85 sebagaimana diuraikan pada poin CaLK 5.1.4, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp886.118.987.095,36, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan sebesar Rp3.355.756.662.438,00 yang terealisasi sebesar Rp3.641.301.887.265,14 sehingga terdapat selisih lebih dari target pendapatan sebesar Rp285.545.224.827,14 atau terealisasi 108,51% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

   a. Selisih lebih anggaran PAD sebesar Rp56.077.059.039,66 yang terdiri atas:
      1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.752.366.130,00;
      2) Selisih lebih anggaran Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp18.793.743,00;
      3) Selisih anggaran pendapatan HPKDYD sebesar Rp0,00; dan
      4) Selisih lebih anggaran Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp54.305.899.166,66.

   b. Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp211.322.444.130,00 yang terdiri atas:
      1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp221.424.049.840,00 yang terdiri atas:
         a) Selisih lebih anggaran DBH sebesar Rp211.235.688.500,00;
         b) Selisih lebih anggaran DAU sebesar Rp11.687.889.760,00;
         c) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Fisik sebesar Rp6.487.858,00; dan
         d) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Non Fisik sebesar Rp1.493.040.562,00.
      2) Selisih kurang anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp12.256.957.980,00 yang terdiri atas:
         a) Selisih lebih anggaran dari Insentif Fiskal sebesar Rp27.000.000,00; dan
         b) Selisih kurang anggaran Dana Desa sebesar Rp12.283.957.980,00.
      3) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp2.155.352.270,00 merupakan selisih lebih anggaran Pendapatan Bagi Hasil.

   c. Selisih lebih anggaran Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp19.800.921.657,48 yang terdiri atas:
      1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Hibah sebesar Rp1.655.200.090.00; dan

2) Selisih lebih anggaran Pendapatan Lainnya sebesar Rp18.145.721.567,48.

2. Anggaran Belanja sebesar Rp3.993.665.099.438,85 terealisasi sebesar Rp Rp3.394.746.436.963,63, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp598.918.662.475,22. Rincian sisa anggaran Belanja sebagai berikut:

   a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp384.484.276.604,82 yang terdiri atas:
      1) Selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp135.347.627.992,87;
      2) Selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp221.870.930.715,86;
      3) Selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp26.249.317.896,09; dan
      4) Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.016.400.000,00.

   b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp187.706.575.772,55 yang terdiri atas:
      1) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp82.226.221.752,00;
      2) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.470.850.075,00;
      3) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.029.478.658,59;
      4) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp55.092.334.936,63;
      5) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.661.930.050,00; dan
      6) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp225.760.300,33.

   c. Selisih kurang anggaran BTT sebesar Rp6.089.357.325,85; dan

   d. Selisih kurang anggaran Belanja Transfer sebesar Rp20.638.452.772,00 merupakan selisih kurang anggaran dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp20.638.452.772,00.

3. Anggaran Pembiayaan sebesar Rp637.908.437.000,85 yang terealisasi sebesar Rp637.908.336.793,85 sehingga selisih kurang anggaran sebesar Rp100.207,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**(100.207,00)**	**77.617,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp(100.207,00) merupakan koreksi silpa yang berasal dari SDN Batu Merah 3 sebesar Rp80.000,00, SDN Lok Batung sebesar Rp(105.207,00) dan SDN Mangkayahu sebesar Rp(75.000,00) sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.617,00 merupakan koreksi silpa yang berasal dari Puskesmas Tebing Tinggi (BOK) sebesar Rp40.000,00 dan dari SDN Dayak Pitap sebesar Rp37.617,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**

Jumlah SAL per 31 Desember 2025 sebesar Rp886.118.987.095,36 terdiri atas:

Tabel 98 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Rekening	Nama Rekening	Jumlah
Kas Daerah			
Bank Kalsel			
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	871.993.533.360,28
Total Kas Daerah			**871.993.533.360,28**
Kas di Bendahara Pengeluaran			-
Kas di Bendahara Penerimaan			-
Kas di Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP			-
Kas di Bendahara BLUD			11.705.419.258,08
Kas di Bendahara BOS			37.655.777,00
Kas di Bendahara BOP			11.000,00
Kas di Bendahara BOK			1.576.609.600,00
Kas Lainnya			805.758.100
Jumlah			**14.125.453.735,08**
Utang PFK			-
Total Kas Bersih			**886.118.987.095,36**

5.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1. Aset	**6.878.379.259.266,00**	**6.614.844.548.126,52**

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.878.379.259.266,00 dan Rp6.614.844.548.126,52, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	1.777.223.560.812,19	1.937.043.450.397,05
2	Investasi Jangka Panjang	1.126.190.308.639,45	1.124.200.930.829,11
3	Aset Tetap	3.927.387.553.705,42	3.138.654.675.028,84
4	Aset Lainnya	47.577.836.108,94	414.945.491.871,52
Jumlah		**6.878.379.259.266,00**	**6.614.844.548.126,52**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1. Aset Lancar	**1.777.223.560.812,19**	**1.937.043.450.397,05**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.777.223.560.812,19 dan Rp1.937.043.450.397,05, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	871.993.533.360,28	629.401.707.659,99
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	11.705.419.258,08	6.219.353.795,86
5	Kas di Bendahara BOS	37.655.777,00	147.761.158,00
6	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	122.260.304,00
7	Kas di Bendahara BOP	11.000,00	-
8	Kas di Bendahara BOK	1.576.609.600,00	2.017.354.083,00
9	Kas Lainnya	805.758.100,00	-
10	Setara Kas	-	-
11	Piutang Pajak	3.538.347.208,00	3.881.268.779,00
12	Piutang Retribusi	160.552.730,00	147.907.730,00
13	Piutang HPKDYD	-	-
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.193.093.845,67	12.036.582.088,50
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	709.305.200.000,00	1.223.130.370.000,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	27.589.748.778,00	24.790.084.881,00
17	Piutang Lainnya	40.548.320,38	111.377.138,68
18	Penyisihan Piutang	(2.142.453.558,22)	(1.840.457.973,98)
19	Beban Dibayar Dimuka	-	-
19	Persediaan	134.419.536.393,00	36.877.880.753,00
Jumlah		**1.777.223.560.812,19**	**1.937.043.450.397,05**

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	871.993.533.360,28	**629.401.707.659,99**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada Bank Kalsel Cabang Paringin dengan nomor rekening 013.00.03.00003.5. Rekening Kas Daerah dibuka berdasarkan SK Bupati Balangan nomor 188.45/732/Kum Tahun 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan. Bank Kalsel ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang Kas Daerah Kabupaten Balangan TA 2025 yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 188.45/8/Kum Tahun 2024.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp871.993.533.360,28 dan Rp629.401.707.659,99, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	-	**-**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 atau nihil.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	-	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 atau nihil.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	11.705.419.258,08	**6.219.353.795,86**

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.705.419.258,08 dan Rp6.219.353.795,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101 Kas di Bendahara BLUD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD	10.428.630.872,77	6.219.353.795,86
2	Puskesmas Juai	43.626.994,83	-
3	Puskesmas Pirsus	35.776.895,14	-

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4	Puskesmas Halong	219.123.832,94	-
5	Puskesmas Uren	86.230.434,01	-
6	Puskesmas Paringin	308.190.655,94	-
7	Puskesmas Paringin Selatan	248.778.992,14	-
8	Puskesmas Awayan	240.185.623,12	-
9	Puskesmas Tebing Tinggi	1.865.453,91	-
10	Puskesmas Lokbatu	30.731.053,99	-
11	Puskesmas Batumandi	226.596,48	-
12	Puskesmas Tanah Habang	15.217.383,32	-
13	Puskesmas Lampihong	46.834.469,49	-
Jumlah		**11.705.419.258,08**	**6.219.353.795,86**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/314/Kum Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013. Namun demikian, penerapan pengelolaan keuangan BLUD belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 karena belum diakomodasi dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/34/Kum Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan RSUD Balangan sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD secara efektif mulai diterapkan pada Tahun 2015 setelah diakomodasi dalam Renja dan RKA Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Bendahara BLUD RSUD membuka rekening pada Bank Kalsel yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/634/Kum Tahun 2014.

Selanjutnya, pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balangan. Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Keberhasilan penerapan PPK-BLUD pada RSUD menjadi dasar pengembangan penerapan BLUD pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan menargetkan seluruh Puskesmas menerapkan PPK-BLUD pada tahun 2025 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan primer. Kebijakan ini juga sejalan dengan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mendorong sebagian besar Puskesmas di Indonesia menerapkan pola BLUD.

Dasar hukum pembentukan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Balangan adalah Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/79/Kum Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Balangan. Berdasarkan keputusan tersebut, Bendahara BLUD Puskesmas membuka rekening pada Bank Kalsel yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/571/Kum Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank untuk Rekening Kas, Rekening Bendahara Penerimaan, dan Rekening Bendahara Pengeluaran pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Balangan.

Dengan status BLUD, Puskesmas memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan langsung pendapatan jasa layanan, percepatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, serta pemberian insentif berbasis kinerja. Penerapan BLUD juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan responsif.

Secara umum, pembentukan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Balangan merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik di bidang kesehatan guna mewujudkan pelayanan yang profesional, mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.5.	**Kas Dana BOS**	**37.655.777,00**	**147.761.158,00**

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan saldo kas pada sekolah-sekolah yang menerima Penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Pusat. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.655.777,00 dan Rp147.761.158,00. Rincian saldo Kas Dana BOS per Sekolah disajikan pada **Lampiran 11**.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.6.	**Kas Dana Kapitasi pada FKTP**	**-**	**122.260.304,00**

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan seluruh kas yang berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp122.260.304,00. Penurunan saldo kas pada tahun 2025 disebabkan karena pengelolaan keuangan Puskesmas telah beralih menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga saldo kas Dana Kapitasi telah terintegrasi dalam Kas di BLUD.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dilaksanakan pemerintah pada Tahun 2014, di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama dilakukan oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dalam pelaksanaannya, Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengelola Dana Kapitasi JKN dan dana pelayanan kesehatan lainnya yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada masing-masing FKTP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP diwajibkan membuka rekening khusus Dana Kapitasi JKN untuk menampung dana yang diterima dari BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Bendahara Puskesmas di Kabupaten Balangan membuka rekening pada BRI Kantor Cabang Pembantu Paringin yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/347/Kum Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Rekening Puskesmas untuk Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Balangan.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan mulai menerapkan PPK-BLUD pada seluruh Puskesmas sebagai upaya meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, efektivitas pelayanan, serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan penerapan PPK-BLUD tersebut, pengelolaan kas Dana Kapitasi tidak lagi disajikan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari Kas di BLUD.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.7.	**Kas Dana BOP**	**11.000,00**	**-**

Kas Dana BOP merupakan saldo yang berasal dari sisa Kas yang ada di Bendahara Bantuan Operasional Pendidikan yang ada disekolah PAUD dan Kesetaraan. Saldo Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.000,00 yang terdapat pada TK Negeri Pertiwi Ranting Halong sebesar Rp10.000,00 dan Paud Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan sebesar Rp1.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau nihil.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.8.	**Kas Dana BOK**	**1.576.609.600,00**	**2.017.354.083,00**

Kas Dana BOK merupakan saldo yang berasal dari sisa Kas yang ada di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan yang ada Puskesmas. Saldo Dana BOK per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.576.609.600,00 dan Rp2.017.354.083.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.9.	**Kas Lainnya**	**805.758.100,00**	**-**

Kas Lainnya merupakan saldo sisa kas yang terdapat pada Bendahara Hibah CSR di 19 unit kerja. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp805.758.100,00 dan Rp0,00. Adapun rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Kas Lainnya

No	Uraian	Kas Di Bendahara Penerima CSR Rp
1	SDN Paringin 2	-
2	Dinas Kesehatan	297.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja	309.997.100,00
5	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	9.298.000,00
6	SMPN 2 Juai	24.453.000,00
7	SDN Galumbang	-
8	SDN Tundi	34.000.000,00
9	SDN Hukai	-
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	37.350.000,00
11	SMPN 4 Paringin	-
12	SMPN 3 Paringin	-
13	SMPN 1 Juai	-
14	Smpn 1 Lampihong	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.660.000,00
16	SDN Lok Batung	-
17	SMPN 3 Batumandi	-
18	SDN Bata	-
19	SMPN 4 Awayan	75.000.000,00
Jumlah		**805.758.100,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.10.	**Piutang Pajak**	**3.538.347.208,00**	**3.881.268.779,00**

Piutang Pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.538.347.208,00 dan Rp3.881.268.779,00.

Tabel 103 Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	436.675.824,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.304.233.930,00	3.257.489.819,00

No	Jenis Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3	Piutang Pajak Reklame	16.470.625,00	12.254.875,00
4	Piutang Katering	89.675.674,00	83.051.746,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	111.009.779,00	91.746.515,00
6	Pajak Kebugaran	-	50.000,00
7	PBJT- Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.200,00	-
8	PBJT- Restoran	16.911.000,00	-
Jumlah		**3.538.347.208,00**	**3.881.268.779,00**

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 104 Mutasi Piutang PBB-P2

Tahun Pajak	Nilai Piutang PBB P2 per 31 Desember 2024	Ketetapan PBB-P2 2025	Hapus Buku	Realisasi Tahun 2025	Nilai Piutang PBB P2 Per 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3-4-5)
2025	-	1.164.005.467,00	35.655.885,00	650.940.733,00	477.408.849,00
2024	617.606.740,00	-	35.482.677,00	115.033.330,00	467.090.733,00
2023	367.209.416,00	-	29.166.714,00	36.190.145,00	301.852.557,00
2022	320.484.086,00	-	23.496.565,00	28.005.675,00	268.981.846,00
2021	263.307.957,00	-	24.702.619,00	18.252.898,00	220.352.440,00
2020	210.077.920,00	-	17.719.022,00	6.040.093,00	186.318.805,00
2019	217.645.961,00	-	15.325.971,00	4.378.768,00	197.941.222,00
2018	177.400.139,00	-	14.205.165,00	1.255.644,00	161.939.330,00
2017	144.232.477,00	-	12.465.623,00	1.565.855,00	130.200.999,00
2016	229.747.885,00	-	11.415.755,00	1.194.622,00	217.137.508,00
2015	234.651.843,00	-	10.434.442,00	1.321.936,00	222.895.465,00
2014	207.779.035,00	-	8.191.191,00	766.125,00	198.821.719,00
2013	267.346.360,00	-	6.519.063,00	7.534.840,00	253.292.457,00
2012	-	-	-	984.606,00	-
2011	-	-	-	252.370,00	-
2010	-	-	-	455.498,00	-
2009	-	-	-	225.796,00	-
2008	-	-	-	19.512,00	-
2007	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	60.124,00	-
Jumlah	**3.257.489.819,00**	**1.164.005.467,00**	**244.780.692,00**	**874.478.570,00**	**3.304.233.930,00**

Mutasi selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB pada Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 105 Mutasi Piutang Pajak Bukan PBB-P2 dan BPHTB

No	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang	Koreksi Bertambah	Penambahan Piutang	Pengurang Piutang, Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Saldo Akhir Piutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5-6)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	436.675.824,00	-	-	436.675.824,00	-
2	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	12.254.875,00	-	8.057.375,00	3.841.625,00	16.470.625,00
3	Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	91.746.515,00	24.000.440,00	-	4.737.176,00	111.009.779,00
4	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	83.051.746,00		25.548.200,00	18.924.272,00	89.675.674,00
5	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	50.000,00	-	-	50.000,00	-
6	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	-	46.200,00	-	-	46.200,00
7	PBJT-Restoran	-		16.911.000,00	-	16.911.000,00
Jumlah		**623.778.960,00**	**24.046.640,00**	**50.516.575,00**	**464.228.897,00**	**234.113.278,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.11. Piutang Retribusi	**160.552.730,00**	**147.907.730,00**

Saldo Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp160.552.730,00 sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp147.907.730,00.

Tabel 106 Piutang Retribusi

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.960.000,00	6.960.000,00
2	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian	38.942.730,00	38.942.730,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	112.370.000,00	100.205.000,00
4.	Kecamatan Batumandi	2.280.000,00	1.800.000,00
Jumlah		**160.552.730,00**	**147.907.730,00**

Perhitungan Piutang Retribusi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 107 Perhitungan Piutang Retribusi

No	SKPD/Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurang Piutang, Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Saldo Akhir Piutang
1	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.960.000,00**	**-**	**-**	**6.960.000,00**
	- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6.960.000,00	-	-	6.960.000,00
2	**Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian**	**38.942.730,00**	**-**	**-**	**38.942.730,00**
	- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.942.730,00	-	-	38.942.730,00
3	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**100.205.000,00**	**26.065.000,00**	**13.900.000,00**	**112.370.000,00**
	- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	64.480.000,00	-	6.355.000,00	58.125.000,00
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	35.725.000,00	26.065.000,00	7.545.000,00	54.245.000,00
4.	**Kecamatan Batumandi**	**1.800.000,00**	**480.000,00**	**-**	**2.280.000,00**
	- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	720.000,00	-	-	720.000,00
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.080.000,00	480.000,00	-	1.560.000,00
Jumlah		**147.907.730,00**	**26.545.000,00**	**13.900.000,00**	**160.552.730,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.12. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**18.193.093.845,67**	**12.036.582.088,50**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.193.093.845,67 sedangkan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.036.582.088,50.

Tabel 108 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD

SKPD	Jenis Piutang	2025	2024
RSUD Kandang Haji (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	10.263.244.099,00	6.129.171.653,00
UPTD Puskesmas Paringin (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	11.342.100,00	-
	Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD	697.672,40	
UPTD Puskesmas Paringin Selatan (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	14.734.200,00	-
	Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD	1.027.235,00	

SKPD	Jenis Piutang	2025	2024
UPTD Puskesmas Lampihong (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	29.182.100,00	-
UPTD Puskesmas Batumandi (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	1.757.100,00	-
	Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD	617.656,60	
UPTD Puskesmas Lokbatu (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	7.569.200,00	-
UPTD Puskesmas Awayan (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	59.384.200,00	-
UPTD Puskesmas Tebing Tinggi (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	9.949.200,00	-
UPTD Puskesmas Juai (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	18.025.000,00	-
UPTD Puskesmas Pirsus (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	4.974.200,00	-
UPTD Puskesmas Tanah Habang (BLUD)	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	3.655.000,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	360.000,00	360.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya (Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)	2.194.318,50	2.194.318,50
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD)	TDF (Remunerasi)	-	49.104.494,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan - Jalan Provinsi	-	8.614.770,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan - Jalan Kabupaten	1.254.180.632,73	2.037.896.618,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan - Jalan Desa	-	521.636.695,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	19.616.600,00	3.858.226,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	174.596.000,00	106.928.601,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	32.421.000,00	29.918.052,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum	-	3.340.445,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	-	277.625,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	175.705.000,00	10.493.403,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gudang	20.481.000,00	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	336.778.750,00	-

SKPD	Jenis Piutang	2025	2024
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.302.122.062,79	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	98.295.500,00	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	6.000.000,00	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	38.394.250,00	-
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	181.842.000,00	-
Dinas Kesehatan	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	174.697.529,00	-
Dinas Perhubungan	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	78.247.363,65	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	20.750.000,00	-
Dinas Sosial	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.179.200,00	-
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	545.319.480,00	-
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	142.270.000,00	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	47.470.500,00	-
Sekretariat Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	12.460.300,00	-
Dinas Perpustakan dan Kearsipan	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	36.366.000,00	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.556.490,00	7.832.084,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Terbuka	-	5.091.435,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	70.437.698,00
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Parkir	-	5.795.065,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-

SKPD	Jenis Piutang	2025	2024
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (KONI)	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.689.959.014,00	2.689.959.014,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	353.671.892,00	353.671.892,00
Jumlah		**18.193.093.845,67**	**12.036.582.088,50**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**709.305.200.000,00**	**1.223.130.370.000,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp709.305.200.000,00 dan Rp1.223.130.370.000,00.

Tabel 109 Perhitungan Transfer Pemerintah Pusat

No	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2025	2024
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	10.727.518.000,00	2.392.315.000,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 25/29	261.748.000,00	25.018.000,00
3	Piutang DBH Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	222.042.922.000,00	386.508.838.000,00
4	Piutang DBH SDA Landrent	1.012.594.000,00	178.112.000,00
5	Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Mineral Dan Batubaru (Royalti)	474.972.964.000,00	834.026.087.000,00
6	Piutang DBH SDA Kehutanan (PSDH)	287.379.000,00	-
7	Piutang DBH CHT	75.000,00	-
Jumlah		**709.305.200.000,00**	**1.223.130.370.000,00**

Rincian mutasi perhitungan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 110 Perhitungan Transfer Pemerintah Pusat

Jenis DBH	Saldo Awal Piutang TA 2025 (Rp)	Penyaluran Kurang Bayar TA 2024 sesuai KMK 29/MK/PK/2025 (Rp)	Penetapan Kurang Bayar Tahun 2025 sesuai PMK 120 Tahun 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang TA 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3+4)
DBH PAJAK	**388.926.171.000,00**	**167.434.998.000,00**	**11.541.090.000,00**	**233.032.263.000,00**
PPh Pasal 21	**2.392.315.000,00**	**1.029.906.000,00**	**9.365.109.000,00**	**10.727.518.000,00**
PPh Pasal 25/29	**25.018.000,00**	**10.770.000,00**	**247.500.000,00**	**261.748.000,00**
Pajak Bumi dan Bangunan	**386.508.838.000,00**	**166.394.322.000,00**	**1.928.406.000,00**	**222.042.922.000,00**
Bagian Daerah	**386.508.838.000,00**	**166.394.322.000,00**	**1.928.406.000,00**	**222.042.922.000,00**
Bagian Daerah Migas	371.841.000,00	160.080.000,00	791.994.000,00	1.003.755.000,00

Jenis DBH	Saldo Awal Piutang TA 2025 (Rp)	Penyaluran Kurang Bayar TA 2024 sesuai KMK 29/MK/PK/2025 (Rp)	Penetapan Kurang Bayar Tahun 2025 sesuai PMK 120 Tahun 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang TA 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3+4)
Bagian Daerah Non Migas	385.745.733.000,00	166.065.801.000,00	-	219.679.932.000,00
Bagian Daerah Perhutanan	3.838.000,00	1.652.000,00	63.878.000,00	66.064.000,00
Bagian Daerah Perkebunan	332.563.000,00	143.170.000,00	849.109.000,00	1.038.502.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	54.863.000,00	23.619.000,00	223.425.000,00	254.669.000,00
CHT	**-**	**-**	**75.000,00**	**75.000,00**
Cukai Hasil Tembakau	-	-	75.000,00	75.000,00
SUMBER DAYA ALAM	**834.204.199.000,00**	**359.129.801.000,00**	**1.198.539.000,00**	**476.272.937.000,00**
Landrent	178.112.000,00	76.678.000,00	911.160.000,00	1.012.594.000,00
Royalti	834.026.087.000,00	359.053.123.000,00	-	474.972.964.000,00
PSDH	-	-	287.379.000,00	287.379.000,00
JUMLAH	**1.223.130.370.000,00**	**526.564.799.000,00**	**12.739.629.000,00**	**709.305.200.000,00**

5.3.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
27.589.748.778,00	**24.790.084.881,00**

Saldo Piutang DBH per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.589.748.778,00 sedangkan saldo Piutang DBH per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.790.084.881,00. Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 111 Piutang Transfer Antar Daerah

No	Nama Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	1.697.069.820,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	-	3.759.484.267,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	25.484.258.114,00	17.444.159.085,00
4	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT dan AP)	163.852.406,00	191.765.126,00
5	Pajak Rokok	1.941.638.258,00	1.697.606.583,00
Jumlah		**27.589.748.778,00**	**24.790.084.881,00**

5.3.1.1.15. Piutang Lainnya

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
40.548.320,38	**111.377.138,68**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.548.320,38 dan Rp111.377.138,68. Piutang tersebut merupakan Piutang Lainnya BLUD.

Tabel 112 Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLUD	2.396.772,98	60.582.912,48
2	Pituang Lainnya – Piutang Lain-lain BMHP	-	3.495.872,00
3	Piuang Lainnya – Piutang Lain-lain Obat-obatan	38.151.547,40	15.298.354,20
4	Parkir	-	32.000.000,00
Jumlah		**40.548.320,38**	**111.377.138,68**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.16. Penyisihan Piutang	**(2.142.453.558,22)**	**(1.840.457.973,98)**

Merupakan Saldo dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(2.142.453.558,22) dan Rp(1.840.457.973,98).

Tabel 113 Penyisihan Piutang

Piutang	Jenis	2025	2024
Penyisihan Piutang Pajak	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	(2.183.379,12)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(1.894.896.065,25)	(1.678.531.041,90)
	Piutang Reklame	(881.611,88)	(61.274,37)
	Pajak Mineral Bukan Logam	(40.690.445,10)	(8.406.736,48)
	Pajak Kebugaran	-	(250,00)
	Pajak Katering	(6.540.488,40)	(415.258,73)
	PBJT-Restoran	(84.555,00)	-
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	(4.620,00)	-
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	**(1.943.097.785,63)**	**(1.689.597.940,60)**
Penyisihan Piutang Retribusi	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(65.805.000,00)	(33.951.950,00)
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(38.942.730,00)	-
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	(35.916.250,00)	(25.881.250,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	**(140.663.980,00)**	**(59.833.200,00)**
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	(58.679.021,00)	(39.476.133,27)
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	(12.771,59)	(12.771,59)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain Pad Yang Sah	**(58.691.792,59)**	**(39.488.904,86)**
Piutang Lainnya dari Kegiatan Non – Operasional BLUD		**-**	**(30.540.348,52)**
Total Penyisihan Piutang		**(2.142.453.558,22)**	**(1.819.460.393,98)**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.17. Beban Dibayar Dimuka	-	-

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau nihil.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.18. Persediaan	**134.419.536.393,00**	**36.877.880.753,00**

Merupakan saldo persediaan yang dikuasai oleh SKPD di lingkungan Pemkab Balangan. Persediaan tersebut bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemkab Balangan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Nilai persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp134.419.536.393,00 dan Rp36.877.880.753,00 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 114 Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	-	-
Bahan-Bahan Kimia	2.362.183.963,00	1.172.085.800,00
Bahan-Bahan Baku	-	-
Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	186.577.296,00	23.845.250,00
Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-
Bahan-Bahan Lainnya	8.772.905.423,00	8.030.948.441,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.700.568,00	134.218.261,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.436.810,00	101.540.940,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	339.751.051,00	278.859.435,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.592.000,00	14.920.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	416.470.194,00	275.943.350,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	4.034.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.109.100,00	3.353.310,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	2.170.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.795.000,00	2.240.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Obat-Obatan-Obat	6.849.451.134,00	7.216.700.496,00
Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	5.256,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.427.976.849,00	7.728.704.936,00
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	109.740.200.176,00	8.516.769.306,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	23.318.200,00	1.773.337.000,00

Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Natura dan Pakan-Natura	1.553.869.109,00	1.395.374.172,00
Natura dan Pakan-Pakan	4.715.000,00	91.626.000,00
Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya	-	-
Komponen-Komponen Lainnya	575.484.520,00	111.204.800,00
Jumlah	**134.419.536.393,00**	**36.877.880.753,00**

Perhitungan mutasi persediaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 115 Perhitungan Saldo Persediaan tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**36.877.880.753,00**
Mutasi Bertambah Persediaan Tahun 2025	
+/+ Belanja	547.212.421.051,08
+/+ Dana BOS	6.051.840.132,00
+/+ Dana BOP	676.702.832,00
+/+ Dana BOK	1.255.302.950,00
+/+ Dana BLUD	22.032.536.015,55
+/+ Belanja Tak Terduga (BTT)	206.935.000,00
+/+ Koreksi	55.666.723.858,00
+/+ Hibah	3.311.975.883,00
+/+ Reklasifikasi	400.363.667,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**636.814.801.388,63**
Mutasi Berkurang Persediaan Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi	(400.363.667,00)
-/- Koreksi	(60.257.046.926,63)
-/- Hibah	(388.415.091.946,00)
-/- Pemakaian	(90.200.643.209,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(539.273.145.748,63)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**134.419.536.393,00**

a. Rekapitulasi Belanja Persediaan TA 2025 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Rekapitulasi Belanja Persediaan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.632.972.663,00
2	Dinas Kesehatan	6.962.538.013,51
3	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	5.338.835.908,35
4	BLUD Puskesmas Paringin	2.213.600,00
5	BLUD Puskesmas Lampihong	600.000,00
6	BLUD Puskesmas Batumandi	-
7	BLUD Puskesmas Awayan	-
8	BLUD Puskesmas Juai	8.673.300,00
9	BLUD Puskesmas Halong	3.450.000,00
10	BLUD Puskesmas Lokbatu	10.220.100,00
11	BLUD Puskesmas Uren	16.592.100,00
12	BLUD Puskesmas Pirsus	-
13	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	11.212.600,00
14	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	6.800.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
15	BLUD Puskesmas Tanah Habang	5.281.600,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	286.563.106.440,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	324.706.800,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	657.172.963,00
19	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	152.382.980,00
20	Dinas Sosial	4.469.661.490,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.486.886.335,00
22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	177.510.525.486,61
23	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.058.750.788,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	566.351.780,00
25	Dinas Perhubungan	980.420.472,00
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	379.145.950,00
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	1.682.866.067,61
28	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	382.470.200,00
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.352.335.475,00
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.476.827.391,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	654.532.640,00
32	Sekretariat Daerah	15.745.381.697,00
33	Sekretariat DPRD	2.563.623.738,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	512.153.800,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6.460.639.536,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	227.762.700,00
37	Inspektorat	424.899.000,00
38	Kecamatan Lampihong	350.294.825,00
39	Kecamatan Batumandi	254.691.300,00
40	Kecamatan Awayan	196.119.700,00
41	Kecamatan Halong	163.706.700,00
42	Kecamatan Juai	159.023.200,00
43	Kecamatan Paringin	869.228.714,00
44	Kecamatan Tebing Tinggi	233.684.898,00
45	Kecamatan Paringin Selatan	353.678.100,00
Jumlah		**547.212.421.051,08**

b. Rincian belanja persediaan Dana BOS sebesar Rp 6.051.840.132,00 yang terdiri dari:

Tabel 117 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOS Tahun 2025

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	480.394.980,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	76.474.996,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	18.196.700,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	79.868.400,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.204.526.336,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.881.178,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	627.406.963,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.170.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	218.145.448,00

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.299.831.107,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	225.837.826,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.459.600,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	557.731.438,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	99.900.200,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.175.000,00
16	Belanja Obat-Obatan-Obat	93.205.260,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.434.700,00
18	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00
19	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.000.000,00
Jumlah		**6.051.840.132,00**

c. Rincian belanja persediaan Dana BOP sebesar Rp 676.702.832,00 yang terdiri dari:

Tabel 118 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOP Tahun 2025

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	10.968.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.721.600,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	264.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.125.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	303.552.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.423.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	162.524.832,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.750.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.064.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	112.679.500,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.757.500,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	31.362.000,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	16.816.300,00
14	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.695.100,00
Jumlah		**676.702.832,00**

d. Rincian belanja persediaan Dana BOK sebesar Rp 1.255.302.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOK Tahun 2025

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.439.800,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.485.000,00
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.236.378.150,00
Jumlah		**1.255.302.950,00**

e. Rincian belanja persediaan BLUD sebesar Rp 22.032.536.015,55 merupakan reklasifikasi dari beban barang Dana BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rekapitulasi Belanja Persediaan BLUD Dinkes Tahun 2025

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	113.724.930,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.041.814.061,75
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	529.600.348,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95.600.200,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	338.149.699,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.150.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	60.911.300,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	46.827.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.430.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.100.800,00
11	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.301.216.381,50
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.355.024.695,30
13	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	96.986.100,00
Jumlah		**22.032.536.015,55**

f. Belanja Tak Terduga sebesar Rp 206.935.000,00 terdapat pada:

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 191.485.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Rekapitulasi Belanja Tak Terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.375.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00
3	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	183.610.000,00
Jumlah		**191.485.000,00**

2) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp 15.450.000,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa peralatan kebersihan seperti sikat lantai, pengerok sampah, sekop sampai dengan sabun cair.

g. Koreksi Bertambah sebesar Rp55.666.723.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Persediaan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Catat Baru	100.520.000,00
2	Koreksi Satuan Terkecil	988.206.360,00
3	Koreksi Harga Satuan	3.213.287,00
4	Koreksi Saldo Awal	765.423.896,00
5	Utang	3.556.327.646,00
6	Retur Persediaan	19.295.717,00
7	Pengembalian Pinjaman	29.397.212,00
8	Peminjaman Obat	30.742.491,00
9	Reklasifikasi dari Aset	30.762.024.111,00
10	Koreksi Volume Pekerjaan	17.697.341.547,00
11	Koreksi Kelebihan Pembayaran	1.714.231.591,00
Jumlah		**55.666.723.858,00**

1) Catat Baru terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp100.520.000,00 pada Persediaan Bibit Ternak berasal dari penjualan hewan ternak.

2) Koreksi Satuan Terkecil terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp988.206.360,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya karena menyesuaikan satuan terkecil pemakaian barang persediaan di Instalasi/Unit.

3) Koreksi Harga Satuan sebesar Rp3.213.287,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.

4) Koreksi Saldo Awal sebesar Rp765.423.896,00 terdapat pada:

   a. Dinas Kesehatan pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp5.474.000,00 disebabkan kurang catat utang persediaan tahun sebelumnya;

   b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp334.344.802,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat disebabkan koreksi saldo awal atas penyesuaian utang;

   c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp320.995.696,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat disebabkan koreksi saldo awal atas penyesuaian utang; dan

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp104.609.398,00 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain disebabkan koreksi saldo awal atas penyesuaian utang.

5) Utang sebesar Rp3.556.327.646,00 terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp 5.652.500,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya; dan

b) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp3.550.675.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Utang Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.591.804.486,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.958.870.660,00
Jumlah		**3.550.675.146,00**

6) Retur persediaan sebesar Rp19.295.717,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Retur Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Tahun 2025

No	Keterangan	Retur dari PBF Nilai (Rp)	Retur dari Pasien Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.819.115,00	-	5.819.115,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.642.180,00	5.834.422,00	13.476.602,00
Jumlah		**13.461.295,00**	**5.834.422,00**	**19.295.717,00**

7) Pengembalian pinjaman sebesar Rp29.397.212,00 terdapat pada:

a. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.180.000,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat; dan

b. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp20.217.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Pengembalian Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.818.871,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.398.341,00
Jumlah		**20.217.212,00**

8) Peminjaman obat sebesar Rp30.742.491,00 terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.209.800,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat berasal dari peminjaman obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten lain; dan

b) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp28.532.691,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat berasal dari peminjaman obat ke Rumah Sakit lain.

9) Reklasifikasi bertambah yang berasal dari aset sebesar Rp30.762.024.111,00 terdapat pada :

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp30.753.671.361,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan

b) Sekretariat DPRD sebesar Rp8.352.750,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer.

10) Koreksi Volume Pekerjaan sebesar Rp17.697.341.547,00 yang terdiri dari:

Tabel 126 Rincian Koreksi Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025

No	Keterangan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Nilai (Rp)	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	15.321.957.191,00	15.321.957.191,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.375.384.356,00	-	2.375.384.356,00
Jumlah		**2.375.384.356,00**	**15.321.957.191,00**	**17.697.341.547,00**

11) Koreksi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp1.714.231.591,00 yang terdiri dari:

Tabel 127 Rincian Koreksi Kelebihan Pembayaran Tahun 2025

No	Keterangan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Nilai (Rp)	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	557.429.581,00	557.429.581,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.156.802.010,00	-	1.156.802.010,00
Jumlah		**1.156.802.010,00**	**557.429.581,00**	**1.714.231.591,00**

h. Hibah sebesar Rp3.311.975.883,00 terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.617.667.834,00 yang terdiri dari:

a) Sumber dana dari IGFPK Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.437.427.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari IGFPK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	261.092.380,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.176.335.557,00
Jumlah		**2.437.427.937,00**

b) Sumber dana dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 147.577,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya;

c) Sumber dana dari Instalasi Farmasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 30.766.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	381.300,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	30.384.920,00
Jumlah		**30.766.220,00**

d) Sumber dana dari Instalasi Farmasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp584.000,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya;

e) Sumber dana dari Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong sebesar Rp58.641.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	570.000,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	58.071.000,00
Jumlah		**58.641.000,00**

f) Sumber dana dari Instalasi Farmasi Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp1.673.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.571.100,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	102.000,00
Jumlah		**1.673.100,00**

g) Sumber dana dari Instalasi Farmasi Kota Banjarbaru sebesar Rp77.428.000,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat; dan

h) Sumber dana dari PT. Adaro Indonesia sebesar Rp11.000.000,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata.

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp302.227.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Sumber dana dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp277.687.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.815.980,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	261.871.569,00
Jumlah		**277.687.549,00**

b) Sumber dana dari PT. Adaro Indonesia sebesar Rp24.540.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari PT. Adaro Indonesia Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	21.000.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.540.000,00
Jumlah		**24.540.000,00**

3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp132.366.000,00 merupakan Persediaan Barang Cetakan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan sumber dana sebagai berikut:

a) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp122.184.000,00; dan

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp10.182.000,00.

4) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp37.870.000,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Obat-Obatan-Obat karena Diskon barang dari distributor sebesar Rp5.614.000,00; dan
b. Belanja Natura dan Pakan-Natura yang berasal dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar Rp32.256.000,00.

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.750.000,00 yang bersumber dari Balangan Coal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari Balangan Coal Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.075.000,00
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.175.000,00
Jumlah		**8.750.000,00**

6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.779.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Rekapitulasi Hibah Persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Keterangan	PT. Adaro Indonesia Nilai (Rp)	PT. Sapta Indra Sejati Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5=3+4**
1	SMPN 1 Juai	3.650.000,00	-	3.650.000,00
2	SMPN 3 Batumandi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	SMPN 4 Paringin	500.000,00	-	500.000,00
4	SMPN 3 Paringin	-	1.060.000,00	1.060.000,00
5	SDN Galumbang Paringin Selatan	-	459.000,00	459.000,00
6	SDN Hukai	-	1.270.000,00	1.270.000,00
7	SDN Paringin 2	-	340.000,00	340.000,00
Jumlah		**5.650.000,00**	**3.129.000,00**	**8.779.000,00**

7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja sebesar Rp49.105.000,00 yang bersumber dari PT. Sapta Indra Sejati dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari PT. Sapta Indra Sejati Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	375.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.440.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	42.816.000,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
4	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.474.000,00
Jumlah		**49.105.000,00**

8) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp21.300.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 137 Rekapitulasi Hibah Persediaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	PT. Adaro Indonesia	8.000.000,00
2	PT. BUMA	11.300.500,00
3	PT. Sapta Indra Sejati	2.000.000,00
Jumlah		**21.300.500,00**

9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp133.910.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 138 Rekapitulasi Hibah Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	PT. Adaro Indonesia	86.960.000,00
2	PT. BUMA	38.500.000,00
3	Balangan Coal	8.450.000,00
Jumlah		**133.910.000,00**

i. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp400.363.667,00 terdapat pada:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman pada Belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp398.462.167,00; dan
   b. Kecamatan Batumandi pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp1.901.500,00.

j. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp400.363.667,00 terdapat pada:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman pada Belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp398.462.167,00; dan
   b. Kecamatan Batumandi pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp1.901.500,00.

k. Koreksi berkurang sebesar Rp60.257.046.926,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Persediaan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	32.000.000,00

No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	2.205.496.690,00
3	Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	3.830.844.577,00
4	Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	4.569.041.982,00
5	Reklasifikasi ke Belanja Jasa	84.304.200,00
6	Reklasifikasi ke Belanja Hibah	4.995.000,00
7	Utang Tahun Lalu	15.492.752.735,00
8	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Barang Expired dan Rusak)	577.134.369,00
9	Koreksi Saldo Awal	623.746.446,00
10	Koreksi Harga Satuan	3.194.740,00
11	Koreksi Satuan Terkecil	988.206.360,00
12	Retur ke PBF	14.168.767,00
13	Pembulatan Desimal	29,63
14	Peminjaman Barang Persediaan oleh Rumah Sakit lain/IF Kabupaten lain	38.782.300,00
15	Pengembalian Pinjaman Barang Persediaan ke Rumah Sakit Lain/IF Kabupaten lain	35.894.250,00
16	Koreksi Belanja atas Pembayaran Utang	11.611.374.303,00
17	Koreksi Kurang Volume Pekerjaan	17.875.789.247,00
18	Koreksi Kelebihan Pembayaran	2.269.320.931,00
Jumlah		**60.257.046.926,63**

1) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp32.000.000,00 pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
2) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.205.496.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140 Rekapitulasi Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	591.240.390,00
3	Sekretariat Daerah	944.187.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	570.956.800,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.748.000,00
6	Kecamatan Batumandi	3.000.000,00
7	Kecamatan Juai	2.250.000,00
8	Kecamatan Paringin	45.290.000,00
9	Kecamatan Paringin Selatan	12.324.000,00
Jumlah		**2.205.496.690,00**

3) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.830.844.577,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141 Rekapitulasi Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	149.096.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	2.367.457.249,00
3	Sekretariat Daerah	627.550.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	348.520.564,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	224.495.834,00
9	BLUD PKM Paringin Selatan	113.724.930,00
Jumlah		**3.830.844.577,00**

4) Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.569.041.982,00
5) Reklasifikasi ke Belanja Jasa sebesar Rp84.304.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 142 Rekapitulasi Reklasifikasi ke Belanja Jasa Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	63.449.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.855.200,00
Jumlah		**84.304.200,00**

a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp63.449.000,00; dan
b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp20.855.200,00 terdapat pada:

Tabel 143 Rekapitulasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Direklasifikasi ke Belanja Jasa Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.600.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.500.000,00
3	Inspektorat	9.755.200,00
Jumlah		**20.855.200,00**

6) Reklasifikasi ke Belanja Hibah sebesar Rp4.995.000,00 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
7) Utang Tahun Lalu sebesar Rp 15.492.752.735,00 terdapat pada:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp3.881.378.432,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 144 Rekapitulasi Utang Tahun Lalu Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.428.401.262,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.452.977.170,00
Jumlah		**3.881.378.432,00**

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.474.000,00 terdapat pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya;

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.139.272.254,00 terdapat pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;

d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.125.446.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145 Rekapitulasi Utang Tahun Lalu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.500.000,00
2	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.112.946.696,00
Jumlah		**2.125.446.696,00**

e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.341.181.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 146 Rekapitulasi Utang Tahun Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.120.080.303,00
2	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.221.101.050,00
Jumlah		**2.341.181.353,00**

8) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena Barang Rusak dan Expired sebesar Rp577.134.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Barang persediaan yang rusak terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp293.810,00 yang terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp275.000,00 dan Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp18.810,00; dan

b. Barang Persediaan yang Expired sebesar Rp576.840.559,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147 Rekapitulasi Koreksi Expired Tahun 2025

No	Keterangan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Obat-Obatan-Obat	Total (Rp)
1	Dinas Kesehatan	275.162.723,00	144.026.515,00	419.189.238,00

No	Keterangan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Obat-Obatan-Obat	Total (Rp)
2	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	28.831.813,00	66.544.943,00	95.376.756,00
3	BLUD Puskesmas Awayan	3.483.222,00	4.339.506,00	7.822.728,00
4	BLUD Puskesmas Batumandi	1.258.257,00	3.187.100,00	4.445.357,00
5	BLUD Puskesmas Halong	-	1.680.830,00	1.680.830,00
6	BLUD Puskesmas Juai	425.920,00	3.754.944,00	4.180.864,00
7	BLUD Puskesmas Lampihong	870.333,00	1.715.016,00	2.585.349,00
8	BLUD Puskesmas Lokbatu	1.939.046,00	2.208.530,00	4.147.576,00
9	BLUD Puskesmas Paringin	747.368,00	1.236.457,00	1.983.825,00
10	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	10.543.196,00	5.404.608,00	15.947.804,00
11	BLUD Puskesmas Pirsus	5.525.986,00	4.379.596,00	9.905.582,00
12	BLUD Puskesmas Tanah Habang	852.274,00	3.989.658,00	4.841.932,00
13	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	489.177,00	3.622.129,00	4.111.306,00
14	BLUD Puskesmas Uren	-	621.412,00	621.412,00
Jumlah		**330.129.315,00**	**246.711.244,00**	**576.840.559,00**

9) Koreksi Saldo Awal sebesar Rp623.746.446,00 terdiri dari:
   a. Belanja Obat-Obatan-Obat pada BLUD Puskesmas Lampihong sebesar Rp956.046,00 disebabkan oleh barang persediaan yang seharusnya *expired* tercatat di saldo akhir persediaan tahun sebelumnya;
   b. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp111.909.400,00 disebabkan oleh koreksi saldo awal utang; dan
   c. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp510.881.000,00 disebabkan oleh koreksi saldo awal utang.
10) Koreksi Harga Satuan sebesar Rp3.194.740,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji pada Belanja Obat-Obatan-Obat.
11) Koreksi Satuan Terkecil sebesar Rp988.206.360,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.
12) Retur ke PBF pada Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp14.168.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148 Rekapitulasi Retur ke PBF Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	539.800,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	13.628.967,00
Jumlah		**14.168.767,00**

13) Pembulatan Desimal sebesar Rp29,63 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
    a) Dinas Kesehatan sebesar Rp1,51 pada Belanja Obat-Obatan-Obat;
    b) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1,61 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
    c) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja sebesar Rp0,61 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat; dan
    d) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp25,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Rekapitulasi Pembulatan Desimal Rumah Sakit Datu Kandang Haji Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14,05
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	11,55
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,30
Jumlah		**25,90**

14) Peminjaman barang persediaan oleh Rumah Sakit Lain/Instalasi Farmasi Kabupaten lain sebesar Rp38.782.300,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
    a) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp38.348.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 150 Rekapitulasi Peminjaman Barang Persediaan Oleh Rumah Sakit Lain Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.067.361,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	37.280.939,00
Jumlah		**38.348.300,00**

    b) Dinas Kesehatan sebesar Rp434.000,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat

15) Pengembalian Pinjaman Barang Persediaan ke Rumah Sakit Lain/Instalasi Farmasi Kabupaten Lain sebesar Rp35.894.250,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
    a) Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp34.674.250,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat; dan
    b) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.220.000,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat

16) Koreksi Belanja atas Pembayaran Utang sebesar Rp11.611.374.303,00 terdapat pada:
    a. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.474.000,00 pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
    b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.139.272.254,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
    c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.125.446.696,00 yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp12.500.000,00 dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.112.946.696,00; dan
    d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.341.181.353,00 yang terdiri dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.120.080.303,00 dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp1.221.101.050,00.

17) Koreksi Volume Pekerjaan sebesar Rp17.875.789.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 151 Rincian Koreksi Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2025

No	Keterangan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Nilai (Rp)	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	15.413.022.191,00	15.413.022.191,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.462.767.056,00	-	2.462.767.056,00
Jumlah		**2.462.767.056,00**	**15.413.022.191,00**	**17.875.789.247,00**

18) Koreksi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp2.269.320.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Koreksi Kelebihan Pembayaran Tahun 2025

No	Keterangan	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Nilai (Rp)	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	698.019.331,00	698.019.331,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.571.301.600,00	-	1.571.301.600,00
Jumlah		**1.571.301.600,00**	**698.019.331,00**	**2.269.320.931,00**

l. Rincian Beban Hibah Persediaan sebesar Rp388.415.091.946,00 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 153 Rekapitulasi Beban Hibah Persediaan Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.677.423.560,00
2	Dinas Kesehatan	111.140.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	195.756.205.451,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	506.590.202,00
5	Dinas Sosial	4.123.980.558,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	774.128.710,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	166.383.373.279,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	648.413.607,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	501.821.649,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.754.259.282,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.477.971.784,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.690.860,00
13	Sekretariat Daerah	4.150.205.504,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.036.818.000,00
15	Kecamatan Paringin	213.058.500,00
16	BLUD Puskesmas Paringin	44.820.000,00
17	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	37.350.000,00
18	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	18.675.000,00
19	BLUD Puskesmas Lokbatu	17.430.000,00
20	BLUD Puskesmas Batumandi	24.900.000,00
21	BLUD Puskesmas Tanah Habang	2.490.000,00
22	BLUD Puskesmas Lampihong	11.703.000,00
23	BLUD Puskesmas Juai	2.739.000,00
24	BLUD Puskesmas Pirsus	18.924.000,00
25	BLUD Puskesmas Halong	4.980.000,00
Jumlah		**388.415.091.946,00**

m. Rincian Pemakaian Persediaan sebesar Rp90.200.643.209,00 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 154 Rekapitulasi Pemakaian Persediaan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.604.716.983,00
2	Dinas Kesehatan	1.407.634.397,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.726.640.650,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	323.384.700,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.592.456,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	151.286.880,00
7	Dinas Sosial	309.645.055,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.738.366.576,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10.233.252.636,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.441.498.715,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	594.453.611,00
12	Dinas Perhubungan	980.241.872,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	379.973.750,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	1.230.613.318,00
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	390.502.600,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.070.626.949,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	992.475.250,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	686.978.380,00
19	Sekretariat Daerah	9.456.634.228,00
20	Sekretariat DPRD	2.573.393.188,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	512.493.800,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.601.793.308,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	195.820.582,00
24	Inspektorat	404.192.800,00
25	Kecamatan Lampihong	350.134.825,00
26	Kecamatan Batumandi	251.773.700,00
27	Kecamatan Awayan	196.444.700,00
28	Kecamatan Halong	164.310.500,00
29	Kecamatan Juai	157.166.100,00
30	Kecamatan Paringin	1.227.814.826,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi	236.288.598,00
32	Kecamatan Paringin Selatan	655.835.534,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	25.389.870.314,00
34	BLUD Puskesmas Paringin	1.092.889.630,00
35	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	936.405.805,00
36	BLUD Puskesmas Awayan	1.018.152.514,00
37	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	677.730.254,00
38	BLUD Puskesmas Lokbatu	436.046.814,00
39	BLUD Puskesmas Batumandi	1.023.381.442,00
40	BLUD Puskesmas Tanah Habang	488.049.400,00
41	BLUD Puskesmas Lampihong	967.416.209,00
42	BLUD Puskesmas Juai	868.975.422,00
43	BLUD Puskesmas Pirsus	411.816.858,00
44	BLUD Puskesmas Halong	929.692.041,00
45	BLUD Puskesmas Uren	424.235.039,00
Jumlah		**90.200.643.209,00**

n. Rincian Persediaan Akhir Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp134.419.536.393,00 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 155 Rekapitulasi Saldo Persediaan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.750.241,00
2	Dinas Kesehatan	4.588.028.161,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109.748.295.761,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.637.600,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233.967.011,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.982.800,00
7	Dinas Sosial	497.651.377,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114.477.576,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.965.970.051,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	29.713.966,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.855.369,00
12	Dinas Perhubungan	408.300,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	381.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	230.000,00
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.427.700,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	305.259.400,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.370.357,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	927.000,00
19	Sekretariat Daerah	583.127.265,00
20	Sekretariat DPRD	148.400,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	655.000,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	324.222.364,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.404.218,00
24	Inspektorat	13.361.300,00
25	Kecamatan Lampihong	421.100,00
26	Kecamatan Batumandi	611.800,00
27	Kecamatan Awayan	-
28	Kecamatan Halong	671.400,00
29	Kecamatan Juai	-
30	Kecamatan Paringin	456.500,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi	840.800,00
32	Kecamatan Paringin Selatan	151.700,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	8.740.581.046,00
34	BLUD Puskesmas Paringin	94.425.438,00
35	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	237.310.539,00
36	BLUD Puskesmas Awayan	221.479.602,00
37	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	98.827.613,00
38	BLUD Puskesmas Lokbatu	149.128.339,00
39	BLUD Puskesmas Batumandi	135.441.762,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
40	BLUD Puskesmas Tanah Habang	84.492.111,00
41	BLUD Puskesmas Lampihong	203.089.025,00
42	BLUD Puskesmas Juai	203.656.089,00
43	BLUD Puskesmas Pirsus	162.408.084,00
44	BLUD Puskesmas Halong	117.094.917,00
45	BLUD Puskesmas Uren	192.196.311,00
Jumlah		**134.419.536.393,00**

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.126.190.308.639,45	**1.124.200.930.829,11**

Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.126.190.308.639,45 dan Rp1.124.200.930.829,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 156 Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	203.818.000,00	203.818.000,00
2	Investasi Permanen	1.125.986.490.639,45	1.123.997.112.829,11
Jumlah		**1.126.190.308.639,45**	**1.124.200.930.829,11**

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
203.818.000,00	**203.818.000,00**

Merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp203.818.000,00 dan Rp203.818.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Investasi Non Permanen

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi Kepada BUMD	203.818.000,00	203.818.000,00
2	Dana Bergulir	-	-
Jumlah		**203.818.000,00**	**203.818.000,00**

5.3.1.2.1.1. Investasi Kepada BUMD

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
203.818.000,00	**203.818.000,00**

Investasi Kepada BUMD Kabupaten Balangan berasal dari koperasi-koperasi di Balangan. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp203.818.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158 Penyertaan Modal Koperasi

No	Nama Koperasi	Nilai Penyertaan TA 2025 (Rp)	Realisasi Pengembalian Pokok TA 2025 (Rp)	Nilai Penyertaan TA 2024 (Rp)
1	KSU Sanggam Mandiri	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2	KUD Kita	15.988.000,00	-	15.988.000,00
3	Koperasi Wanita Sinar	45.000.000,00	-	45.000.000,00
4	Koperasi PNPM Pedesaan	42.830.000,00	-	42.830.000,00
Jumlah		**203.818.000,00**	**-**	**203.818.000,00**

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi, Usaha Kecil/ Mikro dan Menengah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber PAD serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemkab Balangan melakukan Penyertaan Modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penyertaan Modal ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dan Ketua Koperasi Penerima Penyertaan Modal. Sesuai perjanjian, Penyertaan Modal tersebut harus dikembalikan oleh Koperasi dengan cara mengangsur selama 54 bulan terhitung tanggal 21 November 2011 sampai dengan 01 Mei 2016.

Atas Penyertaan Modal sebesar Rp100.000.000,00 pada KSU Sanggam Mandiri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Petikan Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bjm tanggal 10 April 2018 telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang berinisial MY (Mantan Ketua KSU SM) dengan:

a. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dan
b. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.1.2.	**Dana Bergulir**	**-**	**-**

Dana Bergulir merupakan bibit ternak sapi dan kambing yang digulirkan mulai dari Tahun 2006. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-

masing sebesar Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2021 didapat dari nilai Investasi *bruto* sebesar Rp665.500.000,00 dengan penyisihan sebesar Rp665.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 159 Dana Bergulir

No	Tahun	Jenis Ternak	Jenis Kelamin	Nilai Dana Bergulir (Bruto) (Rp)	Penyisihan (Rp)	*Not Realizable Value*
1	2006	Sapi	Betina	140.400.000,00	140.400.000,00	-
2	2006	Kambing	Jantan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
3	2006	Kambing	Betina	1.150.000,00	1.150.000,00	-
4	2007	Sapi	Jantan	100.100.000,00	100.100.000,00	-
5	2007	Sapi	Betina	109.850.000,00	109.850.000,00	-
6	2007	Kambing	Jantan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
7	2007	Kambing	Betina	2.300.000,00	2.300.000,00	-
8	2008	Sapi	Jantan	100.100.000,00	100.100.000,00	-
9	2008	Sapi	Betina	77.350.000,00	77.350.000,00	-
10	2010	Sapi	Betina	131.950.000,00	131.950.000,00	-
JUMLAH				**665.500.000,00**	**665.500.000,00**	**-**

Penyajian Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak berdasarkan harga perolehan ternak, akan tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara peternak dengan Dinas Pertanian. Mutasi sapi mati dan majir/potong paksa belum dilengkapi SK Penghapusan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

Pemkab Balangan telah menerapkan penyisihan atas saldo dana bergulir sejak TA 2014 berdasarkan Kebijakan Akuntansi tentang Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2. Investasi Permanen	**1.125.986.490.639,45**	**1.123.997.112.829,11**

Merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.125.986.490.639,45 dan Rp1.123.997.112.829,11.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**1.125.986.490.639,45**	**1.123.997.112.829,11**

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Paringin, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Penyertaan Modal Bank dan BUMD

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bank Kalsel	908.397.600.000,00	908.397.600.000,00
2	PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paringin	22.061.441.871,36	21.265.484.813,04
3	PDAM Balangan	175.527.448.768,09	174.334.028.016,07
4	PT. Asabaru Daya Cipta Lestari	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah		**1.125.986.490.639,45**	**1.123.997.112.829,11**

a. Bank Kalsel Bank Kalsel

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada Bank Kalsel per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp908.397.600.000,00 dan Rp908.397.600.000,00.

b. PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paringin

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada PD BPR Paringin-Balangan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.061.441.871,36 dan Rp21.265.484.813,04.. Persentase kepemilikan per 31 Desember 2025 *(audited)* adalah sebesar 96,81%. Pemkab Balangan pada tahun 2025 mencatat nilai investasi pada PD BPR Paringin dengan menggunakan metode ekuitas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 161 Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada PD BPR

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari	21.265.484.813,04	20.671.697.713,61
2	-/- Koreksi Penerimaan Deviden	(521.442.126,00)	(354.304.185,00)
3	-/- Koreksi Saldo Awal	-	-
4	-/- Koreksi Bagian laba	(52.158.137,26)	-
5	+/+ Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	1.369.557.321,58	948.091.284,43
Saldo Akhir per 31 Desember		**22.061.441.871,36**	**21.265.484.813,04**

Perhitungan Laba (Rugi) TA 2025 selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 13.**

c. Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada PDAM Balangan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp175.527.448.768,09 dan Rp174.334.028.016,07. Persentase kepemilikan per 31 Desember 2025 *(audited)* adalah sebesar 92,25%. Penilaian Penyertaan Modal pada PDAM Balangan per 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 162 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Balangan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari	174.334.028.016,07	69.684.172.727,68
2	Mutasi Tahun 2024:		
	+/+ Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	1.594.195.319,79	1.539.610.939,53
	+/+ Koreksi atas saldo *Audited* per 31 Desember	-	668.234.688,86
	+/+ Penambahan Penyertaan Modal	-	102.442.009.660,00
3	-/- Koreksi Bagian laba	(400.774.567,77)	-
Saldo Akhir per 31 Desember		**175.527.448.768,09**	**174.334.028.016,07**

Perhitungan Laba (Rugi) TA 2024 selengkapnya dapat dilihat di **Lampiran 14.**

d. PT. Asabaru Daya Cipta Lestari

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp20.000.000.000,00. Pada tahun 2022 Pemkab Balangan melakukan penyertaan modal awal ke PT. Asabaru Daya Cipta sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2023 dengan SP2D Nomor 00302/SP2D-LS/BUD/BPKPAD/2023. Penyertaan modal pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari didasarkan pada Perda Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari. Adapun rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 163 Penyertaan Modal Pemkab Balangan pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	-/- Koreksi Penerimaan Deviden	-	-
3	+/+ Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	-	-
4	+/+ Penyertaaan Modal	-	10.000.000.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember		**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3.927.387.553.705,42	**3.138.654.675.028,84**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp Rp3.927.387.553.705,42 dan Rp3.138.654.675.028,84 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164 Aset Tetap (Netto) per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	502.128.333.512,00	61.187.954.206,00	(917.600.000,00)	562.398.687.718,00
2	Peralatan dan Mesin	988.477.540.498,00	161.172.269.256,00	(11.202.328.452,00)	1.138.447.481.302,00
3	Gedung dan Bangunan	1.360.559.912.324,42	310.019.531.367,91	(63.757.827.205,33)	1.606.821.616.487,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.685.719.280.826,42	493.423.467.872,96	(17.586.077.626,96)	3.161.556.671.072,42
5	Aset Tetap Lainnya	9.753.400.327,00	1.879.591.836,00	(1.573.695.286,00)	10.059.296.877,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.345.808.759,00	6.597.707.630,00	(15.017.280.242,00)	6.926.236.147,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.423.329.601.218,00)	(1.773.334.454.257,00)	1.637.841.619.577,00	(2.558.822.435.898,00)
JUMLAH		**3.138.654.675.028,84**	**739.053.932.088,13**	**(1.527.786.810.764,71)**	**3.927.387.553.705,42**

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
562.398.687.718,00	**502.128.333.512,00**

Tanah yang termasuk dalam Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemkab Balangan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Tanah pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp562.398.687.718,00 dan Rp502.128.333.512,00 Saldo Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penambahan sebesar Rp61.187.954.206,00 dari saldo Tanah per 31 Desember 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 165 Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**502.128.333.512,00**
Mutasi Penambahan Tanah Tahun 2025:	
+/+ Belanja Modal	60.493.628.274,00
+/+ Hibah	5.250.000,00
+/+ Reklasifikasi Bertambah	689.075.932,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**61.187.954.206,00**
Mutasi Pengurangan Tanah Tahun 2025:	
Jumlah Mutasi Berkurang	**(906.600.000,00)**
-/- Reklasifikasi Berkurang	(906.600.000,00
-/- Koreksi	(11.000.000,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(917.600.000,00)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**562.398.687.718,00**

Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah Kabupaten Balangan disebabkan oleh beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan Nilai Tanah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp61.187.954.206,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

1) Penambahan Saldo Tanah Berdasarkan Pengadaan Belanja Modal sebesar Rp60.493.628.274,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.045.802.324,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.049.320.729,00, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp57.398.505.221,00

2) Penambahan Saldo Tanah Berdasarkan Hibah dari masyarakat pada Kecamatan Paringin Selatan berupa Tanah Jalan Usaha Tani RT.11 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.250.000,00

3) Penambahan Saldo Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp689.075.932,00 berasal dari Reklasifikasi Bertambah yang merupakan penyesuaian dari realisasi rekening belanja diluar belanja modal tanah tahun 2025 dan menambah nilai pada aset induk tanah yang terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 166 Rincian Penambahan Saldo Tanah per SKPD yang bersumber dari Reklasifikasi Bertambah

No	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Land Clearing Lahan Pemda Belakang Polres Balangan	229.679.969,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Land Clearing Lahan Pemda Komplek Pendidikan Kab. Balangan	229.737.463,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Penambahan Kantor Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan	229.658.500,00
Jumlah			**689.075.932,00**

b. Pengurangan Nilai Tanah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp917.600.000,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

a. Pengurangan nilai tanah berdasarkan reklasifikasi berkurang ke golongan aset lain – lain karena akan dilaksanakan tukar menukar aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp906.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Jalan Tawahan - Ulin Pasak (S.2) dengan nilai perolehan sebesar Rp306.000.000,00; dan

2) Jalan Tawahan - Tundakan Hulu (081) / S.2 dengan nilai perolehan sebesar Rp600.600.000,00.

b. Pengurangan nilai tanah berdasarkan koreksi berkurang pada Dinas Kesehatan berupa honor tim pengadaan tanah relokasi Puskesmas Pirsus sebesar Rp11.000.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	**1.138.447.481.302,00**	**988.477.540.498,00**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, memenuhi batas nilai kapitalisasi, dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp1.138.447.481.302,00 dan Rp988.477.540.498,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 167 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**988.477.540.498,00**
Mutasi Bertambah Peralatan dan Mesin Tahun 2025	
+/+ Belanja Modal	148.095.489.131,00
+/+ Hibah	9.753.648.955,00
+/+ Utang Belanja 2025	193.335.999,00
+/+ Belanja Tak Terduga	2.960.000,00
+/+ Reklasifikasi Bertambah	857.838.530,00
+/+ Belanja Barang dan Jasa	2.268.996.641,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**161.172.269.256,00**
Mutasi Berkurang Peralatan dan Mesin Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi Berkurang	(10.688.047.914,00)
-/- Koreksi Berkurang	(514.280.538,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(11.202.328.452,00)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**1.138.447.481.302,00**

1. **Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp161.172.269.256,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:**

   a. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp148,095,489,131.00. Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 168 Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	18.058.881.956,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.108.943.144,00

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.553.352.853,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	460.777.500,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.694.564.499,00
6	Dinas Sosial	793.414.200,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.145.346.250,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.820.066.060,00
9	Dinas Satpol PP	1.379.125.499,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	377.289.502,00
11	Dinas Perhubungan	31.014.167.373,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	665.377.697,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	1.447.035.520,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	262.664.750,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.680.118.298,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.785.495.498,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	799.757.048,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.323.475.361,00
19	Sekretariat Daerah	15.060.793.685,00
20	Sekretariat DPRD	5.635.372.782,00
21	Kecamatan Lampihong	35.787.800,00
22	Kecamatan Batumandi	103.161.000,00
23	Kecamatan Awayan	58.116.000,00
24	Kecamatan Halong	65.443.000,00
25	Kecamatan Tebing Tinggi	733.279.440,00
26	Kecamatan Paringin	1.554.296.410,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	1.158.416.346,00
28	Inspektorat	7.505.318.986,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	485.999.599,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.214.099.773,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.115.551.302,00
Jumlah		**148.095.489.131,00**

b. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah sebesar Rp9.753.648.955,00. Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 169 Rekapitulasi Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Hibah Tahun 2025

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.658.635,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.377.933.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.813.000,00
4	Dinas Perhubungan	1.371.244.320,00
Jumlah		**9.753.648.955,00**

1) Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan hibah bertambah pada Dinas Kesehatan berupa Freeze Free Cold Box dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp3.658.635,00;
2) Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan hibah bertambah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.377.933.000,00, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**;
3) Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan hibah bertambah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.000.813.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 170 Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Hibah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Mobil Dapur Lapangan	488.675.000,00
2	Rescue Car	456.016.000,00
3	Sepeda Motor	28.061.000,00
4	Sepeda Motor	28.061.000,00
Jumlah		**1.000.813.000,00**

4) Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan hibah bertambah pada Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.371.244.320,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Mobil Angkutan Pelajar (Microbus) dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp648.244.320,00;
   b) Mobil Angkutan Pelajar (Mini Bus) dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp275.000.000,00;
   c) Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp224.000.000,00; dan
   d) Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp224.000.000,00.

c. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin dari Utang karena perolehan barang tahun 2025 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp193.335.999,00 karena perolehan pengadaan tahun 2025 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa Laptop sebanyak 9 Unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 171 Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Utang Tahun 2025 Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Laptop	18.648.000,00
2	Laptop	18.648.000,00
3	Laptop	18.648.000,00
4	Laptop	18.648.000,00
5	Laptop	18.648.000,00
6	Laptop	18.648.000,00
7	Laptop	18.648.000,00
8	Laptop	31.399.999,00
9	Laptop	31.400.000,00
Jumlah		**193.335.999,00**

d. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Tak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp2.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kursi Dorong dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp1.700.000,00; dan
2) Kursi Dorong dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp1.260.000,00.

e. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp857.838.530,00 merupakan Reklasifikasi Bertambah dari golongan barang lain pada tahun 2025 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 172 Rekapitulasi Reklasifikasi Bertambah Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	9.343.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.908.250,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.563.680,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.025.500,00
5	Sekretariat Daerah	322.000.000,00
6	Sekretariat DPRD	98.845.500,00
7	Kecamatan Paringin	91.752.600,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	169.400.000,00
Jumlah		**857.838.530,00**

1) Penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.343.000,00 terdiri dari:

Tabel 173 Penambahan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dari Gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Sofa L	1	4.650.000,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
2	Kursi Kerja	1	950.000,00
3	Wastafel Lampihong	1	1.243.000,00
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
Jumlah			**9.343.000,00**

2) Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.908.250,00 terdiri dari:

Tabel 174 Rekapitulasi Penambahan Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Ke Golongan Lain Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin dari Jalan Irigasi dan Jaringan	7.750.000,00
2	Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	15.158.250,00
Jumlah		**22.908.250,00**

a) Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin yang berasal dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 175 Penambahan Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Dari Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tong air	1.750.000,00
2	Tandon Air	1.500.000,00
3	Tandon 1200 Liter	3.000.000,00
4	Tandon Air	1.500.000,00
Jumlah		**7.750.000,00**

b) Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.158.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 176 Penambahan Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Dari Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bass Tarbang	3.183.200,00
2	Tarbang	1.860.000,00
3	Sound System	8.500.000,00
4	Audio Amplifier	1.615.050,00
Jumlah		**15.158.250,00**

3) Penambahan Reklasifikasi Bertambah pada peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berasal dari Aset Lain-Lain berupa kursi kerja eselon II dengan nilai perolehan sebesar Rp2.563.680,00.
4) Penambahan Reklasifikasi Bertambah pada peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp141.025.500,00 terdiri dari 21 unit alat peraga kesenian nilai perolehan per unit sebesar Rp6.715.500,00.
5) Penambahan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin berasal dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp322.000.000,00 berupa 10 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp10.700.000,00 10 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp13.400.000,00 dan 5 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp16.200.000,00.
6) Penambahan Reklasifikasi Bertambah pada peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD berasal dari Gedung dan Bangunan berupa papan nama kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp98.845.500,00.
7) Penambahan pada Kecamatan Paringin berdasarkan Reklasifikasi bertambah pada Peralatan dan Mesin berasal dari Aset tetap Lainnya sebesar Rp91.752.600,00 terdiri dari 7 unit alat peraga kesenian dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp7.037.400,00 dan 6 unit alat peraga kesenian dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp7.081.800,00.
8) Penambahan Reklasifikasi Bertambah pada peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berasal dari Aset Lain-Lain berupa Micro Bus dengan nilai perolehan sebesar Rp169.400.000,00.

f. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Barang dan Jasa sebesar Rp2.268.996.641,00 merupakan belanja barang milik daerah yang dianggarkan dan direalisasikan melalui rekening Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi nilai kriteria aset sehingga harus dicatat dalam daftar aset daerah. Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan

Mesin berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebagai berikut:

Tabel 177 Reklasifikasi Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin Dari Barang dan Jasa Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	14.700.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	591.240.390,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	48.799.951,00
5	Sekretariat Daerah	944.187.500,00
6	Kecamatan Batumandi	3.000.000,00
7	Kecamatan Juai	2.250.000,00
8	Kecamatan Paringin	45.290.000,00
9	Kecamatan Paringin Selatan	12.324.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	570.956.800,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.748.000,00
Jumlah		**2.268.996.641,00**

Rincian penambahan saldo Peralatan dan Mesin dari Barang dan Jasa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.700.000,00 terdiri dari 1 buah meja rapat dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp8.500.000,00 dan 5 buah meja kerja nilai perolehan per unit sebesar Rp1.240.000,00;
2) Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.500.000,00 terdiri dari 1 buah CCTV dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp4.500.000,00 dan 20 buah telepon jaringan nilai perolehan per unit sebesar Rp100.000,00;
3) Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp591.240.390,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 16**;
4) Penambahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa teralisasi dengan nilai perolehan sebesar Rp48.799.951,00.
5) Penambahan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp944.187.500,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 17**;
6) Penambahan pada Kecamatan Batumandi sebesar Rp3.000.000,00 terdiri dari 1 buah kursi roda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp3.000.000,00;
7) Penambahan pada Kecamatan Juai berupa 1 buah kursi roda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp2.250.000,00;
8) Penambahan pada Kecamatan Paringin sebesar Rp45.290.000,00 terdiri dari 4 buah handy talky dengan nilai perolehan per unit sebesar

Rp500.000,00 dan 3 buah solar cell nilai perolehan per unit sebesar Rp14.430.000,00;

9) Penambahan pada Kecamatan Paringin Selatan sebesar Rp12.324.000,00 terdiri dari 1 buah speaker dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp3.000.000,00 dan 2 buah kursi nilai perolehan per unit sebesar Rp4.662.000,00;

10) Penambahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp570.956.800,00 terdiri dari Karpet dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp198.556.800,00 dan Mitsubishi X Pander dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp372.400.000,00.

11) Penambahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp29.748.000,00 terdiri dari 1 buah Video Confrence dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp29.748.000,00.

2. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp11.202.328.452,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi sebesar Rp10.688.047.914,00 berdasarkan Reklasifikasi Berkurang ke golongan barang lain dimasing-masing SKPD dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 178 Rekapitulasi Reklasifikasi Berkurang Peralatan dan Mesin Berdasarkan SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	673.978.329,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.364.973.045,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	62.529.553,00
4	Dinas Sosial	12.987.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	555.721.050,00
6	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	225.162.150,00
7	Dinas Satpol PP	124.810.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	244.800.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.458.807.200,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	130.000.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	114.236.200,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.600.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	322.999.147,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23.865.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.807.600,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	200.206.521,00
17	Sekretariat Daerah	841.681.801,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
18	Sekretariat DPRD	2.068.789.303,00
19	Kecamatan Lampihong	12.500.000,00
20	Kecamatan Awayan	200.350.000,00
21	Kecamatan Paringin	170.055.400,00
22	Kecamatan Paringin Selatan	40.287.450,00
23	Inspektorat	563.828.165,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	39.170.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.191.903.000,00
Jumlah		**10.688.047.914,00**

1) Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp673.978.329,00 terdiri dari :

Tabel 179 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Ke Golongan Lain Pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	480.938.329,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	4.250.000,00
3	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.500.000,00
4	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan	154.290.000,00
Jumlah		**673.978.329,00**

a) Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin serta bertambah pada Extracomptable karena barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset sebesar Rp480.938.329,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**;

b) Reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Lain - Lain berupa Sepeda Motor dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp4.250.000,00;

c) Reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp34.500.000,00 yang terdiri dari 7 Unit Instalasi PLTS Kapasitas Kecil dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp4.312.500,00 dan 1 Unit PLTS 2025 dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp4.312.500,00;

d) Reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp154.290.000,00 yang terdiri dari 10 Unit Kerangka Baliho dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp15.429.000,00.

2) Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.364.973.045,00 terdiri dari :

Tabel 180 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Ke Golongan Lain Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	1.363.473.045,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.500.000,00
Jumlah		**1.364.973.045,00**

a) Pengurangan Saldo pada Peralatan dan Mesin berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin serta bertambah pada Extracomptable karena barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset sebesar Rp1.363.473.045,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**;
b) Reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum dengan nilai perolehan per Unit sebesar Rp1.500.000,00.

3) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable Peralatan Dan Mesin sebesar Rp62.529.553,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**;
4) Pengurangan pada Dinas Sosial sebesar Rp12.987.000,00 disebabkan reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Ke Extracomptable Pada Dinas Sosial

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nomor Register	Nilai (Rp)
1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342625	566.100,00
2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342626	566.100,00
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342627	566.100,00
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342628	566.100,00
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342629	566.100,00
6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342630	566.100,00
7	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342631	566.100,00
8	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342632	566.100,00
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342633	566.100,00
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342634	566.100,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nomor Register	Nilai (Rp)
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342635	566.100,00
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342636	566.100,00
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342637	566.100,00
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342638	566.100,00
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	5342639	566.100,00
16	Kipas Angin	1	5347448	832.500,00
17	Kipas Angin	1	5347449	832.500,00
18	Kipas Angin	1	5347450	832.500,00
19	Kipas Angin	1	5347451	832.500,00
20	Kasur/Spring Bed	1	5347608	116.550,00
21	Kasur/Spring Bed	1	5347609	116.550,00
22	Kasur/Spring Bed	1	5347610	116.550,00
23	Kasur/Spring Bed	1	5347611	116.550,00
24	Kasur/Spring Bed	1	5347612	116.550,00
25	Kasur/Spring Bed	1	5347613	116.550,00
26	Kasur/Spring Bed	1	5347614	116.550,00
27	Kasur/Spring Bed	1	5347615	116.550,00
28	Kasur/Spring Bed	1	5347616	116.550,00
29	Kasur/Spring Bed	1	5347617	116.550,00
Jumlah				**12.987.000,00**

5) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain – Lain sebesar Rp555.721.050,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**;
6) Pengurangan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp225.162.150,00 terdiri dari:

Tabel 182 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Ke Golongan Lain Pada Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	7.047.150,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	218.115.000,00
Jumlah		**225.162.150,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable sebesar Rp7.047.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 183 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Ke Extracomptable Pada Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nomor Register	Nilai (Rp)
1	Meja Komputer	1	5333673	499.500,00
2	Meja Komputer	1	5333674	499.500,00
3	Kursi Lipat	1	5333675	421.800,00
4	Kursi Lipat	1	5333676	421.800,00
5	Kursi Lipat	1	5333677	421.800,00
6	Kursi Lipat	1	5333678	421.800,00
7	Kursi Lipat	1	5333679	421.800,00
8	Kursi Lipat	1	5333680	421.800,00
9	Kursi Lipat	1	5333681	421.800,00
10	Kursi Lipat	1	5333682	421.800,00
11	Kursi Lipat	1	5333683	421.800,00
12	Kursi Lipat	1	5333684	421.800,00
13	Pompa Air	1	5335359	870.000,00
14	Baterai Kamera	1	5349517	960.150,00
Jumlah				**7.047.150,00**

b) Reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik Modern dengan nilai perolehan sebesar Rp218.115.000,00.

7) Pengurangan pada Dinas Satpol PP sebesar Rp124.810.000,00 disebabkan reklasifikasi berkurang pada Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Lain – Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah ke Aset Lain – Lain pada Dinas Satpol PP

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nomor Register	Nilai (Rp)
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	24930	11.515.000,00
2	Sepeda Motor	1	24852	15.750.000,00
3	Sepeda Motor	1	24857	15.750.000,00
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	25190	11.515.000,00
5	Sepeda Motor	1	24874	15.750.000,00
6	Sepeda Motor	1	24764	15.750.000,00
7	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	25203	11.515.000,00
8	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	25342	11.515.000,00
9	Sepeda Motor	1	24799	15.750.000,00
Jumlah				**124.810.000,00**

8) Pengurangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp244.800.000,00 terdiri dari:

Tabel 185 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	9.800.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	235.000.000,00
Jumlah		**244.800.000,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable sebesar Rp9.800.000,00 berupa 10 Unit Alat Pemadam Kebakaran dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp980.000,00; dan
b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Lain – Lain berupa Mobil Dinas dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp235.000.000,00**.**

9) Pengurangan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.458.807.200,00 terdiri dari:

Tabel 186 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Perhubungan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	2.800.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	1.456.007.200,00
Jumlah		**1.458.807.200,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable sebesar Rp2.800.000,00 berupa 8 Unit Handy Talkie dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp350.000,00; dan
b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain – Lain sebesar Rp1.456.007.200,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

10) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain – Lain berupa Mobil dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp130.000.000,00**.**
11) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja berdasarkan reklasifikasi

berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable Peralatan Dan Mesin sebesar Rp114.236.200,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 23**;

12) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable Peralatan Dan Mesin sebesar Rp7.600.000,00 berupa 8 Unit Pendingin (Kipas Angin) dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp950.000,00**.**
13) Pengurangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp322.999.147,00 terdiri dari:

Tabel 187 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	79.598.100,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	243.401.047,00
Jumlah		**322.999.147,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable sebesar Rp79.598.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 188 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah ke Extracomptable pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Harga per unit (Rp)	Nilai (Rp)
1	Meja Tambahan	2	493.950,00	987.900,00
2	Kursi Rapat	48	654.900,00	31.435.200,00
3	Kursi Tamu	50	943.500,00	47.175.000,00
Jumlah				**79.598.100,00**

b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Lain-Lain sebesar Rp243.401.047,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

14) Pengurangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp23.865.000,00 terdiri dari reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp23.865.000,00 berupa 40 buah kursi lipat dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp596.625,00.
15) Pengurangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp36.807.600,00 terdiri dari reklasifikasi berkurang Peralatan dan

Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp36.807.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 189 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Extracomptable pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Kursi Kerja Staf	976.800,00
2	Kursi Kerja Staf	976.800,00
3	Kursi Kerja Staf	976.800,00
4	Kursi Kerja Staf	976.800,00
5	Kursi Kerja Staf	976.800,00
6	Kursi Kerja Staf	976.800,00
7	Kursi Kerja Staf	976.800,00
8	Kursi Kerja Staf	976.800,00
9	Kursi Kerja Staf	976.800,00
10	Kursi Kerja Staf	976.800,00
11	Kursi Kerja Staf	976.800,00
12	Kursi Kerja Staf	976.800,00
13	Kursi Kerja Staf	976.800,00
14	Kursi Kerja Staf	976.800,00
15	Kursi Kerja Staf	976.800,00
16	Kursi Kerja Staf	976.800,00
17	Kursi Kerja Staf	976.800,00
18	kursi biasa	577.200,00
19	kursi biasa	577.200,00
20	kursi biasa	577.200,00
21	kursi biasa	577.200,00
22	kursi biasa	577.200,00
23	kursi biasa	577.200,00
24	kursi biasa	577.200,00
25	kursi biasa	577.200,00
26	kursi biasa	577.200,00
27	kursi biasa	577.200,00
28	kursi biasa	577.200,00
29	kursi biasa	577.200,00
30	kursi biasa	577.200,00
31	kursi biasa	577.200,00
32	kursi biasa	577.200,00
33	kursi biasa	577.200,00
34	kursi biasa	577.200,00
35	kursi biasa	577.200,00
36	kursi biasa	577.200,00
37	kursi biasa	577.200,00
38	meja kerja kayu	865.800,00
39	meja kerja kayu	865.800,00
40	meja kerja kayu	865.800,00
41	meja kerja kayu	865.800,00
42	meja kerja kayu	865.800,00
43	meja kerja kayu	865.800,00
44	meja kerja kayu	865.800,00
45	meja kerja kayu	865.800,00
46	meja kerja kayu	865.800,00
47	meja kerja kayu	865.800,00
Jumlah		**36.807.600,00**

16) Pengurangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp200.206.521,00 terdiri dari:

Tabel 190 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	178.258.250,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	21.948.271,00
Jumlah		**200,206,521.00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp178.258.250,00 berupa 1 unit mobil pickup dengan nilai perolehan sebesar Rp161.535.000,00 dan 1 unit Sepeda Motor dengan nilai perolehan sebesar Rp16.723.250,00; dan
b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp21.948.271,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

17) Pengurangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp841.681.801,00 terdiri dari:

Tabel 191 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Sekretariat Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	315.691.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	525.990.801,00
Jumlah		**841.681.801,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp315.691.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 192 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Mobil Mikro Bus	139.055.000,00
2	Mobil	90.000.000,00
3	Sepeda Motor	16.456.000,00
4	Sepeda Motor	14.250.000,00
5	Sepeda Motor	16.440.000,00
6	Sepeda Motor	11.500.000,00
7	Sepeda Motor	16.440.000,00

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
8	Sepeda Motor	11.550.000,00
Jumlah		**315.691.000,00**

b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp525.990.801,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

18) Pengurangan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.068.789.303,00 terdiri dari:

Tabel 193 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Sekretariat DPRD

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	2.042.410.153,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	7.908.750,00
3	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	18.470.400,00
Jumlah		**2.068.789.303,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp2.042.410.153,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 27**;
b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset tetap lainnya golongan peralatan dan mesin sebesar Rp7.908.750,00 berupa 1 buah tanaman hias dengan nilai perolehan sebesar Rp7.908.750,00; dan
c) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp18.470.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 194 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Extracomptable pada Sekretariat DPRD

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Sofa	532.800,00
2	Sofa	532.800,00
3	Sofa	532.800,00
4	Sofa	532.800,00
5	Sofa	532.800,00
6	Sofa	532.800,00
7	Sofa	532.800,00
8	Sofa	532.800,00
9	Sofa	532.800,00
10	Sofa	532.800,00
11	Sofa	532.800,00

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
12	Sofa	532.800,00
13	Sofa	532.800,00
14	Sofa	532.800,00
15	Sofa	532.800,00
16	Sofa	532.800,00
17	Sofa	532.800,00
18	Sofa	532.800,00
19	Sofa	532.800,00
20	Sofa	532.800,00
21	Sofa	532.800,00
22	Sofa	532.800,00
23	Sofa	532.800,00
24	Sofa	532.800,00
25	Sofa	532.800,00
26	Sofa	532.800,00
27	Sofa	532.800,00
28	Sofa	532.800,00
29	Sofa	532.800,00
30	Sofa	532.800,00
31	*Crimping Tolls*	305.250,00
32	*Crimping Tolls*	305.250,00
33	*Network Cable Tester*	460.650,00
34	*Network Cable Tester*	460.650,00
35	*Kitchen Set*	238.650,00
36	*Kitchen Set*	238.650,00
37	*Kitchen Set*	238.650,00
38	*Kitchen Set*	238.650,00
Jumlah		**18.470.400,00**

19) Pengurangan pada Kecamatan Lampihong sebesar Rp12.500.000,00 terdiri dari reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp12.500.000,00 berupa 100 buah kursi fiber glas / plastik dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp125.000,00
20) Pengurangan pada Kecamatan Awayan terdiri dari reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp200.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 195 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Extracomptable pada Kecamatan Awayan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Sepeda Motor Smash Biru	6.500.000,00
2	Sepeda Motor	11.500.000,00

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
3	Sepeda Motor Viar	22.000.000,00
4	Menara Tempat Tong Air	2.000.000,00
5	Brankas	4.750.000,00
6	Meja Rapat	1.000.000,00
7	Meja Rapat	1.000.000,00
8	Meja Rapat	1.000.000,00
9	Sofa	5.000.000,00
10	Mesin Cuci	1.800.000,00
11	AC	4.700.000,00
12	AC	3.500.000,00
13	Tong Air	2.000.000,00
14	Tong Air	2.000.000,00
15	Televisi Samsung LED	10.000.000,00
16	Televisi Panasonic	10.000.000,00
17	Tangga Aluminium	2.700.000,00
18	Meja Kerja Staf	1.000.000,00
19	Meja Kerja Staf	1.000.000,00
20	Meja Kerja Staf	1.000.000,00
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.700.000,00
22	UPS	2.050.000,00
23	UPS	3.000.000,00
24	UPS	3.000.000,00
25	UPS	3.000.000,00
26	Kamera	9.950.000,00
27	LCD Proyektor	10.000.000,00
28	Komputer PC	4.000.000,00
29	Komputer PC	4.000.000,00
30	Komputer PC	4.000.000,00
31	Komputer PC	5.000.000,00
32	Komputer PC	4.500.000,00
33	Komputer PC	4.500.000,00
34	Laptop	9.900.000,00
35	Laptop	14.700.000,00
36	CPU	2.100.000,00
37	Printer	3.000.000,00
38	Printer	1.655.000,00
39	Printer	1.500.000,00
40	Printer	2.500.000,00
41	Printer	2.000.000,00
42	Kompter Server Dell	9.845.000,00
Jumlah		**200.350.000,00**

21) Pengurangan pada Kecamatan Paringin sebesar Rp170.055.400,00 terdiri dari:

Tabel 196 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Kecamatan Paringin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain – Lain	145.000.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	25.055.400,00
Jumlah		**170.055.400,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp145.000.000,00 berupa 1 unit mobil ambulance dengan nilai perolehan sebesar Rp45.000.000,00 dan 1 unit mobil dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00; dan

b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp25.055.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 197 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Extracomptable pada Kecamatan Paringin

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Baterai Laptop	675.000,00
2	Handy Talky (HT)	500.000,00
3	Handy Talky (HT)	500.000,00
4	Handy Talky (HT)	500.000,00
5	Handy Talky (HT)	500.000,00
6	Kipas Angin	985.000,00
7	Kipas Angin	985.000,00
8	Kipas Angin	985.000,00
9	Kipas Angin	985.000,00
10	Kipas Angin	985.000,00
11	Kipas Angin	985.000,00
12	Kipas Angin	985.000,00
13	Kipas Angin	985.000,00
14	Kipas Angin	985.000,00
15	Kipas Angin	985.000,00
16	Kipas Angin	976.800,00
17	Kipas Angin	976.800,00
18	Kipas Angin	976.800,00
19	Kursi Kerja Staf	600.000,00
20	Kursi Kerja Staf	600.000,00

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
21	Kursi Kerja Staf	600.000,00
22	Kursi Kerja Staf	600.000,00
23	Kursi Kerja Staf	600.000,00
24	Kursi Kerja Staf	600.000,00
25	Kursi Kerja Staf	600.000,00
26	Meja 1/2 Biro	900.000,00
27	Meja 1/2 Biro	900.000,00
28	Meja 1/2 Biro	900.000,00
29	Meja 1/2 Biro	900.000,00
30	Meja 1/2 Biro	900.000,00
31	Meja 1/2 Biro	900.000,00
Jumlah		**25.055.400,00**

22) Pengurangan pada Kecamatan Paringin Selatan sebesar Rp40.287.450,00 terdiri dari reklasifikasi berkurang dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan berupa Partisi / HPL dengan nilai perolehan sebesar Rp40.287.450,00.

23) Pengurangan pada Inspektorat sebesar Rp563.828.165,00 terdiri dari:

Tabel 198 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Inspektorat

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain - Lain	563.228.165,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	600.000,00
Jumlah		**563.828.165,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp563.228.165,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 28**; dan

b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp600.000,00 yang terdiri dari 1 unit semprotan elektrik dengan nilai perolehan sebesar Rp600.000,00.

24) Pengurangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp39.170.000,00 terdiri dari:

Tabel 199 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	9.200.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	29.970.000,00
Jumlah		**39.170.000,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset tetap lainnya golongan peralatan dan mesin sebesar Rp9.200.000,00 berupa perosotan anak dengan nilai perolehan sebesar Rp9.200.000.000,00; dan
b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp29.970.000,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

25) Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp1.191.903.000,00 terdiri dari:

Tabel 200 Rekapitulasi Pengurangan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Aset Lain - Lain	1.060.035.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin ke Extracomptable	131.868.000,00
Jumlah		**1.191.903.000,00**

a) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp1.060.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 201 Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin Bertambah ke Aset Lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Mobil Ketua DPRD	420.750.000,00
2	Mobil	238.410.000,00
3	Mobil	214.000.000,00
4	Mobil Dinas	186.875.000,00
Jumlah		**1.060.035.000,00**

b) Reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp131.868.000,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

b. Koreksi Berkurang disebabkan terdapat belanja yang dianggarkan dan direalisasikan pada belanja modal, namun tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam aset maupun persediaan sebesar Rp439.243.175,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut :

Tabel 202 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.630.000,00
2	Dinas Perhubungan	425.260.425,00
3	Sekretariat DPRD	8.352.750,00
Jumlah		**439.243.175,00**

1) Koreksi Berkurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengadaan buku untuk pegangan siswa dan guru dalam proses pembelajaran di seluruh sekolah. Alokasi pengadaan buku pegangan dianggarkan dan direalisasikan oleh sekolah melalui belanja modal. Namun berdasarkan kriteria, buku-buku tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset maupun extracomptable sebesar Rp5.630.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 203 Koreksi Berkurang Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Buku Pedoman Guru	65.000,00
2	Buku Pedoman Guru	65.000,00
3	Baju Tari	1.500.000,00
4	Baju Tari	2.000.000,00
5	Baju Tari	2.000.000,00
Jumlah		**5.630.000,00**

2) Koreksi Berkurang pada Dinas Perhubungan terdapat belanja yang dianggarkan dan direalisasikan pada belanja modal, namun tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam aset maupun persediaan sebesar Rp425.260.425,00 yang terdiri dari Marka jalan / rambu tak bersuar.

3) Koreksi Berkurang pada Sekretariat DPRD terdapat belanja yang dianggarkan dan direalisasikan pada belanja modal, namun tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam aset maupun persediaan sebesar Rp8.352.750,00 yang terdiri dari connecktor dan kabel UTP.

c. Koreksi Berkurang disebabkan terdapat kelebihan pembayaran personel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp75.037.363,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	**1.606.821.616.487,00**	**1.360.559.912.324,42**

Merupakan nilai Gedung dan Bangunan pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.606.821.616.487,00 dan Rp1.360.559.912.324,42 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 204 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**1.360.559.912.324,42**
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025	
+/+ Belanja Modal	301.477.376.953,91
+/+ Hibah	258.523.000,00
+/+ Utang	1.405.998.120,00
+/+ Koreksi Bertambah	149.096.000,00
+/+ Reklasifikasi Bertambah	797.217.931,00
+/+ Belanja Barang dan Jasa	5.931.319.363,00
Total Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025	**310.019.531.367,91**
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi Berkurang	(21.289.882.423,42)
-/- Koreksi Berkurang	(42.467.944.781,91)
Total Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025	**(63.757.827.205,33)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**1.606.821.616.487,00**

Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan disebabkan oleh beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan pada Tahun 2025 sebesar Rp310.019.531.367,91 berasal dari hal-hal sebagai berikut:**
   a. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp301.477.376.953,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	22.313.705.179,01
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.945.800.677,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	189.746.882.154,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.884.742,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	483.309.998,41
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	672.186.569,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
7	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6.228.478.605,00
8	Dinas Satpol PP	34.021.500,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	440.558.234,00
10	Dinas Perhubungan	509.787.319,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.547.918.758,00
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	880.328.047,98
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	535.459.730,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.472.245.190,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.676.206.608,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.861.721.200,00
17	Sekretariat Daerah	2.184.011.400,00
18	Sekretariat DPRD	3.866.304.344,00
19	Kecamatan Paringin	37.562.400,00
20	Inspektorat	294.499.177,51
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	433.156.506,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.081.687.824,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.660.791,00
Jumlah		**301.477.376.953,91**

b. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan belanja hibah pada tahun 2025 sebesar Rp258.523.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 206 Tabel penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan belanja hibah Tahun 2025

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Taman	1.600.000,00
2	Green House	2.300.000,00
3	Taman	2.426.000,00
4	Taman Permanen	2.466.000,00
5	Bangunan Bank Sampah	3.369.000,00
6	Bangunan Bank Sampah	4.448.000,00
7	Taman	4.920.000,00
8	Gudang	6.070.000,00
9	Plafon	6.461.000,00
10	Bangunan Hidroponik	7.130.000,00
11	Bangunan Kompos	9.071.000,00
12	Halaman	9.660.000,00
13	Bangunan Hidroponik	10.000.000,00
14	Bangunan Aviari (Kandang)	10.000.000,00

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
15	Taman	10.761.000,00
16	Taman	10.981.000,00
17	Green House	15.860.000,00
18	WC	41.000.000,00
19	Panggung	50.000.000,00
20	Pagar Sekolah	50.000.000,00
Jumlah		**258.523.000,00**

c. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan dari Utang karena perolehan fisik tahun 2025 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp1.405.998.120,00, terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Puskesmas Halong (Utang 2025) dengan nilai perolehan sebesar Rp1.373.502.870,00; dan
2) Perencanaan Puskesmas Juai (Utang 2025) dengan nilai perolehan sebesar Rp32.495.250,00.

d. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan dari Koreksi Bertambah sebesar Rp149.096.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan WC Paud Negeri Pembina Paringin Selatan.

e. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp797.217.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 207 Rekapitulasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Barang Lain

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	739.482.481,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.448.000,00
3	Kecamatan Paringin Selatan	40.287.450,00
Jumlah		**797.217.931,00**

1) Penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp739.482.481,00 terdiri dari:

Tabel 208 Rekapitulasi penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Lain pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Bertambah Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin	154.290.000,00
2	Reklasifikasi Bertambah Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	585.192.481,00
Jumlah		**739.482.481,00**

a) Penambahan pada Dinas Kesehatan berasal dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp154.290.000,00 terdiri dari 10 unit Kerangka baliho dengan nilai perolehan masing-masing Rp15.429.000,00.
b) Penambahan pada Dinas Kesehatan berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp585.192.481,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 209 penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Penambah Ruang Pkm Uren	49.480.000,00
2	Perencanaan Rehab Poskesdes Mantuyan	9.817.950,00
3	Perencanaan Rehab Poskesdes Mamantang	9.817.950,00
4	Poskesdes Mamantang	41.291.861,00
5	Perencanaan Puskesmas Halong	98.300.000,00
6	Poskesdes Mantuyan	87.754.007,00
7	Puskesmas Batumandi	288.730.713,00
Jumlah		**585.192.481,00**

2) Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.448.000,00 terdiri dari Perencanaan bangunan WC Paud Negeri Pembina Paringin selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp10.295.000,00 dan Pengawasan bangunan WC Paud Negeri Pembina Paringin selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp7.153.000,00
3) Penambahan pada Kecamatan Paringin Selatan berasal dari Peralatan dan Mesin berupa Partisi / HPL dengan nilai perolehan sebesar Rp40.287.450,00

f. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.931.319.363,00 disebabkan adanya pengadaan untuk menambah nilai aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 210 Rekapitulasi Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Barang dan Jasa

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	228.369.430,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.897.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.367.457.249,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	74.346.789,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	502.475.978,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	224.495.834,00
7	Sekretariat Daerah	1.383.128.700,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	546.825.283,00
9	Dinas Sosial	211.323.100,00
Jumlah		**5.931.319.363,00**

a. Penambahan pada Dinas Kesehatan dengan nilai perolehan sebesar Rp228.369.430,00 dengan rincian sebagai berikut :

   1) Ruang bersalin Puskesmas Paringin Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp113.724.930,00;
   2) Ruang Bersalin Puskesmas Juai dengan nilai perolehan sebesar Rp50.000.000,00; dan
   3) Rehab Puskesmas Paringin dengan nilai perolehan sebesar Rp64.644.500,00.

b. Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai perolehan sebesar Rp392.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

   1) Pemeliharaan Gedung Budaya dengan nilai perolehan sebesar Rp196.524.000,00; dan
   2) Instalasi MCK dan Pintu Gedung Budaya dengan nilai perolehan sebesar Rp196.373.000,00.

c. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai perolehan sebesar Rp2.367.457.249,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 211 Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dari Barang dan Jasa

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	RTH Sekolah Paket 4 (SDN jungkal Lampihong) (reklasifikasi dari persediaan)	214.256.751,00
2	Sarana dan Prasarana SDN Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong (CV. PERBATASAN) Reklas dari Persediaan	177.919.076,00
3	RTH Sekolah Paket 3 (SDN Gunung Manau Batumandi) Reklas dari Persediaan	214.620.000,00
4	Gedung Serbaguna Komplek Batu Piring Kec. Parsel Lanjutan (reklas dari persediaan)	199.875.003,00
5	Rehabilitasi Pagar Aula Kecamatan Sampai Kelurahan Batu Piting RT. 8 Kecamatan Paringin Selatan (CV. BORNEO MEGAH CONSULTANT) (rejklas persediaan)	14.833.485,00
6	Gudang Aset Kampung Baru Kec. Paringin (CV. HARAPAN BARU) (Reklas Persediaan)	229.396.161,00
7	Rehabilitasi Pagar Aula Kecamatan Sampai Kelurahan Batu Piring RT. 8 Kecamatan Paringin Selatan (CV. TATA LAKSANA KONSTRUKSI) reklas di persediaan	199.835.045,00
8	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Site Development SDN Binjai Punggal (CV. DAFFA AGUNG PERSADA) (REKLAS PERSEDIAAN)	14.990.003,00
9	Site Development Langgar Darut Taqwa Desa Haur Batu (Lanjutan) (CV. SEJAHTERA ABADI) reklas di persediaan	229.360.602,00
10	Gudang Aset Desa Minduin RT. 12 Kel. Batu Piring (CV. SINAR REZKY AGUNG) reklas di persediaan	229.233.358,00
11	Paving Halaman Gudang Aset Desa Harapan Baru (CV. MITRA SANGGAM KONSTRUKSI) (Reklas Persediaan)	229.561.173,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
12	Halaman Samping Aula Kantor Camat Paringin Selatan	199.369.173,00
13	Rehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Lampihong	214.207.419,00
Jumlah		**2.367.457.249,00**

d. Penambahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan nilai perolehan sebesar Rp74.346.789,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Uang Muka Pembangunan Ruang Seketariat dengan nilai perolehan sebesar Rp25.284.938,00;
2) Rehab Ruang Perencanaan dan Keuangan dengan nilai perolehan sebesar Rp25.284.938,00; dan
3) Rehab Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp23.776.913,00.

e. Penambahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai perolehan sebesar Rp502.475.978,00 berupa Moshola kantor.

f. Penambahan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan nilai perolehan sebesar Rp224.495.834,00 berupa atap tribun.

g. Penambahan pada Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.383.128.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Backdrop Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp627.550.000,00;
2. Rumah Dinas Blok B Nomor 102 dengan nilai perolehan sebesar Rp189.100.400,00;
3. Rumah Dinas Blok D Nomor 48 dengan nilai perolehan sebesar Rp189.545.900,00;
4. Rumah Dinas Blok B Nomor 112 dengan nilai perolehan sebesar Rp189.478.400,00; dan
5. Rumah Dinas Blok B Nomor 106 dengan nilai perolehan sebesar Rp187.454.000,00.

h. Penambahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp546.825.283,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kafetaria Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp198.304.719,00; dan
2) Pagar BPKPAD dengan nilai perolehan sebesar Rp348.520.564,00.

i. Penambahan pada Dinas Sosial dengan nilai perolehan sebesar Rp211.323.100,00 berupa Pemeliharaan Gedung.

2. Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp63.757.827.205,33 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

a. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang sebesar Rp21.289.882.423,42 dengan sebagai berikut:

Tabel 212 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.115.362.474,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja	226.584.151,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	15.177.861.422,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.489.512.433,42
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212.004.388,00
6	Dinas Perhubungan	118.645.589,00
7	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	482.856.956,00
8	Sekretariat Daerah	322.000.000,00
9	Sekretariat DPRD	145.055.010,00
Jumlah		**21.289.882.423,42**

Rincian pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.115.362.474,00 terdiri dari:

Tabel 213 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Kesehatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	9.343.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	1.978.773.980,00
3	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.245.494,00
Jumlah		**2.115.362.474,00**

a) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.343.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 214 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Peralatan dan mesin

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Sofa L	1	4.650.000,00
2	Kursi Kerja	1	950.000,00
3	Wastafel Lampihong	1	1.243.000,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	250.000,00
Jumlah			**9.343.000,00**

b) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset lain-lain sebesar Rp1.978.773.980, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 215 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Aset Lain-lain

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Gedung A Rawat Jalan Puskesmas Halong	1	334.089.000,00
2	Gedung B (rawat Inap) Puskesmas Halong	1	642.086.000,00
3	Puskesmas Uren Kec Halong	1	1.002.598.980,00
Jumlah			**1.978.773.980,00**

c) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp127.245.494,00, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Perencanaan Rumah Travo dengan nilai perolehan sebesar Rp13.520.564,00; dan
   2) Ruang Bersalin Puskesmas Paringin Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp113.724.930,00.

2. Pengurangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja berdasarkan Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 226.584.151,00 berupa Paving Blok Halaman.
3. Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 15.177.861.422,00 terdiri dari:

Tabel 216 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan	13.181.546.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.996.315.422,00
Jumlah		**15.177.861.422,00**

a) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.181.546.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 217 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	PSU Perumahan Pondok Indah V (jalan komplek)	1	1.021.141.000,00
2	Peningkatan PSU Perumahan Rizki Balangan Residence (Jalan Komplek)	1	3.048.216.000,00
3	PSU Perumahan Puri Gardena (Jalan Komplek)	1	3.054.878.000,00
4	PSU Perumahan Balai Pangeran (Jalan Komplek)	1	3.078.272.000,00
5	Peningkatan PSU Perumahan Cahaya Muhibbin (Jalan Komplek)	1	2.979.039.000,00
Jumlah			**13.181.546.000,00**

b) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.996.315.422,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 218 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puja Sera Belakang Pasar Adaro Tahap V (CV. KARYASA CONSULINDO)	1	99.805.511,00
2	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Halaman Sekretariat Daerah Kab. Balangan (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	1	99.768.465,00
3	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Taman MPP Kab. Balangan (CV. LINE BORNEO CONSULTANT)	1	99.790.665,00
4	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan RTH Komplek Perkantoran Paringin Selatan (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	1	99.735.165,00
5	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor dan Gedung	1	99.790.665,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
	Serbaguna Kelurahan Paringin Timur (CV. KARYA DESARI)		
6	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kawasan MPP Kab. Balangan (CV. JOINT CONSULTANT ENGINEERING)	1	99.931.080,00
7	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Review Struktur Bangunan Stadion Garuda Maharam (CV. NISKALA ASITEKNIK BANUA)	1	99.790.665,00
8	Pekerjaan Perencanaan Penambahan Ruang Kantor DKUKMNAKER Kab. Balangan (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	1	99.776.235,00
9	Perencanaan Penambahan Ruang Kantor DISDUKCAPIL Kab. Balangan (CV. JASA REKA ARTISTIKA)	1	99.836.932,00
10	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	99.836.932,00
11	Perencanaan Pembangunan Pusat Perbankan Kab. Balangan (CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT)	1	99.944.261,00
12	Perencanaan Peningkatan Tugu Perjuangan Dan Kawasan DPMPTSP Kab. Balangan (CV. RIA KONSULTAN)	1	99.805.511,00
13	Perencanaan Pembangunan Gedung UKPBJ Kab. Balangan (CV. GANESH GAUTAMA KONSULTAN)	1	99.685.215,00
14	Perencanaan Penambahan Kantor Baru Sekretariat Daerah Kab. balangan (CV. GANESH GAUTAMA KONSULTAN)	1	99.982.972,00
15	Perencanaan Peningkatan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Balangan (CV. WIYASA DRAWANA)	1	99.982.972,00
16	Perencanaan Pembangunan Gudang BPBD Lanjutan (CV. AMBER CONSULTANT)	1	99.345.000,00
17	Angsuran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Bahasa Disnakertrans Kab. Balangan (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	1	99.955.500,00
18	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Kawasan Terpadu Komplek Islamic Centre (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	1	99.776.235,00
19	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran Kab. Balangan (CV. ESTIMA ENGITECS)	1	99.858.930,00
20	Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah Dinsos Kab. Balangan (CV. CIVIL DESIGN)	1	99.916.511,00
Jumlah			**1.996.315.422,00**

4. Pengurangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan bertambah pada Aset Lain-lain sebesar Rp2.489.512.433,42 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 219 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Aset Lain-lain

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Gedung Posyando Kelurahan Paringin Kota	1	224.158.325,30
2	Gedung Posyando Desa Gunung Riut Kec.Halong	1	224.083.043,80
3	Gedung Posyando Desa Maradap Kec.Paringin Selatan	1	224.059.525,00
4	Gedung Posyando Desa Kandang Jaya Kec.Lampihong	1	223.657.426,60
5	Gedung Posyando Desa Binju Kec.Halong	1	224.412.327,48
6	Gedung Posyando Desa Tanah Habang Kiri Kec.Lampihong	1	223.766.264,83
7	Gedung Posyando Tanah Habang Kanan Kec.Lampihong	1	223.741.969,40
8	Gedung Posyando Desa Teluk Karya Kec.Lampihong	1	223.821.002,00
9	Gedung Posyando Desa Pimping Kec.Lampihong	1	223.677.718,00
10	Gedung Posyando Desa Timbun Tulang Kec.Batumandi	1	223.539.395,41
11	Gedung Posyando Desa Lajar Kec.Lampihong	1	106.387.221,00
12	Gedung Posyando Desa Juuh Kec.Tebing Tinggi	1	144.208.214,60
Jumlah			**2.489.512.433,42**

5. Pengurangan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan bertambah pada Extracomptable dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp212.004.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 220 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Extracomptable Gedung Bangunan	21.529.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	190.475.388,00
Jumlah		**212.004.388,00**

Tabel 221 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Extracomptable

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Taman	1	1.600.000,00
2	Green House	1	2.300.000,00
3	Taman	1	2.426.000,00
4	Taman Permanen	1	2.466.000,00
5	Bangunan Bank Sampah	1	3.369.000,00
6	Bangunan Bank Sampah	1	4.448.000,00
7	Taman	1	4.920.000,00
Jumlah			**21.529.000,00**

Tabel 222 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Dewi Sartika Ds. Teluk Bayur Kec. Juai Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2025.001657	1	13.780.000,00
2	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Galumbang Kec. Juai Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2025.001618	1	96.951.000,00
3	Perencanaan Pemasangan Paving SDN Mantimin 2	1	9.937.275,00
4	Perencanaan Pem. Kanopi TKN Tunas Harapan Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000143	1	10.319.000,00
5	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Budaya Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000273	1	12.254.500,00
6	Perencanaan Rehabilitasi Pagar Korwil Paringin Selatan Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000347	1	9.715.900,00
7	Perencanaan Pemb. Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK. Al Ikhlas Ds. Panimbaan Kec. Juai Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000334	1	9.700.100,00
8	Perencanaan Pengecatan SDN Hilir Pasar Kec. Lampihong Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000230	1	13.817.613,00
9	Perencanaan Pembangunan Halaman SDN Pimping Kec. Lampihong Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000135	1	14.000.000,00
Jumlah			**190.475.388,00**

6. Pengurangan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp118.645.589,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 223 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Perhubungan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	20.000.000,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.645.589,00
Jumlah		**118.645.589,00**

   a) Tempat Parkir Dinas Perhubungan bertamabah pada Aset lain-lain dengan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00; dan
   b) Perencanaan Halte Kab.Balangan TA.2025 bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan sebesar Rp98.645.589,00.
7. Pengurangan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp482.856.956,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 224 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan	414.327.155,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	68.529.801,00
Jumlah		**482.856.956,00**

a) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp414.327.155,00 berupa betonisasi Halaman Kantor; dan
b) Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp68.629.801,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 225 Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Selasar Membran Perahu dan Parkiran Bidang Tata Lingkungan Hidup	1	14.213.550,00
2	Perencanaan Pembangunan Papan Nama RTH Bidang Tata Lingkungan Hidup	1	14.874.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Kebun Raya Bidang Tata Lingkungan Hidup	1	14.874.000,00
4	Perencanaan Rehab Gedung Laboratorium Bidang Pengendalian Pencemaran	1	14.754.930,00
5	Petrencanaan Rehab Parkir Laboratorium UPT Laboratorium	1	9.813.321,00
Jumlah			**68.529.801,00**

8. Pengurangan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp322.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) 10 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp10.700.000,00;
   b) 10 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp13.400.000,00; dan
   c) 5 buah tenda dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp16.200.000,00.

9. Pengurangan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp145.055.010,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 226 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang ke Golongan Lain pada Sekretariat DPRD

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	98.845.500,00
2	Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.209.510,00
Jumlah		**145.055.010,00**

a) Papan Nama Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp 98.845.500,00; dan
b) Perencanaan Review Gudang Arsip dengan nilai perolehan sebesar Rp46.209.510,00.

b. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Berdasarkan Koreksi Berkurang Sebesar Rp42.467.944.781,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 227 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Koreksi Berkurang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	505.468.582,01
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.786.885.501,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.108.425.319,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.475.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,41
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	0,98
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28.324.376,00
8	Inspektorat	2,51
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.366.000,00
Jumlah		**42.467.944.781,91**

1) Pengurangan pada Dinas Kesehatan berdasarkan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.468.582,01 dengan rincian sebagai berikut :

a) Koreksi Pembayaran Utang pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp 430.097.581,00;
b) Koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah sebesar Rp1,01; dan

c) Koreksi pengembalian karena kurang volume pada Dinas Kesehatan sebesar Rp75.371.000,00.

2) Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.786.885.501,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Koreksi pembayaran Utang pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp18.775.329.011,00; dan
b) Koreksi pengembalian karena kurang volume pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.556.490,00.

3) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.108.425.319,00 dengan rincian sebagai berikut :
a) Koreksi Pembayaran Utang pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp264.948.989,00;
b) Koreksi / Reklasifikasi ke Persediaan dengan nilai perolehan sebesar Rp22.599.721.080,00; dan
c) Koreksi pengembalian karena kurang volume pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp243.755.250,00.

4) Pengurangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.475.000,00 merupakan Jasa / Upah bongkar Partisi HPL.

5) Pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengurangan berdasarkan koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah sebesar Rp0,41.

6) Pengurangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Pengurangan berdasarkan koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah sebesar Rp0,98.

7) Pengurangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.324.376,00 merupakan pembayaran Utang pekerjaan tahun 2024.

8) Pengurangan pada Inspektorat berdasarkan koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah sebesar Rp2,51.

9) Pengurangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Koreksi pengembalian karena kurang sebesar Rp36.366.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**3.161.556.671.072,42**	**2.685.719.280.826,42**

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan /atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, masing–masing adalah sebesar Rp3.161.556.671.072,42 dan Rp2.685.719.280.826,42 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 228 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**2.685.719.280.826,42**
Mutasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	
+/+ Belanja Modal	453.719.735.367,00
+/+ Hibah	308.654.000,00
+/+ Utang	7.160.407.006,96
+/+ Reklasifikasi	27.665.629.517,00
+/+ Barang dan Jasa	4.569.041.982,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**493.423.467.872,96**
Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi Berkurang	(5.233.336.558.00)
-/- Koreksi Kurang	(12.352.741.068,96)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(17.586.077.626,96)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**3.161.556.671.072,42**

1. **Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp493.423.467.872,96 berasal dari hal-hal sebagai berikut:**

   a. Penambahan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Belanja Modal tahun 2025 Sebesar Rp453.719.735.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 229 Rekapitulasi Penambahan Saldo pada Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	7.704.175.796,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.750.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	369.607.100.928,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74.828.908.170,00
5	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	436.625.103,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	642.407.370,00
7	Sekretariat DPRD	348.762.000,00
8	Kecamatan Paringin Selatan	144.006.000,00
Jumlah		**453.719.735.367,00**

b. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah sebesar Rp308.654.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Solar panel dengan nilai perolehan Rp102.000.000,00
2) Solar panel dengan nilai perolehan Rp102.000.000,00
3) Solar panel dengan nilai perolehan Rp102.000.000,00
4) Drainase dengan nilai perolehan Rp2.654.000,00

c. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Utang karena perolehan fisik tahun 2025 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp7.160.407.006,96 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 230 Rekapitulasi Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dari dari Utang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	PT. Indo Trans Konstruksi	2.666.510.186,50
2	CV. Rangas Batuah	966.582.423,27
3	CV. Adiba Rizkia	169.752.907,66
4	"CV. Al Madani Jaya	1.394.158.979,33
5	Makmur"	969.247.360,00
6	CV. Annisa	994.155.150,20
JUMLAH		**7.160.407.006,96**

d. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp27.665.629.517,00 berdasarkan Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Barang Lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 231 Rekapitulasi Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Barang Lain

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	34.500.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26.689.839.611,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	298.878.600,00
5	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	414.327.155,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	226.584.151,00
Jumlah		**27.665.629.517,00**

Rincian Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Penambahan pada Dinas Kesehatan dari Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.500.000,00 berupa honorarium 8 unit PLTS dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp4.312.500,00;
2) Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Peralatan dan Mesin berupa Bangunan menara air dengan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00;
3) Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Lain sebesar Rp26.689.839.611,00 terdiri dari:

Tabel 232 Rekapitulasi penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah dari Golongan Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan	13.181.546.000,00
2	Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.508.293.611,00
Jumlah		**26.689.839.611,00**

a) Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan bangunan sebesar Rp13.181.546.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 233 Rekapitulasi penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	PSU Perumahan Pondok Indah V (jalan komplek)	1	1.021.141.000,00
2	Peningkatan PSU Perumahan Rizki Balangan Residence (Jalan Komplek)	1	3.048.216.000,00
3	PSU Perumahan Puri Gardena (Jalan Komplek)	1	3.054.878.000,00
4	PSU Perumahan Balai Pangeran (Jalan Komplek)	1	3.078.272.000,00
5	Peningkatan PSU Perumahan Cahaya Muhibbin (Jalan Komplek)	1	2.979.039.000,00
Jumlah			**13.181.546.000,00**

b) Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.508.293.611,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 234 Rekapitulasi penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Rekontruksi Jalan Lokpanginangan - Jimamun (DANA DAK)	1	2.155.434.792,00
2	Rekonstruksi Jalan Lokpanginangan - Jimamun (DANA DAK)	1	1.553.292.500,00
3	Jalan Lokpanginangan - Jimamun (DANA DAK)	1	2.210.000,00
4	Rekonstruksi Jalan Lokpanginangan - Jimamun (Dana Dak)	1	2.434.261.800,00
5	Jalan Lokpanginangan - Jimamun (DANA DAK)	1	2.279.303.174,00
6	Peningkatan Jalan Halong - Tabuan	1	276.324.683,00
7	Peningkatan Jalan Halong - Tabuan	1	1.050.000,00
8	Jalan Halong - Tabuan	1	1.610.000,00
9	Jalan Halong - Tabuan	1	95.352.000,00
10	Jalan Halong - Tabuan	1	644.757.594,00
11	Peningkatan Jalan Muara Pitap - Lingsir	1	1.395.513.159,00
12	Jalan Muara Pitap - Lingsir	1	1.050.000,00
13	Jalan Muara Pitap - Lingsir	1	2.210.000,00
14	Jalan Muara Pitap - Lingsir	1	96.259.200,00
15	Jalan Muara Pitap - Lingsir (CV. PATRA JASA UTAMA) UTANG 2024	1	266.511.095,00
16	Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang	1	937.593.388,00
17	Jalan Mauya - Binuang Santang	1	1.050.000,00
18	Jalan Mauya - Binuang Santang	1	1.910.000,00
19	Jalan Mauya - Binuang Santang	1	96.015.000,00
20	Jalan Mauya - Binuang Santang	1	1.063.543.434,00
21	Jalan Mauya - Binuang Santang (CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK)	1	105.322.992,00
22	Jalan Tabuan - Uren	1	97.718.800,00
Jumlah			**13.508.293.611,00**

4) Penambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp298.878.600,00 terdiri dari:

a) Perencanaan Karya Bakti TNI Jalan Desa Binuang Santang - Ajung Kec.Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp99.794.550,00;
b) Konsultan Perencnaan Lanjutan Pimping Kec.Lampihong dengan nilai perolehan sebesar Rp99.278.400,00; dan
c) Perencanaan Jalan Desa Mayanau-Mantuyan Kec.Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp99.805.650,00.

5) Penambahan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dari Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan berupa Betonisasi Halaman Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp414.327.155,00; dan
6) Penambahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dari Reklasifikasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan berupa Paving Blok Halaman dengan nilai perolehan sebesar Rp226.584.151,00.

e. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa disebabkan adanya pengadaan untuk menambah nilai aset sebesar Rp4.569.041.982,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 235 Rekapitulasi penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan Lingkungan Desa Muara Pitap Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan (reklasifikasi dari persediaan)	229.319.605,00
2	Jalan Lingkungan RT. 7 Tungkap Kel. Batu Piring Paringin Selatan (Reklas dari Persediaan)	225.825.535,00
3	Jalan Lingkungan RT. 11 Desa Teluk Keramat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin (CV. HAFA CIPTA MANDIRI) Reklas dari Persediaan	229.217.570,00
4	Jalan Lingkungan RT. 10 Desa Gunung Pandau Kel. Paringin Timur (Reklas dari Persediaan)	229.615.700,00
5	Sarana dan Prasarana Air Bersih Rica Rt. 7 Kel. Paringin Kota Kab. Balangan (Reklas dari persediaan)	229.530.500,00
6	Sarana dan Prasarana Air Bersih Kel. Batu Piring RT. 6 (Reklas dari persediaan)	229.748.000,00
7	Jalan Lingkungan Margo Mulyo kelurahan batu piring (reklas dari persediaan)	229.680.982,00
8	Jalan Lingkungan Desa Teluk Keramat Kec. Paringin (CV. KILAU MUTIARA RAYA) (Reklas Persediaan)	229.615.700,00
9	Jalan Lingkungan Desa Harapan Baru Kec. Paringin Selatan (CV. SEMAR CIPTA MULYA) (REKLAS PERSEDIAAN)	229.057.295,00
10	Jalan Lingkungan Gang Sepakat Kel. Batu Piring (CV. HAFA CIPTA MANDIRI) (REKLAS PERSEDIAAN)	228.933.272,00
11	Jalan Lingkungan RT. 8 Desa Muara Pitap Kec. Paringin Selatan (CV. SEMAR CIPTA MULYA) (Reklas Persediaan)	228.619.795,00
12	Jalan Lingkungan RT. 11 Desa Harapan Baru Kec. Paringin Selatan (CV. MAWAR JAYA LESTARI) (REKLAS PERSEDIAAN)	229.502.085,00
13	Jalan Lingkungan Rt. 12 Desa Haur Batu Tembus Paringin Timur Kec. Paringin (CV. UTAMA SRI REZEKI) (REKLAS PERSEDIAAN)	229.231.763,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
14	JALAN LINGKUNGAN RT.07 KEL. BATU PIRING KEC. PARINGIN SELATAN (CV. JEJE KARYA UTAMA) (reklas persediaan)	199.723.000,00
15	Jalan Lingkungan RT. 13 Desa Haur Batu Kec. Paringin (CV. SEMAR CIPTA MULYA) (Reklas Persediaan)	228.777.763,00
16	Jalan Lingkungan RT. 13 Desa Harapan Baru Kec. Paringin Selatan (CV. GLOBAL JAYA) Reklas Di Persediaan	229.493.085,00
17	Jalan Lingkungan Kelurahan Batu Piring Rt. 8 Gang Hidayah (CV. HAFA CIPTA MANDIRI) (Reklas Persediaan)	229.033.466,00
18	Jalan Lingkungan RT. 12 Desa Minduin Kec. Paringin Selatan (CV. SEMAR CIPTA MULYA) (REKLAS PERSEDIAAN)	228.986.295,00
19	Jalan Lingkungan Desa Teluk Keramat RT. 9 (CV. PUTERA PERINTIS GROUP) (Reklas Persediaan)	229.625.700,00
20	Jalan Lingkungan Gampa Kolam Kecamatan Paringin Selatan (CV. KASTURI RAYA MANDIRI) (REKLAS PERSEDIAAN)	229.541.295,00
21	Jalan Gang Kadavi Kelurahan Batu Piring	15.963.576,00
Jumlah		**4.569.041.982,00**

2. **Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp17.586.077.626,96 berasal dari hal-hal sebagai berikut:**

   a. Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang tahun 2025 Sebesar Rp5.233.336.558,00

Tabel 236 Rekapitulasi Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang ke Golongan Barang Lain

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.750.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	199.444.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.026.141.758,00
Jumlah		**5.233.336.558,00**

Rincian Pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.750.000,00 terdiri dari:

Tabel 237 pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dari Golongan Lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Tong air	1	1.750.000,00
2	Tandon Air	1	1.500.000,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
3	Tandon 1200 Liter	1	3.000.000,00
4	Tandon Air	1	1.500.000,00
Jumlah			**7.750.000,00**

2) Pengurangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp199.444.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Perencanaan Karya Bakti TNI Jalan Desa Marajai – Mauya dengan nilai perolehan sebesar Rp99.722.400,00;
   b) Perencanaan Karya Bakti TNI Jalan Desa Gunung Manau - Juuh dengan nilai perolehan sebesar Rp99.722.400,00.

3) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.026.141.758,00 terdiri dari:

Tabel 238 Rekapitulasi pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dari Golongan Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Tanah	689.075.932,00
2	Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain	466.224.200,00
3	Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.870.841.626,00
Jumlah		**5.026.141.758,00**

   a) Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Tanah sebesar Rp689.075.932,00 terdiri dari:
      (1) *Land Clearing* Lahan Pemda Belakang Polres Balangan dengan nilai perolehan sebesar Rp 229.679.969,00;
      (2) *Land Clearing* Lahan Pemda Komplek Pendidikan Kab. Balangan dengan nilai perolehan sebesar Rp229.737.463,00;
      (3) Tanah Untuk Penambahan Kantor Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan dengan nilai perolehan sebesar Rp229.658.500,00.
   b) Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain berupa Siring Jalan Kabupaten Desa Tawahan Kec. Juai / S.2 dengan nilai perolehan sebesar Rp466.224.200,00.

c) Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.870.841.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 239 Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan Jembatan Balida (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	1	99.123.000,00
2	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Box Culvert Tungkap Kelurahan Batu Piring (CV. RMH KONSULTAN)	1	99.339.450,00
3	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Jembatan Sungsum (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	1	99.123.000,00
4	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Sumber Agung - Karya (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	1	99.100.800,00
5	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Mesjid YAMP - Polsek Paringin Kecamatan Paringin	1	99.211.800,00
6	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lajar - Mundar (CV. RMH KONSULTAN)	1	99.599.190,00
7	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Gampa Kec. Paringin (CV. RMH KONSULTAN)	1	99.343.446,00
8	Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Jaya - Lok Batu Kecamatan Awayan (CV. AMBER CONSULTANT)	1	99.120.558,00
9	Perencanaan Rekontruksi Jalan Longsor Matang Lurus (CV. R-PLAN ARSIMETRIKA)	1	98.778.900,00
10	Pembayaran Termyn 100% PerencanaanPeningkatan Jalan Panaitan - Matang Lurus (CV. CLICK DESAIN KONSULTAN)	1	98.967.600,00
11	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Kusambi Hilir - Basio (CV. KARYA DESARI)	1	99.295.050,00
12	Angsuran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Baramban - Pulantan (CV. EL BANJARO CLASICO)	1	99.169.620,00
13	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Sirap - Brai (CV. RMH KONSULTAN)	1	99.343.446,00
14	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Komplek Pendidikan - Gampa Kecamatan Paringin Selatan (CV. BERKAH DESAIN KONSULTANT)	1	99.296.714,00
15	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Rt. 1 Desa Baruh Panyambaran (CV. SKALA MULTIREKA)	1	99.081.375,00
16	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Paran Rt. 2 Kec. Paringin	1	99.059.175,00
17	Pembayaran 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Mungkur Uyam - Binjai Punggal Kecamatan Juai (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	1	99.367.200,00
18	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Pitap - Awayan (CV. RUHAFI ADHIRAJASA)	1	98.956.500,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
19	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Galumbang - Muara Kuaw (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	1	99.123.000,00
20	Pembayaran 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Kapul - Pasar Halong Kecamatan Halong (CV. MITRA BANUA MANDIRI)	1	99.243.321,00
21	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Hauwai - Aniungan Kecamatan Halong (CV. AMANDA NUSANTARA)	1	99.089.700,00
22	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Halong - Gunung Belawan Kecamatan Halong (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	1	99.533.700,00
23	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Pitap - Lingsir (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	1	99.594.750,00
24	Perencanaan Peningkatan Jalan Awayan - Guha Kecamatan Awayan (CV. BANUATAM TEKNIK CONSULTANT)	1	99.158.200,00
25	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lamida Bawah Rt. 1 Kec. Paringin	1	99.447.675,00
26	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Tangalin - Jinamun (CV. ASKARA JAYA KONSULTAN)	1	99.567.000,00
27	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Baruh Penyambaran - Sumber Agung (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	1	99.567.000,00
28	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lasung Batu - Bayu (PT. PRIMA DINAMIKA SELARAS)	1	99.411.600,00
29	Perencanaan Jalan Bahan - Pasar Halong Kecamatan Halong (PT. KULA BANUA KONSULTAN)	1	99.504.840,00
30	Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Mungkur Uyam - Kantor Camat Kecamatan Juai (CV. M.I.A. 13)	1	99.478.200,00
31	Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	1	99.345.000,00
32	Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi Jalan Longsor Desa Murung Jambu Kecamatan Paringin Selatan	1	98.896.116,00
33	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Marias/Muara Ninian - Balahing Kura-kura (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	1	99.123.000,00
34	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Gunung Batu - Iyam (CV. TANJUNG PRIMANUSA PERSADA)	1	99.145.200,00
35	Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Mauya - Binuang Santang (CV. DEYA CONSULTANT ENGINEERING)	1	99.378.300,00
36	Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Mamigang RT. 1 (CV. CITRA MANDIRI CONSULTANT)	1	99.067.500,00
37	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI PINUAN DESA AUH KEC. TEBING TINGGI (CV. CAKRAWALA BORNEO NUSANTARA)	1	99.289.500,00
38	Perencanaan Peningkatan Jalan Hauwai - Suryatama/Mihu (CV. ASKARA JAYA KONSULTAN)	1	99.589.200,00

No	Nama Barang	Satuan (unit)	Nilai (Rp)
39	Perencanaan Peningkatan Jalan Karuh - Sungai Raya Kecamatan Batumandi (CV. GRIYASHANTA)	1	99.012.000,00
Jumlah			**3.870.841.626,00**

b. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Koreksi tahun 2025 sebesar Rp12.352.741.068,96 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,96;
2) Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan koreksi utang tahun lalu sebesar Rp3.385.794.386,00;
3) Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan koreksi / reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp8.153.950.281,00; dan
4) Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan koreksi kurang volume sebesar Rp812.996.400,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	**10.059.296.877,00**	**9.753.400.327,00**

Merupakan nilai Aset Tetap Lainnya pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp10.059.296.877,00 dan Rp9.753.400.327,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 240 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**9.753.400.327,00**
Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	
+/+ Belanja Modal	1.612.368.086,00
+/+ Reklasifikasi Bertambah	235.223.750,00
+/+ Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00
Jumlah Penambahan	**1.879.591.836,00**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi Berkurang	(279.936.350,00)
-/- Koreksi	(1.293.758.936,00)
Jumlah Pengurangan	**(1.573.695.286,00)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**10.059.296.877,00**

1. Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp1.879.591.836,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

a. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan Belanja Modal sebesar Rp1.612.368.086,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 241 Rekapitulasi Belanja Modal Bertambah Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.308.917.186,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.300.000,00
3	Dinas Satpol PP	49.372.800,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.025.500,00
5	Kecamatan Tebing Tinggi	7.000.000,00
6	Kecamatan Paringin	91.752.600,00
Jumlah		**1.612.368.086,00**

b. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp 235.223.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 242 Rekapitulasi Reklasifikasi Bertambah Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	218.115.000,00
2	Sekretariat DPRD	7.908.750,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	9.200.000,00
Jumlah		**235.223.750,00**

1) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp218.115.000,00 berupa alat musik modern;
2) Reklasifikasi bertambah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp7.908.750,00 berupa tanaman hias;
3) Reklasifikasi bertambah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebesar Rp9.200.000,00 berupa 1 set perosotan Anak.

c. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Barang dan Jasa sebesar Rp32.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan pengadaan indukan ikan nila berdasarkan hasil identifikasi pada kolam indukan ikan terdiri dari 600 ekor Indukan Ikan Nila Betina dengan nilai perolehan per ekor sebesar Rp40.000,00 dan 200 ekor Indukan Ikan Nila Jantan dengan nilai perolehan per ekor sebesar Rp40.000,00.

2. Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp1.573.695.286,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan Reklasifikasi Berkurang sebesar Rp279.936.350,00, dengan rincian tabel berikut:

Tabel 243 Rekapitulasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan Reklasifikasi Berkurang Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.158.250,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.025.500,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	32.000.000,00
4	Kecamatan Paringin	91.752.600,00
Jumlah		**279.936.350,00**

1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Reklasifikasi Berkurang dari Aset Tetap Lainnya dan bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.158.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 244 Rekapitulasi Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Nomor Register	Nilai (Rp)
1	Bass Tarbang	5357047	3.183.200,00
2	Tarbang	5357064	1.860.000,00
3	Sound System	5356995	8.500.000,00
4	Audio Amplifier	5357051	1.615.050,00
Jumlah			**15.158.250,00**

2) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Reklasifikasi Berkurang dari Aset Tetap Lainnya dan bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp141.025.500,00 terdiri dari 21 unit Alat Peraga Kesenian dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp6.715.500,00;

3) Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Reklasifikasi Berkurang dari Aset Tetap Lainnya dan bertambah pada Extracomptable sebesar Rp32.000.000,00 terdiri dari 600 ekor

Indukan Ikan Nila Betina dengan nilai perolehan per ekor sebesar Rp40.000,00 dan 200 ekor Indukan Ikan Nila Jantan dengan nilai perolehan per ekor sebesar Rp40.000,00;

4) Pada Kecamatan Paringin Reklasifikasi Berkurang dari Aset Tetap Lainnya dan bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.752.600,00 terdiri dari 7 unit Alat Peraga Kesenian dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp7.037.400,00 dan 6 unit Alat Peraga Kesenian dengan nilai perolehan per unit sebesar Rp7.081.800,00

b. Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Koreksi Berkurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengadaan buku untuk pegangan siswa dan guru dalam proses pembelajaran di seluruh sekolah. Alokasi pengadaan buku pegangan dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui belanja modal aset tetap lainnya. Namun berdasarkan kriteria, buku-buku tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset maupun extracomptable sebesar Rp1.293.758.936,00 dengan rincian:

1) Belanja modal buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp23.633.000,00;
2) Belanja modal buku pada Sekolahan sebesar Rp1.270.125.936,00 yang bersumber dari dana BOS/BOSP.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**6.926.236.147,00**	**15.345.808.759,00**

Merupakan nilai pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp6.926.236.147,00 dan Rp15.345.808.759,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 245 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**15.345.808.759,00**
Mutasi Bertambah Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024	
+/+ Reklasifikasi dari golongan lain	6.597.707.630,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**6.597.707.630,00**
Mutasi Berkurang Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	
-/- Reklasifikasi ke golongan lain	(14.946.797.492,00)
-/- Koreksi	(70.482.750,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(15.017.280.242,00)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**6.926.236.147,00**

1. **Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp6.597.707.630,00 merupakan reklasifikasi bertambah dari golongan barang lain dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel 246 Rekapitulasi penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan reklasifikasi bertambah dari golongan barang lain Tahun 2025

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	127.245.494,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.475.388,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.867.157.048,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	199.444.800,00
5	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	68.529.801,00
6	Dinas Perhubungan	98.645.589,00
7	Sekretariat DPRD	46.209.510,00
Jumlah		**6.597.707.630,00**

a. Penambahan pada Dinas Kesehatan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.245.494,00 terdiri dari :
   1) Perencanaan Rumah Travo dengan nilai perolehan sebesar Rp13.520.564,00; dan
   2) Ruang Bersalin dengan nilai perolehan sebesar Rp113.724.930,00.

b. Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dan berkurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp190.475.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 247 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang pada golongan barang lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Dewi Sartika Ds. Teluk Bayur Kec. Juai	13.780.000,00
2	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Galumbang Kec. Juai	96.951.000,00
3	Perencanaan Pemasangan Paving SDN Mantimin 2	9.937.275,00
4	Perencanaan Pem. Kanopi TKN Tunas Harapan	10.319.000,00
5	Perencanaan Pemeliharaan Gedung Budaya	12.254.500,00
6	Perencanaan Rehabilitasi Pagar Korwil Paringin Selatan	9.715.900,00
7	Perencanaan Pemb. Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK. Al Ikhlas Ds. Panimbaan Kec. Juai	9.700.100,00
8	Perencanaan Pengecatan SDN Hilir Pasar Kec. Lampihong	13.817.613,00
9	Perencanaan Pembangunan Halaman SDN Pimping Kec. Lampihong	14.000.000,00
Jumlah		**190.475.388,00**

c. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang pada golongan barang lain terdapat sebesar Rp5.867.157.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 248 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang pada golongan barang lain Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dari Gedung dan Bangunan	1.996.315.422,00
2	Reklasifikasi Bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.870.841.626,00
Jumlah		**5.867.157.048,00**

1) Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.996.315.422,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 31**;
2) Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang dari Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.870.841.626,00 dengan rincian pada **Lampiran 32**.

d. Penambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp199.444.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Perencanaan Karya Bakti TNI Jalan Desa Marajai - Mauya dengan nilai perolehan sebesar Rp99.722.400,00; dan
2) Perencanaan Karya Bakti TNI Karya Bakti TNI Jalan Desa Gunung Manau - Juuh dengan nilai perolehan sebesar Rp99.722.400,00.

e. Penambahan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp68.529.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 249 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Selasar Membran Perahu dan Parkiran Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.213.550,00
2	Perencanaan Pembangunan Papan Nama RTH Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.874.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Kebun Raya Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.874.000,00
4	Perencanaan Rehab Gedung Laboratorium Bidang Pengendalian Pencemaran	14.754.930,00
5	Petrencanaan Rehab Parkir Laboratorium UPT Laboratorium	9.813.321,00
Jumlah		**68.529.801,00**

f. Penambahan pada Dinas Perhubungan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi Dalam Pengerjaan serta berkurang pada Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Halte Kab. Balangan TA. 2025 dengan nilai perolehan sebesar Rp98.645.589,00.

g. Penambahan pada Sekretaris DPRD berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi Dalam Pengerjaan serta berkurang pada Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Review Gudang Arsip dengan nilai perolehan sebesar Rp46.209.510,00.

2. Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sebesar Rp15.017.280.242,00 sebagai berikut:

Tabel 250 Rekapitulasi Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang ke Golongan Barang Lain Tahun 2025

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Berkurang ke Golongan Barang Lain	14.946.797.492,00
2	Koreksi Berkurang	70.482.750,00
Jumlah		15.017.280.242,00

a. Reklasifikasi berkurang ke golongan barang lain sebesar Rp14.946.797.492,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 251 Rekapitulasi Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Reklasifikasi Berkurang dari Golongan Barang Lain Tahun 2025

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	585.192.481,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.824.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.508.293.611,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.270.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	298.878.600,00
6	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	277.351.800,00
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	189.987.000,00
Jumlah		14.946.797.492,00

1) Pengurangan pada Dinas Kesehatan berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp585.192.481,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 252 Rekapitulasi pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan reklasifikasi bertambah ke Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Perencanaan Penambah Ruang Pkm Uren	49.480.000,00
2	Perencanaan Rehab Poskesdes Mantuyan	9.817.950,00
3	Perencanaan Rehab Poskesdes Mamantang	9.817.950,00
4	Poskesdes Mamantang	41.291.861,00
5	Perencanaan Puskesmas Halong	98.300.000,00
6	Poskesdes Mantuyan	87.754.007,00
7	Puskesmas Batumandi	288.730.713,00
Jumlah		**585.192.481,00**

2) Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah pada Golongan Lain sebesar Rp19.824.000,00 terdiri dari:

Tabel 253 Rekapitulasi pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan reklasifikasi bertambah ke Golongan Lain Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Berkurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Gedung dan Bangunan	17.448.000,00
2	Reklasifikasi Berkurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Lain-Lain	2.376.000,00
Jumlah		**19.824.000,00**

a) Reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.448.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Rehabilitasi WC (Toilet) PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Paringin Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp10.295.000,00; dan
2. Pengawasan Rehabilitasi WC (Toilet) PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Paringin Selatan dengan nilai perolehan sebesar Rp7.153.000,00.

b) Reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain Lain Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboraturium SMPN 4 Halong sebesar Rp2.376.000,00

3) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.508.293.611,00, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 33.**

4) Pengurangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain Lain Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp67.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 254 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain Lain Konstruksi dalam pengerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Matang Lurus RT. 2 Kec. Lampihong	17.070.000,00
2	Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Muara Ninian Kec. Juai	15.890.000,00
3	Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Tanah Habang Kanan RT.2 Kec. Lampihong	17.110.000,00
4	Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Tanah Habang kanan RT.1 Kec. Lampihong	17.200.000,00
Jumlah		**67.270.000,00**

5) Pengurangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp298.878.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 255 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan Karya Bakti Tni Jalan Desa Binuang Santang - Ajung Kec.Halong	99.794.550,00
2	Konsultan Perencnaan Lanjutan Pimping Kec.Lampihong	99.278.400,00
3	Perencanaan Jalan Desa Mayanau-Mantuyan Kec.Halong	99.805.650,00
Jumlah		**298.878.600,00**

6) Pengurangan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp277.351.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 256 Rekapitulasi Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyusunan DED Gedung Penggelola, lab, perpustakaan, herbarium dan bank Biji	58.720.200,00
2	Penyusunan DED Lawn dan Bidding Plan	39.029.100,00
3	Penyusunan DED restoran dan garden shop	48.545.200,00
4	Penyusunan DED Rumah Kaca Anggrek dan Guest House	43.814.100,00
5	Penyusunan DED Jalan Utama dan Pematangan	48.379.100,00
6	Penyusunan DED Jalan Tapak	38.864.100,00
Jumlah		**277.351.800,00**

7) Pengurangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja berdasarkan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan bertambah ke Aset Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp189.987.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

   1) Perencanaan Pembangunan Dapur dan ruang makan dengan nilai perolehan sebesar Rp95.000.000,00; dan

   2) Rigit Beton dengan nilai perolehan sebesar Rp94.987.000,00.

b. Koreksi berkurang sebesar Rp 70.482.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

1) Prc Pembangunan Lab Bahasa Disnakertrans sebesar Rp6.000.000,00;

2) Prc Pembangunan Pusat Perbangkan sebesar Rp21.494.250,00;

3) Prc Pembangunan Puja Sera Belakang Pasar Adaro Tahap IV sebesar Rp21.494.250,00; dan

4) Prc Peningkatan Tugu Perjuangan dan kawasan Dpmptsp Kab Balangan sebesar Rp21.494.250,00.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	(2.558.822.435.898,00)	**(2.423.329.601.218,00)**

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.558.822.435.898,00 dan sebesar Rp2.423.329.601.218,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 257 Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**(2.423.329.601.218,00)**
	Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	
	-/- Beban Penyusutan 2025	(392.655.800.702,00)
	-/- Koreksi Bertambah	(1.380.508.740.819,00)
	-/- Reklasifikasi Bertambah Peralatan dan Mesin	(169.912.736,00)
1	**Jumlah Penambahan**	**(1.773.334.454.257,00)**
	Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	
	Koreksi Berkurang	1.630.002.953.631,00
	+/+ Reklasifikasi Berkurang Peralatan dan Mesin	6.519.924.363,00
	+/+ Reklasifikasi Berkurang Gedung dan Bangunan	991.842.386,00
	+/+ Reklasifikasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.899.197,00
2	**Jumlah Pengurangan**	**1.637.841.619.577,00**
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**(2.558.822.435.898,00)**

1. **Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.773.334.454.257,00 dengan rincian sebagai berikut:**

   a. Beban Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp392.655.800.702,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 258 Rekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2025 per Golongan Barang

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Beban Penyusutan 2025:	
• Peralatan dan Mesin	(133.041.894.929,00)
• Gedung dan Bangunan	(63.715.722.238,00)
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	(195.815.684.059,00)
• Aset Tetap Lainnya	(82.499.476,00)
Jumlah Penambahan Beban Penyusutan 2025	**(392.655.800.702,00)**

Penambahan Beban Penyusutan 2025 sebesar Rp392.667.392.108,00 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 259 Rekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2025 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.792.642,00	450.723.194,00	-	-	1.395.515.836,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	512.285.407,00	269.987.602,00	86.664,00	-	782.359.673,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.674.778.304,00	156.083.326,00	3.985.726.448,00	-	5.816.588.078,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.415.565.564,00	1.834.055.260,00	73.520.661,00	-	5.323.141.485,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.018.205.211,00	478.412.715,00	11.681.732,00	-	1.508.299.658,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	724.359.241,00	895.468.651,00	41.025.523,00	4.308.366,00	1.665.161.781,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	937.212.305,00	272.242.239,00	11.302.148,00	-	1.220.756.692,00
8	Dinas Kesehatan	42.784.753.800,00	6.388.434.630,00	2.178.946.578,00	-	51.352.135.008,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.215.857.503,00	2.567.563.993,00	427.488.710,00	-	5.210.910.206,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.051.624.981,00	436.527.631,00	53.966.738,00	-	1.542.119.350,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	1.065.167.980,00	1.519.634.596,00	172.176.833,00	-	2.756.979.409,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.380.321.735,00	13.845.477.101,00	179.940.264.657,00	-	198.166.063.493,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.111.385.966,00	311.607.280,00	7.304.159.072,00	-	8.727.152.318,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.535.581.918,00	-	-	-	1.535.581.918,00

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.371.479.508,00	18.856.523.066,00	334.551.637,00	599.976,00	41.563.154.187,00
16	Dinas Perhubungan	14.791.759.280,00	403.779.444,00	15.768.445,00	-	15.211.307.169,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	763.964.546,00	2.601.707.545,00	10.872.216,00	-	3.376.544.307,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	782.755.436,00	415.752.928,00	27.573.696,00	-	1.226.082.060,00
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.267.330.182,00	920.386.115,00	358.552.704,00	-	5.546.269.001,00
20	Dinas Satpol Pamong Praja	737.947.663,00	86.937.195,00	159.700,00	-	825.044.558,00
21	Dinas Sosial	712.950.248,00	149.983.083,00	6.464.748,00	-	869.398.079,00
22	Inspektorat	1.120.100.149,00	467.648.888,00	26.237.795,00	-	1.613.986.832,00
23	Kecamatan Awayan	408.631.570,00	255.735.331,00	-	-	664.366.901,00
24	Kecamatan Batumandi	469.701.745,00	375.544.525,00	745.800,00	-	845.992.070,00
25	Kecamatan Halong	464.085.517,00	250.250.832,00	301.596,00	-	714.637.945,00
26	Kecamatan Juai	454.558.300,00	337.496.884,00	150.000,00	-	792.205.184,00
27	Kecamatan Lampihong	445.003.429,00	442.685.254,00	243.375,00	-	887.932.058,00
28	Kecamatan Paringin	1.133.509.759,00	584.713.165,00	359.875.378,00	989.994,00	2.079.088.296,00
29	Kecamatan Paringin Selatan	684.987.604,00	225.809.543,00	290.460.513,00	-	1.201.257.660,00
30	Kecamatan Tebing Tinggi	573.845.403,00	335.523.905,00	521.834,00	-	909.891.142,00
31	Sekretariat Daerah	15.235.365.976,00	6.593.145.879,00	122.414.919,00	76.601.140,00	22.027.527.914,00
32	Sekretariat DPRD	4.252.026.057,00	985.880.438,00	60.443.939,00	-	5.298.350.434,00
Jumlah		**133.041.894.929,00**	**63.715.722.238,00**	**195.815.684.059,00**	**82.499.476,00**	**392.655.800.702,00**

b. Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp1.380.508.740.819,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 260 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 per Golongan Barang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(191.591.081.568,00)
2	Gedung dan Bangunan	(322.349.095.071,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(866.359.469.276,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(209.094.904,00)
Jumlah		**(1.380.508.740.819,00)**

Penambahan Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp1.380.508.740.819,00 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 261 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan Barang per SKPD

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.375.427.173,00	2.593.159.355,00	-	-	4.968.586.528,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.070.256.011,00	23.166.418,00	873.862,00	-	1.094.296.291,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.814.346.045,00	687.848.628,00	21.093.589.498,00	-	25.595.784.171,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6.934.088.528,00	5.218.587.020,00	151.852.797,00	-	12.304.528.345,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.017.614.884,00	4.754.763.404,00	115.707.471,00	-	6.888.085.759,00

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.278.593.714,00	4.613.472.569,00	136.906.560,00	19.191.634,00	6.048.164.477,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.518.672.569,00	4.051.254.534,00	24.482.284,00	-	5.594.409.387,00
8	Dinas Kesehatan	56.520.257.821,00	44.966.306.993,00	4.624.065.163,00	-	106.110.629.977,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.284.648.257,00	14.447.963.577,00	2.816.158.531,00	-	21.548.770.365,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.505.093.622,00	2.824.728.835,00	235.420.616,00	-	5.565.243.073,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	1.394.307.224,00	10.667.151.910,00	940.632.677,00	-	13.002.091.811,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.637.953.751,00	30.811.301.618,00	829.071.455.230,00	-	868.520.710.599,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.299.434.640,00	1.464.448.906,00	294.897.664,00	-	4.058.781.210,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.748.085.645,00	2.271.462.886,00	6.988.375,00	-	5.026.536.906,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.300.632.669,00	73.976.584.833,00	2.341.693.985,00	17.549.813,00	103.636.461.300,00
16	Dinas Perhubungan	9.468.364.853,00	1.579.814.020,00	110.691.216,00	-	11.158.870.089,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.431.976.647,00	23.671.945.474,00	906.018,00	-	25.104.828.139,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.677.860.850,00	1.681.077.823,00	122.075.749,00	-	3.481.014.422,00
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10.304.833.050,00	3.544.333.448,00	1.750.892.400,00	-	15.600.058.898,00
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.819.676.476,00	939.577.001,00	-	-	2.759.253.477,00
21	Dinas Sosial	1.586.121.848,00	1.254.391.215,00	40.387.441,00	-	2.880.900.504,00
22	Inspektorat Kabupaten	1.464.549.963,00	3.318.647.417,00	25.360.316,00	-	4.808.557.696,00
23	Kecamatan Awayan	583.527.256,00	1.552.724.863,00	-	-	2.136.252.119,00
24	Kecamatan Batumandi	633.006.979,00	2.640.255.005,00	3.045.350,00	-	3.276.307.334,00
25	Kecamatan Halong	861.103.447,00	1.516.571.687,00	1.533.113,00	-	2.379.208.247,00
26	Kecamatan Juai	659.601.515,00	2.145.112.646,00	1.212.500,00	-	2.805.926.661,00
27	Kecamatan Lampihong	665.874.245,00	1.948.800.467,00	-	-	2.614.674.712,00
28	Kecamatan Paringin	1.509.982.122,00	1.895.849.926,00	1.054.949.955,00	3.134.981,00	4.463.916.984,00
29	Kecamatan Paringin Selatan	978.891.821,00	1.864.510.436,00	856.793.775,00	-	3.700.196.032,00
30	Kecamatan Tebing Tinggi	956.279.529,00	770.170.863,00	885.360,00	-	1.727.335.752,00
31	Sekretariat Daerah	26.912.187.878,00	55.674.285.287,00	391.409.884,00	169.218.476,00	83.147.101.525,00
32	Sekretariat DPRD	5.377.830.536,00	12.978.826.007,00	144.601.486,00	-	18.501.258.029,00
Jumlah		**191.591.081.568,00**	**322.349.095.071,00**	**866.359.469.276,00**	**209.094.904,00**	**1.380.508.740.819,00**

c. Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp169.912.736,00 merupakan penambahan Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp169.400.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp512.736,00

disebabkan aset peralatan mesin dari aset lain-lain dengan kondisi sebelumnya rusak berat berubah kondisi menjadi baik dan dapat dipergunakan.

2. **Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp1.637.841.619.577,00 dengan rincian sebagai berikut:**

   a. Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp1.630.002.953.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 262 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 per Golongan Barang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	288.184.439.459,00
2	Gedung dan Bangunan	355.596.764.690,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	985.946.385.983,00
4	Aset Tetap Lainnya	275.363.499,00
Jumlah		**1.630.002.953.631,00**

Penambahan Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp1.630.002.953.631,00 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 263 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.006.296.897,00	2.724.643.940,00	-	-	5.730.940.837,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.420.539.991,00	25.272.500,00	953.326,00	-	1.446.765.817,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.747.222.625,00	770.600.600,00	24.712.966.370,00	-	29.230.789.595,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.670.837.128,00	5.607.404.314,00	210.098.434,00	-	14.488.339.876,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.808.362.174,00	5.030.626.306,00	125.831.180,00	-	7.964.819.660,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.768.440.568,00	5.046.279.524,00	171.974.648,00	23.500.000,00	7.010.194.740,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.246.001.292,00	4.099.574.042,00	34.831.216,00	-	6.380.406.550,00
8	Dinas Kesehatan	91.593.962.809,00	48.373.460.979,00	6.438.862.336,00	-	146.406.286.124,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.888.956.907,00	15.940.670.310,00	3.111.706.202,00	-	24.941.333.419,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.167.896.095,00	3.141.086.727,00	279.270.972,00	-	6.588.253.794,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	2.130.045.767,00	11.289.551.468,00	1.090.667.291,00	-	14.510.264.526,00

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.828.610.189,00	41.961.019.386,00	938.047.396.773,00	-	991.837.026.348,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.127.068.357,00	1.734.740.188,00	3.538.771.985,00	-	8.400.580.530,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.044.560.161,00	2.278.141.152,00	7.682.896,00	-	6.330.384.209,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.977.942.538,00	83.741.227.858,00	2.636.820.475,00	18.099.818,00	131.374.090.689,00
16	Dinas Perhubungan	19.651.329.678,00	1.873.530.078,00	120.447.498,00	-	21.645.307.254,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.954.973.431,00	25.113.712.626,00	10.872.218,00	-	27.079.558.275,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.217.653.250,00	1.902.358.431,00	139.445.031,00	-	4.259.456.712,00
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13.344.340.913,00	4.093.725.463,00	2.067.226.878,00	-	19.505.293.254,00
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	2.295.127.285,00	949.069.059,00	-	-	3.244.196.344,00
21	Dinas Sosial	2.112.341.043,00	1.269.124.756,00	46.313.604,00	-	3.427.779.403,00
22	Inspektorat Kabupaten	2.041.999.719,00	3.400.133.137,00	27.871.100,00	-	5.470.003.956,00
23	Kecamatan Awayan	917.537.522,00	1.634.495.825,00	-	-	2.552.033.347,00
24	Kecamatan Batumandi	1.000.214.266,00	2.920.565.147,00	3.729.000,00	-	3.924.508.413,00
25	Kecamatan Halong	1.241.695.158,00	1.521.855.467,00	1.809.600,00	-	2.765.360.225,00
26	Kecamatan Juai	1.017.355.062,00	2.146.645.739,00	1.350.000,00	-	3.165.350.801,00
27	Kecamatan Lampihong	1.013.104.754,00	2.083.581.771,00	-	-	3.096.686.525,00
28	Kecamatan Paringin	2.055.215.010,00	2.113.422.604,00	1.383.260.619,00	3.960.000,00	5.555.858.233,00
29	Kecamatan Paringin Selatan	1.336.882.337,00	1.947.853.204,00	1.100.475.826,00	-	4.385.211.367,00
30	Kecamatan Tebing Tinggi	1.372.019.689,00	777.958.085,00	1.000.000,00	-	2.150.977.774,00
31	Sekretariat Daerah	35.554.138.942,00	56.549.532.783,00	435.408.018,00	229.803.681,00	92.768.883.424,00
32	Sekretariat DPRD	8.631.767.902,00	13.534.901.221,00	199.342.487,00	-	22.366.011.610,00
Jumlah		**288.184.439.459,00**	**355.596.764.690,00**	**985.946.385.983,00**	**275.363.499,00**	**1.630.002.953.631,00**

b. Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp7.838.665.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 264 Rekapitulasi Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 per Golongan Barang

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	6.519.924.363,00
2	Gedung dan Bangunan	991.842.386,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.899.197,00
Jumlah		**7.838.665.946,00**

Penambahan Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp7.838.665.946,00 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265 Rekapitulasi Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.060.034.983,00	-	-	1.060.034.983,00
2	Dinas Kesehatan	4.249.994,00	976.386.109,00	-	980.636.103,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	178.258.246,00	-	-	178.258.246,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	129.999.996,00	-	-	129.999.996,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	-	-	326.899.197,00	326.899.197,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	555.489.111,00	10.372.964,00	-	565.862.075,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	243.401.032,00	-	-	243.401.032,00
8	Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil	235.000.000,00	-	-	235.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	899.108.264,00	5.083.313,00	-	904.191.577,00
10	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	124.810.000,00	-	-	124.810.000,00
11	Inspektorat Kabupaten	534.266.809,00	-	-	534.266.809,00
12	Kecamatan Awayan	199.799.890,00	-	-	199.799.890,00
13	Kecamatan Paringin	144.999.995,00	-	-	144.999.995,00
14	Sekretariat Daerah	315.690.984,00	-	-	315.690.984,00
15	Sekretariat DPRD	1.894.815.059,00	-	-	1.894.815.059,00
Jumlah		**6.519.924.363,00**	**991.842.386,00**	**326.899.197,00**	**7.838.665.946,00**

3. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.558.822.435.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 merupakan hasil perhitungan dari Penambahan dan Pengurangan transaksi tahun berjalan terhadap Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 pergolongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 266 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per Golongan

No	Aset Tetap	Nilai Rp
1	Peralatan dan Mesin	(571.400.092.913,00)
2	Gedung dan Bangunan	(566.243.605.776,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.420.684.549.079,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(494.188.130,00)
Jumlah		**(2.558.822.435.898,00)**

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.558.822.435.898,00 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 267 Rekapitulasi Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)				
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.699.889.246,00	3.043.882.549,00	-	-	7.743.771.795,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.040.796.493,00	1.010.341.109,00	26.729.526,00	-	3.077.867.128,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.971.465.666,00	674.676.981,00	25.079.315.946,00	-	35.725.458.593,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19.132.172.088,00	25.037.164.668,00	653.234.433,00	-	44.822.571.189,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.646.856.478,00	5.693.987.089,00	129.939.203,00	-	11.470.782.770,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.671.562.487,00	6.548.214.612,00	209.870.239,00	50.227.000,00	10.479.874.338,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.682.472.529,00	2.698.501.456,00	35.959.432,00	-	7.416.933.417,00
8	Dinas Kesehatan	199.921.707.493,00	62.676.770.707,00	10.240.129.684,00	-	272.838.607.884,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10.061.167.815,00	24.413.989.642,00	6.639.923.238,00	-	41.115.080.695,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.419.462.737,00	2.262.258.954,00	684.448.804,00	-	8.366.170.495,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	9.342.171.300,00	12.691.015.533,00	1.201.920.298,00	-	23.235.107.131,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.682.200.303,00	51.659.149.015,00	1.351.653.364.518,00	-	1.425.994.713.836,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.880.367.865,00	2.240.039.922,00	7.599.056.736,00	-	16.719.464.523,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.958.715.641,00	-	-	-	5.958.715.641,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.628.838.618,00	187.400.859.064,00	3.513.862.870,00	141.428.539,00	283.684.989.091,00
16	Dinas Perhubungan	30.136.058.657,00	3.122.642.151,00	567.566.786,00	-	33.826.267.594,00

No	SKPD	Nilai (Rp)				
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.520.309.885,00	29.581.999.498,00	430.975.334,00	-	34.533.284.717,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.421.884.847,00	3.431.680.229,00	1.031.902.064,00	6.000.000,00	8.891.467.140,00
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	23.927.576.176,00	6.657.050.167,00	2.541.863.926,00	-	33.126.490.269,00
20	Dinas Satpol Pamong Praja	4.964.474.970,00	1.474.476.116,00	25.079.500,00	-	6.464.030.586,00
21	Dinas Sosial	3.149.699.794,00	1.606.329.625,00	46.852.189,00	-	4.802.881.608,00
22	Inspektorat	4.614.287.926,00	6.723.627.245,00	263.313.071,00	-	11.601.228.242,00
23	Kecamatan Awayan	1.555.656.936,00	2.551.800.148,00	-	-	4.107.457.084,00
24	Kecamatan Batumandi	2.127.207.134,00	2.998.434.057,00	3.791.150,00	-	5.129.432.341,00
25	Kecamatan Halong	2.384.371.587,00	2.936.475.679,00	1.834.709,00	-	5.322.681.975,00
26	Kecamatan Juai	1.976.075.706,00	3.005.491.268,00	1.362.500,00	-	4.982.929.474,00
27	Kecamatan Lampihong	2.080.608.970,00	3.665.893.175,00	3.407.250,00	-	5.749.909.395,00
28	Kecamatan Paringin	3.656.864.402,00	7.227.381.192,00	1.661.069.333,00	4.124.975,00	12.549.439.902,00
29	Kecamatan Paringin Selatan	2.657.563.838,00	2.843.355.004,00	1.153.494.693,00	-	6.654.413.535,00
30	Kecamatan Tebing Tinggi	2.655.442.632,00	1.898.657.263,00	5.670.088,00	-	4.559.769.983,00
31	Sekretariat Daerah	60.452.984.282,00	89.425.663.749,00	4.520.254.634,00	265.707.616,00	154.664.610.281,00
32	Sekretariat DPRD	13.379.178.412,00	9.041.797.909,00	758.356.925,00	26.700.000,00	23.206.033.246,00
Jumlah		**571.400.092.913,00**	**566.243.605.776,00**	**1.420.684.549.079,00**	**494.188.130,00**	**2.558.822.435.898,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4. Aset Lainnya	**47.577.836.108,94**	**414.945.491.871,52**

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.577.836.108,94 dan Rp414.945.491.871,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 268 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	538.784.181,00	538.784.181,00
2	Aset Tidak Berwujud	7.740.866.899,00	6.670.167.200,00
3	Aset Lain-Lain	105.193.479.615,42	102.555.885.116,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.315.444.731,00)	(4.088.865.460,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(61.694.019.855,48)	(62.034.826.165,48)
6	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	-	371.190.177.000,00
7	Properti Investasi	114.170.000,00	114.170.000,00
Saldo Akhir		**47.577.836.108,94**	**414.945.491.871,52**

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	538.784.181,00	**538.784.181,00**

Jumlah saldo Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp538.784.181,00.

Tabel 269 Daftar Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	Pihak yang Bertanggungjawab / yang Berkewajiban Mengembalikan	Nilai TGR Per 31 Desember 2024	Nilai Pengembalian Selama Tahun 2025	Koreksi atau Penghapusan	Saldo Piutang TGR Per 31 Desember 2025
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SKTJM hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011	Abdul Hakim, S. Sos	19.150.000,00	-	-	19.150.000,00
2	Penyimpangan dana hibah dari Pemkab Balangan kepada KONI sesuai LHP BPKP Perwakilan kalimantan Selatan tahun 2021	Samsul Fadli,S.Pd	3.792.500,00	-	-	3.792.500,00
		Drs. Syarifudin	7.585.000,00	-	-	7.585.000,00
		H. Duas	508.256.681,00	-	-	508.256.681,00
Jumah			**538.784.181,00**	**-**	**-**	**538.784.181,00**

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	7.740.866.899,00	**6.670.167.200,00**

Aset Tidak Berwujud (ATB) merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.740.866.899,00 dan Rp6.670.167.200,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 270 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**6.670.167.200,00**
Mutasi Bertambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	
+/+ Pengadaan Belanja Modal	1.070.699.699,67
Jumlah Mutasi Bertambah	**1.070.699.699,67**
Mutasi Berkurang Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	
Jumlah Mutasi Berkurang	**-**
-/- Koreksi Berkurang	**(0,67)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**7.740.866.899,00**

1. **Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp1.070.699.699,67 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel 271 Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud bersumber dari Pengadaan Belanja Modal Tahun 2025

No	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Software (Software Aset)	98.845.500,00
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Software (Software (Perbend)	94.685.903,00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sofware (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud)	99.511.500,00
4.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Software (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software (Belanja Penambahan Buku Bacaan E-Book Balangan Membaca) Th.2025)	188.811.000,00
5.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Software (Belanja ModaL Aset Tidak Berwujud - Software (Belanja Paket Perpustakaan Digital Offline/Perpustakaan Keliling) Th.2025)	188.700.000,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	(Pengadaan Nomor : 24.04.13.01.2025.000079)	98.457.000,00
7.	Sekretariat DPRD	sofware (Sofware Berupa pembuatan Aplikasi)	47.730.000,00
8.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja	Microsoft Office Profesional Plus (Aplikasi BLK)	26.223.750,00
9	Sekretariat Daerah	Aplikasi (Software) Penjadwalan Protokoler (Pengadaan Nomor : 24.04.04.01.2026.000021)	49.228.496,67
10.	Sekretariat Daerah	Langganan Capcus Pro 1 Tahun (Pengadaan Nomor : 24.04.04.01.2026.000024)	1.500.000,00
11.	Sekretariat Daerah	Langganan Paket Google Drive 1 Tahun (Pengadaan Nomor : 24.04.04.01.2026.000025)	2.000.000,00
12.	Sekretariat Daerah	Langganan Canva Pro 1 Tahun (Pengadaan Nomor : 24.04.04.01.2026.000023)	1.500.000,00
13.	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	Aplikasi Kertas Kerja PPK (Pendagaan Aplikasi Kertas Kerja PPK Bidang Pengelolaan Persampahan)	49.006.500,00
14.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi Investasi Berbasis Digital (Pengadaan Nomor : 24.04.13.03.2026.000001)	74.600.000,00
15.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Belanja Pembuatan Aplikasi Untuk PAUD dan PNF (Pengadaan Nomor : 24.04.08.01.2026.000505)	49.900.050,00
Jumlah			**1.070.699.699,67**

2. **Pengurangan Saldo Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat Daerah tahun 2025 berdasarkan koreksi berkurang yang disebabkan terdapatnya akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah sebesar Rp0,67.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.3 Aset Lain-lain	**105.193.479.615,42**	**102.555.885.116,00**

Merupakan pos yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp105.193.479.615,42 dan Rp102.555.885.116,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 272 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 Rp
	Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**102.555.885.116,00**
	Penambahan Aset Lain-lain Tahun 2025	
	Reklasifikasi Bertambah	
	+/+ Tanah	906.600.000,00
	+/+ Peralatan dan Mesin	7.254.161.865,00
	+/+ Gedung dan Bangunan	4.488.286.413,42
	+/+ Jalan, Irigasi dan Jaringan	466.224.200,00
	+/+ Konstruksi dalam pengerjaan	536.984.800,00
	+/+ Barang Expired dan Rusak	577.134.369,00
1	**Jumlah Penambahan**	**14.229.391.647,42**
	Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2025	
	Reklasifikasi Berkurang	
	-/- Peralatan dan Mesin	(171.963.680,00)
	Penghapusan	
	-/- Tanah	(923.220.000,00)
	-/- Peralatan dan Mesin	(6.901.640.938,00)
	-/- Gedung dan Bangunan	(2.790.897.130,00)
	-/- Jalan, Irigasi dan Jaringan	(466.224.200,00)
	-/- Aset Tetap Lainnya	(337.851.200,00)
2	**Jumlah Pengurangan**	**(11.591.797.148,00)**
Saldo Akhir per 31 Desember 2025		**105.193.479.615,42**

1. **Penambahan Nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp14.229.391.647,42 pada tahun 2025 disebabkan dengan rincian sebagai berikut:**
   a. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman saldo Aset Lain-lain Reklasifikasi bertambah dari aset tetap tanah sebesar Rp906.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
      1) Jalan Tawahan - Ulin Pasak (S.2) dengan nilai perolehan sebesar Rp306.000.000,00; dan
      2) Jalan Tawahan - Tundakan Hulu (081) / S.2 dengan nilai perolehan sebesar Rp600.600.000,00.

b. Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.254.161.865,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 273 Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai(Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1.060.035.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	178.258.250,00
3	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	235.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	4.250.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	130.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	555.721.050,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	243.401.047,00
8	Dinas Perhubungan	1.456.007.200,00
9	Dinas Satpol Pp	124.810.000,00
10	Inspektorat	563.228.165,00
11	Kecamatan Awayan	200.350.000,00
12	Kecamatan Paringin	145.000.000,00
13	Sekretariat Daerah	315.691.000,00
14	Sekretariat Dprd	2.042.410.153,00
Jumlah		**7.254.161.865,00**

Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.254.161.865,00 karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dipergunakan Pemerintah Daerah pada tabel diatas diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

1) Penambahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.060.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 274 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	Mobil ketua DPRD	11666	420.750.000,00
2	Mobil	7452	238.410.000,00
3	Mobil	4638	214.000.000,00
4	Mobil Dinas	1402	186.875.000,00
Jumlah			**1.060.035.000,00**

2) Penambahan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp178.258.250,00 terdiri dari 1 unit mobil pick up dengan nilai perolehan sebesar

Rp161.535.000,00 dan 1 unit sepeda motor dengan nilai perolehan sebesar Rp16.723.250,00.

3) Penambahan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin terdiri dari 1 unit mobil dinas dengan nilai perolehan sebesar Rp235.000.000,00.

4) Penambahan pada Dinas Kesehatan berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin terdiri dari 1 unit sepeda motor dengan nilai perolehan sebesar Rp4.250.000,00.

5) Penambahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin terdiri dari 1 unit mobil dengan nilai perolehan sebesar Rp130.000.000,00.

6) Penambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp555.721.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 275 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	AC	50781	6.000.000,00
2	Air Conditioner	5406	3.100.000,00
3	AC 4 dari 7	72310	5.900.000,00
4	AC 5 dari 7	72311	5.900.000,00
5	AC 6 dari 7	72314	5.900.000,00
6	AC UNIT	35042	3.250.000,00
7	Air Conditioner	5336	5.000.000,00
8	Pendingin Ruangan AC	4695	3.500.000,00
9	Digitizer	5281	8.000.000,00
10	Mesin Tik	5449	3.500.000,00
11	Printer 5 dari 6	72360	5.964.500,00
12	Printer EPSON L3150	100018	3.965.000,00
13	Generator Set	5452	12.550.000,00
14	Laptop	44261	14.875.000,00
15	Mobil	9858	90.000.000,00
16	Kamera Handycam	5414	10.000.000,00
17	Proyektor	6772	14.800.000,00

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
18	Proyektor Dan Screen	50783	15.268.850,00
19	Proyektor Dan Screen	50789	15.268.850,00
20	Laptop	44273	14.875.000,00
21	Laptop	59805	7.885.000,00
22	Laptop	31967	10.000.000,00
23	Laptop	69118	10.704.000,00
24	Laptop	44266	14.875.000,00
25	Laptop	50206	9.350.000,00
26	Laptop	41320	15.000.000,00
27	Mobil operasional Dinas Suzuki Karimun	34815	117.310.000,00
28	Dispenser I	99988	1.265.000,00
29	Kursi Kerja Eselon II	87295	4.600.000,00
30	Kursi Eselon III	50010	1.842.225,00
31	Printer	39372	2.950.000,00
32	Printer	39368	2.950.000,00
33	Printer	6726	2.435.000,00
34	Faximile	5487	1.363.950,00
35	Printer	44356	3.500.000,00
36	Printer 2 dari 6	72357	5.964.500,00
37	Printer 6 dari 6	72361	5.964.500,00
38	Printer CANON / iP2770 #13	36747	1.009.750,00
39	Printer	44359	3.500.000,00
40	Sepeda Motor	4090	16.456.000,00
41	Printer	39369	2.950.000,00
42	Printer	69124	1.550.000,00
43	Kursi Eselon III	50007	1.842.225,00
44	Sepeda Motor	34917	18.778.000,00
45	Laptop ASUS	39606	9.933.450,00
46	Komputer PC All in One 6 dari 7	70859	16.645.500,00
47	Printer dot matrik	98114	2.500.000,00
48	Laptop	52912	14.979.750,00
Jumlah			**555,721,050.00**

7) Penambahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp243.401.047,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 276 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	AC Split	1034	1.295.000,00
2	AC Split	4145	4.415.400,00
3	Mesin Antrian	34876	49.250.000,00
4	Gorden	87268	2.600.000,00
5	Printer (Inkjet+Copy+Scan)	39375	7.000.000,00
6	Faks, Telpon dan Instalasinya	1527	2.581.818,00
7	Laptop	39376	11.450.000,00
8	Printer (Dot Matrik)	8448	2.500.000,00
9	Printer (Dot Matrik)	5398	3.000.000,00
10	Mesin Ketik Listrik Portable	40852	3.500.000,00

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
11	Mesin Absen (Time Recorder)	5244	3.300.000,00
12	UPS	8524	1.600.000,00
13	Printer (Laser+Copy+Scan)	35264	2.124.320,00
14	UPS	42075	6.889.977,00
15	UPS	5354	2.128.000,00
16	Printer	44899	1.781.250,00
17	UPS	44908	1.556.250,00
18	Printer (Inkjet+Copy+Scan)	35036	1.700.000,00
19	UPS	8520	1.600.000,00
20	UPS	8477	1.600.000,00
21	UPS	8515	1.600.000,00
22	UPS	35032	2.128.000,00
23	AC Split	1030	1.295.000,00
24	AC Split	4130	4.415.400,00
25	Box Mesin Antrian	39452	3.000.000,00
26	Telephone (PABX)	35024	10.500.000,00
27	Dispenser	1079	1.031.818,00
28	Laptop	5387	6.000.000,00
29	Laptop	5183	12.524.167,00
30	Laptop	5187	12.524.166,00
31	Laptop	49760	9.225.000,00
32	Laptop / Notebook	68642	9.000.000,00
33	Kendaraan Roda 2	4616	14.699.759,00
34	Papan Visuil/SOTK	4782	15.035.722,00
35	Kendaraan Roda 2	1613	13.550.000,00
36	Neon Box	49777	15.000.000,00
Jumlah			**243.401.047,00**

8) Penambahan pada Dinas Perhubungan berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.456.007.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 277 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	Mobil Angkutan Pelajar (Micro Bus) (RB)	2133	239.442.000,00
2	Mobil Angkutan Pelajar (Micro Bus) (RB)	2130	239.442.000,00
3	Mobil Angkutan Pelajar (Micro Bus) (RB)	5334958	224.000.000,00
4	Mobil Angkutan Pelajar (Micro Bus) (RB)	5334959	224.000.000,00
5	Mesin Diesel / Genset (RB)	2119	4.500.000,00
6	Palang Pintu Otomatis (RB)	112797	30.712.500,00
7	Palang Pintu Otomatis (RB)	112798	30.712.500,00
8	Palang Pintu Otomatis (RB)	112799	30.712.500,00
9	Palang Pintu Otomatis (RB)	112800	30.712.500,00
10	Palang Pintu Otomatis (RB)	112801	36.855.000,00
11	Palang Pintu Otomatis (RB)	112802	36.855.000,00
12	Palang Pintu Otomatis (RB)	112803	36.855.000,00
13	Palang Pintu Otomatis (RB)	112804	36.855.000,00
14	Kulkas Showcase (RB)	98885	4.000.000,00
15	Tangga (RB)	100199	4.520.000,00

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
16	Air Conditioner/ AC (RB)	44638	3.500.000,00
17	Sound Sistem Mobil (RB)	2575	5.450.000,00
18	Kursi Kerja Staf (RB)	88577	2.000.000,00
19	Kursi Kerja Staf (RB)	88579	2.000.000,00
20	Kursi Kerja Staf (RB)	88578	2.000.000,00
21	Kursi Kerja Staf (RB)	88576	2.000.000,00
22	Komputer All in One (RB)	44630	7.500.000,00
23	Komputer PC (RB)	2587	7.820.000,00
24	Notebook/LAPTOP (Pink) (RB)	2590	9.430.000,00
25	Laptop (RB)	32053	8.725.000,00
26	Laptop (RB)	32054	8.725.000,00
27	Laptop (RB)	50162	9.490.000,00
28	Laptop (RB)	50164	9.490.000,00
29	Laptop (RB)	50166	9.490.000,00
30	NoteBook/Laptop (RB)	87796	9.550.000,00
31	Komputer Tablet (TAB) (RB)	88286	4.369.100,00
32	Komputer Tablet (TAB) (RB)	88285	4.369.100,00
33	Monitor LED (RB)	34373	2.000.000,00
34	Printer Dot Matrik (RB)	2804	2.200.000,00
35	Printer Multifungsi (RB)	87807	3.500.000,00
36	Filling Cabinet	89797	2.500.000,00
37	Filling Cabinet (RB)	89798	2.500.000,00
38	AC (RB)	68660	4.000.000,00
39	AC (RB)	50129	4.000.000,00
40	Monitor LED (RB)	68740	1.700.000,00
41	Monitor LED (RB)	68739	1.700.000,00
42	Printer (Peralatan Personal Komputer) (RB)	934904	1.960.000,00
43	Mobil Operasional PJU (RB)	3370	89.000.000,00
44	Sepeda Motor Operasional (RB)	2517	15.015.000,00
45	Meja Kerja Kepala Dinas (RB)	68757	6.550.000,00
46	Printer	87803	3.300.000,00
Jumlah			**1.456.007.200,00**

9) Penambahan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 278 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	24930	11.515.000,00
2	Sepeda Motor	24852	15.750.000,00
3	Sepeda Motor	24857	15.750.000,00
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	25190	11.515.000,00
5	Sepeda Motor	24874	15.750.000,00
6	Sepeda Motor	24764	15.750.000,00
7	Kendaraan Dinas Roda Dua	25203	11.515.000,00
8	Kendaraan Dinas Roda Dua	25342	11.515.000,00
9	Sepeda Motor	24799	15.750.000,00
Jumlah			**124.810.000,00**

10) Penambahan pada Inspektorat Kabupaten berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin

sebesar Rp563.228.165,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 34**.

11) Penambahan pada Kecamatan Awayan berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp200.350.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 279 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Awayan

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	Sepeda Motor Smash Biru	663	6.500.000,00
2	Sepeda Motor	2417	11.500.000,00
3	Sepeda Motor Viar	35291	22.000.000,00
4	Menara Tempat Tong Air	39748	2.000.000,00
5	Brankas	4019	4.750.000,00
6	Meja Rapat	45099	1.000.000,00
7	Meja Rapat	45100	1.000.000,00
8	Meja Rapat	45111	1.000.000,00
9	Sofa	3642	5.000.000,00
10	Mesin Cuci	2737	1.800.000,00
11	AC	2813	4.700.000,00
12	AC	12945	3.500.000,00
13	Tong Air	39745	2.000.000,00
14	Tong Air	39746	2.000.000,00
15	Televisi Samsung LED	35286	10.000.000,00
16	Televisi Panasonic	40881	10.000.000,00
17	Tangga Aluminium	4027	2.700.000,00
18	Meja Kerja Staf	101317	1.000.000,00
19	Meja Kerja Staf	101319	1.000.000,00
20	Meja Kerja Staf	101320	1.000.000,00
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	71624	1.700.000,00
22	UPS	14307	2.050.000,00
23	UPS	39761	3.000.000,00
24	UPS	50811	3.000.000,00
25	UPS	50812	3.000.000,00
26	Kamera	3666	9.950.000,00
27	LCD Proyektor	32154	10.000.000,00
28	Komputer PC	3726	4.000.000,00
29	Komputer PC	3737	4.000.000,00
30	Komputer PC	3739	4.000.000,00
31	Komputer PC	14310	5.000.000,00
32	Komputer PC	14773	4.500.000,00
33	Komputer PC	14774	4.500.000,00
34	Laptop	14299	9.900.000,00
35	Laptop	45023	14.700.000,00
36	CPU	3704	2.100.000,00
37	Printer	3125	3.000.000,00
38	Printer	3128	1.655.000,00
39	Printer	14308	1.500.000,00
40	Printer	14309	2.500.000,00
41	Printer	71598	2.000.000,00
42	Komputer Server Dell	894	9.845.000,00
Jumlah			**200.350.000,00**

12) Penambahan pada Kecamatan Paringin berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp145.000.000.00 terdiri dari 1 unit mobil Ambulance dengan nilai perolehan sebesar Rp45.000.000,00 dan 1 unit Mobil dengan nilai perolehan sebesar Rp100.000.000,00.

13) Penambahan pada Sekretariat Daerah berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp315.691.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 280 Rincian Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Register	Jumlah (Rp)
1	Mobil Micro Bus	11416	139.055.000,00
2	Mobil	268	90.000.000,00
3	Sepeda Motor	8038	16.456.000,00
4	Sepeda Motor	2450	14.250.000,00
5	Sepeda Motor	4779	16.440.000,00
6	Sepeda Motor	2353	11.500.000,00
7	Sepeda Motor	4722	16.440.000,00
8	Sepeda Motor	2622	11.550.000,00
Jumlah			**315.691.000,00**

14) Penambahan pada Sekretariat DPRD berdasarkan reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.042.410.153,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 35.**

c. Penambahan saldo Aset lain-lain dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.488.286.413,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 281 Rekapitulasi Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.978.773.980,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.489.512.433,42
3	Dinas Perhubungan	20.000.000,00
Jumlah		**4.488.286.413,42**

1) Penambahan pada Dinas Kesehatan berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.978.773.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Gedung A Rawat Jalan Puskesmas Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp334.089.000,00;

b) Gedung B (rawat Inap) Puskesmas Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp642.086.000,00; dan
c) Puskesmas Uren Kec Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp1.002.598.980,00.

2) Penambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.489.512.433,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 282 Rekapitulasi Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Nama Barang	Unit	Nomor Register	Jumlah (Rp)
1	Gedung Posyando Kelurahan Paringin Kota	1	5320599	224.158.325,30
2	Gedung Posyando Desa Gunung Riut Kec.Halong	1	5320602	224.083.043,80
3	Gedung Posyando Desa Maradap Kec.Paringin Selatan	1	5320677	224.059.525,00
4	Gedung Posyando Desa Kandang Jaya Kec.Lampihong	1	5321602	223.657.426,60
5	Gedung Posyando Desa Binju Kec.Halong	1	5321603	224.412.327,48
6	Gedung Posyando Desa Tanah Habang Kiri Kec.Lampihong	1	5321604	223.766.264,83
7	Gedung Posyando Tanah Habang Kanan Kec.Lampihong	1	5321605	223.741.969,40
8	Gedung Posyando Desa Teluk Karya Kec.Lampihong	1	5321606	223.821.002,00
9	Gedung Posyando Desa Pimping Kec.Lampihong	1	5321607	223.677.718,00
10	Gedung Posyando Desa Timbun Tulang Kec.Batumandi	1	5321608	223.539.395,41
11	Gedung Posyando Desa Lajar Kec.Lampihong	1	5321614	106.387.221,00
12	Gedung Posyando Desa Juuh Kec.Tebing Tinggi	1	5321737	144.208.214,60
Jumlah				**2.489.512.433,42**

3) Penambahan pada Dinas Perhubungan berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang dari aset Gedung dan Bangunan dengan nama Tempat Parkir Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00.

d. Penambahan saldo Aset lain-lain dari Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan berupa Permukiman Siring Jalan Kabupaten Desa Tawahan Kec. Juai / S.2 dengan nilai perolehan sebesar Rp466.224.200,00.

e. Penambahan saldo Aset lain-lain dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp536.984.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 283 Rekapitulasi Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.270.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja	189.987.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.376.000,00
4	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	277.351.800,00
Jumlah		**536.984.800,00**

1) Penambahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp67.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Matang Lurus RT. 2 Kec. Lampihong dengan nilai perolehan sebesar Rp17.070.000,00;
   b) Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Muara Ninian Kec. Juai dengan nilai perolehan sebesar Rp15.890.000,00;
   c) Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Tanah Habang Kanan RT.2 Kec. Lampihong dengan nilai perolehan sebesar Rp17.110.000,00; dan
   d) Siring Penahan Longsor Tebing Sungai Desa Tanah Habang kanan RT.1 Kec. Lampihong dengan nilai perolehan sebesar Rp17.200.000,00.
2) Penambahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp189.987.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Perencanaan Pembangunan Dapur dan ruang makan dengan nilai perolehan sebesar Rp95.000.000,00; dan
   b) Rigit Beton dengan nilai perolehan sebesar Rp94.987.000,00.
3) Penambahan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboraturium SMPN 4 Halong dengan nilai perolehan sebesar Rp2.376.000,00
4) Penambahan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp277.351.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 284 Rekapitulasi Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyusunan DED Gedung Penggelola, lab, perpustakaan, herbarium dan bank Biji	58.720.200,00
2	Penyusunan DED Lawn dan Bidding Plan	39.029.100,00
3	Penyusunan DED restoran dan garden shop	48.545.200,00
4	Penyusunan DED Rumah Kaca Anggrek dan Guest House	43.814.100,00
5	Penyusunan DED Jalan Utama dan Pematangan	48.379.100,00
6	Penyusunan DED Jalan Tapak	38.864.100,00
Jumlah		**277.351.800,00**

f. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena Barang Rusak dan Expired sebesar Rp577.134.369,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Barang persediaan yang rusak terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp293.810,00 yang terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp275.000,00 dan Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp18.810,00; dan
   b) Barang Persediaan yang Expired sebesar Rp576.840.559,00.

2. **Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan sebesar Rp11.591.797.148,00 pada tahun 2025 disebabkan hal-hal sebagai berikut:**
   a. Reklasifikasi Berkurang pada Aset Lain-lain ke Peralatan dan Mesin terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari micro bus dengan nilai perolehan sebesar Rp169.400.000,00:
   b. Reklasifikasi Berkurang pada Aset Lain-lain ke Peralatan dan Mesin terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian terdiri dari kursi kerja eselon II dengan nilai perolehan sebesar Rp2.563.680,00:
   c. Penghapusan Aset Lain-Lain disebabkan karena Aset Lain-Lain tersebut merupakan Objek Hibah, Pemusnahan, Penjualan langsung, bangunan telah di bongkar, dan tercatat ganda sebesar Rp11.419.833.468,00. Rekapitulasi penghapusan Aset Lain-Lain pada TA 2025 dikategorikan berdasarkan Golongan Barang Aset Lain-Lain yang dihapuskan dengan rincian dapat lihat pada **Lampiran 36**.

3. **Saldo Akhir Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan sebesar Rp105.193.479.615,42 pada tahun 2025 merupakan kumpulan Aset Lain-Lain yang ditampung untuk ditindak lanjuti pada tahun berikutnya dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 37.**

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(4.315.444.731,00)	**(4.088.865.460,00)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan akumulasi penyusutan dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.315.444.731,00 dan Rp4.088.865.460,00. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 38.**

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(61.694.019.855,48)	**(62.034.826.165,48)**

Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan nilai akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dimutasikan ke Aset Lain-lain, sehingga hal ini bukan merupakan penyusutan dari aset-aset yang berada dalam daftar Aset Lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp61.694.019.855,48 dan Rp62.034.826.165,48, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 285 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Saldo Awal Tahun 2025 (Saldo per 31 Desember 2024)	**(62.034.826.165,48)**
	Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025	
	Reklasifikasi Bertambah	
	-/- Peralatan dan Mesin	(6.519.924.363,00)
	-/- Gedung dan Bangunan	(991.842.386,00)
	-/- Jalan, Irigasi dan Jaringan	(326.899.197,00)
1	**Jumlah Penambahan**	**(7.838.665.946,00)**
	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025	
	Reklasifikasi Berkurang	
	+/+ Peralatan Mesin	169.912.736,00
	Penghapusan	8.009.559.520,00
2	**Jumlah Pengurangan**	**8.179.472.256,00**
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**(61.694.019.855,48)**

1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp7.838.665.946,00 pada tahun 2025 berasal dari reklasifikasi bertambah dari akumulasi penyusutan aset tetap golongan barang peralatan dan mesin, golongan barang Gedung dan Bangunan, dan golongan barang jalan, irigasi, dan jaringan yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 286 Rekapitulasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			Jumlah (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)	
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.060.034.983,00	-	-	1.060.034.983,00
2	Dinas Kesehatan	4.249.994,00	976.386.109,00	-	980.636.103,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	178.258.246,00	-	-	178.258.246,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	129.999.996,00	-	-	129.999.996,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	-	-	326.899.197,00	326.899.197,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	555.489.111,00	10.372.964,00	-	565.862.075,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	243.401.032,00	-	-	243.401.032,00
8	Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil	235.000.000,00	-	-	235.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	899.108.264,00	5.083.313,00	-	904.191.577,00
10	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	124.810.000,00	-	-	124.810.000,00
11	Inspektorat Kabupaten	534.266.809,00	-	-	534.266.809,00
12	Kecamatan Awayan	199.799.890,00	-	-	199.799.890,00
13	Kecamatan Paringin	144.999.995,00	-		144.999.995,00
14	Sekretariat Daerah	315.690.984,00	-	-	315.690.984,00
15	Sekretariat DPRD	1.894.815.059,00	-	-	1.894.815.059,00
Jumlah		**6.519.924.363,00**	**991.842.386,00**	**326.899.197,00**	**7.838.665.946,00**

2. Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada tahun 2025 sebesar Rp8.179.472.256,00 disebabkan karena Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain karena Reklasifikasi dan Penghapusan yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

   a) Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2025 sebesar Rp169.912.736,00 merupakan penambahan Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp169.400.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp512.736,00 disebabkan aset peralatan mesin dari aset lain-lain dengan kondisi sebelumnya rusak berat berubah kondisi menjadi baik dan dapat dipergunakan.

b) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp8.009.559.520,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 287 Rekapitulasi Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025			Jumlah (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.684.700,00	-	-	65.684.700,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.541.400,00	-	-	12.541.400,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.864.000,00	-	-	15.864.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.110.913.483,00	-	-	1.110.913.483,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	224.496.000,00	-	-	224.496.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	543.772.787,00	-	-	543.772.787,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	288.840.213,00	-	-	288.840.213,00
8	Dinas Kesehatan	233.550.454,00	976.386.109,00	-	1.209.936.563,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	237.091.250,00	-	-	237.091.250,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	268.358.570,00	26.862.000,00	-	295.220.570,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.016.451.800,00	128.827.745,00	326.899.197,00	1.472.178.742,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	172.776.000,00	-	-	172.776.000,00
13	Dinas Perhubungan	350.448.865,00	-	-	350.448.865,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.588.400,00	-	-	16.588.400,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.525.000,00	-	-	13.525.000,00
16	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	237.702.750,00	-	-	237.702.750,00
17	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	211.632.009,00	-	-	211.632.009,00
18	Dinas Sosial	37.415.000,00	-	-	37.415.000,00
19	Inspektorat Kabupaten	16.557.563,00	-	-	16.557.563,00
20	Kecamatan Batumandi	20.500.000,00	-	-	20.500.000,00
21	Kecamatan Halong	114.011.333,00	-	-	114.011.333,00
22	Kecamatan Lampihong	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00
23	Kecamatan Paringin	150.999.995,00	-	-	150.999.995,00
24	Kecamatan Paringin Selatan	60.882.800,00	-	-	60.882.800,00
25	Sekretariat Daerah	574.709.813,00	-	-	574.709.813,00
26	Sekretariat DPRD	541.470.284,00	-	-	541.470.284,00
Jumlah		**6.550.584.469,00**	**1.132.075.854,00**	**326.899.197,00**	**8.009.559.520,00**

3. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp61.694.019.855,48 pada tahun 2025 rincian sebagai berikut:

Tabel 288 Rekapitulasi Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025			Jumlah (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.646.290,00	-	-	7.646.290,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.980.000,00	-	-	300.980.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.780.000,00	-	-	26.780.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	58.220.480,00	-	-	58.220.480,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	34.598.900,00	22.455.000,00	88.002.800,00	145.056.700,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.488.750,00	-	-	2.488.750,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.752.150,00	-	-	64.752.150,00
8	Dinas Kesehatan	1.726.864.121,00	68.281.453,50	-	1.795.145.574,50
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	304.922.113,00	13.800.000,00	358.900.000,00	677.622.113,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	38.685.000,00	-	27.852.000,00	66.537.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	5.485.500,00	-	-	5.485.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98.604.500,00	2.785.682.023,10	20.890.197.163,88	23.774.483.686,98
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.489.111,00	10.372.964,00	-	565.862.075,00
14	Dinas Perhubungan	343.401.032,00	-	-	343.401.032,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.797.702.225,00	19.915.278.483,00	97.554.980,00	27.810.535.688,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.282.254.375,00	5.083.313,00	-	1.287.337.688,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	27.786.250,00	-	-	27.786.250,00
18	Dinas Satpol Pamong Praja	328.151.509,00	-	-	328.151.509,00
19	Dinas Sosial	15.325.000,00	-	-	15.325.000,00
20	Inspektorat Kabupaten	40.175.293,00	-	-	40.175.293,00
21	Kecamatan Awayan	563.875.520,00	-	-	563.875.520,00
22	Kecamatan Batumandi	208.299.890,00	-	-	208.299.890,00
23	Kecamatan Halong	19.700.000,00	-	-	19.700.000,00
24	Kecamatan Juai	25.099.750,00	63.308.700,00	-	88.408.450,00
25	Kecamatan Lampihong	46.221.143,00	-	-	46.221.143,00
26	Kecamatan Paringin	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	61.890.000,00	-	-	61.890.000,00
28	Kecamatan Tebing Tinggi	45.201.000,00	-	-	45.201.000,00
29	Sekretariat Daerah	1.716.287.114,00	-	-	1.716.287.114,00
30	Sekretariat DPRD	1.597.363.959,00	-	-	1.597.363.959,00
Jumlah		**17.347.250.975,00**	**22.884.261.936,60**	**21.462.506.943,88**	**61.694.019.855,48**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	**-**	**371.190.177.000,00**

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp371.190.177.000,00. Sesuai dengan Pasal Pasal 47 Ayat (10) PMK Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus disebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk DBH) dalam bentuk non Tunai dicatat sebagai pendapatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Kebijakan Akuntansi dan Penyaluran DBH melalui Rekening TDF Transfer ke Daerah TDF-TKD dan nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF Transfer ke Daerah TDF-TKD Tahun 2022 bahwa pendapatan TDF Pemkab Balangan ditempatkan dalam Rek Lain BI TDF TKD Kab Balangan nomor rekening 519000456980 sejumlah Rp371.190.177.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.7 Properti Investasi *(Netto)*	**114.170.000,00**	**114.170.000,00**

Saldo Properti Investasi merupakan aset berupa Gedung dan Bangunan serta Tanah milik Pemkab Balangan yang disewa oleh BPR. Saldo tersebut per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp114.170.000,00.

Tabel 289 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025		
		Nilai Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	107.535.000,00	-	107.535.000,00
2	Gedung dan Bangunan	132.700.000,00	126.065.000,00	6.635.000,00
Jumlah		**240.235.000,00**	**126.065.000,00**	**114.170.000,00**

Penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut:

1. Satu Bidang Tanah pada SKPD Sekretariat Daerah dengan nama barang Tanah BPR dengan nilai perolehan sebesar Rp107.535.000,00; dan
2. Satu Bangunan Gedung pada SKPD Sekretariat Daerah dengan nama barang Eks Rumah Dinas Sekretaris Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp132.700.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp126.065.000,00 sehingga nilai bukunya sebesar Rp6.635.000,00.

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
24.097.564.837,86	**59.692.530.288,44**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.097.564.837,86 dan Rp59.692.530.288,44 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
24.097.564.837,86	**59.692.530.288,44**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.097.564.837,86 dan Rp59.692.530.288,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 290 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	330.118.209,39	186.392.548,50
2	Utang Belanja	23.763.562.001,47	59.493.224.212,94
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.884.627,00	12.913.527,00
Jumlah		**24.097.564.837,86**	**59.692.530.288,44**

5.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
330.118.209,39	**186.392.548,50**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan pendapatan yang dicatat sebagai kewajiban yang akan menjadi pendapatan dikemudian hari. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp330.118.209,39 dan Rp186.392.548,50. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 291 Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89.454.891,40	57.010.572,35
2	Sekretariat Daerah	72.737.810,46	29.137.626,01
3	Kecamatan Lampihong	24.965.000,00	15.684.949,54
4	Kecamatan Awayan	20.294.000,00	6.382.255,76
5	RSUD (BLUD)	45.410.958,91	41.408.217,22
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT.DISDIK)	33.945.060,18	3.951.556,48
7	Dinas Komunikasi & Informatika	-	5.513.522,50
8	Kecamatan Juai	18.590.488,44	5.423.848,64
9	DPMPTSP	24.720.000,00	21.880.000,00
Jumlah		**330.118.209,39**	**186.392.548,50**

Rincian pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 per jenis pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 39.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.2. Utang Belanja	**23.763.562.001,47**	**59.493.224.212,94**

Utang Belanja merupakan Utang Beban Pegawai, Utang Beban Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang belum dilakukan pembayaran. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp23.763.562.001,47 dan Rp59.493.224.212,94. Utang Belanja per 31 Desember 2025 terdiri dari Utang Beban Pegawai sebesar Rp7.290.574.485,00. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp7.662.361.100,01 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp8.810.626.416,46. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dengan rincian per SKPD dan per jenis belanja tersaji pada tabel berikut:

Tabel 292 Utang Beban atas Belanja per 31 Desember 2025 Per SKPD

SKPD	Pegawai	Barang Jasa	Modal	JUMLAH
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	12.116.700,00	-	12.116.700,00
Dinas Kesehatan	-	15.033.020,00	1.405.998.120,00	1.421.031.140,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.969.293,00	8.681.785,00	7.211.292.297,46	7.244.943.375,46
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.877.500,00	-	1.877.500,00
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	562.000,00	-	562.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	95.000,00	-	95.000,00
Dinas Sosial	-	47.000,00	-	47.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	416.950.823,00	1.804.500,00	-	418.755.323,00
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	1.752.500,00	-	1.752.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	47.500,00	-	47.500,00
Dinas Perhubungan	-	1.085.500,00	-	1.085.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	63.534.609,00	47.000,00	-	63.581.609,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	-	30.508.812,00	-	30.508.812,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.172.182,00	294.000,00	-	56.466.182,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	143.145.154,00	994.000,00	-	144.139.154,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.800.958,00	7.146.467,00	-	64.947.425,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	8.460.900,00	-	8.460.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.599.900,00	-	2.599.900,00
Sekretariat Daerah	-	84.456.400,00	-	84.456.400,00
Sekretariat DPRD	68.000.000,00	1.725.000,00	-	69.725.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	34.610.148,00	993.500,00	-	35.603.648,00

SKPD	Pegawai	Barang Jasa	Modal	JUMLAH
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38.814.545,00	2.010.000,00	193.335.999,00	234.160.544,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	956.000,00	-	956.000,00
Inspektorat	-	367.000,00	-	367.000,00
Kecamatan Lampihong	-	271.200,00	-	271.200,00
Kecamatan Batumandi	190.033.994,00	6.986.480,00	-	197.020.474,00
Kecamatan Awayan	-	304.200,00	-	304.200,00
Kecamatan Halong	-	424.000,00	-	424.000,00
Kecamatan Juai	-	7.474.506,00	-	7.474.506,00
Kecamatan Paringin	146.333.780,00	1.063.700,00	-	147.397.480,00
Kecamatan Tebing Tinggi	-	623.000,00	-	623.000,00
Kecamatan Paringin Selatan	-	867.500,00	-	867.500,00
Rumah Sakit Datu Kandang Haji	6.050.208.999,00	7.209.561.304,41	-	13.259.770.303,41
Puskesmas Paringin	-	80.417.685,60	-	80.417.685,60
Puskesmas Paringin Selatan	-	10.535.320,00	-	10.535.320,00
Puskesmas Awayan	-	38.995.020,00	-	38.995.020,00
Puskesmas Tebing Tinggi	-	7.446.100,00	-	7.446.100,00
Puskesmas Lokbatu	-	4.541.520,00	-	4.541.520,00
Puskesmas Batumandi	-	4.594.804,00	-	4.594.804,00
Puskesmas Tanah Habang	-	3.429.608,00	-	3.429.608,00
Puskesmas Lampihong	-	18.122.760,00	-	18.122.760,00
Puskesmas Juai	-	13.640.220,00	-	13.640.220,00
Puskesmas Pirsus	-	2.984.520,00	-	2.984.520,00
Puskesmas Halong	-	66.415.668,00	-	66.415.668,00
Jumlah	**7.290.574.485,00**	**7.662.361.100,01**	**8.810.626.416,46**	**23.763.562.001,47**

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3.884.627,00	**12.913.527,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada posisi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.884.627,00 dan Rp12.913.527,00. Utang Jangka Pendek Lainya merupakan Utang Lain-Lain BLUD RSUD Datu Kandang Haji per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.884.627,00 dan Rp12.913.527,00 yang merupakan utang obat-obatan dari BLUD RSUD lain. Berikut rincian Utang Obat Rumah Sakit dan BMHP TA 2025:

Tabel 293 Sisa Utang per 31 Desember 2024 RSUD H. Badaruddin - Obat

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
16/10/2024	Amitriptylin 25mg Tab	1.000	210,00	210.000,00
10/12/2024	Otsu Salin 3%	20	36.100,00	722.000,00
10/12/2024	Otsu D40%	30	7.770,00	233.100,00
23/12/2024	Dobutamin Inj	20	16.677,00	333.540,00
23/12/2024	Soroquin 300mg Tab Pehacain Inj	120	9.092,00	1.091.040,00
23/12/2024	Pehacain Inj	40	3.707,00	148.280,00
Jumlah		**1230**		**2.737.960,00**

Tabel 294 Sisa Utang per 31 Desember 2024 RSUD H. Damanhuri Barabai obat tahun berjalan

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
23/11/2018	Catapres Inj	50	48.146,00	2.407.300,00
20/12/2018	Farsorbid Inj	45	64.350,00	2.895.750,00
18/12/2024	Mestinon 60mg Tab	50	8.243,00	412.150,00
30/12/2024	Hyson Inj	15	77.700,00	1.165.500,00
30/12/2024	Otsu D40%	15	7.770,00	116.550,00
03/03/2024	Biosave Inj	3	1.059.439,00	3.178.317,00
Jumlah		**178**		**10.175.567,00**

Tabel 295 Sisa Utang per 31 Desember 2025 RSUD H. Damanhuri Barabai obat tahun berjalan

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Phenobarbital Inj	10	3.885,00	Rp38.850,00
31/07/2025	Biosave Inj	1	1.281.933,00	1.281.933,00
28/08/2025	Biosave Inj	2	1.281.922,00	2.563.844,00
Jumlah		**13**		**3.884.627,00**

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
6.854.281.694.428,14	**6.555.152.017.838,08**

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.854.281.694.428,14 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.555.152.017.838,08 ditambah Surplus-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp48.819.577.452,29 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp250.310.099.137,77.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemkab Balangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional.

5.4.1. Pendapatan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.681.078.138.671,11	**4.709.233.037.929,88**

Pendapatan-LO adalah hak Pemkab Balangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.681.078.138.671,11 dan Rp4.709.233.037.929,88, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 296 Ringkasan perbandingan Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	207.880.324.211,63	202.419.435.557,66	5.460.888.653,97	180.335.304.902,06
2	Pendapatan Transfer	2.082.319.921.647,00	3.062.780.561.770,00	(980.460.640.123,00)	4.515.000.890.650,82
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	390.877.892.812,48	377.757.089.937,48	13.120.802.875,00	13.896.842.377,00
Jumlah		**2.681.078.138.671,11**	**3.642.957.087.265,14**	**(961.878.948.594,03)**	**4.709.233.037.929,88**

5.4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
207.880.324.211,63	**180.335.304.902,06**

Pos ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp207.880.324.211,63 dan Rp180.335.304.902,06, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 297 Ringkasan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO dengan Pendapatan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	37.460.993.676,73	37.607.251.720,00	(146.258.043,27)	18.299.531.748,53
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.020.670.865,87	1.967.294.243,00	53.376.622,87	2.662.107.164,70
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.282.992.046,34	48.293.614.236,00	1.989.377.810,34	20.479.163.343,96
4	Lain-lain PAD yang Sah	118.115.667.622,69	114.551.275.358,66	3.564.392.264,03	138.894.502.644,87
Jumlah		**207.880.324.211,63**	**202.419.435.557,66**	**5.460.888.653,97**	**180.335.304.902,06**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	**37.460.993.676,73**	**18.299.531.748,53**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Balangan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan. Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.460.993.676,73 dan Rp18.299.531.748,53, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 298 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/*Billboard/ Videotron/ Megatron*	82.989.541,73	102.844.316,00	(19.854.774,27)	124.528.025,75
2	Pajak Air Tanah	25.956.504,00	25.956.504,00	-	24.076.662,80
3	Pajak Sarang Burung Walet	918.000,00	918.000,00	-	918.000,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.372.014.716,00	3.376.751.892,00	(4.737.176,00)	1.186.981.954,35
5	PBB-P2	1.166.003.373,00	874.478.570,00	291.524.803,00	1.292.594.827,93
6	BPHTB-Pemindahan Hak	1.506.528.250,00	1.506.528.250,00	-	967.153.600,00
7	BPHTB-Pemberian Hak Baru	233.209.600,00	233.209.600,00	-	183.541.200,00
8	PBJT-Restoran	432.389.394,00	415.478.394,00	16.911.000,00	395.434.394,00
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	10.543.262.132,00	10.536.638.204,00	6.623.928,00	8.907.788.927,70
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.689.036.622,00	5.125.712.446,00	(436.675.824,00)	5.185.795.183,00
11	PBJT-Hotel	20.694.454,00	20.694.454,00	-	-
12	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse /Bungalo/Resort/Cottage	8.603.171,00	8.603.171,00	-	13.162.973,00
13	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	32.501.019,00	32.501.019,00	-	16.776.000,00
14	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	811.000,00	861.000,00	(50.000,00)	780.000,00
15	Opsen PKB	8.153.442.100,00	8.153.442.100,00	-	-

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
16	Opsen BBNKB	7.192.633.800,00	7.192.633.800,00	-	-
Jumlah		**37.460.993.676,73**	**37.607.251.720,00**	**(146.258.043,27)**	**18.299.531.748,53**

Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

1. Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*

Tabel 299 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Reklame LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* – LRA	**102.844.316,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(3.841.625,00)
b.	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	8.057.375,00
c.	+/+ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	82.416.041,73
d.	-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	(106.486.566,00)
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LO	**82.989.541,73**

Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp82.989.541,73. Nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp102.844.316,00.

Perbedaan antara realisasi pendapatan LRA dengan pendapatan LO disebabkan oleh penerapan basis akrual pada pengakuan pendapatan dalam LO, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembayaran piutang pajak reklame tahun sebelumnya sebesar Rp3.841.625,00 yang diakui sebagai pendapatan pada LRA, namun pada LO tidak diakui sebagai pendapatan karena merupakan realisasi atas piutang yang telah diakui pada periode sebelumnya.
b) Penambahan piutang pajak reklame tahun berjalan sebesar Rp8.057.375,00 yang merupakan hak Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan dan belum diterima pembayarannya.
c) Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp82.416.041,73 yang pada tahun berjalan telah menjadi hak Pemerintah Daerah sehingga diakui sebagai pendapatan LO.

d) Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp106.486.566,00 yang belum menjadi hak Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan sehingga dicatat sebagai kewajiban dan tidak diakui sebagai pendapatan LO.

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Tabel 300 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LRA	**3.376.751.892,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(4.737.176,00)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	**3.372.014.716,00**

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya pada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp3.372.014.716,00. Nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp3.376.751.892,00.

Perbedaan pengakuan antara LRA dan LO disebabkan oleh penerapan basis akrual dalam penyusunan LO. Penyesuaian yang dilakukan berupa:

a) Pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp4.737.176,00 yang diakui sebagai pendapatan pada LRA, namun tidak diakui sebagai pendapatan pada LO karena merupakan realisasi atas piutang yang telah diakui pada periode sebelumnya.

3. PBB-P2

Tabel 301 Kertas Kerja Perbandingan PBB-P2 LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	PBB-P2 – LRA	**874.478.570,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(185.884.046,00)
b.	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	477.408.849,00
	PBB-P2 – LO	**1.166.003.373,00**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.166.003.373,00. Nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp874.478.570,00.

Perbedaan antara realisasi pendapatan LRA dengan pendapatan LO disebabkan oleh penerapan basis akrual pada pengakuan pendapatan dalam LO, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp185.884.046,00 yang diakui sebagai pendapatan pada LRA, namun pada LO tidak diakui sebagai pendapatan karena merupakan realisasi atas piutang yang telah diakui pada periode sebelumnya; dan
b) Penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar Rp477.408.849,00 yang merupakan hak Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan dan belum diterima pembayarannya.

4. PBJT- Restoran

Tabel 302 Kertas Kerja Perbandingan PBJT- Restoran dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	PBJT- Restoran – LRA	**415.478.394,00**
	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	16.911.000,00
	PBJT- Restoran – LO	**432.389.394,00**

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – Restoran pada tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp432.389.394,00. Nilai tersebut merupakan hasil penyesuaian dari realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp415.478.394,00.

Perbedaan antara realisasi pendapatan LRA dengan pendapatan LO disebabkan oleh penerapan basis akrual pada pengakuan pendapatan dalam LO, dengan rincian sebagai berikut:

a) Penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar Rp16.911.000,00 yang merupakan hak Pemerintah Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan dan belum diterima pembayarannya.

5. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Tabel 303 Kertas Kerja Perbandingan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering dengan LRA

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering – LRA	**10.536.638.204,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(18.924.272,00)
b.	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	25.548.200,00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering – LO	**10.543.262.132,00**

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas penyedia jasa boga atau katering pada Tahun Anggaran 2025 diakui berdasarkan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual pada Laporan Operasional (LO).

Realisasi pendapatan PBJT jasa boga atau katering pada LRA sebesar Rp10.536.638.204,00, sedangkan pada LO sebesar Rp10.543.262.132,00. Perbedaan antara LRA dan LO tersebut disebabkan oleh pengakuan piutang pajak sesuai dengan basis akrual.

Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp18.924.272,00, yang pada LRA diakui sebagai penerimaan kas tahun berjalan, namun pada LO tidak diakui sebagai pendapatan karena telah menjadi hak pada periode sebelumnya; dan
b) Penambahan atas piutang tahun berjalan sebesar Rp25.548.200,00, yang pada LO diakui sebagai pendapatan meskipun belum diterima kasnya sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Tabel 304 Kertas Kerja Perbandingan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lainnya dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain – LRA	**5.125.712.446,00**
1.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(436.675.824,00)
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain – LO	**4.689.036.622,00**

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO pada akun PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar Rp436.675.824,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan kas atas piutang tahun 2024 yang diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) tahun berjalan.

7. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran

Tabel 305 Kertas Kerja Perbandin PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran – LRA	**861.000,00**
a.	-/-Pembayaran Piutang Tahun 2024	(50.000,00)
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran – LO	**811.000,00**

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO pada akun PBJT Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar Rp50.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan kas atas piutang tahun 2024 yang diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun tidak diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) tahun berjalan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	**2.020.670.865,87**	**2.662.107.164,70**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut. Pendapatan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.020.670.865,87 dan Rp2.662.107.164,70. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 306 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	171.232.500,00	171.232.500,00	-	574.465.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	237.226.500,00	243.581.500,00	(6.355.000,00)	443.871.725,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	116.197.000,00	116.197.000,00	-	75.000.000,00
4	Retribusi Pelataran	2.262.000,00	2.262.000,00	-	1.740.000,00
5	Retribusi Los	107.882.000,00	107.882.000,00	-	117.334.000,00
6	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.731.622,87	-	40.731.622,87	83.543.618,70
7	Retribusi Penyewaan Bangunan	136.025.000,00	136.025.000,00	-	152.747.500,00
8	Retribusi Pemakaian Laboratorium	6.674.000,00	6.674.000,00	-	3.288.000,00
9	Retribusi Pemakaian Ruangan	111.866.000,00	111.866.000,00	-	116.025.500,00
10	Retribusi Pemakaian Alat	185.461.000,00	185.461.000,00	-	65.506.000,00
11	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	202.620.000,00	183.620.000,00	19.000.000,00	230.369.250,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	61.988.000,00	61.988.000,00	-	63.000.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Hasil	51.000.000,00	51.000.000,00	-	1.000.000,00

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
	Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman				
14	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.510.000,00	100.510.000,00	-	100.240.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	13.288.000,00	13.288.000,00	-	47.263.000,00
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	455.768.439,00	455.768.439,00	-	586.713.571,00
17	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	19.938.804,00	19.938.804,00	-	-
Jumlah		**2.020.670.865,87**	**1.967.294.243,00**	**53.376.622,87**	**2.662.107.164,70**

Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Tabel 307 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	**243.581.500,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(6.355.000,00)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	**237.226.500,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp243.581.500,00, sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp237.226.500,00. Terdapat selisih sebesar Rp6.355.000,00 yang disebabkan oleh penerimaan kas pada tahun 2025 yang berasal dari pelunasan piutang retribusi tahun 2024.

2. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Tabel 308 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	**-**
a.	+/+ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	61.025.622,87
b.	-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	(20.294.000,00)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	**40.731.622,87**

a. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp61.250.696,11 hanya tercatat di LRA pada, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kecamatan Awayan sebesar Rp6.382.255,76 atas sewa lahan ATM Bank Kalsel pada halaman Kantor Kecamatan Awayan;
2) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.071.155,59 atas sewa lahan ATM Bank Kalsel pada halaman Masjid Al-Akbar Balangan dan sebesar Rp4.741.470,42 atas sewa lahan ATM Bank Kalsel pada halaman Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Balangan serta Kantor PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera sebesar Rp17.325.000,00;
3) Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian sebesar Rp5.513.522,50 atas sewa lahan ATM Bank Kalsel pada halaman Mall Pelayanan;
4) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp 5.161.949,46 atas sewa kantor kas Bank Kalsel;
5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.951.556,48 atas sewa lahan ATM Bank Bank Kalsel depan Eks UPT Disdik; dan
6) Kecamatan Lampihong sebesar Rp11.103.785,90 atas sewa kantor kas Bank Kalsel Kecamatan Lampihong;

b. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp20.294.000,00 hanya tercatat di LO, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kecamatan Awayan sebesar Rp 20.294.000,00 atas sewa lahan ATM Bank Kalsel pada halaman kantor Kecamatan Awayan.

3. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Tabel 309 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan – LRA	**183.620.000,00**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(7.545.000,00)
b.	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	26.545.000,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan – LO	**202.620.000,00**

Pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp183.620.000,00, sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp202.620.000,00.

Terdapat selisih sebesar Rp19.000.000,00 yang disebabkan oleh pembayaran piutang tahun 2024 sebesar Rp7.545.000,00 dan penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp26.545.000,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
	50.282.992.046,34	**20.479.163.343,96**

Pendapatan HPKDYD merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada BUMD-Lembaga Keuangan dengan kepemilikan saham minoritas dan mayoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya serta ekuitas. Pendapatan HPKDYD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp50.282.992.046,34 dan Rp20.479.163.343,96, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 310 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	50.282.992.046,34	48.293.614.236,00	(1.989.377.810,34)	20.479.163.343,96
	Jumlah	**50.282.992.046,34**	**48.293.614.236,00**	**(1.989.377.810,34)**	**20.479.163.343,96**

Penjelasan atas Perbedaan antara LO dengan LRA dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 311 Kertas Kerja Perbandingan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	**48.293.614.236,00**
a.	-/- Penerimaan Dividen BPR Tahun 2025	(521.442.126,00)
b.	+/+ Laba Penyertaan Modal BPR Tahun 2025	1.317.399.184,32
c.	+/+ Laba Penyertaan Modal PDAM Tahun 2025	1.193.420.752,02
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	**50.282.992.046,34**

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.293.614.236,00, sedangkan pada Laporan Operasional (LO) diakui sebesar Rp50.282.992.046,34.

Perbedaan antara nilai pada LRA dan LO sebesar Rp1.989.377.810,34 disebabkan oleh perbedaan basis pengakuan, yaitu LRA menggunakan basis kas sedangkan LO menggunakan basis akrual. Rincian perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Dikurangi penerimaan dividen BPR Tahun 2025 sebesar Rp521.442.126,00, yang merupakan penerimaan kas atas hak periode sebelumnya sehingga diakui sebagai pendapatan pada LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan LO Tahun 2025;
b) Ditambah pengakuan laba penyertaan modal pada BPR Tahun 2025 sebesar Rp1.317.399.184,32, yang secara akrual telah menjadi hak pemerintah daerah namun belum seluruhnya diterima kasnya pada tahun berjalan; dan
c) Ditambah pengakuan laba penyertaan modal pada PDAM Tahun 2025 sebesar Rp1.193.420.752,02, yang juga telah menjadi hak pemerintah daerah secara akrual dan diakui dalam LO meskipun belum seluruhnya direalisasikan dalam bentuk kas.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	**118.115.667.622,69**	**138.894.502.644,87**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan HPKDYD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp118.115.667.622,69 dan Rp138.894.502.644,87.

Tabel 312 Perbandingan Pendapatan Lain – Lain PAD yang Sah - LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.002.772.890,00	902.252.890,00	100.520.000,00	31.000.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	159.881.952,12	290.520.000,00	(130.638.047,88)	68.386.666,00
3	Jasa Giro	32.071.674.636,55	32.071.674.636,55	-	23.428.350.368,92
4	Pendapatan Bunga	284.931.507,00	284.931.507,00	-	7.043.835.616,43

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih	LO Tahun 2024 (Rp)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	592.037.531,83	592.037.531,83	-	3.678.947.067,68
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	9.262.003.881,64	7.860.555.289,85	1.401.448.591,79	1.525.329.059,78
7	Pendapatan Denda Pajak Hotel	168.652.328,00	168.652.328,00	-	180.951.091,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000,00	10.000,00	-	40.000,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.879.935.424,00	1.879.935.424,00	-	3.223.414.905,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	4.115.906.011,87	6.108.978.396,14	(1.993.072.384,27)	4.859.405.103,53
11	Pendapatan BLUD	57.805.424.562,68	53.570.185.964,29	4.235.238.598,39	52.796.468.089,53
12	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	10.772.436.897,00	10.821.541.391,00	(49.104.494,00)	42.058.374.677,00
Jumlah		**118.115.667.622,69**	**114.551.275.358,66**	**3.564.392.264,03**	**138.894.502.644,87**

Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel 313 Kertas Kerja Perbandingan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	**902.252.890,00**
a.	-/- Penambahan Persediaan dari hasil Pembibitan Ternak	100.520.000,00
	Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	**1.002.772.890,00**

Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp902.252.890,00.

Dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), dilakukan pengakuan pendapatan berbasis akrual atas hasil pembibitan ternak yang menambah nilai persediaan sebesar Rp100.520.000,00.

Dengan demikian, Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.002.772.890,00.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel 314 Kertas Kerja Perbandingan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan– LRA	**290.520.000,00**
a.	-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	(188.269.030,08)
	+/+ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	31.885.012,28
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan– LO	**134.135.982,20**

Pendapatan 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp290.520.000,00.

Dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), dilakukan penyesuaian berbasis akrual sebagai berikut:

a) Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp188.269.030,08, yang merupakan penerimaan kas tahun berjalan namun belum menjadi hak pendapatan pada periode tersebut; dan
b) Penambahan atas pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 yang telah menjadi hak pada Tahun 2025 sebesar Rp31.885.012,28.

3. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 315 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	**7.860.555.289,85**
a.	+/+ Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	1.401.448.591,79
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	**9.262.003.881,64**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.262.003.881,64. Nilai tersebut merupakan pengakuan pendapatan berbasis akrual yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang berlaku.

Perbedaan antara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.860.555.289,85 dengan nilai pada LO disebabkan adanya penyesuaian akrual berupa penambahan atas Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar Rp1.401.448.591,79 serta penyesuaian lainnya sesuai basis pengakuan pendapatan pada LO.

Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO sebesar Rp1.401.448.591,79 adalah sebagai berikut:

a) Pekerjaan Renovasi Puskesmas Halong sebesar Rp99.326.529,00;
b) Peningkatan Jalan Galubang - Muara Kuawau sebesar Rp 284.223.720,28;
c) Peningkatan Jalan Kalahiang - Haur Batu sebesar Rp194.220.053,72;
d) Peningkatan Jalan Piyait – Ambakiang sebesar Rp106.721.697,98;
e) Rekonstruksi Longsor Desa Maradap sebesar Rp119.134.664,55;
f) Rekonstruksi Longsor Desa Marajai sebesar Rp26.443.322,10; dan
g) Pembangunan Jembatan Kapul sebesar Rp571.378.604,14.

4. Pendapatan dari Pengembalian

Tabel 316 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan Pendapatan dari Pengembalian – LRA	**6.108.978.396,14**
a.	-/- Pelunasan Piutang Tahun 2024	(2.812.120.717,00)
b.	+/+ Koreksi Penambahan Piutang	819.048.332,73
	Pendapatan dari Pengembalian – LO	**4.115.906.011,87**

Pendapatan dari Pengembalian pada Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.115.906.011,87. Pendapatan tersebut merupakan pengakuan pendapatan berbasis akrual atas penerimaan pengembalian belanja atau pengembalian lainnya yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Nilai Pendapatan dari Pengembalian pada LO berbeda dengan nilai yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.108.978.396,14. Perbedaan tersebut disebabkan adanya penyesuaian akrual yang terdiri atas pelunasan piutang tahun 2024 sebesar Rp2.812.120.717,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan LO karena telah diakui sebagai piutang pada periode sebelumnya, serta koreksi penambahan piutang sebesar Rp819.048.332,73 yang menambah pendapatan berbasis akrual pada tahun berjalan.

5. Pendapatan BLUD.

Tabel 317 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan BLUD LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan BLUD – LRA	**53.570.185.964,29**
a.	-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(6.120.925.803,00)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
b.	+/+Penambahan Piutang Tahun 2025	10.385.913.113,00.
c..	-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	(67.745.969,92)
	+/+ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	63.743.228,23
	Pendapatan BLUD – LO	**57.831.170.532,60**

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2025 disajikan sebesar Rp57.831.170.532,60. Pendapatan tersebut merupakan hak BLUD yang diperoleh selama tahun berjalan berdasarkan basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Pendapatan BLUD pada LO berbeda dengan Pendapatan BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp53.570.185.964,29. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian akrual atas piutang pendapatan dan pendapatan diterima dimuka yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Penyesuaian dimaksud terdiri atas:

1. Pengurangan atas Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp6.120.925.803,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan kas pada tahun 2025 atas piutang pendapatan yang telah diakui sebagai pendapatan pada tahun 2024, sehingga dalam basis akrual tidak diakui kembali sebagai pendapatan tahun berjalan.
2. Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp10.385.913.113,00. Nilai ini merupakan hak BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya, namun berdasarkan basis akrual tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
3. Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp67.745.969,92. Nilai tersebut merupakan penerimaan kas yang belum menjadi hak BLUD pada tahun 2025 karena jasa atau layanan belum sepenuhnya diberikan sampai akhir periode pelaporan, sehingga diakui sebagai kewajiban.
4. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp63.743.228,23. Nilai tersebut merupakan realisasi pendapatan pada tahun 2025 atas penerimaan dimuka yang telah dicatat sebagai kewajiban pada tahun sebelumnya, sehingga diakui sebagai pendapatan LO tahun berjalan.

6. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Tabel 318 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak– LRA	**10.821.541.391,00**
a.	-/- Penyaluran Piutang Tahun 2024	(49.104.494,00)
	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak– LO	**10.772.436.897,00**

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak adalah Pendapatan Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.821.541.391,00. Dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), dilakukan penyesuaian berupa pengurangan atas penyaluran piutang Tahun 2024 sebesar Rp49.104.494,00, yang pada periode sebelumnya telah diakui sebagai piutang dan pendapatan LO. Dengan demikian, Pendapatan Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF) pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.772.436.897,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer	**2.082.319.921.647,00**	**4.515.000.890.650,82**

Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.082.319.921.647,00 dan Rp4.515.000.890.650,82, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 319 Ringkasan Perbandingan Pendapatan Transfer LO dengan LRA

No.	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.977.272.884.840,00	2.862.288.231.840,00	(885.015.347.000,00)	4.395.091.776.921,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	22.296.663.000,00	120.541.620.020,00	(98.244.957.020,00)	20.597.049.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.750.373.807,00	79.950.709.910,00	2.799.663.897,00	99.312.064.729,82
Jumlah		**2.082.319.921.647,00**	**3.062.780.561.770,00**	**(980.460.640.123,00)**	**4.515.000.890.650,82**

Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.082.319.921.647,00 dan Rp4.515.000.890.650,82 , dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.977.272.884.840,00	**4.395.091.776.921,00**

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan mengakui Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dalam Laporan Operasional (LO) berdasarkan asas akrual, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.977.272.884.840,00 dan Rp4.395.091.776.921,00. Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 320 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	**2.862.288.231.840,00**
a.	-/- Penerimaan Dana TDF Tahun 2024	(371.190.177.000,00)
b.	-/- Penerimaan penerimaan Transfer Dana Perimbangan 2024	(526.564.799.000,00)
c.	+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	12.739.629.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	**1.977.272.884.840,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.862.288.231.840,00.

Dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), dilakukan penyesuaian berbasis akrual sebagai berikut:

a) Pengurangan atas penerimaan Transfer Dana Perimbangan yang merupakan pelunasan piutang Tahun 2024 atas Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp371.190.177.000,00;
b) Pengurangan atas penerimaan Transfer Dana Perimbangan Tahun 2025 yang masih diakui sebagai pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp526.564.799.000,00;
c) Penambahan piutang Transfer Dana Perimbangan Tahun 2025 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.739.629.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp936.5109.000,00;
2. Piutang DBH Pajak Penghasilan Pasal 25/29 sebesar Rp247.500.000,00;
3. Piutang DBH Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1.928.406.000,00;
4. Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp75.000,00;
5. Piutang DBH SDA Kehutanan (PSDH) sebesar Rp287.379.000,00;
6. Piutang DBH SDA Landrent sebesar Rp911.160.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**22.296.663.000,00**	**20.597.049.000,00**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.296.663.000,00 dan Rp20.597.049.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 321 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Dana Desa	-	98.244.957.020,00	(98.244.957.020,00)	-
2	Insentif Fiskal	22.296.663.000,00	22.296.663.000,00	-	20.597.049.000,00
Jumlah		**22.296.663.000,00**	**120.541.620.020,00**	**(98.244.957.020,00)**	**20.597.049.000,00**

Penerimaan Desa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Dana Desa pada LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98.244.957.020,00 disajikan sebagai penerimaan transfer ke daerah. Dana desa harus dicatat dalam LRA sebagai realisasi anggaran, bukan dalam LO sebagai kegiatan operasional keuangan. LRA mencerminkan realisasi anggaran dan posisi keuangan desa.

Penerimaan Insentif Fiskal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.296.663.000,00 dan Rp20.597.049.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi LRA TA 2025 sebesar Rp 22.296.663.000,00 tidak terdapat perbedaan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	**82.750.373.807,00**	**99.312.064.729,82**

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 82.750.373.807,00 dan Rp99.312.064.729,82. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 322 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	1.697.069.820,00	(1.697.069.820,00)	5.901.129.412,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	3.759.484.267,00	(3.759.484.267,00)	11.508.667.672,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.724.492.983,00	61.684.393.954,00	8.040.099.029,00	71.482.021.998,82
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	703.759.999,00	731.672.719,00	(27.912.720,00)	907.881.507,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau	12.322.120.825,00	12.078.089.150,00	244.031.675,00	9.512.364.140,00
Jumlah		**82.750.373.807,00**	**79.950.709.910,00**	**2.799.663.897,00**	**99.312.064.729,82**

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 323 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	**1.697.069.820,00**
-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(1.697.069.820,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	**-**

Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.697.069.820,00 diterima di tahun 2025 sehingga hanya dicatat di LRA.

2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 324 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	**3.759.484.267,00**
-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(3.759.484.267,00)
Berdasarkan LO Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	**-**

Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp3.759.484.267,00 diterima di tahun 2025 sehingga hanya dicatat di LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tabel 325 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	**61.684.393.954,00**
-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(17.444.159.085,00)
+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	25.484.258.114,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	**69.724.492.983,00**

a. Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp17.444.159.085,00 diterima di tahun 2025 sehingga hanya dicatat di LRA; dan

b. Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp25.484.258.114,00 sehingga hanya dicatat di LO.

3. Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Tabel 326 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	**731.672.719,00**
-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(191.765.126,00)
+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	163.852.406,00
Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	**703.759.999,00**

a. Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp191.765.126,00 diterima di tahun 2025 sehingga hanya dicatat di LRA; dan
b. Penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp163.852.406,00 sehingga hanya dicatat di LO.

4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau

Tabel 327 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau – LRA	**12.078.089.150,00**
-/- Pembayaran Piutang Tahun 2024	(1.697.606.583,00)
+/+ Penambahan Piutang Tahun 2025	1.941.638.258,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau – LO	**12.322.120.825,00**

a. Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.697.606.583,00 diterima di tahun 2025 sehingga hanya dicatat di LRA; dan

b. Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.941.638.258,00 sehingga hanya dicatat di LO.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	390.877.892.812,48	**13.896.842.377,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp390.877.892.812,48 dan Rp13.896.842.377,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 328 Rincian Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	14.776.002.965,00	1.655.200.090,00	13.120.802.875,00	5.961.231.815,00
2	Pendapatan Lainnya	376.101.889.847,48	376.101.889.847,48	-	7.935.610.562,00
	Jumlah	**390.877.892.812,48**	**377.757.089.937,48**	**13.120.802.875,00**	**13.896.842.377,00**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	14.776.002.965,00	**5.961.231.815,00**

Pendapatan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.776.002.965,00 dan Rp5.961.231.815,00. Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 329 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Hibah LO dengan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Pendapatan Hibah – LRA	**1.655.200.090,00**
a.	+/+ Penerimaan Hibah Aset Tetap	11.464.027.082,00
b.	+/+ Penerimaan Hibah Persediaan	3.311.975.883,00
	Pendapatan Hibah – LO	**14.776.002.965,00**

5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	376.101.889.847,48	**7.935.418.762,00-**

Pendapatan Lainnya merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LO. Pendapatan tersebut untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 376.101.889.847,48 dan Rp7.935.418.762,00, tidak terdapat perbedaan.

5.4.2. Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.625.858.145.970,82	**2.824.227.213.721,00**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.625.858.145.970,82 dan Rp2.824.227.213.721,00 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 330 Rincian Perbandingan Beban LO dengan Belanja LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Operasi	1.947.285.648.022,01	2.045.244.791.336,05	(97.959.143.314,04)	2.054.947.991.648,75
2	Beban Penyisihan Piutang	590.550.601,81	-	590.550.601,81	79.243.143,25
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	393.675.969.251,00	-	393.675.969.251,00	385.293.693.994,00
4	Beban Transfer	281.127.120.897,00	379.372.077.917,00	(98.244.957.020,00)	382.548.784.935,00
5	Beban Tak Terduga	3.178.857.199,00	3.388.752.199,00	(209.895.000,00)	1.357.500.000,00
Jumlah		**2.625.858.145.970,82**	**2.428.005.621.452,05**	**197.852.524.518,77**	**2.824.227.213.721,00**

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1.Beban Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.947.285.648.022,01	**2.054.947.991.648,75**

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.947.285.648.022,01 dan Rp2.054.947.991.648,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 331 Rincian Perbandingan Beban Operasi LO dengan Belanja Operasi LRA

No	Uraian (Belanja/Beban)	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Pegawai	597.290.474.568,00	604.826.713.205,00	(7.536.238.637,00)	532.344.390.342,00
2	Barang dan Jasa	837.838.572.194,10	1.315.697.863.102,14	(477.859.290.908,04)	860.361.717.102,1
3	Hibah	503.224.596.259,91	115.210.286.128,91	388.014.310.131,00	628.239.433.873,65
4	Bantuan Sosial	8.932.005.000,00	8.932.005.000,00	-	9.013.922.500,00
5	Beban Lain-lain	-	-	-	24.988.527.831,00
Jumlah		**1.947.285.648.022,01**	**2.045.244.791.336,05**	**(97.381.219.414,04)**	**2.054.947.991.648,75**

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	597.290.474.568,00	**532.344.390.342,00**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Beban

Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp597.290.474.568,00 dan Rp532.344.390.342,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 332 Rincian Perbandingan Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai LRA

No	Uraian	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO TA 2024 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	269.948.086.225,00	271.222.174.605,00	(1.274.088.380,00)	247.618.484.546,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	307.482.187.044,00	313.812.337.301,00	(6.330.150.257,00)	216.053.211.178,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	50.962.715.462,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.257.763.614,00	18.189.763.614,00	68.000.000,00	16.596.804.959,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.244.347.644,00	1.244.347.644,00	-	244.808.734,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	647.992.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	358.090.041,00	358.090.041,00	-	220.373.463,00
JUMLAH		**597.290.474.568,00**	**604.826.713.205,00**	**(7.536.238.637,00)**	**532.344.390.342,00**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Tabel 333 Perbandingan Beban Pegawai

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LRA	**604.826.713.205,00**
a.	+/+ Penambahan Utang Beban Pegawai 2025	7.290.574.485,00
b.	-/- Pembayaran Utang Beban Pegawai 2024	(14.826.813.122,00)
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	**597.290.474.568,00**

Mutasi bertambah merupakan penambahan utang beban pegawai dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 334 Rincian Utang Beban Pegawai Tahun 2024

No	Jenis (Utang Belanja Pegawai)	Nilai (Rp)
1	Utang beban Gaji Pokok PNS	7.177.600,00
2	Utang beban Tunjangan Keluarga PNS	789.910,00
3	Utang beban Tunjangan Jabatan PNS	490.000,00
4	Utang beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00
5	Utang beban Tunjangan Beras PNS	362.100,00

No	Jenis (Utang Belanja Pegawai)	Nilai (Rp)
6	Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	142.552.318,00
7	Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.284.919,00
8	Utang beban Pembulatan Gaji PNS	116,00
9	Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.900.217,00
10	Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	379.028,00
11	Utang beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	17.226,00
12	Utang beban Iuran Jaminan Kematian PNS	51.679,00
13	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	382.716.518,00
14	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PPPK	3.790.292,00
15	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.452.299,00
16	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	-
17	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.456.039,00
18	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	574.074.786,00
19	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	5.685.439,00
20	Utang beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.050.208.999,00
21	Utang beban Tunjangan Transportasi DPRD	68.000.000,00
Jumlah		**7.290.574.485,00**

a. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp7.177.600,00 merupakan beban Gaji Pokok PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp3.570.100,00 dan Kecamatan Paringin sebesar Rp3.607.500,00;

b. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp789.910,00 merupakan beban Tunjangan Keluarga PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp357.010,00, dan Kecamatan Paringin sebesar Rp432.900,00.

c. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp490.000,00 merupakan beban Tunjangan Jabatan PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Kecamatan Paringin;

d. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp185.000,00 merupakan beban Tunjangan Fungsional Umum Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

e. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan Beras PNS sebesar Rp362.100,00 merupakan beban Tunjangan Beras PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp144.840,00, dan Kecamatan Paringin sebesar Rp217.260,00;

f. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp142.552.318,00 merupakan beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 dengan rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 335 Rincian Utang Beban Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.070.204,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41.743.699,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.426.707,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.804.734,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.578.132,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.353.198,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.808.220,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.534.345,00
9	Kecamatan Batumandi	25.108.628,00
10	Kecamatan Paringin	19.124.451,00
Jumlah		**142.552.318,00**

g. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebesar Rp1.284.919,00 merupakan beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar

Rp555.894,00, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp729.025,00;

h. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp116,00 merupakan beban Pembulatan Gaji PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp40,00, dan Kecamatan Paringin sebesar Rp76,00;

i. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp29.900.217,00 merupakan beban Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 dengan rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 336 Rincian Utang Beban Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	565.486,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.174.820,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.583.495,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.330.981,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.166.768,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.309.545,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	838.757,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.012.438,00
9	Kecamatan Batumandi	5.202.044,00
10	Kecamatan Paringin	3.715.883,00
Jumlah		**29.900.217,00**

j. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp379.028,00 merupakan beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp104.984,00, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp274.044,00;

k. Mutasi bertambah bersumber dari beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp17.226,00 merupakan beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan

dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp8.568,00, dan Kecamatan Paringin sebesar Rp 8.658,00;

l. Mutasi bertambah bersumber dari beban Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp51.679,00 merupakan beban Iuran Jaminan Kematian PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp25.705,00, dan Kecamatan Paringin sebesar Rp25.974,00;

m. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS sebesar Rp382.716.518,00 merupakan beban beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 dengan rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 337 Rincian Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.819.246,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	143.353.608,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.227.216,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.307.720,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	49.760.101,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.061.355,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.228.869,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10.228.869,00
9	Kecamatan Batumandi	62.227.521,00
10	Kecamatan Paringin	46.502.013,00
Jumlah		**382.716.518,00**

n. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp3.790.292,00 merupakan beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.049.844,00, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.740.448,00;

o. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp382.716.518,00 merupakan beban beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 dengan rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 338 Rincian Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.648.287,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.456.367,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	767.165,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.630.636,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.390.997,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.404.325,00
7	Kecamatan Batumandi	4.154.522,00
Jumlah		**20.452.299,00**

p. Mutasi bertambah bersumber dari beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp2.456.039,00 merupakan beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Bulan Desember Tahun 2025 pada Kecamatan Paringin;

q. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp574.074.786,00 merupakan beban beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan Tahun 2026 dengan rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 339 Rincian Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.228.870,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	215.030.409,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28.840.824,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.961.582,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	74.640.153,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.592.033,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15.343.305,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15.343.305,00
9	Kecamatan Batumandi	93.341.279,00
10	Kecamatan Paringin	69.753.026,00
Jumlah		**574.074.786,00**

r. Mutasi bertambah bersumber dari Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp5.685.439,00 merupakan beban beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Bulan Desember Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar

Rp1.574.765,00, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp4.110.674,00;

s. Mutasi bertambah bersumber dari beban Utang beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp6.050.208.999,00 merupakan beban Utang beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Bulan Desember Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji; dan

t. Mutasi bertambah bersumber dari beban Utang Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp68.000.000,00 merupakan beban Utang beban Tunjangan Transportasi DPRD Bulan Desember Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD.

Pengurangan Beban Pegawai bersumber dari Pembayaran Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp14.826.813.122,00 yang dibayar pada Tahun 2025, sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Adapun rincian utang beban tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 340 Rincian Penyelesaian Utang Beban Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.034.720.799,00
2	Utang beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	28.384.360,00
3	Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	362.588.703,00
4	Utang beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	31.584.631,00
5	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	3.543.937.719,00
6	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PPPK	187.766.612,00
7	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.101.913.155,00
8	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	331.902.266,00
9	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	399.319.825,00
10	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.520.962.280,00
11	Utang beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	283.732.772,00
Jumlah		**14.826.813.122,00**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.	**Beban Barang dan Jasa**	**837.838.572.194,10**	**860.361.717.102,10**

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp837.838.572.194,10 dan Rp860.361.717.102,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 341 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang	157.684.927.235,94	601.989.004.051,08	(444.304.076.815,14)	183.175.615.286,97
2	Beban Jasa	414.136.798.874,42	415.642.681.385,77	(1.505.882.511,35)	415.509.016.754,25
3	Beban Pemeliharaan	35.259.156.728,74	37.598.020.850,74	(2.338.864.122,00)	37.863.911.461,96
4	Beban Perjalanan Dinas	136.183.516.336,00	136.183.956.336,00	(440.000,00)	154.582.100.627,00
5	Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	50.424.497.530,00	50.452.997.530,00	(28.500.000,00)	30.808.759.116,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	6.682.897.960,00	13.411.440.924,00	(6.728.542.964,00)	6.448.759.780,00
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.102.285.547,00	7.357.588.497,00	(1.255.302.950,00)	5.231.378.415,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.364.491.982,00	53.640.097.427,55	(22.275.605.445,55)	26.742.175.660,92
Jumlah		**837.838.572.194,10**	**1.316.275.787.002,14**	**(478.437.214.808,04)**	**860.361.717.102,10**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.1. Beban Barang	**157.684.927.235,94**	**183.175.615.286,97**

Beban Barang berupa konsumsi atas barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi Belanja Modal yang tidak menghasilkan Aset Tetap. Beban Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp157.684.927.235,94 dan Rp183.175.615.286,97 adapun penjelasan perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 342 Rincian Perbandingan Beban Barang LO dengan Belanja Barang LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	151.225.925.840,94	595.813.686.972,08	(444.587.761.131,14)	175.500.384.603,97
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	6.459.001.395,00	6.175.317.079,00	283.684.316,00	7.675.230.683,00
Jumlah		**157.684.927.235,94**	**601.989.004.051,08**	**(444.304.076.815,14)**	**183.175.615.286,97**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 343 Kertas Kerja Perbandingan Beban Barang LO dengan Belanja Barang LRA

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Barang	**601.989.004.051,08**
1	**Mutasi Bertambah:**	
a.	+/+ Reklasifikasi dari Aset ke Beban Barang Ekstra Komptable	1.321.817.936,00
b.	+/+ Utang Beban Barang Tahun 2025	3.556.327.652,36
c	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Barang Dana BOS/Dana BOP	6.728.542.964,00
d	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja BLUD	22.032.536.015,55
e	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja BOK	1.255.302.950,00
f	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja Tidak Terduga	206.935.000,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
g	+/+ Persediaan Awal Barang Tahun 2025	36.877.880.753,00
h	+/+ Rekasifikasi dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	398.462.167,00
i	+/+ Reklasifikasi Sesama Belanja Barang	1.901.500,00
j	+/+ Penambahan dari Beban Barang dari Hibah Barang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi	3.054.591.383,00
k	+/+ Koreksi Tambah Harga Satuan Barang	608.013.600,00
l	+/+ Koreksi Harga Karena Pecahan Desimal	3.213.287,00
m	+/+ Koreksi Tambah Karena Pinjam dan Meminjam Barang Antar RSUD	60.139.703,00
n	+/+ Koreksi Tambah Karena Return dari Pasien	5.834.422,00
o	+/+ Koreksi Tambah Karena Return dari PBF	5.819.115,00
p.	+/+ Koreksi Tambah dari Penjualan Hasil Ternak Ikan	100.520.000,00
q.	+/+ Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan	30.762.024.111,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	**106.979.862.558,91**
2	**Mutasi Berkurang:**	
a.	-/- Koreksi Tambah Harga Satuan Barang	(608.013.600,00)
b.	-/- Koreksi Harga Karena Pecahan Desimal	(3.194.740,00)
c.	-/- Reklasifikasi Sesama Belanja Barang	(1.901.500,00)
d.	-/- Rekasifikasi dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	(398.462.167,00)
e.	-/- Pelunasan Utang Tahun 2024	(15.492.752.737,05)
f.	-/- Persediaan Awal Akhir Tahun 2025	(134.419.536.393,00)
g.	-/- Reklasifikasi Dari Belanja Barang Diserakan ke Belanja Hibah	(388.916.974.236,00)
h.	-/- Reklasifikasi Dari Belanja Barang ke Aset	(10.523.658.319,00)
i.	-/- Koreksi dari Belanja Barang Ke Belanja Jasa	(20.855.200,00)
j.	-/- Koreksi Kurang Karena Barang Experied/Rusak dan Sejenisnya	(577.134.369,00)
k.	-/- Koreksi Karena Retur PBF	(14.168.767,00)
l.	-/- Koreksi Kurang Karena Pinjam Meminjam Obat dan BNHP	(74.676.550,00)
m.	-/- Koreksi Saldo AWAL Persediaan Karena Barang Experied	(956.046,00)
n.	-/- Koreksi atas Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD	(231.654.750,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(551.283.939.374,05)**
	Berdasarkan LO Beban Barang	**157.684.927.235,94**

1. Total yang menjadi penambah nilai beban barang sebesar Rp106.979.862.558,91 terdiri atas:
   a. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Aset ke Beban Barang Ekstra Komptable sebesar Rp1.321.817.936,00 yang terdiri atas Peralatan Mesin sebesar Rp 1.300.288.936,00 merupakan reklasifikasi belanja modal buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Beban Barang Exstracomptable Peralatan Mesin dan sebesar Rp21.529.000,00 merupakan reklasifikasi dari hibah csr yang dibawah nilai kapitalisasi;

   b. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Utang Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp3.556.327.652,36, rincian sebagai berikut:

Tabel 344 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Utang Belanja Barang

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	RSUD Datu Kandang Haji	Utang Belanja Obat-Obatan	1.958.870.665,81
2	RSUD Datu Kandang Haji	Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.597.456.986,55
Jumlah			**3.556.327.652,36**

Adapun rincian utang belanja dijelaskan sebagai berikut:

1) Utang belanja Obat-obatan pada Dinas Kesehatan (RSUD Datu Kandang Haji) sebesar Rp.1.958.870.665,81 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 345 Rincian Utang Belanja Obat-obatan pada Dinas Kesehatan (RSUD Datu Kandang Haji)

No	Nama Rekanan	Uraian	Nilai (Rp)
1	CV. Harapan Makmur Kita	Belanja Obat-Obatan-Obat	267.288.000,00
2	PT Anugrah Argon Medica	Belanja Obat-Obatan-Obat	348.328.934,00
3	PT United Dico Citas	Belanja Obat-Obatan-Obat	81.848.208,00
4	PT Antarmitra Sembada	Belanja Obat-Obatan-Obat	13.706.580,00
5	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Belanja Obat-Obatan-Obat	181.291.175,00
6	PT Bina San Prima	Belanja Obat-Obatan-Obat	97.473.901,00
7	PT Buana Intiprima Usaha	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.843.750,00
8	PT Daya Muda Agung	Belanja Obat-Obatan-Obat	18.814.690,00
9	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.	Belanja Obat-Obatan-Obat	263.515.262,11
10	PT Kebayoran Pharma	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.655.340,00
11	PT Kimia Farma	Belanja Obat-Obatan-Obat	62.756.065,00
12	PT Mensa Bina Sukses	Belanja Obat-Obatan-Obat	17.544.626,70
13	PT Merapi Utama Pharma	Belanja Obat-Obatan-Obat	45.704.438,00
14	PT Millennium Pharmacon International Tbk.	Belanja Obat-Obatan-Obat	106.650.881,00
15	PT Parit Padang Global	Belanja Obat-Obatan-Obat	156.829.148,00
16	PT Penta Valent	Belanja Obat-Obatan-Obat	126.425.927,00
17	PT Sapta Sari Tama	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.250.278,00
18	PT Tempo	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.530.800,00
19	PT Tri Sapta Jaya	Belanja Obat-Obatan-Obat	148.412.662,00
Jumlah			**1.958.870.665,81**

2) Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan (RSUD Datu Kandang Haji) sebesar Rp1.597.456.986,55 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 346 Rincian Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan (RSUD Datu Kandang Haji)

No	Nama Rekanan	Uraian	Nilai (Rp)
1	PT Alexa Medika	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.250.000,00
2	PT Anugerah Putera Alfathan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	42.635.100,00
3	PT Anugrah Argon Medica	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.603.000,00
4	PT Anugrah Pharmindo Lestari	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.326.290,00
5	PT Ayazkamed Dua Putera	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	51.330.872,50
6	PT Borneo Perkasa Medika	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	115.789.440,00
7	PT Doa Restu Ibu	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62.337.600,00
8	PT Edi Hari Syam	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.890.100,00
9	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.480.682,00
10	PT Gloper Prima Mandiri	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	159.675.270,00
11	PT Graha Medika Mandiri	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	780.890.550,00
12	PT Medika Nutrimed Asadtek	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.996.000,00
13	PT Mensa Binasukses	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	35.026.111,05
14	PT Merapi Utama Pharma	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	83.054.375,00
15	PT Millenium Pharmacon International	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.263.063,00
16	PT Parit Padang Global	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.399.230,00
17	PT Sinar Panca Medika	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.178.538,00
18	PT Tigamas Putera	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.058.604,00
19	PT Yamhatevy Paran Mandiri	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	146.619.661,00
20	RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.652.500,00
Jumlah			**1.597.456.986,55**

c. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Dana BOS/Dana BOP sebesar Rp6.728.542.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 347 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Dana BOS/Dana BOP

No	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	229.595.326,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.508.078.336,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.175.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	491.362.980,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	789.931.795,00
6	Belanja Bahan-Bahan Kimia	80.196.596,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	227.209.448,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.993.400,00
9	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	18.196.700,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	54.920.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.304.178,00
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.695.100,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	110.021.560,00
14	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.434.700,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.412.510.607,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.459.600,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	557.731.438,00
18	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	131.262.200,00
20	Belanja Bahan-Bahan Baku	264.000,00
Jumlah		6.728.542.964,00

d. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja BLUD sebesar Rp22,032,536,015.55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 348 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja BLUD

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.000.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	244.750.199,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.798.035.371,75
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	477.958.348,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.872.500,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.430.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.100.800,00
		Belanja Obat-Obatan-Obat	10.301.216.381,50
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.355.024.695,30

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
2	Puskesmas Paringin	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.878.900,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.450.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.324.700,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.064.750,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	17.971.800,00
3	Puskesmas Paringin Selatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.230.600,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.994.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.165.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.593.060,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.623.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	113.724.930,00
4	Blud Puskesmas Awayan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.870.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.995.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.075.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.858.250,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.720.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.480.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.955.000,00
5	Puskesmas Tebing Tinggi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.216.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.326.500,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.280.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.415.350,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.544.000,00
6	Puskesmas Lokbatu	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.920.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.550.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.920.000,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.908.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.856.500,00
7	Puskesmas Batumandi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.724.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.740.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	41.730.450,00

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	7.756.600,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.942.400,00
8	Puskesmas Halong	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.270.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.314.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.112.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.950.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.017.600,00
9	Puskesmas Lampihong	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.608.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.079.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.015.500,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	39.884.520,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	10.984.400,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.497.000,00
10	Puskesmas Tanah Habang	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.200.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.300.000,00
11	Puskesmas Juai	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.241.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.935.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	49.890.710,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	43.700.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.077.000,00
12	Puskesmas Uren	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.391.600,00
13	Puskesmas Pirsus	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.993.800,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.733.000,00
		Belanja Komponen-Komponen Lainnya	4.945.300,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.604.500,00
Jumlah			**22.032.536.015,55**

e. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Belanja BOK sebesar Rp1.255.302.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 349 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Belanja Barang Belanja BOK

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Paringin	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.790.250,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.644.000,00
2	Puskesmas Paringin Selatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.824.000,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	69.233.600,00
3	Blud Puskesmas Awayan	Belanja Natura dan Pakan-Natura	171.283.000,00
4	Puskesmas Tebing Tinggi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.226.000,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	101.844.500,00
5	Puskesmas Lokbatu	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41.049.000,00
6	Puskesmas Batumandi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.125.000,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	264.738.000,00
7	Puskesmas Halong	Belanja Natura dan Pakan-Natura	131.288.000,00
8	Puskesmas Lampihong	Belanja Natura dan Pakan-Natura	158.362.800,00
9	Puskesmas Tanah Habang	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.724.450,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	95.091.200,00
10	Puskesmas Juai	Belanja Natura dan Pakan-Natura	98.503.950,00
11	Puskesmas Uren	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	910.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.795.000,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.258.500,00
12	Puskesmas Pirsus	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.130.100,00
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.081.600,00
Jumlah			**1.255.302.950,00**

f. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp206.935.000,00.

Tabel 350 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga

No	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.375.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00
3	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.060.000,00
Jumlah		206.935.000,00

g. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Awal Barang Tahun 2025 sebesar Rp36.877.880.753,00.

Tabel 351 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Awal Barang Tahun 2025

No	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.172.085.800,00
2	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.845.250,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.030.948.441,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.218.261,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	101.540.940,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	278.859.435,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.920.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	275.943.350,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.034.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.353.310,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.170.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.240.000,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.216.700.496,00
14	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.256,00
15	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.728.704.936,00
16	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.516.769.306,00
17	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.773.337.000,00
18	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.395.374.172,00
19	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	91.626.000,00
20	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	111.204.800,00
Jumlah		36.877.880.753,00

h. Penambahan Beban Barang yang bersumber Rekasifikasi dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp398,462,167.00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

i. Penambahan Beban Barang yang bersumber Reklasifikasi Sesama Belanja Barang pada belanja alat listrik sebesar Rp1.901.500 berasal dari belanja cetak terdapat pada SKPD Kecamatan Batumandi.

j. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Penambahan dari Beban Barang dari Hibah Barang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp3.054.591.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 352 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Penambahan dari Beban Barang dari Hibah Barang oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi

No	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	280.162.337,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.366.000,00
3	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.609.807.046,00
4	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.256.000,00
Jumlah		**3.054.591.383,00**

k. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Satuan Terkecil pada belanja bahan lainnya sebesar Rp608.013.600 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.

l. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Harga Karena Pecahan Desimal sebesar Rp3.213.287,00 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.

m. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah Karena Pinjam dan Meminjam Barang Antar RSUD sebesar Rp60.139.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 353 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah Karena Pinjam dan Meminjam Barang Antar RSUD

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.389.800,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.818.871,00
		Belanja Obat-Obatan-Obat	46.931.032,00
Jumlah			**60.139.703,00**

n. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah Karena Return dari Pasien sebesar Rp5.834.422,00 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.

o. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah Karena Return dari PBF sebesar Rp5.819.115,00 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.

p. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah dari Penjualan Hasil Ternak Ikan sebesar Rp100.520.000,00.

Tabel 354 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Tambah dari Penjualan Hasil Ternak Ikan

No	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	Baung	17.850.000,00
2	Bibit Ikan Nila	23.080.000,00
3	Bibit ikan papuyu/betok	16.100.000,00
4	Lele Sangkuriang	32.675.000,00
5	Nila	2.340.000,00
6	Patin	8.475.000,00
Jumlah		**100.520.000,00**

q. Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp30.762.024.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 355 Rincian Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan

No	SKPD	Nama Akun	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Fasilitas Pendukung Polres Kab. Balangan	15.613.483.691,00
			Pagar Badan Narkotika Nasional	230.722.347,00
			Sarana dan Prasarana BNN Kab. Balangan	215.769.076,00
			Rehabilitasi Kantor BNN Kab. Balangan	244.864.488,00
			Balai Nikah Kec. Lampihong	229.795.034,00
			Perencanaan Pembangunan Kantor Lapas Kab. Balangan	99.916.511,00
			Gedung Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	4.052.218.204,00
			Perencanaan Pembuatan Site Development Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Balangan	99.805.511,00
			Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Tebing Tinggi	215.319.751,00
			Site Development SMAN 2	215.840.366,00
			Halaman KUA Paringin Selatan	230.110.669,00
			Pengawasan Site Development TK Kenanga Ds. Jungkal	230.650.700,00
			Rehab Ruang Kelas dan Kantor TK Kenanga Ds. Jungkal	230.236.738,00
			Site Development TK Teratai Ds. Kaladan	230.585.395,00
			Jalan Lingkungan Ponpes Sullamul Ulum Desa Telaga Purun RT. 1 Kecamatan Paringin Selatan	230.426.500,00
			Jalan Desa Sumber Rejeki Dusun 7 Kec. Juai	234.635.214,00

No	SKPD	Nama Akun	Nama Barang	Jumlah (Rp)
			Jalan RT. 13 Desa Sumber Rejeki	234.336.108,00
			Jalan Rt. 12 Desa Sumber Rejeki	234.407.214,00
			Jalan Desa Sumber Rejeki Rt. 5 Kec. Juai	234.609.114,00
			Jalan Desa Jimamun Kec. Lampihong	234.594.256,00
			Jalan Desa Jimamun Rt. 1 Kecamatan Lampihong	233.638.100,00
			Jalan Desa Lajar Kecamatan Lampihong	234.563.056,00
			Jalan Desa Panaitan Kec. Lampihong	234.429.956,00
			Jalan Lajar RT. 4 Kecamatan Lampihong	233.975.929,00
			Rehab TK Desa RIwa Rt. 6 Kec. Batumandi	230.375.222,00
			Jalan Desa Galumbang Kec. Juai	234.911.190,00
			Jalan Desa Galumbang Rt. 1 Kecamatan Juai	234.332.100,00
			Jalan Desa Teluk Bayur Kec. Juai	235.161.190,00
			Jalan Desa Lalayau RT. 2 Kec. Juai	234.500.190,00
			Jalan Desa Sirap RT. 1 Kec. Juai	234.692.190,00
			Jalan Desa Lampihong Kanan RT. 2 - RT. 3 Kec. Lampihong	201.201.900,00
			Jalan Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong	219.892.085,00
			Jalan Desa Kasai Rt. 02 Kecamatan Batu Mandi	234.799.700,00
			Jalan Baruh Bahinu Luar RT. 1 Kecamatan Paringin Selatan	234.373.080,00
			Jalan Desa Batu Merah RT. 4 Kecamatan Lampihong	235.011.360,00
			Jalan Desa Tanah Habang Kanan Rt. 2 Kec. Lampihong	233.735.995,00
			Jalan Desa Tanah Habang Kiri Rt. 3 Kec. Lampihong	234.592.595,00
			Jalan Desa Auh RT. 4 Kec. Tebing Tinggi	234.406.231,00
			Jalan Gunung Jajangkit Sungsum Kec. Tebing Tinggi	234.277.231,00
			Jalan Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	234.415.231,00
			Jalan Desa Sungsum Kec. Tebing Tinggi	234.454.531,00
			Jalan Lingkungan Desa Simpang Bumbuan Rt. 2	231.606.557,00
			Jalan Desa Simpang Bumbuan Rt. 2 Kec. Tebing Tinggi	233.242.540,00
			Jalan Desa Puyun Kec. Halong	235.359.400,00
			Rehab Ruang KB. Stroberi Ds. Murung Jambu	230.027.377,00
			Jalan RT. 6 Desa Sumber Agung	235.052.400,00
			Jalan RT. 3 Desa Binjai Punggal	234.687.400,00

No	SKPD	Nama Akun	Nama Barang	Jumlah (Rp)
			Jalan Rt. 4 Desa Binjai Punggal	235.838.400,00
			Jalan Desa Sungai Hanyar RT. 6 Kecamatan Batumandi	234.437.314,00
			Jalan Mampari Rt. 4 Kecamatan Batumandi	234.663.662,00
			Jalan Desa Mampari Rt. 1 Kec. Batumandi	234.690.362,00
2	SEKRETARIAT DPRD	Bahan Komputer	Kabel UTP	7.242.750,00
			Connector	1.110.000,00
Jumlah				**30.762.024.111,00**

2. Total yang menjadi pengurang nilai beban barang sebesar Rp551.283.939.374,05, terdiri atas:
   a. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Satuan Terkecil pada belanja bahan lainnya sebesar Rp608.013.600 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.
   b. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Harga Karena Pecahan Desimal pada Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp3.213.287,00 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji.
   c. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Sesama Belanja Barang pada belanja alat listrik sebesar Rp1.901.500 berasal dari belanja cetak terdapat pada SKPD Kecamatan Batumandi.
   d. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Rekasifikasi dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp398.462.167,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
   e. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Pelunasan Utang Tahun 2024 sebesar Rp15.487.278.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 356 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Pelunasan Utang Tahun 2024

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	3.881.378.432,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.139.272.254,00
3	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	2.125.446.696,00
4	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.341.181.353,00
Jumlah		**15.487.278.735,00**

f. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Awal Akhir Tahun 2025 sebesar Rp134.419.536.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 357 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Awal Akhir Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.362.183.963,00
2	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	575.484.520,00
3	Belanja Bahan-Bahan.Bibit Tanaman	186.577.296,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.772.905.423,00
5	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	82.700.568,00
6	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.436.810,00
7	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	339.751.051,00
8	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.592.000,00
9	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	416.470.194,00
10	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.109.100,00
11	Belanja Alat.Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir.Cendera Mata	10.795.000,00
12	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.849.451.134,00
13	Belanja Barang untuk Dijual.Diserahkan kepada Masyarakat	3.427.976.849,00
14	Belanja Barang untuk Dijual.Diserahkan kepada Pihak Ketiga.Pihak Lain	109.740.200.176,00
15	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis.Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis.Berjaga-jaga	23.318.200,00
16	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.553.869.109,00
17	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.715.000,00
Jumlah		**134.419.536.393,00**

g. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Dari Belanja Barang Diserahkan ke Belanja Hibah sebesar Rp388.916.974.236,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 358 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Dari Belanja Barang Diserahkan ke Belanja Hibah

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.677.423.560,00
2	Dinas Kesehatan	111.140.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	195.756.205.451,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	506.590.202,00
5	Dinas Sosial	4.123.980.558,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	774.128.710,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	166.885.255.569,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	648.413.607,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	501.821.649,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.754.259.282,00

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.477.971.784,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.690.860,00
13	Sekretariat Daerah	4.150.205.504,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.036.818.000,00
15	Kecamatan Paringin	213.058.500,00
16	BLUD Puskesmas Paringin	44.820.000,00
17	BLUD Puskesmas Paringin Selatan	37.350.000,00
18	BLUD Puskesmas Tebing Tinggi	18.675.000,00
19	BLUD Puskesmas Lokbatu	17.430.000,00
20	BLUD Puskesmas Batumandi	24.900.000,00
21	BLUD Puskesmas Tanah Habang	2.490.000,00
22	BLUD Puskesmas Lampihong	11.703.000,00
23	BLUD Puskesmas Juai	2.739.000,00
24	BLUD Puskesmas Pirsus	18.924.000,00
25	BLUD Puskesmas Halong	4.980.000,00
Jumlah		**388.916.974.236,00**

h. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Dari Belanja Barang ke Aset sebesar Rp10.523.658.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 359 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Dari Belanja Barang ke Aset

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.748.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	919.477.364,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	224.495.834,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	32.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.527.739.621,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.596.000,00
7	Kecamatan Batumandi	3.000.000,00
8	Kecamatan Juai	2.250.000,00
9	Kecamatan Paringin	45.290.000,00
10	Kecamatan Paringin Selatan	12.324.000,00
11	Sekretariat Daerah	1.571.737.500,00
Jumlah		**10.523.658.319,00**

i. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi dari Belanja Barang Ke Belanja Jasa sebesar Rp20.855.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 360 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Belanja Barang ke Belanja Jasa

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Jumlah (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.200.000,00
			550.000,00
			1.200.000,00
			2.000.000,00
			550.000,00
			1.000.000,00
			500.000,00
			600.000,00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Jasa Instalasi Listrik Stand Expo Hari Jadi Kabupaten Balangan	3.500.000,00
3	INSPEKTORAT	Alat listrik dan jaringan	9.755.200,00
Jumlah			**20.855.200,00**

j. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Kurang Karena Barang Experied/Rusak dan Sejenisnya sebesar Rp577.134.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 361 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Kurang Karena Barang Expired/Rusak dan Sejenisnya

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Nama Akun	Jumlah (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	expired	Bahan Lainnya	275.162.723,00
2	DINAS KESEHATAN	expired	Obat	144.026.515,00
3	RSDKH	expired	Bahan Lainnya	28.831.813,00
4	RSDKH	expired	Obat	66.544.943,00
5	BLUD PUSKESMAS PARINGIN	expired	Bahan Lainnya	747.368,00
6	BLUD PUSKESMAS PARINGIN	expired	Obat	1.236.457,00
7	BLUD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN	expired	Bahan Lainnya	10.543.196,00
8	BLUD PUSKESMAS PARINGIN SELATAN	expired	Obat	5.404.608,00
9	BLUD PUSKESMAS AWAYAN	expired	Bahan Lainnya	3.483.222,00

No	SKPD	Jenis (Utang Belanja Barang)	Nama Akun	Jumlah (Rp)
10	BLUD PUSKESMAS AWAYAN	expired	Obat	4.339.506,00
11	BLUD PUSKESMAS LOKBATU	expired	Bahan Lainnya	1.939.046,00
12	BLUD PUSKESMAS LOKBATU	expired	Obat	2.208.530,00
13	BLUD PUSKESMAS BATUMANDI	expired	Bahan Lainnya	1.258.257,00
14	BLUD PUSKESMAS BATUMANDI	expired	Obat	3.187.100,00
15	BLUD PUSKESMAS TANAH HABANG	expired	Bahan Lainnya	852.274,00
16	BLUD PUSKESMAS TANAH HABANG	expired	Obat	3.989.658,00
17	BLUD PUSKESMAS JUAI	expired	Bahan Lainnya	425.920,00
18	BLUD PUSKESMAS JUAI	expired	Obat	3.754.944,00
19	BLUD PUSKESMAS PIRSUS	expired	Bahan Lainnya	5.525.986,00
20	BLUD PUSKESMAS PIRSUS	expired	Obat	4.379.596,00
21	BLUD PUSKESMAS HALONG	expired	Obat	1.680.830,00
22	BLUD PUSKESMAS UREN	expired	Obat	621.412,00
23	BLUD PUSKESMAS TEBING TINGGI	expired	Obat	3.622.129,00
24	BLUD PUSKESMAS TEBING TINGGI	expired	Bahan Lainnya	489.177,00
25	BLUD PUSKESMAS LAMPIHONG	expired	Obat	1.715.016,00
26	BLUD PUSKESMAS LAMPIHONG	expired	Bahan Lainnya	870.333,00
27	DINAS KESEHATAN	rusak	Bahan Lainnya	275.000,00
28	DINAS KESEHATAN	rusak	Obat	18.810,00
Jumlah				**577.134.369,00**

k. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Karena Retur PBF sebesar Rp14.168.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 362 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Karena Retur PBF

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	13.628.967,00
2	Dinas Kesehatan	539.800.00
Jumlah		**14.168.767,00**

l. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Kurang Karena Pinjam Meminjam Obat dan BNHP sebesar Rp74,676,550.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 363 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Kurang Karena Pinjam Meminjam Obat dan BNHP

No	SKPD	Nama Akun	Jenis	Jumlah (Rp)
1	RSDKH	Bahan Lainnya	peminjaman	1.067.361,00
2	RSDKH	Obat	peminjaman	37.280.939,00
3	DINAS KESEHATAN	Obat	peminjaman	434.000,00
4	RSDKH	Obat	pengembalian	34.674.250,00
5	DINAS KESEHATAN	Obat	pengembalian	1.220.000,00
Jumlah				**74.676.550,00**

m. Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Saldo Awal Persediaan Karena Barang Experied sebesar Rp956.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 364 Rincian Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Saldo AWAL Persediaan Karena Barang Experied

No	SKPD	Nama Akun	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	BLUD PKM LAMPIHONG	Obat	Pil Progestin (KB)	956.046,00
Jumlah				956.046,00

n. Pengurangan Beban Berang yang bersumber dari koreksi atas Pengembalian dari temuan Pemeriksa sebesar Rp231.654.750,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.2. Beban Jasa	**414.136.798.874,32**	**415.509.016.754,25**

Beban Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp414.136.798.874,32 dan Rp415.509.016.754,25 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 365 Rincian Perbandingan Beban Jasa LO dengan Beban Jasa LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	227.206.914.964,67	228.418.217.716,02	(1.211.302.751,35)	232.935.803.453,25
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47.102.990.829,00	47.103.534.069,00	(543.240,00)	42.180.752.096,00
3	Beban Sewa Tanah	215.442.000,00	215.442.000,00	-	36.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.772.168.363,00	2.772.168.363,00	-	2.532.283.963,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	21.100.000,00	21.100.000,00	-	897.754.700,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	365.000.000,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	136.000.000,00	136.000.000,00	-	6.362.690.229,00

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	349.040.370,00	446.066.371,00	(97.026.001,00)	17.647.754.300,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	26.338.876.700,75	26.535.887.219,75	(197.010.519,00)	-
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	109.740.001.647,00	109.740.001.647,00	-	112.315.828.013,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	57.794.000,00	57.794.000,00	-	55.330.000,00
12	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	196.470.000,00	196.470.000,00	-	179.820.000,00
Jumlah		**414.136.798.874,42**	**415.642.681.385,77**	**(1.505.882.511,35)**	**415.509.016.754,25**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 366 Kertas Kerja Perbandingan Beban Jasa LO dengan Beban Jasa LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Jasa	**415.642.681.385,77**
	Mutasi Bertambah:	
	+/+ Utang Beban Jasa Tahun 2025	3.508.288.428,65
	+/+ Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	11.000.000,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	**3.519.288.428,65**
	Mutasi Berkurang:	
	-/- Pelunasan Utang Beban Jasa Tahun 2024	(4.735.794.200,00)
	-/- Reklasifikasi Beban Jasa Ke Aset	(123.146.740,00)
	'-/- Reklasifikasi ke Piutang Lain-lain PAD	(166.230.000,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(5.025.170.940,00)**
	Berdasarkan LO Beban Jasa	**414.136.798.874,42**

a. Penambahan Beban Jasa yang bersumber dari Utang Belanja Jasa tahun 2025 yang akan dibayar pada Tahun 2026 sebesar Rp3.508.288.428,65, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Utang jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.850.000,00;
   2) Utang jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.450.000,00;
   3) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji sebesar Rp3.014.000.074,50;

4) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.236.180.240,70 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 367 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Awayan	35.630.520,00
2	Puskesmas Batumandi	1.054.260,00
3	Puskesmas Halong	64.441.618,00
4	Puskesmas Juai	17.161.740,00
5	Puskesmas Lampihong	17.507.520,00
6	Puskesmas Lokbatu	4.541.520,00
7	Puskesmas Paringin	74.262.342,20
8	Puskesmas Paringin Selatan	13.433.040,00
9	Puskesmas Pirsus	2.819.380,00
10	Puskesmas Tanah Habang	2.194.740,00
11	Puskesmas Tebing Tinggi	5.969.520,00
12	Rumah Sakit Datu Kandang Haji	997.164.040,50
Jumlah		**1.236.180.240,70**

5) Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp11.165.911,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 368 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.333.267,00
2	Kecamatan Juai	429.850,00
3	Puskesmas Batumandi	1.001.500,00
4	Puskesmas Paringin	1.689.150,00
5	Puskesmas Paringin Selatan	1.261.800,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	1.450.344,00
Jumlah		**11.165.911,00**

6) Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.840.020,00;

7) Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp6.886.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 369 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.607.500,00
2	Kecamatan Batumandi	279.000,00
Jumlah		**6.886.500,00**

8) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp187.187.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 370 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	956.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	95.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.877.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.010.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	993.500,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	994.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.500,00
8	Dinas Kesehatan	933.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.460.900,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	47.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	2.717.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.701.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.804.500,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	296.000,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.816.700,00
16	Dinas Perhubungan	1.085.500,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.599.900,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.813.200,00
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.752.500,00
20	Dinas Sosial	47.000,00
21	Inspektorat	367.000,00
22	Kecamatan Awayan	304.200,00
23	Kecamatan Batumandi	291.000,00
24	Kecamatan Halong	424.000,00
25	Kecamatan Juai	546.000,00
26	Kecamatan Lampihong	271.200,00
27	Kecamatan Paringin	1.063.700,00
28	Kecamatan Paringin Selatan	867.500,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	623.000,00
30	Puskesmas Awayan	3.364.500,00
31	Puskesmas Batumandi	490.500,00
32	Puskesmas Halong	301.500,00
33	Puskesmas Juai	621.000,00
34	Puskesmas Lampihong	613.500,00
35	Puskesmas Paringin	1.506.900,00
36	Puskesmas Paringin Selatan	433.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
37	Puskesmas Pirsus	744.700,00
38	Puskesmas Tanah Habang	190.700,00
39	Puskesmas Tebing Tinggi	700.000,00
40	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	52.671.500,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja	562.000,00
42	Sekretariat Daerah	84.456.400,00
43	Sekretariat DPRD	1.725.000,00
Jumlah		**187.187.000,00**

9) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp51.409.803,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 371 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Jasa Kantor-Tagihan Listrik

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	27.791.312,00
2	Kecamatan Batumandi	6.416.480,00
3	Kecamatan Juai	6.498.656,00
4	Puskesmas Batumandi	2.048.544,00
5	Puskesmas Halong	1.672.550,00
6	Puskesmas Juai	2.202.220,00
7	Puskesmas Paringin	2.957.553,00
8	Puskesmas Tanah Habang	1.045.908,00
9	Puskesmas Tebing Tinggi	776.580,00
Jumlah		**51.409.803,00**

b. Pengurangan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp4.735.794.200,00 penyelesaian utang beban Tahun 2024 di Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut::

1) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi NonASN sebesar Rp241.440,00 pada skpd Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp301.800,00 pada skpd Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan sebesar RP4.313.435.506,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 372 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	4.120.893.506,00
2	Dinas Kesehatan	192.542.000,00
JUMLAH		**4.313.435.506,00**

4) Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp5.245.142,00 pada skpd Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji;

5) Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman sebesar Rp1.366.877,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;

6) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp186.523.800,00 dengan rincian skpd berikut:

Tabel 373 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	77.175.200,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.509.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	1.405.500,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	47.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	383.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.089.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	940.500,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.241.000,00
9	Sekretariat DPRD	1.845.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.500,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	527.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.500,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.122.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.340.000,00
15	Dinas Perhubungan	2.843.400,00
16	Kecamatan Paringin Selatan	614.500,00
17	Kecamatan Paringin	1.369.900,00
18	Kecamatan Halong	618.600,00
19	Kecamatan Lampihong	297.600,00
20	Inspektorat	47.500,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.358.900,00
22	Kecamatan Awayan	495.600,00
23	Dinas Sosial	331.500,00
24	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.635.500,00
25	Dinas Kesehatan	11.012.600,00
26	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.369.700,00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.973.500,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	57.732.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
29	Kecamatan Tebing Tinggi	3.493.500,00
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.420.000,00
31	Kecamatan Batumandi	190.300,00
JUMLAH		**186.523.800,00**

7) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp224.019.855,00 dengan rincian skpd berikut :

Tabel 374 Rincian Utang Beban Belanja Jasa Kantor--Tagihan Listrik

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	8.879.703,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji	156.504.100,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17.556.152,00
4	Dinas Perhubungan	41.079.900,00
JUMLAH		**224.019.855,00**

8) Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp4.659.780,00 pada skpd dinas pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengurangan Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp123.146.740,00 dikarenakan reklasifikasi dari Beban Jasa Ke Aset Tetap:
   1) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp29.330.739,00; dan
   2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp45.016.050,00. Dan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp48.799.951,00.

d. Pengurangan beban jasa tahun 2025 sebesar Rp166.230.000,00 dikarenakan reklasifikasi dari Beban Jasa ke Piutang Lain-Lain PAD:
   1) Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Marka Jalan dan Pagar Pengaman Pengguna Jalan/Guadrail pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.210.000,00;
   2) Terdapat kelebihan pembayaran pada Belanja Jasa Konsultansi Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Balangan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp20.750.000,00; dan
   3) Terdapat kelebihan pembayaran pada belanja Jasa Konsultansi SID Kawasan Agropolitan Kabupaten Balangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp142.270.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan	**35.259.156.728,74**	**37.863.911.461,96**

Beban Pemeliharaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.259.156.728,74 dan Rp37.863.911.461,96 terdiri atas Beban sebagai berikut:

Tabel 375 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan Beban Pemeliharaan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.562.761.365,00	8.562.761.365,00	-	11.548.414.609,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.656.717.006,74	10.034.576.003,74	(2.377.858.997,00)	14.291.883.403,96
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.020.683.357,00	18.981.688.482,00	38.994.875,00	11.924.113.449,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	18.995.000,00	18.995.000,00	-	99.500.000,00
Jumlah		**35.259.156.728,74**	**37.598.020.850,74**	**(2.338.864.122,00)**	**37.863.911.461,96**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 376 Kertas Kerja Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Pemeliharaan	**37.598.020.850,74**
	Mutasi Bertambah:	
a.	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.735.425,00
.	+/+ Reklasifikasi dari Belanja Barang	20.855.200,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	**448.590.625,00**
b.	**Mutasi Berkurang:**	
c.	'-/- Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2024	(495.392.000,00)
	-/- Reklasifikasi Berkurang ke Aset Tetap	(2.060.579.497,00)
	-/- Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD	(231.483.250,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(2.787.454.747,00)**
	Berdasarkan LO Beban Pemeliharaan	**35.259.156.728,74**

a. Penambahan Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp448.590.625,00 merupakan utang belanja pemeliharaan dengn rincian sebagai berikut:

1) Penambahan Beban Pemeliharaan tahun 2025 bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp427.735.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 377 Rincian Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Belanja Marka Jalan / Rambu tak Bersuar	425.260.425,00
2	Jasa Bongkaran HPL	2.475.000,00
JUMLAH		**427.735.425,00**

2) Penambahan Beban Pemeliharaan tahun 2025 bersumber dari Reklasifikasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp20.855.200 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 378 Rincian Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	06.01.01.00.000 - INSPEKTORAT	9.755.200,00
2	05.02.01.00.000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.500.000,00
3	01.01.01.00.000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.600.000,00
JUMLAH		**20.855.200,00**

3) Penambahan Beban Pemeliharaan tahun 2025 bersumber dari Utang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp495.392.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 379 Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2025 bersumber dari Utang Tahun Anggaran 2024

No	Utang	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan AirIrigasi Lainnya	199.277.000,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	296.115.000,00
JUMLAH		**495.392.000,00**

4) Penambahan Beban Pemeliharaan Rp199.277.000,00 bersumber dari Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5) Penambahan Beban Pemeliharaan sebesar Rp296.115.000,00 bersumber dari Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 380 Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.763.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95.545.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.807.000,00
JUMLAH		**296.115.000,00**

b. Pengurangan beban pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp2.060.579.497,00, adapun rincian pengurangan beban pemeliharaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Berupa Gedung Kantor Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja berupa gedung kantor sebesar Rp1.906.895.519,00. Adapun rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut:

Tabel 381 Rincian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	198.304.719,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.897.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	348.792.000,00
4	Dinas Sosial	211.323.100,00
5	Sekretariat Daerah	755.578.700,00
JUMLAH		**1.906.895.519,00**

2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja berupa bangunan parkir sebesar Rp153.683.978,00 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

d. Pengurangan beban pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp231.483.250,00 adapun rincian pengurangan beban pemeliharaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengurangan beban pemeliharaan pada tahun 2025 atas kurang volume sebesar Rp23.639.500,00. Adapun rincian per SKPD tersaji pada tabel berikut

Tabel 382 Rincian Kurang Volume

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	12.460.300,00
2	Dinas Sosial	11.179.200,00
JUMLAH		**23.639.500,00**

2) Pengurangan beban pemeliharaan pada tahun 2025 atas kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp207.843.750,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas	**136.183.516.336,00**	**154.582.100.627,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban tersebut untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp136.183.516.336,00 dan Rp154.582.100.627,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 383 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	111.987.925.987,00	111.988.365.987,00	(440.000,00)	130.536.193.879,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.926.215.199,00	16.926.215.199,00	-	19.370.680.068,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.024.970.400,00	7.024.970.400,00	-	3.568.504.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	244.404.750,00	244.404.750,00	-	1.106.722.680,00
Jumlah		**136.183.516.336,00**	**136.183.956.336,00**	**(440.000,00)**	**154.582.100.627,00**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 384 Kertas Kerja Perhitungan Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Perjalanan Dinas	**136.183.956.336,00**
	Mutasi Bertambah:	
a.	+/+ Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025	1.460.000,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	**1.460.000,00**
	Mutasi Berkurang:	
b.	-/+ Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024	(1.900.000,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(1.900.000,00)**
	Berdasarkan LO Beban Belanja Perjalanan Dinas	**136.183.516.336,00**

Penambahan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp1.460.000,00 disebabkan karena terdapat Utang Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 yang akan

dibayarkan pada tahun 2026 pada SKPD RSUD Datu Kandang Haji sedangkan pengurang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp1.900.000,00 merupakan Utang Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 yang dibayar pada Tahun 2025 pada SKPD RSUD Datu Kandang Haji.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.5. Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	**50.422.497.530,00**	**30.808.759.116,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kelompok Masyarakat. Beban tersebut untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp50.422.497.530,00 dan Rp30.808.759.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 385 Rincian Perbandingan Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat LO dengan Belanja LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.402.729.212,00	2.402.729.212,00	-	2.352.952.600,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	713.566.300,00	713.566.300,00	-	192.587.000,00
3	Beban Beasiswa	43.471.338.257,00	43.471.338.257,00	-	23.500.323.516,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	1.907.120.000,00
5	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	8.270.000,00	8.270.000,00	-	15.920.000,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.576.593.761,00	3.605.093.761,00	(28.500.000,00)	2.809.856.000,00
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah		**50.422.497.530,00**	**50.450.997.530,00**	**(28.500.000,00)**	**30.808.759.116,00**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 386 Kertas Kerja Perhitungan Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat LO dengan Belanja LRA

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	**50.450.997.530,00**
	Mutasi Bertambah:	
a.	+/+ Utang Beban Tahun 2025	-
	Jumlah Mutasi Bertambah	**-**
	Mutasi Berkurang:	
b.	+/+ Utang Beban Tahun 2024	(28.500.000,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(28.500.000,00)**
	Berdasarkan LO Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	**50.422.497.530,00**

1. Pengurangan Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp28.500.000,00 merupakan Utang Beban tahun 2024 yang akan dibayarkan pada tahun 2025 pada RSUD Datu Kandang Haji (Sesuai dengan LK BLUD).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP	**6.682.897.960,00**	**6.448.759.780,00**

Beban Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP merupakan belanja dengan sumber pendapatan DAK-Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan yang langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah dari RKUN yang digunakan untuk belanja barang dan jasa pada sekolah negeri tingkat SD dan SMP untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp682.897.960,00 dan Rp6.448.759.780,00 adapun penjelasan perbedaan antara LO dengan LRA sebagai berikut:

Tabel 387 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOS/BOP LO dengan Beban Barang dan Jasa BOS/BOP LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOS/ BOP	6.682.897.960,00	13.411.440.924,00	(6.728.542.964,00)	6.448.759.780,00
Jumlah		**6.682.897.960,00**	**13.411.440.924,00**	**(6.728.542.964,00)**	**6.448.759.780,00**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 388 Kertas Kerja Perhitungan Beban Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP LO dengan Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP	**13.411.440.924,00**
	Mutasi Berkurang:	
a.	-/- Reaklisifikasi ke Jenis Beban Barang Yang Sesuai	(6.728.542.964,00)
b.	-/- Reaklisifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	-
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(6.728.542.964,00)**
	Berdasarkan LO Beban Barang dan Jasa BOS/BOP	**6.682.897.960,00**

a. Pengurangan beban Beban Barang dan Jasa BOS/BOP/BOSP merupakan Reaklisifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS ke Jenis Beban Barang yang sesuai dengan jenis barangnya sebesar Rp6.835.620.313,00, dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 389 Rincian Reaklisifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS ke Jenis Beban Barang yang sesuai dengan jenis barangnya

No	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	491.362.980,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	80.196.596,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	264.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	18.196.700,00
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.993.400,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.508.078.336,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.304.178,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	789.931.795,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	54.920.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	227.209.448,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.412.510.607,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	229.595.326,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.459.600,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	557.731.438,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	131.262.200,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.175.000,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat	110.021.560,00
18	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.434.700,00
19	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00
20	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.695.100,00
Jumlah		**6.728.542.964,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	**6.102.285.547,00**	**5.231.378.415,00**

Tabel 390 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Barang dan Jasa BOK	6.102.285.547,00	7.357.588.497,00	(1.255.302.950,00)	5.231.378.415,00
Jumlah		**6.102.285.547,00**	**7.357.588.497,00**	**(1.255.302.950,00)**	**5.231.378.415,00**

Tabel 391 Kertas Kerja Perhitungan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Barang dan Jasa BOK Puskesmas	**7.357.588.497,00**
Mutasi Berkurang:	
-/- Reaklisifikasi ke Jenis Beban Barang Yang Sesuai	(1.255.302.950,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(1.255.302.950,00)**
Berdasarkan LO Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	**6.102.285.547,00**

Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan Rekalisifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas ke beban yang sesuai dengan posnya sebesar Rp1.255.302.950,00, dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 392 Rincian Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.439.800,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.485.000,00
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.236.378.150,00
Jumlah		**1.255.302.950,00**

5.4.2.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
31.364.491.982,00	**26.742.175.660,92**

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa pada RSUD Datu Kandang Haji yang bersumber dari Pendapatan Pelayanan pada BLUD untuk tahun yang berakhir sampaai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.364.491.982,00 dan Rp26.742.175.660,92 adapun penjelasan perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 393 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BLUD dengan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.364.491.982,00	53.640.097.427,55	(22.275.605.445,55)	26.742.175.660,92
Jumlah		**31.364.491.982,00**	**53.640.097.427,55**	**(22.275.605.445,55)**	**26.742.175.660,92**

Tabel 394 Kertas Kerja Perhitungan Beban Barang dan Jasa BLUD LO dengan Belanja Barang dan Jasa BLUD LRA

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Barang dan Jasa BLUD	**53.640.097.427,55**
Mutasi Berkurang:	
-/- Reaklisifikasi ke Jenis Beban Barang Yang Sesuai	(22.032.536.015,55)
-/- Reklasifikasi ke Aset Tetap	(243.069.430,00)

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Jumlah Mutasi Berkurang	**(22.275.605.445,55)**
Berdasarkan LO Beban Barang dan Jasa BLUD	**31.364.491.982,00**

1. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Rekalisifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD ke beban yang sesuai dengan posnya sebesar Rp22.032.536.015,55, dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 395 Rincian Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	113.724.930,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.041.814.061,75
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	529.600.348,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95.600.200,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	338.149.699,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.150.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.911.300,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	46.827.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.430.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.100.800,00
11	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.301.216.381,50
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.355.024.695,30
13	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	96.986.100,00
Jumlah		**22.032.536.015,55**

a. reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp243.069.430,00, dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 396 Rincian Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14.700.000,00
2	Gedung dan Bangunan	228.369.430,00
Jumlah		243.069.430,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.3. Beban Hibah	**503.224.596.259,91**	**628.239.433.873,65**

Beban Hibah merupakan Kewajiban Pemkab Balangan atas pemberian hibah. Pengelolaan Hibah diatur melalui Perbup Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemkab Balangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan. Beban Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp503.224.596.259,91 dan Rp628.239.433.873,65, adapun penjelasan perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 397 Rincian Perbandingan Beban Hibah LO dengan Beban Hibah LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.492.176.000,00	3.492.176.000,00	-	6.722.600.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.249.209.017,91	28.794.528.497,91	(545.319.480,00)	61.285.448.266,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.831.408.400,00	2.831.408.400,00	-	5.075.000.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	433.230.489.639,00	44.670.860.028,00	388.559.629.611,00	480.120.671.538,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.532.243.634,00	28.532.243.634,00	-	68.874.645.040,00
6	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	248.527.100,00	248.527.100,00	-	300.000.000,00
7	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.231.875.000,00	1.231.875.000,00	-	741.158.332,65
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	854.405.500,00	854.405.500,00	-	5.119.910.697,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.658.374.000,00	2.658.374.000,00	-	-
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.895.887.969,00	1.895.887.969,00	-	-
Jumlah		**503.224.596.259,91**	**115.210.286.128,91**	**388.014.310.131,00**	**628.239.433.873,65**

Perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 398 Kertas Kerja Perbandingan Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Hibah	**115.210.286.128,91**
	Mutasi Tambah:	
a.	+/+ Reklasifikasi Bertambah dari Beban Hibah Uang/Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain	388.415.091.946,00
	Jumlah Mutasi Bertambah	**388.415.091.946,00**
	Mutasi Berkurang:	
b	-/- Pembayaran Utang Beban Tahun 2024	(357.344.625,00)
c	-/- Reklasifikasi ke Piutang Lain-Lain PAD	(43.437.190,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(400.781.815,00)**
	Berdasarkan LO Beban Hibah	**503.224.596.259,91**

a. Reklasifikasi Bertambah dari Belanja Barang diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp388.415.091.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 399 Rincian Reklasifikasi dari Beban Hibah

No.	SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	5.754.259.282,00
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.477.971.784,00
3	Sekretariat Daerah	4.150.205.504,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	115.690.860,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	3.036.818.000,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Serta Tenaga Kerja	501.821.649,00
7	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	648.413.607,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	166.383.373.279,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	774.128.710,00
10	Dinas Sosial	4.123.980.558,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	506.590.202,00
12	Dinas Kesehatan	111.140.000,00
13	Blud Puskesmas Paringin	44.820.000,00
14	Blud Puskesmas Paringin Selatan	37.350.000,00
15	Blud Puskesmas Tebing Tinggi	18.675.000,00
16	Blud Puskesmas Lokbatu	17.430.000,00
17	Blud Puskesmas Batumandi	24.900.000,00
18	Blud Puskesmas Tanah Habang	2.490.000,00
19	Blud Puskesmas Lampihong	11.703.000,00
20	Blud Puskesmas Juai	2.739.000,00
21	Blud Puskesmas Pirsus	18.924.000,00
22	Blud Puskesmas Halong	4.980.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	195.756.205.451,00
24	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.677.423.560,00
25	Kecamatan Paringin	213.058.500,00
TOTAL		**388.415.091.946,00**

b. Berkurang Beban Hibah Tahun 2025 terdiri dari Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp357.344.625,00, Dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi berkurang dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp357.344.625,00, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 400 Rincian Reklasifikasi dari Beban Hibah

No	Nama SKPD	Utang	Jenis	Nilai (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Pembayaran	236.998.625,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Pembayaran	120.346.000,00
Jumlah				357.344.625,00

c. Berkurang Reklasifikasi ke Piutang lain-lain PAD merupakan kelebihan pembayaran atas pekerjaan atas hasil temuan dari pemeriksaan sebesar Rp43.437.190,00.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.4.	**Beban Bantuan Sosial**	**8.932.005.000,00**	**9.013.922.500,00**

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan Bantuan Sosial diatur melalui Perbup Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemkab Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Balangan. Beban Bantuan Sosial untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.932.005.000,00 dan Rp9.013.922.500,00 terdiri atas Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Kelompok Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 401 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.629.300.000,00	1.629.300.000,00	-	415.600.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.068.600.000,00	2.068.600.000,00	-	2.868.100.000,00

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	272.807.500,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.234.105.000,00	5.234.105.000,00	-	5.457.415.000,00
Jumlah		**8.932.005.000,00**	**8.932.005.000,00**	**0,00**	**9.013.922.500,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1.5. Beban Lain-lain	**-**	**24.988.527.831,00**

Beban Lain-lain merupakan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 PP 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Beban Lain-lain untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp24.988.527.831,00,

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.1. Beban Penyisihan Piutang	**590.550.601,81**	**79.243.143,25**

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi piutang yang tidak dapat ditagih dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp590.550.601,81 dan Rp79.243.143,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 402 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	500.464.166,15	510.600,65
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	59.833.200,00	30.188.250,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.253.235,66	48.544.292,60
Jumlah		**590.550.601,81**	**79.243.143,25**

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.2.1. Beban Penyisihan Piutang Pajak	**500.464.166,150**	**510.600,65**

Beban Penyisihan Piutang Pajak adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp500.464.166,150 dan Rp510.600,65, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 403 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	461.145.715,35	-
2	Beban Penyisihan Piutang Reklame	-	48.499,38
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	-
4	Beban Penyisihan Pajak Katering	-	394.268,73
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak PBJT-Restoran	84.555,0	-
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.125.229,67	-
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	32.283.708,62	-
8	Beban Penyisihan Pajak Kebugaran	-	250,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL)	-	67.582,54
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	820.337,51	-
11	Beban Penyesihan Pajak PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.620,00	-
Jumlah		**500.464.166,15**	**510.600,65**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.2.2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	**59.833.200,00**	**30.188.250,00**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Penyisihan Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp59.833.200,00 dan Rp30.188.250,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 404 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	25.881.250,00	9.864.175,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	33.951.950,00	20.324.075,00
Jumlah		**59.833.200,00**	**30.188.250,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.2.3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**30.253.235,66**	**48.544.292,60**

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.253.235,66 dan Rp48.544.292,60. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyisihan piutang dari Pendapatan dari BLUD.

5.4.1.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	393.675.969.251,00	**385.293.693.994,00**

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk ATB.

Beban Penyusutan merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp393.675.969.251,00 dan Rp385.293.693.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 405 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	133.041.894.929,00	129.417.993.585,00
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	63.715.722.238,00	62.988.718.821,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	195.815.684.059,00	191.792.727.531,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	82.499.476,00	82.891.227,00
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.020.168.549,00	1.004.727.830,00
6	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	-	6.635.000,00
Jumlah		**393.675.969.251,00**	**385.293.693.994,00**

5.4.2.3.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	133.041.894.929,00	**129.417.993.585,00**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp133.041.894.929,00 dan Rp129.417.993.585,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 406 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	42.784.753.800,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22.371.479.508,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4.380.321.735,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	512.285.407,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.674.778.304,00
6	Dinas Sosial	712.950.248,00
7	Dinas Satpol Pamong Praja	737.947.663,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.111.385.966,00
9	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	4.267.330.182,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	937.212.305,00
11	Dinas Perhubungan	14.791.759.280,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	1.051.624.981,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	724.359.241,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	782.755.436,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2.215.857.503,00

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	1.065.167.980,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.535.581.918,00
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	763.964.546,00
19	Sekretariat Daerah	15.235.365.976,00
20	Sekretariat Dprd	4.252.026.057,00
21	Kecamatan Lampihong	445.003.429,00
22	Kecamatan Batumandi	469.701.745,00
23	Kecamatan Awayan	408.631.570,00
24	Kecamatan Halong	464.085.517,00
25	Kecamatan Tebing Tinggi	573.845.403,00
26	Kecamatan Juai	454.558.300,00
27	Kecamatan Paringin	1.133.509.759,00
28	Kecamatan Paringin Selatan	684.987.604,00
29	Inspektorat	1.120.100.149,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.018.205.211,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	3.118.449.453,00
32	Pengelola	297.116.111,00
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	944.792.642,00
Jumlah		**133.041.894.929,00**

Tabel 407 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.555.174.813,00
2	Dinas Kesehatan	43.884.026.774,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.414.878.124,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.093.383.838,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	493.562.226,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	624.193.280,00
7	Dinas Sosial	705.509.988,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.116.381.314,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.165.029.241,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4.167.212.762,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	929.569.616,00
12	Dinas Perhubungan	13.678.630.708,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.012.840.056,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	891.956.890,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.501.676.937,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	602.162.957,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	763.507.985,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	662.256.268,00
19	Sekretariat Daerah	14.136.391.360,00
20	Sekretariat DPRD	4.434.627.672,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.005.523.751,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.696.492.159,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	924.842.114,00
24	Inspektorat	893.941.732,00
25	Kecamatan Lampihong	444.238.620,00
26	Kecamatan Batumandi	466.599.292,00
27	Kecamatan Awayan	407.755.396,00
28	Kecamatan Halong	463.231.505,00
29	Kecamatan Juai	455.664.648,00

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
30	Kecamatan Paringin	781.460.605,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi	525.506.993,00
32	Kecamatan Paringin Selatan	519.763.961,00
Jumlah		**129.417.993.585,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.3.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**63.715.722.238,00**	**62.988.718.821,00**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp63.715.722.238,00 dan Rp62.988.718.821,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 408 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.388.434.630,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	18.856.523.066,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	13.845.477.101,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	269.987.602,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.083.326,00
6	Dinas Sosial	149.983.083,00
7	Dinas Satpol Pamong Praja	86.937.195,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	311.607.280,00
9	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	920.386.115,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	272.242.239,00
11	Dinas Perhubungan	403.779.444,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	436.527.631,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	895.468.651,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	415.752.928,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2.567.563.993,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	1.519.634.596,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.601.707.545,00
18	Sekretariat Daerah	6.593.145.879,00
19	Sekretariat Dprd	985.880.438,00
20	Kecamatan Lampihong	442.685.254,00
21	Kecamatan Batumandi	375.544.525,00
22	Kecamatan Awayan	255.735.331,00
23	Kecamatan Halong	250.250.832,00
24	Kecamatan Tebing Tinggi	335.523.905,00
25	Kecamatan Juai	337.496.884,00
26	Kecamatan Paringin	584.713.165,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	225.809.543,00
28	Inspektorat	467.648.888,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	478.412.715,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1.179.609.396,00
31	Pengelola	654.445.864,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	450.723.194,00
Jumlah		**63.715.722.238,00**

Tabel 409 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.839.904.507,00
2	Dinas Kesehatan	6.403.222.130,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.583.867.612,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	134.093.691,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.699.951,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	86.653.718,00
7	Dinas Sosial	138.194.288,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	436.966.057,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.577.526.662,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	893.669.879,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247.810.655,00
12	Dinas Perhubungan	401.239.013,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	424.838.145,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	1.436.411.829,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	212.197.365,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	701.662.354,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	352.879.587,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.280.266.908,00
19	Sekretariat Daerah	6.588.238.290,00
20	Sekretariat DPRD	918.193.039,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	422.220.042,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.614.715.536,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	444.507.568,00
24	Inspektorat	468.665.426,00
25	Kecamatan Lampihong	311.421.428,00
26	Kecamatan Batumandi	346.806.899,00
27	Kecamatan Awayan	208.270.859,00
28	Kecamatan Halong	250.466.622,00
29	Kecamatan Juai	314.543.035,00
30	Kecamatan Paringin	584.556.773,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi	88.230.612,00
32	Kecamatan Paringin Selatan	221.778.341,00
Jumlah		**62.988.718.821,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.3.3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	**195.815.684.059,00**	**191.792.727.531,00**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp195.815.684.059,00 dan Rp191.792.727.531,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 410 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.178.946.578,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	334.551.637,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	179.940.264.657,00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	86.664,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.985.726.448,00
6	Dinas Sosial	6.464.748,00
7	Dinas Satpol Pamong Praja	159.700,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.304.159.072,00
9	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	358.552.704,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	11.302.148,00
11	Dinas Perhubungan	15.768.445,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	53.966.738,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	41.025.523,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	27.573.696,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	427.488.710,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	172.176.833,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.872.216,00
18	Sekretariat Daerah	122.414.919,00
19	Sekretariat DPRD	60.443.939,00
20	Kecamatan Lampihong	243.375,00
21	Kecamatan Batumandi	745.800,00
22	Kecamatan Halong	301.596,00
23	Kecamatan Tebing Tinggi	521.834,00
24	Kecamatan Juai	150.000,00
25	Kecamatan Paringin	359.875.378,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	290.460.513,00
27	Inspektorat	26.237.795,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	11.681.732,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	72.763.137,00
30	Pengelola	757.524,00
Jumlah		**195.815.684.059,00**

Tabel 411 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	333.604.028,00
2	Dinas Kesehatan	2.180.237.260,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	179.699.328.614,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.983.695.314,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86.666,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	159.700,00
7	Dinas Sosial	6.464.764,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.538.771.985,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	422.809.810,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	352.829.655,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.302.156,00
12	Dinas Perhubungan	15.673.869,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	53.966.829,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	170.288.712,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	757.536,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	41.025.591,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.573.717,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.872.218,00
19	Sekretariat Daerah	122.692.296,00
20	Sekretariat DPRD	59.717.367,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12.502.538,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	72.763.159,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
24	Inspektorat	26.237.813,00
25	Kecamatan Lampihong	243.375,00
26	Kecamatan Batumandi	745.800,00
27	Kecamatan Awayan	0,00
28	Kecamatan Halong	301.600,00
29	Kecamatan Juai	150.000,00
30	Kecamatan Paringin	359.864.276,00
31	Kecamatan Tebing Tinggi	521.842,00
32	Kecamatan Paringin Selatan	287.539.041,00
Jumlah		**191.792.727.531,00**

5.4.2.3.4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	82.499.476,00	**82.891.227,00**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp82.499.476,00 dan Rp82.891.227,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 412 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.308.366,00	4.700.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.976,00	600.000,00
3	Kecamatan Paringin	989.994,00	990.000,00
4	Sekretariat Daerah	76.601.140,00	76.601.227,00
Jumlah		**82.499.476,00**	**82.891.227,00**

5.4.2.3.5. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.020.168.549,00	**1.004.727.830,00**

Beban Amortisasi merupakan Beban Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.020.168.549,00 dan Rp1.004.727.830,00, , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 413 Rincian Beban Amortisasi per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.127.398,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.609.996,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	316.872.620,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	37.417.050,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.049.129,00
8	Dinas Kesehatan	37.016.492,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	205.381.222,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18.315.000,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Tenaga Kerja	12.037.061,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	37.576.619,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.942.666,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.686.660,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.059.688,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
16	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.816.775,00
17	Inspektorat Kabupaten	39.460.500,00
18	Sekretariat Daerah	28.004.173,00
19	Sekretariat DPRD	795.500,00
Jumlah		**1.020.168.549,00**

Tabel 414 Rincian Beban Amortisasi per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	40.334.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.855.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.192.440,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.610.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00
6	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.835.400,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.980.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.476.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	209.501.610,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	11.600.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.853.800,00
13	Sekretariat Daerah	27.764.000,00
14	Inspektorat	39.460.500,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	34.930.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	307.207.680,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.127.400,00
Jumlah		**1.004.727.830,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.3.6. Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	**-**	**6.635.000,00**

Beban Penyusutan Aset Properti Investasi merupakan penyusutan properti investasi Bangunan Gedung pada Sekretariat Daerah yang disewa oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.3. Beban Transfer	**281.127.120.897,00**	**382.548.784.935,00**

Transfer merupakan Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp281.127.120.897,00 dan Rp382.548.784.935,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 415 Rincian Perbandingan Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	4.080.358.497,00	4.080.358.497,00	-	1.730.148.884,00
2	Beban Bantuan Keuangan	277.046.762.400,00	375.291.719.420,00	(98.244.957.020,00)	380.818.636.051,00
Jumlah		**281.127.120.897,00**	**379.372.077.917,00**	**(98.244.957.020,00)**	**382.548.784.935,00**

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.4.1. Beban Bagi Hasil	**4.080.358.497,00**	**1.730.148.884,00**

Beban Bagi Hasil merupakan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa, Realisasi Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.080.358.497,00 dan Rp1.730.148.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 416 Rincian Perbandingan Beban Bagi Hasil LO dengan Belanja Bagi Hasil LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	3.844.094.540,00	3.844.094.540,00	-	1.505.603.600,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	236.263.957,00	236.263.957,00	-	224.545.284,00
Jumlah		**4.080.358.497,00**	**4.080.358.497,00**	**-**	**1.730.148.884,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.4.2. Beban Bantuan Keuangan	**277.046.762.400,00**	**380.818.636.051,00**

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban Bantuan ADD. Beban Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp277.046.762.400,00 dan Rp380.818.636.051,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 417 Rincian Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dengan Belanja Bantuan Keuangan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	-	-	-	7.777.458.900,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	-	98.244.957.020,00	(98.244.957.020,00)	-
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	277.046.762.400,00	277.046.762.400,00	-	373.041.177.151,00
Jumlah		**277.046.762.400,00**	**375.291.719.420,00**	**(98.244.957.020,00)**	**380.818.636.051,00**

Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 418 Kertas Kerja Perbandingan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi LO dengan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi LRA

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan – LRA	**375.291.719.420,00**
-/- Koreksi Beban	(98.244.957.020,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan – LO	**277.046.762.400,00**

Pengurangan Beban Transfer ADD dari APBN sebesar Rp98.244.957.020,00 disebabkan karena tidak termasuk dalam Beban LO, sejak tahun 2021 ADD dari APBN di transfer langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tabalong, Kabupaten HSU dan Kabupaten Balangan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.4. Beban Tak Terduga	**3.178.857.199,00**	**1.357.500.000,00**

Beban Tidak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.178.857.199,00 dan Rp1.357.500.000,00. Adapun penjelasn lebih rinci sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.5.1. Beban Tak Terduga	**3.178.857.199,00**	**1.357.500.000,00**

Beban Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Beban Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.178.857.199,00 dan Rp1.357.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 419 Rincian Perbandingan Beban Tak Terduga LO dan LRA

No	Uraian	LO Tahun 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)	LO Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Tak Terduga	3.178.857.199,00	3.388.752.199,00	(209.895.000,00)	1.357.500.000,00
Jumlah		**3.178.857.199,00**	**3.388.752.199,00**	**(209.895.000,00)**	**1.357.500.000,00**

Penjelasan atas perbedaan antara LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 420 Kertas Kerja Perbandingan Beban Tidak Terduga LO dengan Belanja Tidak Terduga LRA

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
	Berdasarkan LRA Belanja Tidak Terduga	**3.388.752.199,00**
1.	-/- Reklasifikasi Ke Beban Persediaan	(206.935.000,00)
2.	-/- Reklasifikasi Ke Aset Peralatan dan Mesin	(2.960.000,00)
	Jumlah Mutasi Berkurang	**(209.895.000,00)**
	Berdasarkan LO Beban Tidak Terduga	**3.178.857.199,00**

a. Rincian Reklasifikasi ke Beban Persediaan Sebesar Rp206.935.000,00

Tabel 421 Kertas Kerja Perbandingan Beban Tidak Terduga LO dengan Belanja Tidak Terduga LRA

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.375.000,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00
3.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.060.000,00
Jumlah		**206.935.000,00**

b. Rincian Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.960.000,00 berupa 2 buah korsi roda pada Badan Penanggulanan Bencana Daerah.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.	**Surplus/ (Defisit) dari Operasi**	**55.219.992.700,29**	**1.885.005.824.208,88**

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional adalah hasil dari selisih Pendapatan dikurangi Beban tahun berjalan. Surplus/ Defisit untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.219.992.700,29 dan Rp1.885.005.824.208,88.

Tabel 422 Surplus/Defisit dari Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.681.078.138.671,11	4.709.233.037.929,88
2	Beban	(2.625.858.145.970,82)	(2.824.227.213.721,00)
Jumlah		**55.219.992.700,29**	**1.885.005.824.208,88**

5.4.3.	Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		(6.400.415.248,00)	**38.494.602.935,00**

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(6.400.415.248,00) dan Rp38.494.602.935,00.

5.4.4.1.	Surplus Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.469.777,00	**38.941.231.984,00**

Surplus Non Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.469.777,00 dan Rp38.494.602.935,00.

Tabel 423 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	38.941.231.984,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.469.777,00	-
Jumlah Surplus Non Operasional	**9.469.777,00**	**38.941.231.984,00**

5.4.4.1.1.	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		-	**38.941.231.984,00**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp38.494.602.935,00.

5.4.4.1.2.	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.469.777,00	**-**

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.469.777,00 dan Rp0,00.

5.4.4.2.	Defisit Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		6.409.885.025,00	**446.629.049,00**

Defisit Non Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.409.885.025,00 dan Rp446.629.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 424 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	3.410.273.948,00	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.999.611.077,00	446.629.049,00
Jumlah Defisit Non Operasional	**6.409.885.025,00**	**446.629.049,00**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4.2.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	**3.410.273.948,00**	**-**

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.410.273.948,00 dan Rp446.629.049,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4.2.2. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2.999.611.077,00**	**446.629.049,00**

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.999.611.077,00 dan Rp446.629.049,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**48.819.577.452,29**	**1.923.500.427.143,88**

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa adalah hasil dari selisih Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dikurangi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun berjalan. Surplus/(Defisit) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desemeber 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp48.819.577.452,29 dan Rp1.923.500.427.143,88.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.5. Surplus/(Defisit) LO	**48.819.577.452,29**	**1.923.500.427.143,88**

Surplus/(Defisit) LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desemeber 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp48.819.577.452,29 dan Rp1.923.500.427.143,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 425 Ringkasan Perhitungan Surplus/ Defisit LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan	2.681.078.138.671,11	4.709.233.037.929,88
Beban	(2.625.858.145.970,82)	(2.824.227.213.721,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(6.400.415.248,00)	38.494.602.935,00
Surplus/(Defisit) LO	**48.819.577.452,29**	**1.923.500.427.143,88**

5.5. LAPORAN ARUS KAS

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan terhadap Kas dan Setara Kas selama TA 2025 dan 2024 dan saldo Kas dan Setara Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**1.214.049.212.923,09**	**1.799.310.500.083,56**

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.214.049.212.923,09 dan Rp1.799.310.500.083,56. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami penurunan sebesar Rp585.261.287.160,47 atau 32,53%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 426 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.642.054.834.375,14	4.326.129.918.038,91
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.428.005.621.452,05	2.526.819.417.955,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1.214.049.212.923,09**	**1.799.310.500.083,56**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**3.642.054.834.375,14**	**4.326.129.918.038,91**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Jumlah Masuk Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.640.399.634.375,14 dan Rp4.326.129.918.038,91. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp4.326.129.918.038,91 maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi mengalami penurunan sebesar Rp684.075.083.663,77 atau 15,81%. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.642.054.834.375,14 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada LRA TA 2025 sebesar Rp3.642.957.087.265,14 terdapat perbedaan sebesar Rp902.252.890,00. Rincian dan perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan LRA TA 2025 serta Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 2024 sebagai berikut:

Tabel 427 Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan LRA TA 2025 serta Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2024 (Rp)
		Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		Laporan Arus Kas (LAK)
1	Penerimaan Pajak Daerah	37.607.251.720,00	37.607.251.720,00	-	17.931.079.059,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.967.294.243,00	1.967.294.243,00	-	6.491.994.812,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	48.293.614.236,00	48.293.614.236,00	-	18.345.765.305,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	113.649.022.468,66	114.551.275.358,66	902.252.890,00	133.132.894.990,41
5	Penerimaan Bagi Hasil	2.378.509.962.500,00	2.378.509.962.500,00	-	3.394.844.581.540,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	388.541.608.760,00	388.541.608.760,00	-	387.094.307.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	1.611.713.142,00	1.611.713.142,00	-	36.005.560.168,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	93.624.947.438,00	93.624.947.438,00	-	81.484.551.213,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
10	Insentif Fiskal	22.296.663.000,00	22.296.663.000,00	-	20.597.049.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	98.244.957.020,00	98.244.957.020,00	-	114.314.789.590,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	79.950.709.910,00	79.950.709.910,00	-	107.530.009.314,00
13	Penerimaan Hibah	1.655.200.090,00	1.655.200.090,00	-	421.917.285,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	376.101.889.847,48	376.101.889.847,48	-	7.935.418.762,00
Jumlah		**3.642.054.834.375,14**	**3.642.957.087.265,14**	**902.252.890,00**	**4.326.129.918.038,91**

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.428.005.621.452,05	**2.526.819.417.955,35**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing–masing sebesar Rp2.428.005.621.452,05 dan Rp2.526.819.417.955,35. Jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas pada Aktivitas Operasi TA 2024 maka Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.813.796.503,30 atau 3,91%. Sedangkan perbandingan antara Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.428.005.621.452,05 dengan Realisasi Belanja Operasi, BTT dan Belanja Transfer pada LRA TA 2025 sebesar Rp2.428.005.621.452,05 maka tidak terdapat perbedaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 428 Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dan LRA TA 2025 serta Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2024 (Rp)
		Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		Laporan Arus Kas (LAK)
1	Pembayaran Pegawai	604.826.713.205,00	604.826.713.205,00	-	528.346.491.670,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.316.275.787.002,14	1.316.275.787.002,14	-	1.292.777.489.260,70
3	Pembayaran Hibah	115.210.286.128,91	115.210.286.128,91	-	198.460.439.999,65
4	Pembayaran Bantuan Sosial	8.932.005.000,00	8.932.005.000,00	-	9.013.922.500,00
5	Pembayaran Tak Terduga	3.388.752.199,00	3.388.752.199,00	-	1.357.500.000,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	379.372.077.917,00	379.372.077.917,00	-	496.863.574.525,00
Jumlah		**2.428.005.621.452,05**	**2.428.005.621.452,05**	**-**	**2.526.819.417.955,35**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(965.838.562.621,58)**	**(1.802.174.676.702,04)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk TA yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp965.838.562.621,58 dan Rp1.802.174.676.702,04. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024, maka Arus Kas dari Aktivitas Investasi mengalami penurunan sebesar Rp836.336.114.080,46 atau 46,41%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 429 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	902.252.890,00	-
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	966.740.815.511,58	(1.802.174.676.702,04)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(965.838.562.621,58)**	**(1.802.174.676.702,04)**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**902.252.890,00**	**-**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp902.252.890,00 dan Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	966.740.815.511,58	**1.802.174.676.702,04**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp966.740.815.511,58 dan Rp1.802.174.676.702,04, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 430 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Perolehan Tanah	60.493.628.274,00	8.119.274.250,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	148.105.830.131,00	370.854.449.606,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	301.735.899.953,91	274.000.297.829,17
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	453.722.389.367,00	396.492.146.916,87
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.612.368.086,00	778.523.500,00
6	Perolehan Aset Lainnya	1.070.699.699,67	1.929.984.600,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	750.000.000.000,00
Jumlah		**966.740.815.511,58**	**1.802.174.676.702,04**

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	-	**1.000.000,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah Aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali, yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, serta bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.000.000,00. Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**1.000.000,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan Aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.000.000,00. Arus Masuk Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024, yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Pengembalian Penyertaan Modal Koperasi).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**-**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan Aktivitas pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**-**	**-**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 tidak ada perbedaan jika dibandingkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp0,00. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 431 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	222.171.661.843,10	222.265.144.916,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	222.171.661.843,10	222.265.144.916,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-**	**-**

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4.1.	**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**	**222.171.661.843,10**	**222.265.144.916,00**

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp222.171.661.843,10 dan Rp222.265.144.916,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93.483.072,90 atau 0,04% jika dibandingkan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp222.265.144.916,00. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 merupakan Penerimaan Pehitungan Fihak Ketiga (PFK).

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4.2.	**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**	**222.171.661.843,10**	**222.265.144.916,00**

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp222.171.661.843,10 dan Rp222.265.144.916,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93.483.072,90 atau 0,04% jika dibandingkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp222.171.661.843,10 . Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 merupakan Pengeluaran Pehitungan Fihak Ketiga (PFK).

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.5.	**Kenaikan/ (Penunan) Kas**	**248.210.650.301,51**	**(2.863.176.618,48)**

Kenaikan/ (Penurunan) Kas merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp248.210.650.301,51 dan (Rp2.863.176.618,48) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 432 Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.214.049.212.923,09	1.799.310.500.083,56
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(965.838.562.621,58)	(1.802.174.676.702,04)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	1.000.000,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/ (Penurunan) Kas		**248.210.650.301,51**	**(2.863.176.618,48)**

	1 Januari 2025 (Rp)	1 Januari 2024 (Rp)
5.5.6. Saldo Awal Kas	**637.908.437.000,85**	**640.771.536.002,33**

Saldo Awal Kas 1 Januari 2025 sebesar Rp637.908.437.000,85 dan saldo awal kas 1 Januari 2024 sebesar Rp640.771.536.002,33. Saldo Awal Kas terdiri dari Kas di BUD, Kas Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BLUD, Kas Bendahara JKN, Kas Bendahara BOK, Kas Bendahara BOP, dan Kas Bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 433 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BOP dan Setara Kas

No	Nomor Rekening	1 Januari 2025		1 Januari 2024	
		Nama Rekening	Jumlah (Rp)	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas					
Bank Kalsel					
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	629.401.707.659,99	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	624.221.300.103,45
Total Kas di BUD			**629.401.707.659,99**		**624.221.300.103,45**
Jumlah			**629.401.707.659,99**		**624.221.300.103,45**
1	Kas di Bendahara BLUD		6.219.353.795,86		13.733.779.326,88
2	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		122.260.304,00		21.841.033,00
3	Kas di Bendahara Puskesmas (BOK)		2.017.354.083,00		2.552.676.313,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		-		-
5	Kas di Bendahara BOS		147.761.158,00		241.939.226,00
6	Kas di Bendahara BOP		-		-
Jumlah			**637.908.437.000,85**		**640.771.536.002,33**

5.5.7. Koreksi SILPA Tahun Lalu	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(100.207,00)	**77.617,00**

Saldo Akhir Koreksi SILPA Tahun Lalu 31 Desember 2025 sebesar (Rp100.207,00) merupakan koreksi silpa yang berasal dari SDN Batu Merah 3 sebesar Rp80.000,00, SDN Lok Batung sebesar Rp(105.207,00) dan SDN Mangkayahu sebesar Rp(75.000,00) dan Saldo Akhir Koreksi SILPA Tahun Lalu 31 Desember 2024 sebesar Rp77.617,00 merupakan koreksi silpa yang berasal dari puskesmas tebing tinggi (BOK) sebesar Rp40.000,00 dan dari SDN Dayak Pitap sebesar Rp37.617,00.

5.5.8. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	886.118.987.095,36	**637.908.437.000,85**

Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar dan Rp886.118.987.095,36 dan Rp637.908.437.000,85. Saldo Akhir Kas terdiri dari Kas di BUD, Kas Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BLUD, Kas Bendahara JKN, Kas Bendahara BOK, Kas Bendahara BOP, dan Kas Bendahara BOS.

Tabel 434 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	871.993.533.360,28	629.401.707.659,99
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas di Bendaraha Penerimaan	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	11.705.419.258,08	6.219.353.795,86
5	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	122.260.304,00
6	Kas di Bendahara Puskesmas (BOK)	1.576.609.600,00	2.017.354.083,00
7	Kas di Bendahara BOP	11.000,00	-
8	Kas di Bendahara BOS	37.655.777,00	147.761.158,00
9	Kas Lainnya	805.758.100,00	-
Jumlah		**886.118.987.095,36**	**637.908.437.000,85**

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.854.281.694.428,14, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp6.555.152.017.838,08 maka ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp299.129.676.590,06 atau 4,56%.

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.854.281.694.428,14 berasal dari Saldo Awal Ekuitas per 1 Januari 2025 sebesar Rp6.555.152.017.838,08 ditambah Surplus/ Defisit LO tahun 2025 sebesar Rp48.819.577.452,29, ditambah Koreksi Ekuitas tahun 2025 sebesar Rp250.310.099.137,77.

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 1 Januari 2025 sebesar Rp6.555.152.017.838,08 terdiri dari Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp4.613.767.447.063,90 ditambah Surplus/ Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp1.923.500.427.143,88 dan ditambah Koreksi Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp17.884.143.630,30.

5.6.2. Surplus/ Defisit LO

Surplus/ Defisit LO tahun 2025 sebesar Rp48.819.577.452,29 berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2025 dan mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas LO pada CaLK 5.4.6.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dari berbasis kas menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mengakibatkan banyak terdapat Koreksi Ekuitas.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1. Koreksi Ekuitas – Lain-lain	**250.310.099.137,77**	**17.884.143.630,30**

Koreksi Ekuitas tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp250.310.099.137,77 dan Rp17.884.143.630,30. Koreksi Ekuitas tersebut terdiri atas:

Tabel 435 Koreksi Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
1	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	(4,26)	16.852.011.872,38
2	Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	(0,67)	-
3	Koreksi Ekuitas - Penyusutan	249.494.212.812,00	-
4	Koreksi Ekuitas - Piutang	(39.069.474,30)	66.569,45
5	Koreksi ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	-	-

No	Uraian	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
6	Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	43.774.325,57	-
7	Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	23.062.874,43	2.815.146,20
8	Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang	-	668.234.688,86
9.	Koreksi Ekuitas – Lainnya	788.118.605,00	361.015.353,41
Jumlah		**250.310.099.137,77**	**17.884.143.630,30**

5.6.3.1.1. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(4,26)	**16.852.011.872,38**

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan kesalahan pencatatan pengakuan Aset Tetap atau catat baru, tukar menukar, selisih pembulatan dan koreksi pencatatan lainnya. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4,26 dan Rp16.852.011.872,38. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 436 Rincian Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Pembulatan Koma dari Gedung dan Bangunan	(1,01)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koreksi Pembulatan Koma dari Gedung dan Bangunan	(0,41)
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Koreksi Pembulatan Koma dari Gedung dan Bangunan	(0,98)
4	Inspektorat	Koreksi Pembulatan Koma dari Gedung dan Bangunan	(1,86)
Jumlah			**(4,26)**

5.6.3.1.2. Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(0,67)	**-**

Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan kesalahan pencatatan pengakuan Aset Tetap atau catat baru, tukar menukar, selisih pembulatan dan koreksi pencatatan lainnya. Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp0,67) dan Rp0,00. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya Tahun 2025 merupakan Koreksi atas pembulatan dari pengadaan Belanja ATB pada Sekretariat Daerah.

5.6.3.1.3. Koreksi Ekuitas – Penyusutan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(0,67)	**-**

Koreksi Ekuitas – Penyusutan merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan oleh penyesuaian akibat perubahan basis perhitungan penyusutan dari tahunan menjadi

bulanan. Koreksi Ekuitas – Penyusutan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp249.494.212.812,00 dan Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1.4. Koreksi Ekuitas – Piutang	**(39.069.474,30)**	**66.569,45**

Koreksi Ekuitas – Piutang merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan oleh penyesuaian atas kesalahan pencatatan piutang, termasuk pelunasan piutang dari PBF, double catat obat dan BMHP, serta koreksi lainnya terkait pengakuan piutang tahun sebelumnya. Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp39.069.474,30 dan Rp66.569,45.

Rincian Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2025 sebesar Rp39.069.474,30 adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Debet sebesar Rp63.116.114,30, terdiri dari:
   - Penyesuaian atas pelunasan piutang dari PBF sebesar Rp58.186.139,50; dan
   - Koreksi atas double catat Obat dan BMHP sebesar Rp4.929.974,80.
b. Koreksi Kredit sebesar Rp24.046.640,00, terdiri dari:
   - Koreksi piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD) sebesar Rp24.000.440,00; dan
   - Koreksi piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD) sebesar Rp46.200,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1.5. Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	**43.774.325,57**	**-**

Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang merupakan saldo atas penghapusan saldo Akumulasi penyisihan piutang, saldo koreksi ekuitas – Penyisihan piutang tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp43.774.325,57 dan Rp0,00. Saldo Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penyisihan Piutang tahun 2025 pada BPKPAD dikarenakan piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sudah lunas sebesar Rp250,00;

2. Koreksi atas Penyisihan Piutang tahun 2025 pada BPKPAD dikarenakan piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sudah lunas sebesar Rp2.183.379,12;
3. Koreksi atas Penyisihan Putang tahun 2025 pada RSUD sebesar Rp41.590.696,45.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1.6. Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	**23.062.876,39**	**2.815.146,20**

Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut atas penyajian kewajiban pada Tahun Anggaran 2024. Koreksi ini dilakukan karena terdapat kesalahan dalam pengakuan utang beban, baik berupa pengakuan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya maupun kesalahan klasifikasi dan pencatatan pada akhir periode pelaporan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah telah melakukan koreksi melalui mekanisme penyesuaian saldo awal agar penyajian Utang Belanja Barang dan Jasa mencerminkan nilai yang andal, wajar, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara keseluruhan, koreksi saldo awal tersebut mengakibatkan penurunan nilai utang sebesar Rp23.062.876,39, dengan rincian per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 437 Rincian Saldo Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Niali
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(156.396.002,00)
2	Dinas Kesehatan	(11.128.374,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	334.344.802,00
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	(189.885.302,39)
Jumlah		**(23.062.876,39)**

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1.7. Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang	**-**	**668.234.688,86**

Koreksi Ekuitas Investasi Jangka Panjang merupakan saldo atas Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang Tahun 2025. Saldo Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp668.234.688,86. Saldo Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang berasal dari Koreksi saldo awal penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2025 yang disebabkan oleh koreksi perhitungan bagian laba PDAM tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.6.3.1.8. Koreksi Ekuitas – Lainnya	**788.118.605,00**	**361.015.353,41**

Koreksi Ekuitas – Lainnya merupakan Koreksi Ekuitas selain Koreksi Nilai Koreksi Ekuitas – Aset Tetap, Koreksi Ekuitas – Penyusutan, Koreksi Ekuitas – Piutang, Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek. Koreksi Ekuitas – Lainnya tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp788.118.605,00 dan Rp361.015.353,41.

Tabel 438 Rincian Saldo Koreksi Ekuitas – Lainnya

No	Uraian	Niali
1	Koreksi Saldo Awal BOS	(100.207,00)
2	Koreksi Akumulasi Amortisasi dikarenakan perubahan pehitungan dari tahunan menjadi bulanan	793.589.278,00
3	Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Pinjaman dari Dinkes HST	9.180.000,00
4	Jurnal Penyesuaian atas Pencatatan Peminjaman Obat Ke Dinkes Tabalong	1.260.000,00
5	Jurnal Penyesuaian atas Pencatatan Peminjaman Obat Ke Dinkes Tapin	949.800,00
6	Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian pinjaman ke IF Kabupaten Lain	(1.220.000,00)
7	Jurnal Penyesuaian atas Retur PBF	(14.168.767,00)
8	Koreksi saldo awal karena barang yang sudah expired yang belum dilaporkan	(956.046,00)
9	Peminjaman Obat Oleh IF Kabupaten Lain	(434.000,00)
10	Perubahan Harga Persediaan Satuan	18.547,00
Jumlah		**788.118.605,00**

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO dan Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 439 Saldo Ekuitas Akhir

No	Uraian	2025	2024
1	Ekuitas Awal	6.555.152.017.838,08	4.613.767.447.063,90
2	Surplus/ Defisit LO	48.819.577.452,29	1.923.504.125.813,88
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	250.310.099.137,77	17.884.143.630,30
Jumlah		**6.854.281.694.428,14**	**6.555.155.716.508,08**

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Pendapatan Transfer Pusat-Dana Bagi Hasil

Pendapatan Transfer Pusat terutama DBH penyalurannya tahun berkenaan tidak sepenuhnya mengacu pada Perpres tentang Rincian APBN akan tetapi juga memperhitungkan kurang salur (KB) dan lebih salur (LB) tahun sebelumnya, untuk Tahun Anggaran 2025 perhitungankurang salur (KB) dan lebih salur (LB) sesuai dengan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dan MK 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, dengan rincian tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 440 Perhitungan Kurang Bayar (KB) Pendapatan Transfer Pusat DBH Tahun 2025

Jenis Dana Bagi Hasil	Saldo Akhir Kurang Bayar Tahun 2024 (Rp)	Penyelesaian Kurang Bayar Tahun 2025 (Rp)	Penetapan Kurang Bayar TA 2025 (Rp)	Saldo Akhir Kurang Bayar Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2 - 3) + 4
Dana Bagi Hasil Pajak	**388.926.171.000,00**	**167.434.998.000,00**	**11.541.090.000,00**	**233.032.263.000,00**
Pajak Penghasilan	**2.417.333.000,00**	**1.040.676.000,00**	**9.612.609.000,00**	**10.989.266.000,00**
PPh Pasal 21	**2.392.315.000,00**	**1.029.906.000,00**	**9.365.109.000,00**	**10.727.518.000,00**
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.392.315.000,00	1.029.906.000,00	9.365.109.000,00	10.727.518.000,00
PPh Pasal 25/29	**25.018.000,00**	**10.770.000,00**	**247.500.000,00**	**261.748.000,00**
Pajak Penghasilan Pasal 25/29	25.018.000,00	10.770.000,00	247.500.000,00	261.748.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	**386.508.838.000,00**	**166.394.322.000,00**	**1.928.406.000,00**	**222.042.922.000,00**
Bagian Daerah	**386.508.838.000,00**	**166.394.322.000,00**	**1.928.406.000,00**	**222.042.922.000,00**
Bagian Daerah Migas	371.841.000,00	160.080.000,00	791.994.000,00	1.003.755.000,00
Bagian Daerah Non Migas	385.745.733.000,00	166.065.801.000,00	-	219.679.932.000,00
Bagian Daerah Perhutanan	3.838.000,00	1.652.000,00	63.878.000,00	66.064.000,00
Bagian Daerah Perkebunan	332.563.000,00	143.170.000,00	849.109.000,00	1.038.502.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	54.863.000,00	23.619.000,00	223.425.000,00	254.669.000,00
Cukai Hasil Tembakau	**-**	**-**	**75.000,00**	**75.000,00**
CHT	**-**	**-**	**75.000,00**	**75.000,00**
Cukai Hasil Tembakau			75.000,00	75.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**834.204.199.000,00**	**359.129.801.000,00**	**1.198.539.000,00**	**476.272.937.000,00**
Sumber Daya Mineral Batu Bara	**834.204.199.000,00**	**359.129.801.000,00**	**911.160.000,00**	**475.985.558.000,00**
Sumber Daya Mineral Batu Bara	**834.204.199.000,00**	**359.129.801.000,00**	**911.160.000,00**	**475.985.558.000,00**
Landrent	178.112.000,00	76.678.000,00	911.160.000,00	1.012.594.000,00
Royalti	834.026.087.000,00	359.053.123.000,00	-	474.972.964.000,00
Sumber Daya Kehutanan	**-**	**-**	**287.379.000,00**	**287.379.000,00**
Sumber Daya Kehutanan	**-**	**-**	**287.379.000,00**	**287.379.000,00**
PSDH	-	-	287.379.000,00	287.379.000,00
Jumlah Total	**1.223.130.370.000,00**	**526.564.799.000,00**	**12.739.629.000,00**	**709.305.200.000,00**

Tabel 441 Perhitungan Lebih Bayar Pendapatan Transfer Pusat DBH Tahun 2025

Jenis Dana Bagi Hasil	Saldo Akhir Lebih Bayar Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Lebih Bayar TA 2025 (Rp)	Saldo Akhir Lebih Bayar Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4 = 2 + 3
DBH PAJAK	**-**	**19.735.355.000,00**	**19.735.355.000,00**
Pajak Bumi dan Bangunan	**-**	**19.735.355.000,00**	**19.735.355.000,00**
Bagian Daerah	**-**	**19.735.355.000,00**	**19.735.355.000,00**
Bagian Daerah Non Migas	-	19.735.355.000,00	19.735.355.000,00
Sumber Daya Alam	**-**	**30.896.564.000,00**	**30.896.564.000,00**
Migas	**-**	**273.648.000,00**	**273.648.000,00**
Sumber Daya Minyak Bumi	**-**	**273.648.000,00**	**273.648.000,00**
Minyak Bumi	-	273.648.000,00	273.648.000,00
Minerba	**-**	**27.865.574.000,00**	**27.865.574.000,00**
Sumber Daya Mineral Batu Bara	**-**	**27.865.574.000,00**	**27.865.574.000,00**
Royalti	-	27.865.574.000,00	27.865.574.000,00
	-	**213.802.000,00**	**213.802.000,00**
Sumber Daya Perikanan	**-**	**213.802.000,00**	**213.802.000,00**
Perikanan	-	213.802.000,00	213.802.000,00
	-	**2.543.540.000,00**	**2.543.540.000,00**
Sumber Daya Perkebunan Sawit	**-**	**2.543.540.000,00**	**2.543.540.000,00**
Perkebunan Sawit	-	2.543.540.000,00	2.543.540.000,00
Jumlah Total	**-**	**50.631.919.000,00**	**50.631.919.000,00**

6.2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi

Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil Pajak) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB), Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP) dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD disampaikan bahwa Opsen Pajak Daerah atas 3 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemda pada 5 Januari 2025, adanya realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan penyaluran atas bagi hasil tahun sebelumnya.

Besaran alokasi bagi hasil diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan untuk periode tiga bulanan (triwulan) ditetapkan setelah tanggal Neraca. Realisasi penyaluran pada tahun berjalan tidak sepenuhnya penerimaan atas potensi tahun berjalan

akan tetapi juga merupakan penerimaan atas penetapan bagi hasil tahun sebelumnya yang pada umumnya merupakan penetapan bagi hasil untuk Triwulan IV Tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil Pajak) yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp79.950.709.910,00 yang terdiri dari penerimaan dari bagi hasil Tahun 2024 atau penyelesaian piutang Tahun 20234 sebesar Rp24.790.084.880,00 dan Penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp55.160.625.030,00 yang merupakan penetapan bagi hasil Tahun 2025, dengan rincian tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 442 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Selama Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Penerimaan					Jumlah
		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT dan AP)	Pajak Rokok	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Tahun 2025 atas Bagi Hasil Tahun 2024	596.962.911,00	-	-	-	-	596.962.911,00
2		16.847.196.173,00	1.697.069.820,00	3.759.484.267,00	191.765.126,00	1.697.606.583,00	24.193.121.969,00
Jumlah		**17.444.159.084,00**	**1.697.069.820,00**	**3.759.484.267,00**	**191.765.126,00**	**1.697.606.583,00**	**24.790.084.880,00**
1	Penerimaan 2025 atas Bagi Hasil Tahun 2025	15.785.889.252,00	-	-	147.883.987,00	4.536.087.029,00	20.469.860.268,00
2		7.363.877.100,00	-	-	115.086.190,00	-	7.478.963.290,00
3		-	-	-	-	2.822.541.794,00	2.822.541.794,00
4		10.101.548.096,00	-	-	-	-	10.101.548.096,00
5		10.988.920.422,00	-	-	276.937.416,00	3.021.853.744,00	14.287.711.582,00
Jumlah		**44.240.234.870,00**	**-**	**-**	**539.907.593,00**	**10.380.482.567,00**	**55.160.625.030,00**
Jumlah Total		**61.684.393.954,00**	**1.697.069.820,00**	**3.759.484.267,00**	**731.672.719,00**	**12.078.089.150,00**	**79.950.709.910,00**

Adapun dasar penetapan Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/1009/KUM/2024 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2024.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/0130/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2024.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/0479/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2025.

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/0787/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2025.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/0692/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2025.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor100.3.3.1/0953/KUM/2025 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2025.
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0131/KUM/2026 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025, dan Pajak Rokok Penerimaan Bulan Oktober dan November 2025.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur total bagi hasil Tahun 2025 alokasi Bagi Hasil Provinsisebesar Rp82.750.373.808,00, penyaluran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp55.160.625.030,00 sehinga masih terdapat kurang salur Pendapatan DBH Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.589.748.778,00 dari nilai tersebut telah telah seluruhnya disalurkan di tahun 2026, khusus untuk Penerimaan Pajak Rokok bulan Desember 2025 sampai dengan laporan ini disusun belum ditetapkan, adapun rincian tersaji pada tebel berikut:

Tabel 443 Perhitungan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Alokasi (Rp)	Penyaluran Tahun 2025	Penyaluran Tahun 2026	Selisih (+ / -)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**				
	Triwulan I	15.785.889.252,00	15.785.889.252,00	0,00	0,00
	Triwulan II	17.465.425.196,00	17.465.425.196,00	0,00	0,00
	Triwulan III	17.632.676.222,00	10.988.920.422,00	6.643.755.800,00	0,00
	Triwulan IV	18.840.502.314,00		18.840.502.314,00	0,00
	Jumlah	**69.724.492.984,00**	**44.240.234.870,00**	**25.484.258.114,00**	**0,00**
2	**Pajak Air Permukaan (PAP)**				
	Triwulan I	147.883.987,00	147.883.987,00	0,00	0,00
	Triwulan II	115.086.190,00	115.086.190,00	0,00	0,00
	Triwulan III	276.937.416,00	276.937.416,00	0,00	0,00
	Triwulan IV	163.852.406,00		163.852.406,00	0,00
	Jumlah	**703.759.999,00**	**539.907.593,00**	**163.852.406,00**	**0,00**
3	**Pajak Rokok**				
	Triwulan I	4.536.087.029,00	4.536.087.029,00	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Alokasi (Rp)	Penyaluran Tahun 2025	Penyaluran Tahun 2026	Selisih (+ / -)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Triwulan II	2.822.541.794,00	2.822.541.794,00	0,00	0,00
	Triwulan III	3.021.853.744,00	3.021.853.744,00	0,00	0,00
	Triwulan IV	1.941.638.258,00		1.941.638.258,00	0,00
	Jumlah	**12.322.120.825,00**	**10.380.482.567,00**	**1.941.638.258,00**	**0,00**
Jumlah		**82.750.373.808,00**	**55.160.625.030,00**	**27.589.748.778,00**	**0,00**

6.3. Pendapatan Lainnya

Sesuai dengan Pasal Pasal 47 Ayat (10) PMK Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan Dana Otonomi Khusus disebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk DBH) dalam bentuk non Tunai dicatat sebagai pendapatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF disebutkan bahwa:

1. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun dalam hal terdapat DBH kurang bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
2. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-137/WPB.19/2025 Perihal Penyampaian Rekening Koran TDF-TKD Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 444 Rincian Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Sampai Dengan Desember 2024

No	Uraian Dana Treasury Deposit Facility	Nilai (Rp)
1	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	102.104.000,00
2	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	1.179.000,00
3	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	114.950.797.000,00
4	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	16.844.000,00
5	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	1.000,00
6	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	1.000,00

No	Uraian Dana Treasury Deposit Facility	Nilai (Rp)
7	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	54.684.000,00
8	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	256.064.565.000,00
9	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH	2.000,00
Jumlah		**371.190.177.000,00**

Seluruh Dana *Treasury Deposit Facility* sudah disalurkan seluruhnya termasuk remunerasinya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 445 Realisasi Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025

No	Tanggal Penyaluran	Uraian Penyaluran	Nomor SP2D Penyaluran	Nilai (Rp)
1	11/04/2025	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	250191304003500	41.855.307.007,00
2	02/06/2025	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	250191304005919	41.855.307.007,00
3	28/07/2025	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	259991340024178	143.739.781.493,00
4	29/12/2025	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	259991340129030	143.739.781.493,00
Jumlah				**371.190.177.000,00**

Tabel 446 Realisasi Remunerasi dari Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025

No	Tanggal Penyaluran	Uraian Penyaluran	Nomor SP2D Penyaluran	Nilai (Rp)
1	27/08/2025	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)	259991340040754	4.313.011.413,00
2	27/08/2025	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)	259991340040749	3.630.890.745,00
3	05/12/2025	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)	259991340106500	1.959.361.736,00
4	19/12/2025	Remunerasi Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)	259991340123444	918.277.497,00
Jumlah				**10.821.541.391,00**

6.4. Penyelesaian Utang Belanja Kepada Pihak Ke Tiga Tahun 2021

Sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan dengan nilai sebesar Rp50.885.290,50 yang merupakan utang pihak ketiga Tahun 2021 atas kekurangan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang yang dilaksanakan oleh CV. Azm Husna dengan kontrak Nomor 03/KPA/JL-26/2021 tanggal 12 November 2021, dari keterangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bahwa CV. Azm Husna tidak ada mengajukan permintaan pembayaran sehingga Pemkab Balangan tidak dapat melakukan pelunasan utang tersebut.

6.5. Penyelesaian Pembayaran Utang Belanja Pihak Ke Tiga dan Penundaan Pembayaran atas Perpanjangan Waktu/ Pemberian Kesempatan Melewati Tahun Anggaran

Pada Tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat 495 Pekerjaan yang belum terbayar dikarenakan adanya kendala pada SKPD sehinngga terlambat

penyampaian dokumen pengajuan pencairan dana ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dari Pekerjaan tersebut terdapat kewajiban Pemkab Balangan kepada Pihak Ketiga yang diakui sebagai Utang Pemkab Balangan kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.366.708.340,00 pada Tahun 2025 telah dibayar sebesar Rp35.169.522.538,61 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp197.185.801,39 dan atas kekurangan tersebut merupakan kelebihan pengajuan usulan oleh SKPD sehingga nilai utang terkoreksi, untuk penyelesaian atas penundaan pembayaran pada pekerjaan-pekerjaan dengan perpanjangan waktu/ pemberian kesempatan melewati tahun anggaran atau diselesaikan di Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp18.838.663.925,13 pada tahun 2025 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp18.831.682.141,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp6.981.784,13 yang merupakan koreksi nilai penyesuaian nilai utang sebesar Rp999,13 dan kekurangan pembayaran sebesar Rp6.980.785,00 yang disebabkan kesalahan dalam mengajuan pencairan dana namun atas kekurangan pembayaran tersebut akan diselesaikan dengan menganggarkan kembali kekurangan pembayaran tersebut, adapun rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 447 Penyelesaian Pembayaran Utang Belanja Pihak Ke Tiga Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	Penyelesaian Utang 2024				
		Saldo Utang per 31 Desember 2024	Penyelesaian	Selisih	Koreksi	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kesehatan	430.097.581,00	430.097.581,00	-	-	-
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2.672.676.625,00	2.482.791.322,61	(189.885.302,39)	189.885.302,39	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.171.202.047,00	26.163.901.548,00	(7.300.499,00)	7.300.499,00	-
4	Dinas PUPR dan PERKIM	5.863.837.711,00	5.863.837.711,00	-	-	-
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.763.000,00	14.763.000,00	-	-	-
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.807.000,00	185.807.000,00	-	-	-
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	28.324.376,00	28.324.376,00	-	-	-
Jumlah		**35.366.708.340,00**	**35.169.522.538,61**	**(197.185.801,39)**	**197.185.801,39**	**-**

Adapun rincian kelebihan dan kekurangan pembayaran utang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan terdapat kekurangan pembayaran pada pekerjaan Pembuatan Cor Jalan Produksi/JUT Desa Riwa Kec. Batumandi yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp198.501.000,00 sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 02652/SP2D/2-09.3-27.3-25.1.0.0/LS/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebesar Rp182.925.048,67 sehingga terdapat selisih/kurang bayar sebesar Rp15.575.951,33 hal ini disebabkan atas pekerjaan tersebut terdapat temuan pada saat pemeriksaan

LKPD Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan sehingga pada saat pembayaran langsung dilakukan pengurangan pembayaran senilai temuan tersebut sehingga sisa tidak ada lagi sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pihak Ketiga.

2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan terdapat kekurangan pembayaran pada pekerjaan JUT Desa Batumandi RT. 03 Kec. Batumandi yang dikerjakan oleh CV. Surya Melati Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp114.145.000,00 sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 02653/SP2D/2-09.3-27.3-25.1.0.0/LS/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebesar Rp96.871.087,34 sehingga terdapat selisih/kurang bayar sebesar Rp17.273.912,66 hal ini disebabkan atas pekerjaan tersebut terdapat temuan pada saat pemeriksaan LKPD Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan sehingga pada saat pembayaran langsung dilakukan pengurangan pembayaran senilai temuan tersebut sehingga sisa tidak ada lagi sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pihak Ketiga.

3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan terdapat kekurangan pembayaran pada pekerjaan JUT Kelompok tani Karya Bersama II Desa Teluk Mesjid Kec. Batumandi yang dikerjakan oleh CV. Bara Teknik Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp198.235.000,00sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 03353/SP2D/2-09.3-27.3-25.1.0.0/LS/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 sebesar Rp41.199.561,60 sehingga terdapat selisih/kurang bayar sebesar Rp157.035.438,40hal ini disebabkan atas pekerjaan tersebut terdapat temuan pada saat pemeriksaan LKPD Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan sebesar Rp10.820.438,40 dan Pihak Ketiga tidak menyelesaikan pekerjaanya dengan nilai sisa pekerjaan sebesar Rp146.215.000,00 dan atas pekerjaan ini kepada pihak ketiga telah diberikan sanksi berupa Daftar Hitam Nasional melalui sistem LKPP. Untuk pekerjaan ini dengan adanya pengurangan pembayaran senilai temuan dan sisa kewajiban tidak diselesaikan sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pihak Ketiga.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang KB. Ibunda Ds. Matang Lurus Kec. Lampihong sebesar Rp7.300.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nono The Sains sesuai dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran sudah dibayarkan pada Tahun 2024 dengan SP2D Nomor 01179/SPP-LS/DISDIKBUD-BLG/2024 pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.300.000,00 sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pihak Ketiga.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gunung Riut 2 Kec. Halong sebesar Rp9.668.951,00 yang dilaksanakan oleh CV. Haded Barakat Utama sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 02108/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/05/2025 tanggal

08 Mei 2025 sebesar Rp9.668.950,00 sehingga terdapat perhitungan selisih/kurang bayar sebesar Rp1,00 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara Pembayaran Nomor : 2024.883/BAP/PWS/SAR/APBD/DISDIKBUD-BLG/2025 tanggal 14 April 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp6.668.950,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pekerjaan Pengawasan Pengecatan Ruangan TK. Negeri Pembina Kec. Juai sebesar Rp3.672.496,00 yang dilaksanakan oleh CV. Line Borneo Consultant sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 02517/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebesar Rp3.672.000,00sehingga terdapat perhitungan selisih/kurang sebesar Rp496,00 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara Pembayaran Nomor : 2024.1170/BAP/PWS/SAR/APBD/DISDIKBUD-BLG/2025 tanggal 15 April 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp3.672.000,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Fatimah Az- Zahra Ds. Pimping Kec. Lampihong sebesar Rp104.609.400,00 yang dilaksanakan oleh CV Citra Gemilang sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 02038/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/05/2025 tanggal 08 Mei 2025 sebesar Rp104.609.398,00 sehingga terdapat selisih/kurang bayar sebesar Rp2,00 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara Pembayaran Nomor :2024.365/BAP/SPK/SAR/APBD/DISDIKBUD-BLG/2025 tanggal 15 April 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp104.609.398,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

Tabel 448 Penyelesaian Pembayaran Penundaan Pembayaran atas Perpanjangan Waktu/ Pemberian Kesempatan Melewati Tahun Anggaran

NO	NAMA SKPD	Penyelesaian Utang 2024				
		Saldo Utang Penyelesaian Sisa Pekerjaan di Tahun 2025	Penyelesaian	Selisih	Koreksi	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Kesehatan	284.296.789,00	284.295.789,00	(1.000,00)	1.000,00	-
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	738.565.335,00	738.565.335,00	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	17.815.801.801,13	17.808.821.017,00	(6.980.784,13)	(0,87)	(6.980.785,00)
Jumlah		**18.838.663.925,13**	**18.831.682.141,00**	**(6.981.784,13)**	**999,13**	**(6.980.785,00)**

Adapun rincian kelebihan dan kekurangan pembayaran utang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan untuk pekerjaan Rehab Poskesdes Mamantang dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp191.132.019,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nabila Salam Sejahtera sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 08659/SP2D/1-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp191.131.019,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.291.861,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp149.839.158,00 sehingga masih terdapat selisih kurang pembayaran sebesar Rp1.000,00 yang disebabkan oleh kesalahan pengajuan nilai utang atas perkalian persentase akhir pekerjaan pekerjaan bersarkan pengajuan utang dengan pengajuan pembayaran sehingga terdapat koreksi kurang untuk utang yang diajukan dan atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Pembangunan Taman Edukasi dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp681.503.136,50yang dilaksanakan oleh CV. Aries Mandiri sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 05540/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp681.503.137,00yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp41.290.559,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp640.212.578,00 sehingga masih terdapat selisih lebih pembayaran sebesar Rp0,50 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara Pembayaran Nomor 008/BA-P/CK/Fisik-eP-PBL /BLG/2025 tanggal 21 Juli 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp681.503.137,00atas selisih tersebut dilakukan koreksi tambah untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tugu Maritam - Muara Pitap dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp3.802.042.680,58 yang dilaksanakan oleh CV. Saila Rizky sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 03691/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp3.802.042.681,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp311.984.183,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp3.490.058.498,00 sehingga masih terdapat selisih lebih pembayaran sebesar Rp0,42 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara PembayaranNomor : 004/BA.BYR/PA/JL-BM/2025 tanggal 03 Juni 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp3.802.042.681,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi tambah untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Muara Pitap – Lingsir dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp3.429.370.699,11 yang dilaksanakan oleh CV. Patra Jasa Utama sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 03690/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp3.429.370.699,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp266.511.095,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp3.162.859.604,00 sehingga masih terdapat selisih kurang pembayaran sebesar Rp0,11 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara PembayaranNomor : 005/BA.BYR/PA/JL-BM/2025 tanggal 03 Juni 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp3.429.370.699,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Buntut Pilanduk - Mamantang dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1.023.819.351,12 yang dilaksanakan oleh CV. Lidy's Pratama sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 05420/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 sebesar Rp1.023.819.351,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp134.079.835,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp889.739.516,00 sehingga masih terdapat selisih kurang pembayaran sebesar Rp0,12 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara PembayaranNomor : 013/BA.BYR/PA/JL-BM/2025 tanggal 28 Juni 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp1.023.819.351,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp982.778.073,82 yang dilaksanakan oleh CV. Barakat Mandiri Teknik sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 03818/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp982.778.074,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp105.322.992,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp877.455.082,00 sehingga masih terdapat selisih lebih pembayaran sebesar Rp0,18 yang disebabkan pengajuan pelunasan utang mengacu pada perhitungan terakhir sesuai dengan dokumen Berita acara Pembayaran Nomor : 008/BA.BYR/PA/JL-BM/2025 tanggal 24 Juni 2025 dilakukan pembulatan sehingga nilai pembayaran menjadi Rp982.778.074,00 atas selisih tersebut dilakukan koreksi kurang untuk nilai utang sehingga nilai utang nihil.

7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan Pembangunan Gedung PKK Desa Mangkayahu dengan nilai penyelesaian pekerjaan sebesar Rp66.816.085,00 yang dilaksanakan oleh CV. Nakula Trio Putra sedangkan nilai pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor 12379/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/LS/12/2025 tanggal 08 Desember 2025 sebesar Rp59.835.300,00 yang dipergunakan untuk pembayaran utang per 31 Desember sebesar Rp40.887.455,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan di Tahun 2025 sebesar Rp18.947.845,00 sehingga masih terdapat selisih kurang pembayaran sebesar Rp6.980.785,00 yang merupakan kesalahan pada saat pengajuan pembayaran atas kekurangan pembayaran ini akan diselesaikan pada Tahun 2026.

Adapun rincian pembayaran per paket pekerjaan Penyelesaian Pembayaran Penundaan Pembayaran atas Perpanjangan Waktu/ Pemberian Kesempatan Melewati Tahun Anggaran setelah dikoreksi penjelasan diatas tersaji pada **Lampiran 40 dan 41**.

6.6. Utang Belanja Pihak Ke Tiga Tahun Anggaran 2025

Pada Tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat 10 Pekerjaan yang belum terbayar dikarenakan adanya kendala pada SKPD sehinngga terlambat penyampaian dokumen pengajuan pencairan dana ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dari Pekerjaan tersebut terdapat kewajiban Pemkab Balangan kepada Pihak Ketiga yang diakui sebagai Utang Pemkab Balangan kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.759.741.125,96 dan sisa Kewajiban atau potensi Utang Pemkab Balangan pada Tahun 2026 yang dikarenakan penyelesaian pekerjaan atas pemberian kesempatan sampai dengan Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp50.885.290,50, sehingga jumlah nilai pekerjaan yang belum terbayar sebesar Rp8.810.626.416,46, adapun pekerjaan yang belum terbayar tersebut terdapat pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 449 Jumlah Pekerjaan Yang Belum Terbayar Per SKPD

No	SKPD	Jumlah Paket Pekerjaan	Kewajiban Per 31 Desember 2025	Potensi Kewajiban Tahun 2026	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	2	1.405.998.120,00	-	1.405.998.120,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7	7.160.407.006,96	50.885.290,50	7.211.292.297,46
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1	193.335.999,00	-	193.335.999,00
Jumlah		**10**	**8.759.741.125,96**	**50.885.290,50**	**8.810.626.416,46**

Adapun rincian per paket pekerjaan TA 2025 yang belum terbayar tersaji pada **Lampiran 42.**

6.7. Piutang atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Laporan Keuangan *(audited)* PT Adaro Indonesia tahun buku 2023, PT Adaro memiliki kewajiban mengalokasikan keuntungan bersih bagian kabupaten/kota penghasil (2,5%) sebesar US$20,076,743 atau Rp318.718.295.125,00 jika dikalikan dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KM.10/KF.4 Tahun 2024, kewajiban tersebut sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara pasal 16 ayat 4 huruf b yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%. Penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih kepada pemerintah daerah kabupaten/kota masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi. Sehingga Pemkab Balangan belum bisa mencatat piutang atas kekurangan bagian pemerintah daerah atas IUPK pada Laporan Keuangan Tahun 2024. Pendapatan pendapatan ini telah dibayarkan oleh PT. Adaro pada tanggal 11 Juli 2025.

BAB VII
PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

LKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Penerangan Jalan	2025	436.675.824,00	-	436.675.824,00	-
2	Pajak Reklame	2025	12.254.875,00	8.057.375,00	3.841.625,00	16.470.625,00
3	PBB-P2	2025	3.257.489.819,00	477.408.849,00	430.664.738,00	3.304.233.930,00
4	Pajak Katering	2025	83.051.746,00	25.548.200,00	18.924.272,00	89.675.674,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	2025	91.746.515,00	24.000.440,00	4.737.176,00	111.009.779,00
6	Pajak Kebugaran	2025	50.000,00	-	50.000,00	-
7	Pajak Restoran	2025	-	16.911.000,00	-	16.911.000,00
8	Pajak Tempat Parkir	2025	-	46.200,00	-	46.200,00
9	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	2025	36.805.000,00	26.545.000,00	7.545.000,00	55.805.000,00
10	Retribusi Persampahan	2025	72.160.000,00	-	6.355.000,00	65.805.000,00
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2025	38.942.730,00	-	-	38.942.730,00
12	Jasa Pelayanan Kesehatan	2025	6.129.171.653,00	52.028.929.805,00	47.731.942.495,00	10.426.158.963,00
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	2025	5.904.856.117,00	1.837.367.002,65	2.861.225.211,00	4.880.997.908,65
14	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2025	360.000,00	-	-	360.000,00
15	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2025	2.194.318,50	-	-	2.194.318,50
16	Transfer Pusat	2025	1.223.130.370.000,00	12.739.629.000,00	526.564.799.000,00	709.305.200.000,00
17	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2025	1.697.069.820,00	-	1.697.069.820,00	-
18	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	2025	3.759.484.267,00		3.759.484.267,00	-
19	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB)	2025	17.444.159.085,00	25.484.258.114,00	17.444.159.085,00	25.484.258.114,00
20	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & AP)	2025	191.765.126,00	163.852.406,00	191.765.126,00	163.852.406,00
21	Pajak Rokok	2025	1.697.606.583,00	1.941.638.258,00	1.697.606.583,00	1.941.638.258,00
22	Piutang lainnya (BLUD)	2025	111.377.138,68	31.520.210,25	103.502.678,00	39.394.670,93
Jumlah			**1.264.097.590.617,18**	**94.805.711.859,90**	**602.960.347.900,00**	**755.942.954.577,08**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	SALDO PIUTANG NETTO
1	2	3	4	5
1	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
2	Pajak Reklame	16.470.625,00	881.611,88	15.589.013,12
3	PBB-P2	3.304.233.930,00	1.894.896.065,25	1.409.337.864,75
4	Pajak Mineral Bukan Logam	111.009.779,00	40.690.455,10	70.319.323,90
5	Pajak Katering	89.675.674,00	6.540.488,40	83.135.185,60
6	Pajak Kebugaran	-	-	-
7	Pajak Restoran	16.911.000,00	84.555,00	16.826.445,00
8	Pajak Tempat Parkir	46.200,00	4.620,00	41.580,00
9	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	55.805.000,00	35.916.250,00	19.888.750,00
10	Retribusi Persampahan	65.805.000,00	65.805.000,00	-
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.942.730,00	38.942.730,00	-
12	Jasa Pelayanan Kesehatan	10.426.158.963,00	58.679.021,00	10.367.479.942,00
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	4.880.997.908,65	-	4.880.997.908,65
14	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	360.000,00	1.800,00	358.200,00
15	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.194.318,50	10.971,59	2.183.346,91
16	Piutang Pemerintah Pusat	709.305.200.000,00	-	709.305.200.000,00
17	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-
18	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	-	-	-
19	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB - KB)	25.484.258.114,00	-	25.484.258.114,00
20	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & AP)	163.852.406,00	-	163.852.406,00
21	Pajak Rokok	1.941.638.258,00	-	1.941.638.258,00
22	Piutang lainnya (BLUD)	39.394.670,93	-	39.394.670,93
Jumlah		**755.942.954.577,08**	**2.142.453.568,22**	**753.800.501.008,86**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

No	Tahun	Jenis Ternak	Jenis Kelamin	Jumlah (ekor)	Harga Perolehan/ ekor	Harga SPK Penggaduh/ ekor	Nilai Total SPK Penggaduh *)	Jatuh Tempo	Ternak Mati		Ternak Majir/ Potong Paksa **)		Setoran Potong Paksa ***)	Sisa Ternak	Setoran Ternak	Nilai Setoran Ternak Redistrisbusi ****)	Piutang 31 Desember 2025					Nilai Piutang	Penyisihan Piutang					Not Realizable Value
																	Piutang Ternak		Piutang Uang Senilai Ternak Sesuai SPK	Piutang Bunga	Piutang Keuntungan		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Tak Tertagih	Total	
									Jml	Nilai	Jml	Nilai					Jml	Nilai										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(7)*(10)	(12)	(13)=(7)*(12)	(14)	(15)=(5)-	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(19)+(20)+(21)+(22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)=(24)+(25)+(26)+(27)	(29)=(23)-(28)
1	2006	Sapi	Jantan	9	403.949.700,00	3.900.000,00	35.100.000,00	02/10/2011	2	7.800.000,00	7	27.300.000,00	17.089.000,00	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sapi	Betina	99		3.000.000,00	297.000.000,00	02/10/2011	34	102.000.000,00	29	87.000.000,00	34.600.000,00	36	4	12.000.000,00	36	108.000.000,00		32.400.000,00	-	140.400.000,00	-	-	-	140.400.000,00	140.400.000,00	-
2	2006	Kambing	Jantan	20	94.900.000,00	500.000,00	10.000.000,00	16/10/2009	19	9.500.000,00	0	-		1	0	-	2	1.000.000,00	-	150.000,00	-	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-
		Kambing	Betina	60		500.000,00	30.000.000,00	16/10/2009	59	29.500.000,00	0	-		1	0	-	2	1.000.000,00	-	150.000,00	-	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-
3	2007	Sapi	Jantan	30	246.770.000,00	3.500.000,00	105.000.000,00	13/11/2012	5	17.500.000,00	3	10.500.000,00	10.500.000,00	22	0	-	22	77.000.000,00		23.100.000,00	-	100.100.000,00	-	-	-	100.100.000,00	100.100.000,00	-
		Sapi	Betina	30		3.250.000,00	97.500.000,00	13/11/2012	4	13.000.000,00	0	-		26	3	9.750.000,00	26	84.500.000,00		25.350.000,00	-	109.850.000,00	-	-	-	109.850.000,00	109.850.000,00	-
4	2007	Kambing	Jantan	1	14.860.000,00	500.000,00	500.000,00	06/11/2010	0	-	0	-	-	1	0	-	2	1.000.000,00	-	150.000,00	-	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-
		Kambing	Betina	9		500.000,00	4.500.000,00	06/11/2010	7	3.500.000,00	0	-		2	0	-	4	2.000.000,00	-	300.000,00	-	2.300.000,00	-	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-
5	2008	Sapi	Jantan	31	270.800.000,00	3.500.000,00	108.500.000,00	24/06/2011	7	24.500.000,00	2	7.000.000,00	1.950.000,00	22	3	10.500.000,00	22	77.000.000,00	-	23.100.000,00	-	100.100.000,00	-	-	-	100.100.000,00	100.100.000,00	-
		Sapi	Betina	29		3.500.000,00	101.500.000,00	24/06/2013	8	28.000.000,00	4	14.000.000,00	8.725.000,00	17	0	-	17	59.500.000,00	-	17.850.000,00	-	77.350.000,00	-	-	-	77.350.000,00	77.350.000,00	-
6	2009	Sapi	Jantan	10	59.600.000,00	4.500.000,00	45.000.000,00	17/09/2012	3	13.500.000,00	7	31.500.000,00	19.150.000,00	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sapi	Betina	0		-	-	-	0	-	0	-		0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2010	Sapi	Jantan	0	189.040.000,00	-	-	-	0	-	0	-		0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sapi	Betina	34		3.500.000,00	119.000.000,00	28/04/2013	5	17.500.000,00	0	-		29	0	-	29	101.500.000,00	-	30.450.000,00	-	131.950.000,00	-	-	-	131.950.000,00	131.950.000,00	-
				362	**1.279.919.700,00**		**953.600.000,00**		**153**	**266.300.000,00**	**52**	**177.300.000,00**	**92.014.000,00**	**157**	**10**	**32.250.000,00**	**162**	**512.500.000,00**	**-**	**153.000.000,00**	**-**	**665.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**665.500.000,00**	**665.500.000,00**	**-**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Akhir Tahun	Sisa Modal yang belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9+11-12
1	2023	Bank BPD Kalsel	Peraturan Daerah	Kas/ Tunai	-	908.397.600.000,00	-	908.397.600.000,00	-	-	-	908.397.600.000,00
2	2023	PD BPR Paringin	Peraturan Daerah	Kas/ Tunai	-	21.265.484.813,04	-	21.265.484.813,04	-	1.317.399.184,32	521.442.126,00	22.061.441.871,36
3	2023	PDAM Balangan	Peraturan Daerah	Kas/ Tunai	-	174.334.028.016,07	-	174.334.028.016,07	-	1.193.420.752,02	-	175.527.448.768,09
4	2023	PT. Asabaru Daya Cipta Lestari	Peraturan Daerah	Kas/ Tunai	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	-	-	-	20.000.000.000,00
5	2023	KSU Sanggam Mandiri	Surat Perjanjian Penyertaan Modal	Kas/ Tunai	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
6	2023	KUD Kita	Surat Perjanjian Penyertaan Modal	Kas/ Tunai	100.000.000,00	15.988.000,00	-	15.988.000,00	-	-	-	15.988.000,00
7	2023	Koperasi Wanita Sinar	Surat Perjanjian Penyertaan Modal	Kas/ Tunai	100.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00
8	2023	Koperasi PNPM Pedesaaan	Surat Perjanjian Penyertaan Modal	Kas/ Tunai	100.000.000,00	43.830.000,00	-	43.830.000,00	-	-	-	43.830.000,00
		JUMLAH				**1.124.201.930.829,11**	**-**	**1.124.201.930.829,11**	**-**	**2.510.819.936,34**	**521.442.126,00**	**1.126.191.308.639,45**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XII : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	502.128.333.512,00	61.187.954.206,00	(917.600.000,00)	562.398.687.718,00
2	PERALATAN DAN MESIN	988.477.540.498,00	161.172.269.256,00	(11.202.328.452,00)	1.138.447.481.302,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.360.559.912.324,42	310.019.531.367,91	(63.757.827.205,33)	1.606.821.616.487,00
4	JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.685.719.280.826,42	493.423.467.872,96	(17.586.077.626,96)	3.161.556.671.072,42
5	ASET TETAP LAINNYA	9.753.400.327,00	1.879.591.836,00	(1.573.695.286,00)	10.059.296.877,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	15.345.808.759,00	6.597.707.630,00	(15.017.280.242,00)	6.926.236.147,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.423.329.601.218,00)	(1.773.334.454.257,00)	1.637.841.619.577,00	(2.558.822.435.898,00)
JUMLAH		**3.138.654.675.028,84**	**(739.053.932.088,13)**	**1.527.786.810.764,71**	**3.927.387.553.705,42**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XIII : Peraturan Daerah TA 2025

NOMOR : 4 Tahun 2026

TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	25.595.518.353,00	205.884.559.244,00	443.424.357.851,00	6.406.230.307,00	471.655.667,00	290.673.785,00	682.072.995.207,00
2	Dinas Kesehatan	20.226.218.849,00	312.009.539.284,00	161.361.952.572,00	48.796.144.568,00	56.562.450,00	179.377.494,00	542.629.795.217,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	356.132.289.436,00	43.666.929.821,00	423.716.716.720,00	2.914.106.777.478,42	6.847.411.200,00	5.796.674.298,00	3.750.266.798.953,42
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.120.000,00	18.414.584.384,00	3.303.046.429,00	39.859.118.140,00	-	-	61.661.868.953,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	8.430.462.306,00	2.454.902.691,00	29.072.000,00	49.372.800,00	-	10.963.809.797,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.100.000,00	4.158.510.075,00	5.725.804.542,00	28.369.000,00	-	-	9.990.783.617,00
7	Dinas Sosial	-	6.384.866.470,00	3.616.114.356,00	69.948.940,00	-	-	10.070.929.766,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51.260.000,00	11.819.273.417,00	7.002.969.542,00	110.268.591.320,00	14.300.000,00	199.444.800,00	129.355.839.079,00
9	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	5.364.949.539,00	42.528.362.286,00	24.081.361.090,00	6.357.959.670,00	218.115.000,00	128.708.451,00	78.679.456.036,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	8.232.160.987,00	7.099.192.734,00	115.239.700,00	6.900.000,00	-	15.453.493.421,00
11	Dinas Perhubungan	10.348.455.000,00	132.734.703.662,00	8.459.756.948,00	1.038.240.644,00	-	98.645.589,00	152.679.801.843,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-	8.377.438.128,00	14.263.959.686,00	1.468.246.618,00	174.358.920,00	87.502.220,00	24.371.505.572,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.393.451.736,00	6.916.796.891,00	63.116.001.327,00	527.919.285,00	-	99.000.000,00	81.053.169.239,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	574.908.350,00	13.325.209.881,00	33.528.046.251,00	2.510.393.051,00	-	-	49.938.557.533,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	11.448.493.480,00	-	-	19.950.000,00	-	11.468.443.480,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dan Pariwisata	5.200.620.000,00	6.949.917.487,00	20.636.191.098,00	950.879.969,00	50.227.000,00	-	33.787.835.554,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	21.900.000,00	7.783.114.436,00	8.943.823.735,00	1.357.997.220,00	217.916.000,00	-	18.324.751.391,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	18.722.396.000,00	20.195.919.826,00	58.568.190.979,00	9.851.864.426,00	322.968.200,00	-	107.661.339.431,00

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
19	Sekretariat Daerah	83.823.705.567,00	122.305.321.210,00	158.115.893.665,00	6.748.775.417,00	536.044.140,00	-	371.529.739.999,00
20	Inspektorat Kabupaten	715.700.000,00	14.665.862.729,00	11.990.833.002,00	483.968.990,00	27.272.050,00	-	27.883.636.771,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	610.500.000,00	9.502.325.007,00	11.744.691.575,00	174.889.640,00	119.722.500,00	-	22.152.128.722,00
22	Badan Pengeolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	9.448.840.000,00	39.808.900.588,00	40.502.850.971,00	1.087.134.510,00	-	-	90.847.726.069,00
23	Badan Keegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	7.929.552.633,00	10.877.932.281,00	-	-	-	18.807.484.914,00
24	Pengelola BMD	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	2.774.504.000,00	33.497.186.225,00	26.835.178.545,00	1.560.838.157,00	816.070.950,00	46.209.510,00	65.529.987.387,00
26	Kecamatan Lampihong	466.700.000,00	3.981.844.480,00	9.001.180.702,00	9.735.000,00	34.700.000,00	-	13.494.160.182,00
27	Kecamatan Batumandi	346.696.000,00	4.192.810.834,00	7.625.918.200,00	14.916.000,00	-	-	12.180.341.034,00
28	Kecamatan Awayan	957.200.000,00	3.366.812.810,00	5.161.939.050,00	-	7.150.000,00	-	9.493.101.860,00
29	Kecamatan Halong	447.900.000,00	4.278.477.555,00	5.110.486.685,00	12.064.000,00	-	-	9.848.928.240,00
30	Kecamatan Juai	399.060.000,00	3.937.553.940,00	7.124.664.514,00	6.000.000,00	7.150.000,00	-	11.474.428.454,00
31	Kecamatan Paringin	7.803.321.388,00	9.675.947.710,00	11.782.515.217,00	4.404.281.122,00	54.450.000,00	-	33.720.515.437,00
32	Kecamatan Tebing Tinggi	556.613.000,00	5.376.326.890,00	6.810.021.879,00	22.358.700,00	7.000.000,00	-	12.772.320.469,00
33	Kecamatan Paringin Selatan	1.252.760.500,00	6.667.716.626,00	4.835.121.650,00	3.288.717.200,00	-	-	16.044.315.976,00
JUMLAH		**562.398.687.718,00**	**1.138.447.481.302,00**	**1.606.821.616.487,00**	**3.161.556.671.072,42**	**10.059.296.877,00**	**6.926.236.147,00**	**6.486.209.989.603,42**

Paringin, 07 Agustus 2026

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XIV : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DPRD	Jasa Konsultan Perencanaan Review Gudang Arsip	46.209.510,00
2	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Pembangunan Poskesdes Batumandi	9.657.000,00
		Perencanaan Paving Halaman Puskesmas Halong	9.657.000,00
		Perencanaan Relokasi Poskedes Murung Abuin	24.697.500,00
		Perencanaan Rehab Poskesdes Binjai	7.270.500,00
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	850.000,00
		Perencanaan Rumah Travo (APBD)	13.520.564,00
		Ruang Bersalin	113.724.930,00
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perencanaan Menara Triangle Desa Mayanau	11.877.000,00
		Perencanaan Menara Triangle Ds Hauwai	13.072.250,00
		Perencanaan Menara Triangle Ds Surya Tama	13.072.250,00
		Perencanaan Menara Triangle Ds Mamantang	13.072.250,00
		Perencanaan Menara Internet Pucak Caparu Ajung	12.317.035,00
		Perencanaan Menara Internet SD Ajung	12.317.035,00
		Perencanaan Menara Internet SD Bata	11.774.400,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	Perencanaan Halte Kab.Balangan TA.2025	98.645.589,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Perencanaan Pembangunan Jembatan Balida (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	99.123.000,00
		Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Box Culvert Tungkap Kelurahan Batu Piring (CV. RMH KONSULTAN)	99.339.450,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Jembatan Sungsum (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	99.123.000,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Puja Sera Belakang Pasar Adaro Tahap V (CV. KARYASA CONSULINDO)	78.311.261,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Sumber Agung - Karya (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	99.100.800,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Mesjid YAMP - Polsek Paringin Kecamatan Paringin	99.211.800,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lajar - Mundar (CV. RMH KONSULTAN)	99.599.190,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Gampa Kec. Paringin (CV. RMH KONSULTAN)	99.343.446,00
		Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Jaya - Lok Batu Kecamatan Awayan (CV. AMBER CONSULTANT)	99.120.558,00
		Perencanaan Rekontruksi Jalan Longsor Matang Lurus (CV. R-PLAN ARSIMETRIKA)	98.778.900,00
		Pembayaran Termyn 100% PerencanaanPeningkatan Jalan Panaitan - Matang Lurus (CV. CLICK DESAIN KONSULTAN)	98.967.600,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Kusambi Hilir - Basio (CV. KARYA DESARI)	99.295.050,00
		Angsuran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Baramban - Pulantan (CV. EL BANJARO CLASICO)	99.169.620,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Sirap - Brai (CV. RMH KONSULTAN)	99.343.446,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Komplek Pendidikan - Gampa Kecamatan Paringin Selatan (CV. BERKAH DESAIN KONSULTANT)	99.296.714,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Rt. 1 Desa Baruh Panyambaran (CV. SKALA MULTIREKA)	99.081.375,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Paran Rt. 2 Kec. Paringin	99.059.175,00
		Pembayaran 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Mungkur Uyam - Binjai Punggal Kecamatan Juai (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	99.367.200,00
		Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Pitap - Awayan (CV. RUHAFI ADHIRAJASA)	98.956.500,00
		Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Galumbang - Muara Kuaw (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	99.123.000,00
		Pembayaran 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Kapul - Pasar Halong Kecamatan Halong (CV. MITRA BANUA MANDIRI)	99.243.321,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Hauwai - Aniungan Kecamatan Halong (CV. AMANDA NUSANTARA)	99.089.700,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Halong - Gunung Belawan Kecamatan Halong (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	99.533.700,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Muara Pitap - Lingsir (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	99.594.750,00
		Perencanaan Peningkatan Jalan Awayan - Guha Kecamatan Awayan (CV. BANUATAM TEKNIK CONSULTANT)	99.158.200,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lamida Bawah Rt. 1 Kec. Paringin	99.447.675,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Tangalin - Jinamun (CV. ASKARA JAYA KONSULTAN)	99.567.000,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Baruh Penyambaran - Sumber Agung (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	99.567.000,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lasung Batu - Bayu (PT. PRIMA DINAMIKA SELARAS)	99.411.600,00
		Perencanaan Jalan Bahan - Pasar Halong Kecamatan Halong (PT. KULA BANUA KONSULTAN)	99.504.840,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Mungkur Uyam - Kantor Camat Kecamatan Juai (CV. M.I.A. 13)	99.478.200,00
		Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi (CV. MITRA PRIMA DESAIN)	99.345.000,00
		Termin 100% Pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi Jalan Longsor Desa Murung Jambu Kecamatan Paringin Selatan	98.896.116,00
		Pembayaran Termyn 100% Perencanaan Peningkatan Jalan Marias/Muara Ninian - Balahing Kura-kura (CV. MITRA SOLUSI ENGINEERING)	99.123.000,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Gunung Batu - Iyam (CV. TANJUNG PRIMANUSA PERSADA)	99.145.200,00
		Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Jalan Mauya - Binuang Santang (CV. DEYA CONSULTANT ENGINEERING)	99.378.300,00
		Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Mamigang RT. 1 (CV. CITRA MANDIRI CONSULTANT)	99.067.500,00
		Perencanaan Pembangunan Pusat Perbankan Kab. Balangan (CV. GEOTEK INTERMEDIA CONSULTANT)	78.450.011,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
		Perencanaan Peningkatan Tugu Perjuangan Dan Kawasan DPMPTSP Kab. Balangan (CV. RIA KONSULTAN)	78.311.261,00
		Angsuran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Bahasa Disnakertrans Kab. Balangan (CV. RAMA GRAHA CONSULTANT)	93.955.500,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Halaman Sekretariat Daerah Kab. Balangan (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	99.768.465,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Taman MPP Kab. Balangan (CV. LINE BORNEO CONSULTANT)	99.790.665,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan RTH Komplek Perkantoran Paringin Selatan (CV. BANJAR HULU KONSULTAN)	99.735.165,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Gedung Kantor dan Gedung Serbaguna Kelurahan Paringin Timur (CV. KARYA DESARI)	99.790.665,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kawasan MPP Kab. Balangan (CV. JOINT CONSULTANT ENGINEERING)	99.931.080,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Review Struktur Bangunan Stadion Garuda Maharam (CV. NISKALA ASITEKNIK BANUA)	99.790.665,00
		Pekerjaan Perencanaan Penambahan Ruang Kantor DKUKMNAKER Kab. Balangan (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	99.776.235,00
		Perencanaan Penambahan Ruang Kantor DISDUKCAPIL Kab. Balangan (CV. JASA REKA ARTISTIKA)	99.836.932,00
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	99.836.932,00
		Perencanaan Pembangunan Gedung UKPBJ Kab. Balangan (CV. GANESH GAUTAMA KONSULTAN)	99.685.215,00
		Perencanaan Penambahan Kantor Baru Sekretariat Daerah Kab. balangan (CV. GANESH GAUTAMA KONSULTAN)	99.982.972,00
		Perencanaan Peningkatan Kantor Sekretariat Daerah Kab. Balangan (CV. WIYASA DRAWANA)	99.982.972,00
		Perencanaan Pembangunan Gudang BPBD Lanjutan (CV. AMBER CONSULTANT)	99.345.000,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Kawasan Terpadu Komplek Islamic Centre (CV. SAMUDERA JAYA KONSULTAN)	99.776.235,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI PINUAN DESA AUH KEC. TEBING TINGGI (CV. CAKRAWALA BORNEO NUSANTARA)	99.289.500,00
		Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran Kab. Balangan (CV. ESTIMA ENGITECS)	99.858.930,00
		Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah Dinsos Kab. Balangan (CV. CIVIL DESIGN)	99.916.511,00
		Perencanaan Peningkatan Jalan Hauwai - Suryatama/Mihu (CV. ASKARA JAYA KONSULTAN)	99.589.200,00
		Perencanaan Peningkatan Jalan Karuh - Sungai Raya Kecamatan Batumandi (CV. GRIYASHANTA)	99.012.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perencanaan Karya Bakti TNI Jalan Desa Marajai - Mauya	99.722.400,00
		Perencanaan Karya Bakti TNI Karya Bakti TNI Jalan Desa Gunung Manau - Juuh	99.722.400,00
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Marias Kec. Juai	13.740.000,00
		Honorarium KPA Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	500.000,00
		Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan/Paving Halaman SDN Hauwai 1 Kec. Halong	13.500.000,00
		Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah TK Ibunda Desa Matang	13.860.000,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar TK. Negeri Mundar Kec. Lampihong	13.442.100,00
		Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Paringin	13.544.497,00
		Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Rantau Paku Kec. Tebing Tinggi	13.686.300,00
		Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Baruh Panyambaran 2, SD Kecil	11.081.500,00
		Perencanaan Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Tunas Bangsa Ds. Hauwai Kec. Halong	6.844.000,00
		Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Dewi Sartika Ds. Teluk Bayur Kec.	13.780.000,00
		Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Galumbang Kec. Juai	96.951.000,00
		Perencanaan Pemasangan Paving SDN Mantimin 2	9.937.275,00
		Perencanaan Pem. Kanopi TKN Tunas Harapan	10.319.000,00
		Perencanaan Pemeliharaan Gedung Budaya	12.254.500,00
		Perencanaan Rehabilitasi Pagar Korwil Paringin Selatan	9.715.900,00
		Perencanaan Pemb. Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK. Al Ikhlas Ds. Panimbaan Kec.	9.700.100,00
		Perencanaan Pengecatan SDN Hilir Pasar Kec. Lampihong	13.817.613,00
		Perencanaan Pembangunan Halaman SDN Pimping Kec. Lampihong	14.000.000,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perencanaan Rehabilitasi Pasar Galumbang Kec. Juai	99.000.000,00

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4
9	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Konsultan Perencanaan Pembuatan Landasan TPS Bidang Pengelolaan Persampahan	14.485.500,00
		Konsultan Perencanaan Bangunan Parkir Bidang Tata Lingkungan	29.553.750,00
		Konsultan Pengawasan Pembuatan Landasan TPS Bidang Pengelolaan Persampahan	9.657.000,00
		Konsultan Perencanaan Penggantian Tempat Bermain Anak di RTH Batumandi Bidang Tata	6.482.400,00
		Perencanaan Selasar Membran Perahu dan Parkiran Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.213.550,00
		Perencanaan Pembangunan Papan Nama RTH Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.874.000,00
		Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Kebun Raya Bidang Tata Lingkungan Hidup	14.874.000,00
		Perencanaan Rehab Gedung Laboratorium Bidang Pengendalian Pencemaran	14.754.930,00
		Petrencanaan Rehab Parkir Laboratorium UPT Laboratorium	9.813.321,00
JUMLAH			**6.926.236.147,00**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XV : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	TUNTUTAN GANTI RUGI	538.784.181,00	-	-	538.784.181,00
2	ASET TIDAK BERWUJUD	6.670.167.200,00	1.070.699.699,67	0,67	7.740.866.899,00
3	ASET LAIN-LAIN	102.555.885.116,00	14.229.391.647,42	11.591.797.148,00	105.193.479.615,42
4	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(4.088.865.460,00)	(2.721.036.681,00)	2.494.457.410,00	(4.315.444.731,00)
5	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	(62.034.826.165,48)	(7.838.665.946,00)	8.179.472.256,00	(61.694.019.855,48)
6	PROPERTI INVESTASI	114.170.000,00	-	-	114.170.000,00
JUMLAH		**43.755.314.871,52**	**4.740.388.720,09**	**22.265.726.814,67**	**47.577.836.108,94**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XVI : Peraturan Daerah TA 2025

NOMOR : 4 Tahun 2026

TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DI RENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XVII : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	186.392.548,50	362.501.566,00	218.775.905,11	330.118.209,39
3	Utang Belanja	59.493.224.212,94	22.107.408.561,87	57.837.070.773,34	23.763.562.001,47
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.913.527,00	28.532.691,00	37.561.591,00	3.884.627,00
JUMLAH		**59.692.530.288,44**	**22.498.442.818,87**	**58.093.408.269,45**	**24.097.564.837,86**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XVIII : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
JUMLAH					

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XIX : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DI SELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
1	**1.03.1.04.0.00.01**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**	**4.672.917.000,00**	**19.874.723.873,18**	**19.702.101.167,07**	**-**	**27.582.797.971,00**	**7.160.407.006,96**	**78.992.947.018,21**	**7.211.292.297,46**
		Kantor Pengadilan Negeri	4.672.917.000,00	-	-	-	-	-	4.672.917.000,00	-
		Peningkatan Jalan Batumandi - Sei Hanyar	-	1.780.401.600,00	-	-	-	-	1.780.401.600,00	-
		Peningkatan Jalan Puskesmas Halong - Binjai Punggal	-	1.278.369.400,00	-	-	-	-	1.278.369.400,00	-
		Peningkatan Jalan Liyu - Upau	-	2.818.183.100,00	-	-	-	-	2.818.183.100,00	-
		Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang	-	966.819.100,00	-	-	-	-	966.819.100,00	-
		Pembangunan Box Culvert Desa Ambakiang	-	522.836.300,00	-	-	-	-	522.836.300,00	-
		Pembangunan Jembatan Desa Matang Hanau	-	127.688.700,00	-	-	-	-	127.688.700,00	-
		Pembangunan Dinding Penahan Tanah Gedung Taman Budaya	-	861.903.882,18	-	-	-	-	861.903.882,18	-
		Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Balangan Lanjutan	-	5.811.963.751,00	-	-	-	-	5.811.963.751,00	-
		Peningkatan Jalan Muara Pitap - Awayan	-	2.145.622.500,00	-	-	-	-	2.145.622.500,00	-
		Peningkatan Jalan Wangkili – Pudak	-	742.344.600,00	-	-	-	-	742.344.600,00	-
		Pembangunan Jembatan Langkap - Ajung	-	293.243.640,00	-	-	-	-	293.243.640,00	-
		Peningkatan Jalan Matang Lurus - Pimping	-	229.288.800,00	-	-	-	-	229.288.800,00	-
		Peningkatan Jalan Binuang Santang - Ajung	-	278.009.100,00	-	-	-	-	278.009.100,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lalayau	-	120.460.000,00	-	-	-	-	120.460.000,00	-
		Pembangunan Pile slab Gunung Manau	-	1.081.389.550,00	-	-	-	-	1.081.389.550,00	-
		Betonisasi Batu Piring Ke. Batu Piring	-	50.178.300,00	-	-	-	-	50.178.300,00	-
		Betonisasi, Harapan Baru Desa Harapan Baru	-	25.059.000,00	-	-	-	-	25.059.000,00	-
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Desa Gunung Riyut Rt.03	-	51.035.100,00	-	-	-	-	51.035.100,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Padang Raya Kec. Halong	-	50.565.000,00	-	-	-	-	50.565.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lalayau Rt. 03 Kec. Juai	-	19.757.400,00	-	-	-	-	19.757.400,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Mapat Desa Binuang Santang Kec. Halong	-	50.820.000,00	-	-	-	-	50.820.000,00	-
		Lanjutan Drainase Desa Mungkur Uyam Kec. Juai	-	51.043.500,00	-	-	-	-	51.043.500,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Agung Kec. Halong	-	50.833.200,00	-	-	-	-	50.833.200,00	-
		Pembuatan Drainase Desa Tabuan Rt. 3 Kec. Halong	-	50.720.100,00	-	-	-	-	50.720.100,00	-
		Pembuatan Drainase Desa Baruh Panyambaran Kec. Halong	-	91.223.750,00	-	-	-	-	91.223.750,00	-
		Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	-	162.200.000,00	-	-	-	-	162.200.000,00	-
		Pembuatan Drainase Paringin Timur Rt. 1	-	158.564.500,00	-	-	-	-	158.564.500,00	-
		Pengawasan Lanjutan Drainase Desa Mungkur Uyam Kec. Juai	-	4.200.000,00	-	-	-	-	4.200.000,00	-
		Peningkatan Jalan Muara Pitap - Awayan	-	-	1.439.377.500,00	-	-	-	1.439.377.500,00	-
		Peningkatan Jalan Wangkili - Pudak	-	-	1.690.816.400,00	-	-	-	1.690.816.400,00	-
		Pembangunan Jembatan Desa Pimping	-	-	488.332.000,00	-	-	-	488.332.000,00	-
		Pembangunan Jembatan Langkap - Ajung	-	-	541.174.960,00	-	-	-	541.174.960,00	-
		Peningkatan Jalan Matang Lurus - Pimping	-	-	517.750.200,00	-	-	-	517.750.200,00	-
		Peningkatan Jalan Binuang Santang - Ajung	-	-	648.687.900,00	-	-	-	648.687.900,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lalayau	-	-	196.540.000,00	-	-	-	196.540.000,00	-
		Pembangunan Pile slab Gunung Manau	-	-	36.002.450,00	-	-	-	36.002.450,00	-
		Pembangunan Jalan Desa Harapan Baru RT. 12	-	-	174.048.000,00	-	-	-	174.048.000,00	-
		Pembangunan Jalan Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	169.466.000,00	-	-	-	169.466.000,00	-
		Pembangunan Jembatan Desa Mampari RT. 04	-	-	130.110.000,00	-	-	-	130.110.000,00	-
		Pembangunan Jembatan Ulin Desa Tangalin RT. 03	-	-	130.242.000,00	-	-	-	130.242.000,00	-
		Pembangunan Titian Ulin Desa Bakung RT. 01	-	-	130.269.000,00	-	-	-	130.269.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Box Culvert Desa Mantimin Kec. Batumandi	-	-	106.075.000,00	-	-	-	106.075.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lajar - Trans Pupuyuan	-	-	173.696.000,00	-	-	-	173.696.000,00	-
		Pembangunan Box Culvert Desa Binuang Santang	-	-	130.488.000,00	-	-	-	130.488.000,00	-
		Pembangunan Titian Ulin Sungai Kungsi Desa lajar RT. 1	-	-	81.667.000,00	-	-	-	81.667.000,00	-
		Pembanguna Siring Jalan Desa Hilir pasar	-	-	125.849.000,00	-	-	-	125.849.000,00	-
		Pembangunan Titian Ulin Desa Teluk Mesjid	-	-	130.286.000,00	-	-	-	130.286.000,00	-
		Pembangunan Jembatan Belait Desa Batu Merah	-	-	174.175.000,00	-	-	-	174.175.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Kusambi Hilir RT. 2	-	-	174.180.000,00	-	-	-	174.180.000,00	-
		Pembangunan Box Culvert Desa Lokbatu RT. 03	-	-	81.625.000,00	-	-	-	81.625.000,00	-
		Pembangunan Jalan desa riwa RT.08	-	-	174.118.000,00	-	-	-	174.118.000,00	-
		Pembangunan Titian Ulin Belakang Mesjid Desa Lajar RT. 2	-	-	130.320.000,00	-	-	-	130.320.000,00	-
		Pembangunan Siring Jalan Desa Muara Pitap	-	-	81.641.000,00	-	-	-	81.641.000,00	-
		Pembangunan Siring Jalan Desa Matang Hanau	-	-	139.114.000,00	-	-	-	139.114.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Kandang Jaya	-	-	173.190.000,00	-	-	-	173.190.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lokpanginangan	-	-	173.900.000,00	-	-	-	173.900.000,00	-
		Pembangunan Box Culvert Desa Lajar	-	-	174.267.000,00	-	-	-	174.267.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Tanah Habang Kanan	-	-	194.345.000,00	-	-	-	194.345.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Gunung Pandau RT. 10	-	-	173.750.000,00	-	-	-	173.750.000,00	-
		Pembangunan Titian Ulin RAI Desa Lajar RT. 1	-	-	81.680.000,00	-	-	-	81.680.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Tanah Habang Kiri	-	-	129.940.000,00	-	-	-	129.940.000,00	-
		Pemeliharaan Jalan Tabuan - Uren	-	-	194.414.000,00	-	-	-	194.414.000,00	-
		Pembangunan Jalan Batu Piring Kec. Paringin Selatan	-	-	173.797.000,00	-	-	-	173.797.000,00	-
		Rehabilitasi Jalan Trans Matang Hanau	-	-	173.724.000,00	-	-	-	173.724.000,00	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Matang Lurus	-	-	174.280.000,00	-	-	-	174.280.000,00	-
		Pembangunan Siring Jalan Desa Lajar	-	-	173.538.000,00	-	-	-	173.538.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Perencanaan Peningkatan Jalan Tanah Habang Kiri - Pimping	-	-	49.670.000,00	-	-	-	49.670.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Lokbatu RT. 03	-	-	13.180.000,00	-	-	-	13.180.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Titian Ulin Desa Karuh	-	-	13.220.000,00	-	-	-	13.220.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Mampari RT. 04	-	-	13.230.000,00	-	-	-	13.230.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Lok Batung Kec. Paringin	-	-	13.180.000,00	-	-	-	13.180.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Titian Ulin Baungin Desa Maradap	-	-	13.220.000,00	-	-	-	13.220.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Harapan Baru RT. 12	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Titian Ulin Akai Desa Pupuyuan	-	-	13.310.000,00	-	-	-	13.310.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Platdecker Desa Badalungga	-	-	13.180.000,00	-	-	-	13.180.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Jembatan Ulin Desa Tangalin RT. 03	-	-	13.230.000,00	-	-	-	13.230.000,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Jalan Trans Matang Hanau	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Siring Jalan Desa Muara Pitap	-	-	13.270.000,00	-	-	-	13.270.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Pile Slab Gunung Manau	-	-	45.760.000,00	-	-	-	45.760.000,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pulantan - Baramban	-	-	18.490.000,00	-	-	-	18.490.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Galumbang Kec. Parsel	-	-	13.180.000,00	-	-	-	13.180.000,00	-
		Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Tanah Habang Kanan	-	-	14.750.000,00	-	-	-	14.750.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Titian Ulin Sungai Kungsi Desa Lajar RT. 1	-	-	11.640.000,00	-	-	-	11.640.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Jembatan Belait Desa Batu Merah	-	-	16.140.000,00	-	-	-	16.140.000,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Tanah Habang Kanan	-	-	16.140.000,00	-	-	-	16.140.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Siring Jalan Arah Basio Kusambi Desa Lajar RT. 01	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Riwa RT.08	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Siring Jalan Desa Batumandi RT. 6	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Lasung Batu RT. 04	-	-	18.710.000,00	-	-	-	18.710.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Titian Ulin Desa Teluk Mesjid	-	-	13.310.000,00	-	-	-	13.310.000,00	-
		Betonisasi Batu Piring Ke. Batu Piring	-	-	117.082.700,00	-	-	-	117.082.700,00	-
		Betonisasi Perumahan Riski Balangan Blok G Kel. Batu Piring	-	-	167.240.000,00	-	-	-	167.240.000,00	-
		Betonisasi, Harapan Baru Desa Harapan Baru	-	-	58.471.000,00	-	-	-	58.471.000,00	-
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Desa Gunung Riyut RT.03	-	-	102.815.900,00	-	-	-	102.815.900,00	-
		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Desa Layap Kec. Paringin	-	-	168.704.000,00	-	-	-	168.704.000,00	-
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Padang Raya Kec. Halong	-	-	106.505.000,00	-	-	-	106.505.000,00	-
		Pembuatan Drainase Jalan Jurusan Tariwin-Bihara Desan Gunung Manau RT. 04 Kec. Batu Mandi	-	-	148.025.000,00	-	-	-	148.025.000,00	-
		Peningkatan Jalan Cor Pemukiman Desa Tawahan Kec. Juai	-	-	83.490.000,00	-	-	-	83.490.000,00	-
		Peningkatan Jalan Desa Mantuyan Kecamatan Halong	-	-	83.622.000,00	-	-	-	83.622.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jungkal Kec. Lampihong	-	-	83.420.000,00	-	-	-	83.420.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lalayau RT. 03 Kec. Juai	-	-	46.100.600,00	-	-	-	46.100.600,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tabuan Kec. Halong	-	-	83.621.000,00	-	-	-	83.621.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Mapat Desa Binuang Santang Kec. Halong	-	-	118.580.000,00	-	-	-	118.580.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Muara Pitap RT. 08 Kel. Batu Piring Kec. Parsel	-	-	154.056.000,00	-	-	-	154.056.000,00	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Sdnk Hampang Kec. Halong	-	-	83.621.000,00	-	-	-	83.621.000,00	-
		Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Gunung Pandau RT.09 Kec. Paringin	-	-	126.830.000,00	-	-	-	126.830.000,00	-
		Lanjutan Drainase Desa Mungkur Uyam Kec. Juai	-	-	119.101.500,00	-	-	-	119.101.500,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Agung Kec. Halong	-	-	118.610.800,00	-	-	-	118.610.800,00	-
		Pembuatan Drainase Desa Tabuan RT. 3 Kec. Halong	-	-	118.346.900,00	-	-	-	118.346.900,00	-
		Betonisasi Batu Piring Tungkap Kel. Batu Piring	-	-	167.262.000,00	-	-	-	167.262.000,00	-
		Pembuatan Drainase Desa Baruh Panyambaran Kec. Halong	-	-	4.801.250,00	-	-	-	4.801.250,00	-
		Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	-	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
		Pembuatan Drainase Paringin Timur RT. 1	-	-	8.345.500,00	-	-	-	8.345.500,00	-
		Pekerjaan Perencanaan Betonisasi Jalan Paringin Kota Kec. Paringin	-	-	12.100.000,00	-	-	-	12.100.000,00	-
		Perencanaan Betonisasi Jalan Lingkungan Desa Bungin RT. 06 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	12.100.000,00	-	-	-	12.100.000,00	-
		Perencanaan Betonisasi Jalan Lingkungan RT. 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringn	-	-	10.200.000,00	-	-	-	10.200.000,00	-
		Perencanaan Betonisasi Jalan Perumahan Haur Batu Permai Desa Haur Batu RT. 15 Kec. Paringin	-	-	11.900.000,00	-	-	-	11.900.000,00	-
		Perencanaan Betonisasi Jalan Tungkap RT. 07 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan	-	-	5.900.000,00	-	-	-	5.900.000,00	-
		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Dahai Kec. Paringin	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-
		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Layap Kec. Paringin	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-
		Perencanaan Pembuatan Drainase Desa Tabuan RT. 03 Kec Halong	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-
		Perencanaan Pembuatan Drainase Desa Tigarun Kec. Juai	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-
		Perencanaan Pembuatan Drainase Gunung Pandau RT. 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Perencanaan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Desa Lasung Batu RT.02 Kec. Paringin	-	-	5.900.000,00	-	-	-	5.900.000,00	-
		Perencanaan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Gunung Pandau RT. 09 Kec. Paringin	-	-	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-
		Perencanaan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Haur Batu RT.14 Kec. Paringin	-	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-
		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Desa Galumbang Kec. Paringin Selatan	-	-	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Desa Ambakiang	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Lingkungan Desa Bungin RT. 6 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Lingkungan RT. 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin	-	-	7.200.000,00	-	-	-	7.200.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Paringin Kota Kec. Paringin	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Perumahan Haur Batu Permai Desa Haur Batu RT.15 Kec. Paringin	-	-	8.500.000,00	-	-	-	8.500.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Jalan Tungkap RT. 07 Kel. Paringn Kec. Paringin Selatan	-	-	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	-
		Pengawasan Betonisasi Perumahan Riski Balangan Blok G Kel. Batu Piring	-	-	8.330.000,00	-	-	-	8.330.000,00	-
		Pengawasan Lanjutan Drainase Desa Mungkur Uyam Kec. Juai	-	-	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00	-
		Pengawasan Paving Blok Jalan Lingkungan Kel. Batu Piring RT.08 Kec. Paringin	-	-	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Dahai Kec. Paringin	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Layap Kec. Paringin	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Drainase Desa Babayau Kec. Paringin	-	-	8.480.000,00	-	-	-	8.480.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembuatan Drainase Desa Haur Batu RT.13 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin	-	-	7.640.000,00	-	-	-	7.640.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Drainase Desa Tabuan RT. 3 Kec. Halong	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Drainase Desa Tigarun Kec. Juai	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Drainase Gunung Pandau RT. 10 Kel. Paringin Timur Kec, Paringin	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Desa Lasung Batu RT. 2 Kec. Paringin	-	-	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin Gunung Pandau RT. 9 Kec. Paringin	-	-	6.400.000,00	-	-	-	6.400.000,00	-
		Pengawasan Pembuatan Pagar Kuburan Muslimin RT. 14 Haur Batu Kec. Paringin	-	-	4.300.000,00	-	-	-	4.300.000,00	-
		Pengawasan Pengecoran Jalan Lingkar Timur Gg. Rambutan RT.13 RW.5 Paringin Kota Kec. Paringin	-	-	7.650.000,00	-	-	-	7.650.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lajar	-	-	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Timbun Tulang RT.04	-	-	4.170.000,00	-	-	-	4.170.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Bumi Raya Indah Blok. 1 Kel. Batu Piring	-	-	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan RT.14 Kel. Paringin Kota Kec. Paringin	-	-	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan RT.06 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	8.330.000,00	-	-	-	8.330.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Desa Galumbang Kec. Paringin Selatan	-	-	8.600.000,00	-	-	-	8.600.000,00	-
		Perkuatan Tebing Sungai Kel. Batu Piring RT. 14	-	-	172.770.000,00	-	-	-	172.770.000,00	-
		Pengawasan Perkuatan Tebing Sungai Paket I	-	-	49.680.000,00	-	-	-	49.680.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Timbun Tulang	-	-	9.230.000,00	-	-	-	9.230.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Bungur	-	-	4.800.000,00	-	-	-	4.800.000,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Perkuatan Tebing Sungai Paket VI	-	-	49.700.000,00	-	-	-	49.700.000,00	-
		Pengawasan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Gunung Manau	-	-	9.260.000,00	-	-	-	9.260.000,00	-
		Perkuatan Tebing Sungai Desa Bangkal	-	-	172.805.600,00	-	-	-	172.805.600,00	-
		Pengawasan Pengerukan Sungai Paket III	-	-	24.800.000,00	-	-	-	24.800.000,00	-
		Pengawasan Pembangunan Pintu Air Desa Simpang Bumbuan	-	-	8.376.500,00	-	-	-	8.376.500,00	-
		Peningkatan Jalan Batumandi - Sei Hanyar	-	-	93.705.406,20	-	-	-	93.705.406,20	-
		Peningkatan Jalan Awayan - Tundakan Hulu	-	-	1.925.727.360,00	-	-	-	1.925.727.360,00	-
		Peningkatan Jalan Puskesmas Halong - Binjai Punggal	-	-	72.826.600,00	-	-	-	72.826.600,00	-
		Peningkatan Jalan Panaitan - Jimamun	-	-	689.096.251,00	-	-	-	689.096.251,00	-
		Peningkatan Jalan Liyu - Upau	-	-	150.348.119,50	-	-	-	150.348.119,50	-
		Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang	-	-	-	-	-	-	-	50.885.290,50
		Peningkatan Jalan Tanah Habang Kiri - Pimping	-	-	929.749.789,75	-	-	-	929.749.789,75	-
		Pemeliharaan Jalan Paringin - Muara Pitap	-	-	1.488.062.429,00	-	-	-	1.488.062.429,00	-
		Pemeliharaan Jalan Muara Pitap - Lingsir	-	-	106.945.641,30	-	-	-	106.945.641,30	-
		Pembangunan Box Culvert Desa Ambakiang	-	-	45.435.679,00	-	-	-	45.435.679,00	-
		Pembangunan Jembatan Desa Matang Hanau	-	-	203.833.728,10	-	-	-	203.833.728,10	-
		Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pulantan - Baramban	-	-	112.744.312,00	-	-	-	112.744.312,00	-
		Pembangunan Dinding Penahan Tanah Gedung Taman Budaya	-	-	45.363.362,22	-	-	-	45.363.362,22	-
		Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Balangan Lanjutan	-	-	305.892.829,00	-	-	-	305.892.829,00	-
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembuatan Drainase Desa Sungsum Rt.01 Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	99.700.000,00		99.700.000,00	-
		Pembangunan Drainase Desa Murung Ilung Rt.01	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Tangalin Rt.0001	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Riwa Rt.08	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gunung Batu Rt.03	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan/ Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Awayan Pasar	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lajar Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pekerjaan Pembangunan Drainase Rt 4 Desa Dahai Kecamatan Paringin	-	-	-	-	99.915.000,00		99.915.000,00	-
		Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Tembus Gang Baru Kel. Paringin Kota	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Drainase Bidang Perkim Paket 002	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Drainase Bidang Perkim Paket 031	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Drainase Bidang Perkim Paket 046	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 054	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 078	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 115	-	-	-	-	31.563.950,00		31.563.950,00	-
		(Konsolidasi) Pengawasan Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 136	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Perencanaa Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 115	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Perencanaan Jalan Lingkungan Bidang Perkim Paket 153	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Perencanaan Drainase Bidang Perkim Paket 155	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Perencanaan Drainase Bidang Perkim Paket 164	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Balai Pangeran	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembuatan/Peningkatan Drainase Desa Baruh Bahinu Luar Kec.Parsel Kab. Balangan	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembuatan/ Peningkatan Drainase Desa Ambuyang	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Normalisasi Dan Rehabilitasi Drainase Desa Halong Rt. 01	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase Desa Hauwai Rt.03	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Trans Desa Batu Mandi	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Uren Rt.01 Kec. Halong Kab. Balangan	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karuh Rt. 5 Kec. Batu Mandi	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Margo Rt.06 Parsel	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.7 Tungkap Kelurahan Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembuatan Jalan Rt. 01 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Guha Rt.01	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Hauwai Kecamatan Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase Gang Ulin. Rt. 012	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Halong Rt.05 Kec.Halong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Normalisasi Dan Rehabilitasi Drainase Desa Halong Rt. 01	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase Desa Hauwai Rt.03	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sirap Rt.01 Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Desa Mamigang Rt.04	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 9 Gunung Pandau	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bihara Hilir Rt.02 Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karuh Rt. 5 Kec. Batu Mandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Margo Rt.06 Parsel	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.7 Tungkap Kelurahan Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.02 Desa Kapul Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Trans Desa Batu Mandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Uren Rt.01 Kec. Halong Kab. Balangan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lamida Bawah	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembuatan Jalan Rt. 01 Desa Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Hauwai Kecamatan Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Hauwai Kecamatan Halong	-	-	-	-	-		-	-
		(Konsolidasi) Perencanaan Drainase Bidang Perkim Paket 90	-	-	-	-	-		-	-
		PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH DESA TARANGAN KEC. PARINGIN SELATAN	-	-	-	-	-		-	-
		PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH DESA BUNGUR KEC. BATUMANDI	-	-	-	-	-		-	-
		PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH DESA MATANG LURUS KEC. LAMPIHONG	-	-	-	-	-		-	-
		PENGADAAN AIR BERSIH /SUMUR BOR DESA KEDONDONG KEC. AWAYAN	-	-	-	-	99.712.000,00		99.712.000,00	-
		REVITALISASI TOKO PASAR TABUAN HALONG	-	-	-	-	461.436.941,00		461.436.941,00	-
		Pembuatan Site Development Pasar Mungkur Uyam Kec. Juai	-	-	-	-	956.009.222,00		956.009.222,00	-
		Rehabilitasi Total Pasar Galumbang Kec. Juai	-	-	-	-	2.832.064.000,00		2.832.064.000,00	-
		Pembangunan Taman Edukasi	-	-	-	-	784.520.626,00		784.520.626,00	-
		Pembangunan TPS3R Desa Murung Ilung	-	-	-	-	696.354.643,00		696.354.643,00	-
		Pembuatan Kantor BPD Desa Kalahiang	-	-	-	-	164.790.049,00		164.790.049,00	-
		PEMBANGUNAN GEDUNG PKK DESA MANGKAYAHU	-	-	-	-	132.634.915,00		132.634.915,00	-
		PEMBANGUNAN PINTU GERBANG MAJILIS SALAWAT IBNU SALAM RT.03 DESA SUNGAI BATUNG	-	-	-	-	170.799.075,00		170.799.075,00	-
		Pembangunan Jalan Tugu Maritam - Muara Pitap	-	-	-	-	5.927.699.438,00		5.927.699.438,00	-
		Peningkatan Jalan Muara Pitap - Lingsir	-	-	-	-	1.469.730.299,00		1.469.730.299,00	-
		Peningkatan Jalan Layap - Paringin	-	-	-	-	1.497.862.590,00		1.497.862.590,00	-
		Peningkatan Jalan Lajar - Transmigrasi (DBH Sawit 2024)	-	-	-	-	2.134.245.348,00		2.134.245.348,00	-
		Peningkatan Jalan Lajar - Transmigrasi (DBH Sawit 2023)	-	-	-	-	3.255.662.686,00		3.255.662.686,00	-
		Peningkatan Jalan Buntut Pilanduk - Mamantang	-	-	-	-	2.547.516.836,00		2.547.516.836,00	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang	-	-	-	-	2.001.136.822,00		2.001.136.822,00	-
		Pembangunan Jembatan Karya	-	-	-	-	1.369.492.678,00		1.369.492.678,00	-
		Pembangunan Jembatan Desa Aniungan	-	-	-	-	849.950.853,00		849.950.853,00	-
		Normalisasi/Restorasi Sungai Desa Baruh Bahinu Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Jembatan Kapul	-	-	-	-	-	966.582.423,27	966.582.423,27	966.582.423,27
		Rekonstruksi Longsor Desa Maradap	-	-	-	-	-	169.752.907,66	169.752.907,66	169.752.907,66
		Rekonstruksi Longsor Desa Marajai	-	-	-	-	-	1.394.158.979,33	1.394.158.979,33	1.394.158.979,33
		Peningkatan Jalan Piyait-Ambakiang	-	-	-	-	-	969.247.360,00	969.247.360,00	969.247.360,00
		Peningkatan Jalan Kalahiang-Haur Batu	-	-	-	-	-	994.155.150,20	994.155.150,20	994.155.150,20
		Peningkatan Jalan Galumbang-Muara Kuwau	-	-	-	-	-	2.666.510.186,50	2.666.510.186,50	2.666.510.186,50
2.	1.03.1.04.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	-	113.240.000,00	5.960.000,00	-	-	-	119.200.000,00	-
		Pembuatan Dam Parit Kel Pok Tan Maju Bersama Desa Panggung Kec. Parsel	-	113.240.000,00	5.960.000,00	-	-	-	119.200.000,00	-
3.	1.01.2.22.0.00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	5.098.377.655,00		5.098.377.655,00	-
		Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Batumandi	-	-	-	-	59.754.189,00		59.754.189,00	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru MIS Darussalam	-	-	-	-	59.843.100,00		59.843.100,00	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru MIS Darussalam	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kantor SMPN 6 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Teluk Bayur 2 (bertingkat)	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang UKS SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	59.770.834,00		59.770.834,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang UKS SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Gerbang dan Pagar SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gerbang dan Pagar SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN 2 Batumandi	-	-	-	-	59.659.421,00		59.659.421,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN 2 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas (Lanjutan) SDN Teluk Mesjid 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Batu Merah 3 Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.701.564,00		59.701.564,00	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Batu Merah 3 Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Hilir Pasar Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.739.171,00		59.739.171,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Hilir Pasar Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karuh Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	59.812.017,00		59.812.017,00	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan lapangan sepak bola SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pembangunan lapangan sepak bola SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		PengawasanRehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 2 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Selasar SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Halubau Kec. Par Sel	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kusambi Hulu 1 Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tanah Habang Kanan Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Lampihong Kiri Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bayur Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Lok Panginangan Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kusambi Hilir Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Lajar Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet SMPN 4 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kusambi Hulu 1 Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.820.150,00		59.820.150,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Lampihong Kiri Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.775.600,00		59.775.600,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kusambi Hilir Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.793.210,00		59.793.210,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Lok Panginangan Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.756.880,00		59.756.880,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tanah Habang Kanan Kec. Lampihong	-	-	-	-	59.645.940,00		59.645.940,00	-
		Rehabilitasi Pagar SDN Badalungga Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Halubau Kec. Par Sel	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Selasar SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Lajar Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang UKS SDN Kambiyain Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Ju'uh Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SMP Negeri 4 Halong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Halong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pagar SDN Badalungga Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Libaru Sungkai Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Uungan Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mamantang	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving SDN Lampihong Kanan Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemasangan Paving SDN Teluk Mesjid 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kecil Sisirin Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap Libaru Sungkai	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SMP Negeri 6 Halong Satu Atap	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang kelas 5 dan kelas 6 SDIT Istiqamah	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan rehabilitasi pagar SDN Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang kelas 5 dan kelas 6 SDIT Istiqamah	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mamantang	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar SDN Ju'uh Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Halong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Toilet SDN Gunung Pandau Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pengecatan Ruangan SD Binjai Punggal 2	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pengecatan RuanganSD Binjai Punggal 1	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving halaman SDN Piyait Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving halaman SDN Sumpung Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving/Pengecoran halaman SDN Putat Basiun Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving SDN Kaladan Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pemasangan paving halaman SDN Piyait Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pemasangan paving/Pengecoran halaman SDN Putat Basiun Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gulinggang Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar SDN Hamarung 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Guru SDN Kalahiang Kec. Paringin	-	-	-	-	59.911.800,00		59.911.800,00	-
		Pemasangan Paving SDN Hamarung 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Staff Tata Usaha (TU) SMPN 5 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan UKS SMPN 4 Paringin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemasangan Paving Blok Halaman SDN Desa Sirap 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemasangan Paving SDN Hamarung 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Guru SDN Kalahiang Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pagar SDN Hamarung 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Langkap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gulinggang Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mihu 1 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sungsum Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Ajung Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kantor SMP Negeri 1 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan/Rehabilitasi Paving SMPN 1 Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Puyun Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pematang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan pengecoran halaman SD Kecil Tampaan Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Murung Abuin Kec. Par Sel	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Gudang SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Mushola SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Mangkayahu Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Renovasi Plafon Ruang Kelas Belajar (RKB) SDN 2 Desa Binjai Punggal Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Laboraturiom Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Halong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Halong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pengecatan Ruangan SMPN 2 Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mantimin 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemasangan Paving SMPN 4 Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Perencanaan Pemasangan Paving SD Kecil Simpang Bumbuan Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	12.293.200,00		12.293.200,00	-
		Rehabilitasi Mushola SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	59.718.000,00		59.718.000,00	-
		Pembangunan Pagar SMPN 1 Lampihong	-	-	-	-	59.754.300,00		59.754.300,00	-
		Rehabilitasi Plafon Ruang Kelas (RKB) SDN 2 Desa Binjai Punggal Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Gudang SMPN 3 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar SDN Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mantimin 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		pengawasan pembangunan pagar SDN Karuh Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pemasangan Paving Halaman SMPN 4 Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Teluk Bayur 2 (bertingkat) Kec. Juai	-	-	-	-	600.000.000,00		600.000.000,00	-
		Pembangunan Aula SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	846.082.782,00		846.082.782,00	-
		Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SDN Teluk Mesjid 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	201.888.718,00		201.888.718,00	-
		Pembangunan Mushalla SMPN 4 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengecatan Ruangan SD Baruh Penyambaran 2 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Toilet SMPN 4 Halong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengecatan Ruangan SD Binjai Punggal 1 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengecatan Ruangan SD Binjai Punggal 2 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengecatan Ruangan SMPN 2 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengecatan Ruangan SMPN 2 Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pemasangan /Rehabilitasi Paving SMPN 1 Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 2 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pengecatan Ruangan SMPN 2 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Paving Halaman Sekolah SMPN 3 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pengecatan ruangan SD Baruh Penyambaran 2 kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah SDN Teluk Mesjid 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang UKS SDN Kambiyain Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tinggar di Rarapit (Filial)	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Badalungga Kec. Awayan	-	-	-	-	9.768.000,00		9.768.000,00	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gunung Riut 2 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kambiyain Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Murung Ilung Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mangkayahu Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Nungka Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Guha 1 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Pagar SDN Ju'uh Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar SD Kecil Simpang Bumbuan Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mushalla SMPN 4 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pemeliharaan Korwil Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pemeliharaan Korwil Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pemeliharaan Korwil Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pemeliharaan Korwil Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Belanja Pemeliharaan Plafon Gedung Kantor Disdikbud	-	-	-	-	-		-	-
		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Plafon Gedung Kantor	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemeliharaan Korwil Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemeliharaan Korwil Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemeliharaan Korwil Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pemeliharaan Korwil Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Toilet SMPN 4 Paringin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	59.483.400,00		59.483.400,00	-
		Rehabilitasi Ruang UKS SMP Negeri 3 Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 3 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Batumandi	-	-	-	-	59.800.500,00		59.800.500,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tarangan Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	59.774.500,00		59.774.500,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kambiyain Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Galumbang Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	59.769.300,00		59.769.300,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kantor (Guru) SDN Sungsum	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kantor (Guru) SDN Balida Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang UKS SMPN 1 Paringin	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Pagar SMPN 3 Batumandi	-	-	-	-	59.847.000,00		59.847.000,00	-
		Pembangunan Pagar Pembatas Sekolah SMPN 2 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Ajung Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	59.880.900,00		59.880.900,00	-
		pembangunan pagar SDN Teluk Bayur 3 Kec. Juai	-	-	-	-	125.575.800,00		125.575.800,00	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMPN 2 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang UKS SMP Negeri 3 Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Toilet SDN Halong 3 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Balanti Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 3 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Batumandi Satu Atap	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tarangan Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Pengawasan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Halubau Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Galumbang Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kantor (Guru) SDN Sungsum Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kantor (Guru) SDN Balida Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang UKS SMPN 1 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 3 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Pembatas Sekolah SMPN 2 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pemasangan Paving Blok Halaman SDN Desa Tigarun Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan pemasangan paving MIS Darussalam Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan rehabilitasi/pemasangan paving SDN Galumbang Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa konsultan pengawasan rehabilitasi ruang kelas SDN Simpang Tiga kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Halubau Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Halong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Satu Atap Libaru Sungkai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gunung Riut 2 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Libaru Sungkai Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pematang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 3 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Baru Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Guha I Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Toilet SDN Halong 3 Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Langkap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Toilet SDN Gunung PandauKec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mihu 1 Kec. Juai	-	-	-	-	59.827.500,00		59.827.500,00	-
		Pembangunan Ruang Kantor SMPN 6 Halong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Aula SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan UKS SMPN 4 Paringin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 3 Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Staff Tata Usaha (TU)SMPN 5 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 1 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Toilet SMPN 4 Paringin Kecamatan Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Batumandi Satu Atap	-	-	-	-	59.770.500,00		59.770.500,00	-
		Rehabilitasi Ruang Toilet SDN Murung Abuin Kec. Par Sel	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengecatan Ruangan TK. Negeri Pembina Juai Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar RA Darul Hayat Ds. Riwa Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK Nusa Indah Ds. Timbun Tulang Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD/TK Merah Delima Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pengecatan Ruangan TK. Negeri Pembina Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan (Penyelesaian) Ruang Kelas KB. Mekar 2 Ds. Bungin Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang KB Kenari Ds. Tanah Habang Kiri Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Fatimah Az- Zahra Ds. Pimping Kec. Lampihong	-	-	-	-	44.832.600,00		44.832.600,00	-
		Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK Maritam Ds. Uren Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Area Bermain dan APE Luar Ruang TK Al Muawwanah Ds. Baruh Bahinu Dalam	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pagar TK. Kemboja Ds. Tundakan Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pagar TK Pelangi Ds. Awayan Kec. Awayan	-	-	-	-	59.823.900,00		59.823.900,00	-
		Pembangunan Pagar TK. Temanggung Jalil Ds. Ambakiang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pavingblok dan Kanopi TK. Mitahurrahmah Ds. Tangalin Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pavingblok dan Kanopi TK. Qurrata Ayun Ds. Tariwin Kec. Batumandi	-	-	-	-	50.730.000,00		50.730.000,00	-
		Pembangunan WC (Toilet) KB PAUD Berkarya Ds. Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Karantika Bersinar Ds. Langkap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Mayang Marias Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Permata Ds. Bata Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Area Bermain dan APE Luar Ruangan TK Negeri Merpati Ds. Lokhamawang	-	-	-	-	44.803.800,00		44.803.800,00	-
		Pembangunan Mushalla PAUD Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan (Penyelesaian) Ruang UKS TK Negeri Dahlia Ds. Tampang Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan (Penyelesaian) Ruang UKS TK Negeri Pembina Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang (Penyelesaian) UKS TK Negeri Kamboja Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Ruang UKS TK Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Asy Syifa Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Kamboja - Muara Pitap Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Pelita Ds. Jimamun Kec.Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pagar PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	88.140.600,00		88.140.600,00	-
		Pembangunan Pagar TK Negeri Ar-Rahman Ds. Sungsum Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pagar TK. Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	79.044.030,00		79.044.030,00	-
		Pembangunan Pagar TK Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pagar TK. Negeri Kamboja-Muara Pitap Kel. Paringin Selatan	-	-	-	-	79.099.398,00		79.099.398,00	-
		Pembangunan Pagar TK. Negeri Mawar Ds. Banua Hanyar Kec. Batumandi	-	-	-	-	69.424.234,00		69.424.234,00	-
		Pembangunan (Penyelesaian) Pagar PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	85.156.629,00		85.156.629,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Al Ihsan Ds. Maradap Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	59.853.000,00		59.853.000,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Batu Raya Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Reflesia Ds.Pematang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Terpadu Pelangi Ds. Halubau Utara Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Cempaka Pematang Ds. Pematang kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Dewi Sri Ds. Matang Hanau Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Mawar Ds. Halubau Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Mutiara Ds. Puyun Kec. Halong	-	-	-	-	59.775.000,00		59.775.000,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Rahayu Ds. Tundi Kec. Awayan	-	-	-	-	59.796.300,00		59.796.300,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Temanggung Jalil Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec.Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kartini Ds. Tabuan Kec. Halong	-	-	-	-	59.702.100,00		59.702.100,00	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Negeri Mawar Ds.Galumbang Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Nusa Indah Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pertiwi Ds. Ju'uh Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pertiwi Kel. Paringin Timur	-	-	-	-	393.088.429,00		393.088.429,00	-
		Rehabilitasi Pagar TK. Nurul Mukhsinin Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi WC (Toilet) PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Peringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Gedung/Ruang Utilitas TK. Negeri Pembina Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar TK Negeri Pembina Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar TK Negeri Teratai Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Pagar TK Negeri Kartini Ds. Muara Ninian Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK.Anggrek Ds. Auh Kec.Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK. Fajar Harapan Ds. Murung Ilung Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan (Penyelesaian) Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK N Kamboja - Muara Pitap Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Merpati Ds. Lok Hamawang	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan (Penyelesaian) Ruang Kelas TK. Dharma Bakti Ds. Binjai Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Melati Ds. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Mutiara Hati Ds. Muara Jaya Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Noor Agape Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru KB PAUD Berkarya Ds. Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Terpadu Pelita Sanggam Ds. Baruh Bahinu Luar Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Al Muhajirin Ds. Padang Raya Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Fatimah Az - Zahra	-	-	-	-	59.853.300,00		59.853.300,00	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Mekar Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Pelangi Ds. Kasai Kec. Batumandi	-	-	-	-	59.804.400,00		59.804.400,00	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Permata Ds. Bata Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Pertiwi Ranting Ds. Hukai Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Puncak Seratus Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Awayan	-	-	-	-	355.636.376,00		355.636.376,00	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Negeri Harapan Bangsa SKB	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Pelita Ds. Jimamun Kec. Lampihong	-	-	-	-	114.941.783,00		114.941.783,00	-
		Pembangunan Gedung PKBM Karang Bintang Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	52.364.400,00		52.364.400,00	-
		Pembangunan Gedung PKBM Sumber Ilmu Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Gedung PKBM Murai Kec. Awayan	-	-	-	-	52.289.100,00		52.289.100,00	-
		Pembangunan Gedung PKBM Bina Remaja Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang KB. Ibunda Ds. Matang Lurus Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang KB Kenari Ds. Tanah Habang Kiri Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK. Fatimah Az Zahra Ds. Pimping Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang TK Maritam Ds. Uren Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar Ruang TK Al Muawwanah Ds. Baruh Bahinu Dalan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar dan Pavingblok TK Cempaka Ds. Hamparaya Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK Pelangi Ds. Awayan Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK Pertiwi Ranting Ds. Hukai Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pavingblok dan Kanopi TK. Mitahurrahmah Ds. Tangalin Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Pavingblok dan Kanopi TK. Qurrata Ayun Ds. Tariwin Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan toilet (Jamban) TK. Kenanga Ds. Jungkal Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) TK Puncak Seratus Ds. Mamigang Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) KB Paud Berkarya Ds. Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) PAUD Terpadu Pelita Sanggam Ds. Baruh Bahinu Luar Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Mayang Marias Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Permata Ds. Bata Kec. Jua	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK. Negeri Al Hidayah Ds. Bihara Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar ruangan TK Negeri Merpati Ds. Lokhamawang	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Mushalla PAUD Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan (Penyelesaian) Ruang UKS TK Negeri Dahlia Ds. Tampang Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan (Penyelesaian) Ruang UKS TK Negeri Pembina Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang (Penyelesaian) UKS TK Negeri Kamboja Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang UKS TK Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Asy Syifa Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Bina Bersama Ds. Baru Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Kamboja - Muara Pitap Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan WC (Toilet) TK Negeri Pelita Ds. Jimamun Kec.Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK Negeri Ar-Rahman Ds. Sungsum Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK. Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK. Negeri kamboja-Muara Pitap Kel. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Pagar TK. Negeri Mawar Ds. Banua Hanyar Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan (Penyelesaian) Pagar PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru TK.Annur Ds. Karuh Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Al Ihsan Ds. Maradap Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Batu Raya Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas KB. Reflesia Ds.Pematang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Terpadu Pelangi Ds. Halubau Utara Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Bintang Ds. Munjung Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Cempaka Pematang Ds. Pematang Kec.Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Dewi Sri Ds. Matang Hanau Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Mawar Ds. Halubau Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Mutiara Ds. Puyun Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Rahayu Ds. Tundi Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Temanggung Jalil Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah PAUD Terpadu Negeri Pembina Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Anggrek Ds. Sumpung Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec.Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kamboja Ds. Binjai Punggal Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kartini Ds. Tabuan Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK. Negeri Mawar Ds.Galumbang Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Nusa Indah Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Pertiwi Ds. Ju'uh Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) TK. Darussalam Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar TK Nurul Mukhsinin Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar,Kanopi dan Halaman TK. Cempaka Pematang Ds. Pematang Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Rehabilitasi WC (Toilet) PAUD Terpadu Negeri Pembina Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Gedung/Ruang Utilitas TK. Negeri Pembina Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan WC (Toilet) PAUD Terpadu Negeri Pembina Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar TK Negeri Pembina Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar TK Negeri teratai Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Rehabilitasi Pagar TK Negeri Kartini Ds. Muara Ninian Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah PAUD Terpadu Amanah Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK.Anggrek Ds. Auh Kec.Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK. Fajar Harapan Ds. Murung Ilung Kec. Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan (Penyelesaian) Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Kamboja - Muara Pitap Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Kamboja Ds. Binjai Pungal Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Merpati Ds. Lok Hamawang	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan (Penyelesaian) Ruang Kelas TK. Dharma Bakti Ds. Binjai Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Melati Ds. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Mutiara Hati Ds. Muara Jaya Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru KB. Noor Agape Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru KB PAUD Berkarya Ds. Dayak Pitap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Cinta Ilmu Ds. Badalungga Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Terpadu Pelita Sanggam Ds. Baruh Bahinu Luar Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Al Muhajirin Ds. Padang Raya Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Fatimah Az - Zahra	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Karantika Bersinar Ds. Langkap Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Mekar Sari Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Nusa Indah Ds. Timbun Tulang Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Pelangi Ds. Kasai Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Permata Ds. Bata Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Pertiwi Ranting Ds. Hukai Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Puncak Seratus Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Ar-Rahman Ds. Sungsum Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Negeri Bina Bersama Ds. Baru Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Cempaka Kel. Batu Piring	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Negeri Harapan Bangsa Ds. Hamarung Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Harapan Bangsa SKB	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Mawar Ds. Banua Hanyar Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Pelita Ds. Jimamun Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK. Negeri Mundar Kec. Lampihong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Honorarium Fasilitator Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah Beserta Perabotnya TK. Negeri Mundar Kec. Lampihong (DAK)	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Karang Bintang Kec. Tebing Tinggi	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Sumber Ilmu Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Murai Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Pengawasan Pembangunan Gedung PKBM Bina Remaja Paringin	-	-	-	-	-		-	-
4.	**2.19.3.26.0.00.01**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
		Belanja Modal Fasilitas Umum. Pembuatan Spot Foto Goa Gunung Batu	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
5.	**2.12.0.00.0.00.01**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
		Rehabilitasi Gedung Kantor Disdukcapil Atap dan Plafon	-	-	-	-	-		-	-
6.	**1.02.0.00.0.00.01**	**Dinas Kesehatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**355.754.945,00**	**1.405.998.120,00**	**1.761.753.065,00**	**1.405.998.120,00**
		Rehab Poskesdes Mantuyan	-	-	-	-	-		-	-
		Rehab Poskesdes Mamantang	-	-	-	-	-		-	-
		Penyelesaian Puskesmas Batumandi	-	-	-	-	355.754.945,00		355.754.945,00	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Poskesdes Puyun	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Poskesdes Mantuyan	-	-	-	-	-		-	-
		Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Poskesdes Mamantang	-	-	-	-	-	1.405.998.120,00	1.405.998.120,00	1.405.998.120,00
		Renovasi Puskesmas Halong	-	-	-	-	-		-	-
7.	**1.03.1.04.0.00.01**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
		Pembuatan JUT Mungkur Desa Inan Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
		Pembuatan Cor Jalan Produksi/JUT Desa Riwa Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembuatan Jalan Produksi Desa Muara Ninian RT. 02 Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		JUT Kelompok tani Karya Bersama II Desa Teluk Mesjid Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Tani Tunas Jaya Desa Putat Basiun Kec. Awayan	-	-	-	-	-		-	-
		Jalan Produksi Desa Timbun Tulang Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Jalan Produksi Desa Timbun Tulang Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Galumbang Kec. Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Jalan Produksi RT. 03 Desa Matang Hanau Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
		JUT Desa Batumandi RT. 03 Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Munjung	-	-	-	-	-		-	-
		Pembangunan Pondok Pertemuan Kelompok Tani Makmur Jaya II Desa Timbun Tulang Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelompok tani Suka Maju II Desa Banua Hanyar Kec. Batumandi	-	-	-	-	-		-	-
		Pembuatan Kandang Kambing Kelompok Binjai Punggal Kec. Halong	-	-	-	-	-		-	-
		Pengadaan Kolam Ikan Desa Batu Merah Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Papan Nama Kelompok	-	-	-	-	-		-	-
		Konsultansi Pengawasan Pengadaan Kolam Ikan Desa Sungsum Rt. 02 Kec. Tebing Tinggi (Pengawasan)	-	-	-	-	-		-	-
		Pengadaan Sarana Budidaya Karamba (Jaring Apung) Desa Ju'uh Rt.04 Kec. Tebing Tinggi - Jala Apung	-	-	-	-	-		-	-
		Pengadaan Sarana Budidaya Kolam Ikan Pokdakan Berkat Setia Desa Matang Hanau Kec. Lampihong	-	-	-	-	-		-	-
		Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Maradap Kec. Paringin Selatan	-	-	-	-	-		-	-
8.	**2.23.2.24.0.00.01**	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
		Belanja Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Perpustakaan Kecamatan Juai	-	-	-	-	-		-	-
		Belanja Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Perpustakaan Kecamatan Paringin	-	-	-	-	-		-	-
		Belanja Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Perpustakaan Kecamatan Batumandi	-	-	-	-	-		-	-

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	REALISASI TAHUN						JUMLAH AKUMULASI REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2025	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA (TA. 2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 4+5+6+7+8+9	11
9.		**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193.335.999,00**	**193.335.999,00**	**193.335.999,00**
		Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-	-	193.335.999,00	193.335.999,00	193.335.999,00
JUMLAH			**4.672.917.000,00**	**19.987.963.873,18**	**19.708.061.167,07**	**-**	**33.036.930.571,00**	**8.759.741.125,96**	**86.165.613.737,21**	**8.810.626.416,46**

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XX.1 : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

KABUPATEN BALANGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	STATUS b)	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	KEWAJIBAN LAINNYA	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS c)	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+1-+11	13	14	15	16	17	18	19	20=18x19
1	PDAM	Audited		59.020.556.687	136.225.480.310	-	195.246.036.997	1.855.586.278	2.380.622.364	-	4.236.208.642	174.613.513.117	102.442.009.660	10.879.933.000	(96.925.627.422)	-	191.009.828.355	87,84%	167.780.070.824
2	PD. BPR PARINGIN	Audited		38.248.434.146	350.866.083	8.180.000	38.607.480.229	14.691.130.241	-	304.692.097	14.995.822.338	19.109.300.000	-	-	3.021.615.400	1.480.742.491	23.611.657.891	96,81%	22.858.446.005
3	PT. Asabaru Daya Cipta Lestasi			20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000	100,00%	20.000.000.000

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN XX.2 : Peraturan Daerah TA 2025
NOMOR : 4 Tahun 2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

KABUPATEN BALANGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	STATUS b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM	LK Audited		36.458.000.600	36.337.345.934	120.654.666	1.248.851.919	75.825.553	1.293.681.032
2	PD. BPR PARINGIN	LK Audited		4.948.052.778	3.159.090.514	1.788.962.264	1.125.000	142.144.500	1.647.942.764
3	PT. Asabaru Daya Cipta Lestasi			-	-	-	-	-	-

Paringin, 07 Agustus 2026
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI